KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia yang dilakukan oleh badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan;

b. bahwa perkembangan ketatanegaraan, hukum materiil, hukum acara, dan kemajuan teknologi informasi menuntut pembaruan pedoman pelaksanaan teknis administrasi dan teknis peradilan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya demi mewujudkan akses pelayanan peradilan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan teknis administrasi perkara dan teknis peradilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi Perkara dan Teknis Peradilan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN.

KESATU : Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis atas pelaksanaan keputusan ini diatur oleh masing-masing direktur jenderal badan peradilan setelah berkoordinasi dengan masing-masing ketua kamar.

KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh aparatur peradilan untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2026

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERADILAN UMUM

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEKNIS ADMINISTRASI PERADILAN PADA TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

I. PIDANA UMUM

Perkara pidana yang termasuk dalam pendaftaran perkara pidana umum:

1. Perkara Pidana Acara Biasa
2. Perkara Pidana Acara Singkat
3. Perkara Pidana Acara Cepat:
   a. Perkara Pidana Ringan
   b. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
4. Perkara Praperadilan

A. ADMINISTRASI PERKARA

1. Administrasi Pendaftaran
   a. Dokumen Pendaftaran
      1) Perkara Pidana Acara Biasa:
         (1) Surat pengantar dari kejaksaan.
         (2) Surat pelimpahan perkara dari kejaksaan.
         (3) Tanda terima surat pelimpahan perkara.
         (4) Dakwaan penuntut umum.
         (5) Dakwaan penuntut umum (untuk perkara koneksitas dakwaan tim penuntut umum koneksitas yang ditandatangani oleh jaksa dan/atau oditur).
         (6) Surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan oleh penyidik (jika ada).
         (7) Surat perintah penahanan dan berita acara penahanan oleh penyidik (jika ada).
         (8) Surat perintah penunjukan penuntut umum (untuk perkara koneksitas surat perintah penunjukan penuntut umum dan/atau oditur

militer).

(9) Berkas perkara penyidik (untuk perkara koneksitas berkas perkara penyidikan tim penyidik koneksitas terdiri dari unsur jaksa, polisi, dan penyidik militer/polisi militer (POM)).

(10) Daftar saksi (jika ada saksi mahkota maka wajib dilengkapi dengan kesepakatan perjanjian saksi mahkota dan penetapan ketua pengadilan negeri[1]) dan ahli.

(11) Daftar terdakwa.

(12) Berita acara penolakan untuk didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum (jika ada),[2] bagi terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, majelis hakim wajib menunjuk advokat untuk mendampingi dengan cuma-cuma.[3]

(13) Daftar barang bukti.

(14) Surat izin/persetujuan/penolakan penyitaan dan berita acara penyitaan.

(15) Surat izin/persetujuan/penolakan penggeledahan dan berita acara penggeledahan.

(16) Surat izin/persetujuan/penolakan pemblokiran dan berita acara pemblokiran (jika ada).

(17) Perpanjangan penahanan penuntut umum dan berita acara penahanan.

(18) Perpanjangan penahanan ketua pengadilan negeri ke I dan berita acara penahanan (jika ada).

(19) Perpanjangan penahanan ketua pengadilan negeri ke II dan berita acara penahanan (jika ada).

(20) Soft copy dakwaan.

(21) Surat perintah penahanan dan berita acara penahanan oleh penuntut umum.

(22) Penetapan permohonan pengakuan bersalah yang

---

[1] Pasal 74 ayat (2), (3) dan (4) KUHAP
[2] Pasal 154 ayat (4) dan (5) KUHAP
[3] Pasal 155 KUHAP

ditolak (jika ada).

(23) Surat keterangan dari penuntut umum bahwa perkara yang diajukan tidak ada perkara praperadilan yang sedang berjalan.

(24) dalam pendaftaran perkara tindak pidana pers ditambahkan dengan dokumen hasil musyawarah Dewan Pers (jika ada).

2) Perkara Pidana Acara Singkat:

(1) Surat pengantar dari kejaksaan.

(2) Surat pelimpahan perkara dari kejaksaan.

(3) Tanda terima surat pelimpahan perkara.

(4) Catatan penuntut umum.

(5) Surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan oleh penyidik (jika ada).

(6) Surat perintah penahanan dan berita acara penahanan oleh penyidik (jika ada).

(7) Surat perintah penunjukan penuntut umum.

(8) Berkas perkara penyidik.

(9) Daftar saksi dan ahli.

(10) Daftar terdakwa.

(11) Berita acara penolakan untuk didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum (jika ada).

(12) Daftar barang bukti.

(13) Surat izin/persetujuan/penolakan penyitaan dan berita acara penyitaan.

(14) Surat izin/persetujuan/penolakan penggeledahan dan berita acara penggeledahan.

(15) Surat izin/persetujuan/penolakan pemblokiran dan berita acara pemblokiran (jika ada).

(16) Perpanjangan penahanan penuntut umum dan berita acara penahanan.

(17) Perpanjangan penahanan ketua pengadilan negeri ke I dan berita acara penahanan (jika ada).

(18) Perpanjangan penahanan ketua pengadilan negeri ke II dan berita acara penahanan (jika ada).

(19) *Soft copy* catatan penuntut umum.

(20) Surat perintah penahanan dan berita acara penahanan oleh penuntut umum.

(21) Penetapan permohonan pengakuan bersalah yang diterima (jika ada).

3) Perkara Pidana Acara Cepat:

a. Tindak Pidana Ringan:

(1) Surat pengantar dari penyidik.

(2) Surat pelimpahan perkara dari penyidik.

(3) Tanda terima surat pelimpahan perkara.

(4) Berkas perkara penyidik.

(5) Daftar saksi dan ahli.

(6) Daftar terdakwa.

(7) Daftar barang bukti.

(8) Surat izin/persetujuan/penolakan penyitaan dan berita acara penyitaan.

(9) Surat izin/persetujuan/penolakan penggeledahan dan berita acara penggeledahan.

(10) Surat izin/persetujuan/penolakan pemblokiran dan berita acara pemblokiran (jika ada).

b. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas:[4]

(1) Surat pengantar pelimpahan.

(2) Daftar perkara pelanggaran lalu lintas.

(3) Bukti pelanggaran.

(4) Daftar barang bukti.

4) Perkara Praperadilan:

(1) Surat permohonan praperadilan dan *softcopy*-nya.

(2) Surat kuasa didampingi advokat (jika ada).

(3) Permohonan ganti rugi[5] (jika ada).

(4) Permohonan rehabilitasi[6] (jika ada).

5) Penahanan

Penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah

---

[4] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan PKS Nomor 03/KMA/IX/2021

[5] Pasal 173 ayat (3) KUHAP

[6] Pasal 176 ayat (4) KUHAP

penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih[7]

Surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim dikirimkan melalui e-Berpadu dengan mencantumkan:

(1) identitas tersangka atau terdakwa;
(2) alasan penahanan;[8]
(3) uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
(4) tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

6) Perpanjangan Penahanan

a. Dokumen permohonan perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 103 KUHAP diajukan melalui e-Berpadu:
   (1) Surat permohonan perpanjangan penahanan.
   (2) Laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).
   (3) Surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum.
   (4) Surat perintah perpanjangan penahanan sebelumnya (jika ada).
   (5) Berita acara penahanan.
   (6) Uraian singkat perkara/hasil pemeriksaan yang disusun oleh pihak penyidik.

b. Dokumen perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 107 ayat (1) KUHAP
   (1) Surat permohonan perpanjangan penahanan.
   (2) Laporan polisi dan Sprindik.
   (3) Surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum.
   (4) Surat perintah perpanjangan penahanan sebelumnya (jika ada).
   (5) Berita acara penahanan.

---

[7] Pasal 100 ayat (1) KUHAP
[8] Anotasi KUHAP Halaman 92 (yang mengandung syarat formil, syarat materil, syarat objektif, syarat subjektif)

(6) uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan.

(7) surat keterangan dokter bagi tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat.

7) Izin Pemindahan Tempat Persidangan

Dokumen permohonan izin pemindahan tempat persidangan:

a. Usul ketua pengadilan negeri/kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

b. Surat keterangan tentang keadaan keamanan dari kepolisian yang bersangkutan.

8) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dikenal mekanisme pengakuan bersalah,[9] mekanisme perjanjian penundaan penuntutan, mekanisme restitusi, izin keluar dari tahanan dalam keadaan mendesak:

a. Permohonan pengakuan bersalah Pasal 78 KUHAP:

(1) Permohonan pengakuan bersalah (dilengkapi konsep perjanjian) oleh penuntut umum.

(2) Surat kuasa didampingi oleh advokat.

(3) Berita acara pengakuan bersalah.

(4) Surat pernyataan bersedia membayar ganti rugi atau restitusi.

(5) Berita acara pemeriksaan penyidik /resume penyidik.

(6) Daftar bukti yang mendukung pengakuan bersalah (jika ada)

b. Pengakuan bersalah Pasal 205 KUHAP:

(1) Berita acara persidangan MKR.

(2) Penetapan hari sidang oleh hakim tunggal.

(3) Surat perintah/perpanjangan penahanan (jika ada).

[9] Pasal 78, 205 dan 234 KUHAP

c. Pengakuan bersalah berdasar Pasal 234 KUHAP:
   (1) Permohonan pengakuan bersalah/*plea bargain*
   (2) BA pengakuan bersalah (PB 3).
   (3) Nota dinas usul persetujuan isi kesepakatan pengakuan bersalah (PB 5).
   (4) Perjanjian kesepakatan pengakuan bersalah (PB 6).
   (5) Tanda terima permohonan sidang tertentu.
   (6) Surat pernyataan bersama (antara korban dan pelaku).
   (7) Surat kuasa (disertai BA Sumpah dan KTA) apabila didampingi oleh advokat.

9) Permohonan Perjanjian Penundaan Penuntutan:[10]
   (1) Surat permohonan pengesahan perjanjian penundaan penuntutan oleh penuntut umum.
   (2) Surat perjanjian penundaan penuntutan.
   (3) Surat permohonan perjanjian penundaan penuntutan yang diajukan oleh tersangka, terdakwa atau advokat (korporasi) ke penuntut umum.
   (4) Surat kuasa didampingi oleh advokat (jika ada).
   (5) Surat pernyataan penuntut umum menerima permohonan perjanjian penundaan penuntutan.
   (6) Surat pemberitahuan dari penuntut umum ke pengadilan negeri terkait akan dilaksanakannya perjanjian penundaan penuntutan.
   (7) Berita acara penyusunan perjanjian penundaan penuntutan.[11]

10) Restitusi
   a. Surat permohonan restitusi;
   b. Dokumen yang menunjukan kedudukan hukum/*legal standing* antara lain*:*
      - Fotokopi identitas korban/para korban atau identitas keluarga korban.
      - Surat keterangan psikiater atau psikolog. (jika

[10] Pasal 328 KUHAP
[11] Pasal 156 KUHAP

diperlukan).

- Fotokopi penetapan penunjukan wali (dalam hal diwakili wali).
- Fotokopi penetapan pengampuan (dalam hal diwakili pengampu).
- Fotokopi profil konsorsium (apabila korban dalam jumlah banyak; misalnya sampai sepuluh orang dalam tindak pidana perdagangan orang).
- Fotokopi surat kuasa atau lembar persetujuan untuk memberikan kuasa kepada konsorsium bertindak untuk dan atas nama korban.
- Fotokopi surat kuasa khusus advokat, yang memuat kewenangan untuk memohon restitusi dan melakukan segala tindakan berkaitan dengan permohonan restitusi (jika ada).
- Fotokopi surat tugas dari instansi berwenang, sebagai pendamping korban atau pendamping pemohon restitusi (jika ada).
- Kartu Keluarga (KK) atau surat lain yang menjelaskan hubungan keluarga bagi keluarga korban (untuk mengetahui hubungan antara pemohon dengan korban).
- Surat keterangan kematian/akta kematian korban (dalam hal korban meninggal).

c. Bukti kerugian nyata (*actual loss*) yang diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang atau alat bukti lain yang sah;

d. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan/pengobatan atau bukti lain yang sah.

11) Izin keluar dari tahanan dalam keadaan mendesak

Dalam hal terdakwa/anak yang ditahan dalam perkara yang diperiksa di tingkat banding atau kasasi, terdakwa/anak mengajukan permohonan untuk

keperluan mendesak: berobat di luar Rutan, melayat kerabat dekat (istri/suami, anak, orang tua/mertua) yang meninggal dunia, ketua pengadilan negeri tempat perkara tersebut disidangkan, diberi wewenang mengeluarkan penetapan pemberian izin guna keperluan itu. Penetapan oleh ketua pengadilan negeri dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab, dengan menyebutkan secara jelas tentang keperluan, jangka waktu pemberian izin, dan pengamanannya. Penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung sesuai kewenangan yang melakukan penahanan.[12]

dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan izin tersebut yaitu:

1. Identitas terdakwa/anak yang mengajukan permohonan.
2. Dokumen Permohonan izin terdakwa/anak/ keluarga/kuasa.
3. Dokumen bukti hubungan keluarga.
4. - untuk izin berobat dilengkapi dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit/bukti tujuan berobat.
   - Untuk izin melayat dilengkapi dengan surat keterangan kematian.
   - Dokumen lainnya yang membuktikan keadaan mendesak.

b. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Pidana

b.1. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Pidana secara Elektronik

1) Panitera muda pidana menerima berkas perkara pidana secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
2) Panitera muda pidana melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas perkara elektronik sesuai dengan daftar periksa *(checklist)*.

---

[12] SEMA Nomor 1 Tahun 2025

3) Terhadap berkas perkara yang tidak lengkap, panitera muda pidana memberikan notifikasi berkas perkara yang tidak lengkap dengan menyebut jenis dokumen yang harus dilengkapi oleh penuntut umum.

4) Pendaftaran perkara secara elektronik agar mempedomani aturan tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.[13]

b.2. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Secara Manual

1) Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima berkas perkara pidana secara manual pada meja PTSP.

2) Petugas PTSP melakukan validasi terhadap kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar periksa (*checklist*).

3) Terhadap berkas perkara yang tidak lengkap, petugas PTSP melaporkan kepada panitera muda pidana untuk dilakukan pengembalian berkas perkara kepada penuntut umum.

4) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi daftar barang bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

5) Penerimaan perkara pidana biasa dicatatkan ke dalam register induk pada SIP dan kemudian data tersebut dicatat dalam register (untuk perkara yang belum terakomodir dalam SIP).

6) Perkara pidana singkat diregister setelah hakim melaksanakan sidang pertama.[14] Jika terdakwa tidak bisa dihadirkan pada sidang pertama, maka berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum.

---

[13] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

[14] Pasal 204 dan Pasal 257 KUHAP

7) Perkara tindak pidana ringan diregister setelah perkara diputus oleh pengadilan.
8) Perkara pelanggaran lalu lintas diregister setelah perkara diputus oleh pengadilan.
9) Pelimpahan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian kepada pengadilan negeri paling lambat 3 (hari) sebelum hari sidang.
10) Perkara permohonan pengakuan bersalah dicatatkan ke dalam SIP.
11) Perkara permohonan perjanjian penundaan penuntutan dicatatkan ke dalam register (jika sudah tersedia pada SIP maka hanya dicatatkan secara elektronik).
12) Perkara praperadilan dicatatkan ke dalam SIP.
13) Petugas melakukan pencatatan perkara banding pada setiap tahapan dan pelaksanaan putusan dalam SIP.
14) Pelaksanaan tugas pada PTSP, dilakukan oleh kepaniteraan muda pidana dan berada langsung dibawah koordinasi panitera.

c. Upaya Hukum
1) Banding
a) Permohonan banding diajukan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.[15]
b) Pendaftaran banding:
1. Pendaftaran banding secara elektronik:
- Pembanding mengajukan pernyataan Upaya Hukum secara Elektronik melalui SIP.
- Apabila diajukan oleh penasihat hukum, permohonan banding wajib disertai dengan surat kuasa.
- Pada hari Pengadilan menerima notifikasi

[15] Pasal 285 ayat 2 KUHAP

pernyataan banding, kepaniteraan Pengadilan tingkat pertama:[16]

(1) Surat keterangan permohonan banding; atau
(2) Surat keterangan terlambat mengajukan banding; atau
(3) Surat keterangan terlambat/tidak mengajukan memori banding penuntut umum (gugur).[17]
(4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan tentang permohonan banding tidak memenuhi syarat formil/permohonan banding gugur.
(5) menginput permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding pada SIP.
(6) melaporkan secara elektronik adanya permohonan banding ke Pengadilan tingkat banding pada hari yang sama, apabila terdakwa ditahan.
(7) Surat pengantar pemberitahuan perkara banding ke pengadilan tinggi; atau
(8) Surat keterangan pencabutan banding.

- Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui SIP Oleh Pengadilan tingkat pertama kepada Pengadilan tingkat banding paling lambat pada Hari ke- 30 (tiga puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pembanding.

---

[16] SK KMA No. 365 Tahun 2022 dan Pasal 285 KUHAP
[17] Pasal 289 ayat 4 KUHAP

- Pemberitahuan permohonan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas perkara bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum dan bukan sebagai pengguna lain, baik yang beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan yang memutus perkaranya maupun yang berada di luar wilayah hukum disampaikan melalui Surat Tercatat.
- Pemberitahuan disampaikan secara elektronik melalui Kepala Rutan tempat terdakwa ditahan.

2. Pendaftaran banding secara manual:
   - Pada prinsipnya seluruh pendaftaran perkara pidana dilakukan secara elektronik melalui SIP namun dimungkinkan pendaftaran manual jika terjadi kendala yang tidak memungkinkan dilakukan secara elektronik dengan prosedur sebagai berikut:
   - Petugas meja kepaniteraan pada PTSP Pengadilan menerima pernyataan banding, panitera pengadilan negeri mengeluarkan:[18]
     (1) Surat keterangan permohonan banding; atau
     (2) Surat keterangan terlambat mengajukan banding; atau
     (3) Surat keterangan terlambat/tidak mengajukan memori banding penuntut umum (gugur).[19]
     (4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka

[18] SK KMA No. 365 Tahun 2022 dan Pasal 285 KUHAP
[19] Pasal 289 ayat 4 KUHAP

2 dan angka 3 ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan tentang permohonan banding tidak memenuhi syarat formil/permohonan banding gugur.

(5) Mencatatkan permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding pada SIP.

(6) Melaporkan secara elektronik adanya permohonan banding ke Pengadilan tinggi pada hari yang sama, apabila terdakwa ditahan.

(7) Surat pengantar pemberitahuan perkara banding ke pengadilan tinggi; atau

(8) Surat keterangan pencabutan banding.

c) Apabila jangka waktu telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka terdakwa atau advokatnya dan/atau penuntut umum dianggap menerima putusan.[20]

d) Terhadap permohonan banding yang melampaui tenggang waktu, panitera membuat surat keterangan keterlambatan banding. Berdasarkan surat keterangan panitera, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan bahwa banding tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan dilampirkan dalam berkas perkara. Berkas perkara tidak dikirim ke pengadilan tinggi21 serta penetapan ketua pengadilan negeri tersebut diberitahukan kepada pemohon banding.

e) Terdakwa yang berada dalam tahanan dapat mengajukan permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan (dalam hal terdakwa hadir dalam persidangan) atau 7 (tujuh)

---

[20] Pasal 286 ayat 1 KUHAP

[21] Pasal 45A UU Mahkamah Agung RI

hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa melalui kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) (dalam hal terdakwa tidak hadir dalam persidangan).

f) Kepala Rutan dalam waktu 3 (tiga) hari harus sudah meneruskan permohonan banding tersebut kepada ketua pengadilan negeri, selanjutnya panitera pengadilan negeri membuat surat keterangan banding.

g) Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak satu kepada pihak yang lain.

h) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.[22]

i) Dalam hal perkara banding yang sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.[23]

j) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi, pengadilan pengaju tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan pengadilan pengaju menerbitkan surat keterangan pencabutan secara elektronik.

k) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi, permohonan pencabutan tersebut dikirim ke pengadilan tinggi.

l) Menyampaikan salinan memori dan kontra memori, diserahkan kepada para pihak dengan relaas pemberitahuan.

m) Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri kecuali yang diajukan secara elektronik.[24]

---

[22] Pasal 287 ayat (1) KUHAP
[23] Pasal 287 ayat (2) KUHAP
[24] Pasal 288 ayat (2) KUHAP dan SK KMA No 365 Tahun 2022 angka VI huruf B.1.g

n) Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di pengadilan tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada ketua pengadilan tinggi melalui ketua pengadilan negeri, kecuali yang diajukan secara elektronik.

o) Berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi.25

p) Dalam hal berkas perkara banding telah dikirimkan ke pengadilan tinggi, namun pemohon (terdakwa atau advokat) belum mengajukan memori atau kontra memori banding maka pemohon dapat menyampaikan melalui PTSP pengadilan negeri untuk dikirimkan ke pengadilan tinggi.26

q) Dalam hal pemohon banding adalah penuntut umum dan tidak mengajukan memori banding dalam batas waktu yang ditentukan maka permohonan banding gugur27 panitera membuat surat keterangan tidak mengajukan atau keterlambatan memori banding. Berdasarkan surat keterangan panitera tersebut, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan bahwa banding tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan dilampirkan dalam berkas perkara.

r) Berkas perkara tidak dikirim ke pengadilan tinggi serta penetapan ketua pengadilan negeri tersebut diberitahukan kepada pemohon banding dan dilaporkan ke pengadilan tinggi.

s) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu panitera pengadilan negeri pengaju membuat akta

---

25 Pasal 288 KUHAP
26 Pasal 16E ayat (3) Perma 8 Tahun 2022
27 Pasal 289 ayat (4) KUHAP

pencabutan permohonan banding yang ditandatangani pihak yang mencabut dan panitera, serta dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri dan selanjutnya akta tersebut dikirim ke pengadilan tinggi.

t) Dalam hal pencabutan permohonan banding tidak dilakukan oleh pemohon/advokatnya secara langsung (di hadapan kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/kepala rutan), hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya, dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.

u) Tanggal sidang pembacaan putusan pengadilan tinggi wajib diberitahukan kepada terdakwa/ advokat dan penuntut umum[28], dapat dilakukan secara elektronik maupun manual oleh pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembacaan putusan.

v) Putusan pengadilan tinggi wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dapat dihadiri oleh terdakwa dan/atau penuntut umum, baik secara langsung maupun secara elektronik.[29]

w) Amar putusan diumumkan melalui SIP pada hari putusan dibacakan.[30]

x) Salinan putusan pengadilan tinggi yang telah ditandatangani secara elektronik oleh panitera akan terkirim 1x24 jam ke pengadilan pengaju melalui SIP, selanjutnya pengadilan pengaju memberitahukan kepada terdakwa/advokat dan penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan tinggi.

y) Jika tidak dilakukan secara elektronik, salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara disampaikan kepada pengadilan negeri yang memutus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah

---

[28] Pasal 298 ayat (1) KUHAP
[29] Pasal 298 ayat (2) dan ayat (5) KUHAP
[30] Pasal 298 ayat (6) KUHAP

putusan tersebut dijatuhkan.

z) Petugas melakukan pencatatan perkara banding pada setiap tahapan dan pelaksanaan putusan dalam SIP.

2) Kasasi

a) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.[31]

b) Pengajuan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap:[32]

1) putusan bebas;
2) putusan berupa pemaafan hakim;
3) putusan berupa tindakan;
4) putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V;
5) putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat;

c) Putusan praperadilan juga tidak dapat diajukan kasasi berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

d) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.[33]

e) Permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa melalui kepala rutan/kepala lapas selama masih dalam tenggat waktu pengajuan kasasi dan selanjutnya kepala rutan/kepala lapas meneruskan sekaligus melaporkan adanya permohonan kasasi

---

[31] Pasal 299 ayat (1) KUHAP
[32] Pasal 299 ayat (2) KUHAP
[33] Pasal 300 ayat 1 KUHAP

tersebut kepada panitera pengadilan pengaju secara elektronik atau secara manual, kemudian panitera membuat surat keterangan permohonan kasasi serta melaporkan secara elektronik sesuai waktu pengajuan (*realtime*) ke Mahkamah Agung.[34]

f) Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kepada panitera setelah permohonan kasasi diajukan, jika pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.[35]

g) Terhadap permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu atau tidak mengajukan memori kasasi, panitera membuat surat keterangan tidak memenuhi syarat formal (TMS). Berdasarkan surat keterangan panitera, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan bahwa kasasi tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan dilampirkan dalam berkas perkara. Penetapan ketua pengadilan negeri tersebut dikirim ke Mahkamah Agung tanpa berkas perkara[36] dan diberitahukan kepada para pihak.

h) Permohonan kasasi wajib diajukan secara elektronik, dengan cara:[37]

   a. Pengadilan Pengaju memproses permohonan kasasi yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
   b. Permohonan kasasi yang diajukan di luar waktu diproses pada hari kerja berikutnya.
   c. Dalam hal permohonan kasasi diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, Pengadilan memproses permohonan kasasi paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat.

---

[34] SEMA No.4 Tahun 2016
[35] Pasal 303 ayat (1) dan (3) KUHAP
[36] Pasal 45A UU Mahkamah Agung RI dan Pasal 303 ayat (3) KUHAP serta SEMA Nomor 11 Tahun 2010
[37] SK KMA No 207 /KMA/SK.HK2/X/2023

d. Pada hari dinyatakannya permohonan kasasi oleh terdakwa atau penuntut, panitera Pengadilan Pengaju:
   - menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik;
   - mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register perkara pada SIP; dan
   - melaporkan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan kasasi dan status penahanan terdakwa dalam hal terdakwa ditahan.
e. Panitera Pengadilan Pengaju memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan kasasi diterima.
f. Pemohon mengajukan memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah permohonan kasasi diterima.
g. Panitera Pengadilan Pengaju menyampaikan pemberitahuan memori kasasi kepada termohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima Pengadilan.
h. Dalam hal pemohon kasasi merupakan terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pengadilan pengaju pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan alasan mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.[38]
i. Penetapan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.
j. Termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan memori kasasi diterima.
k. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori kasasi, panitera Pengadilan Pengaju menyampaikan pemberitahuan kontra memori

[38] Pasal 303 ayat 2 KUHAP

kasasi kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.

l. Pemberitahuan terhadap termohon yang ditahan diberitahukan melalui Domisili Elektronik tempat termohon ditahan.

m. Kepaniteraan mencetak memori kasasi dan menyampaikannya kepada termohon melalui Surat Tercatat atau secara elektronik bagi termohon.

n. Termohon menyerahkan dokumen lunak (*softcopy*) dan dokumen cetak (*hardcopy*) kontra memori kasasi melalui PTSP, kemudian petugas kepaniteraan terkait mengunggah kontra memori tersebut ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

o. Termohon menyerahkan kontra memori kasasi melalui kepala rutan tempat termohon ditahan selanjutnya mengirimkannya secara elektronik ke pengadilan untuk kemudian diunggah ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

p. Panitera Pengadilan Pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik.

q. Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi (paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi), dalam waktu paling lama 1 (satu) hari wajib mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.[39]

r. Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui SIP oleh Pengadilan Pengaju kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan atau 3 (tiga) hari setelah

[39] Pasal 305 ayat (1) KUHAP

tenggat waktu inzage berakhir.

s. Kontra memori kasasi tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.

t. Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, panitera pengadilan negeri wajib melampirkan penetapan penahanan dimaksud dalam berkas perkara.

u. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu baik secara manual maupun elektronik, dan tidak dapat diajukan lagi.[40]

v. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan petikan putusan yang telah ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung dikirimkan secara elektronik melalui SIP kepada pengadilan pengaju untuk diberitahukan kepada terdakwa, penuntut umum, Rutan, dan Lapas melalui SIP atau surat tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah salinan petikan putusan diterima.[41]

w. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan yang telah ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung dikirimkan secara elektronik melalui SIP kepada pengadilan pengaju untuk diberitahukan kepada terdakwa, penuntut umum dan penyidik melalui SIP atau surat tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah salinan putusan diterima.

3) Peninjauan Kembali

a) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.[42]

---

[40] Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHAP
[41] SK KMA Nomor 207 Tahun 2023
[42] Pasal 318 ayat 1 dan 2 KUHAP

b) Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu kecuali permintaan peninjauan kembali yang dilakukan atas dasar alasan dalam Pasal 318 ayat (5) huruf b KUHAP dibatasi dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.[43]

c) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan salinan putusan dan tidak dibenarkan berdasarkan petikan putusan.

d) Dalam hal terpidana telah meninggal dunia, permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami, orang tua, anak, atau saudara kandung yang ditinggalkan. permintaan tersebut dapat dikuasakan kepada advokat yang dikuasakan khusus untuk itu.[44]

e) Permintaan peninjauan kembali dengan menyebutkan secara jelas alasannya berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut diajukan secara elektronik ataupun manual oleh terpidana atau ahli warisnya kepada panitera.[45] Selanjutnya dibuatkan akta yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, kecuali jika terpidana sedang menjalani pidana di Lapas.[46]

f) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, majelis hakim menerbitkan penetapan hari sidang dan selanjutnya meminta bantuan kepada kepala lapas atau kepala rutan dimana terpidana menjalani pidana, untuk menghadirkan terpidana ke persidangan di pengadilan negeri.

g) Terpidana yang sedang menjalani pidana di Lapas atau Rutan tersebut dapat diwakili oleh advokat selaku kuasanya untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, kehadiran pada persidangan, dan penandatanganan berita acara persidangan.[47]

---

[43] Pasal 319 ayat (2) dan (3) KUHAP
[44] Pasal 318 ayat 3 dan 4 KUHAP
[45] Pasal 319 ayat (1) KUHAP
[46] SEMA Nomor 3 Tahun 2018
[47] SEMA No 4 Tahun 2016

h) Terpidana yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO) tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.[48]

i) Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana yang berada di lapas tanpa advokat dilakukan menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung.[49]

j) Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan permohonan peninjauan kembali.

k) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada jaksa.

l) Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali pada prinsipnya diwajibkan dilakukan secara elektronik:

   a. Pengadilan Pengaju memproses permohonan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

   b. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a diproses pada hari kerja berikutnya.

   c. Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, Pengadilan memproses permohonan peninjauan kembali paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat.

   d. Pada hari dinyatakan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana/ ahli waris / penasihat hukum, panitera Pengadilan Pengaju:
      - menerbitkan akta permohonan peninjauan kembali secara elektronik; dan
      - mencatat permohonan peninjauan kembali dalam register perkara pada SIP.

---

[48] SEMA No. 1 Tahun 2012
[49] SEMA Nomor 3 Tahun 2018

e. Dalam hal bundel A masih berbentuk dokumen cetak, kepaniteraan pengadilan pengaju melakukan digitalisasi dokumen tersebut dan mengunggah ke dalam SIP.

f. Panitera pengadilan pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dan kejelasan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan secara elektronik.

g. Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan pengaju paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diajukan.

m) Setelah permohonan peninjauan kembali diterima, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.[50] Jika kondisi atau jumlah hakim tidak memungkinkan maka diserahkan kepada kebijakan ketua pengadilan negeri.

n) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali, pemohon dan perwakilan dari Jaksa Agung hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya,[51] untuk selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.[52]

o) Panitera sidang wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh jaksa, pemohon, serta panitera sidang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut, selanjutnya dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera sidang.[53]

---

[50] Pasal 320 ayat (1) KUHAP
[51] Pasal 320 ayat 2 KUHAP
[52] Pasal 320 ayat 3 KUHAP
[53] Pasal 320 ayat 3 KUHAP

p) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.

q) Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:

(1) Diajukan kepada pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama.

(2) Hakim dari pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan (delegasi) pemeriksaan kepada pengadilan negeri tempat pemohon peninjauan kembali berada.

(3) Berita acara pemeriksaan dikirim ke pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan.

(4) Berita acara pendapat dibuat oleh pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama.[54]

r) Dalam pemeriksaan persidangan, dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan pengadilan negeri.

s) Setelah pemeriksaan persidangan selesai, ketua pengadilan negeri segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

t) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan tinggi, tembusan surat pengantar tersebut disampaikan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dengan dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat.[55]

u) Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan yang telah ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung dikirimkan secara elektronik melalui SIP kepada

---

[54] SEMA No. 4 Tahun 2016
[55] Pasal 320 ayat 5 KUHAP

pengadilan pengaju setelah diperiksa dahulu oleh ketua pengadilan negeri untuk selanjutnya diberitahukan kepada terdakwa, penuntut umum dan penyidik melalui SIP atau surat tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah salinan putusan diterima.

v) Relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung secara elektronik.

w) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali[56], kecuali jika terdapat keadaan baru atau bukti baru atau terdapat pertentangan antara 2 (dua) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[57]

x) Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung.[58]

y) Untuk menerima atau tidak menerima permohonan peninjauan kembali, pengadilan negeri hanya berwenang menilai aspek formal.

4) Prosedur Penerimaan Permohonan Grasi

a) Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

b) Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi kepada Presiden melalui ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, secara tertulis oleh :

---

[56] SEMA Nomor 7 Tahun 2014
[57] Pasal 318 ayat 6 KUHAP
[58] Pasal 67 huruf e UU No 14 Tahun 1985 dan SEMA No.10 Tahun 2009 jo SEMA No. 7 Tahun 2014

(1) Terpidana dan/atau advokatnya.
(2) Keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana.
(3) Keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana, dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati.

c) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.[59]
d) Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggat waktu.[60]
e) Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
f) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.[61]
g) Pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dalam masa percobaan pidana mati dan tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.[62]
h) Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana, permohonan dan salinannya disampaikan melalui kepala lapas, untuk diteruskan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan grasi.[63]
i) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui kepala lapas, kepala lapas menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden melalui ketua pengadilan yang memutus

---

[59] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
[60] Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015
[61] Pasal 62 KUHP
[62] Pasal 99 UU No 1 tahun 2026
[63] Pasal 8 ayat 4 UU No 22 tahun 2002

perkara tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi.

j) Panitera wajib membuat akta penerimaan salinan permohonan grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

k) Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:
   (1) Surat pengantar.
   (2) Daftar isi berkas perkara.
   (3) Akta berkekuatan hukum tetap.
   (4) Permohonan grasi dan akta penerimaan.
   (5) Salinan permohonan grasi dari terpidana dan akta penerimaan salinan permohonan grasi.
   (6) Surat kuasa dari terpidana atau keluarganya (jika ada).
   (7) Berita acara sidang.
   (8) Putusan pengadilan negeri.
   (9) Putusan pengadilan tinggi (jika ada).
   (10) Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada).
   (11) Surat dakwaan.
   (12) Perlawanan, pendapat penuntut umum dan putusan sela (jika ada).
   (13) Surat tuntutan.
   (14) Pembelaan, replik, duplik (jika ada).
   (15) Surat penetapan penunjukan hakim.
   (16) Surat penetapan hari sidang.
   (17) Berita acara pemeriksaan pendahuluan.
   (18) Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.

l) Permohonan grasi yang tidak memenuhi persyaratan, untuk selanjutnya panitera membuat akta penolakan permohonan grasi.

m) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penerimaan salinan permohonan

grasi, pengadilan negeri mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.[64]

n) Salinan keputusan grasi yang diterima oleh pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dicatat oleh petugas dalam register induk, dan diberitahukan oleh panitera kepada terpidana dengan membuat akta pemberitahuan.

o) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu.

2. Administrasi Keuangan Perkara

a. Putusan pemidanaan harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan/diwajibkan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti.[65] Dalam tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, ditentukan bahwa biaya perkara minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) itu adalah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat banding. [66]

b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar selama belum ada perubahan, hendaknya dalam memutus biaya perkara tetap mengacu pada nilai minimal dan maksimal tersebut. Hakim dalam menentukan besarnya jumlah biaya perkara harus memperhatikan kemampuan terdakwa, dengan pengertian bahwa apabila terdakwa tidak mampu ataupun tidak mau membayar, jaksa dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara

---

[64] Pasal 9 UU No 22 Tahun 2002 dan UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi

[65] Pasal 250 huruf I KUHAP dan Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

[66] Disesuaikan dengan ketentuan paling akhir

tersebut.[67]

c. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara[68].

d. Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan uang yang dimaksud harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud, jurusita menyita barang miliknya untuk dilelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.[69]

3. Register

a. Register pidana terdiri dari:

1) Register induk pidana
2) Register pidana singkat
3) Register pidana cepat:
   a) Register pidana ringan
   b) Register pelanggaran lalu lintas
4) Register praperadilan
5) Register penggeledahan
6) Register penyitaan
7) Register penahanan
8) Register barang bukti
9) Register banding
10) Register kasasi
11) Register peninjauan kembali
12) Register grasi
13) Register restitusi

---

[67] Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.14_PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP jo Pasal 361 KUHAP
[68] Pasal 35 PP Nomor 27 Tahun 1983 (ketentuan sesuai KUHAP lama)
[69] Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 (ketentuan sesuai KUHAP lama)

14) Register kompensasi
15) Register Rehabilitasi
16) Register pengakuan bersalah
17) Register perjanjian penundaan penuntutan
18) Register mekanisme keadilan restoratif
19) Register pemblokiran
20) Register penyadapan
21) Register larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia
22) Register penyitaan terhadap benda yang tidak diketahui pemiliknya
23) Register penetapan sebagai saksi mahkota
24) Register pengawasan dan pengamatan

b. Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik melalui SIP;
c. Register yang dicetak dari aplikasi SIP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual;
d. Dalam hal register elektronik belum tersedia untuk mencatat administrasi baru dalam KUHAP, pencatatannya dilakukan secara manual.

4. Monitoring dan Evaluasi
   a. Pengadilan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan negeri paling sedikit 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik;
   b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan tinggi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik;
   c. Pengadilan negeri berkewajiban membuat laporan;[70]
   d. Laporan tentang keadaan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat setiap bulan;
   e. Laporan tentang Hakim pengawas dan pengamat, dibuat

[70] Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website Di Lingkungan Peradilan Umum

setiap 3 (tiga) bulan sekali; (Pasal 359 KUHAP)

f. Laporan dikirim secara elektronik melalui media elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;[71]

g. Laporan keadaan perkara pidana sudah tercatat pada media elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya.

5. Pemberkasan Perkara dan Arsip

a. Berkas Perkara

1) Berkas perkara terdiri dari bundel A dan bundel B.

Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:

a) Putusan (yang telah diparaf oleh majelis hakim pada setiap halaman);
b) Petikan putusan (yang telah diparaf oleh majelis hakim pada setiap halaman);
c) Penetapan penunjukan majelis hakim/hakim
d) Penunjukkan panitera pengganti;
e) Penunjukkan jurusita/jurusita pengganti;
f) Penetapan hari sidang;
g) *Court calender;*
h) Berita acara sidang (yang telah diparaf oleh majelis hakim pada setiap halaman:
   - Surat dakwaan;
   - Perlawanan;
   - Putusan sela;
   - Surat tuntutan;
   - Pembelaan, replik dan duplik);
i) Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan (bila ada);
j) Akta tidak mengajukan permohonan banding;
k) Surat kuasa didampingi advokat /penetapan penunjukkan advokat; (bila ada)
l) Surat pelimpahan berkas perkara dari penuntut

---

[71] Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website Di Lingkungan Peradilan Umum

umum;

m) Penetapan/perintah penahanan (hakim/ penuntut umum);

n) Berkas perkara penyidik

- Penetapan/perintah perpanjangan penahanan;
- Penetapan izin/persetujuan penyitaan (jika ada);
- Penetapan izin/persetujuan pengeledahan (jika ada);

o) Surat-surat lainnya (bila ada);

p) *Soft copy* (putusan dan berita acara sidang)

Bundel A tersebut disimpan oleh pengadilan negeri dan menjadi arsip di kepaniteraan muda hukum;

2) Dalam hal ada upaya hukum banding, panitera menyiapkan berkas bundel A dan bundel B.

3) Bundel B merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:

a) Surat keterangan permohonan banding dengan menggunakan nomor yang dijunctokan nomor perkara;

Contoh : Nomor 12/Akta Bdg/VIII/2023 Jo. Nomor Perkara 1200/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel;

b) Laporan adanya banding kepada pengadilan tinggi;

c) Relaas pemberitahuan permohonan banding;

d) Memori banding (jika ada);

e) Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding (jika ada);

f) Kontra memori banding (jika ada);

g) Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding (jika ada);

h) Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) jika ada;

i) Surat pernyataan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di pengadilan tinggi (jika ada)[72]

j) Salinan putusan yang telah ditandatangani secara

---

[72] Pasal 288 ayat (3) KUHAP

elektronik (TTE);

k) File putusan berbentuk *microsoft word* dan bukan berbentuk *PDF* maupun hasil pemindaian (*scanning*);

l) Surat-surat lainnya (jika ada);

4) Setelah pengadilan pengaju menerima berkas perkara yang sudah diputus pengadilan tinggi, pengadilan pengaju melakukan pemberitahuan putusan pengadilan tinggi kepada para pihak.

5) Dalam hal ada upaya hukum kasasi, panitera menyiapkan bundel B yang merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:

a) Daftar isi dan surat pengantar;

b) Relaas pemberitahuan putusan tingkat banding;

c) Surat keterangan permohonan kasasi;

d) Relaas pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon kasasi;

e) Memori kasasi/tambahan memori kasasi

f) Surat keterangan penerimaan memori kasasi/tambahan memori kasasi;

g) Relaas pemberitahuan/penyerahan memori kasasi/tambahan memori kasasi kepada termohon kasasi (jika ada);

h) Kontra memori kasasi/tambahan kontra memori kasasi (jika ada);

i) Surat keterangan pemberitahuan/penyerahan kontra memori/tambahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi;

j) 2 (dua) eksemplar salinan resmi putusan tingkat pertama;

k) 2 (dua) eksemplar salinan resmi putusan tingkat banding;

l) Surat kuasa khusus untuk mengajukan kasasi dari terdakwa;

m) Dokumen elektronik sebagai syarat kelengkapan berkas kasasi;[73]

---

[73] SEMA Nomor 1 tahun 2014 jo SEMA Nomor 14 tahun 2010 jo Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014

n) Surat-surat lainnya;

6) Bundel B untuk upaya hukum kasasi wajib disertai dengan dokumen elektronik yang merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara upaya hukum kasasi.[74] Dokumen elektronik upaya hukum kasasi dikirimkan melalui SIP yang terdiri dari:
   a) Surat keterangan permohonan kasasi;
   b) Tanda terima memori kasasi;
   c) Memori kasasi dan tambahan memori kasasi;
   d) Kontra memori kasasi dan tambahan kontra memori kasasi (jika ada);
   e) Surat dakwaan penuntut umum;
   f) Salinan putusan tingkat pertama; dan/atau
   g) Salinan putusan tingkat banding.
7) Dalam hal ada upaya hukum peninjauan kembali, panitera menyiapkan bundel B yang merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:
   a) Surat keterangan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon;
   b) Surat permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasannya;
   c) Salinan putusan pengadilan negeri;
   d) Salinan putusan pengadilan tinggi (jika ada);
   e) Salinan putusan Mahkamah Agung (jika ada);
   f) Berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat;[75]
   g) Surat-surat lainnya;
8) Bundel B untuk upaya hukum peninjauan kembali wajib disertai dengan dokumen elektronik yang merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara upaya hukum peninjauan kembali.[76] Dokumen elektronik upaya hukum peninjauan kembali dikirimkan melalui SIP yang terdiri dari:
   a) Surat keterangan permohonan peninjauan kembali;

---

[74] SEMA No 1 Tahun 2014
[75] Pasal 320 KUHAP
[76] SEMA No 1 Tahun 2014

b) Berita acara pendapat;
c) Berita acara pemeriksaan;
d) Surat keterangan sedang menjalani hukuman dari Lapas (jika ditahan);
e) Surat kuasa (jika sedang menjalani hukuman);
f) Memori peninjauan kembali;
g) Kontra memori peninjauan kembali (jika ada);
h) Salinan putusan tingkat pertama; dan/atau
i) Salinan putusan tingkat banding (jika ada); dan/atau
j) Salinan putusan tingkat kasasi (jika ada);
k) Surat keterangan putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
l) Surat-surat lainnya (jika ada).

Bundel B disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung.

b. Arsip berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT)

1) Penyimpanan Arsip Perkara Manual

a) Persiapan Arsip

Berkas perkara diserahkan kepada panitera muda hukum paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkekuatan hukum tetap.

Sebelum berkas perkara ditempatkan pada ruang arsip, panitera muda hukum melakukan pemeriksaan terhadap:

- identitas dan nomor perkara;
- jenis perkara;
- kelengkapan dokumen;
- urutan dokumen;
- tanggal dan status penyelesaian perkara;
- status upaya hukum
- kondisi fisik berkas;
- kesesuaian antara berkas dengan data pada sistem informasi penelusuran perkara

Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada panitera muda terkait untuk dilengkapi sebelum diserahkan untuk penyimpanan.

b) Pengelompokan Arsip

Arsip perkara dikelompokkan paling sedikit berdasarkan:

1. Jenis Perkara
   a. pidana;
   b. pidana khusus; dan
   c. jenis perkara lainnya sesuai kewenangan pengadilan.
2. Tahun Perkara

   Dalam masing-masing jenis perkara, arsip dikelompokkan berdasarkan tahun pendaftaran atau tahun penyelesaian sesuai dengan sistem klasifikasi yang ditetapkan.
3. Nomor Perkara

   Dalam setiap kelompok tahun, arsip disusun secara berurutan berdasarkan nomor perkara.

c) Penempatan dalam Box Arsip

Berkas perkara ditempatkan dalam box arsip dengan memperhatikan:

1. jenis perkara;
2. tahun;
3. urutan nomor perkara;
4. kapasitas box;
5. kondisi fisik arsip; dan
6. kemudahan pengambilan kembali.

1 (satu) box sedapat mungkin tidak mencampurkan jenis perkara dan tahun yang berbeda.

Setiap box diberikan identitas yang paling sedikit memuat:

PENGADILAN :

JENIS PERKARA :

TAHUN :

NOMOR PERKARA : ... s.d. ...

NOMOR BOX :

JUMLAH BERKAS :

d) Penomoran Box

Setiap box diberikan nomor unik dan dicatat dalam Daftar Arsip Perkara.

Contoh:

PID/2026/001

yang berarti:

- PID = Pidana;
- 2026 = tahun;
- 001 = nomor urut box.

e) Ruang Penyimpanan

Ruang arsip perkara harus:

1. digunakan secara terkendali;
2. memiliki pembatasan akses;
3. mempunyai ventilasi dan pencahayaan yang memadai dengan tetap memperhatikan perlindungan arsip;
4. terhindar dari kebocoran dan kelembaban berlebih;
5. terlindungi dari hama;
6. memiliki sarana pengamanan kebakaran;
7. terlindungi dari risiko banjir;
8. dijaga kebersihannya; dan
9. ditata agar memungkinkan proses evakuasi arsip dalam keadaan darurat.

f) Pengamanan

Akses ke ruang arsip hanya diberikan kepada petugas yang ditunjuk.

Setiap pengeluaran arsip dari ruang penyimpanan harus tercatat.

Dilarang:

1. membawa arsip keluar tanpa izin;
2. mengubah atau mengganti isi berkas;
3. mengambil dokumen dari berkas;
4. memberikan arsip kepada pihak yang tidak berwenang;
5. makan, minum, atau merokok di ruang penyimpanan; dan
6. melakukan tindakan lain yang dapat

menyebabkan kerusakan atau kehilangan arsip.

2) Penyimpanan Arsip Perkara Elektronik

a) Prinsip Umum

1. Kepaniteraan muda hukum wajib melakukan alih media terhadap seluruh berkas perkara dan mencatatkannya pada SIP.
2. Panitera muda hukum melakukan penyimpanan arsip perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Arsip perkara elektronik dikelola secara terintegrasi dengan SIP.
4. SIP menjadi sarana utama dalam pengelolaan, pencatatan, penelusuran, dan penyediaan informasi mengenai arsip elektronik perkara sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditetapkan.

b) Pendataan arsip perkara pada SIP

Isikan data arsip yang terdiri atas:

- Nomor Ruang.
- Nomor Rak/Lemari.
- Nomor Tingkat/Laci.
- Nomor Box.
- Nomor Arsip.
- Nomor Perkara.
- Tanggal masuk.
- Staf yang menyerahkan berkas.
- Petugas yang menerima berkas.
- Status.
- e-*Doc* Arsip.
- Keterangan.

c) Format dan pengarsipan dokumen

1. Dokumen arsip perkara elektronik yang diunggah ke dalam SIPP menggunakan format *Portable Document Format* (PDF) atau format lainnya.

2. Dokumen elektronik harus memiliki kualitas sebagai berikut :
   - terbaca dengan jelas;
   - lengkap;
   - tidak terpotong;
   - sesuai dengan dokumen sumber;
   - dapat ditelusuri; dan
   - dapat digunakan kembali sepanjang masih mempunyai nilai guna.
3. Dalam hal diperlukan untuk efisiensi penyimpanan, dokumen dapat dilakukan kompresi sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang ditetapkan dalam pengelolaan SIP.
4. Kompresi tidak boleh mengurangi keutuhan, keterbacaan, autentisitas, dan integritas dokumen.
5. Pada Tingkat pertama dokumen arsip perkara dalam SIP diunggah mulai dari dakwaan/petitum sampai putusan yang sudah ditandatangani, sesuai kewenangan dan diperbarui apabila terdapat dokumen upaya hukum;
6. Pada Tingkat banding dokumen arsip perkara dalam SIP diunggah sesuai daftar bundel B serta putusan tingkat banding yang sudah ditandatangani, sesuai kewenangan;

d) Pemutakhiran Arsip Elektronik
1. Arsip elektronik perkara wajib dimutakhirkan apabila terdapat dokumen baru yang menjadi bagian dari rangkaian penyelesaian perkara.
2. Pemutakhiran terutama dilakukan apabila terdapat:
   - upaya hukum;
   - putusan pada tingkat upaya hukum;
   - pelaksanaan putusan;
   - eksekusi; atau
   - dokumen lain yang berdasarkan

ketentuan wajib menjadi bagian dari arsip perkara.

3. Pemutakhiran tidak boleh menghapus rekam jejak dokumen atau data yang telah mempunyai nilai arsip, kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah.

e) Penemuan Kembali Arsip

1. SIP menjadi sarana utama penelusuran arsip elektronik perkara berdasarkan nomor perkara
2. Penelusuran arsip melalui SIP dapat ditemukan setidaknya kurang dari 3 (tiga) menit.

f) Keterhubungan dengan Arsip Manual

1. Arsip elektronik dalam SIP dan arsip perkara manual harus mempunyai identitas perkara yang sama.
2. Nomor perkara menjadi identitas utama untuk menghubungkan arsip elektronik dengan arsip manual.
3. Informasi mengenai lokasi penyimpanan arsip manual dapat dihubungkan dengan data perkara dalam SIP.
4. Informasi lokasi paling sedikit meliputi:
   - ruang arsip;
   - rak;
   - tingkat rak;
   - nomor box.

3) Peminjaman, Pemindahan dan Retensi Arsip Perkara

a) Peminjaman Arsip Perkara

1. Prosedur peminjaman berkas harus dipublikasikan oleh panitera muda hukum.
2. Panitera muda hukum meneliti permohonan peminjaman arsip perkara.
3. Peminjaman berkas harus menggunakan form peminjaman yang disetujui oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan.

4. Batas waktu peminjaman arsip maksimal 3 (tiga) hari dan jika masih dipinjam, dicatat perpanjangan peminjaman 3 (tiga) hari setelahnya.
5. Data peminjaman arsip perkara wajib dicatat pada SIP atau dicatat secara manual pada buku bantu.
6. Setelah berkas dikembalikan data pengembaliannya wajib dicatat dalam SIP.

b) Pemindahan Arsip Perkara

1. Dalam hal gedung pengadilan sedang diperbaiki atau direlokasi, arsip perkara dapat dipindahkan ke lokasi lainnya.
2. Pemindahan berkas dari ruangan arsip harus menggunakan berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan.
3. Berita Acara pemindahan arsip setidak-tidaknya memuat nomor kotak penyimpanan perkara, nomor perkara yang sesuai dengan nomor perkara yang ditempelkan pada kotak tersebut dan menyebutkan jumlah keseluruhan kotak dan berkas yang dipindahkan (misal: 100 kotak dengan berkas sejumlah 1000 nomor perkara).
4. Pemindahan arsip dilaksanakan dengan cermat dan penuh kehati-hatian agar tidak merusak kondisi fisik arsip.

c) Retensi Arsip Perkara

1. Jika ruang arsip sudah tidak memungkinkan untuk penyimpanan arsip perkara baru, maka arsip perkara yang sudah berusia 30 (tiga pulu) tahun ke atas dapat diajukan untuk proses retensi dan dialihkan pemeliharaannya kepada Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) atau lembaga arsip daerah.
2. Proses retensi untuk arsip perkara yang sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun keatas hanya

dapat dilakukan jika sudah mendapat izin dari pengadilan tinggi terkait dan harus dibuatkan berita acara serah terima arsip perkara yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri. Berita acara dan izin pengadilan tinggi tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

3. Arsip perkara tidak dapat dimusnahkan dengan alasan apapun.[77]

4) Dalam hal arsip berkas perkara mengalami kondisi tingkat kerusakan diatas 80% (delapan puluh persen) dan sudah dialihmediakan dalam bentuk elektronik atau digital maka dapat dilakukan pemusnahan dengan prosedur sebagai berikut:[78]

a) Pengadilan negeri yang bersangkutan wajib mengajukan izin tertulis kepada ketua pengadilan tinggi yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

b) Pengadilan tinggi yang bersangkutan wajib mengajukan izin tertulis kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

c) Jika izin sudah diberikan oleh ketua pengadilan tinggi kepada pengadilan negeri atau Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada pengadilan tinggi dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan arsip berkas perkara, maka pemusnahan dapat dilakukan oleh panitera dengan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri/pengadilan tinggi.

5) Dalam hal arsip berkas perkara mengalami kondisi tingkat kerusakan diatas 80% (delapan puluh persen) namun belum dialihmediakan dalam bentuk elektronik atau digital maka tidak dapat dilakukan pemusnahan dan satuan kerja wajib mendokumentasikan kondisi berkas tersebut sebagai bukti jika salah satu pihak

---

[77] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
[78] Hasil Rapim tanggal 13 Agustus 2026

meminta atau menanyakan.

6. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara pada SIP

a. Penghapusan/Perbaikan data perkara selain putusan pada SIP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Data yang diajukan untuk dihapus adalah data yang disebabkan karena adanya kesalahan pengisian dan duplikasi data perkara.

2) - Perbaikan data SIPP dilakukan menggunakan akun ketua/wakil ketua.
- Perbaikan data e-Berpadu dan e-Court dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Badan Urusan Administrasi melalui Biro Hukum Humas Mahkamah Agung.

3) Membuat berita acara penghapusan data perkara yang ditandatangani oleh panitera, panitera muda, dan kepala subbagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan (PTIP).

Untuk setiap penghapusan data perkara yang sudah dilakukan pada SIP harus dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan penghapusan data kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mencegah terjadinya gagal sinkronisasi dikarenakan adanya perbedaan data antara *server local* pengadilan dan *server* Mahkamah Agung.

b. Penghapusan/perbaikan data perkara putusan yang sudah terpublikasi, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Jika kesalahan putusan terdapat pada amar, maka tidak dapat dihapus tetapi dilakukan upaya hukum.

2) Selain kesalahan putusan pada amar, maka dapat dilakukan perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Hapus terlebih dahulu *e-doc* dan metadata yang ada di direktori putusan.
- Gunakan akun admin masing-masing satuan kerja untuk hapus data putusan *dan e-docnya* di direktori putusan.
- Perbaiki *e-doc* putusan dan metadata amar putusan

yang ada di SIPP.

- Sinkronkan ulang data putusan SIPP (data yang sudah dipastikan benar) dengan direktori putusan (menggunakan antrian direktori putusan).
- Sinkron tidak dapat dilakukan (*replace*) jika pada direktori putusan masih terdapat data direktori putusan dengan nomor perkara yang sama.

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

Pada prinsipnya persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua sidang dan 2 (dua) hakim anggota dan dalam perkara tertentu, majelis hakim dapat terdiri dari seorang hakim ketua sidang dan 4 (empat) hakim anggota dan dibantu oleh panitera pengganti.

Pengecualian terhadap ketentuan di atas, persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal, misalnya perkara dengan pemeriksaan acara cepat, praperadilan, pidana anak, dan perkara yang memperoleh dispensasi (dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung).

1. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Biasa
   1) Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.[79]
   2) a. Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.[80]
      b. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikan kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri

[79] Pasal 195 KUHAP
[80] Pasal 196 ayat 1 dan 2 KUHAP

yang tercantum dalam surat penetapan dan turunan surat penetapan tersebut disampaikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum.[81]

c. Dalam hal penuntut umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri, penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat penetapan tersebut diterima.[82]

3) Ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim/hakim tunggal untuk menyidangkan perkara yang merupakan kewenangan pengadilan negeri bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari melalui SIP.

4) Dalam hal ketua pengadilan berhalangan, penetapan hakim/majelis hakim dilimpahkan kepada wakil ketua atau hakim senior/hakim lain yang ditunjuk. Berdasarkan surat penunjukan Plt/Plh maka admin SIPP pengadilan negeri membuka kewenangan untuk penunjukan hakim pada akun hakim tersebut sampai dengan berakhirnya penunjukan Plh/Plt tersebut.

5) Panitera menunjuk panitera pengganti dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah perkara diregister melalui SIP.

6) Dalam hal panitera pengadilan negeri berhalangan, wewenang penunjukan dilimpahkan kepada Plh/Plt panitera untuk menunjuk panitera sidang dan jurusita/jurusita pengganti, dilakukan dengan menggunakan SIP dan dicetak serta ditandatangani. Berdasarkan surat penunjukan Plt/Plh maka admin SIPP pengadilan negeri membuka kewenangan untuk penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti pada akun pejabat yang ditunjuk tersebut sampai dengan berakhirnya penunjukan Plh/Plt.

7) Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan, pembantaran, dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas dasar musyawarah majelis

---

[81] Pasal 196 ayat 3 KUHAP
[82] Pasal 197 ayat 1 dan 4 KUHAP

hakim.

8) Dalam hal permohonan penangguhan/pengalihan penahanan, pembantaran dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim anggota dan diucapkan di persidangan.
9) Dalam hal terdakwa semula tidak dilakukan penahanan kemudian ditetapkan untuk dilakukan penahanan, penetapan penahanannya ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim anggota dan diucapkan di persidangan.
10) Majelis hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut menetapkan hari sidang dengan perintah kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.
11) Penetapan hari sidang oleh majelis hakim wajib memperhatikan tenggang waktu yang cukup antara pemanggilan dan hari sidang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.[83]
12) Sebelum perkara disidangkan, majelis hakim terlebih dahulu mempelajari berkas perkara untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil dan meneliti kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara tersebut.
13) Syarat formil: tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.[84]
14) Syarat materil: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.[85] Mengenai syarat materil, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.[86]
15) Persidangan dilakukan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan dan/atau perkara anak atau jenis perkara khusus yang diatur oleh undang-undang agar

---

[83] Pasal 278 ayat (1) KUHAP
[84] Pasal 75 ayat (2) huruf a KUHAP
[85] Pasal 75 ayat (2) huruf b KUHAP
[86] Pasal 75 ayat (3) jo Pasal 75 ayat (2) huruf b KUHAP

disidangkan secara tertutup.

16) Majelis hakim, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa, walaupun tidak ada perlawanan karena jabatannya dapat menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang.[87]

17) Amar putusan diunggah pada SIP pada hari yang sama saat putusan diucapkan dan minutasi diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari + 1 setelah putusan diucapkan.

18) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 204 ayat (5) KUHAP maka setelah dakwaan dibacakan, hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan korban yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (7) KUHAP.

19) Dalam hal terdakwa dan korban bersepakat untuk melakukan perdamaian, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh terdakwa, korban, dan hakim maka Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/ atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[88]

20) Dalam hal terdakwa dan korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, namun terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum maka hakim wajib memeriksa pengakuan terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP.

21) Dalam hal hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, pemeriksaan beralih kepada pemeriksaan singkat dan dicatat dalam berita acara sidang serta hakim anggota 2 karena jabatannya menjadi hakim tunggal untuk

---

[87] Pasal 206 ayat (9) KUHAP
[88] Pasal 204 ayat (6) dan (8) KUHAP

melanjutkan, memeriksa, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan singkat menggunakan susunan persidangan yang baru,[89] dengan penomoran perkara tetap menggunakan register pemeriksaan biasa. Hakim anggota 2 membuat penetapan hari sidang sebagai penanda perubahan dari pemeriksaan acara biasa ke acara singkat.

22) Dalam hal hakim berkeyakinan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP tidak terpenuhi maka hakim melanjutkan pemeriksaan dengan acara biasa.

23) a. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana koneksitas dalam hal Ketua Mahkamah Agung dengan keputusannya menunjuk pengadilan negeri dan/atau pengadilan khusus yang akan memeriksa dan mengadili perkara koneksitas.

b. Selanjutnya ketua pengadilan negeri dan/atau pengadilan khusus koordinasi dengan kepala pengadilan militer, untuk menunjuk majelis hakim paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keputusan penunjukan.

c. Ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan penunjukan majelis hakim yang mencantumkan nama-nama hakim (termasuk hakim militer yang telah dikoordinasikan).

d. Penunjukan hakim oleh ketua pengadilan negeri untuk menangani perkara koneksitas (perkara pidana yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer) dilakukan melalui mekanisme khusus yang melibatkan kolaborasi antara peradilan umum dan peradilan militer, guna menjaga keseimbangan kepentingan.

e. Pada prinsipnya persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua berasal dari hakim pengadilan negeri (peradilan umum) dan 2 (dua) hakim anggota yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim militer secara

[89] SEMA Nomor 1 Tahun 2026

berimbang dan dalam perkara tertentu, majelis hakim dapat terdiri dari seorang hakim ketua berasal dari hakim pengadilan negeri (peradilan umum) dan 4 (empat) hakim anggota yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim militer secara berimbang dan dibantu oleh panitera pengganti.

2. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Singkat

1) Perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.[90]

2) Ketua pengadilan negeri menentukan hari-hari tertentu untuk persidangan perkara acara singkat.

3) Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh hakim dan menanyakan identitas terdakwa, penuntut umum diperintahkan untuk memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara dan merupakan pengganti surat dakwaan.[91]

4) Pencatatan perkara pidana dengan acara singkat dicatat oleh panitera muda pidana setelah hakim memeriksa perkara.

5) Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, berkas dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung tanpa penetapan, dengan buku pengantar (ekspedisi).

6) Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam jangka waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang

---

[90] Pasal 257 KUHAP

[91] Pasal 257 ayat (3) huruf a KUHAP

pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa[92] dan dicatatkan kedalam berita acara dan selanjutnya diserahkan ke penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan sebagai perkara pidana biasa.

7) Guna kepentingan pembelaan, atas permintaan terdakwa dan/atau advokat, hakim dapat menunda pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.[93]
8) Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
9) Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa.[94]
10) Pada waktu putusan diucapkan, amar putusan diunggah pada SIP. pada hari yang sama, minutasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan.
11) Ketua pengadilan negeri agar berkoordinasi dengan kepala kejaksaan negeri, supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

3. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat
   1) Perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.[95]
   2) Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan[96].
   3) Dalam hal terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa.
   4) Dalam hal putusan yang dijatuhkan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
   5) Panitera memberitahukan perlawanan tersebut kepada

---

[92] Pasal 257 ayat (3) huruf b KUHAP
[93] Pasal 257 ayat 3 huruf b KUHAP
[94] Pasal 257 ayat 3 huruf e KUHAP
[95] Pasal 258 ayat 2 KUHAP
[96] Pasal 265 KUHAP

penyidik, dan hakim (hakim yang menyidangkan perkara pokok) menetapkan hari persidangan untuk memutus perkara perlawanan tersebut. Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.[97]

6) Putusan dalam perkara dengan pemeriksaan cepat, Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding.[98]

7) Pada waktu putusan diucapkan, amar putusan diunggah pada SIP pada hari yang sama, minutasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan.

8) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera[99] , apabila sudah terakomodir dalam SIP, maka pencatatan dilakukan secara elektronik.

II. PIDANA KHUSUS

A. PERKARA PIDANA KHUSUS

RUANG LINGKUP

Berdasar Bab XXXV KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, yang dimaksud Tindak Pidana Khusus adalah:

1. Perkara Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi
3. Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Perkara Tindak Pidana Terorisme

1. ADMINISTRASI PERKARA

a. Administrasi Pendaftaran

1) Dokumen Pendaftaran

Dokumen yang dilimpahkan ke pengadilan negeri pada prinsipnya sama dengan dokumen pendaftaran pada

[97] Pasal 266 ayat (4),(5) dan (7) KUHAP
[98] Pasal 258 ayat 4 dan 5 KUHAP
[99] Pasal 263 ayat (1) KUHAP

perkara pidana acara biasa, kecuali diatur berbeda atau disyaratkan dokumen tambahan;

a) Untuk perkara tindak pidana pers ditambahkan dengan dokumen hasil musyawarah Dewan Pers (jika ada).
b) Untuk perkara tindak pidana berat terhadap HAM ditambahkan dengan berita acara pengangkatan sebagai penyidik ad hoc HAM[100].
c) Untuk perkara tindak pidana terorisme ditambahkan surat penetapan penyadapan dari ketua pengadilan negeri.[101]

2) Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara pidana umum, kecuali perkara tindak pidana pencucian uang yang didakwakan bersama dengan perkara tindak pidana korupsi, maka setelah diterima petugas kepaniteraan pada PTSP selanjutnya dilimpahkan pada kepaniteraan muda tipikor pengadilan tindak pidana korupsi.
3) Register Perkara
   a) Register diisi secara cermat dan lengkap pada SIP
   b) Untuk perkara tindak pidana berat terhadap HAM terdiri dari:
      (1) Register induk pidana hak asasi manusia
      (2) Register penahanan hak asasi manusia
      (3) Register permohonan banding
      (4) Register permohonan kasasi
      (5) Register permohonan peninjauan kembali
      (6) Register permohonan grasi
   c) Untuk perkara tindak pidana korupsi terdiri dari:
      (1) Register induk perkara tindak pidana korupsi
      (2) Register permohonan banding tindak pidana korupsi
      (3) Register permohonan kasasi tindak pidana korupsi

---

[100] Pasal 21 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
[101] Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

(4) Register permohonan peninjauan kembali tindak pidana korupsi
(5) Register permohonan grasi tindak pidana korupsi
(6) Register penahanan tindak pidana korupsi

d) Untuk perkara pidana anak terdiri dari:
(1) Register induk pidana biasa anak
(2) Register induk pidana singkat anak
(3) Register perkara tindak pidana ringan anak
(4) Register perkara pidana anak korban dan anak saksi
(5) Register penahanan anak
(6) Register diversi
(7) Register permohonan banding anak
(8) Register permohonan kasasi perkara pidana anak
(9) Register permohonan peninjauan kembali perkara anak
(10) Register permohonan grasi perkara pidana anak
(11) Register pemberian restitusi
(12) Register anak dibawah 12 tahun

e) Untuk Register tindak pidana khusus lainnya mengikuti register induk pidana biasa.

f) Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik melalui SIP;

g) Register yang dicetak dari aplikasi SIP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual;

h) Dalam hal register elektronik belum tersedia untuk mencatat administrasi baru dalam KUHAP, pencatatannya dilakukan secara manual.

2. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

a. Perkara Tindak Pidana Berat terhadap HAM

1) Pemeriksaan Persidangan

a) Daerah hukum Pengadilan HAM berada pada Pengadilan Negeri di:[102]

(1) Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;

(2) Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

(3) Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;

(4) Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

b) Pemeriksaan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat oleh pengadilan HAM dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.[103]

c) Majelis hakim diketuai oleh hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan.

2) Tahap Banding

Perkara pelanggaran HAM berat yang dimohonkan banding diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi HAM dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari

---

[102] Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

[103] Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan tinggi HAM.

3) Tahap Kasasi

Perkara pelanggaran HAM berat yang dimohonkan kasasi diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

4) Tahap Peninjauan Kembali

Ketentuan peninjauan kembali perkara HAM mengacu kepada ketentuan peninjauan kembali perkara pidana.

5) Penahanan

a) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari. Yang dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi selama 60 (enam puluh) hari oleh ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

b) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari. Yang dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang lagi selama 20 (dua puluh) hari oleh ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

c) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari. Yang dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

d) Dalam hal pemeriksaan perkara untuk waktu 120 (seratus dua puluh) hari belum selesai, sementara jangka waktu penahanan sebagaimana disebut pada angka (3) telah berakhir, perpanjangan penahanan dapat dimohonkan kepada ketua pengadilan tinggi untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dimohonkan perpanjangan kembali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari.[104]

e) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di pengadilan tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari, dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh ketua pengadilan tinggi sesuai daerah hukumnya.

f) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

b. Perkara Tindak Pidana Terorisme

1) Pemeriksaan Persidangan

a) Dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme dikenal Tindak Pidana Terorisme Tertentu yaitu tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 600 KUHP, Pasal 601 KUHP, dan Pasal 9 UU Terorisme

b) Klasifikasi tindak pidana Terorisme tertentu meliputi:

(1) Perbuatan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, perbuatan menimbulkan suasana teror atau rasa takut pada orang secara meluas, dan perbuatan menimbulkan Korban bersifat massal yang mengakibatkan:

- merampas kemerdekaan;
- merampas harta benda orang lain;
- menghilangkan nyawa; dan/atau
- mengakibatkan kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

(2) Perbuatan yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud;

- untuk menimbulkan suasana teror atau

[104] Pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 jo. Pasal 107 KUHAP

rasa takut terhadap orang secara meluas;

- untuk menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain; atau
- untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

(3) Perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk melakukan tindak pidana Terorisme.

c) Ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik dapat memberi perpanjangan penangkapan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, apabila jangka waktu penangkapan yang telah dilakukan oleh penyidik tidak cukup. [105]

c. Perkara Tindak Pidana Korupsi

1) Pemeriksaan persidangan

a) Berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh penuntut umum diperiksa dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

b) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi dengan wilayah hukum meliputi seluruh provinsi yang bersangkutan, untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[106]

c) Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.[107]

d) Sebelum penyidik melakukan Penyitaan dan Penggeledahan dalam perkara tipikor, Penyidik

---

[105] Pasal 28 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018
[106] Pasal 35 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
[107] Pasal 7 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

wajib mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda yang akan disita atau lokasi yang akan digeledah[108].

e) Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim yang berjumlah ganjil, paling kurang 3 (tiga) orang Hakim dan paling banyak 5 (lima) orang Hakim terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc.

f) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.

g) Ketua majelis hakim tindak pidana korupsi adalah hakim karier yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

h) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.[109]

2) Tahap Banding

Perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak perkara diterima pengadilan tinggi.

3) Tahap Kasasi

Perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan kasasi diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak perkara diterima Mahkamah Agung.

---

[108] Pasal 119 KUHAP dan hasil RAPIM tanggal 18 Agustus 2026

[109] Pasal 29 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

4) Tahap Peninjauan Kembali

Perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan peninjauan kembali diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak perkara diterima Mahkamah Agung.

d. Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

1) Pemeriksaan Persidangan

a) Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.[110]

b) Obyek Tindak pidana pencucian uang adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

(1) Korupsi;
(2) Penyuapan;
(3) Narkotika;
(4) Psikotropika;
(5) Penyelundupan Tenaga Kerja;
(6) Penyelundupan Migran;
(7) Di Bidang Perbankan;
(8) Di Bidang Pasar Modal;
(9) Di Bidang Perasuransian;
(10) Kepabeanan;
(11) Cukai;
(12) Perdagangan Orang;
(13) Perdagangan Senjata Gelap;
(14) Terorisme;
(15) Penculikan;
(16) Pencurian;
(17) Penggelapan;
(18) Penipuan;
(19) Pemalsuan Uang;
(20) Perjudian;
(21) Prostitusi;

---

[110] Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(22) Di Bidang Perpajakan;
(23) Di Bidang Kehutanan;
(24) Di Bidang Lingkungan Hidup;
(25) Di Bidang Kelautan Dan Perikanan; Atau
(26) Tindak Pidana Lain Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 4 (Empat) Tahun Atau Lebih.

c) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (pembuktian terbalik)[111]

d) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.[112]

3. LAIN-LAIN

a. Ketentuan mengenai grasi perkara pidana khusus mengacu pada ketentuan yang berlaku.[113]
b. Administrasi keuangan perkara pidana khusus sama dengan administrasi keuangan perkara pidana biasa.
c. Monitoring dan evaluasi perkara pidana khusus dilaksanakan dengan cara yang sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara pidana biasa.
d. Pemberkasan dan pengarsipan perkara pidana khusus dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara pidana biasa.
e. Sepanjang tidak diatur berbeda maka berlaku ketentuan pidana biasa.
f. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara Pidana Khusus pada SIP dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai penghapusan/ perbaikan data perkara pada SIP perkara pidana biasa.

---

[111] Pasal 77-78 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
[112] Pasal 79 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
[113] Undang-Undang Grasi No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. (UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi)

B. PERKARA PIDANA SEKTORAL

Perkara tindak pidana sektoral adalah perkara pidana yang diatur diluar KUHP/undang-undang selain KUHP. termaksud perkara tindak pidana khusus dengan penomoran mengikuti penomoran tindak pidana khusus. Perkara tindak pidana narkotika tidak termasuk dalam kategori tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dikarenakan tidak memiliki ancaman pidana minimum khusus pada tindak pidana tersebut. pidana perkara tindak pidana sektoral antara lain :

1. Perkara Tindak Pidana Narkotika
2. Perkara Tindak Pidana Perikanan
3. Perkara Tindak Pidana Anak
4. Perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak
5. Perkara Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
6. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
8. Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup
9. Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. Perkara Tindak Pidana Psikotropika
11. Perkara Tindak Pidana Pers
12. Perkara Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
13. Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
14. Perkara Tindak Pidana Cukai
15. Perkara Tindak Pidana Minerba dan Gas
16. Perkara Tindak Pidana Kesehatan
17. Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
18. Perkara Tindak Pidana Perbankan

1. ADMINISTRASI PERKARA

a. Administrasi Pendaftaran

1) Dokumen pendaftaran

Dokumen yang dilimpahkan ke pengadilan negeri pada prinsipnya sama dengan dokumen pendaftaran pada perkara pidana acara biasa, kecuali diatur berbeda atau disyaratkan dokumen tambahan;

2) Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran

perkara pidana biasa.

b. Upaya Hukum

1) Banding

a) Permohonan banding perkara pidana sektoral pada prinsipnya sama dengan permohonan banding pada perkara pidana acara biasa, kecuali diatur berbeda atau disyaratkan pada undang-undang lain.

b) - permohonan banding perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.

- Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

- Upaya hukum banding merupakan upaya hukum terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (kasasi atau peninjauan kembali)

c. Register Perkara

1) Register diisi secara cermat dan lengkap pada SIP.

2) Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik melalui SIP.

3) Register yang dicetak dari aplikasi SIP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual.

4) Dalam hal register elektronik belum tersedia untuk mencatat administrasi baru dalam KUHAP, pencatatannya dilakukan secara manual.

5) - Register perkara tindak pidana sektoral menggunakan register perkara tindak pidana acara biasa kecuali ditentukan berbeda.

- Untuk perkara tindak pidana anak terdiri dari:
  a) Register induk pidana biasa anak
  b) Register induk pidana singkat anak
  c) Register perkara tindak pidana ringan anak.
  d) Register perkara pidana anak korban dan anak saksi.
  e) Register penahanan anak.
  f) Register diversi.
  g) Register permohonan banding anak.
  h) Register permohonan kasasi perkara pidana anak.
  i) Register permohonan peninjauan kembali perkara anak.
  j) Register permohonan grasi perkara pidana anak.
  k) Register pemberian restitusi.
  l) Register anak dibawah 12 tahun.

2. ADMINISTRASI PERSIDANGAN
   a. Pada prinsipnya persidangan dilakukan sama dengan perkara pidana biasa kecuali yang ditentukan berbeda oleh aturan perundang undangan.
   b. Ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim/hakim tunggal untuk menyidangkan perkara yang merupakan kewenangan pengadilan negeri bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari melalui SIP.
   c. Pengaturan majelis hakim dalam perkara pidana sektoral yang diatur berbeda dengan perkara pidana biasa, antara lain:
      1) Perkara pidana anak
         a) Dalam hal perkara pidana anak, maka Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim bersertifikat anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, apabila tidak ada hakim bersertifikat maka ketua/wakil ketua pengadilan

karena jabatannya (*ex officio*) sebagai ketua majelis.

b) Dalam hal pemeriksaan perkara pidana anak;[114]

(1) Keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana diserahkan ke pengadilan negeri untuk selanjutnya ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(2) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(3) Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

(4) Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator diversi.

(5) Fasilitator diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversi.[115]

(6) Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki oleh fasilitator diversi apabila tidak memenuhi syarat paling lambat 3 (tiga) hari.

(7) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan

---

[114] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[115] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

diversi.

(8) Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

(9) Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

(10) Ketua pengadilan negeri memerintahkan hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan diversi.

(11) Penetapan penghentian pemeriksaan perkara disampaikan kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

c) Peradilan Pidana Anak

(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak.

(2) Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.

(3) Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

d) Laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum berisi:

(1) data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;

(2) latar belakang dilakukannya tindak pidana;

(3) keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;

(4) hal lain yang dianggap perlu;

(5) berita acara diversi; dan

(6) kesimpulan dan rekomendasi dari

pembimbing kemasyarakatan

e) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Identitas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

f) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum.

g) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum.

2) Dalam hal perkara pidana pajak, maka Ketua pengadilan menunjuk hakim yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpajakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praperadilan dan perkara pokok tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam hal di pengadilan tidak terdapat hakim yang telah mengikuti pelatihan maka ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan ditunjuk untuk memeriksa perkara tindak pidana di bidang perpajakan.

3) Dalam hal perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum maka Ketua pengadilan negeri menunjuk majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan yaitu hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

4) Dalam hal perkara tersebut adalah perkara tindak pidana perikanan, Ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang terdiri atas hakim karier bersertifikat perikanan yang ditetapkan berdasarkan

keputusan Ketua Mahkamah Agung dan hakim ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Ketua Mahkamah Agung, dengan komposisi 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karir.

5) Perkara Tindak Pidana Narkotika
   a) Penyadapan dalam perkara narkotika hanya dapat dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
   b) Ketua pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti narkotika harus mencantumkan berat bersih (*netto*) terhadap barang bukti narkotika yang telah disita dan dimohonkan persetujuan tersebut. [116]
6) Dalam hal pemeriksaan perkara pidana perikanan;[117]
   a) Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014, perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.
   b) Perkara perikanan diperiksa dan diputus oleh pengadilan perikanan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal diregister.[118]
   c) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.[119]

---

[116] SEMA No 3 Tahun 2023
[117] Pasal 106 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
[118] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
[119] Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Pemilu)

7) Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a) Dalam membacakan putusan, majelis hakim wajib merahasiakan identitas Saksi dan/ atau Korban.

b) Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas Saksi dan/ atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan.

c) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan.

d) Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan diucapkan.

3. LAIN-LAIN

a. Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik sebagaimana prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara pidana biasa.

b. Ketentuan mengenai grasi perkara pidana sektoral mengacu pada ketentuan yang berlaku.[120]

c. Administrasi keuangan perkara pidana sektoral sama dengan administrasi keuangan perkara pidana biasa.

d. Monitoring dan evaluasi perkara pidana sektoral dilaksanakan dengan cara yang sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara pidana biasa.

e. Pemberkasan dan pengarsipan perkara pidana sektoral dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara pidana biasa.

f. Sepanjang tidak diatur berbeda maka berlaku ketentuan pidana umum.

g. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara Pidana Sektoral pada SIP dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai penghapusan/perbaikan data perkara pada SIP perkara pidana biasa.

---

[120] Undang-Undang Grasi No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. (UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi)

III. PERDATA UMUM

RUANG LINGKUP

Yang termasuk dalam pendaftaran perkara perdata antara lain:

a. Perkara Permohonan:

1) Permohonan[121]
   - Permohonan perubahan jenis kelamin
   - Permohonan penetapan orang hilang atau permohonan keadaan tidak hadir (*afwezig*)
   - Permohonan penetapan persamaan nama
   - Permohonan pengampunan

2) Permohonan Administrasi Kependudukan[122] antara lain:
   - Permohonan Perwalian
   - Permohonan Pengangkatan Anak
   - Permohonan Ganti Nama
   - Permohonan Pengakuan Pengesahan
   - dll.

3) Permohonan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas[123] antara lain;
   - Permohonan penetapan pemberian izin pemanggilan RUPS
   - Permohonan pemeriksaan terhadap perseroan
   - Permohonan pembubaran perseroan dan pengangkatan likuidator
   - Permohonan pengangkatan likuidator baru dan pemberhentian likuidator lama

4) Permohonan Konsinyasi[124]

5) Permohonan Keberatan terhadap penetapan ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum[125]

---

[121] KUH Perdata

[122] UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

[123] UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan merupakan ruang lingkup dikarenakan sebagai quasi gugatan

[124] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 1404-pasal 1412 KUH Perdata

[125] Pasal 6 Perma Nomor 3 Tahun 2016 jo Perma 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

b. Gugatan:
   1) Gugatan Biasa
   2) Gugatan Sederhana[126]
   3) Gugatan Perwakilan Kelompok[127]
   4) Gugatan Warga Negara terhadap Negara (*Citizen Law Suit*/CLS):
   5) Gugatan untuk Kepentingan Umum/Hak Gugat Organisasi
c. Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verstek
d. Bantahan :
   1) Bantahan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi (sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi)*(Derden Verzet)*
   2) Bantahan Terhadap Eksekusi oleh Pihak Termohon Eksekusi *(Partij Verzet)*
   3) Bantahan pihak ketiga terhadap penetapan
   4) Bantahan pihak ketiga terhadap putusan
e. Permohonan Eksekusi

A. ADMINISTRASI PERKARA
   1. Administrasi Pendaftaran
      a. Dokumen-dokumen Pendaftaran
         1) Perkara Permohonan
            a) Permohonan[128]
               (1) Surat permohonan;
               (2) Kartu identitas pemohon;
               (3) Surat kuasa (jika ada);
               (4) Surat-surat bukti
            b) Permohonan Administrasi Kependudukan[129]
               (1) Surat permohonan;
               (2) Kartu identitas pemohon;
               (3) Surat kuasa (jika ada);
               (4) Surat-surat bukti.
            c) Permohonan Perseroan Terbatas[130]
               (1) Surat permohonan;

---

[126] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
[127] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
[128] KUH Perdata
[129] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
[130] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(2) Kartu identitas Pemohon;
(3) Surat kuasa (jika ada);
(4) Dalam hal pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah dilegalisir;
(5) Surat-surat bukti.

d) Permohonan Konsinyasi[131] :
(1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdata dan konsinyasi pelaksanaan putusan:
(a) Surat permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat;
(b) Perjanjian dalam hal kreditur menolak pembayaran sesuai isi perjanjian atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);
(c) Surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);
(d) Dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);
(e) Dalam hal pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.
(2) Konsinyasi Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum[132]:
(a) surat permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat;
(b) fotokopi surat keputusan gubernur tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan pemohon sebagai instansi yang memerlukan tanah;

---

[131] Konsinyasi yang lahir dari Perikatan (Pasal 1404-1412 KUH Perdata)
[132] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

(c) fotokopi dokumen untuk membuktikan termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah;

(d) fotokopi dokumen yang menunjukkan tempat tinggal, domisili, atau tempat kedudukan termohon;

(e) fotokopi surat dari penilai publik perihal nilai ganti kerugian;

(f) fotokopi berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;

(g) fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan;

(h) fotokopi surat penolakan termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika telah ada;

(i) fotokopi dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberi ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya;

(j) fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberi ganti kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;

(k) fotokopi surat keterangan bank dan sertifikat hak tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberi ganti kerugian menjadi jaminan di bank; dan

(l) bukti penyetoran uang ganti kerugian ke

rekening pengadilan.

e) Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Ganti Kerugian Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum[133]

(1) identitas pemohon keberatan;
(2) identitas termohon keberatan;
(3) surat permohonan yang memuat:
    (a) penyebutan secara lengkap dan jelas penetapan lokasi pembangunan;
    (b) penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;
    (c) uraian yang menjadi dasar keberatan;
    (d) hal pokok yang dimohonkan.

2) Perkara Gugatan

a) Gugatan Biasa:

(1) surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang;
(2) kartu identitas penggugat;
(3) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);
(4) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);
(5) Dalam hal Penggugat merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

b) Gugatan Sederhana:[134]

(1) surat gugatan sederhana/formulir gugatan sederhana dalam perkara cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (PMH) diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang dengan nilai gugatan materiil sesuai dengan

---

[133] Pasal 6 Perma Nomor 3 Tahun 2016 jo Perma 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

[134] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

ketentuan yang berlaku;[135]

(2) bukti surat yang sudah dilegalisir;

(3) kartu identitas penggugat;

(4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);

(5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);

(6) dalam hal penggugat merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

c) Gugatan Perwakilan Kelompok:[136]

(1) surat gugatan perwakilan kelompok yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang;

(2) kartu identitas penggugat/wakil kelompok;

(3) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);

(4) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);

d) Gugatan Warga Negara terhadap Negara (*Citizen Law Suit/CLS)*:

(1) surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang;

(2) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil;(jika ada)

(3) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);

(4) dalam hal penggugat merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir;

(5) tergugatnya negara.

e) Gugatan untuk Kepentingan Umum/Organisasi:

(1) surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang;

(2) anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas,

---

[135] Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

[136] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen/lingkungan hidup dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya minimal 2 tahun;

(3) kartu identitas penggugat;

(4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil; (jika ada)

(5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah).

3) Perlawanan *(Verzet)* Terhadap Putusan *Verstek:*

(1) permohonan perlawanan;

(2) kartu identitas pelawan;

(3) putusan verstek yang dimohonkan perlawanan;

(4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);

(5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);

(6) dalam hal pelawan merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

4) Bantahan/Perlawanan:

a) Bantahan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi (Sita Eksekusi dan Pelaksanaan Eksekusi)*(Derden Verzet)*:

(1) bantahan pihak ketiga;

(2) kartu identitas pembantah;

(3) penetapan sita eksekusi/penetapan eksekusi;

(4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);

(5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);

(6) dalam hal pembantah merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

b) Perlawanan Terhadap Eksekusi oleh Pihak Termohon Eksekusi *(Partij Verzet):*

(1) gugatan perlawanan;

(2) kartu identitas pembantah;
(3) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);
(4) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);
(5) dalam hal pelawan merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

c) Bantahan Pihak Ketiga Terhadap Penetapan:
(1) Surat bantahan;
(2) kartu identitas pembantah;
(3) penetapan;
(4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);
(5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);
(6) dalam hal pembantah merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

5) Permohonan Eksekusi:
a) surat permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat;
b) kartu identitas pemohon;
c) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT)/risalah lelang/sertifikat hak milik[137]/sertifikat hak tanggungan/sertifikat fidusia/hipotik[138]/*grosse* akta;
d) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);
e) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);
f) dalam hal Pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

---

[137] Berkaitan dengan sertifikat hak milik tersebut, dalam hal telah terjadi peralihan hak milik dalam risalah lelang
[138] Hipotik diperuntukan untuk pesawat terbang dan kapal laut tertentu

6) Salinan dokumen yang dibuat di luar negeri[139] dan selanjutnya dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Bukti awal (surat-surat) yang berupa fotokopi harus diberi meterai dan diunggah pada SIP.
8) Permohonan dan persyaratan pendaftaran perkara bagi masyarakat tidak mampu.[140]

b. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik
1) Pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilaksanakan menggunakan SIP dengan syarat sudah memiliki akun pengguna, serta melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan.[141]
2) Panitera muda perdata melakukan pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahapan sebagai berikut:
a) kepaniteraan perdata melakukan login pada SIP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator; dan
b) petugas memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada SIP.
3) Panitera muda perdata menginformasikan berkas elektronik yang belum lengkap maupun tidak sesuai ke pendaftar melalui domisili elektronik pendaftar dengan melampirkan daftar periksa, supaya pemohon/penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya dengan batas waktu yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari untuk memenuhi kekurangan dokumen tersebut, dalam hal kondisi tertentu ketua pengadilan negeri

---

[139] Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)
[140] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
[141] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Bab II dan III sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

dapat menyimpangi ketentuan waktu tersebut sesuai instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.[142]

4) Terhadap pihak pendaftar yang tidak dapat memenuhi kekurangan/ketidaksesuaian kelengkapan berkas perkara sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan maka panitera muda perdata menyatakan pendaftaran perkara secara elektronik tidak dapat diregister pada SIP, serta memerintahkan kasir untuk melakukan pengembalian panjar perkara melalui rekening pendaftar dengan memperhitungkan biaya transfer.

5) Terhadap kekurangan biaya pendaftaran, kepaniteraan muda perdata meminta tambahan biaya perkara paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan, jika kekurangan biaya pendaftaran tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut di atas, perkara tersebut tidak dapat diregister pada SIP, serta memerintahkan kasir untuk melakukan pengembalian panjar perkara melalui rekening pendaftar dengan memperhitungkan biaya transfer.

6) Terhadap pendaftaran perkara secara elektronik, kepaniteraan muda perdata mengunduh dan menggandakan surat gugatan sebanyak jumlah pihak termohon/tergugat (turut termohon/turut tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik) dengan biaya yang berasal dari panjar biaya perkara.

c. Pendaftaran Perkara secara Manual

Dalam hal pelaksanaan SIP tidak dapat dilaksanakan atau terdapat kendala teknis, pendaftaran dilakukan secara manual sebagai berikut :

1) Pendaftaran perkara dilakukan melalui meja PTSP, surat permohonan/gugatan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan oleh pemohon/penggugat atau kuasanya beserta *softcopynya* kepada petugas penerima berkas, sebanyak jumlah pihak ditambah salinan berkas sebanyak hakim/majelis hakim dan arsip.

---

[142]Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penyampaian Informasi Kekurangan Dokumen Pendaftaran secara Elektronik serta Pengembalian Biaya Panjar Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pengadilan Negeri

2) Pendaftaran perkara yang dilakukan melalui meja PTSP, petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*), dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perdata untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap pada hari yang sama.

3) Panitera muda perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa, supaya pemohon/penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan dalam daftar periksa (*checklist*).

4) Setelah gangguan SIP yang mengakibatkan proses administrasi perkara secara elektronik tidak bisa dilaksanakan berakhir, seluruh proses dan dokumen diinput/diunggah ke dalam SIP[143].

2. Administrasi Keuangan Perkara

a. Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dengan ketentuan:

1) Dalam menentukan besarnya biaya panggilan didasarkan pada kesepakatan Mahkamah Agung dengan PT. POS Indonesia atau lembaga lainnya.

2) Besaran panjar biaya proses pada pengadilan negeri diatur dan ditetapkan dalam surat keputusan ketua pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[144].

3) Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara bagi pengadilan negeri, agar biaya proses dan biaya hak-hak kepaniteraan dirincikan dalam putusan.

4) Pada berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM dalam rangkap 3 (tiga) (untuk pendaftaran secara manual):

---

[143] SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik

[144] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya

a) lembar pertama untuk pemohon/penggugat;
b) lembar kedua untuk kasir;
c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan/gugatan.

5) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.
6) Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM, kemudian SKUM diserahkan kepada pemohon/ penggugat atau kuasanya, agar membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang telah ditunjuk pengadilan negeri (dalam hal perkara diproses secara manual).
7) Kasir menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM setelah menerima bukti pembayaran (dalam hal perkara diproses secara manual).
8) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
9) Nomor halaman buku jurnal menjadi nomor urut perkara yang oleh kasir kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat permohonan/ gugatan permohonan. penomoran perkara dengan memperhatikan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;[145]
10) Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan perkara:
    a) berdasarkan putusan pengadilan menggunakan nomor perkara secara lengkap;
    b) selain putusan pengadilan:
        (1) hak tanggungan, hipotik terhadap pesawat terbang/kapal laut;
        (2) arbitrase;
        (3) fidusia;
        (4) risalah lelang yang mencantumkan irah-irah;
        (5) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

[145] Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022 tentang Standar Penomoran perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

(BPSK);

(6) Komisi Informasi Publik (KIP).

menggunakan nomor buku jurnal keuangan yang bersangkutan jo. Nomor register yang tercatat atas permohonan eksekusi yang diajukan.

b. Petugas pada kepaniteraan muda perdata kemudian melengkapi data pendaftaran perkara pada register perkara perdata, sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/surat permohonan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang kas.

c. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran diantaranya yaitu:

1) perkara *verzet* terhadap putusan *verstek* tidak didaftar sebagai perkara baru dan didaftar melalui SIP;

2) gugatan intervensi didaftar melalui SIP dengan mengikuti register perkara pokok (bukan nomor baru);

3) perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) maupun *partij verzet* didaftarkan sebagai perkara baru.

4) petugas PTSP wajib mencocokkan data pihak pada surat gugatan dengan data yang dicatatkan pada SIP;

5) jika terjadi perbedaan jenis perkara, antara yang didaftar dengan yang tercantum pada surat gugatan, maka petugas PTSP wajib melakukan pembetulan data pada SIP melalui menu yang telah disediakan;

6) jika terdapat perbedaan nama dan jumlah pihak, antara yang terdaftar pada surat gugatan dan SIP, maka petugas PTSP wajib melakukan perubahan pihak pada SIP melalui menu yang telah disediakan.

d. Pengisian pada register elektronik harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

3. Register Perkara

a. Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik melalui SIP.

b. Register yang dicetak dari aplikasi SIP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis

secara manual.[146]

c. Sepanjang register belum terakomodir pada SIP maka tetap dicatatkan secara manual.

d. Register induk perkara perdata pengadilan negeri harus ditandatangani pada halaman pertama dan halaman terakhir, serta dibubuhi paraf pada tiap-tiap halaman dengan menyebutkan jumlah halamannya oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

e. Pencatatan perkara dalam register harus dilakukan dengan tertib dan cermat.

f. Register yang berkaitan dengan buku jurnal, terdiri dari:
   1) Register induk perkara gugatan;
   2) Register induk perkara gugatan sederhana;
   3) Register induk perkara permohonan;
   4) Register induk perkara permohonan konsinyasi;
   5) Register permohonan banding;
   6) Register permohonan kasasi;
   7) Register permohonan peninjauan kembali;
   8) Register permohonan eksekusi;
   9) Register permohonan eksekusi hak tanggungan;
   10) Register permohonan eksekusi tanpa keberatan BPSK;
   11) Register arbitrase nasional;
   12) Register arbitrase internasional.

g. Register induk, harus memuat seluruh data-data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.

h. Buku register setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

i. Register perkara gugatan dan permohonan ditutup setiap bulan, nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk 1 (satu) tahun.

   Cara Penutupan:

   1) Penutupan register setiap akhir bulan, ditandatangani oleh petugas register, dengan rincian sebagai berikut:

      Sisa bulan lalu :..... perkara.

      Masuk bulan ini :..... perkara.

---

[146] Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022

Putus bulan ini :..... perkara.

Sisa bulan ini :..... perkara.

Setelah penutupan pada akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor 1.

2) Penutupan register setiap akhir tahun, ditandatangani oleh panitera dan diketahui ketua pengadilan negeri, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa tahun lalu : ..... perkara.

Masuk tahun ini : ..... perkara.

Putus tahun ini : ..... perkara.

Sisa tahun ini : ..... perkara.

j. Register banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi ditutup setiap akhir tahun, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Sisa tahun lalu : ..... perkara.

Masuk tahun ini : ..... perkara.

Putus tahun ini : ..... perkara.

Sisa tahun ini : ..... perkara.

Sisa akhir : ..... perkara.

Sudah dikirim : ..... perkara.

Belum dikirim : ..... perkara.

k. Pencatatan urusan-urusan pelaksanaan tugas-tugas diluar kepaniteraan muda perdata yang menyangkut tentang urusan-urusan dilaksanakan oleh kepaniteraan muda hukum dan berada di bawah pengawasan panitera. Urusan-urusan dimaksud adalah:

1) Register catatan sipil;
2) Register penerimaan/penolakan waris;
3) Register perjanjian kawin;
4) Register akta dibawah tangan *(waarmerking);*
5) Register surat kuasa;
6) Register surat keterangan;
7) Register pengaduan;
8) Register permohonan informasi publik.

4. Kompetensi[147]
   a. Kompetensi adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara baik absolut maupun relatif.
   b. Terhadap putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili baik absolut maupun relatif, lalu selanjutnya diajukan upaya hukum dan putusan upaya hukum, pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili, maka nomor perkara tetap menggunakan perkara yang didaftarkan pertama kali pada pengadilan.
   c. Terkait biaya perkara yang sudah ditutup jurnal keuangannya dan uang sudah dikembalikan ke pemohon maka pemohon wajib menambahkan panjar biaya perkara banding dan dicatat pada buku jurnal banding di pengadilan negeri sesuai dengan besaran panjar yang ditetapkan oleh ketua pengadilan tersebut.
   d. Pada saat pengadilan negeri mengirimkan kembali berkas ke pengadilan tinggi, wajib menginformasikan/melaporkan jumlah perincian biaya perkara yang dikeluarkan untuk melaksanakan perintah dalam amar putusan sela pengadilan tinggi.
5. Monitoring dan Evaluasi
   a. Pengadilan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan negeri paling sedikit 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik.
   b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan tinggi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik.
6. Pemberkasan Perkara dan Arsip Perkara
   a. Berkas Perkara

      Dalam hal putusan yang telah BHT agar segera dibuat pemberkasan oleh petugas kepaniteraan muda. Putusan tersebut segera dilekatkan dengan berkas-berkas perkara yang disebut "Bundel A". "Bundel A" adalah merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan proses penyidangan/pemeriksaan

[147] SEMA Nomor 1 Tahun 2022

perkara tersebut, yang selalu disimpan di pengadilan negeri yang terdiri dari:

1) Pemberkasan perkara perdata gugatan/permohonan (Bundel A):[148]
   a) surat gugatan/permohonan:
      (1) surat gugatan/permohonan;
      (2) perbaikan surat gugatan (jika ada).
   b) surat kuasa/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
   c) penetapan penunjukan hakim/majelis hakim;
   d) penunjukan panitera pengganti majelis;
   e) penunjukan jurusita/jurusita pengganti;
   f) penetapan hari sidang;
   g) relaas-relaas panggilan/*e-summon*;
   h) penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan hasil mediasi (jika ada);
   i) *court calendar*;
   j) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan);
   k) jawaban;
   l) replik (jika ada);
   m) duplik (jika ada);
   n) permohonan intervensi (jika ada);
   o) putusan sela (jika ada);
   p) penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);
   q) surat bukti/alat bukti lainnya penggugat (jika ada);
   r) surat bukti/alat bukti lainnya tergugat (jika ada);
   s) surat bukti/alat bukti lainnya intervenient (jika ada);
   t) berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
   u) simpulan penggugat (jika ada);
   v) simpulan tergugat (jika ada);
   w) simpulan intervenient (jika ada);
   x) penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada);
   y) surat lainnya (jika ada).

---

[148] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bundel B yang berkaitan dengan adanya permohonan banding yang pada akhirnya akan menjadi arsip berkas pengadilan tinggi adalah merupakan surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan pernyataan banding, serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya permohonan banding yang terdiri atas:[149]
   a) salinan sah putusan;
   b) surat kuasa khusus/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
   c) akta banding;
   d) pemberitahuan/*e-summon* banding;
   e) memori banding (jika ada);
   f) pemberitahuan/*e-summon* memori banding (jika ada);
   g) kontra memori banding (jika ada);
   h) pemberitahuan/*e-summon* kontra memori banding (jika ada);
   i) pemberitahuan/*e-summon inzage*;
   j) bukti *e-payment* biaya banding (jika ada);
   k) surat lainnya (jika ada).
3) Bundel B yang akan menjadi arsip berkas perkara baik secara manual maupun elektronik pada Mahkamah Agung (kasasi), terdiri dari:
   a) relaas-relaas pemberitahuan isi putusan banding kepada kedua belah pihak;
   b) akta permohonan kasasi;
   c) surat kuasa khusus dari pemohon kasasi (bila ada);
   d) memori kasasi;
   e) relaas pemberitahuan kasasi kepada pihak termohon kasasi;
   f) relaas pemberitahuan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi;
   g) kontra memori kasasi (bila ada);
   h) relaas pemberitahuan kontra memori kasasi

[149] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada pihak pemohon kasasi;

i) salinan sah putusan pengadilan tinggi;

j) tanda bukti setoran biaya kasasi yang sah dari bank;

k) surat-surat lain apabila ada.

4) Bundel B yang akan menjadi arsip berkas perkara secara manual maupun elektronik pada Mahkamah Agung (peninjauan kembali) terdiri dari:

a) relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung (terutama kepada pemohon peninjauan kembali atau relaas pemberitahuan isi putusan banding bila permohonan peninjauan kembali itu diajukan atas putusan pengadilan tinggi, relaas pemberitahuan putusan pengadilan negeri jika diajukan atas putusan pengadilan negeri);

b) akta permohonan peninjauan kembali;

c) surat permohonan peninjauan kembali, dilampiri dengan surat bukti;

d) tanda terima surat permohonan peninjauan kembali;

e) surat kuasa khusus (jika ada);

f) surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak termohon peninjauan kembali;

g) jawaban surat permohonan peninjauan kembali;

h) novum (jika ada);

i) berita acara sumpah (jika ada novum);

j) putusan yang bertentangan (jika ada);

k) salinan sah putusan pengadilan negeri;

l) salinan sah putusan pengadilan tinggi;

m) salinan sah putusan mahkamah agung;

n) tanda bukti setoran biaya dari bank;

o) surat-surat lain apabila ada.

Untuk mengantisipasi hilangnya berkas perkara maka pengadilan wajib melakukan alih media (*scanning*) terhadap keseluruhan dokumen serta dilakukan unggah pada SIP.

5) Peninjauan kembali kedua hanya dapat diajukan jika memenuhi syarat yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
Bundel B yang akan menjadi arsip berkas perkara secara manual maupun elektronik pada Mahkamah Agung (peninjauan kembali kedua) terdiri dari:[150]
   a) relaas pemberitahuan putusan yang terakhir dan dianggap bertentangan;[151]
   b) akta permohonan peninjauan kembali;
   c) surat permohonan peninjauan kembali, dilampiri dengan surat bukti;
   d) tanda terima surat permohonan peninjauan kembali;
   e) surat kuasa khusus (jika ada);
   f) surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak termohon peninjauan kembali;
   g) jawaban surat permohonan peninjauan kembali (jika ada);
   h) putusan yang saling bertentangan;
   i) salinan sah putusan pengadilan negeri;
   j) salinan sah putusan pengadilan tinggi;
   k) salinan sah putusan Mahkamah Agung;
   l) tanda bukti setoran biaya dari bank;
   m) surat-surat lain diantaranya putusan yang saling bertentangan yang salah satunya putusan peninjauan kembali.

   Untuk mengantisipasi hilangnya berkas perkara maka pengadilan wajib melakukan alih media (*scanning*) terhadap keseluruhan dokumen serta dilakukan unggah pada SIP.
6) Setelah pengadilan pengaju menerima berkas perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tinggi/ Mahkamah Agung (kasasi/peninjauan kembali), pengadilan

---

[150] Sema 1 Tahun 2014 dan SK Panitera MA No 821 tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014
[151] Surat Edaran Panitera Nomor 2196 Tahun 2023 Tangal 02 November 2023

pengaju melakukan pemberitahuan putusan pengadilan tinggi/Mahkamah Agung (kasasi/peninjauan kembali) kepada para pihak.

b. Arsip Perkara[152]

1) Penyimpanan Arsip Perkara Manual

a) Persiapan Arsip

Berkas perkara diserahkan kepada panitera muda hukum paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkekuatan hukum tetap.

Sebelum berkas perkara ditempatkan pada ruang arsip, Panitera Muda Hukum melakukan pemeriksaan terhadap:

(1) identitas dan nomor perkara;
(2) jenis perkara;
(3) kelengkapan dokumen;
(4) urutan dokumen;
(5) tanggal dan status penyelesaian perkara;
(6) status upaya hukum;
(7) kondisi fisik berkas;
(8) kesesuaian antara berkas dengan data pada sistem informasi penelusuran perkara.

Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada panitera muda terkait untuk dilengkapi sebelum diserahkan untuk penyimpanan.

b) Pengelompokan Arsip

Arsip perkara dikelompokkan paling sedikit berdasarkan:

(1) Jenis Perkara
   (a) perdata;
   (b) perdata khusus; dan
   (c) jenis perkara lainnya sesuai kewenangan pengadilan.

(2) Tahun Perkara

Dalam masing-masing jenis perkara, arsip dikelompokkan berdasarkan tahun

[152] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

pendaftaran atau tahun penyelesaian sesuai dengan sistem klasifikasi yang ditetapkan.

(3) Nomor Perkara

Dalam setiap kelompok tahun, arsip disusun secara berurutan berdasarkan nomor perkara.

c) Penempatan dalam Box Arsip

Berkas perkara ditempatkan dalam box arsip dengan memperhatikan:

(1) jenis perkara;
(2) tahun;
(3) urutan nomor perkara;
(4) kapasitas box;
(5) kondisi fisik arsip; dan
(6) kemudahan pengambilan kembali.

1 (satu) box sedapat mungkin tidak mencampurkan jenis perkara dan tahun yang berbeda.

Setiap box diberikan identitas yang paling sedikit memuat:

PENGADILAN :
JENIS PERKARA :
TAHUN :
NOMOR PERKARA : ... s.d. ...
NOMOR BOX :
JUMLAH BERKAS **:**

d) Penomoran Box

Setiap box diberikan nomor unik dan dicatat dalam Daftar Arsip Perkara.

Contoh:

PDT/2026/001

yang berarti:

- PDT = Perdata;
- 2026 = tahun;
- 001 = nomor urut box.

e) Ruang Penyimpanan

Ruang arsip perkara harus:

(1) digunakan secara terkendali;
(2) memiliki pembatasan akses;

(3) mempunyai ventilasi dan pencahayaan yang memadai dengan tetap memperhatikan perlindungan arsip;
(4) terhindar dari kebocoran dan kelembapan berlebih;
(5) terlindungi dari hama;
(6) memiliki sarana pengamanan kebakaran;
(7) terlindungi dari risiko banjir;
(8) dijaga kebersihannya; dan
(9) ditata agar memungkinkan proses evakuasi arsip dalam keadaan darurat.

f) Pengamanan

Akses ke ruang arsip hanya diberikan kepada petugas yang ditunjuk.

Setiap pengeluaran arsip dari ruang penyimpanan harus tercatat.

Dilarang:

(1) membawa arsip keluar tanpa izin;
(2) mengubah atau mengganti isi berkas;
(3) mengambil dokumen dari berkas;
(4) memberikan arsip kepada pihak yang tidak berwenang;
(5) makan, minum, atau merokok di ruang penyimpanan; dan
(6) melakukan tindakan lain yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan arsip.

2) Penyimpanan Arsip Perkara Elektronik

a) Prinsip Umum

(1) Kepaniteraan muda hukum wajib melakukan alih media terhadap seluruh berkas perkara dan mencatatkannya pada SIP.
(2) Panitera Muda Hukum melakukan penyimpanan arsip perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(3) Arsip perkara elektronik dikelola secara terintegrasi dengan SIP.
(4) SIP menjadi sarana utama dalam pengelolaan,

pencatatan, penelusuran, dan penyediaan informasi mengenai arsip elektronik perkara sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditetapkan.

b) Pendataan arsip perkara pada SIP

Isikan data arsip yang terdiri atas :

(1) Nomor Ruang
(2) Nomor Rak/Lemari
(3) Nomor Tingkat/Laci
(4) Nomor Box
(5) Nomor Arsip
(6) Nomor Perkara
(7) Tanggal masuk
(8) Staf yang menyerahkan berkas
(9) Petugas yang menerima berkas
(10) Status
(11) E-Doc Arsip
(12) Keterangan

c) Format dan pengarsipan dokumen

(1) Dokumen arsip perkara elektronik yang diunggah ke dalam SIPP menggunakan format Portable Document Format (PDF) atau format lainnya
(2) Dokumen elektronik harus memiliki kualitas sebagai berikut :
    (a) terbaca dengan jelas;
    (b) lengkap;
    (c) tidak terpotong;
    (d) sesuai dengan dokumen sumber;
    (e) dapat ditelusuri; dan
    (f) dapat digunakan kembali sepanjang masih mempunyai nilai guna.
(3) Dalam hal diperlukan untuk efisiensi penyimpanan, dokumen dapat dilakukan kompresi sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang ditetapkan dalam pengelolaan SIP.
(4) Kompresi tidak boleh mengurangi keutuhan,

keterbacaan, autentisitas, dan integritas dokumen.

(5) Pada Tingkat pertama dokumen arsip perkara dalam SIP diunggah mulai dari dakwaan/petitum sampai putusan yang sudah ditandatangani, sesuai kewenangan dan diperbarui apabila terdapat dokumen upaya hukum;

(6) Pada Tingkat banding dokumen arsip perkara dalam SIP diunggah sesuai daftar bundel B serta putusan tingkat banding yang sudah ditandatangani, sesuai kewenangan;

d) Pemutakhiran Arsip Elektronik

(1) Arsip elektronik perkara wajib dimutakhirkan apabila terdapat dokumen baru yang menjadi bagian dari rangkaian penyelesaian perkara.

(2) Pemutakhiran terutama dilakukan apabila terdapat:

(a) upaya hukum;

(b) putusan pada tingkat upaya hukum;

(c) pelaksanaan putusan;

(d) eksekusi; atau

(e) dokumen lain yang berdasarkan ketentuan wajib menjadi bagian dari arsip perkara.

(3) Pemutakhiran tidak boleh menghapus rekam jejak dokumen atau data yang telah mempunyai nilai arsip, kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah.

e) Penemuan Kembali Arsip

(1) SIP menjadi sarana utama penelusuran arsip elektronik perkara berdasarkan nomor perkara

(2) Penelusuran arsip melalui SIP dapat ditemukan setidaknya kurang dari 3 menit

f) Keterhubungan dengan Arsip Manual

(1) Arsip elektronik dalam SIP dan arsip perkara manual harus mempunyai identitas perkara yang sama.

(2) Nomor perkara menjadi identitas utama untuk menghubungkan arsip elektronik dengan arsip manual.

(3) Informasi mengenai lokasi penyimpanan arsip manual dapat dihubungkan dengan data perkara dalam SIP.

(4) Informasi lokasi paling sedikit meliputi:

(a) ruang arsip;

(b) rak;

(c) tingkat rak;

(d) nomor box

3) Peminjaman, Pemindahan dan Retensi Arsip Perkara

a) Peminjaman Arsip Perkara

(1) Prosedur peminjaman berkas harus dipublikasikan oleh panitera muda hukum

(2) Panitera muda hukum meneliti permohonan peminjaman arsip perkara

(3) Peminjaman berkas harus menggunakan form peminjaman yang disetujui oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan

(4) Batas waktu peminjaman arsip maksimal 3 (tiga) hari dan jika masih dipinjam, dicatat perpanjangan peminjaman 3 (tiga) hari setelahnya

(5) Data Peminjaman arsip perkara wajib dicatat pada SIP atau dicatat secara manual pada buku bantu

(6) Setelah berkas dikembalikan data pengembaliannya wajib dicatat dalam SIP

b) Pemindahan Arsip Perkara

(1) Dalam hal gedung pengadilan sedang diperbaiki atau direlokasi, arsip perkara dapat dipindahkan ke lokasi lainnya

(2) Pemindahan berkas dari ruangan arsip harus

menggunakan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan

(3) Berita Acara pemindahan arsip setidak-tidaknya memuat nomor kotak penyimpanan perkara, nomor perkara yang sesuai dengan nomor perkara yang ditempelkan pada kotak tersebut dan menyebutkan jumlah keseluruhan kotak dan berkas yang dipindahkan (misal: 100 kotak dengan berkas sejumlah 1000 nomor perkara)

(4) Pemindahan arsip dilaksanakan dengan cermat dan penuh kehati-hatian agar tidak merusak kondisi fisik arsip.

c) Retensi Arsip Perkara

(1) Jika ruang arsip sudah tidak memungkinkan untuk penyimpanan arsip perkara baru, maka arsip perkara yang sudah berusia 30 tahun ke atas dapat diajukan untuk proses retensi dan dialihkan pemeliharaannya kepada Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) atau lembaga arsip daerah

(2) Proses retensi untuk arsip perkara yang sudah berusia 30 tahun keatas hanya dapat dilakukan jika sudah mendapat izin dari Pengadilan Tinggi terkait dan harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima Arsip Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berita Acara dan izin Pengadilan Tinggi tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

(3) Arsip perkara tidak dapat dimusnahkan dengan alasan apapun[153]

4) Dalam hal arsip berkas perkara mengalami kondisi tingkat kerusakan diatas 80% (delapan puluh persen) dan sudah dialihmediakan dalam bentuk elektronik

[153] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

atau digital maka dapat dilakukan pemusnahan dengan prosedur sebagai berikut:[154]

(a) Pengadilan negeri yang bersangkutan wajib mengajukan izin tertulis kepada ketua pengadilan tinggi yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

(b) Pengadilan tinggi yang bersangkutan wajib mengajukan izin tertulis kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

(c) Jika izin sudah diberikan oleh ketua pengadilan tinggi kepada pengadilan negeri atau Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada pengadilan tinggi dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan arsip berkas perkara, maka pemusnahan dapat dilakukan oleh panitera dengan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri/pengadilan tinggi.

5) Dalam hal arsip berkas perkara mengalami kondisi tingkat kerusakan diatas 80% (delapan puluh persen) namun belum dialihmediakan dalam bentuk elektronik atau digital maka tidak dapat dilakukan pemusnahan dan satuan kerja wajib mendokumentasikan kondisi berkas tersebut sebagai bukti jika salah satu pihak meminta atau menanyakan.

7. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara pada SIP

a. Penghapusan/Perbaikan data perkara selain putusan pada SIP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Data yang diajukan untuk dihapus adalah data yang disebabkan karena adanya kesalahan pengisian dan duplikasi data perkara.

2) - Perbaikan data SIPP dilakukan menggunakan akun Ketua/Wakil Ketua
- Perbaikan data e-Berpadu dan e-Court dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

[154] Hasil Rapim tanggal 13 Agustus 2026

atau Badan Urusan Administrasi melalui Biro Hukum Humas Mahkamah Agung.

3) Membuat berita acara penghapusan data perkara yang ditandatangani oleh panitera, panitera muda, dan kepala subbagian PTIP.

Untuk setiap penghapusan data perkara yang sudah dilakukan pada SIP harus dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan penghapusan data kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mencegah terjadinya gagal sinkronisasi dikarenakan adanya perbedaan data antara server local pengadilan dan server Mahkamah Agung.

b. Penghapusan/Perbaikan data perkara putusan yang sudah terpublikasi, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Jika kesalahan putusan terdapat pada amar, maka tidak dapat dihapus tetapi dilakukan upaya hukum.

2) Selain kesalahan putusan pada amar, maka dapat dilakukan perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Hapus terlebih dahulu e-doc dan metadata yang ada di Direktori Putusan.
- Gunakan akun admin masing-masing satker untuk hapus data putusan dan e-docnya di Direktori Putusan.
- Perbaiki *e-doc* putusan dan metadata amar putusan yang ada di SIPP.
- Sinkronkan ulang data putusan SIPP (data yang sudah dipastikan benar) dengan Direktori Putusan (menggunakan antrian Direktori Putusan).
- Sinkron tidak dapat dilakukan (*replace*) jika pada direktori putusan masih terdapat data Direktori Putusan dengan nomor perkara yang sama.

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Persiapan Persidangan

a. Penunjukan Hakim/Majelis Hakim

1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas gugatan/permohonan diregister, ketua pengadilan

negeri wajib menetapkan hakim/majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut, kecuali ditentukan lain.

2) Dalam hal ketua pengadilan berhalangan, penetapan hakim/majelis hakim dilimpahkan kepada wakil ketua atau hakim senior/hakim lain yang ditunjuk. Berdasarkan surat penunjukan Plt/Plh maka admin SIP pengadilan negeri membuka kewenangan untuk penunjukan hakim pada akun hakim tersebut sampai dengan berakhirnya penunjukan Plh/Plt tersebut;

3) Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang hakim atau lebih dengan jumlah ganjil (kecuali undang-undang menentukan lain), dengan ketentuan:

a) ketua pengadilan negeri dan wakil ketua pengadilan negeri menjadi ketua majelis dalam suatu perkara;

b) ketua majelis adalah hakim senior atau hakim lain yang ditunjuk oleh ketua pengadilan;

c) susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu;

d) untuk memeriksa perkara-perkara tertentu, ketua pengadilan negeri dapat membentuk majelis khusus;

e) hakim/majelis hakim dibantu oleh seorang atau lebih panitera pengganti;

f) penetapan hakim/majelis hakim dilakukan dengan menggunakan *smart* majelis[155] pada sip dan dicetak serta ditandatangani selanjutnya diunggah pada SIP.

b. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

1) Setelah ditetapkan hakim/majelis hakim oleh ketua pengadilan, panitera pengadilan negeri wajib menunjuk panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan selanjutnya diunggah pada SIP.

---

[155] Ketua Pengadilan dapat meninjau majelis hakim yang ditunjuk smart Majelis dengan mencantumkan alasan dalam smart majelis tersebut

2) Dalam hal panitera pengadilan negeri berhalangan, wewenang penunjukan dilimpahkan kepada Plh/Plt panitera untuk menunjuk panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti, dilakukan dengan menggunakan sip dan dicetak serta ditandatangani. Berdasarkan surat penunjukan Plt/Plh maka admin SIP pengadilan negeri membuka kewenangan untuk penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti pada akun pejabat yang ditunjuk tersebut sampai dengan berakhirnya penunjukan Plh/Plt.

c. Penetapan hari Sidang

1) Panitera muda perdata dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti, wajib menyerahkan berkas perkara kepada hakim/majelis hakim yang telah ditetapkan.

2) Hakim/majelis hakim mempelajari berkas dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menetapkan hari sidang.

3) Penetapan hari sidang dilakukan dengan menggunakan SIP dan dicetak serta ditandatangani selanjutnya diunggah pada SIP.

4) Hakim/majelis hakim wajib membuat rencana persidangan (*court calendar*) yang ditandatangani oleh hakim/majelis hakim dan para pihak, serta diunggah dalam SIP setelah mediasi dinyatakan gagal atau tidak dapat dilaksanakan.[156]

5) Penetapan hari sidang perkara gugatan, selalu dimusyawarahkan dengan sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing.

6) Hakim/ketua majelis dalam menetapkan hari sidang, lamanya tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan hari sidang paling singkat 3 (tiga) hari kerja[157].

---

[156] Perma No. 1 Tahun 2016

[157] Pasal 122 HIR / Pasal 146 RBg

2. Panggilan Para Pihak[158]

   a. Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
      1) penggugat;
      2) tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;
      3) tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau
      4) para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.
   b. Apabila tergugat atau pihak lain yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilaksanakan secara elektronik tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.
   c. Panggilan bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.[159]
   d. Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik. Dalam hal domisili elektronik para pihak yang berkediaman di luar negeri tersebut tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku (rogatori).[160]
   e. Bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui *situs web* pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik.
   f. Panggilan elektronik tidak dikenai biaya.
   g. Panggilan secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

---

[158] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

[159] SEMA No 1 Tahun 2023

[160] Surat Edaran Mahkamah Agung MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tanggal 11 Mei 1991 jo Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata, Nomor PRJ/HI/102/02/1018/01 Nomor 01/NK/MA/2/2018 tertanggal 22 Februari 2018

1) jurusita/jurusita pengganti melakukan login pada SIP sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator;
2) jurusita/jurusita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik;
3) jurusita/jurusita pengganti mengirim panggilan melalui SIP ke domisili elektronik para pihak; dan
4) panggilan sidang melalui SIP ke domisili elektronik para pihak, harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal sidang.

h. Panggilan melalui surat tercatat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1) jurusita/jurusita pengganti mencetak relaas dari SIP;
2) relaas panggilan yang dicetak dari SIP tersebut selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada tergugat melalui surat tercatat; dan
3) panggilan sidang melalui surat tercatat harus dikirim kepada tergugat paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat berdasarkan lacak kiriman paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang.

i. Dalam hal panggilan melalui surat tercatat dikembalikan dikarenakan alamat tidak diketahui/tidak terverifikasi, maka hakim/majelis hakim melakukan klarifikasi kepada penggugat di persidangan terhadap alamat yang tidak diketahui/tidak terverifikasi tersebut, dan setelah diberitahukan, penggugat mengubah alamat yang tertera dalam surat gugatan, kemudian hakim/majelis hakim melakukan panggilan ke alamat yang baru atau panggilan umum sesuai hasil klarifikasi dari penggugat.

j. Untuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*):[161]
1) pemanggilan terhadap perwakilan kelompok (penggugat) atau kuasanya dan tergugat dilakukan melalui panggilan elektronik atau surat tercatat;

---

[161]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan PERMA 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

2) cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan, sepanjang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;
3) pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:
   a) segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
   b) penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan;
4) pemberitahuan memuat:
   a) nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
   b) penjelasan singkat tentang kasus;
   c) penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
   d) penjelasan dan implikasi keturut-sertaan sebagai anggota kelompok;
   e) penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
   f) penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam formulir Lampiran II Peraturan Mahkamah Agung[162];
   g) penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
   h) apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
   i) formulir isian tentang pernyataan keluar anggota

[162] Formulir Lampiran 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

kelompok diatur sesuai dengan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung;[163]

j) penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

5) pemberitahuan yang dimaksud di atas membuat mekanisme pernyataan keluar;

6) Mekanisme pernyataan keluar adalah:

a) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok, dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Agung;[164]

b) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok.

7) anggota kelompok yang menyatakan keluar dapat mengajukan gugatan tersendiri terhadap kerugian yang dialaminya;

8) surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama, harus menyebutkan penyerahan salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat, bahwa tergugat boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang;

9) bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/ elektronik;[165]

10) jika pihak yang dipanggil telah meninggal dunia,

---

[163] lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

[164] lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

[165] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

panggilan dilakukan kepada ahli warisnya dan bila ahli warisnya tidak dikenal, maka melalui kepala desa atau tempat tinggal terakhir almarhum;

11) panggilan terhadap termohon / tergugat yang berada di luar negeri, disampaikan ke Mahkamah Agung untuk diteruskan ke Kementerian Luar Negeri untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.[166]

3. Persidangan

a. Perkara perdata di pengadilan negeri harus diputus dan diminutasi dalam waktu 5 (lima) bulan sejak tidak tercapainya mediasi.[167] Jika melampaui jangka waktu tersebut, ketua majelis melaporkan keterlambatan beserta alasannya kepada ketua pengadilan negeri dengan tembusan kepada ketua pengadilan tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.

b. Sidang pengadilan dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat. Dalam keadaan tertentu, sidang dapat dimulai pada waktu yang lain, namun hal itu harus diumumkan terlebih dahulu

c. Rencana persidangan *(court calendar)* dibuat pada saat sidang pertama setelah mediasi gagal dan ditandatangani oleh para pihak, hakim/ketua majelis hakim dan panitera pengganti serta diunggah pada SIP, pengecualian terhadap jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi maka *court calendar* dibuat pada sidang pertama.

d. Apabila sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, sidang ditunda dan diberitahukan kepada para pihak.

e. Apabila ketua majelis yang ditunjuk berhalangan sementara untuk bersidang, pemeriksaan perkara harus ditunda dalam persidangan oleh salah satu hakim anggota dan apabila berhalangan tetap, ketua pengadilan negeri menunjuk ketua

---

[166] Surat Edaran Mahkamah Agung MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tanggal 11 Mei 1991 jo Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Surat Regatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata, Nomor NK/HI/01/02/2013/58 dan Nomor 162/PAN/HK.00/11/2013, tanggal 19 Februari 2013

[167] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

majelis yang baru dengan penetapan.

f. Apabila salah seorang hakim anggota majelis berhalangan sementara ataupun tetap, ketua pengadilan negeri dengan penetapan menunjuk hakim lain sebagai pengganti.

g. Penetapan kembali ketua majelis dan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dilakukan melalui SIP, serta dicetak dan ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri.

h. Sidang pengadilan harus dilaksanakan di ruang sidang kecuali persidangan secara elektronik, dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, sidang sedapat mungkin dibuka dan ditutup di kantor kepala desa/lurah yang bersangkutan.

i. Terhadap sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, dalam pencatatan pada SIP panitera pengganti wajib untuk memberikan status sidang di luar gedung pengadilan/ sidang keliling pada jadwal sidang yang telah ditentukan.

j. Sidang pemeriksaan perkara harus terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan lain dalam undang-undang atau peraturan lain yang bersangkutan.[168]

k. Penambahan biaya perkara harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan. Penambahan tersebut dibayarkan melalui *virtual account* yang didapat dari SIP dan harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan *generate*. Apabila *virtual account* tidak dapat digunakan ataupun sudah melebihi batas waktu 1 (satu) hari maka Kepaniteraan Perdata melakukan *generate* ulang *virtual account* dan menginformasikannya kepada pihak. Apabila sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan penambahan biaya perkara tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dibuat penetapan yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti. Penetapan tersebut selanjutnya dicatatkan pada SIP dan dicatat pencoretannya dalam buku register induk perkara dan buku jurnal,

---

[168] Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

selanjutnya diberitahukan kepada para pihak[169] (dalam hal perkara diproses secara manual/*hybrid*).

l. Dalam hal biaya perkara kurang, sedangkan proses sudah berjalan pada tahap pembuktian, tergugat dapat menambah biaya perkara apabila bersedia (dalam hal perkara diproses secara manual/*hybrid*).

m. Pelaksanaan persidangan secara elektronik:[170]

1) Hakim/ketua majelis meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada tergugat, kecuali tergugat diwakili oleh advokat.

2) Persetujuan persidangan secara elektronik dituangkan dalam berita acara sidang.

3) Dalam hal terdapat tergugat/turut tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik, persidangan elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui, sedangkan tergugat/turut tergugat yang tidak menyetujui menyerahkan jawaban, duplik, dan simpulan kepada panitera pengganti melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP oleh panitera pengganti pada hari sidang tersebut.

4) Dalam hal penanganan perkara harus dilakukan mediasi, maka mengacu pada aturan terkait.[171]

5) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan dilakukan dengan prosedur:[172]

a) para pihak menyampaikan dokumen elektronik dan/ atau dokumen cetak bagi tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

---

[169] Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1967 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya.

[170] Pasal 22, 23, 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

[171] PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan, SK KMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

[172] SK KMA Nomor 363 Tahun 2022

b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik dan/ atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, hakim/hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak; dan

c) perubahan/perbaikan gugatan/permohonan:
   (1) perubahan/perbaikan gugatan/permohonan diajukan melalui sip paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban;
   (2) perubahan permohonan yang bersifat volunter dapat diajukan paling lambat sebelum pembuktian.

d) dokumen jawaban yang disampaikan oleh tergugat dan diunggah ke SIP;[173]

e) Dokumen elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh jurusita kepada tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik dengan cara:
   (1) dalam hal tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat;
   (2) dalam hal domisili elektronik para pihak tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/ pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

6) Setelah majelis hakim menerima laporan mediasi gagal, hakim/ketua majelis, selanjutnya ketua majelis membuat penetapan kembali hari sidang.

7) Pada hari sidang setelah mediasi gagal, majelis dan para pihak menyepakati *court calender*.

8) Panitera pengganti mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang.

9) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik atau dokumen cetak bagi tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik sesuai

---

[173] Apabila dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi mengenai kewenangan maka tergugat dapat mengunggah bukti awal dalam SIP

dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian majelis hakim/hakim dianggap tidak menggunakan haknya.

10) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
11) Pihak ketiga tersebut wajib mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan persidangan secara elektronik.
12) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
13) Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh panitera pengganti ke dalam SIP.
14) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.
15) Persidangan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan.[174]
16) Segala biaya yang timbul dari persidangan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.[175]

n. Untuk gugatan perwakilan kelompok:[176]
   1) pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok;
   2) hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok;
   3) sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
   4) apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka

---

[174] SK KMA Nomor 363 Tahun 2022
[175] SK KMA Nomor 363 Tahun 2022
[176] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan PERMA 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;

5) apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

o. Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, dalam hal penanganan perkara harus dilakukan mediasi, maka mengacu pada aturan terkait mediasi.[177]

p. Apabila dalam sidang pertama tergugat atau salah satu tergugat tidak hadir, sidang harus diundur dengan memerintahkan untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir tersebut.

q. Panitera pengganti yang menangani perkara tersebut wajib mengisi penundaan jadwal sidang pada SIP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang berlangsung.

r. Meja kepaniteraan muda perdata wajib melakukan pencatatan pada register induk, berdasarkan informasi yang tersedia pada SIP.

4. Berita Acara Persidangan

a. Ketua majelis dan panitera pengganti bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran isi berita acara persidangan serta menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.

b. Panitera pengganti wajib membuat berita acara sidang dan kemudian ditandatangani ketua majelis sesuai dengan template pada SIP, dengan memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu mengenai waktu dan tempat persidangan, susunan persidangan, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas, serta tanggal penundaan sidang berikutnya.

c. Berita acara sidang yang sudah ditandatangani oleh ketua

---

[177] PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan, SK KMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

majelis hakim dan panitera pengganti wajib diunggah pada SIP.

d. Pada waktu musyawarah majelis hakim semua berita acara harus sudah selesai dibuat dan ditandatangani, serta digunakan sebagai bahan musyawarah majelis hakim yang bersangkutan.

e. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan/penetapan. putusan/penetapan ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada dan ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

f. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani Berita Acara Sidang (BAS). BAS ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada, jika hakim anggota juga berhalangan tetap, maka ketua pengadilan menandatangani karena jabatan dengan menyebutkan alasannya.

g. Dalam hal panitera pengganti berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan/penetapan dan BAS. putusan/penetapan dan BAS ditandatangani oleh panitera dengan menyebutkan alasannya.

5. Rapat Permusyawaratan

a. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.[178]

b. Ketua Majelis memberi kesempatan pertama kepada hakim anggota paling junior untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim anggota senior dan terakhir ketua majelis akan menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat harus dikemukakan dengan jelas dengan menunjuk dasar hukum.

c. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya terhadap perkara yang sedang diperiksa dan dalam hal tidak dicapai mufakat, pendapat hakim yang berbeda/*dissenting opinion* wajib dimuat dalam putusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

6. Putusan

a. Putusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat.

---

[178] Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Apabila mengenai sesuatu masalah terdapat perbedaan pendapat (dalam hal ada 3 (tiga) pendapat yang berlainan dalam 1 (satu) majelis) maka masalah tersebut dapat disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dicarikan jalan keluar.

b. Putusan serta merta *(uitvoerbaar bij vooraad)* dapat dijatuhkan, setelah dipertimbangkan secara seksama,[179] sebelum putusan diucapkan terlebih dahulu dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri.

c. Pada waktu putusan diucapkan, pada hari yang sama dicatatkan pada SIP, serta putusan sesegera mungkin diminutasi paling lambat 14 (empat belas) hari.

d. Dalam hal gugatan perwakilan kelompok maka putusan harus paling kurang berisikan:

Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan oleh pengadilan, maka majelis hakim wajib memutuskan dalam putusannya:

1) mengadili dalam hal prosedural;
2) mengadili dalam pokok perkara dengan amar putusan:
   a) jumlah ganti rugi secara rinci;
   b) penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak;
   c) mekanisme pendistribusian ganti rugi;
   d) langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

7. Minutasi Perkara

a. Hakim/ketua majelis bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi perkara.

b. Perkara selesai diminutasi apabila berkas perkara sudah ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti serta diunggah pada SIP, selanjutnya dijahit oleh panitera pengganti untuk diserahkan kepada panitera muda perdata.

c. Dalam hal perkara didaftarkan secara elektronik dan dilaksanakan persidangan secara elektronik, putusan secara

---

[179] Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil

elektronik[180] dilaksanakan sebagai berikut:

1) putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti;
2) putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;
3) pengucapan putusan/penetapan secara elektronik, secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP;
4) pengunggahan salinan putusan/penetapan secara elektronik ke dalam SIP, secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum;
5) pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan secara elektronik ke dalam SIP, dilakukan pada hari dan tanggal yang sama;
6) salinan putusan/penetapan elektronik ke dalam SIP, memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;
7) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP;
8) pemberitahuan putusan/penetapan terhadap tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui surat tercatat.

C. ADMINISTRASI PERKARA UPAYA HUKUM BANDING

1. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara secara Elektronik[181]

a. Penerimaan dan pendaftaran Perkara secara Elektronik

1) Pemohon yang dapat mengajukan Upaya Hukum secara Elektronik adalah pengguna terdaftar atau pengguna lain yang:

a) sejak awal beracara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung; dan

---

[180] Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

[181] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

b) telah mendapatkan salinan putusan elektronik dari SIP.

2) Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan negeri diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

3) Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, kepaniteraan pengadilan negeri:
   a) menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik;
   b) mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding dalam SIP; dan
   c) memberitahukan permohonan banding kepada termohon secara elektronik.

4) Pembanding dapat mengajukan memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pernyataan banding.

5) Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada terbanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima pengadilan.

6) Dalam hal terbanding mengajukan kontra memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada pembanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.

7) Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan memori banding.

8) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.

9) Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding melalui SIP selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.

10) Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pembanding

dan terbanding) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya.

11) Seluruh pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam SIP.
12) Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pembanding.
13) Dalam hal terdapat terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik, pemberitahuan permohonan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) dikirimkan melalui surat tercatat, kecuali terbanding yang sejak awal menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
14) Apabila yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik berada di luar wilayah hukum pengadilan yang memutus perkaranya, pemberitahuan disampaikan melalui pos-el atau surat tercatat.
15) Terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik pada SIP.
16) Pencabutan upaya hukum banding:[182]
    a) Pembanding dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum banding melalui SIP.
    b) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi, pengadilan negeri tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan pengadilan negeri menerbitkan akta pencabutan secara elektronik.

---

[182] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

c) Berdasarkan akta pencabutan secara elektronik tersebut, ketua pengadilan menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.

d) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi, permohonan pencabutan tersebut diteruskan ke pengadilan tinggi melalui SIP dan diputus oleh majelis hakim tingkat banding dengan penetapan.

e) Penetapan pencabutan secara elektronik disampaikan kepada para pihak melalui SIP.

2. Administrasi Biaya Perkara Banding secara Elektronik

a. Pemohon mengajukan pernyataan upaya hukum banding dan pembayaran melalui SIP.

b. Pernyataan upaya hukum banding ditindaklanjuti oleh pemohon dengan membayar biaya perkara sesuai dengan perhitungan e-SKUM pada SIP.

c. Upaya hukum banding diterima dan diproses oleh pengadilan negeri setelah biaya perkara upaya hukum dibayar lunas oleh pembanding.

d. Pembayaran panjar biaya perkara upaya hukum banding dilakukan secara elektronik.

e. Panjar biaya perkara upaya hukum banding secara elektronik meliputi:

1) biaya pendaftaran upaya hukum banding;
2) biaya upaya hukum yang dikirim ke pengadilan tinggi;
3) pemberkasan perkara;
4) biaya transfer;
5) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemberitahuan upaya hukum banding;
6) PNBP penyerahan memori upaya hukum banding;
7) PNBP penyerahan kontra memori upaya hukum banding;
8) PNBP *inzage*; dan
9) PNBP pemberitahuan putusan banding kepada para pihak.

f. Terhadap pendaftaran upaya hukum banding secara elektronik, biaya banding harus disampaikan ke pengadilan

tinggi melalui *virtual account* yang digenerate dari SIP.

g. Biaya pemberitahuan melalui surat tercatat terhadap pihak yang tidak memiliki domisili elektronik:
   1) pos tercatat penyampaian akta banding;
   2) pos tercatat penyampaian memori banding;
   3) pos tercatat penyampaian kontra memori banding;
   4) pos tercatat untuk memeriksa berkas bagi pembanding;
   5) pos tercatat untuk memeriksa berkas bagi terbanding;
   6) pos tercatat pemberitahuan putusan bagi pembanding;
   7) pos tercatat pemberitahuan putusan bagi terbanding;

3. Penerimaan dan pendaftaran Perkara Secara Manual[183]
   a. Pernyataan upaya hukum banding, pembayaran biaya perkara, dan biaya administratif upaya hukum banding bagi pihak yang sejak awal tidak mengikuti/tidak menyetujui persidangan secara elektronik.
   b. Pernyataan upaya hukum banding diajukan langsung ke kepaniteraan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan diberitahukan melalui pos-el atau sejak pemberitahuan putusan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat.
   c. Pemohon banding membayar biaya perkara sesuai dengan SKUM yang dikeluarkan oleh kepaniteraan (e-SKUM yang diperoleh pembanding melalui SIP).
   d. Panitera membuat akta banding yang ditandatangani oleh panitera dan pembanding, selanjutnya akta banding diunggah ke dalam SIP.
   e. Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, memori banding diserahkan melalui PTSP dengan tanda terima, selanjutnya memori banding diunggah oleh kepaniteraan muda perdata ke dalam SIP.
   f. Pemberitahuan upaya hukum banding dan penyerahan memori banding kepada terbanding dilakukan secara elektronik.
   g. Kontra memori banding diajukan melalui SIP, selanjutnya kepaniteraan mencetak kontra memori banding tersebut dan

[183] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

menyampaikan kepada pembanding melalui pos-el atau surat tercatat.

h. Pemberitahuan kontra memori banding dan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara disampaikan melalui pos-el atau surat tercatat.

i. Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik pada SIP.

j. Pembanding dapat mengajukan memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pernyataan banding, jika pembanding mengajukan memori banding setelah batas waktu, maka memori banding tidak dapat diterima.

k. Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada terbanding melalui pos-el atau surat tercatat paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima pengadilan.

l. Dalam hal terbanding mengajukan kontra memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada pembanding melalui pos-el atau surat tercatat paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.

m. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan memori banding, jika terbanding mengajukan kontra memori banding setelah batas waktu, maka kontra memori banding tidak dapat diterima.

n. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.

o. Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (inzage) berkas perkara banding melalui SIP selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.

p. Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pembanding dan terbanding) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya.

q. Seluruh pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam SIP.

r. Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pembanding.

s. Terhadap permohonan banding yang melampaui tenggang waktu, panitera membuat surat keterangan keterlambatan banding. berdasarkan surat keterangan panitera, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan bahwa banding tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan dilampirkan dalam berkas perkara. Berkas perkara tidak dikirim ke pengadilan tinggi[184] serta penetapan ketua pengadilan negeri tersebut diberitahukan kepada pemohon banding dan pengadilan tinggi.

4. Administrasi Biaya Perkara Banding manual.

a. Terhadap pendaftaran upaya hukum banding yang diajukan secara langsung pada meja PTSP, SKUM dibuat dalam rangkap 3 (tiga):

1) lembar pertama untuk pemohon;
2) lembar kedua untuk kasir;
3) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.

b. Panjar biaya banding secara manual dituangkan dalam SKUM, dengan peruntukan:

1) biaya pencatatan pernyataan banding;
2) PNBP pemberitahuan upaya hukum banding;
3) PNBP penyerahan memori upaya hukum banding;
4) PNBP penyerahan kontra memori upaya hukum banding;
5) PNBP mempelajari berkas perkara (inzage);
6) PNBP pemberitahuan putusan banding kepada para pihak;
7) biaya banding;
8) biaya pengiriman berkas;

---

[184] Pasal 45A UU Mahkamah Agung RI

9) biaya pemberitahuan (BP)/biaya surat tercatat:
   a) BP/surat tercatat penyampaian akta banding ke pihak terbanding;
   b) BP/surat tercatat penyampaian memori banding;
   c) BP/surat tercatat penyampaian kontra memori banding;
   d) BP/surat tercatat untuk memeriksa berkas bagi pembanding;
   e) BP/surat tercatat untuk memeriksa berkas bagi terbanding;
   f) BP/surat tercatat pemberitahuan putusan bagi pembanding;
   g) BP/surat tercatat pemberitahuan putusan bagi terbanding.

c. Apabila panggilan/pemberitahuan kembali dari pos, dikarenakan alamat tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

d. Menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pembanding, agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM melalui bank yang telah ditunjuk pengadilan negeri.

e. Kasir setelah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara banding menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.

f. Kasir membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM, pada SIP dan buku jurnal keuangan perkara banding.

g. Terhadap pendaftaran upaya hukum banding secara langsung melalui PTSP, biaya perkara banding harus dikirim ke pengadilan tinggi melalui bank yang ditunjuk dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.

h. Pencabutan upaya hukum banding oleh pemohon banding sebelum atau setelah berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, biaya banding yang dibayarkan oleh pemohon banding dikembalikan ke rekening pemohon setelah dikurangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

D. ADMINISTRASI PERKARA UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Kasasi

a. Pendaftaran Kasasi secara Elektronik

1) Permohonan kasasi diajukan untuk semua jenis perkara secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIP, paling lambat pada 14 (empat belas) hari setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.[185]

2) Dalam hal pemohon datang ke pengadilan pengaju dan mengajukan permohonan kasasi secara lisan, sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, panitera pengadilan pengaju harus membantu pemohon menuangkan permohonannya secara elektronik untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan akta permohonan kasasi.

3) Permohonan kasasi diajukan paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja yang diberlakukan sesuai dengan zona waktu pengadilan pengaju pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis perkara.

4) Panitera pengadilan pengaju membuat akta permohonan kasasi secara elektronik, setelah permohonan memenuhi persyaratan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan kasasi diregistrasi, panitera pengadilan pengaju memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon.

6) Dalam hal termohon telah terdaftar sebagai pengguna

---

[185] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

SIP atau memiliki domisili elektronik, pemberitahuan permohonan kasasi dikirimkan secara elektronik.

7) Dalam hal pemberitahuan dilakukan secara elektronik, bukti telah dikirimnya pemberitahuan secara elektronik berlaku sebagai relaas pemberitahuan.

8) Dalam hal termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan permohonan kasasi dilakukan secara langsung kepada termohon melalui surat tercatat.

9) Pengiriman memori kasasi atas permohonan kasasi yang didaftarkan secara elektronik harus dilakukan secara elektronik melalui SIP, paling lambat pada 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.[186]

10) Pengiriman memori kasasi secara elektronik dilakukan paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja yang diberlakukan sesuai zona waktu pengadilan pengaju pada hari terakhir tenggat waktu pengajuan memori kasasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis perkara.

11) Memori kasasi dikirimkan kepada termohon melalui SIP. Apabila termohon atau salah seorang termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, panitera pengadilan pengaju mengirimkan secara langsung salinan cetak memori kasasi kepada termohon melalui surat tercatat.

12) Termohon kasasi dapat mengirimkan kontra memori kasasi secara elektronik apabila telah terdaftar sebagai pengguna SIP.

13) Pengiriman kontra memori kasasi secara elektronik oleh termohon kasasi dilakukan melalui SIP. Dalam hal termohon kasasi belum terdaftar sebagai pengguna SIP, panitera pengadilan pengaju harus membantu

---

[186] Pasal 47 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

termohon melakukan pendaftaran pengguna SIP serta melakukan pemindaian kontra memori kasasi dan mengunggahnya ke dalam SIP.

14) Ketua pengadilan negeri menetapkan panjar biaya kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan:
    a) biaya pencatatan pernyataan kasasi;
    b) besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung;
    c) PNBP.[187]
15) Apabila memori kasasi tidak dikirimkan secara elektronik atau melewati tenggat waktu, panitera membuat surat keterangan dan berdasarkan surat keterangan tersebut, ketua pengadilan negeri membuat penetapan bahwa kasasi tidak memenuhi persyaratan formil dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung, selanjutnya penetapan tersebut diberitahukan kepada para pihak.
16) Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan pengaju, yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus disetujui oleh prinsipal.
17) Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah Agung, disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera.
18) Pencabutan upaya hukum kasasi oleh pemohon kasasi sebelum dan setelah berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, terhadap biaya kasasi yang dibayarkan oleh pemohon kasasi dikembalikan ke rekening pemohon setelah dikurangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

b. Pendaftaran Kasasi Secara Manual

---

[187] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

1) Petugas PTSP menerima berkas permohonan kasasi selanjutnya diserahkan kepada kepaniteraan muda perdata, untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berdasarkan daftar periksa (*checklist*).
2) Permohonan kasasi dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung keesokan harinya setelah putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada para pihak; apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya[188];
3) Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan surat keterangan panitera dan dibuatkan penetapan ketua pengadilan.
4) Ketua pengadilan negeri menetapkan panjar biaya kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan:
    a) biaya pencatatan pernyataan kasasi;
    b) besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung;
    c) biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
    d) PNBP;[189]
    e) Biaya Pemberitahuan (BP):
        (1) BP pernyataan kasasi;
        (2) BP memori kasasi;
        (3) BP kontra memori kasasi;
        (4) BP amar putusan kasasi kepada Pemohon;
        (5) BP amar putusan kasasi kepada Termohon.
5) SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap 3 (tiga):

---

[188] Pasal 47 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

[189] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

a) lembar pertama untuk pemohon;
b) lembar kedua untuk kasir;
c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

6) Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM kepada bank yang ditunjuk.
7) Kasir setelah menerima bukti pembayaran dari bank menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
8) Pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
9) Kasir membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
10) Apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga, wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut, dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi. Terhadap Pengadilan yang sudah melakukan register elektronik, mengacu pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.[190]
11) Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak termohon kasasi.
12) Memori kasasi harus telah diterima di kepaniteraan pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan kasasi. apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
13) Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-

[190] Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 587/DJU/HM.02.3/6/2022 tentang Penerapan Register Elektronik pada pengadilan

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak termohon kasasi.

14) Kontra memori kasasi harus telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri paling lambat 14(empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi.
15) Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung setelah mendapatkan *barcode* dari Mahkamah Agung.
16) Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh panitera melalui *virtual account* yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
17) Tanggal penerimaan memori dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi serta dicatatkan dalam SIP. Terhadap pengadilan yang sudah melakukan register elektronik, mengacu pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.[191]
18) Fotokopi relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung wajib dikirim ke Mahkamah Agung.
19) Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan negeri, yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus disetujui oleh prinsipal.
20) Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah Agung, disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera.
21) Pencabutan upaya hukum kasasi oleh pemohon kasasi sebelum dan setelah berkas perkara dikirim ke

---

[191] Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 587/DJU/HM.02.3/6/2022 tentang Penerapan Register Elektronik pada pengadilan

Mahkamah Agung, terhadap biaya kasasi yang dibayarkan oleh pemohon kasasi dikembalikan ke rekening pemohon setelah dikurangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

2. Peninjauan Kembali

a. Pendaftaran Peninjauan Kembali secara Elektronik

1) Permohonan peninjauan kembali untuk semua jenis perkara diajukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIP.

2) Dalam hal pemohon datang ke pengadilan pengaju dan mengajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan, sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, panitera pengadilan pengaju harus membantu pemohon menuangkan permohonannya secara elektronik, untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan akta permohonan peninjauan kembali.

3) Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:[192]

a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh

[192] Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

4) Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana pada angka 3) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:[193]

a) alasan pada angka 3) huruf a) sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b) alasan pada angka 3) huruf b) sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c) alasan pada angka 3) huruf c), d) dan f) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d) alasan pada angka 3) huruf e) sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara

5) Permohonan peninjauan kembali diajukan paling lambat pada pukul 23.59 sesuai dengan zona waktu pengadilan pengaju pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis perkara. Tanggal akta permohonan kasasi/peninjauan kembali menggunakan tanggal pembayaran.

6) Panitera pengadilan pengaju membuat akta

---

[193] Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

permohonan peninjauan kembali secara elektronik, setelah permohonan memenuhi persyaratan serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pemohon wajib melampirkan alasan/memori peninjauan kembali dalam pendaftaran permohonan peninjauan kembali. Permohonan dan memori peninjauan kembali merupakan satu-kesatuan dan harus dikirimkan secara elektronik pada waktu yang bersamaan.
8) Permohonan peninjauan kembali yang tidak dilengkapi dengan alasan/memori peninjauan kembali tidak diproses lebih lanjut dan tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
9) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan peninjauan kembali diregistrasi, panitera pengadilan pengaju memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon.
10) Dalam hal termohon telah terdaftar sebagai pengguna SIP atau memiliki domisili elektronik, pemberitahuan permohonan peninjauan kembali dikirimkan secara elektronik.
11) Dalam hal pemberitahuan dilakukan secara elektronik, bukti telah dikirimnya pemberitahuan secara elektronik berlaku sebagai relaas pemberitahuan.
12) Dalam hal termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan permohonan peninjauan kembali dilakukan secara langsung kepada termohon melalui surat tercatat.
13) Memori peninjauan kembali dikirimkan kepada termohon peninjauan kembali melalui SIP. Apabila termohon atau salah seorang termohon peninjauan kembali tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, jurusita pengadilan pengaju mengirimkan salinan cetak memori peninjauan kembali secara langsung kepada termohon melalui surat tercatat.
14) Termohon peninjauan kembali dapat mengirimkan kontra memori peninjauan kembali secara elektronik apabila telah terdaftar sebagai pengguna SIP.

15) Dalam hal termohon peninjauan kembali belum terdaftar sebagai pengguna SIP, panitera pengadilan pengaju harus membantu termohon melakukan pendaftaran pengguna SIP untuk melakukan pemindaian kontra memori peninjauan kembali dan mengunggah ke dalam SIP. Pengiriman kontra memori peninjauan kembali secara elektronik dilakukan melalui SIP.
16) Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru, pemohon peninjauan kembali harus menyertakan surat bukti baru yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk dokumen elektronik, pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali.
17) Apabila pemohon peninjauan kembali belum menyertakan surat bukti baru dalam bentuk dokumen elektronik pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali, panitera pengadilan pengaju melakukan pemindaian surat bukti baru dan mengunggah ke dalam SIP.
18) Pengambilan sumpah penemuan bukti baru dalam peninjauan kembali yang diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru pada perkara perdata umum, dapat dilakukan secara elektronik atas persetujuan pemohon peninjauan kembali, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
19) Atas hasil pelaksanaan pengambilan sumpah penemuan bukti baru secara elektronik ataupun secara langsung pada perkara perdata umum, panitera pengadilan pengaju bertanggung jawab untuk menuangkan berita acara pengambilan sumpah penemuan bukti baru secara elektronik dan mengunggah ke dalam SIP.
20) Pemohon peninjauan kembali dapat melakukan pencabutan permohonan secara elektronik melalui SIP

sebelum perkara diputus oleh majelis hakim agung. dalam hal permohonan peninjauan kembali telah dicabut, permohonan tidak dapat diajukan kembali. Biaya perkara peninjauan kembali yang permohonannya dicabut setelah perkara diregistrasi atau mendapat nomor perkara di Mahkamah Agung, tidak dapat dikembalikan kepada pemohon.

21) Apabila berkas perkara belum dikirim ke Mahkamah Agung dan pemohon mencabut permohonan, pengadilan pengaju tidak mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung, dan biaya proses yang seharusnya dikirim ke Mahkamah Agung dikembalikan kepada pemohon.

22) Apabila berkas perkara telah dikirimkan ke Mahkamah Agung dan telah diregistrasi, namun pemohon mencabut permohonan sebelum diputus oleh majelis hakim agung, panitera pengadilan pengaju menyampaikan notifikasi pencabutan permohonan melalui SIP. Panitera pengadilan pengaju membuat akta pencabutan peninjauan kembali melalui SIP.

23) Dalam hal pemohon mencabut permohonannya secara elektronik, panitera pengadilan pengaju memeriksa apakah pihak termohon telah terdaftar sebagai pengguna SIP. Jika termohon telah terdaftar sebagai pengguna SIP, panitera pengadilan pengaju mengirimkan pemberitahuan pencabutan permohonan tersebut kepada termohon secara elektronik. Jika termohon belum terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan pencabutan permohonan dikirimkan secara langsung melalui surat tercatat.

24) Permohonan peninjauan kembali kedua terhadap 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk

putusan pidana, agama dan tata usaha negara.[194]

b. Pendaftaran Peninjauan Kembali secara Manual

1) Petugas PTSP menerima berkas permohonan peninjauan kembali untuk selanjutnya diserahkan kepada meja kepaniteraan muda perdata, dilakukan pemeriksaan kelengkapan berdasarkan daftar periksa (*checklist*).

2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal:

a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b) apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk[195];

c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama

---

[194] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

[195] SOP Perkara Perdata Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Novum Pada Pengadilan Negeri, sebagaimana dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.1.3/2022 Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

3) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan surat keterangan panitera dan dibuatkan penetapan ketua pengadilan. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas)jatuh pada hari kerja berikutnya.

4) Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, kecuali apabila ada putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan satu sama lain, dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

5) Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM, terdiri dari:

a) biaya perkara peninjauan kembali yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung;

b) biaya pengiriman uang;

c) biaya pengiriman berkas;

d) biaya PNBP;

e) Biaya Pemberitahuan (BP) melalui surat tercatat, berupa:

(1) BP pernyataan peninjauan kembali dan alasan peninjauan kembali;

(2) BP penyampaian salinan putusan dan amar putusan kepada pemohon peninjauan

kembali;

(3) BP amar putusan kepada termohon peninjauan kembali.

6) SKUM dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
   a) lembar pertama untuk pemohon;
   b) lembar kedua untuk kasir;
   c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
7) Kasir menyerahkan SKUM kepada pemohon peninjauan kembali yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada bank yang ditunjuk pengadilan negeri.
8) Kasir setelah menerima pembayaran, menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
9) Permohonan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh kepaniteraan muda perdata telah dibayar lunas.
10) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
11) Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali; (Terhadap Pengadilan yang sudah melakukan register elektronik, mengacu pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 587/DJU/HM.02.3/6/2022 tentang Penerapan Register Elektronik pada pengadilan).
12) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada pihak termohon peninjauan kembali, dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak termohon melalui surat tercatat.

13) Jawaban/tanggapan termohon atas alasan peninjauan kembali harus telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali disampaikan pemohon.
14) Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri, harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.
15) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung, setelah mendapatkan *barcode* dari Mahkamah Agung.
16) Fotokopi relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung dikirim ke Mahkamah Agung.
17) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua pengadilan negeri pengaju, yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. apabila diajukan oleh kuasanya harus disetujui oleh prinsipal
18) Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh panitera.
19) Pencabutan upaya hukum peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali sebelum atau setelah berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, terhadap biaya peninjauan kembali yang dibayarkan oleh pemohon peninjauan kembali dikembalikan ke rekening pemohon setelah dikurangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

E. ADMINISTRASI BIAYA PERKARA

1. Biaya perkara terdiri dari:
   a. biaya proses perkara;
   b. hak-hak kepaniteraan.
2. Biaya proses perkara terdiri dari pengeluaran yang diperlukan

untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi :[196]

a. meterai;
b. biaya redaksi;
c. alat tulis kantor (atk);
d. penggandaan/ fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
e. penggandaan salinan putusan;
f. pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
g. biaya pos tercatat;
h. pelaksanaan sita (jika sita dikabulkan);
i. pemeriksaan setempat (jika ada);
j. penerjemah.

Harus termuat dalam keputusan ketua pengadilan negeri dan dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal.

3. Pencatatan jurnal pada SIP turut pula dicatatkan pihak yang melakukan pembayaran dan melakukan penyesuaian uraian sesuai kondisi.
4. Hak-hak kepaniteraan yang merupakan PNBP berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
5. Pencatatan hak-hak kepaniteraan pada SIP, dilakukan secara otomatis oleh sistem pada menu buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan, akan tetapi pemegang kas dapat menambahkan pada menu tersebut, jika terdapat hak-hak kepaniteraan yang tidak tercatat secara otomatis oleh sistem.
6. Pemegang Kas (panitera) melaksanakan tugas-tugas administrasi biaya perkara.
7. Biaya pencatatan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali dikeluarkan pada saat setelah diterimanya panjar biaya perkara.
8. Biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus.

---

[196] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

9. Pengeluaran uang perkara untuk keperluan lainnya di dalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.
10. Pemegang kas harus menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima pada hari itu juga, untuk disetorkan kepada kas negara setiap harinya. Penyerahan besarnya uang agar dicatat dalam kolom 19 buku KI-A9 dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama bendaharawan penerima.[197]
11. Biaya-biaya perkara dikeluarkan berdasarkan keperluan sesuai dengan jenis kegiatan.
12. Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari, dalam SIP dan buku jurnal yang bersangkutan, serta mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama disimpan dikasir dan lembar kedua diserahkan kepada panitera sebagai laporan.
13. Panitera atau staf panitera yang ditunjuk sebagai pemegang kas (uang pihak ketiga) dengan surat keputusan ketua pengadilan negeri, mencatat dalam buku induk keuangan yang bersangkutan.
14. Buku Keuangan Perkara terdiri dari :
    a. jurnal perkara gugatan (KI-AI/G)
    b. jurnal perkara gugatan sederhana (usul diberikan kode)
    c. jurnal perkara permohonan (KI-A1/P)
    d. jurnal permohonan banding (KI-A2)
    e. jurnal permohonan kasasi (KI-A3)
    f. jurnal permohonan peninjauan kembali (KI-A4)
    g. Jurnal permohonan eksekusi (KI-A5)
    h. Jurnal permohonan Konsinyasi (usul diberikan kode)
    i. buku induk keuangan perkara perdata (KI-A7)
    j. buku keuangan biaya eksekusi (KI-A8)
    k. buku keuangan konsinyasi (usul diberikan kode)
    l. buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KI-A9)
15. Buku jurnal keuangan perkara dan jurnal perkara pada SIP, digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara.

---

[197] Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

16. Buku Jurnal diberi nomor halaman dan setiap nomor halaman digunakan 2 (dua) halaman muka, halaman pertama dan terakhir ditandatangani ketua pengadilan negeri dan halaman lainnya diparaf.
17. Banyaknya halaman pada setiap buku jurnal dan adanya tanda tangan serta paraf ketua pengadilan negeri tersebut, diterangkan dengan jelas oleh ketua pengadilan negeri dan keterangan tersebut ditandatangani ketua pengadilan negeri.
18. Buku induk keuangan perkara, digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara (kecuali perkara permohonan eksekusi dan konsinyasi) dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.
19. Penerimaan dan pengeluaran biaya eksekusi dan konsinyasi yang dicatat dalam jurnal eksekusi dan jurnal konsinyasi, menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dimasukkan kedalam buku induk keuangan eksekusi dan konsinyasi.
20. Banyaknya halaman setiap buku induk biaya perkara dan buku biaya eksekusi dan konsinyasi harus diterangkan dengan jelas, sedangkan setiap halaman pertama dan halaman terakhir harus dibubuhi tanda tangan ketua pengadilan negeri, dan halaman lainnya cukup dibubuhi paraf.
21. Penutupan buku induk keuangan perkara dan buku biaya eksekusi dan konsinyasi dilakukan oleh panitera dan diketahui ketua pengadilan negeri setiap akhir bulan.
22. Pada setiap penutupan buku induk keuangan tersebut, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas maupun disimpan dalam bank, serta uraian terperinci.
23. Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas sesungguhnya maka harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut.
24. Ketua pengadilan negeri sebelum menandatangani buku induk keuangan, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang tersimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.

25. Ketua pengadilan negeri setiap saat dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan, dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara, sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan, dan meneliti keadaan uang menurut buku kas dan uang nyata yang ada dalam brankas keuangan pihak ketiga maupun yang disimpan di bank, disertai bukti-buktinya.
26. Penutupan buku induk keuangan perkara atas dasar perintah ketua pengadilan negeri sebagaimana tersebut di atas, hendaknya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali atau yang dilakukan secara mendadak dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
27. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan dan dalam kolom keterangan diisi dengan tanggal, jumlah uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama bendaharawan penerima.
28. Buku jurnal dan buku induk keuangan setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

IV. PERDATA KHUSUS

RUANG LINGKUP

Yang termasuk dalam perkara perdata khusus, antara lain:

A. Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
B. Kekayaan Intelektual
C. Perselisihan Hubungan Industrial
D. Gugatan Sengketa Partai Politik
E. Gugatan Sengketa Organisasi Masyarakat
F. Gugatan Yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen
G. Gugatan Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi
H. Permohonan Pembatalan Putusan Komisi Informasi Publik[198]
I. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase[199]
J. Permohonan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen[200]

---

[198] Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
[199] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
[200] Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

K. Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha[201]

L. Permohonan Penetapan Sementara dalam Hak Kekayaan Intelektual[202]

M. Permohonan Penangguhan Sementara Yudisial Hak Kekayaan Intelektual[203]

N. Permohonan Pemeriksaan Yayasan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan[204]

O. Gugatan Keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Publik[205]

P. Gugatan Perdata Lingkungan Hidup[206]

A. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT ATAU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG[207]

1. Administrasi Perkara

Kelengkapan administrasi permohonan pernyataan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengacu pada aturan yang berlaku[208], selanjutnya permohonan pernyataan pailit atau permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian, dan permohonan pernyataan pailit atau permohonan PKPU terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.

a. Tata Cara Pendaftaran secara Elektronik Perkara Kepailitan atau PKPU[209]

1) Permohonan oleh debitor pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara elektronik melalui SIP dengan tahapan sebagai berikut:

---

[201] Perma Nomor 3 Tahun 2021tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga

[202] Perma Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara

[203] Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara

[204] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

[205] Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

[206] Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

[207] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[208] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[209] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

a) memilih pengadilan niaga yang berwenang;
b) mengunggah surat kuasa khusus dan/atau surat tugas;
c) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
d) mencatatkan data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya;
e) mencatatkan domisili elektronik pihak termohon (jika tersedia);
f) mengunggah dokumen sebagaimana disyaratkan pada aturan yang berlaku;[210]
g) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);
h) Melakukan pembayaran secara elektronik; dan
i) Terhadap perkara PKPU yang telah terdaftar atau disidangkan di Pengadilan Niaga atas nama debitur yang sama tidak dapat diajukan pendaftaran kembali.

2) Permohonan oleh kreditor pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara elektronik melalui SIP dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kecuali surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor dan daftar harta dengan tambahan sebagai berikut:
a) bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
b) izin dari hakim pengawas dalam bentuk penetapan dalam hal pemohon adalah kurator.

3) Gugatan lain-lain
a) Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara elektronik melalui SIP dengan tahapan sebagai berikut:
(1) memilih pengadilan niaga yang berwenang;
(2) mengunggah surat kuasa khusus (jika ada);

---

[210] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(3) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
(4) menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya;
(5) menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
(6) mengunggah dokumen gugatan/ permohonan;
(7) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan
(8) melakukan pembayaran secara elektronik.

b) Setelah mendapatkan akun, pengguna lain mendaftarkan perkara melalui daring dengan tahapan sebagai berikut:
(1) memilih pengadilan niaga yang berwenang;
(2) mengunggah surat kuasa khusus/surat tugas;
(3) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
(4) mencatatkan data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya;
(5) mencatatkan domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
(6) mengunggah dokumen gugatan/permohonan;
(7) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan
(8) melakukan pembayaran secara elektronik.

c) SIP menyediakan penghitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM;

d) Panjar biaya perkara terdiri atas:
(1) biaya pendaftaran;
(2) PNBP surat kuasa dan panggilan penggugat ataupun tergugat;
(3) biaya pemberkasan;
(4) ATK;
(5) biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat;

(6) meterai; dan

(7) redaksi.

e) SIP menyediakan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara.

f) Pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui *e-payment* setelah mendapat verifikasi dari pengadilan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode akun virtual *e-payment*;

(2) melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);

(3) menunggu konfirmasi otomatis dari sistem serta melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis;

(4) setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, pengguna terdaftar dan pengguna lain akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam SIP.

g) Pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik.

h) Pengguna terdaftar dan pengguna lain mendapatkan notifikasi secara elektronik atas sisa panjar biaya perkara setelah jurnal keuangan SIP ditutup.

i) Biaya pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik dibebankan kepada pemohon/penggugat.

j) Panitera muda terkait melakukan pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahapan sebagai berikut:

(1) petugas kepaniteraan perdata muda khusus melakukan login pada SIP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator; dan

(2) petugas memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada SIP.

k) Kepaniteraan terkait mengunduh dokumen yang tersedia di dalam SIP untuk keperluan proses berikutnya.

l) Pengadilan memproses perkara yang sudah terdaftar secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

m) Pendaftaran perkara secara elektronik yang dilakukan di luar jam sebagaimana dimaksud pada huruf l akan diproses pada hari kerja berikutnya.

n) Dalam hal para pihak diwakili oleh beberapa orang pengguna terdaftar atau beberapa orang pengguna lain, penggugat/pemohon dan/atau tergugat/termohon hanya menggunakan 1 (satu) akun dan 1 (satu) domisili elektronik.

o) Apabila terjadi penggantian kuasa atau pencabutan kuasa, penggantian kuasa atau pencabutan kuasa harus disampaikan:

(1) secara elektronik oleh kuasa yang lama; atau

(2) secara langsung melalui PTSP oleh prinsipal atau kuasa yang baru dengan menyertakan surat kuasa/ surat pencabutan kuasa kepada kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data SIP perkara yang bersangkutan.

p) Dalam hal pendaftaran gugatan lain-lain diajukan oleh Kurator, pendaftaran tersebut harus mendapat izin dari Hakim Pengawas dalam bentuk penetapan.

b. Tata Cara Pendaftaran secara Manual Perkara Kepailitan atau PKPU

1) Dalam hal terjadi kendala SIP, pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan setelah normal kembali, dicatatkan dan diunggah melalui SIP.

2) Pendaftaran perkara secara elektronik dilaksanakan menggunakan SIP dengan syarat sudah memiliki akun pengguna serta melengkapi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Bab II dan Bab III Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dalam hal SIP terkendala, pendaftaran dapat dilakukan secara manual.

3) Petugas pada PTSP menerima pendaftaran dan meneliti daftar periksa (*checklist*) setiap berkas pendaftaran permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU, gugatan lain-lain.
4) Terhadap permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU serta gugatan lain-lain, pemohon harus diwakili oleh advokat berdasarkan surat kuasa khusus.
5) Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (jika ada).[211]
6) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.
7) Terhadap perkara PKPU yang telah terdaftar di pengadilan niaga atas nama debitur yang sama tidak dapat diajukan pendaftaran kembali.

c. Register Perkara
1) Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik melalui SIP.
2) Register yang dicetak dari aplikasi SIP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual.
3) Sepanjang register belum terakomodir pada SIP maka tetap dicatatkan secara manual.

---

[211] Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

4) Register induk perkara niaga harus ditandatangani pada halaman pertama dan halaman terakhir, serta dibubuhi paraf pada tiap-tiap halaman dengan menyebutkan jumlah halamannya oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.
5) Pencatatan perkara dalam register harus dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan buku jurnal keuangan masing-masing.
6) Register induk harus memuat seluruh data-data perkara dalam tingkat pertama, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.
7) Register setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
8) Register perkara perdata niaga terdiri dari:
   a) register induk kepailitan;
   b) register induk penundaan kewajiban pembayaran utang;
   c) register permohonan kasasi;
   d) register permohonan pembatalan perdamaian;
   e) register permohonan perlawanan pencabutan;
   f) daftar umum kepailitan;
   g) register permohonan peninjauan kembali;
   h) register penyitaan;
   i) register pemberesan harta pailit;
   j) daftar umum penundaan kewajiban pembayaran utang;
   k) register rehabilitasi;
   l) register kurator;
   m) register pengurus;
   n) register penyegelan;
   o) register status perusahaan;
   p) register gugatan lain-lain (termasuk perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya

atau kesalahannya dan *actio pauliana*);

q) register prosedur renvoi (khusus untuk perselisihan tentang besarnya tagihan, dalam tahap verifikasi);

r) register bantahan terhadap daftar pembagian.[212]

9) Tata cara pengisian

a) Data-data perkara serta segala kegiatan yang menyangkut jalannya perkara harus dicatatkan ke dalam SIP dan dicatat dalam register dengan penomoran sebagai berikut :

(1) Permohonan Pernyataan Pailit : ..... Pdt.Sus-Pailit/ 20...../PN.Niaga....*)

(2) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : ..... Pdt.Sus-PKPU/20..../PN.Niaga. *)

(3) Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU : ../Pdt.Sus-Pailit/20...../ PN.Niaga .....*). Jo. ..../Pdt.Sus-PKPU/20...../ PN.Niaga.....*)[213]

(4) Nomor disesuaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022 tentang Standar Penomoran Perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Catatan :

*) diisi pengadilan niaga yang bersangkutan

b) Pencatatan data pada SIP/register dilaksanakan sesuai dengan data asli yang tercantum dalam surat permohonan (pencatatan data tidak dapat disingkat kecuali data asli menggunakan

---

[212] Pasal 192 – 194 UU Nomor 37 Tahun 2004

[213] Permohonan kepailitan di*counter*/dilawan pihak terlawan dengan PKPU

singkatan).

c) Pada pencatatan awal, apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi disambung pada lembar berikutnya, untuk pencatatan selanjutnya mengingat lembar berikutnya telah digunakan untuk mencatat perkara lain, apabila lembar yang disediakan tidak mencukupi disambung dengan kertas.

d) Data kegiatan untuk perkara yang diajukan PKPU, kasasi serta peninjauan kembali, selain dicatatkan dalam SIP register induk juga harus dicatat dalam register yang terkait.

e) Untuk data perkara yang dapat dilihat/diketahui oleh umum, selain dicatatkan dalam SIP/register induk juga harus dicatat dalam buku daftar umum.

f) Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh Petugas dengan perincian keadaan perkara sebagai berikut:

- Sisa bulan lalu : ..... Perkara.
- Masuk bulan ini : ..... Perkara.
- Putus bulan ini : ..... Perkara.
- Sisa bulan ini : ..... Perkara.

Setelah penutupan akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor satu sedangkan nomor perkara berlanjut;

g) Penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan niaga, dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa Tahun lalu : .....Perkara.
- Masuk Tahun ini : ..... Perkara.
- Putus Tahun ini : .....Perkara.
- Sisa Tahun ini : ..... Perkara.

h) Register permohonan kasasi, register peninjauan kembali ditutup setiap akhir tahun dengan rekapitulasi:

- Sisa Tahun lalu : ..... Perkara.
- Masuk Tahun ini : ..... Perkara.

- Putus Tahun ini : ..... Perkara.
- Sisa Tahun ini : ..... Perkara.
- Sudah dikirim : ..... Perkara.
- Belum dikirim : ..... Perkara.

i) Pembetulan pencatatan pada register tidak diperbolehkan menggunakan *tipe-ex*, melainkan harus direnvoi dengan cara mencoret kata atau kalimat yang salah dan diberi paraf serta tanggal renvoi.

d. Keuangan Perkara

1) Biaya pengadilan tingkat pertama

Biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses.

Biaya perkara dicatatkan dalam SIP dan dikelola oleh Panitera berdasarkan penetapan dan di bawah pengawasan ketua pengadilan, yang terdiri dari:

a) biaya panggilan pemohon, termohon;
b) biaya untuk menyampaikan salinan putusan;
c) biaya hak-hak kepaniteraan dan meterai;
d) biaya hak-hak kepaniteraan disetor ke kas negara melalui bendahara penerima.

2) Biaya permohonan kasasi terdiri dari:

a) biaya pencatatan kasasi;
b) biaya pemberitahuan pernyataan kasasi;
c) biaya penyerahan memori kasasi;
d) biaya penyerahan kontra memori kasasi;
e) biaya penyampaian salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi;
f) biaya penyampaian salinan putusan kasasi kepada termohon kasasi;
g) biaya kasasi untuk Mahkamah Agung;
h) biaya pengiriman berkas dan uang kasasi ke Mahkamah Agung.

3) Biaya permohonan peninjauan kembali terdiri dari:

a) biaya pencatatan peninjauan kembali;
b) biaya pemberitahuan penyerahan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali;

c) biaya penyerahan kontra memori peninjauan kembali;
d) biaya penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali;
e) biaya penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali;
f) biaya sumpah apabila ada bukti baru (novum);
g) biaya peninjauan kembali untuk Mahkamah Agung;
h) biaya pengiriman berkas dan biaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

4) Hak-hak kepaniteraan terdiri dari:
a) pencatatan pembuatan akta atau tindakan-tindakan lainnya yang bukan sebagai akibat putusan pengadilan;
b) untuk pencatatan:
(1) sesuatu penyerahan akta atau pemberitahuan di kepaniteraan yang dilakukan dalam hal yang diharuskan menurut hukum;
(2) penyerahan akta oleh panitera dan pemberitahuan jurusita;
(3) penyerahan surat-surat dari berkas perkara;
(4) biaya redaksi putusan dan penetapan pengadilan;
(5) biaya mempelajari berkas.

5) Buku keuangan perkara
a) buku keuangan terdiri dari:
(1) buku jurnal;
(2) buku induk.
b) macam-macam buku jurnal:
(1) buku jurnal keuangan perkara permohonan pernyataan pailit;
(2) buku jurnal keuangan perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
(3) buku jurnal keuangan perkara kasasi permohonan pernyataan pailit;
(4) buku jurnal keuangan perkara permohonan peninjauan kembali;

(5) buku jurnal keuangan perkara permohonan rehabilitasi;
(6) buku jurnal keuangan gugatan lain-lain;
(7) buku jurnal keuangan prosedur renvoi (khusus untuk perselisihan tentang besarnya tagihan, dalam tahap verifikasi);
(8) buku jurnal keuangan keberatan terhadap daftar pembagian[214];
(9) buku jurnal keuangan pengesahan perdamaian;
(10) buku jurnal keuangan pembatalan perdamaian;
(11) buku jurnal keuangan perlawanan atas boedel pailit;
(12) buku jurnal keuangan pembetulan berita acara rapat pemungutan suara;
(13) buku jurnal keuangan permohonan pencabutan pernyataan pailit;
(14) buku jurnal keuangan permohonan pencabutan PKPU;
(15) buku jurnal keuangan keberatan atas pembagian harta pailit;
(16) buku jurnal keuangan penggantian dan penambahan kurator;
(17) buku jurnal keuangan penentuan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.

6) Pencatatan Buku Jurnal
a) pada halaman awal buku jurnal dibuat catatan tentang banyaknya halaman dari buku jurnal yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua pengadilan;
b) tiap lembar buku jurnal diberikan nomor halaman, halaman awal dan halaman akhir ditandatangani oleh ketua pengadilan, sedang halaman lainnya diparaf;
c) pencatatan buku jurnal untuk setiap nomor

[214] Pasal 192 – 194 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

perkara menggunakan 1 (satu) halaman rangkap. pada halaman sebelah kanan digunakan pencatatan biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang berhubungan dengan kepailitan;

d) pencatatan buku jurnal dimulai pada saat perkara diterima, ditutup pada saat perkara diputus dan dibuka kembali apabila ada pemberitahuan putusan;

e) hak-hak kepaniteraan yang berupa pencatatan kasasi, dikeluarkan pada saat/setelah diterimanya panjar biaya perkara;

f) biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus;

g) pengeluaran uang untuk keperluan lainnya di dalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku;

h) semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan adalah sebagai pendapatan negara, seminggu sekali pemegang kas harus menyetor kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke negara;

i) jenis pengeluaran uang pada buku jurnal harus sesuai dengan jenis pengeluaran uang yang telah ditentukan pada kolom buku induk keuangan perkara;

j) semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran setelah dicatat dalam buku jurnal harus dipindahkan ke dalam buku kas bantu, yang pencatatan dibuat rangkap dua;

k) setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari buku kas bantu yang berupa lembaran kertas diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku induk keuangan perkara dan sekaligus sebagai laporan penerimaan dan pengeluaran uang harian kepada panitera;

l) untuk perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali, pada kolom keterangan buku

jurnal keuangan tingkat pertama harus diberikan catatan tentang tanggal pengajuan kasasi, tanggal pengajuan peninjauan kembali dan nomor halaman pada jurnal kasasi dan jurnal peninjauan kembali.

7) Jenis Buku Induk:
   a) buku induk keuangan permohonan pernyataan pailit dan PKPU, gugatan lain-lain, rehabilitasi, prosedur renvoi, penyegelan, dan keberatan terhadap daftar pembagian;
   b) buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.
8) Pencatatan Buku Induk:
   a) buku induk adalah buku untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang untuk semua perkara, yang pencatatannya secara berurutan dimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhir bulan;
   b) buku induk dikelola oleh panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan surat keputusan ketua pengadilan niaga;
   c) pencatatan data pada buku induk harus sama dengan data yang ada pada buku jurnal;
   d) pada setiap penutupan buku induk keuangan tersebut, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, serta uraian secara rinci uang yang ada di brankas. Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas yang sesungguhnya, harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut;
   e) dalam rangka pemeriksaan setiap saat ketua pengadilan niaga dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan (pemeriksaan mendadak oleh ketua pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali);
   f) buku jurnal maupun buku induk harus diganti tiap tahun. tidak boleh digabung dengan tahun

sebelumnya;

g) semua pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal dan induk keuangan harus dicatatkan dahulu ke SIP.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

f. Pemberkasan Perkara dan Arsip Perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan[215]

a. Panggilan Sidang

Tata cara panggilan sidang mengacu pada ketentuan panggilan sidang perkara perdata sebagaimana berikut:

1) Panggilan untuk kuasa penggugat/pemohon dilaksanakan secara elektronik.
2) Panggilan bagi tergugat/termohon yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilaksanakan secara elektronik.
3) Apabila tergugat/termohon atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.
4) Panggilan bagi tergugat/termohon yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.
5) Bagi tergugat/termohon yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik.[216]
6) Panggilan elektronik tidak dikenai biaya.
7) Panggilan secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

---

[215] Perma Nomor 7 Tahun 2022 entang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo SK KMA Nomor 363 Tahun 2022

[216] Pemanggilan Umum kepada Tergugat/Termohon dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

a) jurusita/jurusita pengganti melakukan login pada SIP sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator;
b) jurusita/jurusita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik;
c) jurusita/jurusita pengganti mengirim panggilan melalui SIP ke domisili elektronik para pihak; dan
d) panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dikirim kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama.[217]

8) Panggilan melalui surat tercatat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:[218]
   1) jurusita/jurusita pengganti mencetak relaas dari SIP;
   2) relaas panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh jurusita/jurusita pengganti kepada tergugat/termohon melalui surat tercatat; dan
   3) panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dikirim kepada tergugat/termohon paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat/termohon berdasarkan lacak kiriman.

b. Persidangan

Tata cara persidangan mengacu pada ketentuan persidangan perkara perdata sebagaimana berikut:

1) Proses persidangan awal
   a) Hakim/ketua majelis menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama.
   b) Sidang pemeriksaan pertama wajib dilakukan paling lambat 20 hari sejak permohonan

---

[217] Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[218] SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

didaftarkan.[219]

c) Hakim/ketua majelis membuka sidang.

d) Pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan/permohonan, dilengkapi dengan *legal standing* pemberi kuasa.

e) Majelis hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP.

f) Dalam hal kuasa pemohon/penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat kuasa atau terjadi perbedaan antara dokumen surat kuasa yang diunggah ke SIP dan dokumen asli surat kuasa yang diperlihatkan di persidangan, proses persidangan tidak dapat dilanjutkan.

g) Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen surat permohonan /gugatan yang diunggah ke SIP dan dokumen asli diperlihatkan surat gugatan/permohonan yang di persidangan, Penggugat/pemohon mengunggah kembali gugatan/permohonan sebagai dokumen perubahan gugatan/permohonan.

h) Dalam hal terdapat termohon/tergugat/turut tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik, persidangan elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui, sedangkan termohon/tergugat/turut tergugat yang tidak menyetujui menyerahkan jawaban, duplik, dan simpulan kepada panitera pengganti melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

2) Perubahan/perbaikan gugatan/permohonan

a) Perubahan/perbaikan gugatan/permohonan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban.

---

[219] Pasal 6 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b) perubahan permohonan yang bersifat volunter dapat diajukan paling lambat sebelum pembuktian.

3) Proses persidangan lanjutan

a) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui SIP.

b) Panitera Pengganti mencatatkan semua data persidangan melalui SIP.

c) Tergugat/Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan.

d) Setelah hakim/majelis hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat/termohon secara elektronik, hakim/ketua majelis meneruskan jawaban kepada penggugat melalui SIP.

e) Dokumen asli jawaban tidak perlu diserahkan ke pengadilan.

4) Pembuktian

a) Selain bukti yang telah diunggah pada saat pendaftaran perkara dan pada saat pengajuan jawaban, para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai dan/atau alat bukti elektronik ke dalam SIP sebelum sidang untuk acara pembuktian.

b) Dalam hal terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a melebihi kapasitas yang disediakan oleh SIP, para pihak mengunggah dokumen tersebut melalui tautan (media penyimpanan daring) yang terdapat di dalam SIP.

c) Asli dari bukti surat yang fotokopinya telah diunggah ke dalam SIP diperlihatkan didepan persidangan untuk dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP dan hasilnya dicatat ke dalam berita acara sidang.

d) Fotokopi bukti surat bermeterai sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada hakim/majelis hakim.

e) Fotokopi bukti surat bermeterai yang diajukan oleh

tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diunggah oleh panitera pengganti ke dalam SIP.

f) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

g) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audiovisual dibebankan kepada pihak yang mengajukan yang disetorkan melalui rekening panjar biaya perkara.

h) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah.

i) Pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan.

j) Ketua pengadilan setempat menunjuk seorang panitera pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf i.

k) Persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dilaksanakan terhadap saksi dan/atau ahli yang berada di luar negeri pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

l) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf k dipandu oleh hakim/majelis hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di kantor perwakilan Indonesia tempat saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan.

m) Kepala kantor perwakilan indonesia di luar negeri tempat saksi dan/atau ahli memberikan

keterangan menunjuk seorang staf untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf k.

5) Putusan

a) Pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diregister[220].

b) Pemeriksaan terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor diputus paling lama 3 (tiga) hari sejak diregister[221].

c) Pemeriksaan terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor diputus paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diregister[222].

d) Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim dan panitera pengganti, serta diparaf setiap lembarnya oleh majelis hakim.

e) Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik.

f) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.

g) Pengucapan dan pengunggahan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.

h) Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.

i) pemberitahuan putusan/penetapan bagi tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik

---

[220] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[221] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[222] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

c. Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

1) Asas publisitas

Kurator atas perintah hakim pengawas mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit dalam berita negara dan paling sedikit pada 2 (dua) surat kabar elektronik (*e-Paper*) yang berisi tentang[223]:

a) hari, waktu, tempat, tanggal rapat Kreditor pertama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan; dan

b) batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak.

2) Pengajuan tagihan piutang

a) Pengajuan tagihan piutang oleh para Kreditor diajukan kepada Kurator.

b) Pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan domisili elektronik.

c) Hasil rekapitulasi tetap/sementara tersebut diunggah oleh Kurator ke dalam SIP.

3) Rapat kreditor

a) Rapat kreditor pertama dan rapat verifikasi sepenuhnya dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.

b) Dalam hal terdapat sanggahan/perbedaan dari para pihak maupun kendala lainnya yang tidak dapat diatasi secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, rapat dapat dilakukan secara langsung.

c) Rapat kreditor lanjutan dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual apabila ada bantahan terhadap tagihan yang diajukan oleh Kreditur dan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan maka diperiksa dengan prosedur renvoi.

4) Pemeriksaan permohonan prosedur renvoi[224]

---

[223] Pasal 15 ayat (4) jo Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[224] Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a) Prosedur renvoi adalah lembaga penyelesaian antara kreditor, debitor dan kurator tentang jumlah dan atau peringkat tagihan yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim pengawas dan diajukan penyelesaiannya ke majelis hakim pemutus.

b) Prosedur renvoi hanya dapat diajukan oleh hakim pengawas dengan menyertakan berkas perkara termasuk laporan, bukti-bukti dan bantahan-bantahan.

c) Hanya bantahan terhadap tagihan yang diajukan pada saat rapat pencocokan piutang yang dapat diajukan ke proses prosedur renvoi kecuali bantahan yang dimaksudkan sebagaimana pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

d) Pihak yang mengajukan bantahan terhadap tagihan di luar pencocokan rapat piutang bukan merupakan objek prosedur renvoi.

e) Hari, tanggal, waktu dan tempat persidangan ditentukan oleh hakim pengawas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan majelis hakim pemutus dan sekaligus memerintahkan para pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan[225].

f) Dalam pemeriksaan prosedur renvoi para pihak harus diwakili oleh advokat[226].

g) Perkara permohonan renvoi diperiksa secara sederhana[227].

h) Persidangan prosedur renvoi dilakukan secara elektronik dengan mendengar kurator dan para pihak.

---

[225] SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
[226] Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[227] Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

i) Putusan pengadilan mengenai prosedur renvoi diucapkan secara elektronik.

j) Upaya hukum atas permohonan renvoi prosedur adalah kasasi ke Mahkamah Agung[228].

5) Rencana perdamaian

a) Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit diunggah ke SIP.

b) Rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh para kreditor melalui SIP.

c) Sanggahan dari para kreditor diajukan kepada Kurator untuk diinventarisasi.

d) Daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diunggah oleh kurator ke SIP.

e) Rapat pembahasan rencana perdamaian dilakukan secara jarak jauh melalui komunikasi audiovisual.

f) Pemungutan suara dalam rapat kreditor dilakukan secara elektronik dengan cara menyatakan[229]:

(1) setuju; atau

(2) tidak setuju.

pada kolom yang tersedia pada SIP.

6) Pembetulan berita acara rapat pemungutan suara

a) Permohonan pembetulan berita acara rapat pemungutan suara diajukan secara elektronik;

b) Proses persidangan pembetulan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara elektronik.

7) Sidang pengesahan perdamaian (homologasi) dilakukan secara elektronik[230].

8) Upaya Hukum kasasi terhadap putusan pengesahan perdamaian diajukan secara elektronik[231].

---

[228] Pasal 68 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[229] Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[230] Pasal 158 jo Pasal 159 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[231] Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

9) Pembatalan Perdamaian[232]:
   a) permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan diajukan secara elektronik;
   b) proses persidangan pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan dilakukan secara elektronik.
10) Insolvensi[233]
   a) keadaan insolvensi dimuat dalam berita acara rapat kreditor yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan sekretaris/panitera pengganti;
   b) berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a diunggah oleh sekretaris ke SIP;
   c) panitera selanjutnya mengeluarkan surat keterangan tentang insolvensi tersebut bilamana diminta oleh instansi lain[234].
11) Pengurusan
   a) Kurator wajib membuat:
      (1) jadwal kerja sebelum melaksanakan pengurusan; dan
      (2) laporan perkembangan pengurusan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap saat apabila diminta oleh hakim pengawas dan/atau kreditor[235].
   b) Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diunggah oleh Kurator ke SIP.
   c) Laporan Kurator juga wajib ditembuskan kepada Kreditor dan Debitor Pailit atau kuasanya melalui surat tercatat, surel, atau aplikasi.[236]
12) Pemberesan
   a) Hakim pengawas melalui SIP berwenang untuk meminta kurator untuk memberikan laporan

---

[232] Pasal 170 jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[233] Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[234] SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan
[235] Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[236] Putusan MK No. 74/PUU-XXIV/2026

tertulis terkait dengan pengurusan dan pemberesan yang dilakukan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu[237].

b) Melanjutkan usaha debitor[238]

(1) laporan kurator tentang perkembangan harta debitor diunggah ke dalam SIP;

(2) usulan dari kurator dan/atau para kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor (*on going concern*) diajukan oleh kurator kepada hakim pengawas secara elektronik;

(3) kurator mengundang para kreditor untuk membahas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui media elektronik;

(4) sekretaris mengunggah pengumuman panggilan tersebut ke SIP;

(5) rapat untuk memperoleh persetujuan untuk melanjutkan usaha debitor dilakukan secara jarak jauh melalui komunikasi audiovisual;

(6) berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 diunggah ke SIP;

(7) kurator menyampaikan laporan perkembangan kelanjutan usaha debitor yang diunggah melalui SIP.

c) Penjualan harta pailit[239]

(1) Sekretaris mengunggah pengumuman benda yang akan dijual ke SIP atau melalui lelang umum[240].

(2) Usulan penunjukan juru taksir (*appraiser*) diajukan oleh kurator kepada hakim pengawas secara elektronik.

(3) Hakim pengawas menetapkan juru taksir yang ditunjuk secara elektronik dalam SIP.

---

[237] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan

[238] Pasal 104 ayat (1) jo Pasal 179 ayat (1) jo Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[239] Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[240] Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(4) Penyumpahan juru taksir oleh hakim pengawas dilakukan secara langsung,

(5) Berita acara penyumpahan juru taksir oleh hakim pengawas diunggah ke SIP.

(6) Dalam hal harta pailit tidak laku terjual melalui penjualan di muka umum sebanyak 2 (dua) kali, kurator mengajukan permohonan secara elektronik kepada hakim pengawas untuk melakukan penjualan di bawah tangan[241].

d) Daftar pembagian harta pailit[242]

(1) Daftar pembagian harta pailit yang telah dibuat oleh kurator dan disetujui oleh hakim pengawas diunggah ke SIP dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim pengawas.

(2) Kurator mengumumkan daftar pembagian harta pailit yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas dalam 2 (dua) surat kabar elektronik.

(3) Terhadap daftar pembagian harta pailit dapat diajukan keberatan secara elektronik, baik melalui kuasa hukum maupun secara langsung, dengan terlebih dahulu mendapatkan akun pada SIP di pengadilan terdekat bagi yang belum memiliki akun[243].

(4) Keberatan atas daftar pembagian harta pailit harus disertai dengan alasan dan bukti pendukung dalam bentuk elektronik/ digital[244].

(5) Hakim pengawas menetapkan hari sidang dan jurusita memanggil para pihak secara elektronik melalui SIP, sedangkan untuk

---

[241] Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[242] Pasal 192 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[243] Pasal 193 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[244] Pasal 194 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kreditor yang tidak terdaftar sebagai pengguna dipanggil melalui sarana elektronik lainnya.

(6) Persidangan keberatan atas daftar pembagian harta pailit dilakukan secara elektronik.

(7) Panitera Pengganti mengunggah putusan terhadap keberatan atas daftar pembagian harta pailit ke SIP.

(8) Upaya hukum kasasi terhadap putusan keberatan atas daftar pembagian harta pailit diajukan secara elektronik[245].

e) Daftar pembagian harta pailit lanjutan

(1) Hakim pengawas melalui SIP memerintahkan Kurator untuk melakukan pemberesan.[246]

(2) Kurator atas perintah hakim pengawas melakukan pemberesan dan membuat daftar pembagian lanjutan berdasarkan daftar pembagian harta pailit terdahulu.

(3) Daftar pembagian lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diunggah ke SIP.

(4) Terhadap daftar pembagian harta pailit lanjutan dapat diajukan keberatan secara elektronik.

(5) Tata cara pemeriksaan keberatan atas daftar pembagian harta pailit lanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) angka 4 sampai dengan angka 7.

(6) Upaya hukum terhadap putusan keberatan daftar pembagian harta pailit lanjutan dilakukan secara elektronik.

13) Pengakhiran Kepailitan[247]

a) Kurator wajib untuk mengumumkan pengakhiran

---

[245] Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[246] Pasal 198 ayat (3) juncto Pasal 203 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[247] Pasal 18, Pasal 166, Pasal 202, Pasal 207 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kepailitan dalam berita negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar elektronik yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

b) Panitera Pengganti mengumumkan pengakhiran kepailitan tersebut dengan cara mengunggah ke SIP.

14) Rehabilitasi

a) Permohonan rehabilitasi diajukan oleh debitor atau ahli warisnya secara elektronik[248].

b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan bukti telah terbayarnya semua utang terhadap kreditor yang diakui secara memuaskan[249].

c) Pemohon mengumumkan permohonan rehabilitasi paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar elektronik yang ditunjuk oleh pengadilan[250].

d) Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan rehabilitasi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan[251].

e) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d diajukan secara elektronik.

f) Putusan terhadap permohonan rehabilitasi diucapkan secara elektronik.

d. Proses pengurusan PKPU

1) Asas publisitas[252]

Setelah menerima salinan putusan, hakim pengawas dalam waktu paling lama 5 (lima) hari membuat penetapan yang memerintahkan pengurus untuk melaksanakan pengumuman melalui 2 (dua) surat kabar harian dan berita negara serta SIP yang memuat:

---

[248] Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[249] Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[250] Pasal 217 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[251] Pasal 218 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[252] Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a) amar putusan PKPU sementara;
b) nama hakim pengawas, nama dan alamat pengurus, serta nama debitor;
c) panggilan atau undangan kepada para kreditor dan debitor untuk hadir pada rapat kreditor pertama;
d) tanggal, tempat, dan waktu rapat kreditor pertama diadakan;
e) rencana perdamaian apabila telah dilampirkan pada saat permohonan PKPU;
f) tanggal batas akhir pengajuan tagihan;
g) tanggal, tempat, dan waktu diadakan rapat pencocokan piutang (verifikasi);
h) link/tautan (media penyimpanan *online*) pengajuan tagihan piutang; dan
i) tanggal, tempat, dan waktu rapat permusyawaratan hakim paling lama hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.

2) Rapat kreditor pertama PKPU sementara

Rapat Kreditor pertama PKPU sementara dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.

3) Rapat kreditor lanjutan PKPU sementara:
a) rencana perdamaian dari debitor diunggah ke SIP;
b) rapat kreditor lanjutan PKPU sementara dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.

4) Rapat pencocokan piutang dalam PKPU sementara:
a) rapat pencocokan piutang dalam PKPU sementara dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual;
b) dalam hal terdapat sanggahan/perbedaan dari para pihak ataupun kendala lain yang tidak dapat diatasi secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, rapat dapat dilakukan secara langsung;
c) apabila terdapat perbedaan tagihan, hakim pengawas membuat penetapan Kreditur yang

tagihannya dibantah untuk ikut serta dalam Pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditur tersebut[253].

d) penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c diunggah ke dalam SIP.

5) Pemungutan suara untuk pemberian PKPU tetap dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual[254].

6) Rencana perdamaian[255]:

a) rapat pembahasan rencana perdamaian dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual;

b) hakim pengawas memerintahkan sekretaris untuk mengunggah hasil pemungutan suara ke SIP;

c) penandatanganan perdamaian oleh para pihak dilakukan secara elektronik dengan cara menyatakan:

1) setuju; atau

2) tidak setuju pada kolom yang tersedia pada SIP.

d) Hakim pengawas menyampaikan laporan kepada hakim pemutus secara elektronik bahwa[256]:

1) telah tercapai perdamaian; atau

2) rencana perdamaian ditolak oleh para kreditor.

e) Berita acara rapat rencana perdamaian dan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d diunggah ke SIP.

7) Putusan dan upaya hukum

a) Putusan atas perdamaian dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

---

[253] Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[254] Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[255] Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[256] Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(1) putusan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti;

(2) putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;

(3) pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP;

(4) pengucapan dan pengunggahan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pada hari dan tanggal yang sama;

(5) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan untuk umum pada SIP;

(6) pemberitahuan putusan bagi tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

b) Upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan secara elektronik.

8) Insolvensi

a) Dalam hal debitor dinyatakan pailit, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

b) Pernyataan Debitur berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam rapat Kreditur dan dituangkan dalam berita acara tidak perlu dengan Penetapan[257].

9) Gugatan lain-lain

a) Putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat

---

[257] SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan

kedudukan hukum debitor[258].

b) Yang dimaksud dengan ”hal-hal lain” adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan pailit karena kelalaiannya.

c) Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk ”hal-hal lain” adalah sama dengan hukum acara yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya[259].

d) Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi[260] dan peninjauan kembali[261] ke Mahkamah Agung.

10) Dalam hal rencana perdamaian ditolak maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan kepada pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat, dan dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim pengawas.

11) Terhadap hasil pemungutan suara yang menolak rencana perdamaian, hakim pengawas melaporkan kepada majelis pemutus selanjutnya majelis pemutus menyatakan debitor pailit dalam sidang yang ditentukan untuk itu.[262]

12) Dalam putusan pernyataan pailit yang berasal dari

---

[258] Pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[259] Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[260] Pasal 11 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[261] Pasal 295 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[262] Pasal 289 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU harus ditunjuk hakim pengawas dan kurator.

13) Kurator yang ditunjuk sedapat mungkin adalah pengurus dalam PKPU tersebut.

14) Pengurusan dan penjualan harta pailit:

a) Pengurusan

(1) Kurator membuat:

(a) jadwal kerja sebelum melaksanakan pengurusan;

(b) laporan perkembangan pengurusan setiap 3 (tiga) bulan dan/ atau setiap saat apabila diminta oleh hakim pengawas dan/ atau kreditor.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 diunggah oleh kurator ke SIP.

b) Penjualan harta pailit

Tata cara dan prosedur penjualan harta pailit dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) sekretaris mengunggah pengumuman benda yang akan dijual ke SIP;

(2) usulan penunjukan juru taksir (*appraiser*) diajukan oleh kurator kepada hakim pengawas secara elektronik;

(3) hakim pengawas menetapkan juru taksir yang ditunjuk secara elektronik dalam SIP;

(4) penyumpahan juru taksir oleh hakim pengawas dilakukan secara langsung;

(5) berita acara penyumpahan juru taksir oleh hakim pengawas diunggah ke SIP;

(6) dalam hal harta pailit tidak laku terjual melalui penjualan di muka umum sebanyak 2 (dua) kali, kurator mengajukan permohonan secara elektronik kepada hakim pengawas untuk melakukan penjualan di bawah tangan[263].

---

[263] Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

15) Debitor dinyatakan pailit dalam proses PKPU

Dalam hal debitor dinyatakan pailit dalam proses PKPU sementara maupun dalam proses PKPU tetap, pengucapan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) putusan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti;
b) putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;
c) pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP;
d) pengucapan dan pengunggahan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada hari dan tanggal yang sama;
e) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan untuk umum pada SIP;
f) pemberitahuan putusan bagi termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

16) Pengakhiran PKPU[264]

a) Pengakhiran PKPU dapat dilakukan dengan cara:
   (1) permintaan/permohonan hakim pengawas;
   (2) 1 (satu) atau lebih kreditor;
   (3) prakarsa majelis hakim;
   (4) permintaan/permohonan pengurus;
   (5) permohonan pencabutan oleh debitor.
b) Pengakhiran PKPU sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara elektronik.
c) Tata cara pemeriksaan permintaan/permohonan pengakhiran PKPU dilakukan dengan cara:
   (1) pemanggilan dilakukan secara elektronik;
   (2) tanggapan terhadap permintaan/

[264] Pasal 255 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

permohonan pengakhiran PKPU diajukan secara elektronik;

(3) pembuktian dapat dilakukan secara langsung atau secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audiovisual;

(4) tata cara pelaksanaan pembuktian secara audiovisual dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

(a) persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan;

(b) segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audiovisual dibebankan kepada pihak yang mengajukan yang disetorkan melalui rekening panjar biaya perkara;

(c) persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah;

(d) pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan;

(e) ketua pengadilan setempat menunjuk seorang panitera pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf c;

(f) persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan

terhadap saksi dan/ atau ahli yang berada di luar negeri pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri;

(g) pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf f dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di kantor perwakilan indonesia tempat saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan;

(h) kepala kantor perwakilan Indonesia di luar negeri tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan menunjuk seorang staf untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

(5) putusan terhadap permohonan pengakhiran PKPU dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) putusan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti;

(b) putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;

(c) pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP dilakukan pada hari dan tanggal yang sama;

(d) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan untuk umum pada SIP;

(e) pemberitahuan putusan bagi termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat

tercatat.

17) Pembatalan perdamaian yang berasal dari PKPU[265]

a) Permohonan pembatalan perdamaian dalam PKPU dilakukan secara elektronik dan dapat disertai dengan bukti surat.

b) Pemanggilan kepada debitor dilakukan secara elektronik.

c) Tanggapan terhadap permohonan pembatalan perdamaian dilakukan secara elektronik disertai bukti surat.

d) Dalam hal diperlukan pembuktian, pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung atau secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audiovisual.

e) Tata cara pelaksanaan pembuktian secara audiovisual dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

(1) persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan;

(2) segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audiovisual dibebankan kepada pihak yang mengajukan yang disetorkan melalui rekening panjar biaya perkara;

(3) persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah;

(4) pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim pemeriksa perkara

---

[265] Pasal 291 jo Pasal 170 jo Pasal 171 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan;

(5) ketua pengadilan setempat menunjuk seorang panitera pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada angka 3;

(6) persidangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan terhadap saksi dan/ atau ahli yang berada di luar negeri pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri;

(7) pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada angka 6 dipandu oleh hakim/majelis hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di kantor perwakilan Indonesia tempat saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan;

(8) Kepala kantor perwakilan indonesia di luar negeri tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan menunjuk seorang staf untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

f) Dalam hal majelis hakim memberikan kelonggaran waktu kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya, hal tersebut dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diunggah ke SIP.

g) Putusan atas permohonan pembatalan perdamaian dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) putusan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti;

(2) putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;

(3) pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara hukum dilakukan

dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP pada hari dan tanggal yang sama;

(4) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan ke dalam SIP;

(5) pemberitahuan putusan bagi termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

h) Upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud pada huruf g diajukan secara elektronik.

18) Rehabilitasi[266]

Tata cara permohonan rehabilitasi atas kepailitan yang berasal dari PKPU dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) permohonan rehabilitasi diajukan oleh debitor atau ahli warisnya secara elektronik;

b) permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan bukti telah terbayarnya semua utang terhadap kreditor yang diakui secara memuaskan;

c) pemohon mengumumkan permohonan rehabilitasi paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar elektronik yang ditunjuk oleh pengadilan;

d) kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan rehabilitasi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan;

e) permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d) diajukan secara elektronik;

f) putusan terhadap permohonan rehabilitasi diucapkan secara elektronik sesuai ketentuan sebagai berikut:

(1) putusan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera

---

[266] Pasal 215 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pengganti;

(2) putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;

(3) pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP pada hari dan tanggal yang sama;

(4) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan ke dalam SIP;

(5) pemberitahuan putusan bagi termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

19) Upaya Hukum

a) Kasasi

(1) Pendaftaran Kasasi

(a) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perkara kepailitan adalah kasasi ke Mahkamah Agung[267]

(b) Terhadap perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun[268] Kecuali Permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditur tetapi rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur ditolak oleh Kreditor[269]

(c) Putusan yang mengabulkan pengesahan perdamaian dalam PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi[270]

(d) Putusan yang menolak pengesahan perdamaian dalam PKPU tidak dapat

---

[267] Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[268] Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[269] Putusan Mahkamah Konstitusi No.23/PUU-IXX/2011

[270] Pasal 285 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

diajukan upaya hukum kasasi[271]

(e) Upaya Hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum[272]

(f) Prosedur pengajuan dan pendaftaran gugatan perkara kepailitan dan PKPU pada Pengadilan Niaga berlaku pada pendaftaran permohonan kasasi.

(g) Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh pemohon ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

(h) Setelah pemohon kasasi menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, pemohon kasasi diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani petugas kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan

(i) Petugas register pada meja kepaniteraan mencatat tanggal pengajuan permohonan pada register induk dan register kasasi perkara kepailitan dan PKPU

(j) Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonan kasasi untuk ditandatangani oleh panitera dan pemohon kasasi kemudian dilampirkan pada berkas perkara

(k) Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas urusan upaya hukum kepailitan dan PKPU pada meja kepaniteraan untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat pada register induk dan register kasasi

---

[271] Pasal 285 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[272] Pasal 293 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kepailitan dan PKPU dan diunggah ke SIP

(l) Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi kepada petugas kepaniteraan muda niaga pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan

(m) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(n) Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan Panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi pada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

(o) Panitera wajib menyampaikan permohonan memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.[273]

(p) Dalam hal permohonan kasasi diajukan oleh pihak tidak beracara secara elektronik, petugas PTSP wajib memberikan tanda terima memori kasasi yang ditandatangani oleh panitera selanjutnya panitera mengirimkan permohonan serta memori kasasi kepada pihak Termohon Kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kalender

---

[273] Pasal 12 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sejak memori kasasi diterima.

(q) Dalam hal termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi, maka salinan kontra memori kasasi tersebut harus sudah disampaikan kepada petugas pada kepaniteraan muda niaga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi.

(r) Petugas PTSP menerima salinan kontra memori kasasi dan menyerahkan kepada panitera, agar panitera dapat menyampaikan salinan tersebut kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah kontra memori kasasi diterima

(2) Pemberkasan kasasi

(a) Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A bundel B.

(b) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga.

Bundel A berisi:

- surat gugatan;
- penetapan penunjukan majelis hakim;
- penetapan hari sidang;
- panggilan-panggilan;
- berita acara sidang dilengkapi dengan berita acara rapat kreditur selama proses kepailitan/PKPU, berita acara insolvensi, penetapan-penetapan dan laporan hakim pengawas selama proses

kepailitan/PKPU berlangsung;

- jawaban/tanggapan dan bukti-bukti surat, dimasukkan dalam berita acara
- surat kuasa khusus kedua belah pihak yang berperkara;
- tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;
- penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (jika ada);
- berita acara sita jaminan/penyegelan (jika ada);
- lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak (jika ada);
- surat-surat bukti pemohon;
- surat-surat bukti termohon;
- surat-surat lainnya;
- salinan putusan

(c) Bundel B memuat permohonan Kasasi, memori, kontra memori, dan lain sebagainya, yang diperuntukan sebagai arsip Mahkamah Agung

Bundel B berisi:

- berita acara pemberitahuan isi putusan pengadilan niaga kepada kedua belah pihak;
- akta permohonan kasasi;
- surat kuasa khusus dari pemohon kasasi;
- memori kasasi dan atau surat keterangan apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi;
- tanda terima memori kasasi;
- berita acara pemberitahuan kasasi kepada termohon;
- salinan putusan pengadilan niaga.

(d) Petugas kepaniteraan niaga menyiapkan berkas tersebut di atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi.

b) Peninjauan Kembali

(1) Pendaftaran peninjauan kembali[274]

(a) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(b) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

(c) Permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu sebagai berikut:

- paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap
- Pengajuan Permohonan Peninjauan

[274] Pasal 295 - 297 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kembali berdasarkan putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan.
- Panitera Pengadilan mendaftar permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
- Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan
- Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti

pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

- Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.
- Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

(2) Pemberkasan Peninjauan Kembali

Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas. menyusun dan memastikan kelengkapan berkas peninjauan kembali, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A dan bundel B.

(a) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pada pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga.

Bundel A berisi:

- surat permohonan;
- penetapan penunjukan majelis hakim;
- penetapan hari sidang;
- panggilan-panggilan;
- berita acara sidang (jawaban/tanggapan dan bukti-bukti surat, dimasukkan dalam berita acara);
- surat kuasa khusus kedua belah pihak;

- tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;
- penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (jika ada);
- berita acara sita jaminan/penyegelan (jika ada);
- lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak (jika ada);
- surat-surat bukti pemohon;
- surat-surat bukti termohon;
- surat-surat lainnya;
- salinan putusan.

(b) Bundel B berisi:

- berita acara pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung kepada pemohon dan termohon atau berita acara pemberitahuan isi putusan pengadilan niaga (bila permohonan peninjauan kembali itu atas putusan pengadilan niaga);
- akta permohonan peninjauan kembali;
- surat permohonan peninjauan kembali, beserta dengan alasan-alasannya dilampiri dengan surat bukti;
- tanda terima surat permohonan peninjauan kembali;
- surat kuasa khusus;
- surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan;
- jawaban/kontra permohonan peninjauan kembali;
- salinan putusan pengadilan niaga;
- salinan putusan kasasi mahkamah

agung;

- tanda bukti setoran biaya dari bank
- surat-surat lainnya

B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan Gugatan

Untuk jenis perkara hak kekayaan intelektual terkait Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Rahasia Dagang penyelesaian sengketanya menjadi wewenang Pengadilan Negeri sedangkan jenis perkara hak kekayaan intelektual terkait Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu penyelesaian sengketanya di Pengadilan Niaga yang berwenang.

1) Pendaftaran gugatan secara elektronik[275]

Pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara elektronik melalui SIP dengan tahapan sebagai berikut:

a) Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri atau memilih pengadilan niaga yang berwenang;
b) mengunggah surat kuasa khusus/ surat tugas (jika ada);
c) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
d) menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya;
e) menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
f) mengunggah dokumen gugatan;
g) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan
h) melakukan pembayaran secara elektronik.

[275] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

2) Pendaftaran gugatan secara manual

a) Petugas pada PTSP bertanggung jawab untuk penerimaan berkas perkara, menerima gugatan Kekayaan Intelektual (KI).

b) Petugas meja kepaniteraan menerima dan meneliti *checklist* setiap gugatan yang diajukan penggugat.

c) Penggugat dapat diwakili oleh advokat berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan gugatan kepada panitera muda niaga.

d) Pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilaksanakan menggunakan SIP dengan syarat sudah memiliki akun pengguna serta melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

e) Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara yang dilaksanakan secara elektronik pada SIP dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*) dan meneruskan daftar periksa tersebut kepada panitera muda niaga untuk menyatakan berkas lengkap/tidak lengkap.

f) Panitera muda niaga menginformasikan berkas elektronik yang belum lengkap maupun tidak sesuai ke pendaftar melalui domisili elektronik pendaftar dengan melampirkan daftar periksa, supaya penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya dengan batas waktu yang telah ditentukan.

g) Terhadap pihak pendaftar yang tidak dapat memenuhi kekurangan/ketidaksesuaian

kelengkapan berkas perkara sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan maka panitera muda niaga menyatakan pendaftaran perkara secara elektronik tidak dapat dilanjutkan pada SIP, serta memerintahkan kasir untuk melakukan pengembalian panjar perkara melalui rekening pendaftar dengan memperhitungkan biaya transfer.

h) Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (jika ada).[276]

i) Terhadap pendaftaran perkara secara elektronik, kepaniteraan niaga melakukan penggandaan surat gugatan sebanyak jumlah pihak dengan biaya yang berasal dari panjar biaya perkara.

j) Surat gugatan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan oleh penggugat atau kuasanya beserta softcopynya kepada petugas penerima berkas sebanyak jumlah pihak ditambah salinan berkas sebanyak hakim/majelis hakim dan arsip.

k) Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*), dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda niaga untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap.

l) Panitera muda niaga mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan dalam daftar periksa (*checklist*);

m) Dokumen (surat-surat) yang berupa fotokopi harus diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan.

---

[276] Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

n) Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM dengan ketentuan:
   (1) dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara sesuai dengan keputusan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri/niaga;
   (2) ketua pengadilan negeri/niaga dalam menentukan panjar biaya perkara harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya;
   (3) dalam memperhitungkan panjar biaya perkara bagi pengadilan tingkat pertama agar mempertimbangkan pula biaya perkara dan biaya proses yang dipertanggung jawabkan dalam putusan;

o) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.

p) Penambahan biaya perkara harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan. Penambahan tersebut dibayarkan melalui *virtual account* yang didapat dari SIP dan harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan *generate*. Apabila *virtual account* tidak dapat digunakan ataupun sudah melebihi batas waktu 1 (satu) hari maka kepaniteraan niaga melakukan *generate* ulang *virtual account* dan menginformasikannya kepada pihak. Apabila sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan penambahan biaya perkara tidak

dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dibuat penetapan yang ditandatangani oleh majelis hakim. Penetapan tersebut selanjutnya dicatatkan pada SIP dan dicatat pencoretannya dalam buku register induk perkara dan buku jurnal, selanjutnya diberitahukan kepada para pihak.[277]

q) Pada Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM dalam rangkap tiga:
   (1) lembar pertama untuk penggugat;
   (2) lembar kedua untuk kasir;
   (3) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas gugatan.

r) Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM, kemudian SKUM diserahkan kepada penggugat atau kuasanya agar membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang telah ditunjuk pengadilan negeri/niaga.

s) Kasir menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM setelah menerima bukti pembayaran (apabila dilakukan secara manual).

t) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.

u) Nomor halaman buku jurnal menjadi nomor unit urut perkara yang oleh kasir, kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugatan. Penomoran perkara dengan memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

v) Petugas pada meja kepaniteraan kemudian melengkapi data pendaftaran perkara pada menu

---

[277] Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1967 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya

data umum pada SIP dan register induk perkara niaga sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang kas.

w) Pengisian kolom-kolom register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara, terkecuali bagi pengadilan yang sudah mendapatkan ijin untuk pelaksanaan register secara penuh.

x) Pengisian SIP dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/SK//HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum dan juga pada kolom-kolom register perkara.

y) Panitera muda niaga menyerahkan berkas kepada panitera untuk diteruskan kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari[278] setelah tanggal gugatan didaftarkan;

z) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari[279] setelah tanggal gugatan KI didaftarkan, majelis mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

b. Register Perkara

1) Perkara KI

a) Untuk mencatat dan mengelola data mengenai perkara KI, diadakan suatu pencatatan yang teratur dan sistematis dalam suatu register

---

[278] sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2016
[279] sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2016

perkara KI yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut.

b) Penyelenggaraan pendaftaran perkara dalam register perkara harus dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam buku jurnal keuangan masing-masing dan tidak boleh ditunda-tunda.

c) Pemberian nomor register bagi perkara KI dilakukan dengan aturan sebagai berikut: (.../Pdt.Sus-HKI/Merek/jenis perkara KI)/ 200../PN.Niaga ...).

d) Pemberian nomor register dilakukan berdasarkan urutan nomor dalam Buku Jurnal; (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

2) Jenis register perkara KI pada pengadilan niaga

a) Register induk perkara KI

Register tersebut adalah register utama yang memuat segala keterangan mengenai setiap gugatan perkara KI yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

b) Register permohonan kasasi perkara KI

Register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan kasasi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara KI yang sedang berjalan.

c) Register permohonan peninjauan kembali perkara

Register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pihak dalam perkara KI yang sedang berjalan.

3) Tata cara pengisian register perkara

a) Data perkara serta segala kegiatan yang menyangkut jalannya perkara harus dicatatkan ke SIP dan dicatat dalam register induk.

b) Pencatatan kegiatan sesuai jalannya perkara harus dilakukan tepat waktu, menggunakan tinta hitam.

c) Pencatatan data pada register dilaksanakan sesuai dengan data asli yang tercantum dalam surat gugatan (pencatatan data tidak dapat disingkat kecuali data asli menggunakan singkatan).

d) Pada pencatatan awal, apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi disambung pada lembar berikutnya untuk pencatatan selanjutnya mengingat lembar berikutnya telah digunakan untuk mencatat perkara lain, apabila lembar yang disediakan tidak mencukupi ditempel kertas ke bawah.

e) Data kegiatan untuk perkara yang diajukan kasasi peninjauan kembali, selain dicatat dalam register Induk juga dicatat dalam register kasasi dan peninjauan kembali.

f) Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register dengan perincian keadaan per sebagai berikut:

Sisa bulan lalu :..... perkara
Masuk bulan ini :..... perkara
Putus bulan ini :..... perkara
Sisa bulan ini :..... perkara

Setelah penutupan pada akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk periode 1 (satu) tahun;

g) Penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri/niaga, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa tahun lalu :..... perkara
Masuk tahun ini :..... perkara
Putus tahun ini :..... perkara
Sisa tahun ini :..... perkara

h) Register permohonan kasasi, register peninjauan

kembali ditutup setiap akhir tahun dengan rekapitulasi :

Sisa tahun lalu	:..... perkara
Masuk tahun ini	:..... perkara
Putus tahun ini	:..... perkara
Sisa tahun ini	:..... perkara
Sisa akhir	:..... perkara
Sudah dikirim	:..... perkara
Belum dikirim	:..... perkara

i) Pembetulan pencatatan pada register tidak diperbolehkan menggunakan *tipe-ex*, melainkan harus direnvoi dan ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan.

c. Buku Keuangan Perkara

1) Keuangan perkara pada pengadilan niaga diselenggarakan secara tersendiri oleh bendahara kepaniteraan niaga yang merupakan bagian dari meja kepaniteraan.
2) Pembayaran seluruh biaya perkara (gugatan, permohonan penetapan sementara, kasasi dan peninjauan kembali) diterima oleh pemegang kas.
3) Pemegang kas menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan kepada kas negara seminggu sekali.
4) Pemegang kas melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang terkait ke dalam buku induk dan jurnal keuangan perkara niaga menurut jenis-jenisnya.
5) Buku keuangan KI pada pengadilan niaga terdiri dari:
   a) buku induk keuangan perkara KI;
   b) buku jurnal keuangan perkara KI;
   c) buku jurnal keuangan perkara permohonan kasasi perkara KI;
   d) buku jurnal keuangan perkara permohonan peninjauan kembali perkara KI;
   e) buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.

6) Pembuatan dan pencatatan buku jurnal dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
   a) pada halaman awal buku jurnal dibuat catatan tentang banyaknya halaman dari buku jurnal yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua pengadilan niaga;
   b) tiap lembar buku jurnal diberikan nomor halaman, halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani oleh ketua pengadilan, sedang halaman lainnya diparaf;
   c) pencatatan buku jurnal untuk setiap nomor perkara menggunakan 1 (satu) halaman dua muka;
   d) pencatatan buku jurnal dimulai pada saat perkara diterima, ditutup pada saat perkara diputus dan dibuka kembali apabila ada pemberitahuan putusan;
   e) hak-hak kepaniteraan yang berupa pencatatan kasasi dikeluarkan pada saat/setelah diterimanya panjar biaya perkara;
   f) biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus;
   g) pengeluaran uang untuk keperluan lainnya di dalam lingkup hak-hak kepaniteraan, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
   h) semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan adalah merupakan pendapatan negara, setiap minggu sekali pemegang kas harus menyetor kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas negara;
   i) jenis pengeluaran uang pada buku jurnal harus sesuai dengan jenis pengeluaran uang yang telah ditentukan pada kolom buku induk keuangan perkara;
   j) semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang setelah dicatat dalam buku jurnal harus dipindahkan ke dalam buku kas bantu yang pencatatannya dibuat tindasan rangkap dua;
   k) setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari buku

kas bantu yang berupa lembaran kertas diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku induk dan sekaligus sebagai laporan penerimaan dan pengeluaran uang harian kepada panitera;

l) Untuk perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali pada kolom keterangan buku jurnal tingkat pertama harus diberikan catatan tentang tanggal pengajuan kasasi dan peninjauan kembali, nomor halaman serta tahun perkara tersebut dicatat.

7) Buku induk terbagi pada dua jenis, yaitu:
   a) buku induk keuangan perkara KI;
   b) buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.

8) Tata cara pembuatan dan pencatatan pada buku induk:
   a) buku induk adalah buku untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang untuk semua perkara, yang pencatatannya secara berurutan dimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhir bulan;
   b) buku induk dikelola oleh panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan surat keputusan ketua pengadilan negeri/ niaga;
   c) pencatatan data pada buku induk harus sama dengan data yang ada pada buku jurnal;
   d) penutupan buku induk secara rutin dilakukan pada setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri/niaga;
   e) dalam rangka pemeriksaan, setiap saat ketua pengadilan negeri/niaga dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan (pemeriksaan mendadak oleh ketua pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali);
   f) pada penutupan buku induk keuangan, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas atau

disimpan di bank, serta uraian secara terperinci jenis mata uang yang ada dalam brankas;

g) apabila dalam penutupan terdapat selisih jumlah uang antara buku kas dan uang kas sesungguhnya, harus dijelaskan alasan terdapatnya selisih, selisih uang tersebut harus merupakan selisih lebih dan tidak boleh terdapat selisih kurang.

9) Ketua pengadilan negeri/niaga sebelum menandatangani buku induk keuangan, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang disimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.

10) Buku jurnal dan buku induk harus diganti tiap tahun, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

11) Pemegang kas membuat laporan keuangan perkara niaga setiap bulannya.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a) Pemanggilan

Pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik/surat tercatat oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

b) Penunjukan majelis hakim

1) Setelah perkara didaftarkan pada register, paling lambat 2 (dua) hari kerja dan untuk hak cipta paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pendaftaran petugas register harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada panitera melalui panitera muda niaga.

2) Panitera pengganti membuat serta melampirkan formulir waktu penyelesaian perkara (matrik/*court calender*) pada berkas tersebut yang berfungsi sebagai

kalender persidangan perkara (sesuai formulir yang ditentukan).

3) Ketua pengadilan negeri/niaga menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara, kemudian menyerahkan kepada panitera yang akan menunjuk panitera pengganti dan jurusita.

4) Setelah majelis hakim menerima dan mempelajari berkas perkara kemudian menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

c) Pemeriksaan di persidangan

1) Pada hari sidang pertama majelis hakim memeriksa syarat formal gugatan: surat kuasa dari penggugat, kartu advokat, berita acara sumpah advokat, AD/ART apabila pemberi kuasanya adalah badan hukum.

2) Majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian tanpa menggunakan prosedur mediasi kecuali Perkara Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman.[280]

3) Tata cara pemeriksaan persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara perdata biasa.

d) Putusan

Putusan harus diucapkan:

1) 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah perkara diterima oleh majelis hakim yang memeriksa perkara merek dan indikasi geografis;[281]

2) 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak tanggal gugatan perkara paten didaftarkan;[282]

3) 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak gugatan perkara hak cipta didaftarkan;[283]

4) 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah gugatan perkara desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu didaftarkan;[284]

---

[280] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
[281] Pasal 85 ayat (7) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[282] Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[283] Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[284] Pasal 39 ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 31 ayat (8) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

5) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan perkara hukum acara perdata umum;

6) Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang berbeda tersebut dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya.

e) Upaya Hukum

1) Banding

Permohonan banding untuk jenis perkara hak kekayaan intelektual terkait Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Rahasia Dagang pada prinsipnya sama dengan permohonan banding pada perkara perdata umum.

2) Kasasi

a) Pendaftaran kasasi

(1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perkara KI, adalah dengan mengajukan kasasi.

(2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran gugatan perkara KI pada Pengadilan Niaga, mutatis mutandis berlaku pada pendaftaran permohonan kasasi.

(3) Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh pemohon ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(4) Setelah pemohon kasasi menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, pemohon kasasi diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani petugas kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

(5) Petugas register pada meja kepaniteraan mencatat tanggal pengajuan permohonan pada register induk dan register kasasi perkara KI.

(6) Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonan kasasi untuk ditandatangani oleh panitera dan pemohon

kasasi kemudian dilampirkan pada berkas perkara.

(7) Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas urusan upaya hukum KI pada meja kepaniteraan untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat pada register induk dan register kasasi KI dan diunggah ke SIP.

(8) Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi kepada petugas kepaniteraan muda niaga paling lambat:
   (a) 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan merek dan indikasi geografis[285];
   (b) 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan untuk perkara paten[286];
   (c) 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan untuk perkara hak cipta[287];
   (d) 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan untuk perkara desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu[288];
   (e) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan hukum acara perdata umum.

(9) Dalam hal permohonan kasasi diajukan oleh pihak tidak beracara secara elektronik, petugas PTSP wajib memberikan tanda terima memori kasasi yang ditandatangani oleh panitera selanjutnya panitera mengirimkan

---

[285] Pasal 88 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[286] Pasal 150 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[287] Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[288] Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

permohonan serta memori kasasi kepada pihak Termohon Kasasi dalam jangka waktu:

(a) paling lama 2 (dua) hari kalender setelah memori kasasi diterima oleh panitera untuk perkara merek dan indikasi geografis;[289]

(b) paling lama 2 (dua) hari kalender sejak memori kasasi diterima untuk perkara paten;[290]

(c) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak panitera menerima memori kasasi untuk perkara hak cipta;[291]

(d) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan kasasi didaftarkan untuk perkara desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu;[292]

(e) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan perkara hukum acara perdata umum.

(10) Dalam hal termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi, maka salinan kontra memori kasasi tersebut harus sudah disampaikan kepada petugas pada kepaniteraan muda niaga dalam jangka waktu:

(a) paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara merek dan indikasi geografis;[293]

(b) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara

---

[289] Pasal 88 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[290] Pasal 150 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[291] Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[292] Pasal 41 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
[293] Pasal 88 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

paten;[294]

(c) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara hak cipta;[295]

(d) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu;[296]

(e) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan perkara hukum acara perdata umum.

(11) Petugas PTSP menerima salinan kontra memori kasasi dan menyerahkan kepada panitera, agar panitera dapat menyampaikan salinan tersebut kepada pemohon kasasi dalam waktu:

(a) paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera, untuk perkara merek dan indikasi geografis;[297]

(b) paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak kontra memori kasasi diterima, untuk perkara paten;[298]

(c) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima kontra memori kasasi, untuk hak cipta;[299]

(d) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kontra memori kasasi diterima panitera, untuk perkara desain industri dan

---

[294] Pasal 150 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[295] Pasal 103 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[296] Pasal 41 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 33 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
[297] Pasal 88 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[298] Pasal 150 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[299] Pasal 103 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

desain tata letak sirkuit terpadu;[300]

(e) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan perkara hukum acara perdata umum.

b) Pemberkasan kasasi

(1) Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A bundel B.

(2) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga.

Bundel A berisi :

(a) surat gugatan;
(b) penetapan penunjukan majelis hakim;
(c) penetapan hari sidang;
(d) panggilan-panggilan;
(e) berita acara sidang (jawaban/tanggapan dan bukti-bukti surat, dimasukkan dalam berita acara);
(f) surat kuasa khusus kedua belah pihak yang berperkara;
(g) tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;
(h) penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (jika ada);
(i) berita acara sita jaminan/penyegelan (jika ada);
(j) lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak (jika ada);
(k) surat-surat bukti pemohon;
(l) surat-surat bukti termohon;
(m) surat-surat lainnya;
(n) salinan putusan.

(3) Bundel B memuat permohonan Kasasi, memori, kontra memori, dan lain sebagainya,

---

[300] Pasal 41 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pasal 33 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

yang diperuntukan sebagai arsip Mahkamah Agung.

Bundel B berisi :

(a) berita acara pemberitahuan isi putusan pengadilan niaga kepada kedua belah pihak;

(b) akta permohonan kasasi;

(c) surat kuasa khusus dari pemohon kasasi;

(d) memori kasasi dan atau surat keterangan apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi;

(e) tanda terima memori kasasi;

(f) berita acara pemberitahuan kasasi kepada termohon;

(g) salinan putusan pengadilan niaga.

(4) Petugas kepaniteraan niaga menyiapkan berkas tersebut di atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung paling lambat:

(a) 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, untuk perkara merek dan indikasi geografis;[301]

(b) 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, untuk perkara paten;[302]

(c) 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi untuk perkara hak cipta;[303]

---

[301] Pasal 88 ayat (7) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[302] Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[303] Pasal 103 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(d) 7 (tujuh) hari kerja setelah kontra memori kasasi diterima pemohon kasasi, untuk perkara desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu;[304]

(e) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan perkara hukum acara perdata Umum.

3) Peninjauan Kembali

a) Pendaftaran peninjauan kembali

(1) Undang-undang KI tidak mengatur upaya hukum permohonan peninjauan kembali, namun berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, upaya hukum permohonan peninjauan kembali diperkenankan.[305]

(2) Prosedur pengajuan upaya hukum permohonan peninjauan kembali perkara KI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

(3) Permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu sebagai berikut:

(a) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah bukti baru ditemukan, apabila permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan alasan bahwa setelah dan perkara diputus ditemukan bukti baru

---

[304] Pasal 41 ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan berdasarkan Pasal 33 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

[305] Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Kekuasan Kehakiman)

yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, hari serta tanggal ditemukannya surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (b) dan Pasal 69 (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

(b) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada para pihak, apabila permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

(4) Besarnya biaya peninjauan kembali ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(5) Setelah pemohon peninjauan kembali menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, pemohon peninjauan kembali diberikan tanda terima dan SKUM yang

ditandatangani petugas kasir pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

(6) Petugas register pada kepaniteraan muda niaga mencatat tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali yang bersangkutan pada register induk KI dan register peninjauan kembali dan diunggah ke SIP.

(7) Petugas register akan menyiapkan akta permohonan peninjauan kembali untuk ditandatangani oleh panitera dan pemohon peninjauan kembali dan dilampirkan pada berkas perkara (sesuai formulir yang ditentukan).

(8) Berkas permohonan peninjauan kembali yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas upaya hukum pada kepaniteraan muda niaga untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat pada register peninjauan kembali.

(9) Petugas PTSP wajib memberikan tanda terima permohonan dan memori peninjauan kembali yang telah ditandatangani oleh panitera selanjutnya panitera mengirimkan kepada pemohon dan memori peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan (sesuai formulir yang ditentukan).

(10) Tenggang waktu mengajukan kontra memori peninjauan kembali adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali.

(11) Berkas perkara permohonan peninjauan kembali dikirimkan ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima kontra memori peninjauan kembali atau 7 (tujuh) hari setelah lewat tenggang waktu 30

(tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori peninjauan kembali (dengan membubuhkan *barcode* pada surat pengantar yang terunggah serta dilampiri dengan *softcopy* putusan, memori kasasi dan kontra memori kasasi).

b) Pemberkasan peninjauan kembali

Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas, menyusun dan memastikan kelengkapan berkas peninjauan kembali, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A dan bundel B.

(1) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pada pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga.

Bundel A berisi:

(a) surat permohonan;
(b) penetapan penunjukan majelis hakim;
(c) penetapan hari sidang;
(d) panggilan-panggilan;
(e) berita acara sidang (jawaban/tanggapan dan bukti-bukti surat, dimasukkan dalam berita acara);
(f) surat kuasa khusus kedua belah pihak;
(g) tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;
(h) penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (jika ada);
(i) berita acara sita jaminan/penyegelan (jika ada);
(j) lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak (jika ada);
(k) surat-surat bukti pemohon;
(l) surat-surat bukti termohon;
(m) surat-surat lainnya;
(n) salinan putusan.

(2) Bundel B berisi:

(a) berita acara pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung kepada pemohon dan

termohon atau berita acara pemberitahuan isi putusan pengadilan niaga (bila permohonan peninjauan kembali itu atas putusan pengadilan niaga);

(b) akta permohonan peninjauan kembali;
(c) surat permohonan peninjauan kembali, beserta dengan alasan-alasannya dilampiri dengan surat bukti;
(d) tanda terima surat permohonan peninjauan kembali;
(e) surat kuasa khusus;
(f) surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan;
(g) jawaban/kontra permohonan peninjauan kembali;
(h) salinan putusan pengadilan niaga;
(i) salinan putusan kasasi mahkamah agung;
(j) tanda bukti setoran biaya dari bank;
(k) surat-surat lainnya.

C. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL [306]

1. Administrasi Perkara

a. Pendaftaran dan Penelaahan Berkas Perkara

Pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara elektronik melalui SIP[307] dengan tahapan sebagai berikut:

1) memilih pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang berwenang;
2) mengunggah surat kuasa khusus/ surat tugas (jika ada);
3) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor

[306] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

[307] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

perkara);

4) menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya;
5) menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
6) mengunggah dokumen gugatan dan anjuran/risalah;
7) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);
8) melakukan pembayaran secara elektronik; dan
9) khusus gugatan dengan nilai di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikenai biaya perkara termasuk biaya eksekusi.

b. Register Perkara

1) Register perkara PHI terdiri dari:
   a) register induk perkara gugatan PHI;
   b) register permohonan kasasi perkara PHI;
   c) register eksekusi PHI (berdasarkan putusan dan perjanjian bersama);
   d) register penyitaan PHI;
   e) register pendaftaran perjanjian bersama bipartit;
   f) register pendaftaran perjanjian bersama mediasi;
   g) register pendaftaran perjanjian bersama konsiliasi;
   h) register kuasa khusus;
   i) register pendaftaran putusan arbitrase;
   j) register pendaftaran akta perdamaian arbitrase.
2) Tata cara pengisian register
   a) Data perkara serta segala kegiatan yang menyangkut jalannya perkara harus dicatat dalam register dengan penomoran sebagai berikut:
      (1) perkara gugatan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh menggunakan nomor perkara : No. ...../Pdt.Sus.PHI/20.../(PN setempat).
      (2) pendaftaran perjanjian bersama kesepakatan bipartit, mediasi, konsiliasi, penulisan nomor pendaftaran menggunakan kode:

No...../BIP/20.../PHl/(PN setempat).

(3) diisi sesuai jenisnya seperti:

- Bipartit = Bip
- Mediasi = Med
- Konsiliasi = KS

b) Pencatatan data pada register dilaksanakan sesuai dengan data asli dan sesuai data yang tercantum dalam surat gugatan (pencatatan data tidak dapat disingkat kecuali data asli menggunakan singkatan).

c) Pada pencatatan awal, apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi ditempel dari bagian atas kolom yang bersangkutan dengan kertas yang sejenis.

d) Pencatatan data dalam register harus sesuai dengan jalannya perkara dan dilakukan secara tertib dan tepat waktu (tidak dapat ditunda).

e) Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register dengan perincian keadaan perkara sebagai berikut :

Sisa bulan lalu :.....perkara
Masuk bulan ini :.....perkara
Putus bulan ini : .....perkara
Sisa bulan ini : .....perkara

Setelah penutupan akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor 1.

f) Penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan hubungan industrial, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa bulan lalu :.....perkara
Masuk bulan ini :.....perkara
Putus bulan ini :.....perkara
Sisa bulan ini :.....perkara

g) Register permohonan kasasi, ditutup setiap akhir tahun dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Sisa tahun lalu :.....perkara
Masuk tahun ini :.....perkara

Putus tahun ini :.....perkara

Sisa akhir:

(1) Sudah dikirim :.....perkara

(2) Belum dikirim :.....perkara

h) Penutupan register eksekusi, register penyitaan dilakukan tiap akhir tahun dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Sisa tahun lalu : .....perkara

Masuk tahun ini : .....perkara

Dilaksanakan : .....perkara

Sisa tahun ini : .....perkara

i) Pembetulan pencatatan pada buku register tidak boleh menggunakan *tipe-ex*, cukup dicoret dan dibubuhi paraf agar kesalahan tetap terlihat, untuk menghindari manipulasi data.

c. Keuangan Perkara

1) Biaya pengadilan tingkat pertama

Biaya perkara ditentukan oleh ketua pengadilan negeri/PHI yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses.

Biaya perkara dikelola oleh panitera berdasarkan penetapan dan di bawah pengawasan ketua pengadilan, yang terdiri dari:

a) biaya pendaftaran;

b) biaya proses;

c) biaya panggilan tergugat;

d) biaya PNBP panggilan kepada penggugat dan tergugat;

e) biaya PNBP surat kuasa;

f) biaya hak-hak kepaniteraan dan meterai;

g) biaya eksekusi; (jika ada)

h) biaya untuk menyampaikan pemberitahuan putusan; (jika ada)

i) biaya hak-hak kepaniteraan disetor ke kas negara melalui bendahara penerima.

Khusus gugatan dengan nilai di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikenai biaya perkara termasuk biaya

eksekusi.

2) Biaya permohonan kasasi terdiri dari:
   a) biaya pendaftaran kasasi;
   b) biaya PNBP akta permohonan kasasi;
   c) biaya PNBP surat kuasa khusus;
   d) biaya pengiriman berkas kasasi;
   e) biaya admin bank (jika ada);
   f) biaya proses;
   g) biaya pemberitahuan pernyataan kasasi;
   h) biaya penyerahan memori kasasi;
   i) biaya penyerahan kontra memori kasasi;
   j) biaya pemberitahuan putusan kasasi kepada pemohon kasasi;
   k) biaya pemberitahuan putusan kasasi kepada termohon kasasi.
3) Hak-hak kepaniteraan terdiri dari:
   a) Pencatatan pembuatan akta atau berita acara sumpah atau tindakan-tindakan lainnya yang bukan sebagai akibat putusan pengadilan.
   b) Untuk pencatatan:
      (1) Sesuatu penyerahan akta atau *exploit* di kepaniteraan yang dilakukan dalam hal yang diharuskan menurut hukum.
      (2) Penyerahan akta atau *exploit* tersebut di atas oleh panitera/jurusita.
      (3) Penyerahan surat-surat dari berkas perkara.
      (4) Biaya redaksi putusan dan penetapan Pengadilan.
4) Buku keuangan perkara
   a) Buku jurnal meliputi:
      (1) buku jurnal keuangan perkara gugatan;
      (2) buku jurnal keuangan perkara permohonan kasasi;
      (3) buku jurnal keuangan eksekusi perkara PHI
   b) Pencatatan buku jurnal
      (1) Pada halaman awal buku jurnal dibuat catatan tentang banyaknya halaman dari buku jurnal yang bersangkutan, diberi tanggal

dan ditandatangani oleh ketua pengadilan.

(2) Tiap lembar buku jurnal diberi nomor halaman-halaman pertama dan halaman akhir ditandatangani sedang halaman lainnya diparaf oleh pengadilan.

(3) Pencatatan buku jurnal untuk setiap nomor perkara menggunakan 1 (satu) halaman rangkap.

(4) Pencatatan buku jurnal gugatan (Kl - PHI 1) dimulai pada saat perkara diterima, ditutup pada saat perkara diputus dan dibuka kembali apabila ada pemberitahuan putusan dan pengembalian sisa panjar.

(5) Buku jurnal gugatan PHI ditutup pada tanggal perkara diputus.

(6) Pencatatan buku jurnal kasasi (Kl - PHI 2) dimulai pada saat permohonan diterima dan ditutup pada saat putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada para pihak.

(7) Jenis pemasukan dan pengeluaran uang pada buku jurnal harus dimasukkan dalam buku induk keuangan perkara.

(8) Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang setelah dicatat dalam buku jurnal harus dipindahkan ke dalam buku kas bantu dalam rangkap 2 (dua), satu lembar diserahkan kepada pemegang buku induk keuangan perkara dan satu lembar lagi disimpan oleh kasir yang harus diberkas setiap bulan.

(9) Setiap hari tindasan dari buku kas bantu diserahkan kepada panitera (pemegang buku induk keuangan perkara) untuk dicatat dalam buku induk keuangan perkara dan sekaligus sebagai laporan keuangan harian kepada panitera.

(10) Untuk perkara yang diajukan kasasi pada kolom keterangan Buku Jurnal Gugatan (Kl - PHI 1) harus diberi catatan tentang tanggal

pengajuan kasasi, pihak Pemohon Kasasi (Penggugat atau Tergugat), dan menyebutkan nomor halaman dan kode dari buku jurnal kasasi.

Contoh :

"Tergugat mengajukan kasasi tanggal 12 April 2006, lihat Kl - PHI 2 halaman 10".

c) Buku induk meliputi:
   (1) buku induk keuangan perkara;
   (2) buku induk keuangan perkara eksekusi.
   (3) buku induk hak-hak kepaniteraan.

d) Pembuatan dan pencatatan buku induk:
   (1) buku induk keuangan perkara adalah buku untuk mencatat kegiatan pemasukan dan pengeluaran uang untuk semua jenis perkara, yang dicatat secara berurutan dimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhir bulan;
   (2) buku induk dikelola oleh panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan surat keputusan ketua PHI;
   (3) pencatatan data pada buku induk harus sama dengan data-data yang ada pada buku jurnal;
   (4) penutupan buku induk secara rutin dilakukan pada setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri/PHI;
   (5) dalam rangka pemeriksaan, setiap saat ketua pengadilan negeri/PHI dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan. pemeriksaan mendadak oleh ketua pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali;
   (6) pada penutupan buku induk keuangan : dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas atau disimpan di bank, serta uraian secara

terperinci jenis dan pecahan mata uang yang ada dalam brankas;

(7) ketua pengadilan negeri/PHI sebelum menandatangani buku keuangan harus meneliti kebenaran keadaan menurut keadaan yang nyata, baik dalam buku induk maupun yang disimpan di bank, dengan disertai penyimpanan uang di bank;

(8) buku jurnal maupun buku induk harus diganti setiap tahun, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

(9) buku induk hak-hak kepaniteraan diisi sesuai tanggal kegiatan dan ditutup seminggu sekali pada saat penyetoran kepada bendahara penerima, pada kolom keterangan diisi jumlah uang yang disetor, tanggal penerimaan, dan ditandatangani oleh bendahara penerima.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip Perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a. Pemanggilan

1) Hakim ketua menyerahkan berkas perkara kepada panitera pengganti dan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil para pihak dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum persidangan.

2) Jurusita/jurusita pengganti mencatatkan dan mengunggah nomor surat panggilan, tanggal pengiriman serta e-dokumen ke dalam SIP.

3) Jurusita/jurusita pengganti menyerahkan resi pengiriman surat panggilan kepada panitera pengganti untuk disatukan dalam berkas perkara.

4) Pemanggilan para pihak sebagaimana tersebut di atas

dapat dilakukan melalui SIP sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Kuasa Hukum

Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha yang terdaftar dapat bertindak sebagai kuasa hukum di PHI untuk mewakili anggotanya[308] merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dan memberi legal standing kepada pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha untuk bertindak selaku kuasa hukum.

c. Gugatan

1) Gugatan yang diajukan secara cuma-cuma berpedoman pada pasal 237 HIR/ 273 RBg.
2) Pada pengadilan PHI tidak tertutup kemungkinan adanya gugatan rekonvensi maupun intervensi dengan memperhatikan tenggang waktu penyelesaian perkara selama 50 (lima puluh) hari kerja.

d. Majelis Hakim

1) Perkara-perkara perselisihan hubungan industrial yang diajukan ke pengadilan PHI diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim ad hoc yang terdiri dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh masing-masing sebagai hakim anggota.
2) Terhadap perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, majelis hakim dapat menawarkan kepada para pihak untuk melaksanakan sidang secara elektronik atau tidak.
3) Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada PHI supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan dimaksud ketua

[308] Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

pengadilan negeri mengeluarkan ketetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Terhadap penetapan tersebut tidak digunakan upaya hukum.

4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dikabulkan, ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan.
5) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
6) Hakim ketua majelis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan PHI harus sudah melakukan sidang pertama.
7) Dalam hal hakim ad hoc dari salah satu unsur baik serikat pekerja/serikat buruh dan/atau organisasi pengusaha berhalangan tetap/sementara demi kecepatan pemeriksaan dan pemutusan perkara, ketua pengadilan PHI berhak menunjuk hakim ad hoc lainnya untuk menggantikan sementara dari unsur yang sama.
8) Dalam hal tidak terdapat hakim ad hoc dari unsur yang berbeda dapat dimintakan bantuan hakim ad hoc dari unsur yang diperlukan untuk diperbantukan pada pengadilan PHI terdekat untuk menggantikan. Jika dalam satu wilayah pengadilan tinggi maka ditetapkan dengan surat keputusan ketua pengadilan tinggi dan diluar wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan maka ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
9) Mekanisme permintaan bantuan hakim ad hoc pada pengadilan terdekat:
    a) ketua PHI mengajukan permohonan ke Ketua PHI yang dituju dengan tembusan kepada ketua pengadilan tinggi;
    b) ketua PHI yang diminta, dalam tenggat waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah surat permohonan

diterima mengirimkan nama hakim ad hoc ke PHI pemohon dengan ditembuskan dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

c) ketua PHI pemohon setelah menerima pengiriman nama hakim ad hoc dari PHI yang diminta, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari membuat penetapan penggantian hakim anggota yang berhalangan;

d) biaya yang timbul terhadap permintaan bantuan hakim dan aparatur pengadilan lain dibebankan kepada pengadilan tingkat banding sepanjang tersedia anggaran biaya dinas.[309]

e. Perdamaian

1) Usaha perdamaian dapat dilakukan selama proses berjalan dengan tidak perlu mengikuti acara yang diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

2) Apabila majelis hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak atas permintaan para pihak dibuat akta perdamaian berdasarkan pada pasal 130 HIR/154 RBg.

f. *Verzet* atas Putusan *Verstek*

Perlawanan terhadap putusan *verstek* diajukan oleh tergugat dengan memperhatikan pasal 129 HIR/153 RBg, untuk penomoran *verstek* tetap pada nomor perkara gugatan semula.

g. Sita Jaminan

1) Sita jaminan dapat dilakukan sesuai ketentuan pasal 227 HIR/261 RBg jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2) Dalam hal barang-barang yang disita tersebut berada pada wilayah hukum pengadilan PHI lain, pelaksanaan sita dilakukan di dalam wilayah pengadilan PHI di tempat barang tersebut berada.

---

[309] SK KMA Nomor 10/KMA/SK/KP4.1.3/I/2025 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding

h. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

1) Yang dimaksudkan kepentingan mendesak[310] antara lain: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, terjadi huru hara yang mengganggu kepentingan produksi, keamanan dan ketertiban umum.

2) Yang dimaksud dengan tanpa melalui prosedur pemeriksaan[311] adalah sidang pemeriksaan tidak terikat pada acara perkara perdata umumnya antara lain tentang tenggang waktu pemanggilan, replik/duplik dan hal-hal lain yang dapat menghambat proses acara cepat. Persidangan perkara harus dilakukan pada hari kerja pertama setelah kedua belah pihak dipanggil dengan tata cara pemanggilan tercepat.

i. Tugas Kejurusitaan

Tugas-tugas kejurusitaan yang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan oleh panitera pengganti, harus diartikan dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti pengadilan negeri yang ditugaskan pada pengadilan PHI dengan surat keputusan khusus dan menjalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

j. Berita Acara dan Putusan

b) Berita acara sidang dan putusan ditandatangani oleh ketua majelis, hakim ad hoc dan panitera pengganti yang bersidang.

c) Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap sebelum menandatangani berita acara dan putusan, penandatanganan dilakukan oleh anggota yang turut memeriksa perkara tersebut yang paling senior.[312]

d) Dalam praktek apabila ketua majelis atau salah seorang

---

[310] Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

[311] Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

[312] Pasal 186 dan 187 HIR

anggota majelis karena berhalangan tetap, tidak dapat menandatangani putusan, dicatat tentang ketidakhadiran tersebut yang ditandatangani ketua pengadilan negeri/PHI.

k. Upaya Hukum

Putusan PHI hanya dapat dimintakan kasasi dalam hal:

1) perkara mengenai perselisihan hak;
2) perselisihan pemutusan hubungan kerja.

l. Pelaksanaan Putusan

1) Pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial mengacu pada ketentuan hukum acara perdata.[313]
2) Sesuai ketentuan Pasal 1134 jo Pasal 1149 ayat (4) KUHPerdata, upah buruh dibayarkan setelah hak tanggungan dibayarkan, kecuali hipotik atas kapal.
3) Pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian bersama bipartit, mediasi dan konsiliasi yang telah didaftarkan pada pengadilan PHI di tempat dibuatnya perjanjian bersama dilakukan oleh pengadilan PHI di wilayah perjanjian bersama tersebut didaftar.
4) Perjanjian bersama yang dapat dilakukan eksekusi adalah perjanjian bersama yang memuat secara rinci hak dan kewajiban para pihak yang dibuat secara sah menurut undang-undang dan telah didaftarkan di pengadilan.
5) Pelaksanaan eksekusi perjanjian bersama hanya dapat dilakukan setelah perjanjian bersama tersebut di fiat eksekusi oleh ketua pengadilan negeri/PHI dengan memberi irah-irah : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” di atas akta perjanjian bersama dan dibawah perjanjian bersama ditulis kata-kata “Perjanjian Bersama ini dapat dijalankan”, kemudian dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri/PHI setempat serta diberi stempel.

---

[313] vide Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

D. GUGATAN SENGKETA PARTAI POLITIK

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan gugatan

1) Pendaftaran Gugatan secara Elektronik

Penggugat mendaftarkan gugatan sengketa partai politik secara elektronik melalui SIP dengan tahapan sebagai berikut:

a) memilih pengadilan negeri yang berwenang pada SIP;

b) mengunggah surat kuasa khusus (jika ada);

c) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);

d) mencatat data pihak penggugat beserta domisili elektronik;

e) mencatat domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);

f) mengunggah dokumen gugatan beserta bukti-bukti pendukung, antara lain:

(1) AD dan ART partai politik yang bersangkutan;

(2) dokumen putusan mahkamah partai politik atau lembaga lain yang sejenis;

(3) bukti telah ditempuhnya mekanisme penyelesaian sengketa internal;

(4) bukti telah ditempuhnya mediasi yang difasilitasi pemerintah namun tidak tercapai kesepakatan; dan

(5) alat bukti surat lainnya yang mendukung dalil gugatan.

g) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan

h) melakukan pembayaran secara elektronik.

2) Pendaftaran Gugatan secara Manual

a) Petugas pada PTSP bertanggung jawab untuk menerima berkas perkara dan menerima gugatan sengketa partai politik.

b) Petugas meja kepaniteraan menerima dan meneliti checklist setiap gugatan yang diajukan penggugat.

c) Penggugat dapat diwakili oleh advokat berdasarkan

surat kuasa khusus mengajukan gugatan kepada panitera muda perdata.

d) Surat gugatan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan oleh penggugat atau kuasanya beserta softcopy-nya kepada petugas penerima berkas sebanyak jumlah pihak ditambah salinan berkas sebanyak hakim/majelis hakim dan arsip. Dokumen gugatan paling sedikit meliputi:
   (1) AD dan ART partai politik yang bersangkutan;
   (2) dokumen putusan mahkamah partai politik atau lembaga lain yang sejenis.
   (3) bukti telah ditempuhnya mekanisme penyelesaian sengketa internal sesuai AD dan ART;dan
   (4) alat bukti surat lainnya yang mendukung dalil gugatan.

e) Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*), dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perdata untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap.

f) Panitera muda perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan dalam daftar periksa (*checklist*).

g) Dokumen (surat-surat) yang berupa fotokopi harus diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan.

h) Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM dengan ketentuan:
   (1) dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara sesuai dengan keputusan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;
   (2) ketua pengadilan negeri dalam menentukan panjar biaya perkara harus berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya;

(3) dalam memperhitungkan panjar biaya perkara bagi pengadilan tingkat pertama agar mempertimbangkan pula biaya perkara dan biaya proses yang dipertanggungjawabkan dalam putusan;

(4) pada berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM dalam rangkap 3 (tiga):

(a) lembar pertama untuk penggugat;

(b) lembar kedua untuk kasir;

(c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas gugatan.

i) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.

j) Penambahan biaya perkara harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan. Penambahan tersebut dibayarkan melalui *virtual account* yang didapat dari SIP dan harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan *generate*. Apabila *virtual account* tidak dapat digunakan ataupun sudah melebihi batas waktu 1 (satu) hari maka kepaniteraan perdata melakukan *generate* ulang *virtual account* dan menginformasikannya kepada pihak. Apabila sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan penambahan biaya perkara tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dibuat penetapan yang ditandatangani oleh majelis hakim. Penetapan

tersebut selanjutnya dicatatkan pada SIP dan dicatat pencoretannya dalam buku register induk perkara dan buku jurnal, selanjutnya diberitahukan kepada para pihak.

k) Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM, kemudian SKUM diserahkan kepada penggugat atau kuasanya agar membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang telah ditunjuk pengadilan negeri.

l) Kasir menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM setelah menerima bukti pembayaran (apabila dilakukan secara manual).

m) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.

n) Petugas pada meja kepaniteraan kemudian melengkapi data pendaftaran perkara pada menu data umum pada SIP dan register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang kas.

o) Pengisian kolom-kolom register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara, kecuali bagi pengadilan yang sudah mendapatkan izin untuk pelaksanaan register elektronik secara penuh.

p) Pengisian SIP dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.[314]

q) Panitera muda perdata menyerahkan berkas kepada panitera untuk diteruskan kepada ketua pengadilan negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.

---

[314] Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum Jo. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum

r) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal gugatan sengketa partai politik didaftarkan, majelis hakim mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

b. Register

Register gugatan sengketa partai politik menjadi satu dengan register gugatan perdata umum.

c. Buku Keuangan

Buku induk dan keuangan gugatan sengketa partai politik menjadi satu dengan buku induk dan keuangan gugatan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Administrasi persidangan sama dengan gugatan perdata umum[315], terhadap perkara sengketa partai politik upaya hukumnya hanya kasasi.

E. GUGATAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT[316]

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan

1) Dokumen pendaftaran yang didaftarkan ke pengadilan negeri sama dengan dokumen pendaftaran pada perkara perdata umum.

2) Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara perdata umum.

b. Register Perkara

Register gugatan sengketa organisasi kemasyarakatan menjadi satu dengan register gugatan perdata umum.

---

[315] Pasal 4 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[316] Pasal 58 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

c. Buku Keuangan perkara

Buku induk dan keuangan gugatan sengketa organisasi kemasyarakatan menjadi satu dengan buku induk dan keuangan gugatan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara sengketa organisasi kemasyarakatan dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan perdata umum.

F. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN[317]

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan

1. Dokumen pendaftaran yang didaftarkan ke pengadilan negeri sama dengan dokumen pendaftaran pada perkara perdata umum.
2. Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara perdata umum.
3. Gugatan diajukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mengumumkan daftar konsumen yang akan dicantumkan dalam gugatan.

b. Register Perkara

Register gugatan yang diajukan oleh OJK sebagai upaya perlindungan konsumen menjadi satu dengan register perdata umum.

c. Buku Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara gugatan yang diajukan

---

[317] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Mengadili Gugatan Yang Diajukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

oleh OJK sebagai upaya perlindungan konsumen menjadi satu dengan keuangan perkara perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara Gugatan yang diajukan oleh OJK sebagai upaya perlindungan konsumen dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan perdata umum.

G. GUGATAN SENGKETA BANK DALAM LIKUIDASI DAN PASCA LIKUIDASI[318]

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan Gugatan

Pendaftaran Gugatan

1) Dokumen pendaftaran yang didaftarkan ke pengadilan negeri sama dengan dokumen pendaftaran pada perkara perdata umum.

2) Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara perdata umum.

b. Register Perkara

1) Perkara gugatan sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan/atau sengketa penjaminan simpanan

a) Untuk mencatat dan mengelola data mengenai perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan, diadakan suatu pencatatan yang teratur dan sistematis dalam suatu register perkara yang berisi segala

[318] Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank Dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut.

b) Penyelenggaraan pendaftaran perkara dalam register perkara harus dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam buku jurnal keuangan masing-masing dan tidak boleh ditunda-tunda.

c) Pemberian nomor register bagi perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan dilakukan dengan aturan sebagai berikut[319]:

(1) pemeriksaan reguler tingkat pertama: ...../Pdt.Sus-LPS/tahun/kode satuan kerja Pengadilan Niaga

(2) pemeriksaan cepat tingkat pertama: ...../Pdt.Sus.Cepat-LPS/tahun/kode satuan kerja Pengadilan Niaga

(3) bantahan/perlawanan tingkat pertama: ...../Pdt.Sus.Bth-LPS/tahun/kode satuan kerja Pengadilan Niaga

(4) pemeriksaan tingkat kasasi: ..... K/Pdt.Sus-LPS/tahun

(5) pemeriksaan peninjauan kembali: ..... PK/Pdt.Sus-LPS/tahun

d) Pemeriksaan tingkat keberatan atas putusan perkara cepat menggunakan nomor perkara yang diajukan keberatan.

e) Pemberian nomor register dilakukan berdasarkan urutan nomor dalam buku jurnal sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga.

2) Jenis register perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan pada pengadilan niaga

a) Register induk perkara sengketa bank dalam

---

[319] Pasal 39 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank Dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan.

Register tersebut adalah register utama yang memuat segala keterangan mengenai setiap gugatan dan bantahan/perlawanan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan yang diajukan ke pengadilan niaga.

b) Register permohonan keberatan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan.

Register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap putusan pemeriksaan perkara secara cepat dalam perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan yang sedang berjalan.

c) Register permohonan kasasi perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan

Register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan kasasi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan yang sedang berjalan.

d) Register permohonan peninjauan kembali perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan

Register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pihak dalam perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan yang sedang berjalan.

3) Tata Cara Pengisian Register Perkara

a) Data perkara serta segala kegiatan yang menyangkut jalannya perkara harus dicatatkan ke SIP dan dicatat dalam register induk.

b) Pencatatan kegiatan sesuai jalannya perkara

harus dilakukan tepat waktu, menggunakan tinta hitam.

c) Pencatatan data pada register dilaksanakan sesuai dengan data asli yang tercantum dalam surat gugatan (pencatatan data tidak dapat disingkat kecuali data asli menggunakan singkatan).

d) Pada pencatatan awal, apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi disambung pada lembar berikutnya untuk pencatatan selanjutnya mengingat lembar berikutnya telah digunakan untuk mencatat perkara lain, apabila lembar yang disediakan tidak mencukupi ditempel kertas ke bawah.

e) Data kegiatan untuk perkara yang diajukan kasasi peninjauan kembali, selain dicatat dalam register Induk juga dicatat dalam register kasasi dan peninjauan kembali.

f) Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register dengan perincian keadaan perkara sebagai berikut:

Sisa bulan lalu :..... perkara
Masuk bulan ini :..... perkara
Putus bulan ini :..... perkara
Sisa bulan ini :..... perkara

Setelah penutupan pada akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk periode 1 (satu) tahun.

g) Penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri/niaga, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa tahun lalu :..... perkara
Masuk tahun ini :..... perkara
Putus tahun ini :..... perkara
Sisa tahun ini :..... perkara

h) Register permohonan kasasi, register peninjauan kembali ditutup setiap akhir tahun dengan

rekapitulasi :

Sisa tahun lalu	:..... perkara
Masuk tahun ini	:..... perkara
Putus tahun ini	:..... perkara
Sisa tahun ini	:..... perkara
Sisa akhir	:..... perkara
Sudah dikirim	:..... perkara
Belum dikirim	:..... perkara

i) Pembetulan pencatatan pada register tidak diperbolehkan menggunakan *tipe-ex*, melainkan harus direnvoi dan ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan.

c. Buku Keuangan Perkara

1) Keuangan perkara pada pengadilan niaga diselenggarakan secara tersendiri oleh bendahara kepaniteraan niaga yang merupakan bagian dari meja kepaniteraan.

2) Pembayaran seluruh biaya perkara (gugatan, permohonan penetapan sementara, kasasi dan peninjauan kembali) diterima oleh pemegang kas.

3) Pemegang kas menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan kepada kas negara seminggu sekali.

4) Pemegang kas melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang terkait ke dalam buku induk dan jurnal keuangan perkara niaga menurut jenis-jenisnya.

5) Buku keuangan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan pada pengadilan niaga terdiri dari:

a) buku induk keuangan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan;

b) buku jurnal keuangan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan;

c) buku jurnal keuangan perkara permohonan kasasi perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca

likuidasi, dan penjaminan simpanan;

d) buku jurnal keuangan perkara permohonan peninjauan kembali perkara perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan;

e) buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.

6) Pembuatan dan pencatatan buku jurnal dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Pada halaman awal buku jurnal dibuat catatan tentang banyaknya halaman dari buku jurnal yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua pengadilan niaga.

b) Tiap lembar buku jurnal diberikan nomor halaman, halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani oleh ketua pengadilan, sedang halaman lainnya diparaf.

c) Pencatatan buku jurnal untuk setiap nomor perkara menggunakan 1 (satu) halaman dua muka.

d) Pencatatan buku jurnal dimulai pada saat perkara diterima, ditutup pada saat perkara diputus dan dibuka kembali apabila ada pemberitahuan putusan.

e) Hak-hak kepaniteraan yang berupa pencatatan kasasi dikeluarkan pada saat/setelah diterimanya panjar biaya perkara.

f) Biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus.

g) Pengeluaran uang untuk keperluan lainnya di dalam lingkup hak-hak kepaniteraan, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

h) Semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan adalah merupakan pendapatan negara, setiap minggu sekali pemegang kas harus menyetor kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas negara.

i) Jenis pengeluaran uang pada buku jurnal harus sesuai dengan jenis pengeluaran uang yang telah ditentukan pada kolom buku induk keuangan

perkara.

j) Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang setelah dicatat dalam buku jurnal harus dipindahkan ke dalam buku kas bantu yang pencatatannya dibuat tindasan rangkap 2 (dua).

k) Setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari buku kas bantu yang berupa lembaran kertas diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku induk dan sekaligus sebagai laporan penerimaan dan pengeluaran uang harian kepada panitera.

l) Untuk perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali pada kolom keterangan buku jurnal tingkat pertama harus diberikan catatan tentang tanggal pengajuan kasasi dan peninjauan kembali, nomor halaman serta tahun perkara tersebut dicatat.

7) Buku induk terbagi pada 2 (dua) jenis, yaitu:

a) buku induk keuangan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan;

b) buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.

8) Tata cara pembuatan dan pencatatan pada buku induk:

a) Buku induk adalah buku untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang untuk semua perkara, yang pencatatannya secara berurutan dimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.

b) Buku induk dikelola oleh panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan keputusan ketua pengadilan negeri/ niaga.

c) Pencatatan data pada buku induk harus sama dengan data yang ada pada buku jurnal.

d) Penutupan buku induk secara rutin dilakukan pada setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri/niaga.

e) Dalam rangka pemeriksaan, setiap saat ketua pengadilan negeri/niaga dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan (pemeriksaan mendadak oleh ketua pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali).

f) Pada penutupan buku induk keuangan, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas atau disimpan di bank, serta uraian secara terperinci jenis mata uang yang ada dalam brankas.

g) Apabila dalam penutupan terdapat selisih jumlah uang antara buku kas dan uang kas sesungguhnya, harus dijelaskan alasan terdapatnya selisih, selisih uang tersebut harus merupakan selisih lebih dan tidak boleh terdapat selisih kurang.

9) Ketua pengadilan negeri/niaga sebelum menandatangani buku induk keuangan, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang disimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.

10) Buku jurnal dan buku induk harus diganti tiap tahun, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

11) Pemegang kas membuat laporan keuangan perkara niaga setiap bulannya.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a. Pemanggilan

1) Pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik atau melalui surat tercatat oleh juru sita/juru sita pengganti paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari

sidang[320].

2) Pemanggilan para pihak yang berada diluar negeri dengan mekanisme penyampaian bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara[321].

b. Penunjukan Majelis Hakim

1) Setelah gugatan dinyatakan lengkap dan diberi nomor perkara oleh panitera, berkas perkara disampaikan kepada ketua pengadilan niaga melalui panitera muda niaga.

2) Panitera pengganti membuat serta melampirkan formulir waktu penyelesaian perkara (matrik/*court calendar*) pada berkas tersebut yang berfungsi sebagai kalender persidangan perkara.

3) Ketua pengadilan niaga menunjuk:

a) majelis hakim, untuk perkara dengan nilai gugatan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

b) hakim tunggal, untuk perkara dengan nilai gugatan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diperiksa secara cepat;

paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, kemudian menyerahkan kepada panitera yang akan menunjuk panitera pengganti dan jurusita.

4) Setelah majelis hakim/hakim tunggal menerima dan mempelajari berkas perkara, menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

c. Pemeriksaan di Persidangan

1) Persidangan pertama dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi ruang virtual yang ditetapkan oleh majelis hakim/hakim tunggal, para pihak wajib hadir.

2) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut paling banyak 2 (dua) kali, gugatan dinyatakan gugur.

---

[320] Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat

[321] Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara Nomor 02/KMA/NK/IV/2023.

3) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut paling banyak 2 (dua) kali, gugatan diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*).
4) Pada hari sidang pertama, majelis hakim/hakim tunggal mengupayakan perdamaian para pihak tanpa menggunakan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung mengenai prosedur mediasi di pengadilan.
5) Dalam proses pemeriksaan perkara sengketa penjaminan simpanan dan pemeriksaan perkara secara cepat, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, dan duplik.
6) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan bukti surat dilaksanakan secara elektronik melalui SIP, sedangkan autentikasi bukti surat dilaksanakan secara langsung di pengadilan niaga atau didelegasikan kepada pengadilan negeri tempat pendaftaran dalam hal pihak tidak dapat hadir, dengan jangka waktu autentikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak penetapan delegasi dikirimkan.
7) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara virtual melalui media komunikasi audiovisual, segala biaya yang timbul dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.
8) Tata cara pemeriksaan persidangan selain yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

d. Putusan

Putusan harus diucapkan:

1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diterima oleh majelis hakim/hakim tunggal yang memeriksa perkara, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung

melalui ketua pengadilan niaga[322].

2) Pengucapan putusan secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP.

3) Amar putusan dalam sengketa penjaminan simpanan yang mengabulkan gugatan paling sedikit memuat:

a) pernyataan keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b) pernyataan status Simpanan tidak layak dibayar menjadi layak dibayar, Simpanan layak dibayar menjadi tidak layak dibayar, atau pernyataan terkait nilai simpanan layak dibayar;

c) penghukuman kepada LPS untuk membayar Simpanan sesuai Penjaminan Simpanan termasuk bunga yang besarnya setara dengan tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, atau penghukuman kepada Nasabah untuk mengembalikan klaim penjaminan yang telah dibayarkan; dan

d) penghukuman biaya perkara.

e. Upaya Hukum

1) Keberatan *(khusus putusan pemeriksaan perkara secara cepat)*

a) Pendaftaran Keberatan

(1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pemeriksaan perkara secara cepat adalah dengan mengajukan keberatan secara elektronik ke pengadilan niaga paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan[323].

(2) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan niaga berdasarkan surat

---

[322] Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

[323] Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

keterangan panitera[324].

(3) Panitera melakukan verifikasi permohonan keberatan beserta memori keberatan paling lama 1 (satu) hari sejak keberatan diajukan.

(4) Pemberitahuan atas permohonan keberatan beserta memori keberatan dilakukan secara elektronik melalui SIP.

(5) Kontra memori keberatan disampaikan secara elektronik melalui SIP paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

(6) Ketua pengadilan niaga menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

b) Pemeriksaan Keberatan

(1) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:

(a) putusan dan berkas gugatan pemeriksaan perkara secara cepat;

(b) permohonan keberatan dan memori keberatan; dan

(c) kontra memori keberatan.

(2) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

(3) Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan secara elektronik melalui SIP paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim[325].

(4) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan diucapkan dan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali[326].

---

[324] Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

[325] Pasal 33 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

[326] Pasal 33 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

(5) Amar putusan keberatan paling sedikit memuat[327]:

(a) pernyataan permohonan keberatan diterima;

(b) pernyataan membatalkan putusan yang disertai mengadili sendiri, atau menguatkan putusan; dan

(c) penghukuman biaya perkara.

2) Kasasi

a) Pendaftaran Kasasi

(1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan pada pemeriksaan reguler adalah dengan mengajukan kasasi kepada mahkamah agung. kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan pemeriksaan perkara secara cepat[328].

(2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan mahkamah agung mengenai administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung[329].

(3) Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh pemohon ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(4) Setelah pemohon kasasi menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, pemohon kasasi diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani petugas kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

---

[327] Pasal 34 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

[328] Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

[329] Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

(5) Petugas register mencatat tanggal pengajuan permohonan pada register induk dan register kasasi perkara LPS.

(6) Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonan kasasi untuk ditandatangani oleh panitera dan pemohon kasasi kemudian dilampirkan pada berkas perkara[330].

(7) Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas urusan upaya hukum LPS pada meja kepaniteraan untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatatkan ke SIP.

(8) Sidang pemeriksaan dan putusan atas permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi.

(9) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera pengadilan pengaju paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan kasasi diucapkan.

(10) Jurusita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak putusan kasasi diterima.

b) Pemberkasan Kasasi[331]

(1) Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A dan bundel B.

(2) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga. Bundel A berisi:

---

[330] Perma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

[331] SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik

(a) surat gugatan:
- surat gugatan/permohonan;
- perbaikan surat gugatan (jika ada).

(b) surat kuasa / surat tugas kedua belah pihak yang berperkara;

(c) penetapan penunjukan majelis hakim/hakim tunggal;

(d) penunjukan panitera sidang;

(e) penunjukan juru sita/ juru sita pengganti;

(f) penetapan hari sidang;

(g) relaas-relaas panggilan/*e-summon*;

(h) Penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi dan hasil mediasi (jika ada);

(i) *court calendar*;

(j) berita acara sidang (dalam satu kesatuan);

(k) jawaban;

(l) replik (jika ada);

(m) duplik (jika ada);

(n) permohonan intervensi dan penetapan intervensi (jika ada);

(o) putusan sela (jika ada);

(p) penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);

(q) surat bukti penggugat (jika ada);

(r) surat bukti tergugat (jika ada);

(s) surat bukti intervenient (jika ada);

(t) berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);

(u) simpulan penggugat (jika ada);

(v) simpulan tergugat (jika ada);

(w) simpulan intervenient (jika ada);

(x) penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada);dan

(y) surat lainnya (jika ada).

(3) Bundel B memuat dokumen permohonan

kasasi, memori, kontra memori dan lain sebagainya, yang diperuntukkan bagi arsip Mahkamah Agung. Bundel B berisi:

(a) salinan putusan;
(b) surat kuasa khusus/ surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
(c) akta kasasi;
(d) pemberitahuan kasasi;
(e) memori kasasi;
(f) pemberitahuan memori kasasi;
(g) kontra memori kasasi (jika ada);
(h) pemberitahuan kontra memori kasasi (jika ada);
(i) pemberitahuan *inzage* (jika ada);
(j) bukti *e-payment* biaya kasasi;dan
(k) surat lainnya (jika ada).

(4) Petugas kepaniteraan niaga menyiapkan berkas tersebut di atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Peninjauan Kembali

a) Pendaftaran peninjauan kembali

(1) Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan yang telah berkekuatan hukum tetap. peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan pemeriksaan perkara secara cepat.

(2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran peninjauan kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan mahkamah agung mengenai administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

(3) Besarnya biaya peninjauan kembali yang

harus dibayar oleh pemohon ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku[332].

(4) Setelah pemohon peninjauan kembali menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, pemohon diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani Petugas Kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

(5) Petugas register mencatat tanggal pengajuan permohonan pada register induk dan register peninjauan kembali perkara LPS.

(6) Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonan peninjauan kembali untuk ditandatangani oleh panitera dan pemohon peninjauan kembali kemudian dilampirkan pada berkas perkara.

(7) Berkas permohonan peninjauan kembali yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas urusan upaya hukum LPS pada meja kepaniteraan untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatatkan ke SIP.

(8) Tenggang waktu mengajukan kontra memori peninjauan kembali adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali.

(9) Berkas perkara permohonan peninjauan kembali dikirimkan ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima kontra memori peninjauan kembali atau 7 (tujuh) hari setelah lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori peninjauan kembali (dengan membubuhkan *barcode* pada surat pengantar yang terunggah serta dilampiri dengan *softcopy* putusan, memori kasasi dan kontra

---

[332] SK KMA Nomor 140/KMA/SK.2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung

memori kasasi).

b) Pemberkasan peninjauan kembali[333]

(1) Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A dan bundel B.

(2) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga. Bundel A berisi:

(a) surat gugatan:
- Surat gugatan/permohonan;
- Perbaikan surat gugatan. (jika ada)

(b) surat kuasa / surat tugas kedua belah pihak yang berperkara;

(c) penetapan penunjukan majelis hakim/hakim tunggal;

(d) penunjukan panitera sidang;

(e) penunjukan juru sita/ juru sita pengganti;

(f) penetapan hari sidang;

(g) relaas-relaas panggilan/*e-summon*;

(h) penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi dan hasil mediasi (jika ada);

(i) *court calendar*;

(j) berita acara sidang (dalam satu kesatuan);

(k) jawaban;

(l) replik (jika ada);

(m) duplik (jika ada);

(n) permohonan intervensi dan penetapan intervensi (jika ada);

(o) putusan sela (jika ada);

(p) penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);

(q) surat bukti penggugat (jika ada);

---

[333] SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik

(r) surat bukti tergugat (jika ada);
(s) surat bukti intervenient (jika ada);
(t) berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
(u) simpulan penggugat (jika ada);
(v) simpulan tergugat (jika ada);
(w) simpulan intervenient (jika ada);
(x) penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada);dan
(y) surat lainnya (jika ada).

(3) Bundel B memuat permohonan peninjauan kembali, memori, kontra memori, dan lain sebagainya, yang diperuntukkan sebagai arsip Mahkamah Agung. Bundel B berisi:
(a) salinan putusan;
(b) surat kuasa khusus/ surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
(c) akta permohonan peninjauan kembali;
(d) memori peninjauan kembali;
(e) pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali;
(f) kontra memori peninjauan kembali (jika ada);
(g) pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali (jika ada);
(h) pemberitahuan *inzage*;
(i) bukti *e-payment* biaya pemberitahuan peninjauan kembali;dan
(j) surat lainnya (jika ada).

(4) Petugas kepaniteraan niaga menyiapkan berkas tersebut di atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang berlaku.

H. GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK

1. Administrasi Perkara

a) Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Surat keberatan atas putusan Komisi Informasi Publik yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
2) Salinan putusan Komisi Informasi.
3) Surat kuasa khusus atau kuasa insidentil / surat tugas (jika ada).
4) Dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah) (jika ada).
5) Dalam hal pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.
6) Pengadilan negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik selain badan publik negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik selain badan publik negara.[334]

b) Register

1) Register gugatan pembatalan putusan Komisi Informasi Publik mengikuti register induk perdata umum.
2) Register diisi secara cermat dan lengkap pada SIP.

c) Buku Keuangan perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan Buku induk dan keuangan gugatan perdata umum.

d) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e) Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keberatan di register di kepaniteraan pengadilan, panitera meminta Komisi lnformasi yang memutus perkara tersebut untuk

---

[334] Pasal 3 huruf a PERMA No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (merujuk pada Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008)

mengirimkan salinan resmi putusan yang disengketakan serta seluruh berkas perkaranya[335].

b) Komisi Informasi wajib mengirimkan putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a ke pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permintaan diajukan[336].

c) Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada panitera pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diregister[337].

d) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk mengadili perkara[338].

e) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, panitera menunjuk panitera pengganti.

f) Hakim/majelis hakim menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan penunjukkan hakim/majelis hakim.

g) Pemeriksaan dilakukan tanpa proses mediasi.

h) Pengadilan wajib memutus perkara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak majelis hakim ditetapkan[339].

i) Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila para pihak hadir atau 14 (empat belas) hari sejak isi atau amar putusan diberitahukan kepada para pihak oleh jurusita untuk sengketa di pengadilan negeri[340].

---

335 Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

336 Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

337 Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

338 Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

339 Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

340 Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

I. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Surat permohonan pembatalan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat putusan arbitrase tersebut didaftarkan.

2) Salinan putusan arbitrase beserta penetapan pendaftaran putusan yang dimohonkan pembatalan.

3) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan tertulis dan disidangkan oleh majelis hakim,[341] baik secara langsung maupun elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan.[342]

4) Permohonan yang diajukan melampaui tenggang batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak memenuhi syarat formal melalui surat keterangan panitera pengadilan dan selanjutnya ketua pengadilan membuat penetapan.[343]

5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pendaftaran.[344]

6) Surat kuasa khusus termasuk kuasa insidentil/surat tugas (jika ada).

7) Dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah).

8) Dalam hal pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

b. Register Perkara

Register permohonan pembatalan putusan arbitrase sama

---

[341] Pasal 25 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase

[342] Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 24 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

[343] Pasal 24 ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase

[344] Pasal 24 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase

dengan register permohonan perdata umum.

c. Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan gugatan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan[345]

Persidangan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan terbuka untuk umum.

a) Putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau elektronik.

b) Tahapan persidangan pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase terdiri dari:

1) sidang pertama untuk pembacaan permohonan;
2) sidang kedua untuk tanggapan;
3) putusan sela (jika ada);
4) sidang dengan acara pembuktian; dan
5) sidang pembacaan putusan.

c) Dalam hal pemohon setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, permohonan dinyatakan gugur.

d) Dalam hal termohon setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, sidang tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan permohonan pemohon.

e) Terhadap termohon yang tidak hadir dengan alasan yang sah dalam sidang pertama, termohon dipanggil sekali lagi disertai lampiran permohonan guna memberikan hak bagi termohon

---

[345] Pasal 24 sampai dengan Pasal 27, dan Pasal 29 Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase

untuk menyampaikan tanggapan dalam sidang kedua.

f) Dalam hal termohon setelah dipanggil tidak hadir dalam sidang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e, termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan pemohon.

g) Sidang dengan acara pembuktian diberi kesempatan 1 (satu) kali kepada pemohon dan termohon.

h) Dalam hal pemohon ataupun termohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan yang telah ditetapkan, pihak yang tidak mengajukan alat bukti dianggap tidak menggunakan haknya dalam proses pembuktian.

i) Sidang pembacaan putusan hanya dapat ditunda untuk 1 (satu) kali persidangan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.

j) Putusan atas permohonan pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat dikabulkan dalam keadaan diduga mengandung salah satu dari unsur sebagai berikut:

   1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

   2) setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

   3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

k) Majelis hakim dapat mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf j, tanpa adanya putusan pengadilan yang mendasarinya.

l) Terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase, dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

m) Permohonan banding dapat diajukan secara langsung atau elektronik.

n) Terhadap putusan pengadilan yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

o) Permohonan banding ke Mahkamah Agung diajukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak.

p) Permohonan banding diterima dan dicatat dalam register serta harus diajukan bersama-sama dengan memori banding.

q) Permohonan yang diajukan dan/atau permohonan yang diajukan melampaui tenggang waktu dinyatakan tidak memenuhi syarat formal melalui surat keterangan panitera pengadilan.

r) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat formal, ketua pengadilan menerbitkan penetapan dan penetapan tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung tanpa disertai berkas perkara serta kepada para pihak.

s) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan banding dicatat, pengadilan memberitahukan adanya permohonan banding kepada termohon banding.

t) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan kepada termohon banding, termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding ke kepaniteraan pengadilan.

u) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tenggang waktu terlampaui, panitera pengadilan memberitahukan kepada para pihak untuk memeriksa kelengkapan berkas (*inzage*).

v) Para pihak melakukan inzage paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan inzage.

w) Berkas banding dikirim ke Mahkamah Agung paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sejak permohonan banding didaftarkan.

J. GUGATAN KEBERATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN[346]

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan[347]

1) Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan

---

[346] Perma 1 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

[347] Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Pengadilan Niaga

arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2) Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.

3) Konsumen yang tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia harus mengajukan keberatan di pengadilan negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan.

4) Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak.

5) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.

6) Keberatan atas Putusan BPSK diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.

b. Dokumen Pendaftaran:

1) Dokumen putusan BPSK.

2) Surat kuasa khusus termasuk kuasa insidentil.

3) Dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah).

4) Dalam hal Pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

c. Register Perkara

Register menjadi satu dengan gugatan perdata umum.

d. Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara perdata umum.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

f. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara gugatan keberatan putusan badan

penyelesaian sengketa konsumen dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan perdata umum.

K. PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Administrasi Perkara

a) Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika pemohon keberatan hadir atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika pemohon keberatan tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili pelaku usaha (terlapor).

3) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan untuk putusan KPPU yang sama di pengadilan niaga yang sama, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sama.

4) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan niaga disertai dengan usulan tempat pengadilan niaga yang akan memeriksa keberatan tersebut.

5) Permohonan keberatan wajib memuat alasan yang menjadi keberatan dari pemohon keberatan.

6) Salinan jaminan bank diserahkan dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda.

7) Panitera mendaftarkan berkas pemohon keberatan yang telah lengkap.

b) Dokumen Pendaftaran[348]

1) surat kuasa; (jika ada)
2) permohonan Keberatan;
3) salinan putusan KPPU;dan
4) salinan jaminan bank yang dilegalisir.

c) Register Perkara

Register induk permohonan keberatan putusan KPPU.

d) Buku Induk Keuangan Perkara

Buku Induk dan Keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara niaga.

e) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

f) Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan[349]

a) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) keberatan terhadap putusan KPPU yang sama di pengadilan niaga yang sama tetapi terdaftar dengan nomor yang berbeda, ketua pengadilan niaga menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangani penggabungan keberatan tersebut dan memberikan tembusan penunjukan kepada majelis hakim yang tidak menangani keberatan.

b) Majelis hakim pengadilan niaga yang tidak menangani Keberatan mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

c) Setelah menerima keberatan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, ketua pengadilan niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha.

d) Dalam hal belum terdapat hakim bersertifikat persaingan usaha, ketua pengadilan niaga menunjuk majelis hakim yang pernah memutus perkara keberatan terhadap putusan

---

[348] Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

[349] Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Perma Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

KPPU.

e) Dalam hal belum terdapat hakim sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, perkara Keberatan diperiksa oleh ketua pengadilan niaga secara *ex officio* sebagai ketua majelis.

f) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan niaga disertai dengan usulan tempat pengadilan niaga yang akan memeriksa keberatan tersebut.

g) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf f ditembuskan oleh KPPU kepada seluruh ketua pengadilan niaga yang menerima permohonan keberatan.

h) Pengadilan niaga yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.

i) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari menunjuk pengadilan niaga yang memeriksa keberatan tersebut.

j) Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari pengadilan niaga yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara ke pengadilan niaga yang ditunjuk.

k) Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah seluruh berkas perkara yang digabungkan diterima lengkap, ketua pengadilan niaga yang ditunjuk menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan tersebut.

l) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf k dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan keberatan menerima seluruh berkas perkara dari majelis hakim yang tidak menangani keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau dari pengadilan niaga lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud

pada huruf j.

m) Dalam hal terdapat Keberatan, KPPU menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada pengadilan niaga yang memeriksa perkara keberatan pada hari sidang pertama.

n) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf f namun KPPU belum menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya, KPPU menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada pengadilan niaga yang ditunjuk Mahkamah Agung pada hari sidang pertama.

L. PERMOHONAN PENETAPAN SEMENTARA DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL[350]

1. Administrasi Perkara

a) Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Surat permohonan yang diajukan kepada pengadilan niaga yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran.

2) Melampirkan bukti kepemilikan hak atau pemegang hak.

3) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak.

4) Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian.

5) Menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang dikenai penetapan sementara.

6) Surat Kuasa Khusus (jika ada).

b) Register Perkara

Register menjadi satu dengan register induk niaga.

c) Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara niaga.

---

[350] PERMA 5 TAHUN 2012 tentang Penetapan Sementara

d) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e) Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a) Setelah pemohon memenuhi semua persyaratan pendaftaran, panitera mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu 1 x 24 jam kepada ketua pengadilan.

b) Ketua pengadilan setelah menerima berkas permohonan tersebut dapat menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan.

c) Panitera menunjuk panitera pengganti pada hari yang sama setelah ketua pengadilan menetapkan penunjukan hakim.

d) Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima surat permohonan tersebut harus menentukan hari persidangan.[351]

e) Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa, memperhatikan alat bukti dan mendengar keterangan pemohon.

f) Hakim harus mempertimbangkan secara rinci dan cermat tindakan apa yang diminta oleh pemohon, untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari pemohon.

g) Hakim harus mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang atau jasa yang dikenai serta biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut.

h) Paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam setelah pendaftaran permohonan, pengadilan menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan.

i) Proses permohonan sampai dengan penerbitan penetapan pengadilan bersifat rahasia.[352]

---

[351] Pasal 4 Perma Nomor 5 Tahun 2021

[352] Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2012

M. PERMOHONAN PENANGGUHAN SEMENTARA YUDISIAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL[353]

1. Administrasi Perkara

a) Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Permohonan dibuat oleh pemohon atau kuasanya secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga) atau secara elektronik dan ditujukan kepada ketua pengadilan niaga yang berwenang.

2) Surat kuasa atau kuasa insidentil/surat tugas. (jika ada)

3) Permohonan perintah penangguhan sementara yudisial harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

(a) bukti kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang cukup;

(b) data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang;

(c) perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan sementara, agar dengan cepat dapat dikenali oleh pejabat bea dan cukai yang terdiri atas nama importir atau eksportir dan dilengkapi dengan nomor surat muatan angkutan laut *(bill of lading)* dan/atau nomor surat muatan angkutan udara *(airway bills)* dan/atau nomor kontainer dan/atau nomor sarana pengangkutan dan/atau perkiraan jenis dan jumlah barang dan/atau pelabuhan tujuan dan negara asal;

(d) bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI;

(e) surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara;

(f) surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan biaya operasional;

(g) surat keterangan dari perusahaan penilai *(appraisal)* independen yang tersumpah mengenai besarnya nilai barang yang akan ditangguhkan

[353] (PERMA 6 TAHUN 2019)

sementara sebagai dasar pembayaran jaminan atas barang; dan

(h) bukti pembayaran jaminan atas barang yang akan ditangguhkan sementara.

4) Dokumen harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[354]

b) Register Perkara

Register menjadi satu dengan register perkara HKI.

c) Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara HKI.

d) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e) Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a) Panitera pengadilan mendaftarkan permohonan ke dalam register permohonan penangguhan sementara, setelah pemohon membayar panjar biaya perkara dan uang jaminan atas barang.

b) Setelah permohonan didaftarkan dalam register, panitera pengadilan menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan pada hari itu juga.

c) Ketua pengadilan menunjuk seorang hakim untuk memeriksa permohonan.

d) Panitera menunjuk panitera pengganti pada hari yang sama setelah ketua pengadilan menetapkan penunjukan hakim.

e) Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan menetapkan hari sidang dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima surat-surat permohonan.

f) Penyampaian surat-surat permohonan kepada ketua pengadilan, penunjukan hakim dan penetapan hari sidang dilakukan pada hari yang sama dengan pendaftaran

---

[354] Pasal 4 dan 5 Perma Nomor 6 Tahun 2019

permohonan.

g) Pemohon atau kuasanya harus hadir pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.

h) Pemeriksaan permohonan dilakukan tanpa memanggil dan tanpa dihadiri termohon.

i) Hakim mendengarkan keterangan pemohon.

j) Hakim mempelajari, memeriksa dan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup terkait kepemilikan dan dugaan pelanggaran HKI.

k) Hakim mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan atas barang sebanding dengan nilai barang yang ditangguhkan sementara.

l) Hakim memberikan penetapan penangguhan sementara paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan.

m) Hakim mengabulkan atau menolak permohonan pemohon.

n) Dalam hal hakim mengabulkan permohonan, di dalam penetapan memuat amar:

   (1) mengabulkan permohonan pemohon.

   (2) menangguhkan sementara pengeluaran barang dari kawasan pabean selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan oleh pejabat bea dan cukai;

   (3) memerintahkan kepada pejabat bea dan cukai setempat untuk melaksanakan penetapan perintah penangguhan sementara;

   (4) memerintahkan pemohon untuk segera mengajukan permohonan pemeriksaan bersama kepada bea dan cukai paling lama 2 (dua) hari sejak menerima penetapan;

   (5) menyatakan uang jaminan tetap berada pada kepaniteraan pengadilan sampai dengan penetapan akhir; dan

   (6) menangguhkan biaya perkara sampai dengan penetapan akhir.

o) Penetapan perintah penangguhan sementara bersifat final dan mengikat.

p) Penetapan perintah penangguhan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan

kembali.

q) Penegahan bukan merupakan objek dalam sengketa tata usaha negara dan praperadilan.[355]

N. PERMOHONAN[356] PEMERIKSAAN YAYASAN OLEH PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Dokumen pendaftaran yang didaftarkan ke pengadilan negeri sama dengan dokumen pendaftaran pada perkara permohonan perdata umum.

2) Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara permohonan perdata umum.

b. Register Perkara

Register menjadi satu dengan register permohonan perdata umum

c. Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara permohonan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara permohonan perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara permohonan perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara permohonan pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan permohonan perdata umum.

---

[355] Pasal 5 ayat (2) sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 15 PERMA 6 Tahun 2019

[356] Pasal 53 Ayat 2 UU 16 Tahun 2001 dan Pasal 34 UU No 28 Tahun 2004

O. GUGATAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK

1. Administrasi Perkara

   a. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

      1) Surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
      2) putusan Komisi Informasi Publik.
      3) kartu identitas penggugat.
      4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada).
      5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah).
      6) dalam hal penggugat merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

   b. Register Perkara

      Register menjadi satu dengan register permohonan perdata umum

   c. Buku Induk Keuangan Perkara

      Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara permohonan perdata umum.

   d. Monitoring dan Evaluasi

      Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara permohonan perdata umum.

   e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

      Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara permohonan perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

   Persidangan perkara gugatan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Publik dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan permohonan perdata umum.

P. GUGATAN PERDATA LINGKUNGAN HIDUP[357]

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Surat gugatan yang memuat tuntutan dan rencana pemulihan (jika menuntut pemulihan lingkungan hidup) diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
2) Kartu identitas penggugat.
3) Surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada).
4) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah).
5) Dalam hal penggugat merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

b. Register Perkara

Register menjadi satu dengan register permohonan perdata umum.

c. Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara permohonan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara permohonan perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara permohonan perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara gugatan perdata lingkungan hidup dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan permohonan perdata umum.

Q. LAIN-LAIN

Penghapusan/Perbaikan Data Perkara Perdata Khusus pada SIP dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai

---

[357] PERMA 1 TAHUN 2023

Penghapusan/Perbaikan Data Perkara pada SIP perkara perdata umum.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEKNIS ADMINISTRASI PERADILAN PADA PENGADILAN TINGGI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

I. PERKARA PIDANA

Ruang lingkup perkara banding pidana antara lain :

1. banding pidana biasa
2. banding pidana anak
3. banding tindak pidana korupsi
4. perlawanan (banding) terhadap putusan atas perlawanan

A. ADMINISTRASI PERKARA

1. Administrasi Pendaftaran

a. Dokumen Pendaftaran

1) Banding Pidana Biasa

Daftar susunan berkas perkara (*checklist*):

a) Bundel A:

(1) Surat dakwaan.
(2) Surat pelimpahan perkara.
(3) Penetapan penunjukan hakim/majelis hakim.
(4) Penunjukan panitera sidang.
(5) Penunjukan juru sita/juru sita pengganti.
(6) Penetapan hari sidang.
(7) Rencana persidangan (*court calendar*).
(8) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan).
(9) Keberatan (jika ada).
(10) Pendapat penuntut umum atas keberatan (jika ada).
(11) Putusan sela (jika ada).
(12) Surat bukti dari penuntut umum (jika ada).
(13) Surat bukti dari terdakwa (jika ada).
(14) Surat tuntutan.
(15) Surat pembelaan terdakwa/advokat (jika ada).
(16) Replik (jika ada).
(17) Duplik (jika ada).
(18) Salinan putusan.

(19) Penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan, pembantaran, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan (jika ada).
(20) Surat kuasa/penetapan penunjukan advokat (jika ada).
(21) Surat permohonan penggabungan tuntutan ganti rugi (jika ada).
(22) Permohonan restitusi (jika ada).
(23) Permohonan kompensasi (jika ada).
(24) Penetapan hakim/ketua majelis tentang penggabungan tuntutan ganti rugi (jika ada).
(25) Surat-surat lainnya (jika ada).

b) Bundel B:
(1) Salinan putusan.
(2) Surat kuasa (jika ada).
(3) Surat keterangan banding.
(4) Pemberitahuan banding secara elekronik/surat tercatat.
(5) Memori banding (jika ada).
(6) Pemberitahuan dan penyerahan memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).
(7) Kontra memori banding (jika ada).
(8) Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).
(9) Pemberitahuan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara.
(10) Berita acara memeriksa berkas (jika ada).
(11) Surat-surat lain (jika ada).

2) Banding Pidana Anak

Daftar susunan berkas perkara (*checklist*):

a) Bundel A:
(1) Surat dakwaan.
(2) Surat pelimpahan perkara.
(3) Penetapan penunjukan hakim/majelis hakim.
(4) Penunjukan panitera sidang.

(5) Penunjukan juru sita/juru sita pengganti.
(6) Penetapan hari sidang.
(7) Rencana persidangan (*court calendar*).
(8) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan).
(9) Perlawanan (jika ada).
(10) Pendapat penuntut umum atas perlawanan (jika ada).
(11) Putusan sela (jika ada).
(12) Surat bukti dari penuntut umum (jika ada).
(13) Surat bukti dari terdakwa (jika ada).
(14) Surat tuntutan.
(15) Surat pembelaan terdakwa/ advokat (jika ada).
(16) Replik (jika ada).
(17) Duplik (jika ada).
(18) Salinan putusan.
(19) Penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan, pembantaran, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan (jika ada).
(20) Surat kuasa/penetapan penunjukan advokat (jika ada).
(21) Surat permohonan penggabungan tuntutan ganti rugi (jika ada).
(22) Permohonan restitusi (jika ada).
(23) Permohonan kompensasi (jika ada).
(24) Penetapan hakim/ketua majelis tentang penggabungan tuntutan ganti rugi (jika ada).
(25) Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS.
(26) Hasil asesmen terpadu (jika ada).
(27) Surat-surat lainnya (jika ada).

b) Bundel B:
(1) Salinan putusan.
(2) Surat kuasa (jika ada).
(3) Surat keterangan banding.
(4) Pemberitahuan banding secara elekronik/surat tercatat.

(5) Memori banding (jika ada).
(6) Pemberitahuan dan penyerahan memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).
(7) Kontra memori banding (jika ada).
(8) Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).
(9) Pemberitahuan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara.
(10) Berita acara memeriksa berkas (jika ada).
(11) Surat-surat lain (jika ada).

3) Banding Tindak Pidana Korupsi

Daftar susunan berkas perkara (*checklist*):

a) Bundel A:
(1) Surat dakwaan.
(2) Surat pelimpahan perkara.
(3) Penetapan penunjukan hakim/majelis hakim.
(4) Penunjukan panitera sidang.
(5) Penunjukan juru sita/juru sita pengganti.
(6) Penetapan hari sidang.
(7) Rencana persidangan (*court calendar*).
(8) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan).
(9) Perlawanan (jika ada).
(10) Pendapat penuntut umum atas perlawanan (jika ada).
(11) Putusan sela (jika ada).
(12) Surat bukti dari penuntut umum (jika ada).
(13) Surat bukti dari terdakwa (jika ada).
(14) Surat tuntutan.
(15) Surat pembelaan terdakwa/ advokat (jika ada).
(16) Replik (jika ada).
(17) Duplik (jika ada).
(18) Salinan putusan.
(19) Penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan, pembantaran, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan (jika

ada).

(20) Surat kuasa/penetapan penunjukan advokat (jika ada).

(21) Surat-surat lainnya (jika ada).

b) Bundel B:

(1) Salinan putusan.

(2) Surat kuasa (jika ada).

(3) Surat keterangan banding.

(4) Pemberitahuan banding secara elekronik/surat tercatat.

(5) Memori banding (jika ada).

(6) Pemberitahuan dan penyerahan memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).

(7) Kontra memori banding (jika ada).

(8) Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).

(9) Pemberitahuan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara.

(10) Berita acara memeriksa berkas (jika ada).

(11) Surat-surat lain (jika ada).

4) Perlawanan Terhadap Putusan atas Perlawanan

Daftar susunan berkas perkara (*checklist*):

a) Bundel A:

(1) Surat dakwaan.

(2) Surat pelimpahan perkara.

(3) Penetapan penunjukan hakim/majelis hakim.

(4) Penunjukan panitera sidang.

(5) Penunjukan juru sita/juru sita pengganti.

(6) Penetapan hari sidang.

(7) Rencana persidangan (*court calendar*).

(8) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan).

(9) Perlawanan.

(10) Pendapat penuntut umum atas perlawanan.

(11) Putusan atas keberatan.

(12) Surat bukti dari penuntut umum (jika ada).

(13) Surat bukti dari terdakwa (jika ada).

b) Bundel B:
   (1) Salinan putusan
   (2) Surat kuasa (jika ada).
   (3) Surat keterangan perlawanan.
   (4) Pemberitahuan perlawanan secara elekronik/surat tercatat.
   (5) Memori perlawanan (jika ada).
   (6) Pemberitahuan dan penyerahan memori perlawanan secara elektronik/ surat tercatat (jika ada).
   (7) Kontra memori perlawanan (jika ada).
   (8) Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori perlawanan secara elektronik/ tercatat (jika ada).
   (9) Pemberitahun secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara.
   (10) Berita acara memeriksa berkas (jika ada).
   (11) Surat-surat lain (jika ada).

b. Pendaftaran Perkara secara Elektronik
   1) Kepaniteraan menerima notifikasi pengiriman berkas perkara secara elektronik dari Pengadilan pengaju.
   2) Kepaniteraan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar susunan berkas perkara (*checklist*).
   3) Apabila terdapat kekurangan berkas atau terdapat dokumen elektronik yang tidak valid dan/atau tidak dapat terbaca dengan baik, kepaniteraan segera memberikan notifikasi kepada pengadilan pengaju untuk segera melengkapi dan/atau mengunggah ulang dokumen yang bersangkutan.
   4) Pengadilan pengaju melengkapi dan/atau mengunggah ulang dokumen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima notifikasi dari pengadilan tinggi.
   5) Berkas perkara yang lengkap diregister pada SIP dan register manual paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkas lengkap.

c. Pendaftaran Perkara secara Manual

1) Petugas PTSP menerima berkas perkara dari pengadilan pengaju.
2) Petugas PTSP tanpa membuka sampul berkas perkara, mencatat nomor surat pengantar, nomor perkara yang tertera pada sampul berkas perkara, mencatat tanggal serta jam berkas diterima.
3) Pengadilan pengaju wajib mencantumkan nomor surat pengantar dan nomor perkara pada sampul berkas perkara.
4) Paling lambat 1 (satu) jam setelah berkas perkara diterima, petugas PTSP meneruskan berkas perkara ke kepaniteraan pidana/ kepaniteraan tipikor dengan tanda terima penerimaan berkas perkara yang ditanda tangani oleh panitera muda atau apabila panitera muda berhalangan oleh salah satu staf dengan menulis nama jelas dan tanda tangan.
5) Meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai daftar berkas perkara (*checklist*).
6) Apabila terdapat kekurangan berkas atau terdapat dokumen yang tidak valid dan/atau tidak dapat terbaca dengan baik, kepaniteraan segera menyampaikan kepada pengadilan pengaju dengan surat yang dikirim melalui email atau sarana elektronik lainnya milik Pengadilan Pengaju.
7) Pengadilan pengaju melengkapi dokumen yang bersangkutan sebagaimana yang diminta oleh pengadilan tinggi paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan dari pengadilan tinggi.
8) Berkas perkara yang diterima dari pengadilan pengaju yang telah lengkap, diregister pada SIP dan register manual paling lambat 3 (tiga) hari.
9) Dalam hal permohonan banding diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan, atas dasar surat keterangan panitera bahwa pernyataan banding telah terlambat/lewat waktu, dengan penetapan ketua pengadilan negeri yang menyatakan permohonan

banding tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke pengadilan tinggi.

2. Register Perkara

a. Register Elektronik

1) Register pada pengadilan tinggi terdiri dari:

a) Register perkara banding pidana.

b) Register perkara banding pidana anak.

c) Register perkara banding tindak pidana korupsi.

d) Register penahanan.

e) Register penahanan anak.

2) Syarat penggunaan register elektronik

Syarat penggunaan register elektronik pada pengadilan tinggi yaitu pengadilan tinggi telah mencapai nilai Evaluasi Implementasi SIP (EIS) minimal 900 (sembilan ratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

3) Pelaksanaan register elektronik

a) Surat izin terhadap pelaksanaan register elektronik pada pengadilan tinggi dikeluarkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap nilai EIS tanpa usulan dari Pengadilan Tinggi.

b) Pengadilan tinggi yang telah mendapatkan izin untuk melaksanakan register elektronik tidak wajib menggunakan register induk manual dan melaksanakan register elektronik secara penuh (kecuali untuk perkara yang pencatatannya belum ada di SIP).

b. Register Manual

1) Register pada pengadilan tinggi terdiri dari:

a) Register perkara banding pidana.

b) Register perkara banding pidana anak.

c) Register perkara banding tindak pidana korupsi.

d) Register penahanan.

e) Register penahanan anak.

2) Buku register setiap tahun harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

3) Register banding pada halaman pertama dan terakhir

ditandatangani oleh ketua pengadilan tinggi, sedangkan halaman lainnya dibubuhi paraf pada bagian pojok kanan atas. Pada halaman pertama disebutkan mengenai jumlah halaman buku register tersebut.

4) Ditutup setiap bulan dengan diberi nomor unit setiap bulan dimulai dari nomor 1 dan berlanjut untuk setiap tahun dengan uraian sebagai berikut:

a) Setiap akhir bulan register banding ditutup, ditandatangani oleh petugas register dan panitera muda pidana dengan perincian sebagai berikut:

Sisa bulan lalu : perkara.
Masuk bulan ini : perkara.
Putus bulan ini : perkara.
Sisa bulan ini : perkara.

b) Penutupan register banding setiap akhir tahun, ditandatangani oleh panitera muda pidana dan panitera, serta diketahui oleh ketua pengadilan tinggi, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa tahun lalu : perkara.
Masuk tahun ini : perkara.
Putus tahun ini : perkara.
Sisa tahun ini : perkara.

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Pengadilan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan negeri paling sedikit 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik;.

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan tinggi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik.

c. Pengadilan tinggi wajib membuat laporan tentang keadaan perkara setiap bulan melalui aplikasi pelaporan elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan laporan kegiatan hakim setiap 6 (enam) bulan.

4. Arsip Perkara

a. Arsip Elektronik

Setelah salinan putusan dikirim secara elektronik ke

pengadilan negeri pengaju, putusan asli dan berita acara sidang yang ditandatangani dengan tanda tangan basah, oleh kepaniteraan perdata dialihkan pengelolaannya kepada kepaniteraan hukum untuk dimasukan kedalam SIP.

b. Arsip Manual

1) Setelah salinan putusan dikirim ke pengadilan negeri pengaju, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah minutasi pengelolaan berkas perkara dialihkan kepada kepaniteraan hukum untuk diarsipkan.

2) Pembenahan dan penataan berkas perkara dan arsip berkas perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni:

a) Tahap pertama

Penataan arsip berkas perkara dimasukkan dalam rak/lemari dengan diberi:

(1) Nomor urut rak/lemari.
(2) Tahun perkara.
(3) Nomor urut perkara.

b) Tahap Kedua

Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap kedua, dilakukan dengan cara:

(1) Membuat daftar isi yang ditempel dalam rak/lemari.
(2) Arsip disusun menurut nomor urut perkara dan tahun perkara.
(3) Penyimpanan berkas perkara dalam rak/lemari.
(4) Membuat daftar isi rak (D.I.R.) dan daftar isi lemari (D.I.L.).

c) Tahap Ketiga

Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap ketiga dilakukan dengan cara:

(1) Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa 30 (tiga puluh) tahun sebagai dokumen.
(2) Menyimpan arsip berkas perkara dalam rak/lemari dengan rapi.

c. Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara menggunakan aplikasi arsip perkara.

5. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara pada SIP

a. Penghapusan/Perbaikan data perkara selain putusan pada SIP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Data yang diajukan untuk dihapus adalah data yang disebabkan karena adanya kesalahan pengisian dan duplikasi data perkara.

2) - Perbaikan data SIPP dilakukan menggunakan akun ketua/wakil ketua.
- Perbaikan data e-Berpadu dan e-Court dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Badan Urusan Administrasi melalui Biro Hukum Humas Mahkamah Agung.

3) Membuat berita acara penghapusan data perkara yang ditandatangani oleh panitera, panitera muda, dan kasubbag PTIP.

Untuk setiap penghapusan data perkara yang sudah dilakukan pada SIP harus dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan penghapusan data kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mencegah terjadinya gagal sinkronisasi dikarenakan adanya perbedaan data antara *server local* pengadilan dan server Mahkamah Agung.

b. Penghapusan/Perbaikan data perkara putusan yang sudah terpublikasi, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Jika kesalahan putusan terdapat pada amar, maka tidak dapat dihapus tetapi dilakukan upaya hukum.

2) Selain kesalahan putusan pada amar, maka dapat dilakukan perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Hapus terlebih dahulu e-doc dan metadata yang ada di Direktori Putusan.
- Gunakan akun admin masing-masing satker untuk hapus data putusan dan e-docnya di Direktori Putusan.
- Perbaiki e-doc putusan dan metadata amar putusan yang ada di SIPP.
- Sinkronkan ulang data putusan SIPP (data yang

sudah dipastikan benar) dengan Direktori Putusan (menggunakan antrian Direktori Putusan).

- Sinkron tidak dapat dilakukan (*replace*) jika pada direktori putusan masih terdapat data Direktori Putusan dengan nomor perkara yang sama.

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Pemeriksaan Perkara secara Elektronik
   a. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, ketua/wakil ketua pengadilan tinggi menetapkan hakim/majelis hakim melalui SIP.
   b. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, Panitera menunjuk panitera sidang melalui SIP.
   c. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara di register ketua majelis/hakim anggota menetapkan hari sidang melalui SIP dan mengisi rencana persidangan *(court calendar)* pada SIP.
   d. Hakim ketua dan hakim-hakim anggota membaca berkas perkara secara bersamaan melalui SIP.
   e. Paling lambat 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diregister putusan sudah harus diucapkan. Jika melebihi waktu 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari maka majelis hakim pada pengadilan tinggi harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tinggi yang tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Mahkamah Agung.
   f. Pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
   g. Memerintahkan panitera pengadilan tinggi untuk mengirimkan penetapan tanggal sidang pembacaan putusan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri dan penuntut umum mengirimkan penetapan tanggal sidang pembacaan putusan kepada terdakwa dan/atau

advokatnya.[358]

h. Memerintahkan panitera pengadilan tinggi untuk mengirimkan penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri dan penuntut umum mengirimkan penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan kepada terdakwa/para terdakwa dan/atau advokatnya dalam hal majelis hakim di pengadilan tinggi menunda pembacaan putusan.[359]

i. Pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, naskah putusan telah siap dan sesaat setelah diucapkan hakim ketua dan hakim-hakim anggota serta panitera sidang menandatangani putusan dengan tanda tangan basah.

j. Semua halaman putusan harus diparaf oleh majelis hakim, kecuali halaman terakhir harus ditandatangani majelis hakim.

k. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan. putusan ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada dan ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

l. Panitera sidang mengunggah naskah putusan ke SIP dan setelah panitera melakukan verifikasi asli putusan dengan naskah putusan yang diunggah di SIP, Panitera menandatangani naskah putusan menjadi salinan putusan elektronik.

m. Salinan putusan elektronik dan berkas perkara elektronik bundel A dikirim/dikembalikan ke pengadilan pengaju melalui SIP.

n. Pengadilan pengaju memberitahukan putusan pengadilan tinggi kepada pihak secara elektronik bagi penuntut umum dan terdakwa dan atau advokat yang memiliki alamat elektronik terverifikasi, bagi pihak selainnya melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan

---

[358] SEMA Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[359] SEMA Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

diterima.

o. Apabila dalam pemeriksaan perkara, diperlukan pemeriksaan tambahan, maka majelis hakim memerintahkan pengadilan pengaju melalui putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan tambahan.

p. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut atau menyatakan dakwaan batal demi hukum, dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, akan tetapi menurut pengadilan tinggi, pengadilan negeri berwenang atau dakwaan telah memenuhi syarat, maka pengadilan tinggi memerintahkan kepada pengadilan negeri melalui putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan tanpa menjatuhkan putusan segera mengirim kembali berkas perkara kepada pengadilan tinggi untuk selanjutnya menjatuhkan putusan akhir.

q. Terhadap putusan sela pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak dapat dilakukan upaya hukum.

r. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengadilan negeri menerima putusan sela dari pengadilan tinggi, wajib mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil pemeriksaan tambahan ke pengadilan tinggi melalui SIP.

s. Dalam hal pengadilan negeri belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, ketua majelis hakim wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri disertai dengan alasannya, selanjutnya ketua pengadilan negeri melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.

t. Apabila pengadilan tinggi telah memutus perkara yang menyatakan pengadilan tidak berwenang, dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima dengan putusan akhir, upaya hukumnya adalah kasasi.

u. Dalam hal terdapat dokumen manual yang tidak dapat dialih mediakan dan atas permintaan majelis hakim pengadilan tinggi, dokumen manual tersebut dikirim ke pengadilan

tinggi, setelah pemeriksaan perkara pada pengadilan tinggi selesai, berkas perkara manual tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.

2. Pemeriksaan Perkara secara Manual
   a. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, ketua/wakil ketua pengadilan tinggi menetapkan hakim/majelis hakim melalui SIP.
   b. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, panitera menunjuk panitera sidang melalui SIP.
   c. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister ketua majelis/hakim anggota menetapkan hari sidang melalui SIP dan mengisi rencana persidangan (*court calendar*) pada SIP.
   d. Paling lambat 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diregister putusan sudah harus diucapkan. Jika melebihi waktu 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari maka majelis hakim pada pengadilan tinggi harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tinggi yang tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Mahkamah Agung.
   e. Pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
   f. Memerintahkan panitera pengadilan tinggi untuk mengirimkan penetapan tanggal sidang pembacaan putusan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri dan penuntut umum mengirimkan penetapan tanggal sidang pembacaan putusan kepada terdakwa dan/atau advokatnya.[360]
   g. Memerintahkan panitera pengadilan tinggi untuk mengirimkan penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri dan penuntut umum mengirimkan penetapan perubahan tanggal

[360] SEMA Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pembacaan putusan kepada terdakwa/para terdakwa dan/atau advokatnya dalam hal majelis hakim di pengadilan tinggi menunda pembacaan putusan.[361]

h. Pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, naskah putusan telah siap dan sesaat setelah dibacakan hakim ketua dan hakim-hakim anggota serta panitera sidang menandatangani putusan dengan tanda tangan basah.

i. Semua halaman putusan harus diparaf oleh majelis hakim, kecuali halaman terakhir harus ditandatangani majelis hakim.

j. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan. Putusan ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada dan ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

k. Panitera setelah mencocokan naskah putusan dengan putusan asli, menandatangani naskah putusan secara elektronik menjadi salinan putusan.

l. Salinan putusan yang ditandatangani secara elektronik dan berkas perkara bundel A dikirim/dikembalikan ke pengadilan pengaju melalui PTSP.

m. Pengadilan pengaju memberitahukan putusan pengadilan tinggi kepada penuntut umum secara elektronik bagi penuntut umum dan terdakwa dan/atau advokat yang memiliki alamat elektronik terverifikasi, bagi pihak selainnya melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan.

n. Apabila dalam pemeriksaan perkara, diperlukan pemeriksaan tambahan maka majelis hakim memerintahkan pengadilan pengaju melalui putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan tambahan.

o. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut atau menyatakan dakwaan batal demi hukum, dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat

---

[361] SEMA Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

diterima, akan tetapi menurut pengadilan tinggi, pengadilan negeri berwenang atau dakwaan telah memenuhi syarat maka pengadilan tinggi memerintahkan kepada pengadilan negeri melalui putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan tanpa menjatuhkan putusan segera mengirim kembali berkas perkara kepada pengadilan tinggi untuk selanjutnya menjatuhkan putusan akhir.

p. Terhadap putusan sela pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak dapat dilakukan upaya hukum.

q. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengadilan negeri menerima putusan sela dari pengadilan tinggi, wajib mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil pemeriksaan tambahan ke pengadilan tinggi melalui SIP.

r. Dalam hal pengadilan negeri belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, ketua majelis hakim wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri disertai dengan alasannya, selanjutnya ketua pengadilan negeri melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.

s. Apabila pengadilan tinggi telah memutus perkara yang menyatakan pengadilan tidak berwenang atau dakwaan batal dengan putusan akhir, upaya hukumnya adalah kasasi.

II. PERKARA PERDATA

Ruang lingkup perkara perdata banding adalah banding terhadap perkara gugatan.

A. ADMINISTRASI PERKARA

1. Administrasi Pendaftaran

a. Dokumen Pendaftaran

1) Bundel A:

a) Surat gugatan dan perubahan surat gugatan (jika ada).

b) Surat kuasa/ surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada).

c) Penetapan penunjukan majelis hakim.

d) Penunjukan panitera sidang.
e) Penunjukan jurusita/jurusita pengganti.
f) Penetapan hari sidang.
g) Relaas panggilan/*e-summon*.
h) Penetapan penunjukan mediator.
i) Laporan hasil mediasi.
j) Rencana persidangan (*court calendar*).
k) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan).
l) Jawaban (jika ada).
m) Replik (jika ada).
n) Duplik (jika ada).
o) Permohonan intervensi (jika ada).
p) Putusan sela/penetapan (jika ada).
q) Penetapan sita dan berita acara sita (jika ada).
r) Surat bukti penggugat (jika ada).
s) Surat bukti tergugat (jika ada).
t) Surat bukti intervenien (jika ada).
u) Berita acara pemeriksaan setempat (jika ada).
v) Simpulan penggugat (jika ada).
w) Simpulan tergugat (jika ada).
x) Simpulan intervenien (jika ada).
y) Penetapan prodeo (jika ada).
z) Surat-surat lainnya.

2) Bundel B:
a) Salinan putusan.
b) Surat kuasa/surat tugas (jika ada).
c) Akta banding.
d) Pemberitahuan/*e-summon*/surat tercatat.
e) Memori banding (jika ada).
f) Pemberitahuan/*e-summon*/surat tercatat memori banding (jika ada).
g) Kontra memori banding (jika ada).
h) Pemberitahuan/*e-summon* kontra memori banding (jika ada).
i) Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*).
j) Berita acara mempelajari berkas perkara (*inzage*) (jika ada).

k) Bukti *e-payment*.

l) Surat-surat banding lainnya (jika ada).

b. Pendaftaran Perkara secara Elektronik

1) Kepaniteraan menerima notifikasi pengiriman berkas perkara elektronik dari pengadilan pengaju.

2) Kepaniteraan memeriksa kelengkapan berkas perkara elektronik pada SIP paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima notifikasi pengiriman berkas perkara dari pengadilan pengaju.

3) Apabila terdapat kekurangan berkas atau terdapat dokumen elektronik yang tidak valid dan atau tidak dapat terbaca dengan baik, kepaniteraan segera menotifikasi kepada pengadilan pengaju untuk segera melengkapi dan atau mengunggah ulang dokumen yang bersangkutan.

4) Pengadilan pengaju melengkapi dan atau mengunggah ulang dokumen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima notifikasi dari pengadilan tinggi.

5) Berkas perkara lengkap diregister pada SIP paling lambat 3 (tiga) hari.

c. Pendaftaran Perkara secara Manual

1) Petugas PTSP menerima berkas perkara dari pengadilan pengaju.

2) Petugas PTSP tanpa membuka sampul berkas perkara, mencatat pada register khusus penerimaan perkara nomor surat pengantar, nomor perkara yang tertera pada sampul berkas perkara, mencatat tanggal serta jam berkas diterima.

3) Pengadilan pengaju wajib mencantumkan nomor surat pengantar dan nomor perkara pada sampul berkas perkara.

4) Paling lambat 1 (satu) jam setelah berkas perkara diterima, petugas PTSP meneruskan berkas perkara ke panitera muda perdata dengan tanda terima penerimaan berkas perkara yang ditanda tangani oleh panitera muda perdata, atau apabila panitera muda perdata berhalangan oleh salah satu staf dengan

menulis nama jelas dan tanda tangan.

5) Meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai daftar berkas perkara (*checklist*).

6) Apabila terdapat kekurangan berkas atau terdapat dokumen yang tidak valid dan atau tidak dapat terbaca dengan baik, panitera segera menyampaikan kepada pengadilan pengaju dengan surat yang dikirim melalui email atau sarana elektronik lainnya milik pengadilan pengaju.

7) Pengadilan pengaju melengkapi dokumen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan dari pengadilan tinggi.

8) Berkas perkara lengkap diregister pada SIP dan register manual paling lambat 3 (tiga) hari.

9) Dalam hal permohonan banding diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan atas dasar surat keterangan panitera, bahwa pernyataan banding telah terlambat, dengan penetapan ketua pengadilan negeri yang menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke pengadilan tinggi.[362]

10) Permohonan banding diajukan paling lambat pada pukul 23.59 sesuai dengan zona waktu pengadilan pengaju pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis perkara. Tanggal akta permohonan banding menggunakan tanggal pembayaran.

2. Administrasi Keuangan Perkara

a. Kasir menerima dan mengisi biaya perkara banding yang diterima dari pengadilan pengaju kedalam aplikasi SIP dan membukukan kedalam buku jurnal keuangan perkara perdata (KII-Al).

b. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan setelah berkas perkara diterima.

---

[362] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 45A dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan

c. Biaya administrasi dikeluarkan bersamaan dengan pencatatan penerimaan biaya perkara tersebut.

d. Biaya meterai dan redaksi dikeluarkan dari biaya perkara pada waktu perkara diputus.

e. Buku keuangan perkara terdiri dari:
   1) jurnal perkara perdata (KII-A1);
   2) buku induk keuangan perkara perdata (KII-A2);
   3) buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.

f. Jurnal keuangan perkara, digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, dimulai dari penerimaan biaya perkara dan ditutup pada tanggal perkara diputus.

g. Jurnal keuangan perkara diberi nomor halaman, untuk setiap nomor halaman digunakan 2 (dua) halaman muka, dengan halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani ketua pengadilan tinggi dan halaman lainnya diparaf.

h. Banyaknya halaman pada setiap jurnal keuangan perkara, dan adanya tanda tangan serta paraf ketua pengadilan tinggi tersebut diterangkan dengan jelas oleh ketua, dan keterangan tersebut ditandatangani ketua pengadilan tinggi, sebelum halaman pertama jurnal keuangan Perkara.

i. Buku induk keuangan perkara, digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara, dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam jurnal keuangan perkara yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.

j. Banyaknya halaman setiap buku induk keuangan perkara harus diterangkan dengan jelas, sedangkan setiap halaman pertama dan halaman terakhir harus dibubuhi tanda tangan ketua pengadilan tinggi, sedangkan halaman lainnya cukup dibubuhi paraf.

k. Penutupan buku induk keuangan perkara dilakukan oleh panitera dan diketahui ketua pengadilan tinggi.

l. Pada setiap penutupan buku induk keuangan perkara, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas dan keadaan uang yang ada dalam brankas maupun disimpan dalam bank, serta uraian terperinci.

m. Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas senyatanya, maka harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut.

n. Ketua pengadilan tinggi sebelum menandatangani buku induk keuangan, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang tersimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.

o. Ketua pengadilan tinggi setiap saat dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan, dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara, sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan, dan meneliti keadaan uang menurut buku kas dan uang nyata yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, disertai buktinya.

p. Penutupan buku induk keuangan perkara atas dasar perintah Ketua Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut di atas, hendaknya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan secara mendadak, dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan.

q. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan, digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan, dan dalam kolom keterangan diisi dengan tanggal, jumlah uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama bendaharawan penerima.

r. Buku jurnal dan buku induk keuangan setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

s. Setiap pencatatan keuangan perkara yang dilakukan secara manual juga dilakukan secara elektronik.

t. Semua pencatatan keuangan yang wajib ditandatangani secara manual juga ditandatangani secara elektronik pada SIP.

3. Register Perkara

a. Register elektronik

1) Syarat penggunaan register elektronik

Syarat penggunaan register elektronik pada pengadilan tinggi yaitu pengadilan tinggi telah mencapai nilai EIS minimal 900 (sembilan ratus) selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut.

2) Pelaksanaan register elektronik

a) Surat ijin terhadap pelaksanaan register elektronik pada pengadilan tinggi dikeluarkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap nilai EIS tanpa usulan dari pengadilan tinggi.

b) Pengadilan tinggi yang telah mendapatkan ijin untuk melaksanakan register elektronik tidak harus menggunakan register induk manual dan melaksanakan register elektronik secara penuh (kecuali untuk perkara yang pencatatannya belum ada di aplikasi SIP).

b. Register manual

1) Buku register perdata setiap tahun harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

2) Register banding pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh ketua pengadilan tinggi, sedangkan halaman lainnya dibubuhi paraf pada bagian pojok kanan atas. Pada halaman pertama disebutkan mengenai jumlah halaman buku register tersebut.

3) Buku register ditutup setiap bulan dengan diberi nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1 dan berlanjut untuk setiap tahun dengan uraian sebagai berikut:

a) Setiap akhir bulan register banding ditutup, ditandatangani oleh petugas register dan panitera muda perdata dengan perincian sebagai berikut:

Sisa bulan lalu : perkara.
Masuk bulan ini : perkara.
Putus bulan ini : perkara.
Sisa bulan ini : perkara.

b) Penutupan register banding setiap akhir tahun, ditandatangani oleh panitera muda perdata dan panitera, serta diketahui oleh ketua pengadilan tinggi, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa tahun lalu : perkara.
Masuk tahun ini : perkara.

Putus tahun ini : perkara.

Sisa tahun ini : perkara.

4. Monitoring dan Evaluasi

   a. Pengadilan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan negeri paling sedikit 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik.

   b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan tinggi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik.

   c. Pengadilan tinggi wajib membuat laporan tentang keadaan perkara setiap bulan melalui aplikasi pelaporan elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan laporan kegiatan hakim setiap 6 (enam) bulan.

5. Arsip Perkara

   a. Arsip elektronik

      Setelah salinan putusan dikirim secara elektronik ke pengadilan negeri pengaju, putusan asli dan berita acara sidang yang ditandatangani dengan tanda tangan basah, oleh kepaniteraan perdata dialihkan pengelolaannya kepada kepaniteraan hukum untuk di masukan kedalam SIP.

   b. Arsip manual

      1) Setelah salinan putusan dikirim ke pengadilan negeri pengaju, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah minutasi pengelolaan berkas perkara dialihkan kepada kepaniteraan hukum untuk diarsipkan.

      2) Pembenahan dan penataan berkas perkara dan arsip berkas perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni:

         a) Tahap pertama

            Penataan arsip berkas perkara dimasukkan dalam rak/lemari dengan diberi:

            (1) Nomor urut rak/lemari.

            (2) Tahun perkara.

            (3) Nomor urut perkara.

         b) Tahap kedua

            Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap kedua, dilakukan dengan cara:

(1) Membuat daftar isi yang ditempel dalam rak/lemari.

(2) Arsip disusun menurut nomor urut perkara dan tahun perkara.

(3) Penyimpanan berkas perkara dalam rak/lemari.

(4) Membuat D.I.R. dan D.I.L.

c) Tahap ketiga

Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap ketiga dilakukan dengan cara:

(1) Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa 30 (tiga puluh) tahun sebagai dokumen.

(2) Menyimpan arsip berkas perkara dalam rak/lemari dengan rapi.

(3) Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara menggunakan aplikasi arsip perkara.

6. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara pada SIP

a. Penghapusan/Perbaikan data perkara selain putusan pada SIP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Data yang diajukan untuk dihapus adalah data yang disebabkan karena adanya kesalahan pengisian dan duplikasi data perkara.

2) - Perbaikan data SIPP dilakukan menggunakan akun ketua/wakil ketua.

- Perbaikan data e-Berpadu dan e-Court dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Badan Urusan Administrasi melalui Biro Hukum Humas Mahkamah Agung.

3) Membuat Berita Acara Penghapusan Data Perkara yang ditandatangani oleh Panitera, Panitera Muda, dan Kasubbag PTIP

Untuk setiap penghapusan data perkara yang sudah dilakukan pada SIP harus dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan penghapusan data kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mencegah terjadinya gagal sinkronisasi dikarenakan adanya

perbedaan data antara *server local* pengadilan dan server Mahkamah Agung.

b. Penghapusan/Perbaikan data perkara putusan yang sudah terpublikasi, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Jika kesalahan putusan terdapat pada amar, maka tidak dapat dihapus tetapi dilakukan upaya hukum.

2) Selain kesalahan putusan pada amar, maka dapat dilakukan perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Hapus terlebih dahulu e-doc dan metadata yang ada di Direktori Putusan.
- Gunakan akun admin masing-masing satker untuk hapus data putusan dan e-docnya di Direktori Putusan.
- Perbaiki e-doc putusan dan metadata amar putusan yang ada di SIPP.
- Sinkronkan ulang data putusan SIPP (data yang sudah dipastikan benar) dengan Direktori Putusan (menggunakan antrian Direktori Putusan).
- Sinkron tidak dapat dilakukan (*replace*) jika pada direktori putusan masih terdapat data Direktori Putusan dengan nomor perkara yang sama

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Pemeriksaan Perkara secara Elektronik

a. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, ketua pengadilan tinggi menetapkan hakim/majelis hakim melalui SIP.

b. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, panitera menunjuk panitera sidang melalui SIP.

c. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara di register ketua majelis/hakim anggota menetapkan hari sidang melalui SIP dan mengisi rencana persidangan (*court calendar)* pada SIP.

d. Hakim ketua dan hakim-hakim anggota membaca berkas perkara secara bersamaan melalui SIP.

e. Paling lambat 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diregister putusan sudah harus

diucapkan, kecuali terdapat putusan sela pemeriksaan tambahan. Jika melebihi waktu 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari maka majelis hakim pada pengadilan tinggi harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tinggi yang tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Mahkamah Agung.

f. Semua halaman putusan harus diparaf oleh majelis hakim, kecuali halaman terakhir harus ditandatangani majelis hakim.

g. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan. putusan ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada dan ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

h. Pada saat putusan diucapkan, naskah putusan telah siap dan sesaat setelah diucapkan hakim ketua dan hakim-hakim anggota serta panitera sidang menandatangani putusan dengan tanda tangan basah.

i. Panitera sidang mengunggah naskah putusan ke SIP dan setelah panitera melakukan verifikasi asli putusan dengan naskah putusan yang diunggah di SIP, panitera menandatangani naskah putusan menjadi salinan putusan elektronik.

j. Pengucapan putusan, pengisian tanggal dan amar putusan, penandatanganan putusan, penandatangan salinan putusan dan pengunggahan berita acara sidang serta *e-doc* putusan dilakukan paling lambat 1 X 24 jam.

k. Salinan Putusan elektronik dan berkas perkara elektronik bundel A dikirim/dikembalikan ke pengadilan pengaju melalui SIP.

l. Pengadilan pengaju memberitahukan putusan pengadilan tinggi kepada pihak secara elektronik bagi pihak yang memiliki alamat elektronik terverifikasi dan bagi pihak selainnya melalui surat tercatat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan.

m. Apabila dalam pemeriksaan perkara, diperlukan pemeriksaan tambahan maka majelis hakim memerintahkan pengadilan pengaju melalui putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang

memerlukan pemeriksaan tambahan.

n. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, akan tetapi menurut pengadilan tinggi, pengadilan negeri berwenang maka pengadilan tinggi memerintahkan kepada pengadilan negeri melalui putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan tanpa menjatuhkan putusan, dan segera mengirim kembali berkas perkara kepada pengadilan tinggi untuk selanjutnya pengadilan tinggi menjatuhkan putusan akhir.

o. Terhadap putusan sela pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak dapat dilakukan upaya hukum.

p. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengadilan negeri menerima putusan sela dari pengadilan tinggi, wajib mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil pemeriksaan tambahan ke pengadilan tinggi melalui SIP.

q. Dalam hal pengadilan negeri belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, ketua majelis hakim wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri disertai dengan alasannya, selanjutnya ketua pengadilan negeri melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.

r. Apabila pengadilan tinggi telah memutus perkara yang menyatakan pengadilan tidak berwenang dengan putusan akhir, upaya hukumnya adalah kasasi.

s. Apabila permohonan banding dicabut sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, maka berdasarkan keterangan dari panitera, ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengabulkan pencabutan dan berkas perkara tidak dikirim ke pengadilan tinggi.

t. Apabila pencabutan permohonan banding dilakukan setelah berkas perkara dikirim, maka surat pencabutan permohonan banding dikirim ke pengadilan tinggi dan selanjutnya majelis/hakim yang ditunjuk setelah mempelajari permohonan pencabutan banding mengeluarkan penetapan pencabutan banding.

u. Dalam hal terdapat dokumen manual yang tidak dapat dialih

mediakan dan atas permintaan majelis hakim pengadilan tinggi, dokumen manual tersebut dikirim ke pengadilan tinggi, setelah pemeriksaan perkara pada pengadilan tinggi selesai, berkas perkara manual tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

2. Pemeriksaan Perkara secara Manual

(Dalam hal tidak memungkinkan digunakan pemeriksaan secara elektronik)

a. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, ketua pengadilan tinggi menetapkan hakim/ majelis hakim melalui SIP.
b. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, panitera menunjuk panitera sidang melalui SIP.
c. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara di register ketua majelis/hakim anggota menetapkan hari sidang melalui SIP dan mengisi rencana persidangan (*court calendar*) pada SIP.
d. Hakim ketua dan hakim-hakim anggota membaca berkas perkara secara bergantian.
e. Paling lambat 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diregister putusan sudah harus diucapkan. Jika melebihi waktu 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari maka majelis hakim pada pengadilan tinggi harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tinggi yang tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Mahkamah Agung.
f. Pada saat putusan diucapkan naskah putusan harus telah siap dan setelah pengucapan putusan, hakim ketua dan hakim-hakim anggota serta panitera sidang dalam tenggang waktu 1 x 24 jam menandatangani putusan dengan tanda tangan basah, selanjutnya panitera sidang mengisi tanggal putusan dan amar putusan, mengunggah *e-doc* putusan dan berita acara sidang ke SIP.
g. Semua halaman putusan harus diparaf oleh majelis hakim, kecuali halaman terakhir harus ditandatangani majelis hakim.
h. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi

belum menandatangani putusan. Putusan ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada dan ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

i. Panitera setelah mencocokan naskah putusan dengan putusan asli, menandatangani naskah putusan secara elektronik menjadi salinan putusan.

j. Salinan putusan yang ditanda tangani secara elektronik oleh panitera dan berkas perkara bundel A dikirim kembali ke pengadilan pengaju melalui PTSP.

k. Pengadilan pengaju memberitahukan putusan pengadilan tinggi kepada pihak secara elektronik bagi pihak yang memiliki alamat elektronik terverifikasi dan bagi pihak selainnya melalui surat tercatat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan.

l. Apabila dalam pemeriksaan perkara, diperlukan pemeriksaan tambahan maka majelis hakim memerintahkan pengadilan pengaju melalui putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan tambahan.

m. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, akan tetapi menurut pengadilan tinggi, pengadilan negeri berwenang maka pengadilan tinggi memerintahkan kepada pengadilan negeri melalui putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan tanpa menjatuhkan putusan, pengadilan pengaju segera mengirim kembali berkas perkara kepada pengadilan tinggi untuk selanjutnya menjatuhkan putusan akhir.

n. Terhadap putusan sela pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak dapat dilakukan upaya hukum.

o. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengadilan negeri menerima putusan sela dari pengadilan tinggi, wajib mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil pemeriksaan tambahan ke pengadilan tinggi melalui PTSP.

p. Dalam hal pengadilan negeri belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, ketua majelis hakim wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri disertai dengan alasannya,

selanjutnya ketua pengadilan negeri melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.

q. Apabila pengadilan tinggi telah memutus perkara yang menyatakan pengadilan tidak berwenang dengan putusan akhir, upaya hukumnya adalah kasasi.

r. Apabila permohonan banding dicabut sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, maka berdasarkan keterangan dari panitera, ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengabulkan pencabutan dan berkas perkara tidak dikirim ke pengadilan tinggi.

s. Apabila pencabutan permohonan banding dilakukan setelah berkas perkara dikirim, maka surat pencabutan permohonan banding dikirim ke pengadilan tinggi dan selanjutnya majelis/hakim yang ditunjuk setelah mempelajari permohonan pencabutan banding mengeluarkan penetapan pencabutan banding.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEKNIS PERADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

I. PIDANA UMUM

A. TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

1. Penuntut umum dapat menyempurnakan surat dakwaan atau tidak melanjutkan penuntutan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.
2. Penyempurnaan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan 1 (satu) kali paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sidang dimulai.
3. Dalam hal penuntut umum menyempurnakan surat dakwaan, penuntut umum menyampaikan salinan surat dakwaan kepada penyidik, terdakwa, dan advokat.[363]

B. TENTANG DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM[364]

1. Dalam hal surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum, hakim memberikan kesempatan 1 (satu) kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan melimpahkan kembali

[363] Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP
[364] Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP

surat dakwaan tersebut.

2. Pelimpahan kembali surat dakwaan tersebut harus diregister dengan penomoran baru, penetapan penahanan baru (dengan memperhitungkan masa penahanan sebelumnya), dan majelis hakim yang menyidangkan adalah Majelis Hakim baru.
3. Jika Terhadap surat dakwaan yang dilimpahkan kembali tersebut terdakwa atau penasihat hukumnya tetap mengajukan keberatan, maka hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara dalam putusan akhir.

C. TENTANG BANTUAN HUKUM

1. Setiap orang yang tersangkut perkara pidana berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Advokat atau pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum.[365]
3. Kewajiban menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum tidak berlaku jika tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban menyatakan menolak untuk didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum yang dibuktikan dengan berita acara.[366]
4. Ketidakmampuan terdakwa harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala desa/lurah dimana terdakwa berdomisili.[367]
5. Dalam hal terdakwa telah menolak haknya sebagaimana dimaksud pada angka 3, akan tetapi kemudian terdakwa bersedia didampingi advokat maka haknya tersebut dapat diberikan tanpa

---

[365] Pasal 155 KUHAP
[366] Pasal 154 ayat (4) KUHAP
[367] PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

mengulangi proses persidangan dari awal. Penunjukan advokat tersebut dengan penetapan majelis hakim.

D. BENTUK SURAT DAKWAAN

Dalam praktek terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu:

1. Surat Dakwaan Tunggal, yaitu terhadap terdakwa hanya didakwakan 1 (satu) perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang.

   Contoh: Pasal 476 KUHP

2. Surat Dakwaan Kumulatif, yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana secara serempak yang masing-masing berdiri sendiri.

   Terhadap bentuk dakwaan ini semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan oleh penuntut umum dan oleh majelis hakim/hakim setiap dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan. Cara penulisan dakwaan kumulatif kesatu, kedua, ketiga.dst. dan ke-satu, ke-dua, ke-tiga, dst. dan satu, dan dua, dan tiga. dst.

   Contoh:

   Kesatu : penganiayaan. Pasal 466 KUHP

   dan

   Kedua : pencurian. Pasal 476 KUHP

   dan

   Ketiga : merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi. Pasal 521 KUHP

3. Dakwaan Subsidairitas

   Dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya.

   Contoh dakwaan subsidairitas:

   Primair :..... Pasal 459 KUHP

   Subsidair :..... Pasal 458 KUHP

   Lebih subsidair :..... Pasal 467 ayat (3) KUHP, dst.

   Dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya.

4. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam dakwaan ini, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, majelis hakim/hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut.

Dakwaan ini sering dirumuskan dengan menggunakan kata "atau" antara beberapa pasal tindak pidana yang didakwakan.

Contoh :

Kesatu : ..... Pasal 492 KUHP

atau

Kedua :... Pasal 486 KUHP

atau dst

5. Dakwaan Kombinasi

Merupakan kombinasi/campuran dari dakwaan berbentuk subsidairitas dengan alternatif atau antara dakwaan kumulatif dengan subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan alternatif.

Contoh Dakwaan Kombinasi (antara dakwaan subsidairitas dengan dakwaan alternatif)

Kesatu

Primair : ..... Pasal 459 KUHP

Subsidairitas : ..... Pasal 458 KUHP

dan

Kedua

Kesatu : ..... Pasal 492 KUHP

atau

Kedua :..... Pasal 486 KUHP

E. TENTANG ALAT BUKTI

Alat bukti dalam perkara tindak pidana terdiri atas:[368]

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. keterangan terdakwa;

---

[368] Pasal 235 KUHAP

e. barang bukti;
f. bukti elektronik;
g. pengamatan hakim; dan
h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemerikasaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

F. TENTANG SAKSI

1. Penyumpahan saksi dimuka sidang[369]

Hukum acara pidana mengenal keterangan saksi dan keterangan ahli.

a. Saksi: seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi[370].
b. Ahli adalah seseorang yang memiliki:
   Pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu dan/atau pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.[371]

Untuk menyeragamkan cara-cara dan lafaz sumpah di muka persidangan, maka yang menuntun lafaz sumpah adalah hakim yang bersidang.

Bunyi lafaz sumpah untuk saksi dan ahli pada pokoknya sama, dengan beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan menurut cara agama mereka masing-masing yaitu:

1) Untuk saksi yang beragama Islam, petugas sumpah memegang kitab Al Quran diatas kepala, saksi berdiri dan mengucapkan lafaz sumpah sebagai berikut :“WALLAHI” atau DEMI ALLAH “SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.
2) Untuk saksi yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, petugas sumpah memegang Alkitab, saksi yang beragama Kristen Protestan berdiri tangan kiri saksi diletakan diatas Alkitab dan mengangkat tangan sebelah kanan sampai

---

369 Pasal 210 ayat (12) KUHAP disesuaikan dengan tata cara Agama dan Kepercayaannya
370 Pasal 1 Angka 47 KUHAP
371 Pasal 1 Angka 51 KUHAP

setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf “V”, sedangkan untuk yang beragama Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut: “SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA, SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA”.

3) Saksi yang beragama Hindu berdiri sambil memegang dupa didepan dada dan mengucapkan sumpah sebagai berikut: “OM ATAH PARAMAWISESA, SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.
4) Saksi yang beragama Budha berdiri/berlutut sambil mengucapkan sumpah sebagai berikut: “DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.
5) Saksi yang beragama konghucu berdiri sambil mengucapkan sumpah sebagai berikut: “KEHADIRAT TIAN DI TEMPAT YANG MAHA TINGGI DENGAN BIMBINGAN ROHANI NABI KONG ZI, DIPERMULIAKANLAH, SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.[372]
6) Saksi yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan sumpah sebagai berikut: “DEMI TUHAN YANG MAHA ESA SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.
7) Dalam hal ada saksi yang karena kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut : “SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.
8) Tata cara sumpah/janji untuk AHLI sama dengan saksi

---

[372] Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi

dengan LAFAZ sebagai berikut: “SAYA BERSUMPAH/ BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN SESUAI PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA, DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.

2. Pengajuan saksi-saksi untuk hadir di sidang pengadilan.
   a. Penuntut umum dan terdakwa atau advokat terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang akan diajukan pada persidangan. Dalam hal hakim menyetujui saksi dan ahli yang diminta oleh advokat untuk dihadirkan, hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh advokat tersebut.[373]
   b. Dalam hal terdapat saksi atau ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, advokat, atau penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan saksi atau ahli tersebut.[374]
   c. Majelis memiliki kewenangan menyeleksi saksi yang harus didengar dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan
   d. Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. jika keterangan sebagaimana dimaksud diberikan di bawah sumpah atau janji, keterangan tersebut oleh hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.[375]
   e. Dalam hal saksi atau ahli tidak hadir meskipun telah

---

[373] Pasal 210 ayat (1) KUHAP
[374] Pasal 210 ayat 11 KUHAP jo SEMA Nomor 2 Tahun 1985
[375] Pasal 212 KUHAP

dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.[376]

f. Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara elektronik.[377]

g. Dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dan Dewan Pers.[378]

3. Saksi Mahkota

a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama[379].

b. Saksi mahkota merupakan tersangka atau terdakwa dengan peran ringan yang dijadikan saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Jika tidak ada tersangka berperan ringan, terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu substantif dapat mendapat pengurangan pidana. Penunjukan saksi mahkota ditentukan oleh penuntut umum untuk memperkuat pembuktian terhadap pelaku utama. Mekanisme ini harus tetap menjamin keadilan dan menghindari kesaksian yang dipaksakan.[380]

c. Dalam menetapkan saksi mahkota, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dan dituangkan dalam berita acara.

d. Penuntut umum menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.[381]

e. Saksi mahkota dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana, jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.

---

[376] Pasal 209 ayat (2) KUHAP
[377] Pasal 360 KUHAP; PERMA 4 Tahun 2020 Pasal 11 ayat (2) dan (3) jo PERMA 8 Tahun 2022; dan Undang-Undang yang mengatur secara khusus
[378] SEMA Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli
[379] Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP
[380] Huruf i penjelasan umum KUHAP
[381] Pasal 73 ayat (1) dan (2) KUHAP

f. Dalam hal tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, penuntut umum memanggil tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.[382]

g. Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh penuntut umum, calon saksi mahkota, dan advokatnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:
   1) keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan terdakwa pada persidangan lain;
   2) syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota;
   3) pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh penuntut umum kepada saksi mahkota; dan
   4) imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh penuntut umum.

h. Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh penuntut umum hanya dapat berupa:
   1) jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
   2) jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau
   3) jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda, jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.

i. Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tercapainya kesepakatan.

j. Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, penuntut umum wajib memastikan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota pada tahap negosiasi kesepakatan tidak dapat dipergunakan

---

[382] Pasal 74 KUHAP

sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Perlindungan Korban dan Saksi

Ketentuan mengenai perlindungan pelapor, pengadu, korban dan saksi mengacu pada ketentuan yang berlaku,[383] yaitu :

1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/ atau Korban berhak memperoleh pelindungan.
2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku pada setiap tahap pemeriksaan.
3) Dalam hal diperlukan, pelindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
4) Pelindungan dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban.
5) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban.
6) Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Perlindungan meliputi perlindungan atas keamanan pribadi pelapor, pengadu, korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
8) Perlindungan dilakukan berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan, dan atau permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
9) Permohonan perlindungan pada tindak pidana berat HAM dapat juga disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan.
10) Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan kepada negara .

G. PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua sidang atas

---

[383] Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat, Pasal 3, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 361 KUHAP

permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.[384]

2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan dalam waktu paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.[385]
3. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat mengenai penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
4. Hakim/majelis dengan penetapan tersendiri yang amarnya dicatat dalam berita acara persidangan menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan dengan perkara pidana. Ganti kerugian yang dapat diputus hanya berupa kerugian yang timbul atas perbuatan terdakwa berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan dapat dibuktikan secara sederhana, dan kerugian selebihnya dapat diajukan melalui gugatan perdata.
5. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

H. GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI DAN KOMPENSASI

Ketentuan mengenai ganti rugi, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi mengacu pada ketentuan[386] yang diatur sebagai berikut:

a. Setiap korban dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
b. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya

---

[384] Pasal 189 KUHAP
[385] Pasal 189 ayat (2) dan (3) KUHAP
[386] Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat

untuk tindakan tertentu.[387]

d. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

e. Rehabilitasi karena terdakwa dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan wajib dicantumkan rehabilitasi dengan rumusan sebagai berikut :
"Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".[388]

f. Pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diajukan setiap saat sebelum perkara diputus, untuk kemudian apabila hal tersebut bisa dibuktikan dan diterima oleh majelis hakim maka putusannya harus memuat ganti kerugian yang diberikan kepada korban.

g. Pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dapat juga diajukan melalui gugatan perdata melalui peradilan umum.

h. Kementerian Keuangan atau lembaga pengelola dana abadi[389] bertugas melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan.

i. Pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Kementerian Keuangan wajib dilaporkan kepada pengadilan yang mengadili perkara yang bersangkutan dan jaksa agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dilaksanakan.

j. Pengadilan mengirimkan salinan putusan Pengadilan, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Kementerian Keuangan untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi.

k. Kementerian Keuangan melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30 (tiga puluh)

---

[387] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
[388] Pasal 1 Angka 42 KUHAP
[389] Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 188 KUHAP

hari kerja terhitung sejak berita acara diterima.

l. Pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi, dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi tersebut. Setelah ketua Pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

m. Ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

n. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.[390]

o. Tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan diputus di sidang praperadilan.[391]

p. Tuntutan ganti rugi diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.[392]

q. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti rugi tersebut, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan.[393]

r. Putusan pemberian ganti rugi berbentuk penetapan yang memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.[394]

---

[390] Pasal 173 ayat (1) KUHAP
[391] Pasal 173 ayat (2) KUHAP
[392] Pasal 173 ayat (3) KUHAP
[393] Pasal 173 ayat (4) dan (5) KUHAP
[394] Pasal 174 KUHAP

s. Salinan penetapan pemberian ganti rugi disampaikan kepada:[395]
   a. tersangka, terdakwa, atau terpidana;
   b. penyidik;
   c. penuntut umum; dan
   d. lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

t. Dalam menentukan besarnya ganti rugi, Majelis Hakim/Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

u. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.396

v. Dalam penggabungan tuntutan ganti rugi tidak diperbolehkan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Prosedur pemeriksaan permohonan restitusi[397]

a. Korban/keluarga korban dapat mengajukan restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau dalam persidangan.
b. Dokumen-dokumen pendukung diajukan melalui penuntut umum untuk penghitungan nilai restitusi.
c. Penuntut umum menyampaikan rincian perhitungan restitusi dalam surat tuntutan.
d. Hakim/majelis hakim menilai permohonan restitusi berdasarkan fakta dalam persidangan.
e. Hakim/majelis hakim dalam amar putusan menentukan restitusi dapat diberikan atau tidak dan menentukan nilai yang pantas.

Permohonan restitusi yang tidak diajukan selama proses persidangan dapat diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari[398] sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan telah berkuatan hukum tetap.

I. KONEKSITAS

1. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.[399]

---

[395] Pasal 175 ayat (3) KUHAP
[396] Pasal 176 ayat (1) KUHAP
[397] Pasal 179 KUHAP dan Pasal 11 s.d 15 Perma 1 Tahun 2022
[398] Pasal 12 ayat (2) Perma 1 Tahun 2022
[399] Pasal 170 ayat (1) KUHAP

2. Dalam hal titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.[400]
3. Dalam hal tindak pidana diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tindak pidana tersebut diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang hakim dengan komposisi 2 (dua) hakim peradilan militer yang salah satu diantaranya menjadi ketua majelis dan 1 (satu) hakim peradilan umum.[401]
4. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili tindak pidana, majelis hakim terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.[402]
5. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk pengadilan tingkat banding.

J. ANONIMISASI

Anomisasi adalah pengaburan sebagian informasi tertentu yang dilakukan dengan memedomani aturan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan jo. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 100/DJU/TI1.1.1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP.

K. SIDANG TERTUTUP UNTUK UMUM

1. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak.[403]
2. Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka putusan batal demi hukum.
3. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[404]

---

[400] Pasal 170 ayat (2) KUHAP
[401] Pasal 172 ayat (1) KUHAP
[402] Pasal 172 ayat (2) KUHAP
[403] Pasal 202 ayat (2) KUHAP jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
[404] Pasal 248 KUHAP

L. PENAHANAN

1. Penahanan terhadap tersangka/terdakwa dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau oleh hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[405]
2. Dalam hal perlawanan terhadap penangguhan penahanan dan diterima oleh ketua pengadilan negeri maka dapat dilakukan penahanan kembali sepanjang masih adanya sisa waktu penahanan.[406]
3. Dalam masa penahanan maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh penuntut umum untuk kepentingan penuntutan.
4. Masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap mengurangi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan.[407]
5. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak kepala Lapas dalam menghitung kapan terdakwa harus dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan maka tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
6. Sejak perkara dilimpahkan dan diregister pengadilan negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada pengadilan negeri, dan sisa masa penahanan penuntut umum tidak boleh digunakan oleh hakim.
7. Untuk kepentingan pemeriksaan maka hakim di sidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.[408]
8. Apabila terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan terdakwa dalam keadaan ditahan maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit dengan penetapan dari hakim/ majelis hakim.[409]
9. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam KUHAP.[410]
10. Yang dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan

---

[405] Pasal 99 - 111 KUHAP
[406] Pasal 110 ayat (5) dan (6) KUHAP
[407] Pasal 108 ayat (7) KUHAP
[408] Pasal 104 ayat (1) KUHAP
[409] Pasal 111 ayat (1) dan (2) KUHAP; SEMA Nomor 1 Tahun 1989;
[410] Pasal 110 ayat (1) KUHAP jo Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

adalah terdakwa.[411]

11. Penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.[412]
12. Besarnya uang jaminan penangguhan penahanan ditentukan hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa atau penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.
13. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.[413]
14. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara.[414]
15. Dalam hal terdakwa melarikan diri maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar maka melalui penetapan pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.
16. Apabila terdakwa melarikan diri maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak, cukup mampu, dan bertempat tinggal di Indonesia.
17. Pasal 100 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan, hakim dalam amar putusannya dapat memerintahkan terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.[415]
18. Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkannya penetapan perpanjangan penahanan[416] oleh ketua pengadilan tinggi, yang mengakibatkan terdakwa keluar demi hukum maka ketua

---

411 Pasal 110 ayat (1) KUHAP
412 Pasal 110 ayat (2) KUHAP jo Pasal 35, 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
413 Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
414 Pasal 35 ayat (2) PP No 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
415 Pasal 250 ayat (1) huruf k KUHAP
416 Pasal 107 ayat (1), (2) dan (3) huruf b KUHAP jo SEMA Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan

pengadilan negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.[417]

19. Dalam hal terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak diajukan permohonan banding.[418]
20. Permohonan banding harus segera dilaporkan secara elektronik dan/atau secara manual pada hari itu juga kepada pengadilan tinggi.
21. Pimpinan pengadilan tinggi karena jabatannya *(ex officio)* berwenang melakukan penahanan.
22. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditunjuknya hakim, hakim/majelis hakim pengadilan tinggi wajib mempelajari berkas perkara untuk menetapkan perlu atau tidaknya terdakwa tetap ditahan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.[419]
23. Masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap mengurangi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan.[420]
24. Dalam hal penahanan yang dikenakan kepada terdakwa telah mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, terdakwa dibebaskan seketika itu.[421]
25. Yang berwenang mengeluarkan terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat di tempat di mana terdakwa ditahan.

M. KEBERATAN TERHADAP PERPANJANGAN PENAHANAN[422]

1. Terhadap perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri atas permintaan penyidik dan/atau penuntut umum, tersangka dapat mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri.
2. Ketua pengadilan tinggi setelah menerima permohonan keberatan tersangka, melalui penetapannya dapat menolak atau menerima

---

417 SEMA Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan
418 Pasal 291 ayat (2) KUHAP
419 Pasal 291 ayat (4) huruf a KUHAP
420 Pasal 108 ayat (7) KUHAP
421 Pasal 291 ayat (6) KUHAP
422 Pasal 107 ayat (7) KUHAP

keberatan tersebut.

3. Terhadap perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi atas permintaan hakim pengadilan negeri, terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada ketua mahkamah agung melalui pengadilan negeri.

N. PEMBANTARAN (*STUITTING*) [423]

1. Apabila terdakwa sakit dan perlu dirawat inap di rumah sakit, sedangkan terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
2. Pembantaran dilakukan dengan menggunakan penetapan majelis hakim/hakim, terhitung sejak terdakwa dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit dan berakhir setelah terdakwa berada kembali dalam rumah tahanan negara.
3. Masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa penahanan.

O. PENGALIHAN PENAHANAN

1. Pengalihan penahanan dari penahanan rutan ke penahanan rumah atau penahanan kota, dapat diajukan oleh terdakwa atau advokatnya melalui permohonan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang ditujukan kepada hakim/majelis hakim.
2. Jenis penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dialihkan berdasarkan surat perintah penyidik, penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa, keluarga tersangka atau terdakwa, dan instansi yang berkepentingan.[424]
3. Majelis hakim/hakim dapat mengabulkan permohonan pengalihan penahanan tersebut setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang patut dan logis misalnya: jaminan kehadiran terdakwa, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat atau alasan kesehatan dan/atau kemanusiaan.
4. Dalam hal permohonan pengalihan penahanan dikabulkan, maka hal tersebut dituangkan dalam penetapan yang ditandatangani oleh majelis hakim/hakim dan diucapkan di persidangan.
5. Dalam hal permohonan pengalihan penahanan ditolak,

---

[423] Pasal 111 KUHAP
[424] Pasal 108 ayat (11) KUHAP

penolakan tersebut disampaikan di sidang dan dicatat dalam berita acara sidang.

6. Dalam hal permohonan pengalihan penahanan dikabulkan, tidak diperlukan adanya jaminan (uang dan/atau orang).

P. PENANGGUHAN PENAHANAN[425]

1. Atas permintaan terdakwa, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh majelis hakim/hakim.
2. Penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
3. Jaminan orang dapat diberikan oleh keluarga terdakwa, advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika terdakwa melarikan diri.
4. Hakim/majelis hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal terdakwa melanggar syarat yang ditentukan
5. Penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan, selama proses, terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.

Q. PENGGELEDAHAN[426]

1. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat kedudukan penyidik.
2. Permohonan izin harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
3. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.
4. Keadaan mendesak meliputi letak geografis yang susah dijangkau, tertangkap tangan, berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau situasi berdasarkan penilaian penyidik.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, penyidik

---

[425] Pasal 110 ayat (1-5) KUHAP
[426] Pasal 112-117 KUHAP

paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan penggeledahan.

6. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penyidik meminta persetujuan penggeledahan.
7. Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan, penolakan harus disertai dengan alasan dan penolakan tersebut mengakibatkan hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.
8. Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tersebut dilakukan.
9. Ketua pengadilan negeri dalam memberikan izin penggeledahan terhadap gedung atau kantor atau instansi atau lembaga atas permohonan penyidik, harus menyebutkan tempat atau ruangan secara rinci yang secara khusus hendak dilakukan penggeledahan.[427]

R. PENYITAAN[428]

1. Sebelum melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.
2. Permohonan izin harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita, minimal meliputi jenis, jumlah dan nilai barang, lokasi, alasan penyitaan.
3. Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.
4. Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari penyidik mengenai benda yang akan disita.
5. Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak penelitian wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.
6. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan

---

[427] SEMA Nomor 3 Tahun 2023
[428] Pasal 118-135 KUHAP

tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.

7. Keadaan mendesak meliputi:
   a) letak geografis yang susah dijangkau;
   b) tertangkap tangan;
   c) tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;
   d) benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;
   e) adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau
   f) situasi berdasarkan penilaian penyidik.
8. Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak penyidik meminta persetujuan penyitaan wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.
9. Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan izin atau persetujuan penyitaan, penetapan penolakan harus disertai dengan alasan dan terhadap penetapan penolakan, penyidik dapat mengajukan kembali permohonan penyitaan terhadap benda yang sama kepada ketua pengadilan negeri hanya 1 (satu) kali.
10. Penetapan penolakan mengakibatkan hasil penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti.
11. Benda yang dapat disita adalah:
    a. benda atau tagihan terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
    b. benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
    c. benda yang dipergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana;
    d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
    e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/ atau
    f. benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.

12. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Nilai keseluruhan dari benda yang disita tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana.
14. Dalam hal benda sitaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11, ketua pengadilan negeri memerintahkan penyidik untuk mengembalikan benda yang disita kepada pemilik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
15. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan mengajukan izin kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan benda tersebut.
16. Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita terdapat di beberapa daerah hukum pengadilan negeri, penyidik dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut.
17. Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan pengadilan negeri untuk memeriksa permohonan penyitaan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud.
18. Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita berada di luar negeri, pengadilan negeri jakarta pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penyitaan tersebut.[429]
19. Penyitaan terhadap benda yang tidak diketahui pemiliknya berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 KUHAP.
20. Ketua pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti narkotika harus mencantumkan berat bersih (*netto*) terhadap barang bukti narkotika yang telah disita dan dimohonkan persetujuan.[430]
21. Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh ketua pengadilan negeri atas permohonan penyidik, tidak mensyarakatkan terlebih dahulu ada tidaknya tersangka.[431]

---

[429] Pasal 124 ayat (4) KUHAP
[430] SEMA Nomor 3 Tahun 2023
[431] SEMA 1 Tahun 2022

S. PENYADAPAN[432]

Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Ketentuan mengenai Penyadapan diatur dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan.

T. PEMBLOKIRAN[433]

1. Pemblokiran dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dan harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.
2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memuat informasi lengkap mengenai alasan perlunya dilakukan pemblokiran minimal meliputi:
   a. uraian tindak pidana yang sedang diproses;
   b. dasar atau fakta yang menunjukkan objek yang akan diblokir memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
   c. bentuk dan tujuan Pemblokiran yang akan dilakukan terhadap masing-masing objek yang akan diblokir.
3. Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin yang diajukan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.
4. Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari penyidik.
5. pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.[434]
6. Dalam keadaan mendesak, pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.
7. Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 6 meliputi:
   a. potensi dialihkannya harta kekayaan;
   b. adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik;
   c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau
   d. situasi berdasarkan penilaian penyidik.

---

[432] Pasal 136 KUHAP
[433] Pasal 140 KUHAP
[434] Dikecualikan sudah diatur secara khusus pada UU

8. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 7, penyidik dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan pemblokiran.
9. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penyidik meminta persetujuan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan, penolakan harus disertai dengan alasan.
11. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 mengakibatkan pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan pemblokiran.
12. Dalam hal perkara dihentikan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka, pemblokiran harus dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan pemblokiran.

U. LARANGAN BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA UNTUK KELUAR WILAYAH INDONESIA[435]

1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum.
2. Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyidik, penuntut umum, atau hakim berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan tersangka atau terdakwa keluar wilayah Indonesia.
3. Pencegahan keluar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling

[435] Pasal 141 ayat (1),(2) dan (3) KUHAP

lama 6 (enam) bulan.

V. PRAPERADILAN

1. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus: [436]
   a. sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa
   b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
   c. permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
   d. penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
   e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
   f. penangguhan pembantaran penahanan.
2. Yang dapat mengajukan praperadilan adalah:[437]
   a. upaya paksa diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya dan hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama;
   b. penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya diajukan oleh pihak ketiga;
   c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya;
   d. ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diajukan oleh korban atau pelapor.
3. Permohonan Praperadilan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d tidak dapat diajukan jika tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.
4. Acara pemeriksaan praperadilan berpedoman sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 KUHAP.
5. Putusan praperadilan tidak bisa dimintakan banding kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya

---

[436] Pasal 158 KUHAP
[437] Pasal 160 KUHAP

penghentian penyidikan atau penuntutan.[438]

6. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi[439] dan peninjauan kembali[440].

W. KEWENANGAN MENGADILI[441]

1. Ketua pengadilan negeri mempelajari apakah pelimpahan perkara dari penuntut umum termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.
2. Jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.
3. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum dan turunan surat penetapan disampaikan kepada terdakwa, advokat, dan penyidik.
4. Terhadap surat penetapan tersebut, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat penetapan diterima.
5. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari terlampaui, perlawanan yang diajukan penuntut umum batal.
6. Perlawanan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang setelah dicatat dalam buku daftar panitera, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi.
7. Ketua pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan, yang tembusannya disampaikan kepada penuntut umum.
8. Jika pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, dengan surat penetapan memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
9. Jika pengadilan tinggi menolak perlawanan penuntut umum, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara tersebut kepada

---

[438] Pasal 164 ayat (1) KUHAP
[439] Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
[440] Perma 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
[441] Pasal 195-197 KUHAP

pengadilan negeri yang bersangkutan.

X. PERLAWANAN TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI[442]

1. Dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mengambil keputusan.
2. Dalam hal hakim menyatakan perlawanan diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dimaksud kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
3. Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau hakim berpendapat baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.
4. Dalam hal terdakwa atau advokatnya mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi dan diterima oleh pengadilan tinggi, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.
5. Dalam hal perlawanan pada angka 4 diajukan bersama dengan permohonan banding dan pengadilan tinggi membenarkan perlawanan terdakwa, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perkara, melalui keputusannya pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
6. Selanjutnya pengadilan tinggi menyampaikan salinan putusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.
7. Dalam hal pengadilan yang berwenang berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
8. Hakim karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa

---

[442] Pasal 206 KUHAP

dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Y. MEKANISME KEADILAN RESTORATIF[443]

1. Penerapan mekanisme keadilan restoratif di tahap pengadilan tingkat pertama dapat dilakukan terhadap perkara yang pada tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan dilakukan mekanisme keadilan restoratif tetapi tidak mencapai kesepakatan, mencapai kesepakatan damai tapi tidak dilaksanakan seluruhnya atau perkara yang belum pernah dilakukan mekanisme keadilan restoratif.
2. Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:
   a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
   b. tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, tindak pidana ketertiban umum, kepala negara sahabat serta wakilnya, dan kesusilaan;
   c. tindak pidana terorisme;
   d. tindak pidana kekerasan seksual;
   e. tindak pidana korupsi;
   f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
   g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
   h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau
   i. tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

   Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan korban.
3. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, hakim tetap menawarkan kepada terdakwa untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif.
4. Dalam hal korban hadir dalam persidangan, hakim menawarkan mekanisme keadilan restoratif kepada korban dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan keterangan korban perihal:
   a. kronologis tindak pidana yang dialami oleh korban;

---

[443] Pasal 204 KUHAP

b. kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana;
c. ada atau tidak perdamaian antara terdakwa dan korban sebelum persidangan; dan
d. pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.

5. Dalam hal korban tidak hadir di persidangan, hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan korban pada persidangan berikutnya. Dalam hal korban meninggal dunia, kesepakatan untuk memulai mekanisme keadilan restoratif dapat diberikan oleh ahli waris atau keluarga.
6. Selain berdasarkan penawaran hakim, selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa atau keluarganya dan/atau korban atau keluarganya dapat mengajukan permohonan mekanisme keadilan restoratif kepada hakim ketua sidang. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, hakim menolak dengan memberitahukan alasan penolakan secara tertulis dan melanjutkan pemeriksaan sesuai hukum acara pidana.
7. Mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dimulai jika disepakati oleh terdakwa dengan korban dan dinyatakan di hadapan hakim. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh beberapa terdakwa, penerapan mekanisme keadilan restoratif hanya dapat jika seluruh terdakwa dan korban sepakat. Dalam hal terdapat lebih dari satu korban, mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dilaksanakan jika seluruh korban menyatakan persetujuannya.
8. Permohonan penetapan atas penghentian penyidikan/penuntutan berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai daerah hukum.
9. Hal-hal yang diperiksa oleh hakim dalam pemeriksaan MKR tingkat penyidikan/penuntutan:
    - kesesuaian hasil kesepakatan dengan ketentuan KUHAP
    - pemenuhan syarat MKR; dan
    - pemenuhan pengecualian tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan MKR.
10. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan pengembalian berkas.
11. Dalam hal permohonan memenuhi syarat, ketua pengadilan negeri

menerbitkan penetapan sah surat ketetapan penghentian penyidikan.

12. Mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan dengan pembuatan kesepakatan damai melalui mediasi.
13. Dalam hal pembuatan kesepakatan damai dilaksanakan melalui mediasi, hakim menunjuk mediator untuk melaksanakan mediasi berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan korban.
14. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan mediator, penunjukan mediator dilakukan oleh hakim ketua sidang dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditangguhkan sampai dengan diterimanya laporan hasil mediasi dari mediator.
15. Penunjukan mediator ditetapkan dalam surat penunjukan mediator paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak adanya kesepakatan dan harus disampaikan kepada mediator paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal surat penunjukan mediator.
16. Mediasi mulai dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat penunjukan mediator diterima oleh mediator dan proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
17. Mediasi bersifat tertutup dan rahasia, kecuali disepakati lain oleh terdakwa dan korban dan dapat dilaksanakan di kantor pengadilan atau tempat lain yang disetujui terdakwa dan/atau korban serta mediator. Dalam kondisi tertentu, mediasi dapat dilakukan melalui sarana elektronik sepanjang disepakati terdakwa dan korban. Kehadiran korban dapat diwakili oleh keluarga atau kuasa hukum dengan dengan ketentuan:
    a. kondisi kesehatan atau psikologis korban yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
    b. korban berada di bawah pengampuan;
    c. tempat tinggal atau tempat kedudukan Korban berada di luar negeri;
    d. korban menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;
    e. korban meninggal dunia; dan/atau
    f. alasan lain yang sah yang menyebabkan korban tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung.

    Keluarga atau kuasa hukum yang mewakili korban harus menunjukkan bukti pendukung tertulis yang sah

18. Hasil mediasi berupa:
    a. tidak mencapai kesepakatan; atau
    b. mencapai kesepakatan;

    dan dituangkan dalam berita acara.
19. Dalam hal hasil mediasi tidak mencapai kesepakatan, berita acara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan.
20. Dalam hal hasil mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan dituangkan dalam berita acara sebagaimana dan kesepakatan damai serta ditandatangani oleh terdakwa, korban, dan hakim.
21. Kesepakatan perdamaian dan/ atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/ atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dalam hal tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat, proses mediasi harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
23. Dalam hal tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, proses mediasi harus dilaksanakan pada hari sidang itu juga.
24. Hakim yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat bertindak sebagai mediator dalam pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif.
25. Dalam hal mediasi pada perkara dengan acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat mencapai kesepakatan, sidang pembacaan putusan ditunda sampai dengan dilaksanakannya kesepakatan damai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila kesepakatan damai telah dilaksanakan seluruhnya, pelaksanaan kesepakatan damai menjadi alasan bagi hakim untuk meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan.
26. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kesepakatan damai dilaksanakan sebagian atau tidak dilaksanakan, hakim memerintahkan panitera untuk membuat berita acara

pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil kesepakatan damai telah dilaksanakan sebagian, bukti pelaksanaan hasil kesepakatan damai dilampirkan dalam berkas perkara pada setiap tahapan pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dan dituangkan dalam penetapan hakim.

27. Pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di tingkat banding dapat dilakukan terhadap perkara yang pada tahap tingkat pertama dilakukan mekanisme keadilan restoratif tetapi tidak mencapai kesepakatan, mencapai kesepakatan damai tetapi tidak dilaksanakan seluruhnya, atau belum pernah dilakukan mekanisme keadilan restoratif.
28. Jika terdakwa dan korban telah mencapai kesepakatan secara mandiri dalam tahap pemeriksaan sidang pengadilan di tahap tingkat banding, hasil kesepakatan beserta bukti pelaksanaan seluruh kesepakatan dilaporkan kepada hakim atau majelis hakim pengadilan tinggi untuk kemudian hakim atau majelis hakim pengadilan tinggi melakukan verifikasi terhadap:
    a. laporan untuk menilai pemenuhan persyaratan mekanisme keadilan restoratif;
    b. isi kesepakatan untuk memastikan pemenuhan kriteria sebagai berikut:
        1) tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan;
        2) pemulihan keadaan semula; dan
        3) proses kesepakatan secara mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
        4) dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kesepakatan secara mandiri tidak memenuhi syarat dan kriteria mekanisme keadilan restoratif, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil verifikasi kesepakatan secara mandiri telah memenuhi syarat dan kriteria mekanisme keadilan restoratif, pelaksanaan kesepakatan damai menjadi alasan bagi hakim atau

majelis hakim pengadilan tinggi untuk meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan.

Z. PENGAKUAN BERSALAH[444]

1. Pengakuan Bersalah diterapkan dengan persyaratan:
   a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;
   b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau
   c. bersedia membayar ganti rugi atau restitusi.
2. Setelah penuntut umum mengajukan permohonan pengakuan bersalah, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk melakukan persidangan tertentu.
3. Hakim menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah penunjukan hakim. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penuntut umum menghadirkan terdakwa dan advokat.
4. Pengakuan Bersalah Berdasarkan Pasal 78
   - Hakim memeriksa apakah permohonan pengakuan bersalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8) KUHAP. Selanjutnya hakim mengeluarkan penetapan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hari sidang yang telah ditetapkan.
   - Hakim wajib menilai pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa.
   - Dalam hal permohonan pengakuan bersalah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4, hakim mengeluarkan penetapan yang amarnya:
     a. Menerima pengakuan bersalah terdakwa;
     b. Memerintahkan penuntut umum untuk melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan singkat.
   - Dalam hal permohonan pengakuan bersalah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4, hakim membuat penetapan yang amarnya:
     a. Menolak pengakuan bersalah terdakwa;
     b. Memerintahkan penuntut umum untuk melimpahkan

[444] Pasal 78 KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026

perkara dengan acara pemeriksaan biasa.

5. Pengakuan Bersalah Berdasarkan sesuai Pasal 205 KUHAP
   - Dalam hal Terdakwa dan Korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
   - Dalam hal Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim wajib memeriksa pengakuan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal:
     a. Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan;
     b. Terdakwa didampingi oleh Advokat selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan;
     c. pemeriksaan pada tahap Penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut;
     d. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan Penuntutan;
     e. pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan; dan
     f. hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim.
   - Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal sebagaimana dimaksud tersebut diatas telah terpenuhi, maka hakim mengeluarkan Penetapan Penerimaan Pengakuan Bersalah dan menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat oleh hakim anggota dua.
   - Dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya atau Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa hal sebagaimana dimaksud tersebut diatas telah terpenuhi, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa.
6. Pengakuan Bersalah Berdasarkan sesuai Pasal 234 KUHAP
   - Diberlakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun.
   - Dalam hal Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah maka hakim memerintahkan

Terdakwa dan Penuntut Umum untuk menandatangani Berita Acara Pengakuan Bersalah

- Hakim wajib memberitahukan ketentuan Pasal 234 ayat (3) KUHAP
- Dalam hal penuntut umum mengusulkan untuk mengalihkan pemeriksaan perkara dari acara biasa ke acara pemeriksaan singkat karena adanya pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 234 ayat (1) KUHAP, maka majelis hakim wajib melakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (3) KUHAP
  1) Dalam hal majelis hakim menerima pengakuan bersalah, maka:
     - Majelis hakim mengeluarkan Penetapan Penerimaan Pengakuan Bersalah
     - Pemeriksaan beralih kepada pemeriksaan singkat dan dicatat dalam berita acara sidang serta hakim anggota 2 karena jabatannya menjadi hakim tunggal untuk melanjutkan, memeriksa, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan singkat menggunakan susunan persidangan yang baru.
     - Penjatuhan pidana harus memenuhi ketentuan Pasal 234 ayat (5) KUHAP tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana tindak pidana yang didakwakan.
     - Penahanan Terdakwa dalam acara pemeriksaan biasa tetap dapat dilanjutkan dalam acara pemeriksaan singkat kecuali hakim tunggal tersebut berpendapat lain.
     - Perpanjangan penahanan menjadi kewenangan hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut.
     - Nomor perkara dalam putusan tetap menggunakan register pemeriksaan biasa.
  2) Dalam hal majelis hakim menolak pengakuan bersalah, maka sidang dilanjutkan dengan tetap menggunakan acara pemeriksaan biasa.

Å. PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN[445]

1. Setelah menerima permohonan pengesahan perjanjian penundaan penuntutan dari penuntut umum, ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal untuk melakukan persidangan perjanjian penundaan penuntutan.
2. Hakim menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah penunjukan hakim. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penuntut umum menghadirkan tersangka ke persidangan.
3. Hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk memanggil pihak lain yang berkepentingan untuk dihadirkan dan didengar keterangannya di persidangan.
4. Hakim memeriksa apakah permohonan perjanjian penundaan penuntutan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (8) dan ayat (12) KUHAP.
5. Apabila permohonan perjanjian penundaan penuntutan disetujui, hakim mengeluarkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:
   a. Menyetujui perjanjian penundaan penuntutan;
   b. Menangguhkan penuntutan perkara dalam jangka waktu .... (sesuai kesepakatan sebagaimana Pasal 328 ayat (13) KUHAP);
6. Apabila permohonan perjanjian penundaan penuntutan ditolak, hakim mengeluarkan penetapan dengan amar sebagai berikut:
   a. Menolak perjanjian penundaan penuntutan;
   b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ke persidangan dengan acara biasa;
7. Kewenangan pengadilan untuk memantau pelaksanaan perjanjian penundaan penuntutan dilaksanakan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dengan penetapan.
8. Setiap perjanjian penundaan penuntutan dicatat secara resmi dan disampaikan kepada hakim untuk dicatat dalam berita acara di pengadilan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (16) KUHAP).

Ä. KEWAJIBAN HAKIM UNTUK MENGUNDURKAN DIRI (HAK INGKAR)

1. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung. hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik kehendak

[445] Pasal 328 KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026

sendiri maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokatnya. [446]

2. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua majelis, salah seorang hakim anggota, penuntut umum, advokat, atau panitera.[447]
3. Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan advokat.[448]
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3 tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.[449]

Ö. PUTUSAN[450]

1. Putusan pemidanaan di Pengadilan Negeri, berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) KUHAP.
2. Format putusan pengadilan harus mencantumkan bagian khusus yang menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pedoman pemidanaan.
3. Hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang lain dalam setiap putusan pemidanaan.
4. Putusan yang bukan merupakan pemidanaan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.
5. Pendapat hakim yang berbeda dalam putusan tidak diperbolehkan jika terkait lamanya penjatuhan pidana.
6. Petikan putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera segera setelah putusan diucapkan.

---

[446] Pasal 271 ayat (1) dan (2) KUHAP
[447] Pasal 207 KUHAP
[448] Pasal 207 ayat (2) KUHAP
[449] Pasal 207 ayat (4) KUHAP
[450] Pasal 243-256 KUHAP

7. Putusan dalam acara pemeriksaan singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
8. Putusan dalam acara pemeriksaan cepat dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

AA. PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) berpedoman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 353 sampai dengan Pasal 359 KUHAP.

II. PIDANA KHUSUS

A. PIDANA KHUSUS

1. TINDAK PIDANA BERAT TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
b. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.[451]
c. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan

[451] Pasal 598 KUHP jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

yang meluas dan sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang didasar persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. [452]

d. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.[453]

e. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun melakukan pelanggaran HAM berat, maka perkara tersebut akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri (pengadilan anak).[454]

2. TINDAK PIDANA TERORISME

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana terorisme mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana diperoleh penyidik dari laporan intelijen, harus melalui proses pemeriksaan oleh

---

[452] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
[453] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
[454] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup paling lama 3 hari.[455]

b. Selain alat bukti yang diatur pada Pasal 235 KUHAP dalam penanganan perkara terorisme juga dikenal alat bukti:[456]
   1) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
   2) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
      - tulisan, suara, atau gambar;
      - peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
      - huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

c. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.[457]

3. TINDAK PIDANA KORUPSI

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana korupsi mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Tindak pidana korupsi adalah delik materiil, perbuatan melawan hukum dalam unsur tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum formil.[458]
b. Korporasi termasuk sebagai subyek tindak pidana korupsi dan dapat dijatuhi pidana denda, tindakan, dan pidana

---

[455] Pasal 26 PERPU No. 1 Tahun 2002
[456] Pasal 27 PERPU No. 1 Tahun 2002
[457] Pasal 35 PERPU No. 1 Tahun 2002
[458] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;

tambahan.[459]

c. Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis hakim.

d. Dalam perkara tindak pidana korupsi dikenal sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas/berimbang (untuk gratifikasi dan perampasan harta benda), yang mewajibkan Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya/suaminya, anak-anaknya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

e. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.[460]

f. Penjatuhan pidana penjara pengganti denda memperhatikan Lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.[461]

g. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:[462]

   1) Perampasan barang yang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

   2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh

---

[459] Pasal 603 – 606 KUHP; Pasal 118-124 KUHP; Lampiran 1 UU Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;

[460] Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[461] Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Perubahannya jo Pasal 21-24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

[462] Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dari tindak pidana korupsi.

3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana.

h. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.[463]

i. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.[464]

j. Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana.[465]

k. Dalam hal putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang jika terdapat pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.[466]

l. Putusan perampasan barang hasil tindak pidana korupsi terbatas hanya pada barang yang nyata-nyata diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

m. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud diatas tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan

---

[463] Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[464] Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[465] Pasal 11 ayat (4) PERMA 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
[466] Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo PERMA 2 Tahun 2022 tentang ata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

putusan pengadilan.

n. Dalam hal menangani keberatan tersebut, hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan, kemudian terhadap penetapan hakim atas keberatan tersebut dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.[467]

o. Dalam hal keberatan pihak ketiga dikabulkan oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

p. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (in absentia).[468]

q. Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi[469]

   1) Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan[470] yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

   2) Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pokok pada tingkat pertama berwenang mengadili permohonan keberatan.

   3) Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan keberatan secara tertulis oleh pihak ketiga yang beritikad baik.

   4) Pihak ketiga yang dapat mengajukan keberatan merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik

---

[467] Pasal 11 ayat (1) PERMA 2 Tahun 2022 tentang ata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

[468] Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[469] Perma Nomor 2 Tahun 2022

[470] Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2022

barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.

5) Permohonan keberatan dapat diajukan oleh kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
6) Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.
7) Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada kejaksaan atau komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan eksekusi.
8) Dalam hal keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai turut termohon.
9) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada perkara pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
10) Keberatan memuat:
    - identitas pemohon dan termohon beserta alamat lengkap dan/atau domisili elektronik;
    - nomor dan tanggal putusan yang diajukan keberatan;
    - barang-barang yang dinyatakan dirampas;
    - alasan keberatan; dan
    - petitum permohonan.
11) Pemeriksaan keberatan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:
    - membuka persidangan;
    - pemeriksaan identitas pemohon dan termohon;
    - pembacaan keberatan;
    - pembacaan tanggapan atas keberatan;
    - pembuktian pemohon, termohon, dan turut termohon; dan
    - pengucapan penetapan.

12) Majelis hakim memutus keberatan dalam bentuk penetapan.
13) Majelis hakim memutus permohonan keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak sidang pertama.
14) Pemohon, termohon dan/atau turut termohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan atas keberatan dengan melampirkan memori kasasi.[471]
15) Permohonan kasasi terhadap penetapan atas keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau setelah isi penetapan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

4. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG[472]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana pencucian uang mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
b. Azas kriminalitas ganda (double criminality) artinya tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia, juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, karena kejahatan pencucian uang sudah merupakan kejahatan transnasional (lintas negara).
c. Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-

---

[471] Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2022
[472] UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 7, 12 ayat (5), Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 607 dan 608 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

turut secara sah tidak hadir, majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa tersebut.

d. Apabila ternyata dalam sidang berikutnya terdakwa hadir sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, dengan apabila terdakwa telah hadir sejak semula.

e. Apabila terdakwa hadir setelah pembacaan tuntutan, keterangan yang diberikan terdakwa dipersidangan tersebut dimuat dalam surat tuntutan yang kemudian dibacakan kembali dalam persidangan.

f. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan terdakwa yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang kerahasiaan bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku.

g. Undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang mengenal sistem pembuktian terbalik, yang artinya terdakwa, diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana.

h. Terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal/induknya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana yang bersangkutan.

i. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

   1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 KUHAP.

   2) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

   3) dokumen, yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun

selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a) tulisan, suara, atau gambar;

b) peta, rancangan, photo atau sejenisnya ;

c) huruf, tanda, angka, simbul, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan yang telah disita, dirampas untuk Negara.[473]

5) - Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan penanganan harta kekayaan dalam masa pengumuman (30 (tiga puluh) hari), maka ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan tersebut. untuk memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau mengembalikan kepada yang berhak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari sidang pertama.[474]

- Ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan penanganan harta kekayaan.

- Permohon Keberatan harus mengajukan alasan-alasan keberatan disertai dengan alat-alat bukti dan/atau barang bukti yang diperlukan, serta menghadiri sendiri persidangan, baik didampingi atau tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan alat bukti yang telah diperiksa di persidangan,

---

[473] Pasal 79 ayat (4) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

[474] Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain

untuk selanjutnya memutus harta kekayaan tersebut dinyatakan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

- Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan dalam masa pengumuman, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan.
- Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan dalam proses pemeriksaan sidang, hakim tunggal yang memeriksa permohonan penanganan harta kekayaan tersebut melaporkan adanya keberatan tersebut kepada ketua pengadilan negeri, kemudian ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan.

6) Dalam hal Hakim memutus bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan berkenaan dengan harta kekayaan tersebut, harus dinyatakan dirampas untuk negara.[475]

B. PIDANA SEKTORAL

1. PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana narkotika mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Ketentuan minimum khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dihapus dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
b. Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana

[475] SEMA No 3 Tahun 2013

kepada pelaku, benar-benar setimpal dengan perbuatannya, serta dampak edukasi pada masyarakat.[476]

c. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri.

d. Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan.[477]

e. Dalam hal alat yang dirampas untuk negara adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

f. Keberatan terhadap perampasan tersebut diterima dan dicatatkan pada register tersendiri di kepaniteraan pidana.

2. PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana perikanan mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Pengadilan perikanan adalah pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

b. Pengadilan perikanan berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual,

---

[476] SEMA Nomor 3 Tahun 2001
[477] SEMA No 5 Tahun 2014

Pengadilan Negeri Natuna[478], Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.

c. Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang[479].

d. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang-undang perikanan.[480]

e. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.

f. Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

g. Kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan ketua pengadilan negeri setempat.

h. Apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tinggi, dan kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua yang bersangkutan, namun apabila

---

[478] SK KMA nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan

[479] Pasal 106 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

[480] Pasal 107 UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009

perkara telah dilimpahkan kepada majelis, maka persetujuan diterbitkan oleh majelis hakim yang bersangkutan.

i. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.

j. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada angka 9 berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.[481]

k. Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

l. Dalam hal tindak pidana perikanan terjadi di luar wilayah hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2, pengadilan perikanan dimana didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan perikanan itu daripada tempat kedudukan pengadilan perikanan yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan.[482]

m. Dalam perkara illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi penjara pengganti denda.[483]

3. PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana anak mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

---

[481] Pasal 76B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

[482] Pasal 165 ayat (2) KUHAP dan UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009

[483] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

a. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

b. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
   1) menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
   2) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

c. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

d. Diversi
   1) Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
   2) Diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
      a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan, subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan); dan
      b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
   3) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

4) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud diatas dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
5) Proses Diversi wajib memperhatikan:
   - kepentingan korban;
   - kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
   - penghindaran stigma negatif;
   - penghindaran pembalasan;
   - keharmonisan masyarakat; dan
   - kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
6) Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
   - kategori tindak pidana;
   - umur anak;
   - hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan
   - dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
7) Pelaksanaan Diversi di Pengadilan;
   a) Persiapan diversi setelah menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi.
   b) Penetapan hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
      - anak dan orang tua/wali atau pendampingnya;
      - korban dan/ atau orang tua/walinya;
      - pembimbing kemasyarakatan;
      - pekerja sosial profesional;
      - perwakilan masyarakat; dan
      - pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.
8) Tahapan Musyawarah Diversi;
   a) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk

disepakati oleh para pihak yang hadir.

b) Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi.

c) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

d) Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
   - Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
   - Orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
   - Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

e) Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

f) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian

g) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.

h) Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.

i) Musyawarah diversi dicatat dalam berita acara diversi dan ditandatangani oleh fasilitator diversi dan panitera/panitera pengganti.

9) Kesepakatan Diversi

a) Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum,

agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.

b) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
   - tindak pidana yang berupa pelanggaran;
   - tindak pidana ringan;
   - tindak pidana tanpa korban; atau
   - nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

c) Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

d) Kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:
   - pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
   - rehabilitasi medis dan psikososial;
   - penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
   - keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau
   - pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

e) Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:
   - perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
   - penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
   - keikutsertaan dalam pendidikan atau

pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

- pelayanan masyarakat.

e. Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

1) proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2) kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

a) Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

b) Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

c) Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak.

d) Dalam hal hasil evaluasi anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

e) Instansi pemerintah dan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

f) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab.

g) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

h) Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama

7 (tujuh) hari

i) Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

f. Persidangan Pidana anak

1) Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak.

2) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

3) Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

4) Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

5) Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

6) Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

7) Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan.

8) Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, sidang

anak batal demi hukum.

9) Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.
10) Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.
11) Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.
12) Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
13) Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya:
    a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
    b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya
14) Sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan/atau anak saksi pada saat anak berada di luar ruang sidang pengadilan.
15) Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang

bermanfaat bagi anak.

16) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

17) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

18) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

19) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

g. Putusan (Pidana dan Tindakan)

1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak.

2) Pidana

a) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- pidana dengan syarat (dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun):
  (a) pembinaan di luar lembaga;
  (b) pelayanan masyarakat; atau
  (c) pengawasan.
- pelatihan kerja;
- pembinaan dalam lembaga; dan
- penjara.

b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus;

- Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- Syarat khusus adalah untuk melakukan atau

tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

- Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
- Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- Selama anak menjalani pidana dengan syarat anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun

c) Pidana tambahan terdiri atas:
   - perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
   - pemenuhan kewajiban adat.

d) Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

e) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
   - mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
   - mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
   - mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

f) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

g) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana

yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

h) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

i) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

j) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

k) Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

l) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

m) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

n) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

o) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

p) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

q) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak.

r) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

s) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

t) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

u) Anak yang telah menjalani 1/2 (setengah) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

v) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

w) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

x) Anak yang telah menjalani 1/2 (setengah) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

y) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

z) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

h. Tindakan

1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

a) pengembalian kepada orang tua/wali;

b) penyerahan kepada seseorang;

c) perawatan di rumah sakit jiwa;

d) perawatan di LPKS;
e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g) perbaikan akibat tindak pidana.

2) Tindakan dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3) Tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4) Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
5) Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

4. TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK[484]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana perlindungan anak mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Persamaan tindak pidana perlindungan anak dengan SPPA adalah kepentingan terbaik untuk anak harus diutamakan, perbedaannya tindak pidana perlindungan anak pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya anak, sedangkan dalam SPPA pelakunya adalah anak dan korbannya orang dewasa atau anak.
b. Perlindungan Anak
   1) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

[484] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

5) Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus antara lain terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental.

c. Dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa, pada saat acara pemeriksaan Anak sebagai saksi dan / atau Anak sebagai Korban, sidang dilaksanakan tertutup untuk umum. hakim, penuntut umum dan advokat tidak memakai toga dan atribut kedinasan.[485]

5. PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

a. Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilihan umum.[486]

1) Tindak Pidana Pemilihan

a) Tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

---

[485] SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

[486] Perma Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

b) Hari adalah hari kerja.

c) Tindak pidana pemilihan timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas kabupaten/kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan.

d) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.[487]

e) Acara pemeriksaan tindak pidana pemilihan berpedoman pada acara pemeriksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

f) Ketentuan pidana Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

---

[487] Pasal 146 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

g) Perkara tindak pidana pemilihan diputus paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

h) Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa.

i) Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

j) Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.

k) Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Putusan pengadilan tinggi harus disampaikan kepada penuntut umum melalui pengadilan negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

l) Putusan pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

m) Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menetapkan hasil pemilihan secara nasional.

n) Salinan putusan pengadilan harus diterima KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

o) KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan.

p) Salinan putusan pengadilan negeri disampaikan secara manual dan/atau secara elektronik.

2) Tindak Pidana Pemilihan Umum

a) Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

b) Ketentuan pidana dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

c) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.[488]

d) Acara pemeriksaan Tindak Pidana Pemilu berpedoman pada acara pemeriksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

e) Majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum yaitu hakim khusus yang merupakan hakim karier

[488] Pasal 480 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pada pengadilan negeri yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

f) Perkara tindak pidana pemilihan umum diputus paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

g) Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa.

h) Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

i) Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.

j) Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Putusan pengadilan tinggi harus disampaikan kepada penuntut umum melalui pengadilan negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

k) Putusan pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

l) Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan umum yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional.

m) Salinan putusan pengadilan harus diterima KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta pemilihan umum pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

n) KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan.

o) Salinan putusan pengadilan negeri disampaikan secara manual dan/atau secara elektronik.

6. PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ketentuan mengenai teknis peradilan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain sebagai berikut:

a. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
b. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
c. Lingkup rumah tangga meliputi: suami, isteri dan anak, orang-orang, yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menganut prinsip minimum pembuktian keterangan saksi, yaitu bahwa keterangan seorang saksi saja ditambah alat bukti lain sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
e. Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan.
f. Ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga

lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

g. Perintah perlindungan tersebut dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas Penetapan Pengadilan yang diajukan 7 (tujuh) hari sebelum masa berlakunya habis.

h. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani.

i. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan yang diajukan oleh keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani dengan persetujuan korban.

j. Dalam keadaan tertentu, permohonan perlindungan dapat dimohonkan tanpa persetujuan korban.

k. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengandung muatan kekerasan seksual sidang dinyatakan tertutup untuk umum.[489]

7. PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

a. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

b. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual, secara tertutup untuk umum.

c. Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.

d. Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh

---

[489] SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

kekuatan hukum tetap.

e. Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.

f. Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

g. Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

h. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.

i. Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

j. Majelis hakim membacakan putusan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sidang yang terbuka untuk umum.

8. PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP[490]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana lingkungan hidup mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Perkara lingkungan hidup menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya;

2) undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya sepanjang terkait dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, perubahan iklim keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, atau pelindungan satwa dan tumbuhan liar; dan/atau

3) undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya

---

[490] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

sepanjang terkait dengan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Perkara lingkungan hidup diadili oleh majelis hakim lingkungan hidup atau minimal salah seorang hakim dalam majelis itu merupakan hakim lingkungan hidup.
c. Dalam hal belum ada hakim lingkungan hidup, maka ketua/wakil ketua pengadilan karena jabatannya (*ex officio*) menjadi ketua majelis untuk mengadili perkara lingkungan hidup.
d. Dalam hal belum ada hakim lingkungan hidup ketua pengadilan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menempatkan hakim lingkungan hidup pada satuan kerja tersebut dalam penempatan hakim selanjutnya.
e. Pidana dan tindakan terhadap korporasi dalam perkara lingkungan Hidup berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
f. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP.
g. Alat bukti dalam tindak pidana lingkungan hidup berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP.
h. Dalam memeriksa bukti ilmiah yang diajukan dalam proses persidangan perkara lingkungan hidup, hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan ketepatan metode dan validitas prosedur pengambilan sampel dengan memperhatikan akreditasi laboratorium serta pendapat ahli dari penuntut umum dan/atau terdakwa.[491]
i. Hakim pemeriksa perkara dalam memeriksa perkara lingkungan hidup wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.[492]

---

[491] Pasal 72 PERMA Nomor 1 Tahun 2023
[492] Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2023

j. Hakim pemeriksa perkara dalam memeriksa dan menilai keterangan ahli di persidangan menguji:
   1) kesesuaian dengan ilmu pengetahuan dan diterima oleh komunitas ilmu pengetahuan terkait;
   2) adanya publikasi yang telah digunakan sebagai rujukan di komunitas ilmu pengetahuan; dan/atau
   3) telah terdapat peninjauan oleh rekan sejawat (peer review) mengenai teori dan metode ilmiah yang digunakan.

k. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para ahli, hakim pemeriksa perkara dapat meminta dihadirkan ahli lain atas biaya dari penuntut umum dan terdakwa atau menggunakan pendapat ahli yang dianggap benar dengan memberikan alasannya dalam pertimbangan hukum.

l. Hakim pemeriksa perkara menilai keahlian seorang ahli dengan memperhatikan:[493]
   1) disiplin ilmu ahli yang dibuktikan melalui pendidikan formal, ijazah akademis (minimal strata 2), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan khusus, dan/atau pengalaman;
   2) karya ilmiah atau penelitian relevan; dan/atau
   3) keaktifan mengikuti seminar atau lokakarya yang tercantum dalam daftar riwayat hidup.

m. Dalam hal ahli diajukan ke pengadilan berdasarkan pemeriksaan dan/atau penelitian lapangan, pendapat ahli harus didasarkan atas fakta yang valid dan relevan.

n. Orang yang memiliki keahlian khusus berdasarkan kearifan lokal yang diperoleh dari pengalamannya dapat diminta pendapatnya di persidangan.

o. Terhadap dakwaan penuntut umum, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan/atau advokat untuk mengajukan keberatan guna membuktikan bahwa terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

[493] Pasal 73 PERMA Nomor 1 Tahun 2023

p. Dalam hal terdakwa dan/atau advokatnya mengajukan keberatan disertai dengan bukti awal bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hakim pemeriksa perkara memberikan kesempatan kepada penuntut untuk menanggapi keberatan terdakwa dan/atau advokatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penyampaian keberatan diterima.

q. Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan sela dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan.

r. Dalam hal terdakwa dan/atau advokat dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum, hakim mengambil putusan akhir yang amarnya menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tanpa harus memeriksa pokok perkara.

s. Terhadap putusan, penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

t. Dalam hal hakim menolak keberatan terdakwa dan/atau advokatnya, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

u. Apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa dakwaan Penuntut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penuntutan tidak dapat diterima.

9. PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG[494]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana perdagangan orang mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut :

a. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
b. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
c. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.
d. Setiap orang yang membantu, melakukan percobaan, merencanakan untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

---

[494] Undang – Undang Tahun 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan korban TPPO berbasis masyarakat dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

e. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, pidana yang dijatuhkan kepadanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara fisik dengan hormat dari jabatannya. Pidana tambahan tersebut dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

f. Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

g. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

h. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (sepertiga).

i. Kelompok yang terorganisasi adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

j. Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh Pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana. Maksud dipaksa disini adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

k. Jika Terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka Terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

l. Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

m. Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:
   1) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
   2) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
      a) tulisan, suara, atau gambar;
      b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
      c) huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

n. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. tindakan penyadapan tersebut, hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

o. Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

p. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audiovisual.

q. Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

r. Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.

s. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

t. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

u. Jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

v. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

w. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak:
   1) dilakukan dalam sidang tertutup ;
   2) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
   3) dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

x. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.

y. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

z. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

å. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, berupa ganti

kerugian atas:

1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2) Penderitaan;
3) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

ä. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

ö. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

aa. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan selanjutnya memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari pemberi restitusi tidak memenuhi kewajibannya, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi dan jika restitusi tidak mampu dibayar, maka dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.[495]

10. PERKARA TINDAK PIDANA PERS[496]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana pers mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain

---

[495]Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan MengHukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, SEMA Nomor 7 Tahun 2012

[496] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

sebagai berikut:

a. Yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana pers adalah wartawan, redaktur dan perusahaan pers.

b. Ketentuan pidana dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

11. PERKARA TINDAK PIDANA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana kekayaan intelektual mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Desain Industri

1) Ketentuan pidana dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.[497]

2) Tindak pidana terhadap desain industri merupakan delik aduan.[498]

b. Paten

1) Ketentuan pidana dalam Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2) Tindak pidana sebagaimana tersebut di atas adalah delik aduan.[499]

c. Merek dan Indikasi Geografis

1) Ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 101 ayat (1), dan ayat (2), dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diubah dengan Undang-

---

[497] Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
[498] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
[499] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.[500]

d. Hak Cipta

1) Ketentuan pidana dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan delik aduan.[501]

e. Perlindungan Varietas Tanaman

1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PVT.

2) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

---

[500] Pasal 103 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[501] Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

f. Rahasia Dagang

1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang rahasia dagang.

2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

3) Dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

5) Tindak pidana rahasia dagang merupakan delik aduan.[502]

6) Atas permintaan penuntut umum dan/atau terdakwa dalam perkara pidana, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.[503]

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

[502] Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
[503] Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.

3) Dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4) Tindak pidana desain tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan.[504]

12. PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana pajak mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh:[505]

b. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh:[506]

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

---

[504] Pasal 42 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

[505] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa ketentuan dalam penanganan tindak pidana perpajakan

[506] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa ketentuan dalam penanganan tindak pidana perpajakan

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan

4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

c. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama.

d. Penanganan secara pidana atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan meliputi pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan, penanganan tindak pidana yang diketahui seketika, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan hakim.

e. Dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan, hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut: [507]

1) praperadilan diadili oleh pengadilan negeri di wilayah tempat kedudukan penyidik atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan;

2) dalam hal pemohon praperadilan merupakan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang, maka hakim menjatuhkan putusan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

---

[507] Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

3) seluruh kegiatan pemeriksaan bukti permulaan tidak termasuk dalam lingkup kewenangan praperadilan.[508]

f. Tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh hakim yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpajakan.

g. Dalam hal di pengadilan belum ada hakim yang telah mengikuti pelatihan maka ketua atau wakil ketua pengadilan negeri ditunjuk untuk memeriksa perkara tindak pidana di bidang perpajakan.

h. Ketentuan ancaman pada tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagai berikut:

1) Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2) Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

3) Pasal 41A ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan

4) Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

i. Pembayaran pokok dan sanksi administratif dapat dilakukan di tingkat penyidikan, setelah pelimpahan perkara sampai dengan sebelum pembacaan tuntutan atau setelah pembacaan tuntutan dan sebelum putusan.

j. Dalam hal terdakwa orang pribadi melunasi pembayaran

---

[508]Pasal 7 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

pokok dan sanksi administratif, hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah tanpa disertai penjatuhan pidana penjara dengan tetap dijatuhi pidana denda yang diperhitungkan dari pembayaran pokok dan sanksi administratif yang telah dibayar.

k. Dalam hal terdakwa korporasi melunasi pembayaran pokok dan sanksi administratif, hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana denda yang diperhitungkan dari pembayaran pokok dan sanksi administratif yang telah dibayar.

13. TINDAK PIDANA CUKAI[509]

a. Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana cukai mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b. Setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan usaha pabrik, tempat penyimpanan, tempat penjualan eceran barang kena cukai atau mengimpor barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai pengusaha pabrik dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-Undang cukai paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

c. Izin dapat diberikan kepada:

1) badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau

2) badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.

---

[509] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55-58, Pasal 58A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

d. Ketentuan pidana dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55 sampai dengan Pasal 58, Pasal 58A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

e. Ketentuan pidana dalam Pasal 51 dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

14. TINDAK PIDANA MINERBA DAN GAS[510]

a. Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana minerba dan gas mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Pelaku tindak pidana minerba dan gas dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

3) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

c. Ketentuan pidana dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

d. Ketentuan pidana dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 162 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

---

[510] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

15. TINDAK PIDANA KESEHATAN[511]

    a. Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana kesehatan mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    b. Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk:

        1) menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/ atau
        2) menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

    c. Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin dan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

    d. Ketentuan pidana dalam Pasal 430, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 435, Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 437 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 438 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 439 sampai dengan Pasal 446 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

16. TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK[512]

    a. Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana,

---

[511] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 430, 433, 434, 435, 436 ayat (1) dan (2), Pasal 437 ayat (1-2), 438 ayat (1-2), Pasal 439-446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

[512] Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 45 ayat (8), ayat (10) dan Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

c. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan/atau muatan perjudian tidak dapat dipidana dalam hal:
   1) dilakukan demi kepentingan umum;
   2) dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
   3) informasi elektronik dan/ atau dokumen;
   4) elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

d. Ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (8) dan ayat (10) dan Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

17. TINDAK PIDANA PERBANKAN[513]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana perbankan mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

[513] Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan jo Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1-5), Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 50C ayat (1) huruf a-c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia jo Pasal 65-69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

a. Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham meskipun telah diperintahkan oleh bank indonesia maka pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank yang diberikan secara tertulis atas permintaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
c. Ketentuan pidana dalam Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 50C ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
d. Ketentuan pidana dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

III. PERDATA UMUM

RUANG LINGKUP

Yang termasuk dalam perkara perdata umum, meliputi:

A. Perkara permohonan.
B. Perkara gugatan.
C. Perkara gugatan sederhana.
D. Perkara prodeo.
E. Wewenang relatif.
F. Wewenang absolut.

G. Pengecualian.
H. Kuasa/wakil.
I. Perkara gugur.
J. Perkara *verstek.*
K. Perlawanan terhadap putusan *verstek.*
L. Pencabutan gugatan.
M. Perubahan gugatan.
N. Dalam rekonvensi (gugatan balik).
O. Penggabungan dan kumulasi gugatan.
P. Masuknya pihak ketiga dalam proses perkara.
Q. Gugatan perdata lingkungan hidup.
R. Perdamaian.
S. Penggugat/tergugat meninggal dunia.
T. Pengunduran sidang.
U. Hal-hal yang dapat terjadi selama pemeriksaan perkara.
V. Tangkisan/eksepsi.
W. Pengunduran diri hakim.
X. Pembuktian.
Y. Sita jaminan.
Z. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat *(conservatoir beslag).*
Å. Sita terhadap barang milik penggugat *(revindicatoir beslag).*
Ä. Sita persamaan.
Ö. Sita marital.
AA. Putusan serta merta.
BB. Putusan provisi.
CC. Sita eksekusi.
DD. Eksekusi groose akta.
EE. Eksekusi hak tanggungan.
FF. Eksekusi jaminan fidusia.
GG. Eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap.
HH. Lelang (penjualan umum).
II. Perlawanan pihak ketiga *(derden verzet)* terhadap sita.
JJ. Perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi.
KK. Penangguhan eksekusi.
LL. Putusan *non executable.*
MM. Penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi.
NN. Penawaran pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

OO. Rahasia dagang.

PP. Varietas tanaman.

A. PERMOHONAN

1. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan, hakim akan memberikan suatu penetapan, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
2. Perkara permohonan diajukan di tempat tinggal/domisili Pemohon, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
3. Pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Produk permohonan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah putusan, upaya hukumnya adalah banding diajukan ke Mahkamah Agung.[514]
5. Produk permohonan adalah penetapan, upaya hukumnya adalah kasasi diajukan ke Mahkamah Agung.[515]
6. Terhadap pihak ketiga yang menilai memiliki kepentingan terhadap perkara permohonan terkait, dapat menggunakan upaya hukum pembatalan penetapan melalui cara mengajukan gugatan atau perlawanan.[516]
7. Permohonan pengangkatan anak mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
    a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
    c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
    d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengesahan Pengangkatan Anak;
    e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak;

---

[514] Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
[515] Pasal 138 dan Pasal 146 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[516] SEMA Nomor 3 Tahun 2018

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.

8. Permohonan pengangkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI) atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (pengangkatan anak antar negara/*inter country adoption*) harus dijatuhkan dalam bentuk putusan dan dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).[517]
9. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal anak yang hendak diangkat.[518] Apabila permohonan anak angkat yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam, dengan maksud untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, permohonan diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara diajukan ke pengadilan agama.
10. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (pengangkatan anak antar negara/ *inter country adoption*), hanya dapat dilakukan dalam daerah pengadilan negeri dimana lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk Kementerian Sosial.
11. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri antara lain:
    a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa.[519]
    b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.

---

[517] Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengesahan Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran

[518] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

[519] Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

c. Permohonan dispensasi nikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[520]

d. Permohonan pembatalan perkawinan.[521]

e. Permohonan pengangkatan anak.

f. Permohonan lainnya:

1) permohonan penetapan perkawinan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan;[522]

2) permohonan penetapan terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;[523]

3) permohonan penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang di luar wilayah negara Indonesia terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;[524]

4) penetapan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;[525]

5) penetapan perubahan nama;[526]

6) penetapan peristiwa penting lainnya,[527] antara lain perubahan jenis kelamin;

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

7) Penetapan perkawinan.[528]

g. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.[529]

---

[520] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[521] Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[522] Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006
[523] Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006
[524] Pasal 45 ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2006
[525] Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006
[526] Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006
[527] Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006
[528] Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006
[529] Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

h. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir[530] atau dinyatakan meninggal dunia.[531]

i. Permohonan agar diselenggarakan rapat umum pemegang saham.[532]

j. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

k. Permohonan pembatalan perceraian.

l. Permohonan ganti status jenis kelamin.

m. Permohonan perubahan identitas pada pasport.

n. Permohonan perwalian untuk mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

12. Permohonan yang dilarang

a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.

b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

d. Permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.[533]

13. Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan:

a. Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, dan ditandatangani lurah/kepala desa serta diketahui camat tempat tinggal almarhum atau almarhumah.

---

[530] Pasal 463 KUH Perdata
[531] Pasal 457 KUH Perdata
[532] Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[533] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

b. Bagi warga negara Indonesia yang tidak tunduk pada hukum waris adat dapat mendaftarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh balai harta peninggalan atau yang dibuat oleh notaris.[534]

14. Akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan

a. Akta ini dibuat oleh ahli waris, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia/mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh ketua pengadilan negeri.

b. Setelah membacakan dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dihadapan para pihak, ketua pengadilan negeri atau hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat: "*Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri ..... menerangkan, bahwa bernama ..... telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut di atas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tandatangannya di hadapan saya."*[535]

c. Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu di bawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

Catatan:

"Akta dibawah tangan yang telah disahkan ini khusus berlaku untuk mengambil uang deposito di bank .... Atas nama .....".

d. Setelah dibubuhi cap pengadilan negeri, akta tersebut dicatat dalam register yang khusus disediakan untuk itu pada kepaniteraan hukum.[536]

---

[534] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

[535] Pasal 2 (1) Stbld. 1916-46

[536] Pasal 3 ayat (1) Stbld.1916-46

15. Permohonan dalam undang-undang perseroan terbatas[537]
    a. Permohonan penetapan pemberian izin pemanggilan RUPS
        1) Pemegang saham diberi hak mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri[538];
        2) Hak pemegang saham untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut baru terbuka dalam hal-hal sebagai berikut:
            a) Apabila Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan;
            b) Bentuknya adalah surat permohonan, bukan gugatan;
            c) Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (sesuai asas *actor sequitor forum rei*), yakni yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
            d) Isi permintaan permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS;
            e) Ketua pengadilan dapat menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan tersebut.;
            f) sistem pemeriksaan tidak bersifat *ex parte* atau tidak hanya memeriksa dan mendengar pihak Pemohon saja sebagaimana lazimnya pemeriksaan permohonan melainkan pemeriksaan dilakukan bersifat *kontradiktoir* (*inter partes),* dengan cara selain memanggil dan mendengar pemohon , maka Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk harus memanggil dan mendengar Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
            g) Pemohon dibebani untuk membuktikan persyaratan permohonan telah dipenuhi, yaitu:
                1) pemohon benar mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sesuai ketentuan pasal 79

---

[537] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[538] Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

ayat (2) UU Perseroan;

2) telah mengajukan permintaan kepada Direksi atau dewan Komisaris , namun telah melewati tenggang waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan diterima tidak dilakukan pemanggilan RUPS

3) Membuktikan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS;

h) dalam hal permohonan dikabulkan, maka amar memuat:

1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2) Memberi izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS

3) Menetapkan hal hal berikut:

(a) bentuk RUPS (tahunan atau yang lain);

(b) mata acara RUPS sesuai permohonan pemohon;

(c) menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS;

(d) menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UU Perseroan 2007 atau Anggaran Dasar;

4) Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib hadir dalam RUPS;

5) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.... .

b. Permohonan pemeriksaan terhadap perseroan

1) Tujuan Permohonan diajukan untuk menggali data/keterangan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:

a) Perseroan, yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

b) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris, yang merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga.

2) Persyaratan:
   a) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan Perseroan.
   b) Pihak yang Berhak Mengajukan:
      (1) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara.
      (2) Pihak lain yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, atau perjanjian.
      (3) Kejaksaan, untuk kepentingan umum.
   c) Pemohon harus sudah pernah meminta data tersebut kepada Perseroan melalui RUPS, namun ditolak/tidak diberikan.
   d) Permohonan wajib didasari alasan yang wajar dan itikad baik.
3) Kewenangan dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
   a) Ketua PN wajib menolak permohonan jika terbukti tidak ada alasan wajar dan/atau tidak dilandasi itikad baik.
   b) Jika dikabulkan, Ketua PN mengeluarkan Penetapan Pemeriksaan dan mengangkat maksimal 3 (tiga) orang Ahli.
   c) Ahli yang ditunjuk tidak boleh berasal dari internal perseroan (Direksi, Komisaris, Karyawan) maupun pihak terafiliasi (Konsultan, Akuntan Publik yang ditunjuk perseroan).
4) Tata Cara Pemeriksaan
   a) Ahli berhak memeriksa seluruh dokumen dan kekayaan Perseroan yang dinilai relevan.
   b) Seluruh Direksi, Komisaris, dan karyawan wajib memberikan keterangan yang diminta Ahli.
   c) Ahli wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan.
5) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
   a) LHP diserahkan kepada Ketua PN sesuai batas waktu pada Penetapan (maksimal 90 hari sejak Ahli diangkat).
   b) Ketua PN memberikan salinan LHP kepada Pemohon

dan Perseroan paling lambat 14 hari sejak LHP diterima dari Ahli.

6) Biaya Pemeriksaan
   a) Ketua PN menetapkan jumlah batas maksimum biaya pemeriksaan.
   b) Biaya ditanggung terlebih dahulu oleh Perseroan.
   c) Ketua PN dapat membebankan penggantian biaya tersebut (sebagian atau seluruhnya) kepada Pemohon, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris apabila ada permohonan dari pihak Perseroan.

c. Permohonan pembubaran perseroan dan pengangkatan likuidator
   1) Pembubaran Perseroan dapat terjadi karena:
      a) keputusan RUPS;
      b) berakhirnya jangka waktu berdirinya menurut anggaran dasar;
      c) penetapan pengadilan;
      d) dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga berkekuatan hukum tetap dan harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan;
      e) harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi; atau
      f) dicabutnya izin usaha sehingga mewajibkan likuidasi.
   2) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
      a) permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
      b) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
      c) permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan
   3) Yang dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain:
      a) Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-

aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;

b) sebagian besar pemegang saham tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga RUPS tidak dapat diadakan;

c) perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) saham; atau

d) kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

4) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

5) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan.

d. Permohonan pengangkatan likuidator baru dan pemberhentian likuidator lama

1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama

2) Pemberhentian likuidator dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil oleh ketua pengadilan negeri atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk didengar keterangannya.

B. GUGATAN

1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tanpa dibubuhi materai dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah (advokat/kuasa insidentil) dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.

2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan ketua

pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri memerintahkan agar gugatan tersebut dicatat.[539]

C. GUGATAN SEDERHANA

1. Gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan cara dan pembuktian yang sederhana[540] dan hanya bisa untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum, kecuali perkara yang menyangkut sengketa tanah atau yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.[541]
2. Pemeriksaan dilakukan dengan tata cara gugatan sederhana.[542]
3. Seluruh subjek hukum, baik perorangan ataupun badan hukum dapat mengajukan gugatan sederhana, dengan hanya 1 (satu) orang penggugat dan 1 (satu) orang tergugat, kecuali memiliki kepentingan yang sama.
4. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan dengan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat berada dalam satu wilayah hukum yang sama dan wajib menghadiri persidangan secara langsung. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.[543]
5. Dalam gugatan sederhana hakim akan mengupayakan perdamaian, dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.[544]
6. Pendaftaran gugatan dilakukan secara elektronik atau mengisi blanko gugatan yang sudah disediakan di kepaniteraan, yang

---

[539] Pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBg

[540] Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[541] Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

[542] Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[543] Pasal 3a dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[544] Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

berisi keterangan mengenai:

a) identitas penggugat dan tergugat;
b) penjelasan ringkas duduk perkara;
c) tuntutan penggugat;
d) saat pendaftaran penggugat wajib melampirkan surat bukti yang sudah dilegalisasi.[545]

7. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.[546]
8. Dalam gugatan sederhana dapat diletakkan sita jaminan.
9. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan negeri, dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.[547]
10. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh majelis hakim yang ditunjuk ketua pengadilan dan putusan terhadap keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim.[548]
11. *Verzet* terhadap putusan *verstek* dapat diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan putusan.[549]
12. Dalam hal putusan *verstek* dan penggugat tidak menerima putusan, penggugat dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan/diberitahukan.
13. Dalam hal penggugat mengajukan upaya hukum keberatan dan tergugat mengajukan upaya hukum *verzet* dalam waktu yang bersamaan, upaya hukum keberatan dinyatakan gugur.

---

[545] Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[546] Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[547] Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[548] Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[549] Pasal 13 ayat 3a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

14. Terhadap putusan *verzet* upaya hukumnya adalah keberatan.

D. PERKARA PRODEO

1. Sebelum suatu gugatan dicatat dalam register, penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila dikabulkan ketua pengadilan negeri membuat penetapan tentang izin berperkara secara prodeo. Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.
2. Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/permohonan secara prodeo. Keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan :
   a. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan yang bersangkutan;
   b. surat keterangan tunjangan sosial lainnya (Kartu Keluarga Miskin), kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kartu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
   c. surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui ketua pengadilan negeri. Dalam register perkara hal itu akan dicatat. Semua penerimaan dan pengeluaran, meskipun nihil dalam jurnal harus tetap dicatat.[550]
3. Pihak tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara prodeo dengan cara seperti tersebut di atas.
4. Pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:
   a. mengunggah dokumen permohonan; dan
   b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.

E. WEWENANG RELATIF

1. Pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:[551]

---

[550] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

[551] Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg

a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan negeri menurut pilihan penggugat.
c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
d. Tempat tinggal penggugat atau salah satu dan penggugat, dalam hal:
    1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
    2) Tergugat tidak dikenal. (Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
e. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak.[552]
f. Untuk daerah yang berlaku rbg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada.[553]
g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, gugatan dapat diajukan di tempat domisili yang dipilih.

2. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, pengadilan negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang.[554] Yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang dan apabila diajukan terlambat, hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.

---

[552] Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 RBg
[553] Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBg
[554] Pasal 133 HIR dan Pasal 159 RBg

3. Apabila eksepsi diterima, maka Amar Putusan berbunyi :

   Dalam Eksepsi :

   - *Menerima eksepsi Tergugat*
   - *Menyatakan PN ….. (Pengadilan yang mengadili sekarang) tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut*

   Dalam Pokok Perkara :

   - *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*
   - *dan seterusnya…*

F. WEWENANG ABSOLUT

1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.
2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. Dalam hal perjanjian terdapat klausula pilihan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
4. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi.[555]
5. Apabila eksepsi diterima maka amar putusan berbunyi:

   Dalam Eksepsi

   - *Menerima eksepsi Tergugat*
   - *Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut*

   Dalam Pokok Perkara:

   - *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*
   - *dan seterusnya…*

   Catatan: Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi.
6. Apabila eksepsi ditolak, hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan

---

[555] Pasal 134 HIR, Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv

sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam berita acara persidangan.[556]

7. Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir.[557]
8. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi:

   Dalam eksepsi:

   - *Menerima eksepsi Tergugat.*

   Dalam Pokok Perkara:

   – *Menyatakan PN ..... (pengadilan yang mengadili sekarang) berwenang untuk mengadili perkara tersebut.*
9. Jika penggugat tidak menerima putusan tersebut, penggugat dapat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan dalam hal pengadilan tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dengan putusan sela memerintahkan pengadilan negeri untuk memeriksa pokok perkara selanjutnya pengadilan negeri mengirim hasil pemeriksaan pokok perkara ke pengadilan tinggi (tanpa menjatuhkan putusan), selanjutnya pengadilan tinggi akan memutus pokok perkara tersebut dalam bentuk putusan akhir.[558]

G. PENGECUALIAN

1. Dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya.[559]
2. Untuk permohonan pembatalan perkawinan, diajukan ke pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri atau suami atau istri.[560]
3. Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman tergugat[561] dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri

---

[556] Pasal 185 ayat (1) HIR dan 196 ayat (1) RBg
[557] Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947
[558] Sema Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
[559] Pasal 21 KUH Perdata
[560] Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[561] Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tempat kediaman penggugat.[562]

4. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat dan jika domisili elektronik tergugat telah diketahui, pemanggilan dilakukan secara elektronik. Dalam hal domisili elektronik tergugat tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan dilakukan sesuai dengan tersebut melalui mekanisme regatori.[563]
5. Gugatan perceraian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat[564] dan apabila alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman tergugat.

H. KUASA/ WAKIL

1. Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon/termohon atau pembantah/terbantah di pengadilan:
   a. Advokat.[565]

      Advokat yang dapat mewakili pihak dipersidangan adalah advokat yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diluar itu yang bersangkutan tidak memiliki hak beracara di persidangan meskipun nama yang bersangkutan tercantum dalam surat kuasa.
   b. Jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pengacara negara harus memiliki:[566]
      1) kartu tanda penduduk;
      2) kartu identitas pegawai/kartu pegawai;
      3) surat kuasa khusus; dan

---

[562] Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[563] Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Edaran Mahkamah Agung MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tanggal 11 Mei 1991 jo Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Surat Regatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata, Nomor NK/HI/01/02/2013/58 dan Nomor 162/PAN/HK.00/11/2013, tanggal 19 Februari 2013

[564] Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

[565] Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[566] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

4) surat tugas.

c. Kementerian/lembaga, badan usaha atau badan hukum:
   1) kartu tanda penduduk;
   2) kartu identitas pegawai/kartu pegawai/kartu anggota/surat keputusan sebagai karyawan; dan
   3) surat kuasa khusus atau surat tugas.

d. Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.[567] Pejabat yang dapat mewakili pihak dipersidangan adalah pejabat yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) HIR dan Pasal 147 ayat (2) RBg , diluar itu pejabat tersebut yang bersangkutan tidak memiliki hak beracara di persidangan meskipun nama yang bersangkutan tercantum dalam surat kuasa.

e. Posbakum

   Posbakum pada pengadilan negeri hanya diberi kewenangan memberikan konsultasi hukum non-litigasi.

f. Kuasa insidentil
   1) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hubungan keluarga dengan TNI/Polri, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri).
   2) Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

g. Kuasa Substitusi.

   Surat kuasa yang diberikan oleh penerima kuasa sebelumnya dengan hak substitusi sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus yang hanya berlaku untuk 1 (satu) kali persidangan sebagaimana termuat dalam surat kuasa substitusi tersebut.

2. Isi Surat Kuasa Khusus

   a. Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus

---

[567] Pasal 123 ayat (2) HIR dan Pasal 147 ayat (2) RBg

sudah diunggah pada saat mengajukan gugatan/permohonan dan aslinya harus diserahkan di persidangan pertama.

b. Menyebutkan identitas termasuk domisili elektronik penerima kuasa maupun principal dan kedudukan para pihak.

c. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula.

d. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

e. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru.[568]

f. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa/wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi, atau dilampiri surat kuasa khusus yang dipergunakan di pengadilan negeri yang telah menyebutkan pula pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.

g. Terhadap pencabutan upaya hukum, surat pencabutan wajib ditandatangani oleh prinsipal, jika pencabutan upaya hukum tersebut dilakukan oleh kuasa, wajib disertai persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh prinsipal.

h. Terhadap surat pencabutan tersebut, panitera membuat akta pencabutan upaya hukum.

i. Khusus untuk pengajuan permohonan eksekusi dan peninjauan kembali harus dengan surat kuasa khusus baru.

j. Surat kuasa khusus yang dibuat diluar negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi

---

[568] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus

Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).

I. PERKARA GUGUR

1. Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, gugatan dapat digugurkan.[569]
2. Dalam hal-hal tertentu, jika penggugat sudah dipanggil secara sah dan penggugat tidak hadir karena alasan yang sah, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau mengirim kuasanya tetapi surat kuasanya tidak memenuhi syarat, maka hakim dapat mengundurkan dan meminta penggugat dipanggil sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.[570]
3. Terhadap perkara yang digugurkan, sisa panjar perkara yang telah dibayarkan oleh penggugat dikembalikan kepada penggugat setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
4. Dalam hal perkara digugurkan, penggugat dapat mengajukan gugatan lagi dengan membayar panjar biaya perkara.
5. Jika penggugat pada panggilan sidang pertama tidak datang menghadap, meskipun penggugat telah dipanggil dengan sah, tetapi pada panggilan kedua datang dan pada panggilan ketiga penggugat tidak datang lagi, perkaranya tidak dapat digugurkan.[571]
6. Apabila gugatan gugur maka dituangkan dalam putusan, tetapi apabila gugatan dicabut maka dituangkan dalam bentuk penetapan.
7. Dalam hal perkara perceraian, apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan perkaranya belum diputus, perkara menjadi gugur dan dituangkan dalam putusan.
8. Apabila penggugat pernah hadir tetapi kemudian tidak hadir lagi maka penggugat dipanggil sekali dengan peringatan (peremptoir) untuk hadir dan apabila tetap tidak hadir sedangkan tergugat tetap hadir, pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *kontradiktoir*.

---

[569] Pasal 124 HIR dan Pasal 148 RBg
[570] Pasal 126 HIR dan Pasal 150 RBg
[571] Pasal 124 HIR dan Pasal 148 RBg

9. Terhadap putusan gugur tidak ada upaya hukum apapun.

J. PERKARA VERSTEK

1. Gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:[572]
   a. tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
   b. tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
   c. tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
   d. gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.
2. Jika tergugat atau kuasanya tidak hadir pada sidang pertama, akan tetapi mengirimkan surat jawaban yang memuat eksepsi/keberatan, bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkaranya, hakim/majelis hakim wajib memberi putusan tentang eksepsi/keberatan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika eksepsi/keberatan itu tidak diterima, hakim/majelis hakim memutus tentang perkara itu.[573]
3. Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs *web* pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa cetak/elektronik tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.[574]

K. PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK*

1. Tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan,[575] dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat semula, jika pemberitahuan tersebut

---

[572] Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg
[573] Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg
[574] Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[575] Pasal 129 HIR dan 153 RBg

langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan.[576]

2. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari ke 8 (delapan) sesudah *aanmaning* (peringatan).
3. Jika tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggang waktunya adalah hari ke 8 (delapan) sesudah sita eksekusi dilaksanakan.[577] Dalam hal eksekusi riil, sampai dengan hari ke 8 (delapan) setelah pelaksanaan eksekusi, kedua perkara tersebut (perkara *verstek* dan *verzet* terhadap *verstek*) berada dalam satu nomor perkara yang sama.
4. Perkara *verzet* sedapat mungkin dipegang oleh majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan *verstek*.
5. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan *verstek*, harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara *verzet* dilakukan secara biasa.[578]
6. Apabila dalam pemeriksaan *verzet* pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktoir, akan tetapi apabila pelawan yang tidak hadir maka hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding.[579]
7. Apabila *verzet* diterima dan putusan *verstek* dibatalkan maka amar putusannya berbunyi :
   - *Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar*
   - *Membatalkan putusan verstek*
   - *Mengabulkan gugatan Penggugat atau menolak gugatan pengugat*
8. Apabila verzet tidak diterima dan putusan *verstek* tidak dibatalkan maka amar putusannya berbunyi:
   - *Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.*
   - *Menguatkan putusan verstek tersebut.*

---

[576] Pasal 391 HIR dan Pasal 179 RBg
[577] Pasal 129 ayat (2) HIR dan Pasal 153 ayat (2) RBg dan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg
[578] Pasal 129 ayat (3) HIR dan Pasal 153 ayat (3) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan Verstek
[579] Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg

9. Terhadap putusan *verzet* tersebut, kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding, berkas perkara *verstek* dan *verzet* disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke pengadilan tinggi dan hanya ada 1 (satu) nomor perkara.
10. Penggugat yang tidak menerima putusan *verstek*, dapat mengajukan upaya hukum banding dan jika tergugat tidak menerima putusan *verstek* dapat mengajukan upaya hukum verzet. Dalam hal Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, upaya hukum banding yang diajukan oleh penggugat dinyatakan gugur.[580]
11. Perlawanan pelawan terhadap putusan *verstek* merupakan jawaban atas gugatan asal.[581]

L. PENCABUTAN GUGATAN

1. Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban, pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.[582]
2. Dalam hal perkara sudah didaftarkan di pengadilan dan belum ditunjuk hakim/majelis hakim, penggugat mencabut gugatan, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan pencabutan dan sisa panjar perkara dikembalikan setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
3. Dalam hal perkara telah ditetapkan hari sidang penggugat mencabut gugatan, penetapan pencabutan yang dikeluarkan majelis hakim pada hari sidang pertama dan sisa panjar perkara dikembalikan setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
4. Tidak terdapat upaya hukum terhadap penetapan pencabutan.
5. Dalam hal penggugat mencabut gugatan, penggugat dapat mengajukan gugatan kembali setelah membayar panjar biaya perkara.

---

[580] Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

[581] Angka VII Butir A.6 SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

[582] Pasal 271 dan 272 Rv

M. PERUBAHAN GUGATAN[583]

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban tergugat, perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat.
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara dan dasar dari gugatan.
3. Perubahan gugatan dilarang:
   a. apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);
   b. penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah.

N. DALAM REKONVENSI (TUNTUTAN BALIK)

1. Gugatan rekonvensi, dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali:[584]
   a. penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
   b. bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan balik asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu;
   c. dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.
2. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama.[585]
3. Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik, dalam banding tak boleh lagi diajukan tuntutan balik itu.[586]
4. Gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam 1 (satu) putusan, kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu.
5. Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan

---

583 Pasal 127 Rv
584 Pasal 132 a HIR
585 Pasal 132b HIR/Pasal 158 RBg
586 Pasal 132b HIR/Pasal 158 RBg

dengan gugatan konvensi.

6. Apabila gugatan konvensi dicabut, gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.

O. PENGGABUNGAN DAN KUMULASI GUGATAN

1. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam 1 (satu) gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam 1 (satu) gugatan.
2. Penggabungan beberapa tuntutan dalam 1 (satu) gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan saling berhubungan dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.
3. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam 1 (satu) gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat yang harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.
4. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai), sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam 1 (satu) gugatan.
5. Apabila dalam salah satu tuntutan, hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam 1 (satu) gugatan.
6. Tuntutan tentang hak menguasai (*bezit)* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak milik (*eigendom*) dalam 1 (satu) gugatan.[587]

P. MASUKNYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERKARA

1. Ikut sertanya pihak ketiga (intervensi) dalam proses perkara meliputi *voeging, tussenkomst* dan *vrijwaring.*[588]
2. *Voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.

---

[587] Pasal 103 RV

[588] Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv

3. Dalam hal ada permohonan *voeging,* hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan penetapan dan apabila dikabulkan maka dalam penetapan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.
4. *Tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan penetapan. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.
5. *Vrijwaring* adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). *Vrijwaring* diajukan dengan suatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis.
6. Misalnya: tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.
7. Terhadap *voeging*, *tussenkomst* dan *vrijwaring*, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan penetapan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.
8. Hakim/majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menerima atau menolak penggugat intervensi sebagai pihak dalam perkara tersebut. Terhadap penetapan tersebut tidak ada upaya hukum.
9. Apabila permohonan dikabulkan, dicatat dalam berita acara dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabung gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.
10. permohonan intervensi yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan negeri yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan.[589]
11. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui

[589] Pasal 14 Rv

mediasi meliputi gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).

12. Permohonan intervensi diajukan setelah pelaksanaan mediasi gagal dan sebelum pembuktian.
13. Setelah permohonan intervensi dikabulkan, permohonan tersebut dapat dicatatkan melalui SIP.

Q. GUGATAN PERDATA LINGKUNGAN HIDUP

1. Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)
   a. Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan penelusuran perkara gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.[590]
   b. Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal:
      1) jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
      2) terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
      3) wakil kelompok mewakili kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
   c. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur acara perdata, dan harus memuat:
      1) identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok;
      2) identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota;
      3) identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
      4) identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan

[590] Pasal 91 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

5) posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota. kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
6) gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
7) tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, membuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

d. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
e. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.
f. Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut.
g. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
h. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.
i. Dalam proses perkara tersebut hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

j. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

k. Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:
   1) segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar;
   2) pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

l. Pemberitahuan memuat:
   1) nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
   2) penjelasan singkat tentang kasus;
   3) penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
   4) penjelasan dan implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
   5) penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
   6) penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
   7) penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
   8) apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa yang tepat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
   9) formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

m. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

n. Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang telah disediakan.[591]

o. Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

p. Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan;[592] perkara perlindungan konsumen;[593] perkara kehutanan;[594] serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

q. Dalam gugatan perwakilan kelompok/*class action*, apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

2. Gugatan untuk Kepentingan Umum/Hak Gugat Organisasi

a. Organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.

b. Organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Misalnya :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

---

[591] Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

[592] Pasal 91 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[593] Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

[594] Pasal 71 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

harus disyaratkan bahwa organisasi lingkungan tersebut harus:

a) Berbentuk badan hukum atau yayasan.
b) Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan, menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun[595].

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999[596] jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) harus:

a) Berbentuk badan hukum atau yayasan.
b) Anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas, bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
c) Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM.

c. Dalam perkara lingkungan, yang dapat dituntut adalah tuntutan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
d. Dalam perkara perlindungan konsumen yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas, pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Penggugat.
e. Selain dari itu dapat juga dituntut:
   1) penghentian kegiatan;

---

[595] Pasal 92 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[596] Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

2) permintaan maaf;
3) pembayaran uang paksa *(dwangsom).*

3. Gugatan Warga Negara terhadap Negara (*Citizen Law Suit/ CLS*)

Dimaksud dengan gugatan warga negara terhadap negara (*citizen law suit/ CLS*) adalah yang menyangkut kepentingan masyarakat yang dilanggar oleh pemerintah dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Misalnya: lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Persyaratan gugatan warga negara (*citizen law suit/ CLS*) khusus perkara lingkungan hidup[597]:

1. penggugat adalah satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum;
2. tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
3. dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
4. obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
5. notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
6. notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Isi Pemberitahuan singkat/notifikasi/somasi secara tertulis yang berisi:
   a. informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
   b. jenis pelanggaran;
   c. peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;
   d. tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;
   e. prosedur acara persidangan *citizen law suit* (CLS) mengacu pada HIR untuk Jawa dan Madura, sedangkan diluar Jawa dan Madura mengacu pada Rbg.
7. jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanakan

[597] Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman mengadili perkara lingkungan hidup

kewajiban hukumnya, sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat.

4. Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup
   a. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
   b. Dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf a hakim pemeriksa perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
      1) hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
      2) hak untuk mendapatkan akses informasi, akses, partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
      3) hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
      4) hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      5) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
      6) hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/atau laporan;
      7) bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      8) keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
      9) keterhambatan perjuangan hak ketika gugatan

diajukan terhadap tergugat;

10) keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau

11) proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap tergugat.

c. Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat meliputi:

1) penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun tertulis;

2) penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3) penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan;

4) penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya; dan/atau

5) komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

d. Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa:

1) tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan

2) perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas.

e. Gugatan perdata atau gugatan rekonvensi yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menghambat perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Setiap orang yang melakukan perjuangan hak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat yang digugat secara perdata dapat mengajukan eksepsi atau jawaban bahwa gugatan tersebut berhubungan dengan upayanya dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

g. Dalam hal tergugat mengajukan eksepsi disertai dengan bukti awal bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi eksepsi Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penyampaian eksepsi diterima.

h. Hakim pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan eksepsi menjatuhkan putusan sela.

i. Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan berupa gugatan tidak dapat diterima apabila tergugat mampu membuktikan dalil eksepsinya berdasarkan bukti awal, yang cukup bahwa gugatan penggugat telah melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

j. Apabila berdasarkan bukti awal hakim pemeriksa perkara belum menemukan indikasi pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan.

k. Apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa gugatan penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan ditolak.

l. Dalam hal gugatan ditolak, hakim pemeriksa perkara dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tergugat apabila dimintakan dalam gugatan rekonvensi.

m. Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan berupa menolak gugatan apabila setelah memeriksa pokok perkara, hakim pemeriksa perkara menilai berdasarkan bukti yang

cukup bahwa gugatan penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

n. Hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan rekonvensi (gugatan balik) apabila gugatan konvensi terbukti merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menghukum penggugat konvensi untuk membayar kerugian materiil dan/atau immateriil.

o. Dalam hal Penggugat warga negara atau organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penggugat tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata.[598]

5. Gugatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

a. Instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu, baik secara sendiri maupun bersama- sama.

b. Gugatan yang hanya diajukan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah tidak menjadikan gugatan kurang pihak.

c. Instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu apabila:

1) terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; atau

2) menimbulkan kerugian lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

d. Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang diajukan oleh instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah tidak perlu didahului oleh penjatuhan sanksi administratif.

e. Pengajuan gugatan oleh instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah tidak menghilangkan hak gugat orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan

---

[598] Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan organisasi lingkungan hidup yang berkepentingan.

R. PERDAMAIAN

1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak (mediasi). Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya meskipun tahap pemeriksaan lebih lanjut sebelum perkara putus.[599]
2. Para pihak (*prinsipal*) wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
3. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung.
4. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
5. Alasan sah meliputi antara lain:[600]
   a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
   b. di bawah pengampuan;
   c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
   d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
6. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi meliputi:[601]
   a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
      1) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga;
      2) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan

---

[599] Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

[600] Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

[601] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

hubungan industrial;

3) keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha;
4) keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen;
5) permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6) keberatan atas putusan komisi informasi;
7) penyelesaian perselisihan partai politik;
8) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
9) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut.
c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
e. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan, melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

7. Walaupun perkara tersebut tidak diwajibkan mediasi, para pihak dapat melakukan kesepakatan untuk perdamaian.
8. Jika usaha perdamaian berhasil, dibuatkan kesepakatan perdamaian yang dibacakan kepada para pihak dan wajib ditandatangani oleh para pihak (prinsipal) dan kuasanya serta mediator. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara, agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika tercapai perdamaian sedangkan Para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam akta perdamaian, penggugat wajib mencabut gugatan.[602]

---

[602] Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

9. Akta/putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak melaksanakan, para pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
10. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
11. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan.
12. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
13. Perhitungan jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dihitung sejak mediasi tidak mencapai kesepakatan.[603]
14. Mediasi dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, baik tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebelum perkara tersebut diputus.
15. Para pihak yang ingin melakukan perdamaian, melaporkan kepada ketua pengadilan negeri usaha perdamaian yang dilakukan dan ketua pengadilan negeri melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi/Ketua Mahkamah Agung untuk menunda memutus perkara tersebut, menunggu hasil perdamaian para pihak.
16. Penundaan tersebut paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan para pihak kepada ketua pengadilan negeri disampaikan.
17. Kesepakatan perdamaian wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada, selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk diteruskan kepada majelis hakim pemeriksa perkara melalui ketua pengadilan tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.
18. Majelis hakim pemeriksa perkara pada pengadilan tinggi atau

---

603 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Mahkamah Agung harus membuat akta perdamaian (putusan perdamaian), sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat.

19. Pelaksanaan mediasi secara elektronik dapat dilaksanakan setelah para pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan.[604]
20. Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual.

S. PENGGUGAT/TERGUGAT MENINGGAL DUNIA

1. Jika penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara, tergugat atau salah satu tergugat meninggal dunia, maka perkara tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya dan apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, gugatan harus diubah terlebih dahulu dengan mencantumkan nama ahli waris tergugat sebagai tergugat dalam perkara tersebut. Penggantian tersebut tidak perlu persetujuan dari penggugat atau para tergugat lainnya.
3. Dalam hal sebagian atau seluruh tergugat menolak atas penggantian kedudukan tergugat yang telah meninggal dunia, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan dianggap tidak menggunakan haknya.
4. Penggugat memberitahukan perubahan gugatan tentang penggantian kedudukan tergugat yang meninggal dunia tersebut, dengan disertai tempat tinggal/tempat kediaman/domisili elektronik para ahli waris tergugat kepada majelis hakim pemeriksa.
5. Jika tempat tinggal/tempat kediaman/domisili elektronik ahli waris tergugat tidak diketahui, panggilan dialamatkan kepada tempat tinggal/tempat kediaman/domisili elektronik tergugat.

T. PENGUNDURAN SIDANG

1. Dalam hal persidangan dilakukan secara elektronik, pengunduran sidang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo.

---

[604] Pasal 5 Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

2. Dalam hal persidangan dilakukan secara konvensional, jika perkara tidak dapat diperiksa pada sidang pertama, pemeriksaan diundur sampai sidang berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan memperhatikan waktu yang cukup, dengan melalui surat tercatat atau ke domisili elektronik para pihak. Dalam hal ada pihak yang berdomisili di luar negeri, yang tidak diketahui domisili elektroniknya, pemanggilan tersebut harus dilakukan sesuai dengan mekanisme panggilan luar negeri (rogatori).[605]
3. Pengunduran sidang harus diucapkan di persidangan dan bagi mereka yang hadir, pemberitahuan pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir harus dipanggil lagi.[606]

U. HAL-HAL YANG DAPAT TERJADI SELAMA PEMERIKSAAN PERKARA

1. Dalam pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak, ada hal-hal perbuatan yang harus dilakukan, misalnya pemeriksaan setempat, biayanya dibebankan kepada penggugat dan dianggap sebagai panjar biaya perkara, yang kemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan hakim, dihukum untuk membayar biaya perkara.
2. Untuk perkara-perkara mengenai tanah, majelis hakim wajib melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, utamanya letak, luas dan batas tanah, untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara agar putusan dapat dilaksanakan (tidak *non executable*).[607]

---

[605] Surat Edaran Mahkamah Agung MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tanggal 11 Mei 1991 jo Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata Lintas Negara, Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 Nomor 02/KMA/NK/IV/2023 tertanggal April 2023.

[606] Pasal 159 HIR/Pasal 186 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

[607] Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

3. Apabila tanah terletak di wilayah pengadilan negeri lain, majelis hakim memberitahukan pemeriksaan setempat kepada ketua pengadilan negeri tempat tanah sengketa berada.
4. Pihak tergugat, apabila ia mau dapat membayarnya atau jika penggugat yang memohon tetapi keberatan untuk membayarnya, maka biaya dibebankan kepada tergugat. Jika kedua belah pihak tersebut tidak mau membayar biaya tersebut, hal/perbuatan yang harus dilakukan itu tidak dilakukan.
5. Dalam hal perbuatan itu menurut hakim memang sangat diperlukan, hakim dapat memerintahkan para pihak membayar biaya tersebut secara tanggung renteng. Terhadap biaya tersebut, sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh penggugat.[608]
6. Untuk memastikan letak dan batas tanah objek gugatan yang sedang diperkarakan, hakim yang memeriksa perkara dapat meminta pengukuran pada kantor pertanahan setempat.[609]

V. TANGKISAN/ EKSEPSI

1. Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diputus terlebih dahulu setelah mendengar jawab-jinawab dan memeriksa bukti permulaan para pihak.[610]
2. Dalam hal eksepsi dikabulkan, maka diputus dengan putusan akhir *(ein vonis)*. Jika eksepsi tersebut ditolak, maka diputus dengan putusan sela *(toessen vonis)* dan dilanjutkan dengan putusan pokok perkara.

W. PENGUNDURAN DIRI HAKIM

1. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan, apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, pengacara negara, advokat atau panitera, atau dengan pihak yang diadili.[611]
2. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan, apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri

---

[608] Pasal 160 HIR/Pasal 187 RBg
[609] Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
[610] Pasal 136 HIR/162 RBg
[611] Pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

maupun atas permintaan pihak yang berperkara.[612] *"Kepentingan langsung atau tidak langsung"* adalah termasuk, apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.[613]

3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan dinyatakan tidak sah.
4. Untuk perkara *verzet* terhadap *verstek*, tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

X. PEMBUKTIAN

1. Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.[614] Dalam hal ini berarti, apabila yang didalilkan (dikatakan) dibantah/disangkal maka yang mendalilkan wajib membuktikan, tapi apabila yang didalilkan tidak disangkal maka tidak perlu ada pembuktian, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Jenis alat-alat bukti,[615] yaitu:
   a. Bukti Surat

      Ada 2 macam akta yaitu:

      1) Akta otentik, adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang, untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya.[616]
      2) Akta di bawah tangan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ordonansi menentukan: *"Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan*

---

[612] Pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
[613] Penjelasan Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
[614] Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg
[615] Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg
[616] Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg

dibawah dengan diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangan, tetapi bagi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dan padanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili."[617]

Pasal 1 b Ordonansi/Pasal 286 RBg berbunyi: *"Tulisan-tulisan dibawah tangan, berasal dari orang-orang Indonesia atau orang-orang yang dipersamakan mereka yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan-tulisan itu diajukan atau sebagai telah diakui memberikan terhadap pada pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik"*[618]

b. Bukti Saksi

1) Dalam menimbang kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan martabat saksi dan segala ihwal yang dapat mempengaruhi saksi, sehingga saksi dapat dipercaya atau kurang dipercaya.[619]

2) Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:[620]

a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.

b) Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.

c) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun.

d) Orang tua walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

3) Keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu, dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dan pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian

---

[617] Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29
[618] Pasal 1875, 1876 dan 1877 KUHPerdata.
[619] Pasal 172 HIR / Pasal 309 RBg / Pasal 1908 KUH Perdata
[620] Pasal 145 HIR / Pasal 172 RBg

pekerjaan.

4) Saudara dan ipar dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan, keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak,[621] tidak berhak minta mengundurkan diri dari pada memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di atas.
5) Pengadilan negeri dapat mendengar diluar sumpah, anak-anak atau orang-orang tua yang kadang-kadang terang ingatannya, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja.
6) Yang dapat mengundurkan diri untuk memberi kesaksian adalah:[622]
   a) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
   b) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau istri salah satu pihak.
   c) Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.
7) *Testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. *Testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.
8) *Unus testis nullus testis* yang berarti "satu saksi bukan saksi" adalah *keterangan* seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain. *Unus testis nullus testis* harus didukung dengan bukti-bukti lain untuk dapat membuktikan dalil yang harus dibuktikannya.

c. Persangkaan

1) Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa

---

[621] Pasal 146 ayat (1) huruf a dan b / Pasal 172 ayat (1) RBg
[622] Pasal 146 ayat (1) HIR / Pasal 174 RBg

yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Adapun yang menarik kesimpulan dapat undang-undang atau hakim.

2) Persangkaan undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.[623]

3) Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, apakah akan dianggap sebagai alat bukti berkekuatan sempurna atau sebagai bukti penulisan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.

d. Pengakuan

1) Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, maupun diucapkan oleh seorang yang istimewa dirasakan untuk melakukannya.[624]

2) Pengakuan yang dilakukan diluar sidang diserahkan kepada pertimbangan hakim yang akan menentukan kekuatan mana akan diberikannya.[625]

3) Azas "*Onsplitsbaar aveu*" atau pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah, yaitu : "Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima bagiannya saja dan menolak bagian yang lain sehingga menjadi kerugian kepada orang yang mengaku itu, melainkan jika orang yang berhutang untuk melepaskan dirinya menyebutkan bersama pengakuan itu, beberapa perbuatan yang nyata palsu".[626]

e. Sumpah

1) Ada 2 (dua) macam sumpah:

a) Sumpah yang dibebankan oleh hakim (sumpah penambah).

b) Sumpah yang dimohonkan pihak lawan (sumpah pemutus).

2) Apabila sumpah telah diucapkan hakim tidak

---

[623] Pasal 1915 KUH Perdata dan 1916 KUH Perdata
[624] Pasal 174 HIR / Pasal 311 RBg / Pasal 1925 KUH Perdata
[625] Pasal 175 HIR / Pasal 312 RBg / Pasal 1928 KUH Perdata
[626] Pasal 176 HIR / Pasal 313 RBg / Pasal 1924 KUH Perdata

diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah termaksud.[627]

3) Sumpah penambah[628] adalah sebagai berikut:
"Jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya, akan tetapi keterangan adalah sama sekali ada dan tiada kemungkinan akan meneguhkan dia, dengan upaya keterangan yang lain dapatlah Pengadilan Negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, supaya dengan itu keputusan perkara dapat dilakukan atau supaya dengan itu jumlah uang yang akan diperkenankan dapat ditentukan".

4) Dalam hal hakim akan menambah bukti baru dengan suatu sumpah penambah, harus dibuat dengan putusan sela lengkap dengan pertimbangan yang memuat alasan-alasannya.

5) Sumpah penaksir dilakukan untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan atau dikabulkan. Misalnya dalam hal telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh anak tergugat dan barang-barang penggugat musnah.

6) Juga boleh walaupun tidak ada barang keterangan yang dibawa gugatan itu atau pembelaan yang melawannya, salah satu pihak mempertanggungkan kepada pihak yang lain. Sumpah dimuka hakim supaya keputusan perkara tergantung sumpah itu, asal saja sumpah itu mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung. Jika perbuatan ini sama perbuatan yang dikerjakan oleh kedua pihak, bolehlah pihak yang enggan mengangkat sumpah yang dipertanggungkan kepadanya, mengembalikan sumpah itu kepada lawannya. Barang siapa kepadanya sumpah dipertanggungkan dan enggan mengangkatnya atau

---

[627] Pasal 177 HIR / Pasal 314 RBg / Pasal 1936 KUH Perdata
[628] Pasal 155 HIR / Pasal 182 RBg / Pasal 1940 KUH Perdata

mengembalikan dia kepada lawannya ataupun juga barang siapa mempertanggungkan sumpah tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan enggan mengangkat sumpah itu, harus disalahkan.[629]

7) Sumpah pemutus hanya dapat dimintakan oleh Penggugat pada tingkat pengadilan negeri, yaitu dalam hal penggugat dan tergugat tidak mempunyai bukti apapun, sedangkan tergugat menyangkal gugatan penggugat. Tentang hal mengangkat sumpah itu harus diucapkan dalam persidangan pengadilan negeri, kecuali jika hal dapat dilangsungkan karena ada halangan yang sah.[630]

8) Dalam hal sumpah pemutus diminta diucapkan di tempat ibadah yang ditunjuk sehubungan dengan kepercayaan yang dianutnya, misalnya: di masjid, gereja, vihara, atau kelenteng, sumpah dilakukan ditempat yang ditunjuk tersebut, dan dibuat berita acara tentang hal itu.

9) Biaya yang timbul sehubungan upacara sumpah tersebut, ditanggung oleh pihak yang berperkara (pihak yang meminta sumpah).

10) Sumpah penambah dan sumpah pemutus hanya dapat dilaksanakan dihadapan pihak lawan, kecuali pihak lawan telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir.[631]

f. Bukti Elektronik[632]

1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

2) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah

---

[629] Pasal 156 HIR / Pasal 183 RBg / Pasal 1929-1931 KUH Perdata
[630] Pasal 158 ayat (1) HIR / Pasal 185 RBg / Pasal 1944-1945 KUH Perdata
[631] Pasal 158 ayat (2) HIR / Pasal 185 RBg / Pasal 1944 KUH Perdata
[632] Undang-Undang Nomor 1Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Y. SITA JAMINAN

1. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim/ketua majelis selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut hakim/ketua majelis membuat surat penetapan. penyitaan dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.

2. Ada 2 (dua) macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (*revindicatoir beslag*).[633] Permohonan agar dilakukan sita jaminan, baik itu sita *conservatoir* atau sita *revindicatoir*, harus dimusyawarahkan majelis hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka majelis hakim membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai pengadilan negeri sebagai saksi.

3. Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan, majelis hakim

---

[633] Pasal 226, 227 HIR, Pasal 260, 261 RBg

wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat.

4. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, majelis hakim wajib memperhatikan:
   a. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat dengan disertai bukti kepemilikan (atau dalam hal sita *revindicatoir* terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat.[634]
   b. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita *revindicatoir,* harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada lurah atau kepada penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung pengadilan negeri.
5. Dalam hal objek yang disita tidak terletak di wilayah pengadilan yang memeriksa gugatan tersebut, penyitaan dilakukan oleh pengadilan negeri dimana objek yang akan disita terletak. Majelis hakim yang mengeluarkan penetapan sita jaminan wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan, agar ketua pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan dalam daerah hukum mana objek yang akan disita itu terletak, agar penyitaan tersebut dilaksanakan.
6. Apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, sita jaminan harus diangkat.
7. Dalam hal pengadilan tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan sita, pengadilan tinggi melalui putusan sela dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk melaksanakan sita dan berita acara sita dikirimkan ke pengadilan tinggi, amar putusan pengadilan tinggi menyatakan sita tersebut sah dan berharga.
8. Terhadap biaya pelaksanaan sita dibebankan kepada pemohon sita dan diambil dari panjar biaya banding yang termuat dalam buku jurnal banding. Kekurangan terhadap biaya sita tersebut dimintakan kepada pemohon sita.

---

[634] Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg dan Pasal 270 RV

9. Dalam hal objek yang disita barang tidak bergerak (tanah) yang telah bersertifikat, harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat serta dicatatkan dalam register penyitaan barang tidak bergerak yang ada di pengadilan negeri.
10. Dalam hal objek yang disita barang tidak bergerak (tanah) yang belum bersertifikat dan kantor pertanahan setempat tidak bersedia mencatatkan, maka pencatatan dan pengumuman dilakukan di kantor kelurahan setempat serta dicatatkan dalam register penyitaan barang tidak bergerak yang ada di pengadilan negeri.

Z. SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT *(CONSERVATOIR BESLAG)*

1. Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat dan adanya indikasi gugatan akan dikabulkan[635].
2. Objek penyitaan adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat.
3. Dalam hal objek yang akan disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut dikuasai tergugat, letak, luas, serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas.[636] Untuk menghindari kesalahan penyitaan diwajibkan menghadirkan pihak badan pertanahan nasional/kepala desa untuk melihat keadaan tanah, letak, batas serta luas tanah yang akan disita.
4. Apabila yang disita adalah sebidang tanah dengan atau tanpa rumah yang telah bersertifikat didaftarkan di kantor pertanahan setempat, jika tidak bersertifikat didaftarkan di kantor desa/kelurahan setempat.[637]
5. Jika ketentuan pada angka 4 dilanggar, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 278 KUHP dan dimasukkan dalam berita acara penyitaan jaminan tersebut.
6. Penyitaan harus dicatat di buku register penyitaan yang

---

[635] Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg

[636] Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962

[637] Pasal 227 ayat (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg jo Sema Nomor 5 Tahun 1975 dan PP Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PP Nomor 18 Tahun 2021

disediakan di pengadilan negeri, yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita dan perkembangannya dan register tersebut adalah terbuka untuk umum.

7. Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.
8. Kepala desa/lurah yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas, agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.
9. Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, barang tidak bergerak milik tergugat dapat disita.
10. Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim dalam amar putusannya, dan apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat.
11. Sita jaminan terhadap barang-barang milik negara dilarang Undang-Undang Perbendaharaan Negara.[638]
12. Penyitaan terhadap aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak dapat dijalankan atas aset yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan publik secara langsung.
13. Sita terhadap saham dilakukan dalam bentuk pemblokiran yang dilakukan oleh OJK atas permintaan ketua pengadilan negeri melalui ketua pengadilan tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara.

Å. SITA TERHADAP BARANG MILIK PENGGUGAT *(REVINDICATOIR BESLAG)*[639]

1. Sita *revindicatoir* adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.
2. Barang yang dimohonkan sita harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri secara jelas dan terperinci.
3. Apabila gugatan dikabulkan, sita *revindicatoir* dinyatakan sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.

---

[638] Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
[639] Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBg

4. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam membahas sita *conservatoir* secara mutatis mutandis berlaku untuk sita *revindicatoir.*

Ä. SITA PERSAMAAN[640]

1. Sita persamaan tidak diatur dalam HIR maupun RBG, tetapi diatur dalam Pasal 463 Rv yang mengatur tentang eksekusi barang bergerak. Namun demikian telah berkembang dalam praktek, bahwa sita persamaan itu dapat saja dilakukan terhadap barang tidak bergerak, yang tata caranya mengikuti ketentuan dalam Pasal 463 Rv;
2. Ketentuan yang hampir serupa, sebagai berikut :[641]

   "Atas barang yang terlebih dahulu disita untuk orang lain yang berpiutang tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika jurusita mendapatkan barang yang demikian, ia dapat memberikan salinan putusan Surat paksa sebelum tanggal penjualan tersebut kepada Hakim Pengadilan Negeri, yang selanjutnya menentukan, bahwa penyitaan yang dilakukan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut Surat paksa'".
3. Apabila setelah dilakukan penyitaan tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita, diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang ditujukan terhadap penanggung hutang kepada negara, penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut putusan hakim itu dan hakim pengadilan negeri jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.
4. Dalam hal yang dimaksud dalam syarat-syarat angka 1 dan 2, hakim pengadilan negeri menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung hutang kepada negara, pelaksana dan orang yang berpiutang.

---

[640] Pasal 463 RV

[641] Pasal 11 ayat (12) Undang-Undang PUPN jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960

5. Pelaksana dan orang yang berpiutang yang menghadap atas panggilan sebagaimana tersebut di atas, dapat meminta banding pada pengadilan tinggi atas penentuan pembagian tersebut.
6. Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan pasti, hakim pengadilan negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yang ditugaskan melakukan penjualan umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.
7. Penyitaan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah sita eksekusi bukan sita jaminan, dan objek yang disita bisa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
8. Sita persamaan barang tidak bergerak harus dilaporkan kepada badan pertanahan nasional dan/atau kelurahan setempat.
9. Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekutorial dilelang atau sudah dieksekusi riil, maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum.
10. Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama).

Ö. SITA MARITAL

1. Sita marital dimohonkan oleh pihak suami/istri terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, selama proses penyitaan berlangsung barang-barang tersebut dilarang untuk dialihkan suami/istri.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:[642]
   a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
   b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
   c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

---

[642] Pasal 78 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (5) PP Nomor 9 Tahun 1975

AA. PUTUSAN SERTA MERTA[643]

1. Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada pengadilan negeri. Pengadilan tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta.
2. Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah:
   a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.
   b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.
   c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
   d. Dalam hal sengketa *bezit* (penguasaan terhadap benda) bukan sengketa hak milik.
   e. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil, yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.
   f. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
   g. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah ketua pengadilan negeri memperoleh izin dari ketua pengadilan tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.[644]
3. Untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, ketua pengadilan negeri wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung,[645] yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.[646]
4. Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di

---

[643] Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 jo SK Ditjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri

[644] SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001

[645] SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001

[646] Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg jo butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

rekening pengadilan.[647]

5. Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang didasarkan adanya putusan hakim perdata lain yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak memerlukan uang jaminan.

BB. PUTUSAN PROVISI[648]

1. Putusan provisi adalah "putusan antara" yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama berupa tindakan sementara sebelum menjatuhkan putusan akhir yang tidak menyangkut pokok perkara, yang bersifat insidentil/serta merta untuk menghindari adanya kerugian yang lebih lanjut dari salah satu pihak.
2. Putusan provisi dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti awal/permulaan.
3. Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding.
4. Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.
5. Putusan provisi dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.
6. Terhadap putusan provisi dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan provisi dijatuhkan atau diberitahukan kepadanya.
7. Pemeriksaan banding atas putusan provisi dikirim dan diperiksa bersama-sama pokok perkara.
8. Pengadilan tinggi tidak dapat menjatuhkan putusan provisi.
9. Hak mengajukan tuntutan provisi hanya diberikan kepada penggugat konvensi.

CC. SITA EKSEKUSI

1. Sita jaminan atau sita *revindicatoir* yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sita tersebut otomatis menjadi sita eksekusi.
2. Dalam melakukan eksekusi dilarang menyita ternak/hewan atau

---

[647] Pasal 54 Rv
[648] Pasal 351 RV

perkakas yang benar-benar diperlukan oleh tersita untuk menjalankan usahanya sehari-hari.[649]

3. Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :[650]
   a. uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
   b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
   c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
   d. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;
   e. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."
4. Delegasi sita eksekusi terhadap barang tetap yang disita yang berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri dimana pelaksanaan sita eksekusi dilakukan, pengadilan negeri yang dimohonkan untuk melaksanakan eksekusi meminta bantuan kepada pengadilan negeri dimana objek tersebut berada dan pengadilan negeri yang melaksanakan sita, melaporkan pelaksanaan sita kepada pengadilan negeri yang meminta bantuan paling lama 2 (dua) hari.[651]
5. Terhadap permohonan pengangkatan sita eksekusi diajukan di Pengadilan Negeri dimana perkara pokok diperiksa dan diputus.

DD. EKSEKUSI GROOSE AKTA

1. Ada 2 (dua) macam *grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu *grosse* akta pengakuan hutang dan *grosse* hipotik.[652]
2. *Grosse* adalah salinan pertama dan akta otentik Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.
3. Oleh karena salinan pertama dan atas pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini harus ada kepala irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai

---

649 Pasal 197 ayat (8) HIR dan 211 RBg
650 Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
651 Pasal 195 ayat (2) dan (5) HIR dan Pasal 206 RBg ayat (2) dan (5) dan SEMA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi
652 Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg

kepala/irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Asli dari akta (minit) disimpan oleh notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala/irah-irah.

4. Grosse atas pergakuan hutang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh notaris diserahkan kepada kreditor yang di kemudian hari bila diperlukan dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri.
5. Eksekusi berdasarkan *grosse* akta pengakuan hutang hanya dapat dilaksanakan, apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah hutangnya itu.
6. Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut dan besarnya hutang menjadi tidak pasti jumlahnya, eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan, yang dalam hal ini apabila syarat-syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan serta merta.
7. Notaris dilarang membuat akta pengakuan hutang dan mengeluarkan *grosse* aktanya untuk perjanjian hutang-piutang dengan seorang pelepas uang.[653]
8. *Grosse* akta pengakuan hutang adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara orang alamiah/badan hukum, yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan dengan disertai bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.[654]
9. Jumlah yang sudah pasti dalam surat pengakuan hutang, bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain.
10. Kreditur yang memegang *grosse* atas pengakuan hutang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat langsung memohon eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dalam hal debitur ingkar janji.

---

[653] Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg jo Pasal 14 Ordonansi Pelepas Uang *(Geldschieters Ordonantie,* S.1938-523),

[654] Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg

EE. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

1. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.[655]
2. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[656]
3. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan, kantor pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[657]
4. Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratan

---

[655] Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
[656] Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
[657] Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

sebagai berikut:

a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan hak tanggungan;
b. tidak memuat kuasa substitusi;
c. mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan.

6. Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut[658].
7. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.[659]
8. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut, hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.[660]
9. Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
10. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan.
11. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur, hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dari semua beban, kepada pembeli lelang.
12. Apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka

---

[658] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
[659] Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
[660] Pasal 200 ayat (7) HIR dan Pasal 217 ayat (2) RBg jo Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

dapat langsung dieksekusi tanpa melalui gugatan.

13. Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara, atas permohonan pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Janji ini hanya berlaku untuk pemegang Hak tanggungan peringkat pertama saja. Apabila pemegang hak tanggungan peringkat pertama telah membuat janji untuk tidak dibersihkan,[661] apabila ada hak tanggungan lain-lainnya dan hasil lelang tidak cukup untuk membayar semua hak tanggungan yang membebani tanah yang bersangkutan, maka hak tanggungan yang tidak terbayar itu akan tetap membebani persil yang bersangkutan, meskipun sudah dibeli oleh pembeli dan pelelangan yang sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah tersebut dengan beban-beban hak tanggungan yang belum terbayar. Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa.
14. Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh ketua pengadilan negeri, lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh ketua pengadilan negeri dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelang yang diperintahkan oleh ketua pengadilan negeri dan dilaksanakan oleh kantor lelang negara, adalah dalam rangka eksekusi dan bukan merupakan putusan dari kantor lelang negara.
15. Penjualan (lelang) benda tetap harus diumumkan dua kali dengan berselang lima belas hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan obyek yang akan dilelang.[662]

FF. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[663]
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik

---

[661] Pasal 1210 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (2) j Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
[662] Pasal 200 ayat (7) HIR, Pasal 217 RBg
[663] Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (misalnya bangunan di atas tanah milik orang lain), tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[664]

3. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, yang paling kurang memuat:
   a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
   b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
   c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
   d. nilai penjaminan; dan
   e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
5. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.
6. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
7. Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
8. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
   a. Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia

[664] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

yang mengakibatkan beralihnya demi hukum, segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru.

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri, melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.[665]

GG. EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan yang sudah tidak ada upaya hukum.
2. Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:
   a. putusan *declaratoir;*
   b. putusan *constitutief;*
   c. putusan *condemnatoir.*
3. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi.
4. Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.
5. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.
6. Jenis eksekusi atau pelaksanaan putusan ada 3 (tiga), yaitu:
   a. Pembayaran sejumlah uang;
   b. Eksekusi Riil;
   c. Melakukan suatu perbuatan tertentu.
7. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah perintah membayar sejumlah uang sesuai putusan, jika pihak kalah tidak membayar dilakukan sita eksekusi dan pelelangan umum atas barang milik terhukum baik benda bergerak maupun tidak bergerak senilai hutang tersebut[666].
8. Eksekusi riil pelaksanaan perintah Putusan *condemnatoir* yang

---

[665] Pasal 29 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
[666] Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg

amarnya terdapat pernyataan “penghukuman” atau “perintah” terhadap tergugat untuk melakukan[667]:

a. Menyerahkan suatu barang;
b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah;
c. Melakukan perbuatan tertentu;
d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.

9. Eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu adalah perintah kepada pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sesuai amar putusan[668].
10. Putusan untuk melaksanakan suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang[669] dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang.
11. Penerapan Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa termohon tidak bersedia melaksanakan putusan, serta pengadilan tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan putusan tersebut meskipun telah menggunakan bantuan alat negara. Dalam kondisi demikian, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar termohon dihukum membayar sejumlah uang yang nilainya sepadan dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh termohon. Untuk menentukan jumlah uang yang sepadan, ketua pengadilan negeri wajib memanggil dan mendengarkan keterangan dari termohon eksekusi. Apabila diperlukan, ketua pengadilan negeri juga dapat meminta pendapat ahli yang memiliki keahlian di bidang terkait. penetapan mengenai jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh termohon dituangkan dalam bentuk penetapan ketua pengadilan negeri.
12. Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik termohon, yang sebelumnya harus disita.[670]
13. Putusan yang menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan negeri dan dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu

---

667 Pasal 1033 Rv, Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg
668 Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg
669 Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg
670 Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg

dengan bantuan alat kekuasaan negara.

14. Eksekusi harus dilaksanakan dengan tuntas. Apabila eksekusi telah dilaksanakan dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi yang tertuang dalam berita acara, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi, maka eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya.
15. Cara yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut).
16. Putusan pengadilan negeri atas gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 10, apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa *bezit*/kedudukan berkuasa.
17. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut, wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.
18. Permohonan pemulihan hak diajukan oleh pemohon kepada ketua pengadilan negeri. Pelaksanaan pemulihan hak tersebut dilakukan sesuai tata cara eksekusi riil. Apabila objek yang telah dieksekusi ternyata sudah dialihkan kepada pihak lain, maka Termohon eksekusi dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dapat mengajukan gugatan ganti rugi sebesar nilai objek miliknya yang telah dieksekusi tersebut, disertai dengan putusan serta merta (uitvoerbarr bij voorrad).
19. Apabila suatu proses perkara sudah memperoleh suatu putusan namun belum berkekuatan hukum tetap, tetapi terjadi perdamaian di luar pengadilan yang intinya mengesampingkan amar putusan, ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak dan proses perkara dihentikan sehingga putusan yang ada menjadi berkekuatan hukum tetap, putusan yang berkekuatan hukum tetap itulah yang dapat dieksekusi. Akan tetapi pihak yang merasa dirugikan dengan ingkar janjinya pihak yang membuat perjanjian perdamaian itu, dapat mengajukan gugatan

dengan dasar wanprestasi. Dalam hal yang demikian, ketua pengadilan negeri dapat menunda eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

20. Dalam hal eksekusi akan dilaksanakan dan ada permohonan peninjauan kembali, pemohon eksekusi wajib membuat surat pernyataan tidak akan mengalihkan dan bersedia mengembalikan obyek eksekusi dalam hal permohonan peninjauan kembali dikabulkan.
21. Eksekusi perdata lingkungan hidup merujuk pada Perma 1 Tahun 2023 bagian keenam pasal 52 sampai pasal 67.

HH. LELANG (PENJUALAN UMUM)

1. Pengumuman lelang dilakukan melalui harian yang terbit di kota atau kota yang berdekatan dengan tempat objek lelang terletak.[671]
2. Untuk menentukan limit objek yang akan dilelang berdasarkan perhitungan appraisal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dengan penetapan.
3. Nilai limit objek yang akan dilelang ditetapkan dengan acuan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi, yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
4. Lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
5. Agar tujuan lelang tercapai maka sebelum lelang dilaksanakan, kreditur dan debitur dipanggil oleh ketua pengadilan negeri untuk mencari jalan keluar, debitur diberi waktu selama 2 (dua) bulan untuk mencari pembeli yang mau membeli tanah tersebut. Apabila hal itu terjadi, pembayaran harus dilakukan di depan ketua pengadilan negeri, selanjutnya pembeli, kreditur dan debitur menghadap PPAT untuk membuat akta jual belinya, dan kemudian dilakukan balik nama tanah tersebut menjadi atas nama pembeli. Hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diperintahkan untuk diroya.
6. Apabila dalam waktu paling lambat paling lama 2 (dua) bulan debitur tidak berhasil mendapatkan pembeli sesuai dengan harga yang diinginkan, kreditur dan debitur dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri, menentukan harga limit dari tanah yang akan

---

[671] Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg, Pasal 217 RBg dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 23 Maret 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

dilelang.

7. Apabila selama 2 (dua) bulan tidak ada penawaran, maka penjualan umum diumumkan satu kali lagi dalam harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan tanah yang akan dilelang. Jika pelelangan dengan harga limit tidak tercapai, ketua pengadilan negeri memberikan kesempatan kepada debitur untuk kembali mencari pembeli paling lama 1 (satu) bulan. Dan jika tidak berhasil maka kreditur akan memperoleh tanah tersebut dengan harga limit itu, selanjutnya hutang dibayar dan hak tanggungan yang membebani tanah tersebut diroya.
8. Penawar/pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan atau kerusakan, baik yang terlihat atau tidak terlihat atau terdapat cacat lainnya terhadap barang yang telah dibelinya itu, ia tidak berhak untuk menolak menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan dan melepaskan semua hak untuk meminta ganti kerugian berupa apapun juga.
9. Barang yang terjual, pada saat itu juga menjadi hak dan tanggungan pembeli dan apabila barang itu berupa tanah dan rumah, pembeli harus segera membalik nama hak tersebut atas namanya.
10. Pembeli tidak diperkenankan untuk menguasai barang yang telah dibelinya itu sebelum uang pembelian dipenuhi/dilunasi seluruhnya, yaitu harga pokok, bea lelang dan PNBP. Kepada pembeli lelang diserahkan tanda terima pembayaran.
11. Apabila yang dilelang itu adalah tanah/tanah dan rumah yang sedang ditempati/dikuasai oleh tersita/lelang, terlelang tidak bersedia untuk menyerahkan tanah/tanah dan rumah itu secara kosong, maka terlelang, beserta keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa, apabila perlu dengan bantuan yang berwajib dari tanah/tanah dan rumah tersebut berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemenang lelang kepada ketua pengadilan negeri.[672]
12. Ketentuan yang sama berlaku bagi pembelian lelang yang dilakukan oleh PUPN[673]

---

[672] Pasal 200 ayat (10) dan (11) HIR atau Pasal 218 RBg

[673] Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

13. Dalam hal ini kepala panitia urusan piutang dan lelang negara meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri dimana barang tersebut terletak dan pengosongan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri tersebut agar diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam HIR dan RBg.[674]
14. Orang yang menyewa tanah/tanah dan rumah tersebut sebelum dilakukan penyitaan, baik sita jaminan atau sita eksekutorial seperti tersebut dalam pasal-pasal tersebut di atas, tidak terkena sanksi termaksud. Untuk dapat menguasai tanah/rumah yang dibeli lelang, pembeli Lelang harus menunggu sampai masa sewa habis.
15. Atas pemberian hak tanggungan yang tidak didaftarkan di kantor pertanahan setelah tanah tersebut disita, baik sita jaminan, maupun sita eksekusi, sesuai ketentuan yang terdapat dalam HIR dan RBg, tidak berkekuatan hukum.[675]
16. Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan dan pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi.
17. Dalam hal terdapat kekurangan atau pelelangan telah dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan ke pengadilan negeri ditempat lelang dilaksanakan, sedangkan jika lelang belum dilaksanakan dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan negeri di tempat objek berada.

II. PERLAWANAN PIHAK KETIGA *(DERDEN VERZET)* TERHADAP SITA

1. Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut[676]:
    a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
    b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup memper- timbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang

---

[674] Pasal 198, 199, 227 ayat (3) HIR atau Pasal 213, 214 dan Pasal 261 ayat (2) RBg
[675] Pasal 198, 199, 227 ayat (3) HIR atau Pasal 213, 214, dan 261 ayat (2) RBg
[676] SEMA Nomor 3 Tahun 2018

disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”.

c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang undang.
d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

2. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti: hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak pakai, dan hak sewa.
3. Pihak ketiga sebagai pemegang hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak pakai, dan hak sewa harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi.
4. Pemegang hak tanggungan, apabila tanah dan rumah yang dijaminkan kepadanya dengan hak tanggungan disita, berdasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturnya langsung dapat memohon eksekusi kepada ketua pengadilan negeri atau kepala PUPN.
5. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut, pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak sebagaimana tersebut di atas, apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah sebagai pemegang hak dari barang yang akan disita, pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur dan sita dipertahankan.
6. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama.
7. Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau istri, suami atau istri dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga dan perlawanannya dapat diterima, kecuali:

a. Suami istri tersebut menikah dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan.
b. Suami atau istri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga harus ikut bertanggung jawab.

8. Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi.
9. Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh ketua pengadilan negeri yang memimpin eksekusi, apabila perlawanan benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diajukan, jelas terbukti bahwa mobil yang akan dilelang itu sejak lama adalah milik pelawan. Harus diperhatikan apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, karena ada kemungkinan tanah atau mobil itu diperoleh oleh pelawan setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan barang tersebut tidak sah.
10. Terhadap perkara perlawanan pihak ketiga, ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut, harus selalu melaporkan perkembangan perkara itu kepada ketua pengadilan negeri, laporan tersebut diperlukan oleh ketua pengadilan negeri untuk menentukan mengenai diteruskan atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpinnya.

JJ. PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI

1. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak pakai, dan hak sewa, dan lain-lain. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi[677].
2. Perlawanan ini pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, eksekusi ditangguhkan, paling tidak sampai dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri dan terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum.[678]
3. Pada dasarnya termohon eksekusi tidak dapat mengajukan

[677] Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR dan Pasal 206 RBg
[678] Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg

perlawanan terhadap eksekusi, kecuali pelawan pihak/*partij verzet* berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR/Pasal 226 RBg hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita[679].

4. Dalam hal proses eksekusi belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga atau termohon eksekusi adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses eksekusi sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.

KK. PENANGGUHAN EKSEKUSI

1. Eksekusi dapat ditangguhkan oleh ketua pengadilan negeri yang memimpin eksekusi. dalam hal sangat mendesak dan ketua pengadilan negeri berhalangan, wakil ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.
2. Penangguhan eksekusi dituangkan dalam penetapan ketua/wakil ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan penangguhan eksekusi tersebut.
3. Eksekusi dapat ditangguhkan dalam keadaan dan alasan antara lain sebagai berikut:
    a. Penangguhan eksekusi terkait dengan *verzet* terhadap putusan *verstek*:
        1) eksekusi ditangguhkan dalam hal putusan yang dimohonkan eksekusi adalah putusan *verstek* yang pemberitahuannya diberitahukan langsung kepada termohon eksekusi dan termohon eksekusi mengajukan *verzet*;
        2) jika putusan tidak langsung diberitahukan kepada termohon eksekusi sendiri, dan pada waktu teguran, termohon eksekusi hadir, tenggang waktunya sampai pada hari ke 8 (delapan) setelah teguran;
        3) jika termohon eksekusi tidak hadir pada waktu teguran, tenggang waktunya adalah hari ke 8 (delapan) setelah sita eksekusi dilaksanakan;
        4) adanya perlawanan termohon eksekusi baik setelah pendaftaran eksekusi, maupun setelah teguran.

---

[679] Pasal 197 HIR / Pasal 209 RBg

b. Perlawanan termohon eksekusi dengan alasan:
   1) putusan pengadilan tersebut telah dipenuhi;
   2) syarat penyitaan tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang;
   3) penyitaan dilakukan terhadap hewan dan barang bergerak untuk menjalankan usahanya sehari-hari (mata pencaharian).

c. Adanya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai.

d. Adanya perlawanan pihak ketiga sebagai pemegang hak istimewa atas kebendaan dan hak sewa.

e. Adanya permohonan peninjauan kembali yang telah diajukan sebelum atau setelah permohonan eksekusi diajukan.

f. Penangguhan eksekusi atas alasan perdamaian.

g. Terdapat putusan yang bertentangan dalam objek perkara yang sama.

4. Dalam hal penangguhan dengan alasan adanya perlawanan pihak atau pihak ketiga, eksekusi dapat menunggu perkara perlawanan diputus di tingkat pertama.

5. Terhadap penangguhan eksekusi karena ada perlawanan, majelis hakim yang menangani perkara perlawanan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan ketua pengadilan.

6. Jika perkara perlawanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditolak atau tidak dapat diterima atau gugur atau dicabut, eksekusi dilanjutkan, namun apabila perlawanan dikabulkan, harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

7. Apabila jangka waktu penangguhan yang ditentukan dilampaui, eksekusi harus dilaksanakan tanpa diperlukan teguran lagi.

8. Dalam hal eksekusi dilakukan secara delegasi, apabila pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut ditangguhkan, yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi tersebut adalah ketua pengadilan yang diminta bantuannya.

9. Ketua pengadilan yang diminta bantuan, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan yang meminta bantuan tentang segala upaya

yang telah dijalankan olehnya, termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut.

LL. PUTUSAN *NON EXECUTABLE*

1. Ketua pengadilan membuat penetapan terhadap putusan tidak dapat dilaksanakan *(non executable)* berdasarkan berita acara yang dibuat oleh juru sita, apabila dalam eksekusi ditemukan hal-hal antara lain:
   a. objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga atas alas hak yang sah;
   b. objek eksekusi dalam keadaan disewakan;
   c. objek eksekusi tidak jelas batas-batasnya;
   d. objek eksekusi tidak sesuai dengan objek yang disebut dalam amar putusan;
   e. objek eksekusi telah musnah;
   f. objek eksekusi berada di luar negeri;
   g. objek eksekusi berubah statusnya menjadi barang milik negara;
   h. objek eksekusi menjadi objek penyitaan pidana atau menjadi boedel pailit;
   i. objek eksekusi dibebani hak tanggungan/fidusia; dan/atau
   j. adanya putusan-putusan yang bertentangan satu dengan yang lain tentang objek yang sama.
2. Penetapan *non executable* dapat dibuat dalam setiap tahapan pelaksanaan eksekusi.
3. Dalam hal amar putusan tidak bersifat menghukum/memerintahkan (*condemnatoir*), ketua pengadilan menetapkan bahwa permohonan pelaksanaan putusan tidak dapat dilanjutkan.
4. Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), apabila penguasaan pihak ketiga atau penyewa terhadap objek tersebut terjadi sebelum pendaftaran perkara.
5. Penetapan *non executable* bersifat administratif dan tidak permanen, sewaktu-waktu dapat dibuka kembali dengan penetapan ketua pengadilan negeri, sepanjang ada permohonan dan alasan-alasan untuk membuka kembali Penetapan *non executable* tersebut.

MM. PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSINYASI

1. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan/konsinyasi merupakan salah satu hal/sebab hapusnya perikatan.
2. Konsinyasi diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata.
3. Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran, yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran, uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai titipan/konsinyasi.
4. Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan ketua pengadilan negeri/hakim yang ditunjuk.
5. Cara-cara konsinyasi:
    a. Yang berutang mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan disertai dengan penyerahan sejumlah uang ke pengadilan negeri yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan (debitur sebagai pemohon dan kreditur sebagai termohon).
    b. Dalam hal tidak ada persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan diajukan ke pengadilan negeri dimana termohon (si berpiutang pribadi) bertempat tinggal atau tempat tinggal yang telah dipilihnya.
    c. Permohonan konsinyasi didaftar dalam register permohonan konsinyasi pada SIP.
    d. Ketua pengadilan negeri dengan penetapan, memerintahkan jurusita pengadilan negeri dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi, untuk melakukan penawaran pembayaran kepada termohon di tempat tinggal atau tempat tinggal pilihannya.
    e. Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah ketua pengadilan negeri tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar *(aanbod van gereede betaling).*
    f. Termohon diberikan salinan dari berita acara tersebut.
    g. Dalam hal Termohon bersedia menerima penawaran pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh juru sita,

juru sita membuat berita acara kesediaan menerima pembayaran dan melaporkan kepada ketua pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri memanggil para pihak untuk datang pada hari, tanggal dan jam untuk menerima pembayaran uang sesuai jumlah yang disebutkan dalam permohonan dan dibuat berita acara bukti penyerahan uang disertai bukti-bukti, dengan ditandatangani termohon, panitera dan saksi-saksi.

h. Dalam hal termohon menolak pembayaran, juru sita membuat berita acara penawaran yang berisi penolakan termohon untuk menerima pembayaran dan melaporkan kepada ketua pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri/hakim yang ditunjuk memanggil para pihak sesuai dengan hari, tanggal dan jam persidangan untuk pengesahan penitipan (konsinyasi) tersebut, lalu ketua pengadilan negeri/hakim yang ditunjuk membuat penetapan untuk mengesahkan penitipan (konsinyasi) di kas kepaniteraan pengadilan negeri di rekening bank atas nama pengadilan.

i. Terhadap pihak yang tidak hadir di persidangan, panitera pengadilan negeri wajib memberitahukan penetapan pengesahan penitipan (konsinyasi) tersebut.

j. Pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf h, panitera membuat berita acara penyimpanan penitipan uang yang ditandatangani oleh panitera dan 2 (dua) orang saksi serta pemohon dalam hal pemohon hadir, dengan menyebutkan jumlah dan rinciannya untuk dicatat dalam buku kas kepaniteraan pengadilan sebagai uang penitipan, pada hari yang sama dengan pengucapan penetapan ketua pengadilan.

k. Agar pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan penitipan tersebut sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh si berhutang terhadap berpiutang sebagai termohon kepada pengadilan negeri, dengan petitum :

   - *Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi.*
   - *Menghukum Pemohon membayar biaya perkara*

6. Ketentuan ini berlaku juga terhadap:
    a. Pembayaran sejumlah uang atas pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT), dalam hal pihak yang menang menolak untuk menerima pembayaran sejumlah uang.
    b. Pemberesan harta perseroan dalam likuidasi.

NN. PENAWARAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ATAS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1. Konsinyasi terhadap pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.[680]
2. Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada pengadilan, dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:
    a. pihak yang berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
    b. pihak yang berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    c. pihak yang berhak, tidak diketahui keberadaannya;
    d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
        1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
        2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
        3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
        4) menjadi jaminan hak tanggungan.
3. Bentuk ganti kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa uang dalam mata uang rupiah.
4. Sebelum mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian, pemohon wajib terlebih dahulu melakukan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening pengadilan pada waktu yang sama dengan penyetoran panjar biaya perkara, yang akan dicatatkan oleh panitera pengadilan ke dalam buku jurnal keuangan konsinyasi

---

[680] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

dan buku kas bantu pengadilan, untuk kemudian dicatatkan pula ke dalam buku induk keuangan pada kolom konsinyasi atau dalam hal tidak terdapat kolom konsinyasi, dicatat dalam kolom keterangan sebagai konsinyasi.

5. Permohonan penitipan ganti kerugian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya, yang paling sedikit memuat:
   a. Identitas pemohon
      1) dalam hal pemohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; atau
      2) dalam hal pemohon badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/daerah/badan hukum perdata lainnya, meliputi nama badan hukum, tempat kedudukan, identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut di pengadilan, dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa.
   b. Identitas termohon
      1) dalam hal termohon orang perorangan, meliputi nama, tempat tinggal, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
      2) dalam hal termohon badan hukum perdata, meliputi nama badan hukum perdata, tempat kedudukan dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak;
      3) dalam hal termohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; atau
      4) dalam hal termohon masyarakat hukum adat, meliputi nama masyarakat hukum adat, alamat masyarakat hukum adat, fungsionaris masyarakat hukum adat dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak.
   c. Uraian yang menjadi dasar permohonan penitipan ganti kerugian, yang paling sedikit meliputi:

1) hubungan hukum pemohon dengan objek pengadaan tanah;
2) hubungan hukum termohon dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
3) penyebutan secara lengkap dan jelas surat keputusan gubernur, bupati, atau walikota tentang penetapan lokasi pembangunan;
4) penyebutan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan penilaian penilai atau penilai publik;
5) penyebutan pelaksanaan waktu dan serta berita acara tempat hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;
6) penyebutan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat putusan tersebut;
7) penolakan termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8) besaran nilai ganti kerugian yang akan dibayarkan oleh pemohon kepada termohon secara jelas, lengkap dan rinci; dan
9) waktu, tempat, dan cara pembayaran ganti kerugian.

d. Hal yang dimohonkan untuk ditetapkan:
1) mengabulkan permohonan pemohon;
2) menyatakan sah dan berharga penitipan ganti kerugian dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; dan
3) pembebanan biaya perkara.

6. Permohonan penitipan ganti kerugian ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dengan dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
a. Bukti yang berkaitan dengan identitas pemohon:
1) dalam hal pemohon instansi pemerintah, berupa fotokopi surat keputusan pengangkatan/penunjukan/ tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut; atau
2) dalam hal pemohon badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/daerah/badan hukum perdata

lainnya, berupa fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang fotokopi pengesahan badan hukum, keputusan pengangkatan orang yang mewakili badan hukum di pengadilan serta fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya yang sah.

3) fotokopi surat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan pemohon sebagai instansi yang memerlukan tanah;

b. Fotokopi dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.

c. Fotokopi dokumen yang menunjukkan tempat tinggal, domisili atau tempat kedudukan termohon.

d. Fotokopi surat dari penilai atau penilai publik perihal nilai ganti kerugian.

e. Fotokopi berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian.

f. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan.

g. Fotokopi surat penolakan termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika telah ada.

h. Fotokopi dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya.

i. Fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang.

j. Fotokopi surat keterangan bank dan sertifikat hak tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian menjadi jaminan di bank.

k. Fotokopi bukti penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan.

7. Dalam hal berkas permohonan penitipan ganti kerugian dinilai

lengkap, panitera memberikan tanda terima berkas setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara dan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening pengadilan melalui bank.

8. Permohonan penitipan ganti kerugian yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dicatat dalam register konsinyasi dan diberi nomor.
9. Dalam hal pemohon mencabut permohonan yang telah dicatat dalam register konsinyasi tetapi berkas permohonan belum disampaikan kepada ketua pengadilan, panitera menerbitkan akta pencabutan permohonan dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan dan uang konsinyasi.
10. Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada ketua pengadilan pada hari yang sama dengan penyampaian tanda terima berkas lengkap.
11. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima berkas permohonan dari panitera, ketua pengadilan menerbitkan penetapan yang memerintahkan juru sita pengadilan dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran kepada termohon di tempat tinggal termohon.
12. Juru sita disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah ketua pengadilan mendatangi termohon di tempat tinggal termohon paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan ketua pengadilan.
13. Dalam hal penitipan ganti kerugian diajukan dengan alasan objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan, juru sita memberitahukan adanya permohonan penitipan ganti kerugian kepada pejabat yang meletakkan sita atau pemegang jaminan hak tanggungan.
14. Juru sita menyampaikan langsung kepada termohon atau kuasanya kehendak untuk menawarkan pembayaran uang sejumlah nilai ganti kerugian yang diajukan pemohon kepada termohon berikut segala akibat dari penolakan penawaran pembayaran tersebut.
15. Juru sita membuat berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk menerima atau menolak uang ganti kerugian yang ditawarkan tersebut dengan ditandatangani oleh juru sita, saksi-

saksi dan termohon paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran.

16. Tidak ditandatanganinya berita acara oleh termohon tidak mempengaruhi keabsahan berita acara.
17. Salinan berita acara disampaikan pula kepada termohon dan pejabat yang meletakkan sita atau pemegang jaminan hak tanggungan.
18. Juru sita melaporkan pelaksanaan penawaran pembayaran ganti kerugian kepada ketua pengadilan melalui panitera dengan melampirkan berita acara pernyataan kesediaan untuk menerima atau menolak uang ganti kerugian paling lambat 2 (dua) hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran.
19. Dalam hal termohon menyatakan kesediaan untuk menerima uang ganti kerugian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan juru sita melalui panitera, untuk memanggil pemohon dan termohon yang memuat perintah kepada pemohon untuk menyerahkan uang ganti kerugian kepada termohon.
20. Dalam hal pemohon tidak hadir pada panggilan tersebut di atas, penyerahan uang ganti kerugian kepada termohon dilakukan oleh panitera.
21. Dalam hal termohon hadir, panitera membuat berita acara penyerahan uang ganti kerugian kepada termohon pada hari yang sama dengan serah terima uang ganti kerugian.
22. Dalam hal termohon tidak hadir pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 19, pengadilan melanjutkan proses penitipan uang ganti kerugian.
23. Dalam hal termohon menolak untuk menerima uang sejumlah nilai ganti kerugian yang ditawarkan untuk dibayar atau termohon yang semula menyatakan kesediaan menerima pembayaran uang ganti kerugian tidak hadir, ketua pengadilan menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan ganti kerugian yang memuat hal sebagai berikut:
    a. hari, tanggal dan waktu sidang;
    b. perintah kepada juru sita untuk memanggil pemohon, termohon dan pihak pejabat yang berwenang atau menjadi pemegang jaminan hak tanggungan; dan
    c. pemberitahuan akan dilakukan penyimpanan terhadap uang ganti kerugian di kas kepaniteraan pengadilan dalam hal

termohon kembali menolak penawaran.

24. Sidang tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan hari sidang.
25. Ketua pengadilan/hakim yang ditunjuk menerbitkan penetapan dengan amar:
    - *Mengabulkan permohonan Pemohon;*
    - *Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima;*
    - *Memerintahkan panitera untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon; dan*
    - *Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.*
26. Panitera membuat berita acara penyimpanan penitipan uang ganti kerugian yang ditandatangani oleh panitera dan 2 (dua) orang saksi serta pemohon dalam hal pemohon hadir dengan menyebutkan jumlah dan rinciannya untuk dicatat dalam buku kas kepaniteraan pengadilan, sebagai uang penitipan ganti kerugian pada hari yang sama dengan pengucapan penetapan ketua pengadilan.
27. Dalam hal pemohon, termohon dan/atau pihak pejabat yang berwenang atau menjadi pemegang jaminan hak tanggungan tidak hadir pada sidang, tidak menghalangi dilakukannya penyimpanan uang ganti kerugian.
28. Dalam hal dikemudian hari termohon bersedia menerima isi penetapan, panitera pengadilan menyerahkan uang ganti kerugian sesuai dengan isi penetapan kepada termohon.
29. Penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian wajib diselesaikan dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan terregistrasi oleh kepaniteraan pengadilan hingga penyampaian salinan penetapan ketua pengadilan tentang penerimaan permohonan.
30. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal atau berkedudukan di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani permohonan, proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui

prosedur sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung.[681]

31. Dalam hal pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak diketahui namanya (*no name*), penawaran, pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs *web* pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik.
32. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal atau berkedudukan di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani permohonan, proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi, penanganan delegasi panggilan/pemberitahuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung tentang penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan dengan tetap berpedoman pada jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 29.[682]
33. Hasil cetak (*print out*) dokumen elektronik relaas panggilan/pemberitahuan yang dikirimkan melalui surat elektronik atau *faksimile* merupakan relaas panggilan yang sah dan dapat dijadikan dasar bagi ketua pengadilan untuk melangsungkan proses pemeriksaan.[683]
34. Tata cara penyerahan uang konsinyasi:
    a. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atau menolak ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti kerugian dapat diambil di kepaniteraan pengadilan dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak disertai dengan surat pengantar dari

---

[681] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
[682] Pasal 29A ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2021
[683] Pasal 29A ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2021

ketua pelaksana pengadaan tanah.[684]

b. Dalam hal pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaaan pihak yang berhak secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa atau nama lainnya.

c. Dalam hal pihak yang berhak telah diketahui keberadaannya, pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengambil ganti kerugian disertai dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah.

d. Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian.[685]

e. Dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau sita telah diangkat.[686]

f. Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, ganti kerugian dapat diambil di kepaniteraan pengadilan setelah adanya persetujuan dari pihak bank.[687]

OO. RAHASIA DAGANG[688]

a. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

b. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

c. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi,

---

[684] PERMA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
[685] Pasal 32 PERMA Nomor 2 Tahun 2024
[686] Pasal 33 PERMA Nomor 2 Tahun 2024
[687] Pasal 34 PERMA Nomor 2 Tahun 2024
[688] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

d. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

e. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:
   1) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
   2) Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

f. Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial, berupa:
   1) gugatan ganti rugi; dan/atau
   2) penghentian semua perbuatan.

g. Selain penyelesaian melalui gugatan para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

h. Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat ke pengadilan negeri, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan, berupa:[689]
   a. gugatan ganti rugi; dan/atau
   b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

i. Syarat diterapkannya ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum:
   a. perbuatan sengaja atau lalai;
   b. melanggar hak atau kepentingan yang dilindungi hukum milik orang lain;
   c. kerugian nyata;
   d. terbukti nyata ada akibat dari perbuatan tersebut yang

[689] Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

menyebabkan kerugian.

j. Tata cara perhitungan besaran kerugian:

1) Keuntungan yang sesungguhnya dapat diperoleh pemegang hak ekonomi dan hak moral

Rumus:

Jumlah kerugian = profit per unit X jumlah penjualan barang yang diduga melanggar.

2) Keuntungan yang didapat oleh pelanggar dengan pelanggaran itu

Rumus:

Jumlah kerugian = profit perunit pelanggar X volume penjualan

Rumus lanjutan:

Jumlah kerugian = omset pelanggar – biaya (bahan baku)

3) Royalti yang sesungguhnya diterima oleh pemegang hak

Rumus :

Jumlah kerugian = total penjualan produk yang diduga melanggar X tarif royalti

Rumus lanjutan:

Jumlah kerugian = volume penjualan produk yang diduga melanggar X royalti per unit

PP. VARIETAS TANAMAN.[690]

a. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

b. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

c. Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

d. suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan

---

[690] UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

e. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

f. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

g. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

h. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penanaman yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:
   1) nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
   2) pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
   3) penanaman varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
   4) apabila penanaman tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kantor PVT berhak menolak penanaman tersebut dan meminta penanaman baru;
   5) apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
   6) nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

j. Jangka waktu PVT:
   1) 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
   2) 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

k. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.

l. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

m. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

n. Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

o. Pemegang hak PVT berkewajiban:
   1) melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
   2) membayar biaya tahunan PVT;
   3) menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

p. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:
   1) penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
   2) penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan peneliatan, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
   3) penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

q. Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas.

r. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:

1) pemulia;
2) orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
3) ahli waris; atau
4) konsultan PVT.

s. Permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) diajukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;
2) dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 3 (tiga) bulan;
3) dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri;
4) dilengkapi salinan penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.

t. Selain kebenaran alasan lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:
1) Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak berhasil.
2) Pengadilan negeri menilai bahwa hak PVT tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat.

u. Pemeriksaan atas permohonan lisensi wajib dilakukan oleh pengadilan negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari kantor PVT dan pemegang hak PVT yang bersangkutan.

v. Lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari hak PVT.

w. Apabila berdasarkan bukti serta pendapat pengadilan negeri memperoleh keyakinan bahwa belum cukup jangka waktu bagi pemegang hak PVT untuk menggunakannya secara komersial di Indonesia, pengadilan negeri dapat menetapkan penundaan

untuk sementara waktu proses persidangan tersebut atau menolaknya.

x. Pelaksanaan lisensi wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh pemegang lisensi wajib kepada pemegang hak PVT. Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya ditetapkan pengadilan negeri.

y. Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari kekayaan intelektual namun proses pemeriksaan perkaranya dilakukan di Pengadilan Negeri.[691]

z. Dalam putusan pengadilan negeri mengenai pemberian lisensi wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
   1) alasan pemberian lisensi wajib;
   2) bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib;
   3) jangka waktu lisensi wajib;
   4) besarnya royalti yang harus dibayarkan pemegang lisensi wajib kepada pemegang hak PVT dan tata cara pembayarannya;
   5) syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
   6) lisensi wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri;
   7) lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak yang bersangkutan secara adil.

å. Perjanjian lisensi berisi hak yang diberikan oleh pemegang hak PVT selaku pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk melaksanakan 1 (satu) atau lebih dari beberapa kegiatan:
   1) memproduksi dan memperbanyak benih;
   2) menyiapkan untuk tujuan propagasi;
   3) mengiklankan;
   4) menawarkan;
   5) menjual dan memperdagangkan;
   6) mengekspor;
   7) mengimpor;
   8) mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5),

---

[691] Pasal 44 UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

angka 6) dan angka 7).

IV. PERDATA KHUSUS

RUANG LINGKUP

Yang termasuk dalam perkara perdata khusus, meliputi:

A. Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
B. Kekayaan Intelektual.
C. Perselisihan Hubungan Industrial.
D. Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
E. Gugatan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
F. Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase.
G. Gugatan Sengketa Partai Politik.
H. Gugatan Pembatalan Putusan Komisi Informasi Publik.
I. Gugatan Sengketa Organisasi Masyarakat.
J. Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen.
K. Gugatan Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi.
L. Permohonan Penetapan Sementara dalam Hak Kekayaan Intelektual.
M. Permohonan Penangguhan Sementara Yudisial Hak Kekayaan Intelektual.
N. Permohonan Pemeriksaan Yayasan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan.

A. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG[692]

1. Kepailitan
    a. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit
        1) Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor.
        2) Tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
        3) Pemohon Pernyataan Pailit adalah:
            a) Kreditor:

[692] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(1) perorangan;

(2) badan hukum.

b) Debitor:

(1) perorangan;

(2) badan hukum.

Permohonan yang diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, diajukan atas persetujuan suami atau isteri. Kecuali apabila dalam perkawinan ada perjanjian kawin (tidak ada percampuran harta).[693]

c) Kejaksaan, apabila diajukan untuk kepentingan umum.

d) OJK, apabila debitornya suatu bank, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring dan penjaminan, perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, Danantara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, koperasi yang menjalankan usaha lembaga keuangan mikro (LKM).[694]

e) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian, apabila debitornya koperasi.[695]

4) Terhadap permohonan Kepailitan/PKPU yang masih dalam proses persidangan, pengurusan dan pemberesan (dalam Perkara Kepailitan) maupun dalam proses pengurusan (dalam perkara PKPU) tidak dapat diajukan lagi permohonan yang baru terhadap debitor yang sama.

5) Kepailitan/PKPU yang ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat permohonan kepailitan/permohonan PKPU dapat diajukan kembali.[696]

b. Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit

---

[693] Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

[694] UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

[695] SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

[696] Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Kelengkapan administrasi pendaftaran perkara permohonan pernyataan pailit sebagaimana tercantum dalam daftar persyaratan *(checklist)*:[697]

1) Permohonan oleh debitor
    a) Permohonan oleh debitor perorangan
        (1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat domisili pemohon.
        (2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.
        (3) Surat kuasa khusus.
        (4) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.
        (5) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.
        (6) Surat tanda bukti diri pemohon/prinsipal (KTP/paspor/SIM).
        (7) Akta perkawinan/buku nikah yang dilegalisir.
        (8) Surat persetujuan suami/isteri jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta.
        (9) Daftar harta kekayaan dan kewajiban.
        (10) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.
        (11) Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
        (12) Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
        (13) Dalam permohonan pernyataan pailit

[697] SK KMA Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
   - Independen;
   - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
   - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
   - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
   - bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
   - kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
   - menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus).

(e) Menyerahkan surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor,

kecuali BHP atas penunjukan pengadilan niaga.

(f) Kurator yang ditunjuk wajib hadir dalam persidangan.

(14) Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

(15) Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

(16) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(17) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara Elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

b) Permohonan oleh debitor badan hukum: Perseroan Terbatas (PT), yayasan dan koperasi

(1) Perseroan Terbatas (PT)

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT harus mendapat persetujuan dari RUPS[698] sedangkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan Terbatas harus mendapat Persetujuan RUPS[699] .

(2) BUMN/BUMD

BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

---

[698] Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[699] Penjelasan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

(a) Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

(b) Perusahaan Perseroan

Selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

(c) Dalam hal Debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham (Perum), permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

(d) Dalam hal Debitor adalah BUMN berbentuk perseroan, permohonan pernyataan pailit tidak harus diajukan oleh Menteri Keuangan.

(3) Yayasan

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus yayasan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(4) Koperasi

(a) Permohonan pernyataan pailit/PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.

(b) Permohonan pernyataan pailit/PKPU terhadap koperasi yang menjalankan usaha LKM yang izinnya dari OJK hanya dapat diajukan oleh OJK.

(5) Kelengkapan persyaratan permohonan pernyataan pailit oleh debitor badan hukum

(a) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan/domisili termohon.

(b) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.

(c) Surat kuasa khusus dari direksi/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

(d) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(e) Berita acara sumpah dari ketua pengadilan tinggi.

(f) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor PT, permohonan harus didasarkan keputusan RUPS dan ditandatangani oleh dewan direksi atau sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(g) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus yayasan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(h) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh

pengurus koperasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(i) Melampirkan AD/ART jika ada termasuk perubahannya.

(j) Hasil Keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

(k) Daftar harta kekayaan dan kewajiban.

(l) Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh auditor publik.

(m) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

- Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
- Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
- Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
- Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
  - Independen;
  - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
  - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
  - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
  - bersedia mengundurkan diri

apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus.

– Menyerahkan surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor, kecuali BHP atas penunjukan pengadilan niaga[700].

(n) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(o) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(p) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

---

[700] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

c) Permohonan oleh debitor persekutuan perdata: CV, firma dan persekutuan perdata lainnya

(1) *Commanditaire Vennootschap* (CV)

(a) Persekutuan Komanditer *(commanditaire vennotschaap)* yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

(b) Kepengurusan dalam CV dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yaitu persero aktif dan persero pasif.

(c) CV yang dinyatakan pailit yang bertanggungjawab hukum adalah sekutu komplementer, sebab sekutu inilah yang mempunyai kewajiban untuk membayar semua utangnya, sekutu komanditer hanya bertanggungjawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan.

(2) Persekutuan *firma*

(a) Persekutuan firma yang selanjutnya disebut firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.

(b) Firma bukan perorangan dan/atau bukan badan hukum, oleh karena itu persekutuan firma tidak dapat dipailitkan baik melalui permohonan sendiri maupun permohonan pihak lain. Namun yang dapat dimohonkan pailit adalah anggota firma tersebut.

(3) Persekutuan perdata

(a) Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak

atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

(b) Persekutuan perdata terbentuk apabila 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu berupa uang, barang atau tenaga/keahlian untuk membentuk suatu kerjasama.

(c) Persekutuan perdata bukan badan hukum sehingga tidak dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditornya. Namun yang dapat dimohonkan pailit adalah anggota persekutuan perdata tersebut.

(4) Kelengkapan persyaratan permohonan pernyataan pailit oleh debitor CV, firma dan persekutuan perdata lainnya

(a) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum kedudukan pemohon.

(b) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.

(c) Surat kuasa khusus dari pengurus persero (sesuai dengan AD/ART).

(d) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(e) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(f) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua pengurus aktif (komplementer).

(g) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh firma (semua sekutu firma).

(h) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor persekutuan

perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus/pemilik persekutuan perdata lainnya.

(i) Akta pendirian perusahaan.

(j) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(k) Daftar harta kekayaan dan kewajiban.

(l) Neraca keuangan terakhir.

(m) Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

- Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
- Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
- Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
- Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
  - Independen;
  - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
  - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
  - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
  - bersedia mengundurkan diri

apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus.

– Menyerahkan surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor, kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.

(n) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(o) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(p) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

d) Permohonan oleh debitor (bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga klirring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun)

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan

secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.

(2) Permohonan pernyataan pailit terhadap bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun hanya dapat diajukan oleh OJK.

(3) Dalam hal OJK diwakili oleh karyawan OJK dilengkapi surat tugas dari Pimpinan OJK.

(4) Dalam hal OJK memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh pimpinan OJK dengan melampirkan:
   (a) Izin beracara advokat dari organisasi profesi advokat yang masih berlaku.
   (b) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(5) Akta pendirian perusahaan debitor.

(6) AD/ART debitor termasuk jika ada perubahannya.

(7) Daftar harta kekayaan dan kewajiban debitor.

(8) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.

(9) Neraca keuangan terakhir debitor.

(10) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:
   (a) Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
   (b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
- Independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus.

(e) Menyerahkan surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor, kecuali BHP atas penunjukan pengadilan niaga[701].

(11) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

---

[701] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(12) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(13) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

e) Permohonan oleh debitor BUMN/BUMD yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab[702]

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum kedudukan pemohon.

(2) Surat tugas dari Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab.

(3) Dalam hal Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan:

(a) Izin beracara advokat dari organisasi profesi advokat yang masih berlaku.

(b) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(4) Akta pendirian perusahaan debitor.

(5) AD/ART debitor termasuk jika ada perubahannya.

(6) Daftar harta kekayaan dan kewajiban debitor.

(7) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau

---

[702] Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU PKPU

bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.

(8) Neraca keuangan terakhir debitor.

(9) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- Independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor

telepon dan KTP masing-masing Kurator/Pengurus.

(e) Menyerahkan surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor, kecuali BHP atas penunjukan pengadilan niaga[703].

(10) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(11) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(12) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

2) Permohonan oleh kreditor

a) Permohonan oleh kreditor perorangan

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/kedudukan termohon.

(2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.

(3) Surat kuasa khusus.

(4) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(5) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

---

[703] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(6) Surat tanda bukti diri pemohon/prinsipal (KTP/paspor/ SIM).

(7) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- Independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing

Kurator/Pengurus[704].

(8) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(9) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(10) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

b) Permohonan oleh kreditor badan hukum: PT, yayasan dan koperasi (pengajuan pailit terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap koperasi yang menjalankan usaha LKM yang ijinnya dari OJK hanya dapat diajukan oleh OJK.)[705]

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/kedudukan termohon.

(2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.

(3) Surat kuasa khusus dari direksi/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

---

[704] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

[705] SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

(4) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(5) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(6) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(7) Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(8) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- Independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen

pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;

- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[706].

(9) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(10) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(11) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

c) Permohonan oleh kreditor persekutuan perdata: CV, firma dan persekutuan perdata lainnya

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat domisili/kedudukan termohon.

(2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh prinsipal dan advokat.

(3) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi advokat.

(4) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

---

[706] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(5) Surat kuasa khusus dari persero/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

(6) Akta pendirian perusahaan.

(7) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(8) Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(9) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[707].

(10) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(11) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(12) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

d) Permohonan oleh kreditor: pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya, hanya dapat diajukan oleh OJK.[708]

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan/ domisili termohon.

---

[707] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

[708] Pasal 6, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUK PKPU

(2) Surat tugas dari direksi/pimpinan.

(3) Direksi/pimpinan memberi kuasa kepada advokat dengan surat kuasa khusus yang harus ditandatangani oleh direksi/pimpinan, dengan melampirkan:
   (a) Izin beracara advokat dari organisasi profesi advokat yang masih berlaku.
   (b) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(4) Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(5) AD/ART pemohon/prinsipal termasuk jika ada perubahannya.

(6) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:
   (a) Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
   (b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
   (c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
   (d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
      - independen;
      - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
      - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
      - tidak sedang menjalani sanksi berat

yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator / pengurus;

- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[709].

(7) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(8) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(9) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

e) Permohonan oleh kreditor BUMN/BUMD yang bergerak di bidang kepentingan publik.[710]

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan

---

[709] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

[710] Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan/domisili termohon.

(2) Surat tugas dari Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab.

(3) Dalam hal Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab (dengan melampirkan: izin beracara advokat dari organisasi advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi).

(4) Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(5) AD/ART pemohon/prinsipal termasuk jika ada perubahannya.

(6) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;

- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator / pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing Kurator / Pengurus[711].

(7) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(8) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(9) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

---

[711] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

f) Permohonan diajukan oleh kejaksaan (selaku kreditor) untuk kepentingan umum.[712]

(1) Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, antara lain:
   (a) debitor melarikan diri;
   (b) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
   (c) debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
   (d) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
   (e) debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
   (f) dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

(2) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum berdomisili/ berkedudukan termohon.

(3) Surat tugas dari Jaksa Agung.

(4) Dalam hal jaksa memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh Jaksa Agung dengan melampirkan:
   (a) Izin beracara advokat dari organisasi profesi advokat yang masih berlaku.
   (b) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(5) Akta pendirian perusahaan debitor.

(6) Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau

---

[712] Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(7) AD/ART debitor termasuk jika ada perubahannya.

(8) Daftar utang debitor.

(9) Bukti awal adanya kepentingan umum yang dilanggar.

(10) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator / pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen

pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.

- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[713].

(11) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(12) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(13) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

g) Permohonan diajukan oleh kurator.

(1) Kurator yang mewakili kepentingan debitor pailit dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pihak ketiga.

(2) Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas berupa penetapan.

(a) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum

---

[713] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

berdomisili/kedudukan termohon.

(b) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.

(c) Surat kuasa khusus.

(d) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(e) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(f) Surat tanda bukti diri pemohon/prinsipal (KTP/paspor/ SIM).

(g) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

- Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
- Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
- Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
- Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
  - independen;
  - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
  - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
  - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;

- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[714].

(3) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(4) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(5) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

a. Kelengkapan Administrasi Pendaftaran Permohonan PKPU

1) Permohonan PKPU oleh Debitor

a) Permohonan oleh debitor perorangan

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan

---

[714] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/kedudukan termohon.

(2) Permohonan harus ditandatangani oleh debitor dan advokatnya.

(3) Surat kuasa khusus.

(4) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(5) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

(6) Surat tanda bukti diri pemohon/prinsipal (KTP/paspor/ SIM).

(7) Akta perkawinan/buku nikah yang dilegalisir.

(8) Surat persetujuan suami/isteri jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta).

(9) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.

(10) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(11) Bila ada, dapat dilampirkan rencana perdamaian.

(12) Dalam permohonan PKPU, pemohon dapat mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk, antara lain:

- independen;
- tidak mempunyai benturan

kepentingan dengan para pihak;

- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing Kurator/Pengurus.

(e) Harus ada persetujuan dari kreditor termohon.

(13) Permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus[715].

(14) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(15) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(16) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak

[715] Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

b) Permohonan oleh debitor badan hukum: PT, yayasan dan koperasi

(1) PT

Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT harus mendapat persetujuan dari RUPS.

(2) BUMN/BUMD

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

(a) Perum

Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

(b) Perusahaan perseroan

Selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

(c) Dalam hal debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham (Perum), permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

(d) Dalam hal debitor adalah BUMN berbentuk perseroan, permohonan pernyataan pailit tidak harus diajukan oleh Menteri Keuangan.

(3) Yayasan

Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus yayasan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(4) Koperasi

(a) Permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.

(b) Permohonan PKPU terhadap koperasi yang menjalankan usaha LKM yang izinnya dari OJK hanya dapat diajukan oleh OJK.

(5) Kelengkapan persyaratan permohonan PKPU oleh debitor badan hukum

(a) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan termohon.

(b) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh debitor dan advokat.

(c) Surat kuasa khusus dari direksi/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

(d) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(e) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

(f) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor PT maka permohonan harus ditandatangani oleh dewan direksi atau

sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(g) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor yayasan maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus yayasan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar.

(h) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus koperasi sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar.

(i) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(j) Hasil keputusan RUPS/RUPSLB untuk mengajukan permohonan PKPU.

(k) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.

(l) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(m) Neraca keuangan terakhir.

(n) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
- Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor.
- Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
- Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:
  - independen;
  - tidak mempunyai benturan

kepentingan dengan para pihak;

- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru.
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus.
- harus ada persetujuan dari kreditor termohon;
- permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus[716];

(o) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

---

[716] Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(p) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(q) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

c) Permohonan oleh debitor persekutuan perdata: CV, firma dan persekutuan perdata lainnya

1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri diwilayah hukum tempat kedudukan pemohon PKPU.
2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh debitor dan advokatnya.
3) Surat kuasa khusus dari pengurus dan persero (sesuai dengan AD/ART).
4) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.
5) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.
6) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor CV, permohonan harus ditandatangani oleh semua pengurus aktif (komplementer).
7) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh firma (semua sekutu firma).
8) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor persekutuan perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus/pemilik persekutuan perdata

lainnya.

9) Akta pendirian perusahaan.
10) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.
11) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
12) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
13) Neraca keuangan terakhir.
14) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    (a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
    (b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
    (c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
    (d) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:
        - independen;
        - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
        - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;
        - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus;
        - bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
        - pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU

kepada pengurus yang baru.

- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing Kurator/Pengurus.

(e) Harus ada persetujuan dari kreditor.

(f) Permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus[717].

15) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

16) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

17) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

d) Permohonan oleh OJK untuk kepentingan debitor (bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, Danantara, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang menjalankan usaha LKM yang ijinnya dari OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK:

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.

---

[717] Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(2) Surat tugas dari pimpinan OJK.

(3) Dalam hal OJK memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh pimpinan OJK dengan melampirkan:
   (a) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.
   (b) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.
   (c) Akta pendirian perusahaan debitor.
   (d) AD/ART debitor termasuk jika ada perubahannya;
   (e) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
   (f) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
   (g) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.
   (h) Neraca keuangan terakhir debitor.

(4) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   (a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
   (b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
   (c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
   (d) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:
      - independen;
      - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
      - tidak sedang menangani lebih dari 3

(tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;

- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator / pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar.
- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
- harus ada persetujuan dari kreditor termohon;
- permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[718].

(5) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(6) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(7) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara

[718] Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

2) Permohonan PKPU oleh Kreditor

a) Permohonan oleh kreditor perorangan

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri tempat kedudukan/domisili termohon.

(2) Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.

(3) Surat kuasa khusus.

(4) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(5) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

(6) Surat tanda bukti diri pemohon/prinsipal (KTP/paspor/SIM).

(7) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(8) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:

- independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;

- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
- permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[719].

(9) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(10) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(11) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

b) Permohonan oleh kreditor badan hukum: PT, yayasan dan koperasi

(1) Permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi

[719] Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.

(2) Permohonan PKPU terhadap koperasi yang menjalankan usaha LKM yang ijinnya dari OJK hanya dapat diajukan oleh OJK.

(3) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/kedudukan termohon.

(4) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh kreditor dan advokat.

(5) Surat kuasa khusus dari direksi/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

(6) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(7) Berita Acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

(8) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor PT, permohonan harus ditandatangani oleh dewan direksi atau sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(9) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus yayasan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar.

(10) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus koperasi sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar.

(11) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(a) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(b) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan

syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(2) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(3) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(4) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:
   - independen;
   - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
   - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;
   - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
   - bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
   - pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
   - permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;
   - menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-

masing kurator/pengurus[720].

(12) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(13) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(14) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

c) Permohonan oleh kreditor persekutuan perdata: CV, firma dan persekutuan perdata lainnya.

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/tempat kedudukan termohon.

(2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh kreditor dan advokat.

(3) Surat kuasa khusus dari persero/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

(4) Ijin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(5) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

(6) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor CV, permohonan harus ditandatangani oleh semua pengurus aktif (komplementer).

---

[720] Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(7) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh firma (semua sekutu firma).

(8) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor persekutuan perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus/pemilik persekutuan perdata lainnya.

(9) Akta pendirian perusahaan.

(10) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(11) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih

(12) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator/pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:

- independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti

pernyataannya tersebut tidak benar;

- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
- permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[721].

(13) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(14) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(15) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

d) Permohonan oleh OJK (untuk kepentingan kreditor) terhadap bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, Danantara dan koperasi (yang menjalankan usaha LKM) yang ijinnya dari OJK.

(1) surat permohonan bermeterai diajukan secara

[721] Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/tempat kedudukan termohon;

(2) surat tugas dari direksi/pimpinan;

(3) dalam hal direksi/pimpinan memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh direksi/pimpinan dengan melampirkan:
   (a) ijin beracara dari organisasi profesi advokat yang masih berlaku;
   (b) berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;
   (c) bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
   (d) AD/ART pemohon/prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
   (e) surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.

(4) dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   (a) orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia;
   (b) memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus;
   (c) terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu;
   (d) harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:
      - independen;
      - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
      - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;

- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
- permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing Kurator/Pengurus[722].

(5) surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip;

(6) permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik;

(7) permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Desain Industri[723]

a. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,

---

[722] Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

[723] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan.

b. Desain yang dilindungi adalah desain industri yang baru.

c. Desain industri dianggap baru, apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
   - Untuk menentukan unsur baru/*novelty* dinilai dari unsur-unsur penampakan/*visual features* yang terlihat bukan pada adanya persamaan pada unsur-unsur fungsional/*functional features* produk tersebut, mata adalah penilai yang paling tepat untuk memperoleh suatu kesan umum dari objek secara keseluruhan.
   - Pengembangan dari suatu design yang terdaftar dapat dianggap suatu *novelty*.

d. Fotocopy sertifikat yang diajukan sebagai bukti di persidangan harus sesuai dengan asli termasuk warna aslinya.

e. Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:
   1) Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
   2) Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
   3) Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
   4) Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
   5) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan

dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

6) Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
7) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
8) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
9) Ketentuan tersebut berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
10) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
11) Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.
12) Dikecualikan dari ketentuan adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.
13) Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
14) Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:

a) 1 (satu) desain industri; atau
b) beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.

15) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa.
16) Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.
17) Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
18) Permohonan dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri disertai terjemahannya dalam bahasa indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas.
19) Apabila syarat tidak dipenuhi, permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.
20) Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan, kepada pengadilan niaga di wilayah hukum domisili/kedudukan tergugat.
21) Putusan pengadilan niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain industri disampaikan kepada direktorat jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal putusan diucapkan.
22) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
23) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang

ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

24) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.
25) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
26) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah gugatan didaftarkan.
27) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
28) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
29) Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
30) Salinan putusan pengadilan niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.
31) Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat dimohonkan kasasi.
32) Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
33) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal

permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

34) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

35) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan kasasi didaftarkan.

36) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kontra memori kasasi diterimanya.

37) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah lewatnya jangka waktu.

38) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

39) Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.

40) Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

41) Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain industri

yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya.

42) Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan, berupa:
    a) gugatan ganti rugi; dan/atau
    b) penghentian semua perbuatan.
43) Gugatan diajukan ke pengadilan niaga di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Tergugat.
44) Selain penyelesaian gugatan para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
45) Tata cara gugatan berlaku sebagaimana hukum acara perdata gugatan biasa.
46) Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:
    a) pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri;
    b) penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri.
47) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga di wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran KI dengan syarat sebagai berikut:
    a) Melampirkan bukti kepemilikan KI.
    b) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat telah terjadinya pelanggaran KI.
    c) Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian.
    d) Menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

48) Dalam hal surat penetapan sementara telah dilaksanakan, pengadilan niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

49) Dalam hal Hakim pengadilan niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

50) Dalam hal penetapan sementara pengadilan niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

2. Merek dan Indikasi Geografis[724]

a. Penghapusan

1) Penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek, prakarsa Menteri yang berwenang untuk itu.

2) Gugatan penghapusan merek terdaftar dapat diajukan ke pengadilan niaga dengan alasan:

a) merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang;

b) merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan pendaftaran termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

b. Pembatalan

1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.[725]

2) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

---

[724] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[725] Pasal 20 dan atau Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

tanggal pendaftaran merek, kecuali apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

3) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur itikad tidak baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum.

4) Gugatan terhadap pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengen merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan prinsip legistik.[726]

5) Terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dapat diajukan kasasi.

6) Panitera pengadilan niaga segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersangkutan.

c. Persamaan pada pokoknya dilihat dari:

1) Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain.

2) Menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

d. Kriteria merek terkenal adalah:

1) Sejauh mana pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

2) Reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar.

3) Investasi di beberapa negara yang dibuktikan pemilik dengan sertifikat.

---

[726] Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

4) Hasil survei lembaga independen.

5) Terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dengan cara mengajukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal KI.[727]

e. Penyelesaian sengketa

1) Gugatan pembatalan merek:

a) Gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan itikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu.[728]

b) Gugatan pembatalan terhadap merek terkenal yang tidak sejenis dinyatakan tidak berlaku, setelah diundangkannya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.[729]

c) Terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan sebelum tanggal 25 November 2016, tunduk pada Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan pada dan/atau setelah tanggal 25 November 2016, tunduk pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[730]

d) Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum berlaku

---

[727] Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1 b) UU No. 15 Tahun 2001

[728] Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[729] Huruf B angka 2 (d) lampiran SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 Tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 juncto pasal 16 ayat (2) huruf c juncto pasal 19 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016)

[730] Pasal 105 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan.

2) Gugatan atas pelanggaran merek:
   a) Selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan niaga para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
   b) Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
      (1) gugatan ganti rugi; dan/atau
      (2) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
   c) Gugatan sebagaimana dimaksud dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3) Tata cara gugatan pelanggaran merek
   a) Gugatan pelanggaran merek diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
   b) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia, Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
   c) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
   d) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.
   e) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud, ketua pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

f) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah gugatan didaftarkan.

g) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah perkara diterima oleh majelis hakim dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

h) Isi putusan pengadilan niaga dimaksud wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud.

i) Terhadap putusan pengadilan niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi.

f. Indikasi Geografis[731]

1) Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

2) Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

3) Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh menteri.

---

[731] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

4) Indikasi geografis dapat dimohonkan pendaftaran oleh:
   a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa:
      (1) sumber daya alam;
      (2) barang kerajinan tangan; atau
      (3) hasil industri.
   b) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
5) Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftar jika:
   a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
   b) menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
   c) merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
6) Permohonan indikasi geografis ditolak jika:
   a) dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
   b) memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.
7) Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.
8) Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftar jika:[732]
   a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
   b) menyesatkan atau memperdaya masyarakat

[732] Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016

mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan

c) merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

9) Permohonan indikasi geografis ditolak jika:[733]

a. dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau

b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

10) Pelanggaran atas indikasi geografis mencakup:

a) pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis;

b) pemakaian suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:

(1) menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis;

(2) mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau

(3) mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis.

c) pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;

d) pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar;

e) peniruan atau penyalahgunaan yang dapat

---

[733] Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016

menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:

(1) pembungkus atau kemasan;
(2) keterangan dalam iklan;
(3) keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
(4) informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
(5) tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

g. Gugatan terhadap pelanggaran indikasi geografis

1) Terhadap pelanggaran atas indikasi geografis dapat diajukan gugatan.
2) Gugatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh:
   a) setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis; dan/atau
   b) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.
3) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.
4) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah terdaftar sebagai Merek, menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.
5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

6) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek.

7) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.

8) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan dapat diajukan kepada pengadilan niaga.

9) Terhadap putusan pengadilan niaga atas keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan, dapat diajukan kasasi.

10) Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

11) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

3. Paten[734]

a. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain dalam melaksanakannya.

b. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri.

c. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

d. Perlindungan paten meliputi:

---

[734] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

1) paten adalah diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri; dan
2) paten sederhana adalah diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

e. Pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonan, tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten.

f. Pihak yang melaksanakan suatu invensi sebagaimana dimaksud diakui sebagai pemakai terdahulu.

g. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari invensi yang dimohonkan paten.

h. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
1) dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
2) dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1.

i. Larangan menggunakan proses produksi yang diberi paten, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan paten.

j. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten dan tidak bersifat komersial.

k. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

l. Jangka waktu paten tidak dapat diperpanjang.

m. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

n. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

o. Jangka waktu paten sederhana tidak dapat diperpanjang.

p. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

q. Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila:

   1) Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten seharusnya tidak diberikan.

   2) Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama.

   3) Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara, yang merugikan kepentingan masyarakat.

   4) Pihak yang berhak mengajukan pembatalan paten adalah:

      a) pihak ketiga;

      b) kejaksaan dalam hal pemegang paten atau penerima lisensi wajib.

   5) Putusan atas gugatan pembatalan paten harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja setelah tanggal gugatan dibatalkan.

r. Permohonan banding paten

   1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap:

      a) penolakan permohonan;

      b) koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten; dan/atau

      c) keputusan pemberian paten.

   2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding paten dengan tembusan yang disampaikan kepada menteri

dengan dikenai biaya.

3) Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan.
4) Apabila pemohon atau kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.
5) Komisi banding paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap penolakan permohonan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
6) Dalam permohonan banding harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan.
7) Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.
8) Keputusan komisi banding paten ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding.
9) Dalam hal komisi banding paten memutuskan untuk menerima permohonan banding terhadap penolakan permohonan maka menteri akan menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat paten.
10) Dalam hal permohonan banding terhadap penolakan permohonan diterima, menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
11) Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan komisi banding paten ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.
12) Pemberitahuan penolakan meliputi penolakan permohonan banding paten terhadap:
    a) penolakan permohonan;

b) koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar; dan

c) keputusan pemberian paten.

13) Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut, hanya dapat diajukan kasasi.

14) Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

a) permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri;

b) putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c) putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten; atau

d) pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

15) Pihak yang berhak memperoleh paten dapat menggugat ke pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten.

16) Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan.

17) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten.

18) Gugatan didaftarkan kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

19) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

20) Ketua pengadilan niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

21) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

22) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling

lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

23) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika:
    a) produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi paten dimaksud merupakan produk baru; atau
    b) produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud.
24) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan, pengadilan niaga berwenang:
    a) memerintahkan kepada pemegang paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
    b) memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi paten.
25) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan, hakim wajib menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh pelindungan terhadap proses yang telah diuraikan di persidangan.
26) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan, hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.
27) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
28) Putusan atas gugatan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
29) Pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
30) Pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan

putusannya tentang penghapusan paten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.

31) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari pengadilan niaga.
32) Dalam hal salinan putusan pengadilan tidak disampaikan oleh ketua pengadilan niaga, menteri tidak wajib mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
33) Tata cara gugatan sebagaimana hukum acara perdata biasa
34) Terhadap putusan pengadilan niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi.
35) Permohonan kasasi didaftarkan kepada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi.
36) Pengadilan niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
37) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
38) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari sejak memori kasasi diterima.
39) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi
40) Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.
41) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari

setelah lewat jangka waktu

42) Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.
43) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.
44) Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
45) Putusan kasasi sebagaimana dimaksud harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
46) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan kasasi diucapkan.
47) Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib menyampaikan kepada:
    a) pemohon;
    b) termohon;
    c) menteri; dan/atau
    d) pihak yang berkepentingan.
48) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari pengadilan niaga.
49) Selain penyelesaian sengketa sebagaimana diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
50) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51) Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.
52) Atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan paten, pengadilan niaga dapat

menerbitkan surat penetapan sementara untuk:

a) mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten;
b) mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
c) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

53) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran paten dengan persyaratan sebagai berikut:
   a) melampirkan bukti kepemilikan paten;
   b) melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran paten;
   c) melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
   d) menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
54) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat, panitera pengadilan niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan dimaksud dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua pengadilan niaga.
55) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara ketua pengadilan niaga menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
56) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan hakim harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
57) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim menerbitkan surat penetapan

sementara.

58) Surat penetapan sementara diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

59) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, Hakim memberitahukan penolakan dimaksud kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

60) Dalam hal pengadilan niaga menerbitkan surat penetapan sementara, pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.

61) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai paten dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan .

62) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim pengadilan niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara.

63) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
    a) uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
    b) pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran paten; dan/ atau
    c) pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran paten kepada pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

64) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara dimaksud.

65) Menteri sebagaimana tersebut diatas adalah menteri

yang berwenang untuk itu.

66) Hari sebagaimana tersebut diatas adalah hari kalender.

4. Hak Cipta[735]

a. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

c. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang mengekspresikan dalam bentuk nyata.

d. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

e. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,

---

[735] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dan pantomim;

6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7) karya seni terapan;
8) karya arsitektur;
9) peta;
10) karya seni batik atau seni motif lain;
11) karya fotografi;
12) potret;
13) karya sinematografi;
14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18) permainan video; dan
19) program komputer.

f. Perlindungan hak cipta termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

g. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

1) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

h. Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:
   1) hasil rapat terbuka lembaga negara;
   2) peraturan perundang-undangan;
   3) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
   4) putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
   5) kitab suci atau simbol keagamaan.

i. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:
   1) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
   2) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
   3) pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
   4) pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
   5) penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
   1) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
   2) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
   3) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
   4) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

k. Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

l. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, diatur dengan peraturan pemerintah.

n. Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan ketentuan ciptaan berupa:
   1) artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik dalam media cetak maupun media

elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh pencipta, atau berhubungan dengan penyiaran atau komunikasi atas suatu ciptaan;

2) laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan

3) karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

o. Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

p. Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu.[736]

q. Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.[737]

r. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:

1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

7) karya arsitektur;

8) peta;

9) karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

s. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1

---

[736] Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
[737] Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

januari tahun berikutnya.

t. Perlindungan Hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:
   1) karya fotografi;
   2) potret;
   3) karya sinematografi;
   4) permainan video;
   5) program komputer;
   6) perwajahan karya tulis;
   7) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
   8) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
   9) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
   10) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

u. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

v. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud berlaku tanpa batas waktu.

w. Masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman di Direktorat Jenderal Hak Cipta Kekayaan Intelektual.

x. Masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir.

y. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid ciptaan dianggap sebagai

ciptaan tersendiri. Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena:

1) permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.
2) Lampaunya waktu.
3) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait; atau
4) melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.

z. Penghapusan pencatatan ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf y angka 1 dikenai biaya sesuai ketentuan undang-undang.[738]

å. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2) Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga.
3) Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
4) Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
5) Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti Rugi.
6) Ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak

[738] Pasal 74 UU nomor 28 Tahun 2014

pidana hak cipta dan/atau hak terkait.

7) Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
8) Dalam hal ciptaan telah dicatat pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga.
9) Gugatan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta terdaftar.
10) Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta.
11) Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan .
12) Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
13) Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
14) Selain gugatan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
    a) meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan

ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi; dan/atau

b) penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

15) Pelanggaran hak siar berbasis teknologi dan informasi dalam perkara hak cipta/hak terkait :

a) Pihak yang menyiarkan program siaran untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di wilayah komersial tanpa izin pemegang hak adalah pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk didalamnya tindakan menyiarkan secara langsung pertunjukan dan pertandingan di lingkungan hotel tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual.

b) Besaran ganti rugi diputuskan oleh hakim berdasarkan perincian kerugian dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh oleh pelanggar dan kerugian pemegang hak kekayaan intelektual.

16) Pemusnahan/penghancuran terhadap barang – barang hasil pelanggaran dibidang kekayaan intelektual dapat dikabulkan apabila diminta dalam petitum gugatan dan dalam amar putusan disebutkan pemusnahan/penghancuran barang – barang tersebut.

17) Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga.

18) Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.

19) Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

20) Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.

21) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari sidang.
22) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
23) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
24) Dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
25) Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
26) Putusan pengadilan niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
27) Hari adalah hari kalender.

ä. Upaya Hukum

1) Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi.
2) Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
3) Permohonan didaftarkan pada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarannya ditetapkan oleh pengadilan.
4) Panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
5) Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
6) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi

kepada panitera pengadilan niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

7) Panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima memori kasasi.
8) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
9) Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima kontra memori kasasi.
10) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi,Mahkamah Agung menetapkan hari sidang.
11) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
12) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
13) Juru sita pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima putusan kasasi.
14) Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

ö. Penetapan sementara pengadilan.[739]

1) Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:
   a) mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan;
   b) menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
   c) mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
   d) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
2) Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:
   a) mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan;
   b) menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
   c) mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
   d) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
3) Dalam hal pengadilan niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana, pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
4) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat

[739] PERMA No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara

menyampaikan keterangan dan bukti mengenai hak cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan.

5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim pengadilan niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.

6) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:

a) uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;

b) pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta; dan/atau

c) pemohon dapat melaporkan pelanggaran hak cipta kepada pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

7) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu [740]

a. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan paling kurang 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

b. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, paling kuran 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

---

[740] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

c. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu.

d. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang original.

e. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan original apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

f. Hak Desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

g. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak tanggal penerimaan.

h. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

i. Perlindungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.

j. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

k. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

l. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

m. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua

pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

n. Ketentuan berlaku pula bagi desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

o. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

p. Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

q. Dikecualikan dari ketentuan adalah pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu.

r. Gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan kepada pengadilan niaga.

s. Putusan pengadilan niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

t. Gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

u. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

v. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera

dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

w. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.

x. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

y. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah gugatan didaftarkan.

z. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

å. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

ä. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

ö. Salinan putusan pengadilan niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

aa. Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat dimohonkan kasasi.

bb. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.

cc. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

dd. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada

panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan

ee. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan kasasi didaftarkan.

ff. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kontra memori kasasi diterimanya.

gg. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah lewatnya jangka waktu

hh. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

ii. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

jj. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

kk. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

ll. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

mm. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah putusan kasasi diterima.

nn. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan mengumumkannya dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

oo. Pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain tata letak sirkuit terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari desain tata letak sirkuit terpadu.

pp. Dalam hal pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

qq. Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak yang sebenarnya.

rr. Pemegang hak atau penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa:

1) gugatan ganti rugi; dan/atau
2) penghentian semua perbuatan.

ss. Gugatan diajukan ke pengadilan niaga.

tt. Selain penyelesaian gugatan para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

uu. Tata cara gugatan berlaku sebagaimana hukum acara perdata gugatan biasa.

C. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Pada persidangan pertama, nyata-nyata terbukti pengusaha tidak membayar upah dan hak-hak lainnya pekerja/buruh yang dikenakan skorsing oleh pengusaha, hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela yang memberi perintah kepada pengusaha untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja/buruh.
2. Apabila selama persidangan berlangsung pengusaha tidak melaksanakan putusan sela tersebut, hakim ketua sidang

memerintahkan sita jaminan terhadap harta milik pengusaha.

3. Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja maka PHI wajib memutus perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan tersebut dalam bentuk putusan sela.[741]
4. Putusan serta merta dapat dilakukan.[742]
5. Putusan PHI harus memuat:[743]
   a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
   b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
   c. ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/ tergugat yang jelas;
   d. pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
   e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
   f. amar putusan tentang sengketa;
   g. hari, tanggal putusan, nama hakim, hakim ad-hoc yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
6. Amar putusan harus jelas dan tegas serta dapat dilaksanakan.
7. Perkara diputus dalam tenggang waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama.[744]
8. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
9. Apabila terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) di antara majelis hakim, pendapat Hakim yang berbeda dimuat dalam pertimbangan putusan.
10. Amar putusan biaya perkara untuk nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dibebankan kepada Negara, untuk nilai gugatan Rp150.000.000,00 (seratus lima

---

[741] Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
[742] Pasal 180 HIR/191 RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
[743] Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
[744] Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

puluh juta) atau lebih yang penggugatnya diberi izin pengadilan beracara secara cuma-cuma, ditetapkan nihil, sedangkan untuk gugatan perselisihan kepentingan yang diajukan oleh pengusaha, biaya perkara dibebankan pengusaha tersebut.

11. Dalam perkara-perkara PHI yang alasan PHK masih dalam proses pengadilan pidana, perkara PHI tersebut harus ditunda sampai ada putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap.
12. Yang berhak menerima kuasa dari pekerja yang ingin mengajukan gugatan dalam perkara PHI sebagai berikut:
    a. pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan yang bersangkutan, dimana pekerja/buruh tersebut menjadi anggotanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota; atau
    b. pengurus federasi/serikat pekerja yang merupakan gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang terbentuk dalam perusahaan.
13. Sikap Mahkamah Agung dan pengadilan hubungan industrial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Nomor 37/PUU-IX/2011 dapat diterapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
14. Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi paling kurang pada tahap teguran/*aanmaning* yang kedua oleh ketua pengadilan negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi PHK.
16. Posita gugatan perselisihan hubungan industrial yang memuat dalil perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (*obscuur libel*) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan perselisihan hubungan industrial.
17. Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan PKWT.

18. TKA yang dilindungi hanya tenaga kerja asing yang telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
19. TKA yang jangka waktu IMTA-nya telah berakhir namun PKWT-nya masih berlaku sisa waktu PKWT tidak lagi mendapat perlindungan hukum.
20. Perselisihan mengenai pembatalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha (pemberi kerja) termasuk dalam pengertian perselisihan hak yang merupakan kewenangan PHI.
21. Pengadilan hubungan industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokal dengan perwakilan negara asing (kedutaan besar, kuasa usaha dan lain-lain) yang ada di Indonesia karena perwakilan negara asing adalah pemberi kerja.[745] Oleh karena itu terhadap perjanjian kerja yang dibuat perwakilan negara asing dengan tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokal berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
22. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah Menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan. Kelebihan waktu dalam proses PHI bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak.[746]
23. Dalam hal Debitor sudah dinyatakan pailit maka kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dinyatakan gugur.
24. Pekerja/buruh yang diangkat menjadi direksi dalam perusahaan yang sama melalui RUPS maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi direksi, dan pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan, kecuali diperjanjikan lain antara buruh yang diangkat menjadi direksi dengan perusahaan ditempat dia bekerja.

---

[745] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
[746] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

D. PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Permohonan keberatan diajukan dalam bentuk gugatan (bukan *volunteer).*
2. Diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU.[747]
3. Diajukan pada pengadilan niaga di tempat pelaku usaha berdomisili.
4. Pemeriksaan keberatan di pengadilan niaga dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan komisi.[748]
5. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal pemeriksaan dipandang sudah cukup, majelis hakim dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.[749]
6. Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada pengadilan niaga yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU.
7. Keberatan diperiksa dan diputus oleh hakim majelis.
8. Dalam hal keberatan diajukan oleh 1 (satu) pemohon keberatan atau lebih terhadap putusan KPPU yang sama dan terdapat terlapor lain dalam putusan KPPU tersebut yang tidak mengajukan keberatan, terhadap terlapor tersebut putusan KPPU berkekuatan hukum tetap.
9. Dalam pengajuan Keberatan, pemohon Keberatan wajib menyerahkan:
   a. surat kuasa;
   b. permohonan keberatan;
   c. salinan putusan KPPU; dan
   d. salinan jaminan bank yang dilegalisir yang jumlahnya disesuaikan dengan denda yang tersebut dalam amar putusan KPPU.
10. Keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi

---

[747] Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
[748] Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021 Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
[749] Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2021 Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

perkara elektronik sesuai dengan SIP.

11. Dalam hal Keberatan diajukan melalui SIP, proses pemanggilan atau pemberitahuan sidang, persidangan, pembacaan dan penyampaian putusan dilakukan secara elektronik.
12. Proses sebagaimana dimaksud diatas tidak memerlukan persetujuan KPPU.
13. Dalam hal terjadi penggabungan perkara maka panjar biaya perkara digabungkan menjadi 1 (satu) melalui penetapan ketua pengadilan niaga.
14. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan untuk putusan KPPU yang sama tapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, SIP secara otomatis akan mengarahkan kepada 1 (satu) pengadilan niaga untuk menangani perkara keberatan ini.
15. Dalam hal sistem telah menunjuk pengadilan niaga yang berwenang menangani perkara keberatan ini tidak diperlukan lagi ijin dari Mahkamah Agung.
16. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12 diatas tidak berlaku sepanjang fitur pada aplikasi pendaftaran perkara keberatan terhadap putusan KPPU pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 telah tersedia.
17. Setelah menerima keberatan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, ketua pengadilan niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha.
18. Dalam hal belum terdapat hakim bersertifikat persaingan usaha, ketua pengadilan niaga menunjuk majelis hakim yang pernah memutus perkara keberatan terhadap putusan KPPU.
19. Dalam hal belum terdapat hakim sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 perkara keberatan diperiksa oleh ketua pengadilan niaga secara *ex officio* sebagai ketua majelis.
20. Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi.[750]
21. Pemeriksaan Keberatan dilakukan terhadap aspek formil dan/atau materiil berdasarkan salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya.
22. Majelis hakim menolak permohonan Keberatan yang tidak

---

[750] Pasal 12 dan 13 Perma No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

memuat alasan Keberatan.

23. Berdasarkan persetujuan majelis hakim, Pemohon Keberatan dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU namun keterangannya tidak dimuat atau tidak dipertimbangkan dalam Putusan KPPU, atau ditolak kehadirannya memberikan keterangan, untuk didengar keterangannya dalam persidangan.
24. Dalam hal Pemohon Keberatan mengajukan saksi dan/atau ahli, KPPU dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, untuk memperkuat dalilnya.
25. Pemohon Keberatan tidak dapat mengajukan bukti surat dan/atau dokumen, baik yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, maupun bukti surat dan/atau dokumen baru.
26. Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
27. Ditandai dengan mengunggah putusan ke dalam SIP.
28. Pihak yang keberatan dengan putusan pengadilan niaga dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan pengadilan niaga.[751]
29. Upaya hukum kasasi bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.
30. Dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh pemohon keberatan, KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri/niaga yang memutus perkara tersebut.

E. PERKARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

1. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
2. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dapat dilakukan melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase atas dasar pilihan para pihak yang bersangkutan.

---

[751] Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2021 Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Penyelesaian sengketa konsumen yang dapat diajukan keberatan ke pengadilan hanya terhadap penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase.
4. Putusan majelis BPSK pada prinsipnya bersifat final dan mengikat kecuali terhadap putusan arbitrase dapat diajukan keberatan ke pengadilan.
5. Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak.
6. Konsumen mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan.

F. ARBITRASE

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa *(pactum de compromittendo)*, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*acta compromise*).
4. Perjanjian arbitrase dapat dilakukan setelah timbulnya sengketa (*acta compromise*) dengan syarat sebagai berikut:
    a. Dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
    b. Perjanjian tertulis tersebut harus memuat:[752]
        1) masalah yang dipersengketakan;
        2) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
        3) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis

[752] Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999

arbitrase;

4) tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
5) nama lengkap sekretaris;
6) jangka waktu penyelesaian sengketa;
7) pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
8) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

5. Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan[753]
   a. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan pemilihan Arbiter, para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.
   b. Terhadap permohonan tersebut Ketua Pengadilan mendengar para pihak disertai dengan alasan ketidaksepakatan dan usulan arbiter atau majelis arbitrase.
   c. Ketua Pengadilan menunjuk arbiter atau majelis arbitrase paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan tersebut diajukan dalam bentuk penetapan.
6. Hak Ingkar terhadap Arbiter
   a. Terhadap penetapan penunjukkan arbiter atau majelis arbitrase oleh Ketua Pengadilan dapat diajukan hak ingkar paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak penetapan apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.
   b. Hak ingkar terhadap seorang arbiter dapat dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.
   c. Terhadap hak ingkar, Ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan dengan mendengar Pemohon dan tanggapan dari Termohon.
   d. Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas permohonan

---

[753] Pasal 13 UU No. 30 Tahun 1999 jo. Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) PERMA No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

hak ingkar paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya permohonan tersebut.

e. Dalam hal hak ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, para pihak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan.

f. Terhadap permohonan tersebut, Ketua Pengadilan mendengar para pihak disertai dengan alasan ketidaksepakatan.

g. Ketua Pengadilan memberikan putusan atas permohonan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya permohonan tersebut.

h. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

7. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional[754]

a. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nasional secara sukarela, putusan Arbitrase yang telah didaftarkan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

b. Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dapat diajukan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Nasional.

c. Perintah Ketua Pengadilan ditulis pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Nasional, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dinilai tidak bertentangan dengan kesusilaan dan/atau Ketertiban Umum.

d. Dalam hal Ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Nasional bertentangan dengan kesusilaan dan/atau Ketertiban Umum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

---

[754] Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9, 11, 12, 13 dan 15 PERMA No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Ketua Pengadilan menolak permohonan tersebut melalui penetapan. Penetapan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya hukum.

e. Dalam hal terdapat permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nasional dan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional yang diajukan secara bersamaan, Ketua Pengadilan harus menunda pelaksanaan putusan, sampai diterbitkannya putusan tingkat pertama atas permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang menyatakan menolak atau tidak dapat diterima

8. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional[755]

a. Dalam hal terdapat pihak yang tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional secara sukarela, salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur.

b. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.

c. Terhadap Putusan Arbitrase Internasional dapat diajukan permohonan pelaksanaan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Internasional

d. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak permohonan eksekuatur didaftarkan, memeriksa permohonan, memutuskan menolak atau mengabulkan eksekuatur untuk berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

e. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tersebut, ketua Negeri Jakarta Pusat menulis eksekuatur tersebut pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional yang dikeluarkan.

f. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksekuatur untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Internasional, dapat diajukan kasasi.

g. Dalam hal ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Internasional tidak dalam Ruang Lingkup

---

[755] Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Perdagangan dan/atau bertentangan dengan Ketertiban Umum, ketua Pengadilan menolak permohonan sebagaimana dimaksud melalui putusan.

h. Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Negeri Jakarta Pengadilan Pusat

i. Eksekuatur diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial atau Ketua Kamar Perdata yang diberi wewenang oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

j. Permohonan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan tata cara yang berlaku menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

k. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengirimkan berkas permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Putusan Internasional tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung untuk memperoleh eksekuatur.

l. Pengiriman berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf K, harus disertai dengan:

   1) Asli putusan atau turunan Putusan Arbitrase Internasional yang telah diautentikasi sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

   2) Asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional yang telah diautentikasi sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia; dan

   3) Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan

bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Internasional.

m. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan didaftarkan, mengirimkan permohonan ke Panitera Mahkamah Agung.

n. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada m, Mahkamah Agung menolak untuk mengakui atau mengabulkan untuk memberikan eksekuatur dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

o. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Mahkamah Agung menolak untuk mengakui atau mengabulkan untuk memberikan eksekuatur, Panitera Mahkamah Agung mengirimkan berkas permohonan eksekuatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

p. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima berkas permohonan eksekuatur yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase Internasional, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan putusan Arbitrase sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan perdata.

q. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf n dilakukan atas dasar:
   1) Permohonan Pemohon; dan
   2) Putusan Arbitrase Internasional.

r. Putusan untuk mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional bersifat final dan tidak ada upaya hukum.

s. Dalam hal para pihak mengajukan upaya hukum terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada huruf r, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, panitera membuat surat keterangan bahwa pengajuan upaya hukum tidak memenuhi syarat dan selanjutnya ketua Pengadilan membuat penetapan.

t. Putusan yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, hanya dapat

diajukan upaya hukum kasasi.

u. Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf r dan huruf t diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pelaksanaan putusan didaftarkan di Pengadilan.

v. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf p, dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan perdata.

G. PERKARA PARTAI POLITIK

1. Sengketa pemilihan umum dapat diselesaikan melalui proses perdata, pidana maupun tata usaha negara.
2. Perselisihan partai politik wajib diupayakan terlebih dahulu melalui mahkamah partai[756]
3. Apabila tidak tercapai diajukan ke pengadilan negeri yang putusannya final dan mengikat.[757]
4. Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan pemilihan Presiden dan Legislatif.
5. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten/kota.

H. PERKARA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam hal Atasan PPID digugat sengketa Informasi di Komisi Informasi, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung, Atasan PPID dapat menunjuk PPID dan/atau pejabat lain sebagai kuasa.

---

[756] Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

[757] Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

I. GUGATAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT[758]

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Organisasi Masyarakat (Ormas), Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART.
2. Apabila penyelesaian sengketa melalui mekanisme AD/ART tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
3. Dalam hal mediasi tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.
4. Sengketa Ormas wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri.
5. Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
6. Dalam hal diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

J. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN[759]

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
   a. lembaga jasa keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
   b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya,

   baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Pengadilan niaga berwenang mengadili gugatan terhadap PUJK konvensional.
3. Perkara gugatan perlindungan konsumen oleh OJK meliputi:
   a. gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang

---

[758] Pasal 58 UU Nomor 17 Tahun 2013
[759] Perma Nomor 4 Tahun 2025

menyebabkan kerugian maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

b. gugatan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Gugatan diajukan di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum tergugat.
5. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih tergugat yang terdiri dari PUJK dan pihak lain, gugatan diajukan di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat yang merupakan PUJK.
6. Dalam hal tergugat berkedudukan di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
7. Tahapan persidangan pemeriksaan gugatan secara elektronik terdiri atas:
   a. tahap jawab jinawab:
      1) Sidang pertama pembacaan gugatan.
      2) Sidang kedua untuk jawaban.
      3) Putusan sela (jika ada).
   b. tahap pembuktian; dan
   c. tahap pembacaan putusan.
8. Proses pemeriksaan gugatan tidak dapat diajukan replik, duplik, rekonvensi, intervensi, dan kesimpulan.
9. Putusan atas gugatan diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak sidang pertama.
10. Dalam hal putusan pengadilan mengabulkan gugatan, amar putusan mencantumkan mekanisme distribusi pembayaran dilakukan oleh OJK.
11. Terhadap putusan atas gugatan, para pihak hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
12. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan secara sukarela, maka penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan.
13. Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain dalam

Peraturan Mahkamah Agung.

14. Dalam hal gugatan dikabulkan, pelaksanaan putusan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
    a. pelaksanaan putusan dinyatakan selesai setelah Pengadilan menyerahkan hasil pelaksanaan eksekusi kepada OJK;
    b. dalam hal amar putusan terkait ganti rugi, mekanisme distribusi pembayaran dilakukan oleh OJK setelah pengadilan menyerahkan hasil pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
    c. OJK menyerahkan laporan hasil pelaksanaan putusan kepada pengadilan.

K. GUGATAN SENGKETA BANK DALAM LIKUIDASI DAN PASCA LIKUIDASI[760]

1. Bank dalam likuidasi adalah bank yang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas yang melaksanakan pengawasan terhadap bank dan sedang dalam proses likuidasi Bank.
2. Bank pasca likuidasi adalah bank yang telah memenuhi kondisi pengakhiran likuidasi, telah diterima pertanggungjawabannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
3. Pengadilan niaga berwenang mengadili sengketa bank dalam likuidasi dan bank pasca likuidasi termasuk sengketa penjaminan simpanan.
4. Sengketa bank dalam likuidasi terdiri atas sengketa yang berkaitan dengan:
    a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan;
    b. Pengalihan aset dan kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada pihak lain;
    c. Pembatalan yang diajukan oleh Tim Likuidasi atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank dalam Likuidasi, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha, untuk kepentingan aset atau

[760] Perma Nomor 1 Tahun 2026

kewajiban Bank dalam Likuidasi; dan/atau

d. sengketa penjaminan simpanan.

5. Sengketa bank pasca likuidasi terdiri atas sengketa yang berkaitan dengan:
   a. kewajiban direksi, komisaris, pemegang saham dan/atau pihak lain yang terbukti menerima manfaat dan/atau menyebabkan bank menjadi bank dalam likuidasi, dalam hal seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank;
   b. penyelesaian sisa aset dan kewajiban bank pasca likuidasi termasuk sengketa kepemilikan yang berkaitan dengan penyelesaian sisa aset dan kewajiban bank dalam likuidasi dan bantahan/perlawanan; dan/atau
   c. sengketa penjaminan simpanan
6. Sengketa pelaksanaan penjaminan simpanan berupa:
   a. keputusan LPS atas penetapan Simpanan layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar, termasuk perihal nilai simpanan yang dijamin; dan
   b. pendaftaran gugatan sengketa bank dalam likuidasi diajukan ke pengadilan niaga di wilayah hukum kedudukan kantor pusat dari bank yang dicabut izin usahanya.
7. Dalam hal Nasabah keberatan terhadap keputusan LPS, nasabah dapat mengajukan keberatan ke LPS yang didukung dengan bukti jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak putusan LPS diumumkan.
8. Dalam hal keberatan tidak diajukan sesuai jangka waktu diatas, nasabah dianggap telah menerima keputusan LPS.
9. Dalam hal nasabah mengajukan keberatan, LPS memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Nasabah dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak keberatan diajukan.
10. Nasabah dapat mengajukan upaya hukum melalui pengadilan niaga terhadap keputusan atas keberatan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan atas keberatan diberitahukan pendaftaran gugatan sengketa bank pasca likuidasi diajukan ke pengadilan niaga sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
11. Pendaftaran gugatan sengketa penjaminan simpanan diajukan ke

pengadilan niaga di wilayah hukum kedudukan kantor pusat dari bank yang dicabut izin usahanya.

12. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
13. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sengketa bank dalam likuidasi dan bank pasca likuidasi termasuk sengketa penjaminan simpanan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan niaga.
14. Dalam proses pemeriksaan perkara sengketa penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, dan duplik.
15. Persidangan pertama dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi ruang virtual yang ditetapkan oleh majelis hakim.
16. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan bukti surat dilaksanakan secara elektronik melalui SIP.
17. Persidangan Autentikasi bukti surat dilaksanakan secara langsung di pengadilan niaga.
18. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara virtual melalui media komunikasi audiovisual yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

L. PERMOHONAN PENETAPAN SEMENTARA DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL[761]

1. Penetapan sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait, berdasarkan permohonan pemohon terhadap pelanggaran hak atas desain industri, paten, merek, dan hak cipta, untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar HKI ke dalam jalur perdagangan; mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; serta menghentikan

[761] Perma Nomor 5 Tahun 2012

pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

2. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran.
3. Pemohon adalah pemilik atau pemegang hak yang memiliki bukti cukup terkait dugaan terjadinya pelanggaran haknya, sedangkan termohon adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melanggar hak atau yang menguasai barang bukti.
4. Permohonan diajukan dengan persyaratan: melampirkan bukti kepemilikan/pemegang hak; melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak; keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta untuk keperluan pembuktian; serta menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang dikenai penetapan sementara.
5. Permohonan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus, diajukan kepada ketua pengadilan yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran, berisi alasan-alasan termasuk kekhawatiran penghilangan barang bukti, dan didaftarkan pada kepaniteraan setelah membayar biaya perkara (biaya proses, PNBP, dan meterai).
6. Setelah semua persyaratan pendaftaran dipenuhi, panitera mencatat permohonan dan wajib menyerahkannya dalam waktu 1x24 jam kepada ketua pengadilan; ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk dalam waktu 1x24 jam setelah menerima surat permohonan harus menentukan hari persidangan.
7. Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa alat bukti, dan mendengar keterangan Pemohon; mempertimbangkan secara rinci tindakan yang diminta untuk menghindari itikad tidak baik serta besarnya jaminan; dan dalam waktu paling lambat 2x24 jam setelah pendaftaran menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan. Proses permohonan sampai dengan penerbitan penetapan bersifat rahasia.
8. Dalam hal mengabulkan permohonan, penetapan memuat antara lain: mengabulkan permohonan; mencantumkan secara jelas tindakan yang akan dilaksanakan; memerintahkan termohon dan pihak terkait mengizinkan juru sita (yang dapat didampingi pemohon) melaksanakan tindakan; rincian barang termasuk

dokumen sebagai barang bukti; hari, tanggal, dan jam pelaksanaan; alamat tempat penyimpanan barang bukti; perintah kepada juru sita; jumlah uang jaminan; pembebanan biaya kepada pemohon; serta pencantuman kalimat ancaman pidana dalam Pasal 352 dan 353 KUHP.

9. Dalam hal menolak permohonan, penetapan memuat: menolak permohonan pemohon; mengembalikan uang jaminan kepada pemohon; dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.
10. Dalam hal permohonan dikabulkan, juru sita wajib melaksanakan penetapan sesuai amar, didampingi pemohon/kuasa hukum dan dihadiri 2 (dua) orang saksi, membacakan penetapan di hadapan pihak terkait, dan menuangkan pelaksanaannya dalam berita acara.
11. Dalam hal penetapan telah dilaksanakan, dalam waktu 1x24 jam para pihak harus diberitahukan mengenai pelaksanaan tersebut termasuk hak termohon untuk didengar.
12. Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan mempertimbangkan alat bukti, hakim yang memberikan penetapan harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan dikeluarkan.
13. Apabila hanya sebagian permohonan terbukti, penetapan diubah sesuai fakta dan jaminan sebagian diserahkan kepada termohon secara proporsional; apabila pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, penetapan dibatalkan dan jaminan segera diserahkan kepada termohon (termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi); apabila dalil permohonan terbukti seluruhnya, penetapan dikuatkan dan jaminan segera dikembalikan kepada pemohon.
14. Penetapan sementara bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
15. Dalam hal penetapan dikuatkan, pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan; apabila pemohon tidak mengajukan gugatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan sementara ditetapkan, maka penetapan sementara berakhir dengan sendirinya.

M. PERMOHONAN PENANGGUHAN SEMENTARA YUDISIAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL[762]

1. Penangguhan sementara adalah penundaan untuk sementara waktu terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.
2. Perintah penangguhan sementara yudisial adalah perintah penangguhan sementara atas permohonan pemilik atau pemegang HKI yang bukan berasal dari penegahan, melainkan atas inisiatif pemohon.
3. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum kawasan pabean setempat berada.
4. HKI yang menjadi ruang lingkup pengaturan meliputi: merek dan indikasi geografis; hak cipta dan hak terkait; paten dan paten sederhana; desain industri; desain tata letak sirkuit terpadu; dan varietas tanaman.
5. Permohonan perintah penangguhan sementara yudisial harus dilengkapi dokumen: bukti kepemilikan HKI yang cukup; data spesifikasi dan karakteristik barang; perincian dan keterangan jelas barang impor/ekspor (nama importir/eksportir, nomor *bill of lading* dan/atau *airway bill* dan/atau nomor kontainer dan/atau sarana pengangkutan dan/atau perkiraan jenis dan jumlah barang dan/atau pelabuhan tujuan dan negara asal); bukti cukup adanya pelanggaran HKI; surat pernyataan pertanggungjawaban pemohon; surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan biaya operasional; surat keterangan perusahaan penilai independen tersumpah atas nilai barang; dan bukti pembayaran jaminan atas barang. Seluruh dokumen dibubuhi meterai yang cukup.
6. Permohonan dibuat oleh pemohon atau kuasanya secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga) atau secara elektronik, ditujukan kepada ketua pengadilan di daerah hukumnya; panitera mendaftarkan permohonan setelah pemohon membayar panjar biaya perkara dan uang jaminan atas barang.
7. Setelah didaftarkan, panitera menyampaikan surat permohonan

[762] Perma Nomor 6 Tahun 2019

kepada ketua pengadilan, yang menunjuk seorang hakim dan menetapkan hari sidang, seluruhnya dilakukan pada hari yang sama dengan pendaftaran; pemohon atau kuasanya harus hadir pada hari sidang.

8. Pemeriksaan permohonan dilakukan tanpa memanggil dan tanpa dihadiri termohon; hakim mendengarkan keterangan pemohon, mempelajari serta mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup terkait kepemilikan dan dugaan pelanggaran HKI, dan mempertimbangkan besarnya jaminan atas barang sebanding dengan nilai barang.
9. Hakim memberikan penetapan paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran. Dalam hal mengabulkan, amar memuat antara lain: mengabulkan permohonan; menangguhkan sementara pengeluaran barang dari kawasan pabean selama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan diterima pejabat bea dan cukai; memerintahkan pejabat bea dan cukai melaksanakan penetapan; memerintahkan pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan bersama paling lama 2 (dua) hari; menyatakan uang jaminan tetap berada di kepaniteraan sampai penetapan akhir; dan menangguhkan biaya perkara sampai penetapan akhir.
10. Dalam hal menolak permohonan, amar memuat: menolak permohonan pemohon; mengembalikan uang jaminan atas barang kepada pemohon; dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.
11. Pengadilan menyampaikan penetapan kepada pejabat bea dan cukai pada kantor pabean setempat (dan salinan kepada direktur pengawas HKI pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) secara elektronik pada hari yang sama dengan pengucapan penetapan; khusus penangguhan sementara yudisial, pemohon menyerahkan jaminan biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); pejabat bea dan cukai melakukan penundaan pengeluaran barang dan memberitahukan pihak terkait paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima penetapan.
12. Setelah menerima penetapan, pemohon mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang kepada kantor pabean; kantor pabean menentukan hari pemeriksaan bersama paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima permohonan, memberitahukannya

kepada para pihak, dan pemeriksaan bersama harus dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan diterima kantor pabean.

13. Pemeriksaan barang dipimpin oleh Hakim dibantu panitera pengganti bersama pejabat bea dan cukai, pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pemohon, dan termohon atau kuasanya, untuk identifikasi atau pencacahan barang, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani hakim dan panitera pengganti.
14. Perintah penangguhan sementara dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan diterima pejabat bea dan cukai; atas permintaan pemohon karena pemeriksaan bersama belum selesai, hakim dapat memberikan perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) hari, yang diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya tahap pertama.
15. Apabila berdasarkan pemeriksaan bersama tidak ditemukan pelanggaran HKI, hakim menerbitkan penetapan penghentian dan memerintahkan uang jaminan diserahkan kepada termohon (termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum); apabila terjadi pelanggaran HKI, hakim menerbitkan penetapan yang menguatkan dan memerintahkan uang jaminan atas barang dikembalikan kepada pemohon.
16. Penetapan perintah penangguhan sementara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali; penegahan bukan merupakan objek dalam sengketa tata usaha negara dan praperadilan.
17. Setelah dilakukan pemeriksaan barang dan terdapat bukti cukup adanya pelanggaran HKI, pemohon dapat melakukan tindakan hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. PERMOHONAN PEMERIKSAAN YAYASAN OLEH PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN[763]

1. Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa

---

[763] Pasal 53 ayat (2) sampai dengan Pasal 56 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004

organ yayasan: melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar; lalai dalam melaksanakan tugasnya; melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga; atau melakukan perbuatan yang merugikan negara.

2. Pemeriksaan atas dugaan perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan anggaran dasar, kelalaian, serta perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.
3. Pemeriksaan atas dugaan perbuatan yang merugikan negara dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.
4. Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan.
5. Dalam hal mengabulkan permohonan, pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa.
6. Pembina, pengurus, dan pengawas, serta pelaksana kegiatan atau karyawan yayasan, tidak dapat diangkat menjadi pemeriksaan.
7. Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan yayasan; pembina, pengurus, pengawas, pelaksana kegiatan, dan karyawan yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan; serta pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.
8. Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada ketua pengadilan di tempat kedudukan yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan selesai; ketua pengadilan memberikan salinan laporan kepada pemohon atau kejaksaan dan yayasan yang bersangkutan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERADILAN AGAMA

I. Administrasi Perkara

A. Ketentuan Umum

1. Pelayanan administrasi perkara pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan menggunakan sistem *One Stop Service* yaitu sistem pelayanan yang melayani pihak beperkara meliputi:[764]
   a. pendaftaran perkara secara elektronik (verifikasi berkas perkara, verifikasi pembayaran panjar biaya perkara, dan pemberian nomor perkara);
   b. pengembalian sisa panjar biaya perkara;
   c. pengambilan produk pelayanan pengadilan; dan
   d. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PTSP pada pengadilan terdiri atas loket pelayanan administrasi perkara, pelayanan informasi, pelayanan pengaduan, pelayanan gugatan mandiri, pelayanan pos bantuan hukum, pelayanan kelompok rentan, pelayanan bank, dan pelayanan pos.
3. Dalam hal terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan/atau ruang pelayanan di pengadilan, layanan PTSP dapat digabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengadilan dapat menyediakan layanan PTSP *online*.
5. Petugas pelayanan administrasi perkara pada PTSP melakukan identifikasi apakah pihak beperkara termasuk kelompok rentan (orang lanjut usia, anak-anak, orang miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas).[765]
6. Dalam hal pihak beperkara merupakan kelompok rentan, petugas pelayanan administrasi perkara memberikan pelayanan berupa akomodasi yang layak sesuai ketentuan.[2]

---

[764] PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

[765] PERMA Nomor 2 Tahun 2025.

7. Dalam hal pihak beperkara merupakan penyandang disabilitas, pelayanan administrasi dan persidangan perkara di pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung mengenai pedoman mengadili perkara bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di pengadilan.[2]

8. Dalam hal terdapat kewajiban para pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan hasil putusan/penetapan pengadilan dalam perkara permohonan/ gugatan kepada instansi terkait maka kewajiban tersebut harus dipertimbangkan oleh majelis hakim/hakim dalam putusan/ penetapan dan dicantumkan dalam amar putusan/penetapan.[766]

9. Dalam hal terdapat kewajiban pengadilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan salinan putusan/penetapan pengadilan dalam perkara permohonan/ gugatan kepada instansi terkait maka kewajiban tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim/hakim dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan/penetapan.[3]

B. Administrasi Perkara Perdata

1. Tata Laksana Perkara

a. Penerimaan Perkara

1) Penerimaan Perkara Tingkat Pertama[767]

a) Pihak beperkara mendaftarkan perkara gugatan, permohonan, *verzet*, permohonan eksekusi, dan perlawanan baik perlawanan pihak (*partij verzet*) maupun perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

b) Pihak beperkara mendaftarkan perkara ke pengadilan dengan mengunggah dokumen ke dalam SIP, berupa:

(1) surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang berwenang;

---

[766] Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Angka 3 Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2007.

[767] PERMA 1 Tahun 2019 yang dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

(2) dalam hal pihak beperkara belum memiliki surat gugatan/permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1), petugas pelayanan administrasi perkara mengarahkan pihak beperkara untuk membuat surat gugatan/permohonan secara mandiri menggunakan sarana yang disediakan oleh pengadilan dan/atau melalui pos bantuan hukum di pengadilan;

(3) surat kuasa khusus, dalam hal penggugat atau pemohon menguasakan kepada pihak lain;

(4) dokumen bukti yang sudah bermeterai dan dinazegelen; dan

(5) dalam hal surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada angka (4) yang dibuat di luar negeri, harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.[768]

c) Pihak beperkara membayar panjar biaya perkara secara elektronik setelah mendapat verifikasi dari pengadilan.

d) Petugas pelayanan administrasi perkara melakukan pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap.

e) Petugas pelayanan administrasi perkara memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

f) Nomor urut perkara yang didaftarkan harus sesuai dengan nomor urut pada buku jurnal keuangan perkara.

g) Kepaniteraan terkait mengunduh dokumen

---

[768] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022.

yang tersedia di dalam aplikasi *e-court* untuk keperluan proses berikutnya.

h) Petugas pelayanan administrasi perkara memproses perkara yang sudah terdaftar secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

i) Dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan di luar jam yang ditentukan sebagaimana tercantum pada huruf h), pendaftaran perkara akan diproses pada hari kerja berikutnya.

j) Dalam hal pihak beperkara salah memilih pengadilan dan/atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilanjutkan pendaftaran secara elektronik maka uang panjar biaya perkara dikembalikan kepada pihak beperkara secara elektronik dan biaya pengembalian dibebankan kepada pihak penggugat/ pemohon.

k) Dalam hal penggugat/pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara, penggugat/ pemohon mengunggah surat permohonan pembebasan biaya perkara dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi pada saat pendaftaran perkara.[769]

l) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf k) memenuhi syarat maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara.

m) Petugas pelayanan administrasi perkara mengunggah penetapan sebagaimana dimaksud huruf l) ke dalam SIP, selanjutnya perkara diregister sebagai perkara prodeo Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau prodeo murni.[770]

n) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud

---

[769] Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
[770] Pasal 238 ayat (3) HIR dan Pasal 274 ayat (3) RBg.

pada huruf k) tidak memenuhi syarat maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan penolakan pembebasan biaya perkara.

o) Petugas pelayanan administrasi perkara mengunggah penetapan sebagaimana dimaksud huruf n) ke dalam SIP dan proses pendaftaran perkara tidak dapat dilanjutkan.

p) Perlawanan atas putusan verstek (*verzet*) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (verstek) dengan menggunakan kode (Pdt.Plw) dan pelawan membayar biaya perkara secara elektronik untuk pemanggilan dan pemberitahuan para pihak.

q) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru dengan menggunakan kode (Pdt.Bth).

r) Gugatan perbaikan dan/atau penambahan amar putusan atau permohonan perbaikan penetapan didaftarkan sebagai perkara baru.

s) Komponen panjar biaya perkara terdiri atas:[771]
   (1) biaya pendaftaran;
   (2) PNBP surat kuasa dan panggilan penggugat/pemohon atau tergugat/ termohon;
   (3) alat tulis kantor;
   (4) biaya penggandaan termasuk untuk penggandaan surat gugatan/permohonan untuk para tergugat/termohon dalam hal perkara didaftarkan secara elektronik;
   (5) Biaya panggilan terdiri atas:
      (a) panggilan penggugat nihil dalam hal perkara didaftarkan secara elektronik;
      (b) panggilan penggugat x 4 (mediasi x 2 dan panggilan sidang x 2) dalam hal perkara didaftarkan secara langsung;

---

[771] PERMA 1 Tahun 2019 yang dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Angka III Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

(c) panggilan tergugat x 5 (mediasi x 2 dan panggilan sidang x 3);

(d) khusus untuk perkara cerai talak panggilan tergugat x 6; dan

(e) untuk perkara yang lain menyesuaikan jumlah pihak;

(6) meterai; dan

(7) redaksi.

t) Ketua pengadilan tingkat pertama menetapkan surat keputusan mengenai panjar biaya perkara dengan berpedoman pada ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan ketentuan lain yang terkait.

u) Surat keputusan ketua pengadilan tingkat pertama mengenai panjar biaya perkara harus dipasang pada papan pengumuman pengadilan dan diumumkan melalui website pengadilan.

v) Dalam hal pihak beperkara mendaftarkan perkara secara langsung ke petugas pelayanan administrasi pengadilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) Pihak beperkara menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf b) disertai dengan:

(a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan.

(b) Bagi kuasa insidentil, harus menyertakan surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah/gampong/nagari dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi ASN dan Anggota TNI/Polri.

(c) Surat keterangan/izin untuk melakukan perceraian bagi ASN atau

anggota TNI/Polri.[772]

(d) Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk permohonan eksekusi.

(2) Surat gugatan/permohonan dibuat rangkap sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.

(3) Petugas pelayanan administrasi perkara menerima dan memeriksa kelengkapan berkas gugatan, permohonan, *verzet*, permohonan eksekusi, perlawanan pihak (*partij verzet*), dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*).

(4) Petugas pelayanan administrasi perkara menaksir dan mencetak instrumen panjar biaya perkara melalui SIP dengan berpedoman pada surat keputusan ketua pengadilan tingkat pertama mengenai panjar biaya perkara dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

(a) jumlah pihak yang beperkara; dan

(b) jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).

(5) Pihak beperkara membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam instrumen panjar biaya perkara ke nomor rekening pengadilan yang ditetapkan (RPL).

(6) Pengadilan dapat menyediakan layanan pembayaran panjar biaya perkara secara digital (QRIS, dompet digital, dan sejenisnya).

(7) Petugas pelayanan administrasi perkara melakukan pendaftaran perkara setelah

---

[772] Angka 4 Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 05 Tahun 2014.

pemberkasan lengkap.

(8) Nomor urut perkara yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka (7) harus sesuai dengan nomor urut pada buku jurnal keuangan perkara.

(9) Petugas pelayanan administrasi perkara menerbitkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui SIP sebanyak 3 (tiga) rangkap (lembar I untuk penggugat/ pemohon, lembar II untuk bendahara biaya perkara, dan lembar III untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara).

(10) Petugas pelayanan administrasi perkara dan penggugat/pemohon menandatangani SKUM yang kemudian diberi cap tanda lunas dan menyerahkan SKUM lembar I kepada penggugat/pemohon.

(11) Petugas pelayanan administrasi perkara mengisi data para pihak secara lengkap pada SIPP.

(12) Petugas pelayanan administrasi perkara memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut ke dalam map berkas perkara.

(13) Petugas pelayanan administrasi perkara menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda terkait untuk diserahkan kepada panitera, selanjutnya panitera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada ketua pengadilan.

(14) Ketua pengadilan menerima berkas perkara sebagaimana dimaksud pada angka (13).

(15) Rangkaian proses penerimaan perkara mulai dari angka (7) sampai dengan angka (14) dilakukan pada hari yang sama.

(16) Dalam hal para pihak tidak mampu

membayar biaya perkara maka:[773]

(a) Pihak beperkara mengajukan permohonan beperkara dengan pembebasan biaya kepada ketua pengadilan tingkat pertama melalui petugas pelayanan administrasi perkara.

(b) Permohonan beperkara dengan pembebasan biaya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan lurah/kepala desa atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

(c) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dalam bentuk fotokopi, petugas pelayanan administrasi perkara mencocokkan dengan dokumen aslinya, selanjutnya petugas pelayanan administrasi perkara membubuhkan paraf disertai nama lengkap petugas, serta tanggal pada lembar fotokopi dokumen tersebut.

---

[773] Pasal 238 ayat (3) HIR, Pasal 274 ayat (3) RBg., dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

(d) Dalam hal pihak beperkara terdaftar sebagai penduduk miskin pada basis data terpadu pemerintah yang terintegrasi dengan SIP maka pihak tidak perlu melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (b).

(e) Petugas pelayanan administrasi perkara menyerahkan berkas permohonan pembebasan biaya perkara kepada ketua pengadilan tingkat pertama melalui panitera.

(f) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) memenuhi syarat maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara.

(g) Petugas pelayanan administrasi perkara meregister perkara tersebut sebagai perkara prodeo DIPA atau prodeo murni.

(h) Petugas pelayanan administrasi perkara mencetak SKUM nihil, dan selanjutnya ditandatangani oleh petugas pelayanan administrasi perkara serta penggugat/pemohon.

(i) Petugas pelayanan administrasi perkara menyerahkan surat gugatan/ permohonan dan SKUM nihil yang telah diberi nomor perkara kepada penggugat/pemohon.

(j) Dalam hal biaya perkara dari DIPA habis sebelum perkara putus maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa diperlukan putusan sela dari majelis hakim/hakim.

(k) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak

memenuhi syarat maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan penolakan pembebasan biaya perkara.

(l) Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, perkara diproses sebagaimana proses beperkara dengan membayar panjar biaya perkara.

(m) Dalam hal biaya beperkara yang dibiayai DIPA telah habis, ketua pengadilan dapat menetapkan perkara beracara secara prodeo murni, dengan terlebih dahulu meneliti dengan saksama persyaratan dan proses sebagaimana pengajuan permohonan bercara dengan biaya DIPA.

(n) Putusan yang dihasilkan melalui proses beracara secara prodeo murni tidak perlu diberi pembubuhan meterai.

2) Penerimaan Perkara Banding[774]

a) Administrasi di Tingkat Pertama

(1) Pihak beperkara mendaftarkan upaya hukum banding secara elektronik melalui SIP.

(2) Pemohon yang dapat mengajukan upaya hukum banding secara elektronik, apabila:

(a) sejak awal beracara secara elektronik; dan

(b) telah mendapatkan salinan putusan secara elektronik dari SIP.

(3) Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender bagi pihak yang mengikuti

---

[774] Pasal 14 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Angka IV Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

persidangan secara elektronik, sedangkan bagi pihak yang tidak menyetujui 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan diberitahukan melalui pos-el atau sejak pemberitahuan putusan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat.

(4) Pemohon banding membayar biaya perkara secara elektronik berdasarkan e-SKUM.

(5) Panitera pengadilan tingkat pertama menerbitkan akta permohonan banding.

(6) Dalam hal permohonan dan pembayaran biaya upaya hukum banding diajukan pada hari terakhir tenggat waktu upaya hukum, diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (6) diproses pada hari kerja berikutnya dan tanggal akta permohonan banding tersebut menggunakan tanggal pembayaran.

(8) Petugas pelayanan administrasi perkara pada PTSP mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding dalam SIP.

(9) Juru sita/juru sita pengganti memberitahukan permohonan banding kepada termohon secara elektronik.

(10) Pembanding dapat mengajukan memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah pernyataan banding.

(11) Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, juru sita/juru sita pengganti menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada terbanding secara elektronik paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima pengadilan.

(12) Dalam hal terbanding mengajukan kontra memori banding, juru sita/juru sita pengganti menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada pembanding secara elektronik paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.

(13) Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah pemberitahuan memori banding.

(14) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.

(15) Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding secara elektronik selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.

(16) Dalam kurun waktu tersebut para pihak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya.

(17) Seluruh pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik.

(18) Berkas perkara banding dikirim secara elektronik oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pembanding.

(19) Dalam hal terdapat terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara

elektronik, pemberitahuan permohonan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) dikirimkan melalui surat tercatat, kecuali terbanding yang sejak awal menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.

(20) Apabila terbanding sebagaimana dimaksud pada angka (19) berada di luar wilayah hukum pengadilan yang memutus perkaranya, pemberitahuan disampaikan melalui pos-el atau surat tercatat.

(21) Terbanding sebagaimana dimaksud pada angka (19) melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik di meja *e-court*.

(22) Dalam hal pemohon banding sejak awal tidak mengikuti/tidak menyetujui persidangan secara elektronik maka:

(a) permohonan banding diajukan langsung ke pengadilan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka (3);

(b) pembayaran panjar biaya perkara banding sesuai dengan SKUM/ e-SKUM yang diperoleh melalui petugas pelayanan administrasi perkara;

(c) panitera menerbitkan akta banding yang ditandatangani oleh panitera dan pembanding;

(d) petugas pelayanan administrasi perkara pada PTSP mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding dan mengunggah akta banding tersebut ke dalam SIP;

(e) dalam hal pembanding mengajukan

memori banding, memori banding diserahkan melalui petugas pelayanan administrasi perkara pada PTSP dengan tanda terima, selanjutnya memori banding diunggah ke dalam SIP;

(f) pemberitahuan upaya hukum banding dan penyerahan memori banding kepada terbanding dilakukan secara elektronik;

(g) kontra memori banding diajukan secara elektronik, selanjutnya juru sita/juru sita pengganti mencetak kontra memori banding tersebut dan menyampaikan kepada pembanding melalui pos-el atau surat tercatat;

(h) pemberitahuan kontra memori banding dan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara disampaikan melalui pos-el atau surat tercatat;

(i) pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik di meja *e-court*; dan

(j) tenggang waktu pengajuan memori banding, kontra memori banding, pemeriksaan berkas perkara, dan pengiriman berkas perkara dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada angka (13) sampai angka (18).

(23) Dalam hal pihak beperkara mendaftarkan perkara banding secara langsung ke petugas pelayanan administrasi pengadilan berlaku ketentuan sebagaimana angka (22) huruf (a) sampai huruf (j), kecuali:

(a) pemberitahuan akta banding kepada

terbanding, memori banding kepada terbanding, kontra memori banding kepada pembanding dilakukan secara langsung oleh juru sita/juru sita pengganti;

(b) penyampaian kontra memori banding oleh terbanding diserahkan langsung melalui petugas pelayanan administrasi perkara;

(c) pemeriksaan berkas banding (*inzage*) dilakukan secara langsung melalui petugas pelayanan administrasi perkara; dan

(d) komponen panjar biaya perkara banding meliputi:

i. biaya pendaftaran;

ii. biaya banding yang dikirimkan ke pengadilan tingkat banding;

iii. biaya pengiriman biaya banding melalui bank;

iv. biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan;

v. biaya pengiriman berkas perkara banding;

vi. biaya jalan petugas pengiriman;

vii. biaya pemberitahuan akta banding;

viii. biaya pemberitahuan memori banding;

ix. biaya pemberitahuan kontra memori banding;

x. biaya pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) bagi pembanding;

xi. biaya pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) bagi terbanding;

xii. biaya pemberitahuan amar

putusan bagi pembanding; dan

xiii. biaya pemberitahuan amar putusan bagi terbanding.

(24) Dalam hal permohonan banding diajukan dengan pembebasan biaya perkara, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) Penerimaan Perkara Tingkat Pertama huruf v) angka (16).

(25) Panitera memerintahkan bendahara biaya perkara untuk mengirimkan biaya perkara banding kepada pengadilan tingkat banding melalui bank yang ditunjuk.

(26) Panitera muda gugatan menyusun bundel A dan bundel B secara kronologis sebagai berikut:

(a) Bundel A:

i. surat gugatan, termasuk perbaikan surat gugatan (jika ada);

ii. surat kuasa/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);

iii. Penetapan Majelis Hakim/Hakim (PMH).

iv. penunjukan panitera sidang;

v. penunjukan juru sita/juru sita pengganti;

vi. Penetapan Hari Sidang (PHS);

vii. *relaas-relaas* panggilan/ *e-summon*;

viii. penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan hasil mediasi (jika ada);

ix. court calendar;

x. Berita Acara Sidang (BAS) (dalam satu kesatuan);

xi. jawaban;

xii. replik (jika ada);

xiii. duplik (jika ada);

xiv. permohonan intervensi (jika ada);
xv. putusan sela (jika ada);
xvi. penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);
xvii. surat bukti penggugat (jika ada);
xviii. surat bukti tergugat (jika ada);
xix. surat bukti *intervenient* (jika ada);
xx. berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
xxi. simpulan penggugat (jika ada);
xxii. simpulan tergugat (jika ada);
xxiii. simpulan *intervenient* (jika ada);
xxiv. penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada); dan
xxv. surat lainnya (jika ada).

(b) Bundel B:
i. salinan putusan;
ii. surat kuasa khusus/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
iii. akta banding;
iv. pemberitahuan/*e-summon* banding;
v. memori banding (jika ada);
vi. pemberitahuan/*e-summon* memori banding (jika ada);
vii. kontra memori banding (jika ada);
viii. pemberitahuan/*e-summon* kontra memori banding (jika ada);
ix. pemberitahuan/*e-summon* *inzage*;
x. bukti *e-payment* biaya banding (jika ada); dan
xi. surat lainnya (jika ada).

(27) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, panitera melalui panitera muda gugatan

mengirim berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B ke pengadilan tingkat banding.

(28) Apabila masing-masing pihak mengajukan upaya hukum banding maka:
   (a) penyebutan pihak-pihak adalah pembanding I/terbanding II melawan terbanding I/pembanding II;
   (b) pembanding I adalah pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan banding (membayar lebih dahulu);
   (c) biaya perkara banding yang dikirim ke pengadilan tingkat banding hanya dipungut dari pembanding I;
   (d) pembanding II hanya dibebani biaya:
      i. fotokopi penggandaan berkas;
      ii. pemberitahuan akta banding;
      iii. pemberitahuan memori banding;
      iv. pemberitahuan kontra memori banding; dan
      v. PNBP pemberitahuan akta banding, memori banding dan kontra memori banding.
   (e) berkas banding terdiri atas 1 (satu) bundel A dan 2 (dua) bundel B; dan
   (f) panitera pengadilan tingkat pertama segera melaporkan secara tertulis ke pengadilan tingkat banding tentang adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut agar berkas perkaranya di pengadilan tingkat banding dijadikan satu.

(29) Pencabutan permohonan banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:[775]

---

[775] PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

(a) pembanding mengajukan permohonan pencabutan kepada ketua pengadilan tingkat pertama;

(b) apabila permohonan pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus disetujui oleh pihak prinsipal;

(c) panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani panitera dan pembanding;

(d) dalam hal permohonan banding telah diberitahukan kepada terbanding maka akta pencabutan banding sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diberitahukan kepada terbanding;

(e) dalam hal permohonan banding telah dikirim ke pengadilan tingkat banding, pencabutan permohonan banding disertai akta pencabutan dan pemberitahuannya kepada pihak terbanding harus segera dikirim oleh panitera pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding disertai surat pengantar yang ditandatangani ketua atau panitera pengadilan tingkat pertama;

(f) berkas perkara banding yang belum dikirim setelah adanya pencabutan, tidak perlu dikirim ke pengadilan tingkat banding; dan

(g) dalam kasus perceraian, jika terjadi perdamaian antara suami dan istri, permohonan banding bukan dicabut, akan tetapi berkas perkara banding tersebut tetap dikirim ke pengadilan tingkat banding dengan melampirkan kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera pengadilan tingkat pertama, suami

dan istri.

(30) Pengadilan tingkat banding mengirimkan salinan putusan disertai dokumen lunak (*softcopy*) beserta bundel A ke pengadilan tingkat pertama paling lambat 2 (dua) hari kerja.

(31) Pengadilan tingkat pertama memberitahukan amar putusan kepada para pihak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima salinan putusan.

b) Administrasi di Tingkat Banding[776]

(1) Petugas pelayanan administrasi perkara menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas perkara banding dari pengadilan tingkat pertama.

(2) Dalam hal berkas perkara banding sebagaimana dimaksud pada angka (1) sudah lengkap maka petugas pelayanan administrasi perkara mendaftarkan perkara tersebut melalui SIP pada hari yang sama saat berkas tersebut diterima.

(3) Dalam hal berkas perkara banding dinyatakan belum valid dan/atau belum lengkap, petugas pelayanan administrasi perkara meminta perbaikan dokumen yang belum valid dan/atau penambahan berkas yang belum lengkap secara elektronik.

(4) Petugas pelayanan administrasi perkara meregister perkara setelah berkas dinyatakan valid dan lengkap.

(5) Dalam hal perkara banding diajukan secara langsung oleh pengadilan tingkat pertama maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (4) dilaksanakan secara langsung oleh pengadilan tingkat banding.

---

[776] PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

3) Penerimaan Perkara Kasasi[777]

a) Pengadilan pengaju memproses permohonan kasasi yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

b) Permohonan kasasi yang diajukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a) diproses pada hari kerja berikutnya.

c) Pengajuan permohonan dan pembayaran biaya upaya hukum kasasi yang diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c) diproses pada hari kerja berikutnya.

e) Tanggal akta permohonan kasasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) menggunakan tanggal pembayaran.

f) Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran biaya upaya hukum kasasi, kepaniteraan pengadilan pengaju:

(1) menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik; dan

(2) mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register perkara pada SIP.

g) Panitera pengadilan pengaju memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan kasasi diterima.

h) Pemohon mengajukan memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah permohonan kasasi diterima.

i) Kepaniteraan pengadilan menyampaikan

---

[777] PERMA Nomor 6 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023.

pemberitahuan memori kasasi kepada termohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima pengadilan.

j) Dalam hal pemohon tidak mengajukan memori kasasi, panitera menerangkan secara elektronik bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan pengaju.

k) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf j) diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

l) Termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan memori kasasi diterima.

m) Dalam hal termohon mengajukan kontra memori kasasi, kepaniteraan pengadilan pengaju menyampaikan pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.

n) *Inzage* dalam upaya hukum kasasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) pemberitahuan pelaksanaan *inzage* dikirimkan kepada para pihak secara elektronik;

(2) para pihak diberi kesempatan mempelajari berkas perkara melalui SIP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima;

(3) para pihak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas perkara yang dianggap tidak lengkap; dan

(4) pengadilan menindaklanjuti tanggapan para pihak.

o) Dalam hal terdapat termohon yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP:
   (1) pemberitahuan permohonan kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi, serta pemberitahuan *inzage* dikirimkan melalui surat tercatat; atau
   (2) termohon menyatakan persetujuannya secara tertulis dengan mencantumkan alamat elektronik yang bersangkutan dan disampaikan ke pengadilan, baik secara langsung maupun secara elektronik, diberitahukan secara elektronik.

p) Kepaniteraan mencetak memori kasasi dan menyampaikannya kepada termohon sebagaimana dimaksud pada huruf o) melalui surat tercatat atau secara elektronik bagi termohon yang telah menyatakan persetujuannya.

q) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf o) angka (1) menyerahkan dokumen lunak (*softcopy*) dan dokumen cetak (*hardcopy*) kontra memori kasasi melalui PTSP, kemudian petugas kepaniteraan terkait mengunggah kontra memori tersebut ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

r) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf o) angka (2) menyerahkan kontra memori kasasi secara elektronik dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

s) *Inzage* bagi termohon sebagaimana dimaksud pada huruf o) dilakukan secara elektronik pada meja *e-court*.

t) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.

u) Panitera pengadilan pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan berkas perkara

dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik.

v) Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan atau 3 (tiga) hari setelah tenggat waktu *inzage* berakhir, dan kontra memori kasasi tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.

w) Dalam hal pihak beperkara mendaftarkan perkara secara langsung ke petugas pelayanan administrasi pengadilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) permohonan kasasi diajukan dan diproses sesuai dengan jam pelayanan PTSP;

(2) dalam hal permohonan kasasi diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara, pengadilan menerbitkan SKUM paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat;

(3) pembayaran panjar biaya permohonan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

(4) akta pernyataan kasasi menggunakan tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran;

(5) pemohon membayar panjar biaya permohonan upaya hukum kasasi sesuai dengan SKUM;

(6) panitera membuat akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, selanjutnya akta tersebut diunggah ke dalam SIP;

(7) memori kasasi diserahkan melalui PTSP

dengan tanda terima, selanjutnya memori kasasi diunggah oleh kepaniteraan ke dalam SIP;

(8) pemberitahuan upaya hukum kasasi dan penyerahan memori kasasi kepada termohon dilakukan secara elektronik;

(9) kontra memori kasasi diajukan melalui SIP, selanjutnya kepaniteraan mengunduh kontra memori kasasi tersebut dan menyampaikannya kepada pemohon melalui surat tercatat atau secara elektronik bagi pemohon yang telah menyatakan persetujuannya untuk diberitahukan secara elektronik;

(10) *inzage* dalam upaya hukum kasasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) pemberitahuan *inzage* disampaikan kepada pemohon dan/atau termohon melalui surat tercatat atau secara elektronik bagi para pihak yang telah menyatakan persetujuannya untuk diberitahukan secara elektronik; dan

(b) pemohon dan/atau termohon melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik di meja *e-court*;

(11) dalam hal termohon atau beberapa termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan permohonan kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi, serta pemberitahuan *inzage* dikirimkan melalui surat tercatat, kecuali termohon yang menyatakan persetujuannya untuk diberitahukan secara elektronik;

(12) kontra memori kasasi dari termohon sebagaimana dimaksud pada angka (11)

diserahkan melalui PTSP, selanjutnya kepaniteraan membuat tanda terima dan mengunggah kontra memori kasasi tersebut ke dalam SIP; dan

(13) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f) sampai huruf v) pada bagian pengajuan upaya hukum kasasi secara elektronik juga diberlakukan dalam pengajuan upaya hukum kasasi secara langsung.

x) Susunan berkas perkara upaya hukum kasasi (bundel A dan bundel B).

(1) Bundel A:

(a) surat gugatan:

i. surat gugatan/permohonan; dan

ii. perbaikan surat gugatan (jika ada);

(b) surat kuasa/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);

(c) Penetapan Majelis Hakim/Hakim (PMH);

(d) penunjukan panitera sidang;

(e) penunjukan juru sita/juru sita pengganti;

(f) Penetapan Hari Sidang (PHS);

(g) *relaas-relaas* panggilan/*e-summon*;

(h) penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan hasil mediasi (jika ada);

(i) *court calendar*;

(j) Berita Acara Sidang (BAS) (dalam satu kesatuan);

(k) jawaban;

(l) replik (jika ada);

(m) duplik (jika ada);

(n) permohonan intervensi dan penetapan intervensi (jika ada);

(o) putusan sela (jika ada);

(p) penetapan sita dan berita acara sita

(jika ada);

(q) surat bukti penggugat (jika ada);

(r) surat bukti tergugat (jika ada);

(s) surat bukti *intervenient* (jika ada);

(t) berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);

(u) simpulan penggugat (jika ada);

(v) simpulan tergugat (jika ada);

(w) simpulan *intervenient* (jika ada);

(x) penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada); dan

(y) surat lainnya (jika ada).

(2) Bundel B:

(a) salinan putusan;

(b) surat kuasa khusus/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);

(c) pemberitahuan putusan banding;

(d) akta permohonan kasasi;

(e) pemberitahuan kasasi;

(f) memori kasasi;

(g) tanda terima memori kasasi;

(h) *screenshot* tanggal unggah dan verifikasi memori kasasi pada aplikasi *e-court;*

(i) pemberitahuan memori kasasi;

(j) kontra memori kasasi (jika ada);

(k) tanda terima kontra memori kasasi (jika ada), surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi (jika tidak ada kontra memori kasasi);

(l) pemberitahuan kontra memori kasasi (jika ada);

(m) pemberitahuan *inzage* (jika ada);

(n) bukti *e-payment* biaya kasasi; dan

(o) surat lainnya (jika ada).

y) Pengadilan pengaju harus memastikan berkas yang dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung telah lengkap dan jelas.

z) Dalam hal terdapat berkas perkara yang tidak dapat dialihmediakan/didigitalisasi, atas permintaan Mahkamah Agung, pengadilan pengaju mengirimkan dokumen fisik paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan melalui SIP.

aa) Pencabutan permohonan kasasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum kasasi melalui SIP sebelum perkara diputus;

(2) dalam hal pemohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pencabutan permohonan upaya hukum diajukan secara langsung ke pengadilan pengaju;

(3) permohonan upaya hukum kasasi yang telah dicabut tidak dapat diajukan lagi;

(4) dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum kasasi diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, pengadilan pengaju tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan panitera pengadilan pengaju menerbitkan akta pencabutan secara elektronik;

(5) berdasarkan akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka (4), ketua pengadilan pengaju menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik;

(6) dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum kasasi diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dikirimkan ke Mahkamah Agung secara elektronik;

(7) dalam hal perkara belum diregistrasi, berkas perkara dikembalikan ke pengadilan pengaju secara elektronik dengan surat keterangan dari Panitera

Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung;

(8) ketua pengadilan pengaju berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (7) menerbitkan penetapan secara elektronik;

(9) dalam hal perkara telah diregistrasi, permohonan pencabutan tersebut diputus oleh majelis hakim dengan penetapan secara elektronik;

(10) penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (5), angka (8), dan angka (9) disampaikan kepada para pihak melalui SIP atau melalui surat tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP/tidak memiliki domisili elektronik;

(11) dalam hal permohonan kasasi dicabut sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung maka biaya proses yang seharusnya dikirim ke Mahkamah Agung dikembalikan secara elektronik kepada pemohon;

(12) dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka (11) memerlukan biaya, biaya tersebut ditanggung oleh pemohon; dan

(13) biaya perkara kasasi yang permohonannya dicabut setelah perkara diregistrasi, tidak dapat dikembalikan kepada pemohon.

4) Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali[778]

a) Pengadilan pengaju memproses permohonan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

b) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan

[778] PERMA Nomor 6 Tahun 2022; Keputusan KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023.

di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a) diproses pada hari kerja berikutnya.

c) Pengajuan permohonan dan pembayaran biaya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c) diproses pada hari kerja berikutnya.

e) Tanggal akta permohonan peninjauan kembali terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) menggunakan tanggal pembayaran.

f) Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran biaya upaya hukum peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan pengaju:
   (1) menerbitkan akta pernyataan peninjauan kembali secara elektronik; dan
   (2) mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register perkara pada SIP.

g) Panitera pengadilan pengaju memberitahukan permohonan peninjauan kembali dan menyerahkan memori peninjauan kembali kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan diterima.

h) Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru (novum), pemohon menyertakan dokumen elektronik bukti baru (novum) pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

i) Sidang pengambilan sumpah penemuan novum sebagaimana dimaksud pada huruf h) dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali

yang dipimpin oleh ketua pengadilan pengaju atau hakim yang ditunjuk dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti yang ditunjuk.

j) Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan kebohongan/tipu muslihat, pemohon menyertakan dokumen elektronik putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kebohongan/ tipu muslihat, pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

k) Sidang pengambilan sumpah dengan alasan kebohongan/tipu muslihat sebagaimana dimaksud pada huruf j) dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dipimpin oleh ketua pengadilan pengaju atau hakim yang ditunjuk dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti yang ditunjuk.

l) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru (novum) dan alasan kebohongan/tipu muslihat maka pelaksanaan sidang pengambilan sumpah dilakukan sekaligus pada hari yang sama dengan tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dipimpin oleh ketua pengadilan pengaju atau hakim yang ditunjuk dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti yang ditunjuk.[779]

m) Dokumen novum sebagaimana dimaksud pada huruf h) dan/atau putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf j) dicocokkan dengan aslinya di hadapan persidangan.

n) Sidang pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf l) dapat dilakukan secara jarak jauh dengan mengikuti ketentuan sidang

---

[779] Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 835/PAN/HK2/II/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

jarak jauh dalam perkara perdata agama.[780]

o) Berita acara sidang pengambilan sumpah penemuan novum memuat hari dan tanggal ditemukan dan hasil pencocokan novum tersebut dengan aslinya dan berita acara sidang tersebut ditandatangani oleh ketua pengadilan pengaju atau hakim yang ditunjuk dan panitera/panitera pengganti yang ditunjuk. Selanjutnya berita acara tersebut diunggah oleh panitera/panitera pengganti ke dalam SIP.

p) Lafaz sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf l) berbunyi sebagai berikut:

(1) lafaz sumpah oleh orang yang menemukan novum berbunyi:

"*Wallahi,* demi Allah (disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing), saya bersumpah bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa ..... pada hari ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ..... di ..... dan belum pernah diajukan di persidangan."; dan

(2) lafaz sumpah oleh pemohon peninjauan kembali dalam hal novum ditemukan oleh pihak lain:

"*Wallahi,* demi Allah (disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing), saya bersumpah bahwa ..... (nama yang menemukan novum) telah menemukan surat bukti berupa ..... pada hari ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ..... di ..... dan belum pernah diajukan di persidangan."

q) Termohon dapat mengajukan kontra memori peninjauan kembali paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali.

---

[780] PERMA Nomor 6 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023.

r) Dalam hal termohon mengajukan kontra memori peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori peninjauan kembali diterima pengadilan.

s) *Inzage* dalam upaya hukum peninjauan kembali dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) pemberitahuan pelaksanaan *inzage* dikirimkan kepada para pihak secara elektronik;

(2) para pihak diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara melalui SIP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima;

(3) para pihak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas perkara yang dianggap tidak lengkap; dan

(4) pengadilan menindaklanjuti tanggapan para pihak.

t) Dalam hal terdapat termohon yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP:

(1) pemberitahuan permohonan peninjauan kembali beserta penyerahan memori peninjauan kembali dan pemberitahuan *inzage* dikirimkan melalui surat tercatat; dan

(2) termohon yang menyatakan persetujuannya secara tertulis dengan mencantumkan alamat elektronik yang bersangkutan dan disampaikan ke pengadilan, baik secara langsung maupun secara elektronik, diberitahukan secara elektronik.

u) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf t) angka (1) menyerahkan dokumen lunak (*softcopy*) dan dokumen cetak (*hardcopy*) kontra memori peninjauan kembali melalui PTSP, kemudian petugas kepaniteraan terkait memindai kontra memori tersebut dan mengunggahnya ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

v) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf t) angka (2) menyerahkan kontra memori peninjauan kembali secara elektronik dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

w) Pemeriksaan berkas perkara bagi pihak termohon sebagaimana dimaksud pada huruf t) dilakukan secara elektronik pada meja *e-court.*

x) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.

y) Dalam hal bundel A sebagaimana dimaksud pada huruf x) berbentuk dokumen cetak, kepaniteraan pengadilan pengaju melakukan digitalisasi dokumen tersebut dan mengunggah ke dalam SIP.

z) Panitera pengadilan pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dan kejelasan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan secara elektronik.

aa) Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan atau 3 (tiga) hari setelah tenggat waktu *inzage* berakhir.

bb) Kontra memori peninjauan kembali tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.

cc) Dalam hal pihak beperkara mendaftarkan

perkara secara langsung ke petugas pelayanan administrasi pengadilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) permohonan peninjauan kembali diajukan dan diproses sesuai dengan jam pelayanan PTSP;

(2) dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara, pengadilan menerbitkan SKUM paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat;

(3) pembayaran dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

(4) pemohon membayar biaya upaya hukum peninjauan kembali sesuai dengan SKUM;

(5) tanggal akta permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) menggunakan tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran;

(6) panitera membuat akta permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, selanjutnya akta permohonan peninjauan kembali diunggah ke dalam SIP;

(7) pemberitahuan permohonan peninjauan kembali, pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali, serta pemberitahuan *inzage* terhadap termohon yang terdaftar sebagai pengguna SIP, dilakukan secara elektronik melalui SIP;

(8) dalam hal termohon atau beberapa termohon tidak terdaftar sebagai pengguna

SIP, pemberitahuan permohonan peninjauan kembali, pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali, serta pemberitahuan *inzage* dikirimkan melalui surat tercatat, kecuali bagi termohon yang menyatakan persetujuannya untuk diberitahukan secara elektronik;

(9) *inzage* dalam upaya hukum peninjauan kembali dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) pemohon dan/atau termohon sebagaimana dimaksud pada angka (8) melakukan *inzage* secara elektronik pada meja *e-court*; dan

(b) termohon sebagaimana dimaksud pada angka (7) melakukan *inzage* secara elektronik pada SIP; dan

(10) ketentuan pada huruf f) sampai huruf s) diberlakukan dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali secara langsung.

dd) Susunan berkas perkara upaya hukum peninjauan kembali (bundel A dan bundel B):

(1) Bundel A:

(a) surat gugatan:

i. surat gugatan/permohonan; dan

ii. perbaikan surat gugatan (jika ada);

(b) surat kuasa/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);

(c) Penetapan Majelis Hakim/Hakim (PMH);

(d) penunjukan panitera sidang;

(e) penunjukan juru sita/juru sita pengganti;

(f) Penetapan Hari Sidang (PHS);

(g) relaas-relaas panggilan/e-*summon*;

(h) penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan hasil mediasi (jika ada);
(i) *court calendar*;
(j) berita acara sidang (dalam satu kesatuan);
(k) jawaban;
(l) replik (ika ada);
(m) duplik (jika ada);
(n) permohonan intervensi dan penetapan intervensi (jika ada);
(o) putusan sela (jika ada);
(p) penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);
(q) surat bukti penggugat (jika ada);
(r) surat bukti tergugat (jika ada);
(s) surat bukti *intervenient* (jika ada);
(t) berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
(u) simpulan penggugat (jika ada);
(v) simpulan tergugat (jika ada);
(w) simpulan *intervenient* (jika ada);
(x) penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada); dan
(y) surat lainnya (jika ada).

(2) Bundel B:
(a) salinan putusan;
(b) surat kuasa khusus/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
(c) pemberitahuan putusan kasasi;
(d) akta permohonan peninjauan kembali;
(e) memori peninjauan kembali;
(f) tanda terima memori peninjauan kembali;
(g) *screenshot* tanggal unggah dan verifikasi memori peninjauan kembali pada aplikasi *e-court*;

(h) pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali;
(i) kontra memori peninjauan kembali (jika ada);
(j) tanda terima kontra memori peninjauan kembali (jika ada), surat keterangan tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali (jika tidak diajukan kontra memori peninjauan kembali);
(k) pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali (jika ada);
(l) pemberitahuan *inzage*;
(m) bukti *e-payment* biaya pemberitahuan peninjauan kembali; dan
(n) surat lainnya (jika ada).

ee) Pengadilan pengaju harus memastikan berkas yang dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung telah lengkap dan jelas.

ff) Dalam hal terdapat berkas perkara yang tidak dapat dialihmediakan/didigitalisasi, atas permintaan Mahkamah Agung, pengadilan pengaju mengirimkan dokumen fisik paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan melalui SIP.

gg) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
(1) pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum peninjauan kembali melalui SIP sebelum perkara diputus oleh majelis hakim;
(2) dalam hal pemohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan secara langsung ke pengadilan pengaju;
(3) permohonan peninjauan kembali yang telah dicabut tidak dapat diajukan lagi;
(4) dalam hal permohonan pencabutan upaya

hukum peninjauan kembali diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, pengadilan pengaju tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan panitera pengadilan pengaju menerbitkan akta pencabutan secara elektronik;

(5) berdasarkan akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka (4), ketua pengadilan pengaju menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik;

(6) dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum peninjauan kembali diajukan setelah pengiriman berkas perkara, akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dikirimkan secara elektronik;

(7) dalam hal perkara belum diregistrasi, berkas perkara dikembalikan ke pengadilan pengaju secara elektronik dengan surat keterangan dari Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung;

(8) ketua pengadilan pengaju berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (7) menerbitkan penetapan secara elektronik;

(9) dalam hal perkara telah diregistrasi, permohonan pencabutan tersebut diputus oleh majelis hakim secara elektronik;

(10) penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (5), angka (8), dan angka (9) disampaikan kepada para pihak melalui SIP atau melalui surat tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP/tidak memiliki domisili elektronik;

(11) dalam hal permohonan peninjauan kembali dicabut sebelum berkas perkara

dikirim, biaya peninjauan kembali dikembalikan kepada pemohon secara elektronik; dan

(12) dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka (11) memerlukan biaya, biaya tersebut ditanggung oleh pemohon.

b. Pendistribusian Perkara

1) Ketua pengadilan membuat PMH paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah perkara didaftar dengan bantuan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) melalui SIPP.
2) Dalam hal ketua pengadilan menetapkan majelis hakim selain yang ditunjuk dengan bantuan AI, harus dengan menyertakan alasan.
3) Dalam hal fitur PMH dengan bantuan AI sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum dapat digunakan, PMH dilakukan secara langsung oleh ketua pengadilan melalui SIP.
4) Panitera menunjuk panitera sidang dan juru sita/ juru sita pengganti pada hari yang sama dengan PMH.
5) Ketua majelis hakim menetapkan hari sidang paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PMH.
6) Dalam hal perkara didaftarkan secara langsung ke pengadilan maka petugas pelayanan administrasi perkara menyerahkan berkas perkara kepada:
   a) ketua pengadilan untuk membuat PMH;
   b) panitera pengadilan untuk membuat penunjukan panitera sidang dan juru sita/ juru sita pengganti; dan
   c) ketua majelis hakim untuk membuat PHS.

c. Kewajiban Hakim dan Panitera Sidang untuk Mengundurkan Diri

1) Ketua majelis, hakim anggota, atau panitera sidang wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) sampai derajat ketiga atau

hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan ketua majelis, hakim anggota, atau panitera sidang.[781]

2) Ketua majelis, hakim anggota, atau panitera sidang wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan para pihak atau penasihat hukumnya.[18]

3) Ketua majelis, hakim anggota, atau panitera sidang wajib mengundurkan diri, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan para pihak atau penasihat hukumnya untuk mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

4) Jika hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas terpenuhi dan tidak mengundurkan diri atau tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus maka perkara ini harus diadili ulang dengan susunan majelis hakim yang lain.

d. Persidangan

1) Persiapan Persidangan

a) Penetapan Hari Sidang

(1) Ketua majelis membuat PHS melalui SIPP.

(2) Ketua majelis melalui panitera sidang menyerahkan instrumen panggilan kepada juru sita/juru sita pengganti untuk panggilan sidang.

b) Pemanggilan[782]

(1) Panggilan untuk penggugat/kuasa dilaksanakan secara elektronik.

(2) Panggilan bagi tergugat/termohon yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilaksanakan secara elektronik.

(3) Panggilan elektronik tidak dikenai biaya.

---

[781] Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Keputusan KMA Nomor 59/KMA/SK/XI/2024.

[782] PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

(4) Panggilan secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
   (a) juru sita/juru sita pengganti melakukan *login* pada aplikasi *e-court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator;
   (b) juru sita/juru sita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik;
   (c) juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan kepada para melalui aplikasi *e-court*; dan
   (d) panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal sidang.

(5) Dalam hal tergugat atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak hadir, pemanggilan selanjutnya melalui surat tercatat.

(6) Panggilan tergugat/termohon yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

(7) Panggilan melalui surat tercatat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
   (a) juru sita/juru sita pengganti mencetak *relaas* panggilan dari aplikasi SIPP;
   (b) *relaas* panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh juru sita/juru sita pengganti kepada tergugat/termohon melalui surat tercatat untuk sidang pertama dengan melampirkan surat gugatan

penggugat/permohonan pemohon;

(c) panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus dikirim kepada tergugat/termohon paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang berdasarkan lacak kiriman;

(d) dalam hal alamat tergugat/termohon tidak ditemukan/tidak diketahui maka panggilan dilakukan melalui panggilan umum;

(e) panggilan umum sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk perkara perceraian termasuk pemanggilan melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; dan

(f) dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka dilakukan pemanggilan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya maka panggilan dilaksanakan melalui kepala desa/lurah di wilayah domisili terakhir pewaris.[783]

(8) Dalam hal perkara didaftarkan secara langsung, juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan para pihak dengan tata cara sebagai berikut:[784]

(a) juru sita/juru sita pengganti membuat *relaas* panggilan melalui SIPP;

(b) juru sita/juru sita pengganti

---

[783] Pasal 390 ayat (2) HIR/Pasal 718 ayat (2) RBg.

[784] Pasal 388 HIR/Pasal 716 RBg., PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

menyerahkan instrumen panggilan kepada bendahara biaya perkara untuk pencairan biaya sebelum melaksanakan pemanggilan;

(c) juru sita/juru sita pengganti memanggil para pihak, selanjutnya menyerahkan *relaas* panggilan kepada panitera sidang; dan

(d) juru sita/juru sita pengganti memindai dan mengunggah dokumen *relaas* panggilan ke dalam SIPP.

(9) Dalam hal perkara didaftarkan secara langsung, sedangkan pihak berada di luar yurisdiksi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:[785]

(a) bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan:

i. proses pemanggilan/ pemberitahuan delegasi dilakukan melalui SIPP;

ii. ketua pengadilan tingkat pertama menerbitkan surat keputusan tentang penunjukan koordinator bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan;

iii. koordinator mencatat dalam buku register delegasi panggilan/ pemberitahuan ke luar maupun bantuan delegasi dari luar pengadilan tingkat pertama; dan

iv. panitera bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan;

v. panitera bertanggung jawab

---

[785] Pasal 5 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), SEMA Nomor 6 Tahun 2014; PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

melaporkan kepada ketua pengadilan tingkat pertama secara berkala; dan

vi. ketua pengadilan tingkat pertama melaporkan pelaksanaan bantuan delegasi kepada ketua pengadilan tingkat banding secara elektronik;

(b) pengiriman bantuan delegasi ke luar yurisdiksi:

i. ketua majelis melalui panitera sidang memerintahkan koordinator delegasi dengan surat perintah untuk mengirimkan permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan;

ii. koordinator delegasi melakukan proses permohonan bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan kepada pengadilan tingkat pertama di luar wilayah hukum;

iii. koordinator delegasi mengunggah permohonan delegasi dan bukti pengiriman biaya ke dalam SIPP paling lambat 2 (dua) hari sejak perintah ketua majelis;

iv. koordinator mengunduh *relaas* panggilan/pemberitahuan dari SIPP dan menyerahkan kepada ketua majelis melalui panitera sidang; dan

v. setelah menerima *relaas* panggilan (asli) dari pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan bantuan, koordinator delegasi menyerahkan *relaas* panggilan/

pemberitahuan delegasi kepada ketua majelis;

(c) penerimaan bantuan delegasi dari luar yurisdiksi:

i. koordinator delegasi menerima dan mencatat permohonan bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan dalam register delegasi serta menyerahkannya kepada panitera;

ii. panitera menunjuk juru sita/ juru sita pengganti untuk melaksanakan panggilan/ pemberitahuan dari pengadilan tingkat pertama di luar wilayah hukum paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan bantuan delegasi dicatat dalam buku register delegasi;

iii. juru sita/juru sita pengganti mengajukan permohonan uang bantuan delegasi berdasarkan surat penunjukan panitera kepada petugas;

iv. juru sita/juru sita pengganti melaksanakan panggilan/ pemberitahuan dan menyerahkan *relaas* kepada koordinator delegasi pada hari yang sama dengan pelaksanaan panggilan/ pemberitahuan;

v. koordinator delegasi mengunggah *relaas* panggilan/pemberitahuan melalui SIPP; dan

vi. *relaas* panggilan/pemberitahuan yang asli tetap dikirimkan untuk kepentingan minutasi;

(d) permohonan bantuan panggilan/ pemberitahuan yang berdomisili di luar negeri:[786]

i. pengadilan tingkat pertama mengajukan permohonan melalui Panitera Mahkamah Agung, dengan ketentuan:

i) menggunakan formulir standar yang ditentukan;

ii) menyertakan terjemahan dokumen yang akan disampaikan sesuai dengan ketentuan negara tujuan;

iii) biaya penyampaian/ pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak beperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan rekening virtual dari aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Untuk pembuatan rekening virtual tersebut telah disediakan menu "VA Rogatori"; dan

iv) bukti pengiriman biaya sebagaimana dimaksud pada angka romawi iii) dikirimkan bersamaan dengan penyampaian permohonan tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung.

ii. Memperhitungkan jangka waktu yang memadai antara

---

[786] Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Pasal 4 dan Pasal 5 Nota Kesepahaman MA dan Kemlu Nomor 01-04/PK/MA/2/2018.

penyampaian panggilan dengan pelaksanaan persidangan sesuai ketentuan negara tujuan minimal 4 (empat) bulan.

iii. Sah dan patutnya panggilan/ pemberitahuan ke luar negeri cukup dibuktikan dengan diterimanya surat tersebut oleh perwakilan negara Republik Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen dari perwakilan tersebut atau melalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan pos internasional.

(e) Dalam hal alamat tergugat/termohon tidak ditemukan/tidak diketahui maka panggilan dilakukan melalui panggilan umum.

2) Pelaksanaan Persidangan

a) Ketua majelis hakim/hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan.

b) Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

c) Pelaksanaan persidangan paling lambat dimulai pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai lebih dari pukul 09.00 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu.

d) Sidang harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, sidang dapat dibuka dan ditutup di kantor kelurahan/kepala desa/di tempat objek pemeriksaan.[787]

---

[787] Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg., Pasal 211 - 214 Rv, SEMA Nomor 7 Tahun 2001.

e) Pelaksanaan sidang pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka untuk umum kecuali dalam sidang pemeriksaan perkara perceraian atau perkara yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tertutup untuk umum.

f) Pengucapan putusan/penetapan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum.

g) Dalam keadaan luar biasa di mana sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena semua hakim berhalangan maka sidang ditunda pada waktu yang ditentukan kemudian, dan penundaan tersebut sesegera mungkin diumumkan di papan pengumuman.

h) Majelis hakim/hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian.

i) Panitera sidang menginput data persidangan pada SIPP.

j) Panitera sidang membuat BAS melalui SIP.

k) BAS ditandatangani secara elektronik oleh ketua majelis hakim/hakim dan panitera sidang paling lambat 2 (hari) setelah persidangan dan/atau 1 (satu) hari sebelum sidang selanjutnya.

l) Panitera sidang menyampaikan instrumen panggilan kepada juru sita/juru sita pengganti atas perintah majelis hakim/hakim.

m) Ketua pengadilan tingkat pertama membuat PMH baru apabila ada perubahan susunan majelis hakim/hakim melalui SIPP.

n) Panitera membuat penunjukan panitera sidang atau juru sita/juru sita pengganti baru apabila ada perubahan melalui SIPP.

o) Majelis hakim/hakim menginput data putusan/penetapan dan amar putusan/ penetapan ke dalam SIPP.

p) Majelis hakim/hakim mengunggah naskah

salinan putusan dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) ke dalam SIP pada hari tanggal putus.

q) Panitera sidang melakukan anonimisasi file putusan untuk dipublikasi ke dalam SIP.

3) Pascapersidangan

a) Pemberitahuan putusan dalam perkara yang diajukan melalui *e-court* disampaikan melalui akun *e-court* jika pihak-pihak sudah mempunyai akun *e-court*.

b) Pemberitahuan putusan dalam perkara yang diajukan melalui *e-court* disampaikan melalui surat tercatat jika pihak tergugat tidak mempunyai akun *e-court*.

c) Ketua majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti melalui panitera sidang untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir saat pengucapan putusan.

d) Juru sita/juru sita pengganti menyampaikan pemberitahuan isi putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

e) Juru sita/juru sita pengganti memasukkan tanggal pemberitahuan isi putusan pada SIPP.

f) Majelis hakim/hakim dibantu panitera sidang meminutasi berkas perkara paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan diucapkan.

g) Berkas perkara disusun secara kronologis.

h) Panitera sidang menginput data tanggal minutasi ke dalam SIPP di hari yang sama.

i) Dalam hal berkas perkara berbentuk fisik:

(1) panitera sidang menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera muda gugatan/permohonan pada hari dan tanggal minutasi dilakukan;

(2) panitera muda gugatan/permohonan menyerahkan berkas perkara sebagaimana angka (1) yang telah berkekuatan hukum

tetap kepada panitera muda hukum untuk disimpan sebagai arsip;

(3) petugas arsip perkara memindai berkas perkara dan putusan untuk arsip elektronik; dan

(4) petugas arsip perkara menjahit dan memberi segel berkas perkara yang telah diminutasi.

j) Dalam hal perkara cerai talak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) ketua pengadilan menerbitkan PMH untuk pelaksanaan sidang ikrar talak paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap melalui SIPP;

(2) ketua majelis hakim/hakim menerbitkan PHS ikrar talak melalui SIPP paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal PMH;

(3) ketua majelis hakim/hakim melalui panitera sidang memerintahkan juru sita/ juru sita pengganti untuk melaksanakan pemanggilan sidang ikrar talak;

(4) juru sita/juru sita pengganti mengajukan permohonan biaya panggilan kepada petugas pelayanan administrasi perkara;

(5) juru sita/juru sita pengganti melaksanakan panggilan sidang ikrar talak kepada para pihak (prinsipal) secara langsung melalui domisili elektronik atau surat tercatat jika termohon tidak diketahui domisili elektroniknya;

(6) juru sita/juru sita pengganti menyerahkan bukti panggilan ikrar talak kepada majelis hakim/hakim melalui panitera sidang paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan panggilan;

(7) panitera sidang mencatat jalannya sidang ikrar talak dalam BAS melalui SIPP;

(8) ketua majelis hakim/hakim anggota

memasukkan amar penetapan ikrar talak melalui SIPP;

(9) panitera sidang menyerahkan BAS berikut penetapan ikrar talak dan berkas perkara kepada petugas arsip perkara untuk diarsipkan, sebagaimana ketentuan huruf i) angka (3) dan angka (4);

(10) untuk menghindari terjadinya talak *bid'i*, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menunda sidang ikrar talak apabila istri dalam keadaan haid, kecuali bila istri rela dijatuhi talak;

(11) jika pemohon pada hari sidang ikrar talak yang telah ditetapkan tidak datang sendiri atau tidak mengutus wakilnya setelah dipanggil secara resmi dan patut maka ketua majelis hakim/hakim dalam BAS menyatakan bahwa ikrar talak tidak terlaksana dan pemohon diberi kesempatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan sidang ikrar talak;

(12) jika pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka (11), datang melapor di kepaniteraan pengadilan maka disampaikan kepada ketua majelis hakim/ hakim untuk dibuatkan PHS. Setelah membuat PHS, panitera sidang menyampaikan kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil pemohon dan termohon sesuai dengan hari sidang yang telah ditentukan;

(13) Jika pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang tidak datang sendiri atau tidak mengutus wakilnya setelah dipanggil secara resmi dan patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut. Ketua majelis hakim/

hakim yang ditunjuk membuat penetapan mengenai gugurnya kekuatan hukum atas putusan pemberian izin ikrar talak tersebut;[788] dan

(14) dalam hal pemohon dan termohon menyatakan damai/rukun kembali setelah hari sidang ikrar talak ditetapkan maka pemohon mengajukan permohonan tidak menggunakan izin ikrar talak yang diberikan dengan melampirkan surat pernyataan perdamaian/rukun kembali yang telah ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya ketua majelis hakim/ hakim membuat penetapan yang menyatakan pemohon tidak menggunakan izin ikrar talak dan menyatakan gugur kekuatan hukum putusan tersebut.

e. Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan dan Elektronik Akta Cerai (e-AC)[789]

1) Penerbitan salinan putusan/penetapan dilakukan secara elektronik.
2) Penerbitan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk perkara *e-court* dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal pengucapan putusan pada aplikasi *e-court*.
3) Penerbitan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk perkara non *e-court* dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal pengucapan putusan.
4) Penerbitan akta cerai dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi EAC.
5) Penerbitan akta cerai secara elektronik untuk perkara cerai gugat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah putusan berkekuatan

---

[788] Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
[789] SEMA Nomor 1 Tahun 2024.

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

6) Putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengucapan putusan atau pemberitahuan putusan diterima.
7) Dalam hal pelaksanaan pemberitahuan isi putusan melalui media elektronik (pos-el) maka tanggal pengiriman *relaas* pemberitahuan elektronik tersebut dijadikan dasar penghitungan tanggal putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan lacak kiriman surat tercatat.
8) Petugas mencatatkan data tanggal putusan berkekuatan hukum tetap ke dalam SIP pada hari yang sama sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
9) Penerbitan akta cerai secara elektronik untuk perkara cerai talak dilakukan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan sidang ikrar talak.
10) Dalam hal para pihak membutuhkan akta cerai yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing maka terjemahan tersebut dapat diterbitkan oleh lembaga penerjemah resmi yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11) Dalam hal ditemukan kekeliruan yang bersifat administratif dan tidak menyangkut substansi putusan dalam salinan putusan dan/atau e-AC yang telah diterbitkan, pengadilan tingkat pertama melakukan perbaikan berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atau Mahkamah Agung.
12) Pengiriman data atau salinan putusan perceraian ke pegawai pencatat nikah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) pengadilan dapat mengirimkan data perceraian dan salinan putusan tanpa bermeterai secara elektronik kepada pegawai pencatat nikah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyediakan data perceraian dan salinan putusan perceraian yang dapat diakses oleh kementerian yang membidangi perkawinan; dan

c) dalam hal data perceraian dan/atau salinan putusan telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada huruf b), pengadilan tingkat pertama tidak perlu mengirimkan data perceraian dan salinan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a).

2. Administrasi Biaya Perkara

a. Administrasi Biaya Perkara pada Tingkat Pertama

1) Ketua bertanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan biaya perkara yang dilakukan oleh panitera.[790]

2) Ketua menerbitkan surat keputusan tentang tim pengelola biaya perkara yang terdiri atas:[791]

a) panitera sebagai pengelola biaya perkara yang ditunjuk oleh ketua pengadilan;

b) bendahara biaya perkara yang ditunjuk oleh panitera; dan

c) staf pelaksana sebagai petugas pembantu bendahara biaya perkara yang ditunjuk oleh panitera.

3) Ketua melakukan pemeriksaan kas atau pengelolaan biaya perkara minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

4) Hakim tinggi pengadilan tingkat banding dan/atau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan biaya perkara di pengadilan berdasarkan surat tugas sesuai

[790] Pasal 1 PERMA Nomor 7 Tahun 2015.
[791] Pasal 5 ayat (2) PERMA 03 Tahun 2012.

ketentuan.

5) Panitera bertanggung jawab dalam pengelolaan biaya perkara.
6) Bendahara biaya perkara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menatausahakan biaya perkara dan keuangan lainnya dari pihak beperkara secara elektronik melalui SIPP dan e-keuangan.
7) Bendahara penerimaan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menatausahakan secara elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi PNBP Umum dan PNBP Fungsional pada Mahkamah Agung.[792]
8) Penatausahaan PNBP Fungsional, pembukuan biaya perkara dan keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilakukan melalui aplikasi e-keuangan, meliputi pembukuan berdasarkan perkara yang terdiri dari buku bantu panjar biaya perkara, buku bantu sisa panjar biaya perkara, dan pembukuan berdasarkan jenis biayanya yang dicatat pada buku bantu lainnya.
9) Buku bantu panjar biaya perkara dan buku bantu sisa panjar biaya perkara pada e-keuangan menyajikan data keuangan perkara yang dicatatkan melalui SIPP.
10) Biaya perkara prodeo DIPA dicatat nihil pada jurnal keuangan perkara.
11) Pembukuan biaya perkara prodeo DIPA dilakukan oleh bendahara pengeluaran mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang penatausahaan dan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Bendahara.
12) Panitera melakukan verifikasi dan validasi data transaksi harian pada aplikasi e-keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
13) Panitera melakukan pemeriksaan kas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dilakukan

---

[792] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020, Keputusan KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019.

pada setiap akhir hari kerja bulan yang bersangkutan.

14) Panitera mengirimkan data biaya perkara secara elektronik setiap hari kepada pengadilan tingkat banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui aplikasi e-keuangan.

15) Panitera menyusun dan mengirimkan laporan biaya perkara setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui pengadilan tingkat banding secara elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja bulan berikutnya.

b. Administrasi Biaya Perkara pada Tingkat Banding

1) Ketua bertanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan biaya proses yang dilakukan oleh panitera.[793]

2) Ketua menerbitkan surat keputusan tentang tim pengelola biaya proses yang terdiri atas:[794]

a) panitera sebagai pengelola biaya proses yang ditunjuk oleh ketua pengadilan;

b) petugas pembuat komitmen yang ditunjuk oleh panitera;

c) bendahara biaya proses yang ditunjuk oleh panitera; dan

d) staf pelaksana yang ditunjuk oleh panitera.

3) Ketua melakukan pemeriksaan kas atau pengelolaan biaya proses minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

4) Hakim tinggi pengadilan tingkat banding dan/atau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan biaya proses di pengadilan berdasarkan surat tugas sesuai ketentuan.

5) Panitera bertanggung jawab dalam pengelolaan biaya proses.

6) Petugas pembuat komitmen biaya proses bertugas

---

[793] Pasal 1 PERMA Nomor 7 Tahun 2015.
[794] Pasal 5 ayat (2) PERMA 03 Tahun 2012.

membantu pelaksanaan tugas pengelola biaya proses.

7) Bendahara biaya proses memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menatausahakan biaya proses secara elektronik melalui SIPP dan e-keuangan.

8) Panitera mengirimkan data biaya proses secara elektronik setiap hari kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui aplikasi e-keuangan.

9) Panitera menyusun dan mengirimkan laporan keuangan perkara setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan paling lambat 2 (dua) hari kerja bulan berikutnya.

3. Register Perkara

a. Register Perkara pada Tingkat Pertama[795]

1) Administrasi perkara pada pengadilan dilakukan secara elektronik pada SIP.

2) Pencatatan pemberian kode jenis perkara menggunakan ketentuan yang ditetapkan.

3) Pengisian data pada SIPP dilakukan secara tertib, teliti, lengkap, dan akuntabel.

4) Data perkara dicatat pada SIPP sebagai register elektronik.

5) Dalam hal data perkara sudah dicatat pada register elektronik maka tidak perlu lagi dicatat di register manual.

6) Panitera melakukan validasi data pada SIPP setiap hari.

7) Register elektronik dinyatakan ditutup pada saat penarikan data secara otomatis setiap akhir bulan atau pada saat pemeriksaan melalui aplikasi e-register.

8) Pencadangan data perkara elektronik dan aplikasi SIPP dilakukan setiap hari dan disimpan di media penyimpanan yang terpusat dan server terkait

[795] PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

sebagai arsip data elektronik.

9) Media penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 8) di atas dapat berupa *cloud computing*/ *harddisk*/*flashdisk* dan sejenisnya.

10) Pencetakan register elektronik dapat dilakukan untuk kepentingan khusus dalam hal pemeriksaan dan dicetak dalam bentuk PDF untuk perkara berkenaan.

b. Register Perkara pada Tingkat Banding

Penyelenggaraan register perkara pada tingkat banding mengacu pada ketentuan Register Perkara Pada Tingkat Pertama.

4. Pelaporan Perkara

a. Pelaporan Perkara pada Tingkat Pertama

1) Pengiriman laporan dilakukan secara elektronik dari pengadilan tingkat pertama ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui pengadilan tingkat banding.

2) Laporan perkara harian dilakukan secara elektronik melalui sinkronisasi harian pada SIPP dan Aplikasi Pendukung SIPP (APS).

3) Laporan perkara bulanan dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

4) Laporan perkara bulanan meliputi:

a) laporan perkara pelaksanaan sidang di luar gedung;

b) laporan perkara dengan pembebasan biaya (prodeo);

c) laporan perkara pelaksanaan sidang terpadu;

d) laporan permohonan eksekusi;

e) laporan perkara belum putus di atas 5 (lima) bulan; dan

f) laporan lainnya sesuai ketentuan.

5) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dapat menyajikan data perkara secara periodik.

b. Pelaporan Perkara pada Tingkat Banding

1) Pengiriman laporan dilakukan secara elektronik

dari pengadilan tingkat banding kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

2) Laporan perkara bulanan dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

3) Pengadilan tingkat banding menyusun laporan perkara belum putus di atas 3 (tiga) bulan dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

5. Kearsipan Perkara[796]

a. Kearsipan Perkara pada Tingkat Pertama

1) Panitera muda terkait bertanggungjawab atas pengelolaan berkas perkara yang masih berjalan.

2) Panitera muda hukum bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

3) Berkas perkara dapat diarsipkan secara digital/alih media, elektronik dan manual.

4) Berkas perkara elektronik dan berkas perkara manual yang telah dialih media ke digital digabungkan menjadi satu file PDF oleh petugas arsip.

5) Berkas perkara yang telah digabungkan sebagaimana dimaksud pada angka 4) diautentikasi dengan cara ditandatangani secara elektronik oleh panitera.

6) Arsip perkara yang telah diautentikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) diunggah ke dalam SIPP.

7) Pengarsipan berkas perkara yang telah diautentikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat disimpan di dalam ruang penyimpanan (*cloud computing/ hard disk/ flash disk* dan sejenisnya).

8) Pengarsipan berkas perkara manual disimpan di dalam *box file* dan menempatkannya dalam rak/ lemari yang disusun secara rapi.

9) Pengelolaan berkas perkara eksekusi dan perkara perlawanan dilakukan secara tersendiri, namun

---

[796] Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Keputusan SEKMA Nomor 1436/SEK/SK.KA2/X/2024.

penyimpanannya disatukan dengan berkas perkara induk.

10) Panitera muda melakukan monitoring kearsipan perkara elektronik minimal satu kali dalam satu minggu dan melaporkannya kepada ketua dan panitera.

b. Kearsipan Perkara pada Tingkat Banding

Ketentuan kearsipan perkara pada tingkat banding mengacu pada ketentuan Kearsipan Perkara Pada Tingkat Pertama angka 1) sampai dengan angka 8), dan angka 10).

C. Administrasi Perkara Jinayat

1. Mahkamah Syar'iyah

a. Penerimaan Perkara Tingkat Pertama

1) Panitera muda jinayat menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh penuntut melalui SIP, kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara.[797]

2) Dokumen permohonan yang tidak lengkap diberi notifikasi kepada penuntut untuk dilengkapi.

3) Permohonan yang telah lengkap diregistrasi dalam SIP untuk diproses.

4) Penuntut mendapatkan nomor perkara yang dikirim oleh pengadilan melalui domisili elektronik.

5) Perkara dengan acara pemeriksaan singkat mendapatkan nomor perkara setelah dakwaan dibacakan.

6) Pengadilan memproses perkara yang dilimpahkan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

7) Pelimpahan perkara yang dilakukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6) diproses pada hari kerja berikutnya.

b. Register Perkara Jinayat

Ketentuan register perkara jinayat mengacu pada pedoman Register Perkara Pada Tingkat Pertama

---

[797] Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf a.

c. Pelaporan Perkara Jinayat

Ketentuan pelaporan perkara jinayat mengacu pada pedoman Pelaporan Perkara Pada Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 huruf a.

d. Kearsipan Perkara Jinayat

Ketentuan kearsipan perkara jinayat mengacu pada pedoman Kearsipan Perkara Pada Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 huruf a.

e. Upaya Hukum

1) Permohonan Banding

a) Terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum berhak untuk memohon banding terhadap putusan mahkamah syar'iyah, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.

b) Permohonan banding diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan diucapkan/diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan[798], kecuali perkara yang *'uqubat*nya paling lama 12 (dua belas) bulan penjara atau yang disetarakan dengannya, pernyataan banding harus dinyatakan langsung setelah putusan diucapkan.[799]

c) Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu sebagaima dimaksud pada huruf b) tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.

d) Pembanding mengajukan pernyataan banding secara elektronik melalui SIP.

e) Dalam hal permohonan banding diajukan oleh

---

[798] Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[799] Pasal 226 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

penasihat hukum, permohonan tersebut wajib disertai dengan surat kuasa.

f) Panitera menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik.

g) Dalam hal pembanding tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.

h) Kepaniteraan jinayat menginput permohonan banding tersebut pada register induk perkara dan register banding pada SIP.

i) Apabila terdakwanya dalam tahanan maka ketua mahkamah syar`iyah pada hari pernyataan mengirim pemberitahuan banding kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui SIP.

j) Kepaniteraan jinayat mahkamah syar'iyah menerima penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh secara elektronik.

k) Panitera memberitahukan permohonan banding kepada terbanding secara elektronik.

l) Waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dinyatakan banding[800], sedangkan yang *'uqubat*nya paling lama 12 (dua belas) bulan, penyerahan memori banding paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah dinyatakan banding.[801]

m) Pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf l) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima.[802]

n) Kepaniteraan mahkamah syar'iyah mengirimkan memori banding kepada

---

[800] Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[801] Pasal 226 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[802] Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

terbanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima.

o) Terbanding atau penasihat hukum dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah menerima memori banding[803], kemudian kepaniteraan pengadilan mengirimkan kontra memori banding kepada pembanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima.

p) Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register, selajutnya salinan memori dan kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan *relaas* pemberitahuan.

q) Pemberitahuan permohonan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding serta pemberitahuan memeriksa berkas perkara bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum dan bukan sebagai pengguna lain, baik yang beralamat dalam wilayah hukum mahkamah syar'iyah yang memutus perkaranya maupun yang berada di luar wilayah hukum disampaikan melalui surat tercatat yang disampaikan melalui kepala rutan tempat terdakwa ditahan.

r) Kepaniteraan mahkamah syar'iyah memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara berupa bundel A dan bundel B termuat dalam SIP.

s) Mahkamah syar'iyah memberikan kesempatan kepada pembanding dan terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui SIP selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara

---

[803] Pasal 225 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

banding (*inzage*).

t) Terbanding sebagaimana dimaksud pada huruf q) melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik di meja *e-court.*

u) Dalam hal pembanding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara di Mahkamah Syar'iyah Aceh maka kepada pembanding wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.[804]

v) Berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak permintaan banding diajukan, harus sudah dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh[805] secara elektronik melalui SIP.

w) Selama perkara banding belum diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.[806]

x) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan sebelum pengiriman berkas ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, mahkamah syar'iyah tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan panitera menerbitkan akta pencabutan secara elektronik.

y) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan setelah pengiriman berkas ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, mahkamah syar'iyah membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh ketua mahkamah syar'iyah. Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, selanjutnya permohonan pencabutan tersebut

---

[804] Pasal 229 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[805] Pasal 229 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[806] Pasal 228 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan penetapan.

z) Permohonan banding yang sudah dicabut tidak boleh diajukan lagi.[807]

aa) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sementara itu pembanding mencabut permohonan bandingnya maka pembanding dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh hingga saat pencabutannya.[808]

bb) Salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah diterima oleh mahkamah syar'iyah, harus diberitahukan melalui SIP kepada terdakwa dan penuntut umum, sedangkan bagi terdakwa yang bukan pengguna lain dirimkan melalui surat tercatat.

cc) Kepaniteraan muda jinayat mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding dan pelaksanaan putusan ke dalam SIP.

2) Permohonan Kasasi

a) Terhadap putusan perkara '*uqubat* yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.[809]

b) Pengajuan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap:

(1) putusan bebas[46]; dan

(2) terhadap putusan perkara yang ancaman '*uqubat* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau '*uqubat* lain yang setara dengan itu.[810]

c) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon

---

[807] Pasal 228 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[808] Pasal 228 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[809] Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[810] Pasal 236 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum atau sejak pemberitahuan putusan diterima oleh pemohon.

d) Permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa melalui kepala rumah tahanan negara/kepala lembaga pemasyarakatan selama masih dalam tenggat waktu pengajuan kasasi dan selanjutnya kepala rumah tahanan negara/kepala lembaga pemasyarakatan meneruskan sekaligus melaporkan adanya permohonan kasasi tersebut kepada panitera mahkamah syar'iyah pengaju secara elektronik atau secara manual kemudian panitera membuat surat keterangan permohonan kasasi serta melaporkan ke Mahkamah Agung.

e) Mahkamah syar'iyah memproses permohonan kasasi yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

f) Permohonan kasasi yang diajukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e) diproses pada hari kerja berikutnya.

g) Dalam hal permohonan kasasi diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, mahkamah syar'iyah memproses permohonan kasasi paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat.

h) Pada hari dinyatakannya permohoan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum, panitera mahkamah syar'iyah pengaju:

   (1) menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik;

   (2) mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register perkara pada SIP; dan

   (3) melaporkan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan kasasi dan status

penahanan terdakwa dalam hal terdakwa ditahan.

i) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf h) angka (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan kasasi melalui SIP.

j) Panitera mahkamah syar'iyah memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan kasasi diterima.

k) Pemohon wajib menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada) dalam tenggat waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah permohonan kasasi diajukan. Selanjutnya petugas membuat akta tanda terima memori/tambahan memori dan ditandatangani oleh panitera.

l) Dalam hal pemohon kasasi merupakan terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan alasan mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.

m) Terhadap permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu atau tidak mengajukan memori kasasi, panitera membuat Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan surat keterangan panitera, ketua mahkamah syar'iyah menerbitkan penetapan bahwa kasasi tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan dilampirkan dalam berkas perkara. Berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung serta penetapan ketua mahkamah syar'iyah tersebut dikirim ke Mahkamah Agung dan diberitahukan kepada pemohon.

n) Panitera mahkamah syar'iyah memberitahukan dan menyerahkan memori kasasi/tambahan memori kasasi (jika ada) kepada termohon

melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima mahkamah syar'iyah.

o) Termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi, dan panitera mahkamah syar'iyah membuat tanda terimanya.

p) Panitera mahkamah syar'iyah menyampaikan pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima mahkamah syar'iyah.

q) Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, panitera mahkamah syar'iyah wajib melampirkan penahanan dimaksud dalam berkas perkara.

r) *Inzage* dalam upaya hukum kasasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) pemberitahuan pelaksanaan *inzage* dikirimkan kepada para pihak secara elektronik;

(2) para pihak diberi kesempatan mempelajari berkas perkara melalui SIP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima;

(3) para pihak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas perkara yang dianggap tidak lengkap; dan

(4) mahkamah syar'iyah menindaklanjuti tanggapan para pihak.

s) Dalam hal termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan permohonan kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi, serta pemberitahuan *inzage* dikirimkan melalui surat tercatat.

t) Pemberitahuan terhadap termohon sebagaimana dimaksud pada huruf s) yang ditahan diberitahukan melalui domisili elektronik tempat termohon ditahan.

u) Kepaniteraan mencetak memori kasasi dan menyampaikannya kepada termohon sebagaimana dimaksud pada huruf s) melalui surat tercatat atau secara elektronik bagi termohon sebagaimana dimaksud pada huruf t).

v) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf s) menyerahkan dokumen lunak (*softcopy*) dan dokumen cetak (*hardcopy*) kontra memori kasasi melalui PTSP, kemudian petugas Kepaniteraan terkait mengunggah kontra memori kasasi tersebut ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

w) Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf t) menyerahkan kontra memori kasasi melalui kepala rutan tempat termohon ditahan selanjutnya mengirimkannya secara elektronik ke pengadilan untuk kemudian diunggah ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

x) Pemeriksaan berkas perkara bagi pihak termohon sebagaimana dimaksud pada huruf s) dan huruf t) dilakukan secara elektronik pada meja *e-court* atau di tempat termohon ditahan.

y) Kepaniteraan mahkamah syar'iyah memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.

z) Panitera mahkamah syar'iyah pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik.

aa) Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui SIP oleh mahkamah syar'iyah pengaju kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan atau 3 (tiga) hari setelah tenggat

waktu *inzage* berakhir.

bb) Kontra memori kasasi tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.

cc) Mahkamah syar'iyah pengaju harus memastikan berkas perkara yang dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung telah lengkap dan jelas.

dd) Dalam hal terdapat berkas perkara yang tidak dapat dialihmediakan/didigitalisasi, atas permintaan Mahkamah Agung, pengadilan pengaju mengirimkan dokumen fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan melalui SIP.

ee) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu.

ff) Dalam hal pemohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pencabutan permohonan kasasi diajukan secara langsung ke pengadilan pengaju.

gg) Permohonan kasasi yang sudah dicabut, tidak dapat diajukan lagi.

hh) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum kasasi diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, mahkamah syar'iyah pengaju tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan mahkamah syar'iyah pengaju menerbitkan akta pencabutan secara elektronik.

ii) Berdasarkan akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf hh) ketua mahkamah syar'iyah menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.

jj) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum kasasi diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf

hh) dikirimkan ke Mahkamah Agung secara elektronik.

kk) Dalam hal perkara belum diregistrasi, berkas perkara dikembalikan ke mahkamah syar'iyah pengaju secara elektronik dengan surat keterangan dari Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung.

ll) Ketua mahkamah syar'iyah pengaju berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf kk) menerbitkan penetapan secara elektronik.

mm) Dalam hal perkara telah diregistrasi, permohonan pencabutan tersebut diputus oleh majelis hakim dengan penetapan secara elektronik.

nn) Dalam hal perkara yang diajukan kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung, petikan putusan dikirim kepada pengadilan pengaju untuk diberitahukan kepada terdakwa, penuntut umum, rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, selanjutnya panitera membuat *relaas* pemberitahuan putusan.

oo) Dalam hal perkara yang diajukan kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada pengadilan pengaju untuk diberitahukan kepada terdakwa, penuntut umum dan penyidik, selanjutnya panitera membuat *relaas* pemberitahuan putusan.

pp) Fotokopi *relaas* pemberitahuan putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa, penuntut umum dan penyidik, segera dikirim ke Mahkamah Agung secara elektronik.

3) Permohonan Peninjauan Kembali

a) Terhadap putusan jinayat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan

permohonan peninjauan kembali.[811]

b) Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada ketua mahkamah syar'iyah yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.[812]

c) Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu.[813]

d) Permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon.

e) Dalam hal terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh kuasa terpidana.

f) Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan surat permohonan peninjauan kembali.

g) Mahkamah syar'iyah memproses permohonan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

h) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g) diproses pada hari kerja berikutnya.

i) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, mahkamah syar'iyah memproses permohonan kasasi paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat.

---

811 Pasal 238 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
812 Pasal 239 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
813 Pasal 240 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

j) Pada hari dinyatakan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana/ahli waris/penasihat hukum maka panitera pengadilan pengaju:
   (1) menerbitkan akta permohonan peninjauan kembali secara elektronik; dan
   (2) mencatat permohonan peninjauan kembali dalam register perkara pada SIP.

k) Dalam hal mahkamah syar'iyah menerima permohonan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Jaksa.

l) Ketua mahkamah syar'iyah paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendaftaran permohonan peninjauan kembali, menetapkan majelis hakim/hakim yang tidak menangani perkara semula melalui SIP untuk memeriksa dan menyidangkan apakah permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

m) Panitera menunjuk panitera sidang pada hari yang sama dengan penetapan majelis hakim/ hakim melalui SIP.

n) Ketua majelis hakim/hakim paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan majelis hakim/ hakim menetapkan hari sidang melalui SIP.

o) juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan terhadap pemohon dan termohon secara elektronik.

p) Terpidana atau ahli warisnya wajib hadir di persidangan, dalam hal terpidana atau ahli waris tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, permohonan peninjauan dinyatakan tidak dapat diterima.

q) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, majelis hakim/hakim menerbitkan

penetapan yang memerintahkan kepada kepala LP di mana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan mahkamah syar'iyah.

r) Dalam hal terpidana sedang menjalani pidana penjara, kehadiran terpidana dalam persidangan dapat diwakili oleh kuasa terpidana.

s) Dalam pemeriksaan persidangan, Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

t) Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan mahkamah syar'iyah.

u) Panitera sidang wajib membuat berita acara pemeriksaan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim/ hakim, jaksa, pemohon dan panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim/ hakim dan panitera yang diunggah ke dalam SIP.

v) Pendapat majelis hakim/hakim sebagaimana dimaksud huruf u) bersifat tertutup dan hanya bisa diakses oleh majelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali.

w) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.

x) Dalam hal bundel A masih berbentuk dokumen cetak, kepaniteraan mahkamah syar'iyah pengaju melakukan digitalisasi dokumen tersebut dan mengunggah ke dalam SIP.

y) Panitera mahkamah syar'iyah pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dan

kejelasan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan secara elektronik.

z) Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui SIP oleh mahkamah syar'iyah pengaju paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak permohonan peninjauan kembali diajukan dan menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada pemohon dan jaksa.

aa) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampirkan tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan yang bersangkutan.

bb) Mahkamah syar'iyah pengaju harus memastikan berkas perkara yang dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung telah lengkap dan jelas.

cc) Dalam hal terdapat berkas perkara yang tidak dapat dialihmediakan/didigitalisasi, atas permintaan Mahkamah Agung, mahkamah syar'iyah pengaju mengirimkan dokumen fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan melalui SIP.

dd) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.

ee) Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah mahkamah syar'iyah yang telah memutus dalam tingkat pertama:

(1) diajukan kepada mahkamah syar'iyah yang memutus dalam tingkat pertama;

(2) hakim dari mahkamah syar'iyah yang

memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan, dapat meminta bantuan pemeriksaan kepada mahkamah syar'iyah di tempat permohonan peninjauan kembali berada;

(3) berita acara pemeriksaan dikirim ke mahkamah syar'iyah yang meminta bantuan pemeriksaan; dan

(4) berita acara pendapat dibuat oleh hakim mahkamah syar'iyah yang telah memutus pada tingkat pertama.

ff) Pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum peninjauan kembali sebelum perkara diputus oleh majelis hakim melalui SIP.

gg) Dalam hal pemohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemohon mengajukan pencabutan permohonan peninjauan kembali melalui:

(1) kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP)/ kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) di tempat pemohon menjalani pemidanaan; atau

(2) diajukan secara langsung ke mahkamah syar'iyah pengaju, dalam hal pemohon tidak sedang menjalani pidana penjara atau permohonan diajukan oleh ahli waris.

hh) Permohonan peninjauan kembali yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali.

ii) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum peninjauan kembali diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, mahkamah syar'iyah pengaju tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan mahkamah syar'iyah pengaju menerbitkan akta pencabutan secara elektronik.

jj) Berdasarkan akta pencabutan sebagaimana

dimaksud pada huruf ii), ketua mahkamah syar'iyah pengaju menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.

kk) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum peninjauan kembali diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, akta pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf ii) dikirimkan ke Mahkamah Agung secara elektronik.

ll) Dalam hal perkara belum diregistrasi, berkas perkara dikembalikan ke pengadilan pengaju secara elektronik dengan surat keterangan dari Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung.

mm) Ketua mahkamah syar'iyah pengaju berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf ll) menerbitkan penetapan secara elektronik.

nn) Dalam hal perkara telah diregistrasi, permohonan pencabutan tersebut diputus oleh majelis hakim dengan penetapan secara elektronik.

oo) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf jj), huruf mm), dan huruf nn) disampaikan kepada para pihak melalui SIP atau melalui surat tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP/tidak memiliki domisili elektronik.

pp) *Relaas* pemberitahuan putusan Mahkamah Agung diunggah ke dalam SIP.

qq) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja sesuai dengan Pasal 240 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.[814]

4) Permohonan Grasi

a) Terhadap putusan jinayat yang telah

[814] Pasal 240 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan grasi ke Presiden[815] secara tertulis oleh:

(1) terpidana dan atau kuasa hukumnya; atau
(2) keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana.

b) Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:

(1) surat pengantar;
(2) daftar isi berkas perkara;
(3) akta berkekuatan hukum tetap;
(4) permohonan grasi dan akta penerimaan permohonan grasi;
(5) salinan permohonan grasi dari terpidana dan akta penerimaan salinan permohonan grasi;
(6) surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada);
(7) BAS;
(8) putusan mahkamah syar'iyah;
(9) putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh (jika ada);
(10) putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada);
(11) surat dakwaan;
(12) eksepsi, dan putusan sela (jika ada);
(13) surat tuntutan;
(14) pembelaan, replik, duplik (jika ada);
(15) penetapan majelis hakim/hakim;
(16) penetapan hari sidang; dan
(17) berita acara pemeriksaan pendahuluan.

c) Putusan jinayat yang dapat diajukan grasi adalah putusan dengan *'uqubat* minimal 2 (dua) tahun penjara atau yang setara dengan

---

[815] Pasal 246 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

itu.

d) Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

e) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) diajukan kepada Presiden melalui ketua mahkamah syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan/atau terakhir untuk diteruskan ke Mahkamah Agung.

f) Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana, permohonan dan salinannya disampaikan melalui kepala LP untuk diteruskan kepada ketua mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tersebut dan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya permohonan dan salinannya, berkas perkara terpidana dikirim kepada Mahkamah Agung.

g) Panitera wajib membuat akta penerimaan salinan permohonan grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan, panitera membuat akta penolakan grasi.

h) Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, mahkamah syar'iyah mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.

i) Salinan Keputusan Presiden yang diterima oleh mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama, dicatat oleh petugas dalam buku register induk, dan diberitahukan oleh panitera kepada terpidana dengan membuat akta pemberitahuan keputusan grasi.

j) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan

peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama maka permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu.

5) Pemberkasan

a) Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang terdiri atas:

(1) berkas perkara penyidik;
(2) pelimpahan perkara dari JPU;
(3) penetapan majelis hakim serta panitera pengganti;
(4) penetapan hari sidang;
(5) *relaas* panggilan;
(6) perintah/penetapan penahanan;
(7) penetapan izin/persetujuan penyitaan (bila ada);
(8) penetapan izin/persetujuan penggeledahan (bila ada);
(9) surat kuasa penasihat hukum;
(10) surat dakwaan JPU;
(11) berita acara sidang;
(12) tuntutan JPU;
(13) pembelaan, replik, dan duplik;
(14) surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan (bila ada);
(15) dokumen elektronik; dan
(16) surat-surat lainnya.

b) Bundel A tersebut disimpan oleh mahkamah syar'iyah dan menjadi arsip di panitera muda hukum.

c) Dalam hal ada upaya hukum banding, panitera menyiapkan bundel berkas yang disebut Bundel B. Bundel B merupakan himpunan surat-surat yang terdiri atas:

(1) surat permohonan banding;
(2) akta permohonan banding;
(3) akta pemberitahuan permohonan banding;
(4) memori banding;

(5) akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding;
(6) kontra memori banding;
(7) akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding;
(8) surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara;
(9) akta memeriksa berkas perkara (*inzage*);
(10) salinan putusan;
(11) dokumen elektronik; dan
(12) surat-surat lainnya.

d) Bundel B atas upaya hukum banding disimpan dan menjadi arsip di Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.

e) Dalam hal ada upaya hukum kasasi, panitera mahkamah syar'iyah menyiapkan bundel B. Bundel B merupakan himpunan surat-surat yang terdiri atas:
(1) daftar isi dan surat pengantar;
(2) akta pemberitahuan putusan tingkat banding;
(3) akta pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon kasasi;
(4) memori kasasi/tambahan memori kasasi;
(5) akta penerimaan memori kasasi/ tambahan memori kasasi;
(6) akta terlambat mengajukan permohonan kasasi;
(7) akta tidak mengajukan memori kasasi;
(8) akta terlambat mengajukan memori kasasi yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera;
(9) akta pemberitahuan/penyerahan memori kasasi/tambahan memori kasasi kepada termohon kasasi;
(10) kontra memori kasasi/tambahan kontra memori kasasi;
(11) akta pemberitahuan/penyerahan kontra

memori/tambahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi;

(12) surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara;

(13) akta memeriksa berkas perkara (*inzage*).

(14) dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat pertama;

(15) dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat banding;

(16) surat kuasa khusus untuk mengajukan kasasi dari terdakwa;

(17) dokumen elektronik; dan

(18) surat-surat lainnya.

f) Bundel B atas upaya hukum kasasi disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung.

g) Dalam hal ada upaya hukum peninjauan kembali panitera mahkamah syar'iyah menyiapkan bundel B. Bundel B yang berkaitan dengan adanya permohonan peninjauan kembali terdiri atas:

(1) surat keterangan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon;

(2) surat permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasannya;

(3) salinan putusan mahkamah syar'iyah;

(4) salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh (bila ada);

(5) salinan putusan Mahkamah Agung (bila ada);

(6) berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat hakim;

(7) dokumen elektronik; dan

(8) surat-surat lainnya.

h) Bundel B atas upaya hukum peninjauan kembali disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung.

2. Mahkamah Syar'iyah Aceh

a. Penerimaan Perkara

1) Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima berkas/ dokumen upaya hukum yang dikirim oleh mahkamah syar'iyah pengaju melalui SIP.

2) Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa kelengkapan berkas/dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi pula barang-barang bukti yang diajukan oleh JPU, yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara. Barang-barang bukti tersebut dicatat dalam buku daftar barang bukti.

4) Dalam hal terdapat berkas/dokumen yang tidak dapat dialihmediakan/digitalisasi, atas permintaan Mahkamah Syar'iyah Aceh, mahkamah syar'iyah pengaju mengirimkan dokumen fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan.

5) Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan berkas/ dokumen elektronik Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan notifikasi/pemberitahuan secara elektronik kepada mahkamah syar'iyah pengaju mengenai hal-hal yang harus dilengkapi.

6) Dalam hal berkas/dokumen elektronik telah dinyatakan lengkap, tetapi terdapat dokumen yang tidak jelas/terbaca, hakim pemeriksa pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat meminta kepada mahkamah syar'iyah pengaju untuk mengunggah kembali berkas/dokumen elektronik dimaksud.

7) Mahkamah syar'iyah pengaju mengirimkan berkas/ dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6) melalui SIP paling lambat 3 (tiga) hari setelah notifikasi/permintaan secara elektronik dikirimkan.

8) Dalam hal berkas upaya hukum telah lengkap, Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan notifikasi/pemberitahuan dalam SIP

dan menindaklanjuti penanganan perkara upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9) Penomoran, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, dan penetapan hari sidang dilakukan melalui SIP.

b. Pemberkasan Banding

1) Setelah perkara diputus dalam tingkat banding, Panitera menyiapkan dan mengirimkan kembali bundel A dan salinan putusan kepada mahkamah syar'iyah.

2) Bundel A merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan surat PMH dan semua kegiatan/proses persidangan/pemeriksaan perkara tersebut.

3) Bundel B merupakan himpunan surat-surat perkara yang berkaitan dengan permohonan banding (menjadi arsip berkas perkara pada Mahkamah Syar'iyah Aceh) yang terdiri atas:

a) surat permohonan banding;
b) akta pernyataan banding;
c) akta pemberitahuan permohonan banding;
d) memori banding;
e) akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding;
f) kontra memori banding;
g) akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding;
h) surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara;
i) berita acara/akta memeriksa berkas perkara;
j) dokumen elektronik; dan
k) surat-surat lainnya.

c. Register Perkara Jinayat

Ketentuan register perkara jinayat mengacu pada pedoman Register Perkara sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf b.

d. Pelaporan Perkara Jinayat

Ketentuan pelaporan perkara jinayat mengacu pada pedoman Pelaporan Perkara sebagaimana dimaksud

pada huruf B angka 4 huruf b.

e. Kearsipan Perkara Jinayat

Ketentuan kearsipan perkara jinayat mengacu pada pedoman Kearsipan Perkara sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 huruf b.

II. Teknis Peradilan

A. Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Sumber Hukum

1. Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

a. Kewenangan (Kompetensi) Absolut

1) Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain.

2) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[816]

3) Apabila terjadi sengketa hak milik dalam perkara sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama dengan perkara tersebut.[817]

4) Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada angka 3) merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat transaksi kedua dan seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.[818]

---

[816] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
[817] Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
[818] SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

5) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.[819]
6) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang mengadili gugatan terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang usahanya berdasarkan prinsip syariah.[820]
7) Mahkamah syar'iyah di samping bertugas dan berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) sampai dengan angka 6) juga bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang jinayat (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003, Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, dan Qanun Aceh terkait lainnya.
8) Kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang *ahwalusysyakhsiyyah* meliputi perkawinan, waris dan wasiat.[821]
9) Kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang muamalah meliputi hukum kebendaan dan perikatan meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, *qiradh*, *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *wakalah*, *syirkah*, *ariyah*, *hajru*, *syuf'ah*, *rahn*, *ihyaul mawat*, *ma'din*, *luqathah*, perbankan, asuransi, perburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, shadaqah, dan hadiah.[822]
10) Kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang jinayat meliputi khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina,

---

[819] Pasal 52A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
[820] Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2025.
[821] Penjelasan Pasal 49 huruf a Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002.
[822] Penjelasan Pasal 49 huruf b Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 *jo.* Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.[823]

11) Selain kewenangan absolut sebagaimana tersebut di atas, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi.

b. Kewenangan (Kompetensi) Relatif

1) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

a) tempat tinggal tergugat atau domisili/tempat tinggal tergugat sebenarnya;[824]

b) tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;[825]

c) tempat tinggal tergugat utama, jika hubungan antara para tergugat adalah sebagai yang berutang dan penjaminnya;[826]

d) tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat, dalam hal:[827]

(1) tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui keberadaannya; atau

(2) tergugat tidak dikenal (dalam gugatan disebutkan dahulu bertempat tinggal/tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya);

---

[823] Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.
[824] Pasal 118 HIR ayat (1)/Pasal 142 ayat (1) RBg.
[825] Pasal 118 HIR ayat (2)/Pasal 142 ayat (2) RBg.
[826] Pasal 118 HIR ayat (2)/Pasal 142 ayat (2) RBg.
[827] Pasal 118 HIR ayat (3)/Pasal 142 ayat (3) RBg.

e) tempat objek perkara terletak dalam hal objek tersebut dalam bentuk benda tidak bergerak;[828] dan

f) Tempat domisili yang dipilih oleh para pihak dalam akta/akad.[829]

2) Pengecualian:

a) dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya;[830] atau

b) dalam hal berkaitan dengan pegawai negeri, berlaku ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg.

3) Tentang intervensi penjaminan (*vrijwaring*), pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan.[831]

c. Sengketa Kewenangan

1) Dalam menangani sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata memedomani ketentuan sebagai berikut:

a) sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi jika:[832]

(1) dua pengadilan atau lebih menyatakan berwenang untuk mengadili perkara yang sama; atau

(2) dua pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama;

b) pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan yang terjadi antara pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di daerah

---

828 Pasal 118 HIR ayat (3)/Pasal 142 ayat (5) RBg.
829 Pasal 118 HIR ayat (4)/Pasal 142 ayat (4) RBg.
830 Pasal 21 KUHPerdata.
831 Pasal 76 Rv.
832 Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

hukumnya;[833]

c) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili antara:[834]
   (1) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan lingkungan peradilan yang lain;
   (2) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang berbeda wilayah hukum pengadilan tinggi agamanya; dan
   (3) pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan pengadilan tinggi agama yang lain atau pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan pengadilan tingkat banding dari lingkungan peradilan yang lain;

d) dalam hal terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan atau lebih yang menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama:[835]
   (1) pihak beperkara, atau dalam hal tidak diajukan oleh pihak beperkara, ketua pengadilan karena jabatannya mengajukan permohonan secara elektronik kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili;
   (2) apabila permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak beperkara, atau diajukan oleh ketua pengadilan karena jabatannya maka pengadilan harus menunda pemeriksaan perkaranya tersebut yang dituangkan dalam bentuk "PENETAPAN", sampai sengketa kewenangan tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;
   (3) pengadilan yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan

---

[833] Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
[834] Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
[835] Angka 3 SEMA Nomor 1 Tahun 1996.

mengadili, harus mengirimkan salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut kepada Pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama; dan

(4) pengadilan lain yang menerima salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut, harus menunda pemeriksaan perkara dimaksud sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

e) apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan atau lebih yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama maka pihak beperkara dapat mengajukan permohonan secara elektronik untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan tingkat pertama;[836]

f) permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak beperkara, dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh ketua pengadilan tingkat pertama, termasuk di dalamnya untuk biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung;[837] dan

g) permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh ketua pengadilan tidak dikenakan biaya.[838]

2) Proses pengajuan permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak beperkara harus memenuhi syarat sebagai berikut:[839]

a) pemohon membayar biaya perkara sengketa kewenangan mengadili sejumlah biaya perkara kasasi yang berlaku dan dikirim melalui rekening biaya perkara Mahkamah Agung;

b) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membuat akta permohonan sengketa kewenangan mengadili dan mendaftarkannya dalam register permohonan

---

[836] Angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 1996.
[837] Angka 5 SEMA Nomor 1 Tahun 1996.
[838] Angka 6 SEMA Nomor 1 Tahun 1996.
[839] Pasal 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

sengketa kewenangan mengadili;

c) pemohon harus membuat alasan permohonan sengketa kewenangan mengadili dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembuatan akta permohonan sengketa kewenangan;

d) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menghentikan pemeriksaan perkara tersebut dengan putusan sela setelah menerima permohonan sengketa kewenangan mengadili dari pihak beperkara;

e) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mengirimkan berkas perkara sengketa kewenangan mengadili ke Mahkamah Agung yang terdiri atas:

(1) akta permohonan sengketa kewenangan mengadili dan alasan-alasannya;

(2) surat pemberitahuan akta permohonan sengketa kewenangan mengadili dan alasannya kepada badan peradilan lainnya yang terkait;

(3) berkas perkara (bundel A) pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang berisi gugatan sampai berita acara sidang terakhir sebelum diajukan permohonan sengketa kewenangan mengadili; dan

(4) bukti pengiriman biaya perkara sengketa kewenangan mengadili;

f) pihak lawan berhak mengajukan jawaban disertai pendapat dan alasan-alasannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan sengketa kewenangan mengadili melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah; dan

g) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mengirimkan jawaban serta alasan-alasan permohonan sengketa kewenangan mengadili ke Mahkamah Agung.

3) Jika permohonan sengketa kewenangan mengadili diajukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah maka pengadilan agama/mahkamah syar'iyah harus melakukan hal-hal sebagai berikut:[840]

a) membuat akta permohonan sengketa kewenangan mengadili disertai alasan-alasannya, selanjutnya mengirimkan salinan akta permohonan tersebut kepada lingkungan peradilan lain yang terkait sebagai pemberitahuan;

b) mengirimkan berkas perkara permohonan sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung, yang berisi:

(1) akta dan alasan permohonan sengketa kewenangan mengadili;

(2) surat pemberitahuan adanya sengketa kewenangan mengadili dan alasannya kepada lingkungan peradilan lainnya yang terkait; dan

(3) berkas perkara (bundel A) pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah; dan

c) permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tidak dikenakan biaya perkara.

2. Sumber Hukum

a. Hukum Materiel Peradilan Agama

1) Al-Qur'an dan Hadis.

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan

---

[840] Pasal 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
10) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
13) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
14) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
15) Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
16) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
17) Yurisprudensi.
18) Qanun Aceh.
19) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
20) Akad Ekonomi Syariah.

b. Hukum Acara Peradilan Agama

1) HIR.
2) RBg.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
9) Yurisprudensi.
10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
11) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
12) Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.

c. Hukum Acara Mahkamah Syar'iyah
   1) Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.
   2) Hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum.
   3) Qanun Aceh tentang hukum acara.

3. Asas Personalitas Keislaman
   a. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memiliki kewenangan atas semua sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam.[841]
   b. Asas personalitas keislaman juga berlaku dalam perkara sebagai berikut:[842]
      1) sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun salah satu pasangan suami istri atau keduanya keluar dari agama Islam;
      2) dispensasi kawin atas anak yang beragama Islam, meskipun orang tuanya nonmuslim;
      3) sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli warisnya nonmuslim;

---

[841] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
[842] Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

4) sengketa di bidang ekonomi syariah, meskipun nasabahnya nonmuslim;
5) sengketa di bidang wakaf, meskipun para pihak atau salah satu pihak nonmuslim; dan
6) sengketa di bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, meskipun para pihak atau salah satu pihak nonmuslim.

B. Teknis Peradilan Perkara Perdata

1. Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

a. Pedoman Umum

1) Perkara Permohonan (*Voluntair*)

a) Surat Kuasa

(1) Surat kuasa untuk beracara di pengadilan harus berupa surat kuasa khusus.[843]

(2) Surat kuasa khusus dibuat di hadapan notaris/panitera pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah atau di bawah tangan.

(3) Yang dapat menjadi kuasa hukum adalah advokat, jaksa, biro hukum pada instansi/ lembaga/badan hukum dan keluarga.

(4) Surat kuasa khusus yang diberikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara di mana WNI tersebut berada. Namun, jika suatu negara tidak memiliki KBRI maka pengesahan tersebut dapat dilakukan melalui Konsulat Jenderal (KJRI).[844]

(5) Kuasa dari keluarga harus mendapat izin dari pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk beracara secara insidentil.

(6) Keluarga yang dapat menjadi kuasa insidentil dibatasi hanya suami/istri dan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah.

---

[843] Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 1795 KUHPerdata.

[844] Putusan MA Nomor 3038 K/Pdt/1981, Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006.

(7) Surat kuasa khusus harus memenuhi syarat:[845]
   (a) tanggal pembuatan surat kuasa;
   (b) identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa;
   (c) menjelaskan jenis kasus yang dikuasakan;
   (d) mencantumkan pihak dan kedudukan para pihak;
   (e) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang akan menangani perkara; dan
   (f) surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa.

(8) Dalam hal surat kuasa khusus dibuat di hadapan notaris/panitera, surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang menerima kuasa serta notaris/panitera.

b) Pendaftaran

(1) Permohonan diajukan secara elektronik melalui SIP.

(2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, permohonan tersebut dicatat oleh ketua atau hakim yang ditunjuk dan didaftarkan secara elektronik melalui SIP.

(3) Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh pemohon.

(4) Perkara permohonan harus diputus oleh majelis hakim/hakim dalam bentuk penetapan.

(5) Pengadilan agama/mahkamah syariyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh

---

[845] SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum.

c) Persidangan

(1) Sidang pertama

(a) Ketua majelis hakim/hakim membuka sidang yang dilaksanakan di ruang sidang sesuai tanggal dan jam pelaksanaan sidang yang telah ditetapkan.

(b) Pengguna terdaftar atau pengguna lain menyerahkan surat kuasa asli dan surat permohonan asli.

(c) Majelis hakim/hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP.

(d) Dalam hal pengguna terdaftar tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli maka persidangan tidak dapat dilanjutkan sampai pengguna terdaftar dapat menunjukkan surat kuasa asli sesuai dengan dokumen yang diunggah di SIP.

(e) Dalam hal pemohon/para pemohon tetap ingin melanjutkan persidangan maka pemohon/para pemohon harus menyatakan mencabut surat kuasa dan sidang diskors untuk memberi kesempatan kepada pemohon/para pemohon untuk membuat akun sebagai pengguna lain.

(f) Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen surat permohonan yang diunggah ke dalam SIP dengan dokumen asli surat permohonan yang diperlihatkan di persidangan maka pemohon/para pemohon mengunggah kembali permohonan sebagai dokumen

perubahan permohonan.

(g) Pada sidang yang dihadiri pemohon/para pemohon, ketua majelis hakim/hakim menjelaskan hak dan kewajiban pemohon/para pemohon terkait persidangan secara elektronik.

(h) Dalam hal pemohon/para pemohon tidak hadir, majelis hakim/hakim dapat menunda persidangan dan memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil kembali pemohon/para pemohon secara elektronik.

(i) Apabila pemohon/para pemohon tidak hadir dalam sidang selanjutnya, majelis hakim/hakim melanjutkan persidangan dengan musyawarah dan membuat penetapan gugur dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon/ para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon/ para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp… (... rupiah);

(2) Perubahan/Perbaikan Permohonan[846]

(a) Perubahan permohonan dapat diajukan paling lambat sebelum pembuktian.

(b) Setelah majelis hakim/hakim mengonfirmasi tentang perubahan permohonan, selanjutnya persidangan pembuktian dilaksanakan secara langsung di ruang sidang.

(3) Pencabutan Permohonan[847]

(a) Permohonan pencabutan perkara *voluntair* diajukan melalui SIP.

(b) Majelis hakim/hakim memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud

---

[846] Pasal 127 Rv dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.
[847] Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

pada huruf (a) melalui SIP.

(c) Dalam hal permohonan pencabutan dilakukan di depan sidang pengadilan, permohonan tersebut dibuat secara tertulis. Majelis hakim/hakim menskors sidang dan memerintahkan kepada pemohon/para pemohon untuk keluar ruang sidang dan memberitahukan bahwa penetapan akan disampaikan secara elektronik melalui SIP apabila pencabutan di depan persidangan.

(d) Majelis hakim/hakim bermusyawarah dan membuat penetapan pencabutan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor ..... dari Pemohon/para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon/ para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);

(e) Panitera sidang membuat BAS melalui SIP.

(f) Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

(4) Sidang Pembuktian[848]

(a) Pemohon/para pemohon harus mengunggah alat bukti yang telah bermeterai dan/atau alat bukti elektronik ke dalam SIP dalam rentang waktu sejak mendaftar perkara sampai sebelum sidang pembuktian.

(b) Dalam hal terdapat dokumen bukti surat melebihi kapasitas yang disediakan oleh

[848] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

SIP maka pemohon/para pemohon mengunggah dokumen tersebut melalui tautan (media penyimpanan *online*) yang terdapat di dalam SIP.

(c) Asli dari surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan untuk dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP dan hasilnya dicatat ke dalam BAS.

(d) Fotokopi bukti surat bermeterai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diserahkan kepada majelis hakim/ hakim.

(e) Sidang pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual*, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

(f) Pemeriksaan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. saksi/ahli yang berada di dalam negeri diperiksa dari pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli; dan

ii. saksi/ahli yang berada di luar negeri, diperiksa dari KBRI/KJRI di mana saksi/ahli berada.[849]

(g) Pemeriksaan saksi/ahli dari pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ ahli dilakukan dengan ketentuan:

i. persidangan secara elektronik

[849] Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 dan Nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024.

menggunakan sarana dan prasarana pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli yang memungkinkan saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan;

ii. panitera pengadilan pemeriksa perkara menyampaikan surat permohonan pemeriksaan saksi/ ahli secara elektronik atau melalui media elektronik kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli;

iii. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka romawi ii minimal memuat informasi tentang nomor perkara, identitas pihak, identitas saksi/ahli yang akan diperiksa, usulan jadwal pemeriksaan yang telah disesuaikan dengan jam kerja pada kantor pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli, akun media telekonferensi resmi, dan alamat elektronik dan/atau nomor kontak pengadilan pemeriksa perkara sebagai sarana koordinasi dengan pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli;

iv. berdasarkan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka romawi ii, pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik di pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli sesuai dengan waktu yang disepakati;

v. berdasarkan permohonan secara elektronik atau melalui media

elektronik sebagaimana dimaksud pada angka romawi ii, ketua pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli menunjuk seorang panitera pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi jalannya pemeriksaan dan menyampaikan jawaban secara elektronik atau melalui media elektronik tentang kesiapan pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima;

vi. dalam hal panitera pengganti sebagaimana dimaksud pada angka romawi v berhalangan atau tidak ada, pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli menunjuk seorang panitera/panitera muda;

vii. ketua majelis hakim/hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang pengadilan, dengan agenda pemeriksaan saksi/ahli, menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ ahli di depan persidangan tempat pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh yang ditunjuk, dan dilanjutkan dengan permintaan/pemberian keterangan saksi/ahli;

viii. panitera pengganti/panitera muda/ panitera yang ditunjuk tanpa menggunakan atribut mengawasi pemeriksaan jarak jauh dengan cara:

i) memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat pemeriksaan jarak jauh sesuai

dengan sifat pemeriksaan tersebut (terbuka atau tertutup untuk umum); dan

ii) berada dalam ruang sidang tempat pemeriksaan jarak jauh selama pemeriksaan berlangsung meskipun sidang tertutup untuk umum;

ix. panitera pengganti/panitera muda/ panitera yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka romawi v dan angka romawi vi, melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi/ahli tentang pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh yang memuat hari, tanggal, waktu (mulai dan selesai), situasi sesuai sifat sidang, pelaksanaan (kualitas suara dan gambar terputus putus atau tidak atau kendala lainnya) dan ditandatangani oleh panitera/panitera muda/panitera pengganti yang ditunjuk tersebut;

x. dalam hal terdapat kendala teknis yang mengakibatkan sidang pemeriksaan saksi/ahli secara jarak jauh tidak dapat dilanjutkan, demi hukum, sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir;

xi. dalam hal kendala teknis tidak dapat diatasi selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum, sidang pemeriksaan saksi/ahli secara jarak jauh ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan termuat dalam SIP;

xii. dalam hal kendala teknis berupa gangguan koneksi telekonferensi pada saat pelaksanaan, ketua majelis hakim/hakim berwenang untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut diulang pada hari itu, atau ditunda atau dianggap cukup tanpa merugikan para pihak;

xiii. panitera sidang mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam BAS melalui SIP; dan

xiv. segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses pemeriksaan jarak jauh dibebankan kepada pemohon/para pemohon.

(h) Pemeriksaan saksi/ahli dari kantor perwakilan negara Indonesia dilakukan dengan ketentuan:[850]

i. KBRI/KJRI dapat memfasilitasi pemeriksaan saksi/ahli selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara setempat;

ii. persidangan secara elektronik menggunakan sarana dan prasarana KBRI/KJRI yang memungkinkan saksi/ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan;

iii. pengadilan pemeriksa perkara menyampaikan surat permohonan pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik melalui Mahkamah Agung kepada KBRI/KJRI dengan tembusan kepada Kementerian Luar Negeri;

---

[850] PKS antara MA dan Kemenlu Nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 dan Nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024.

iv. surat permohonan sebagaimana dimaksud angka romawi iii minimal memuat informasi tentang nomor perkara, identitas pihak, identitas saksi/ahli yang akan diperiksa, usulan jadwal pemeriksaan yang telah disesuaikan dengan jam kerja pada kantor perwakilan setempat, akun media telekonferensi resmi, dan alamat elektronik dan/atau nomor kontak pengadilan Indonesia sebagai sarana koordinasi dengan KBRI/KJRI;

v. KBRI/KJRI mengirimkan informasi secara tertulis terkait pelaksanaan pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik oleh pengadilan Indonesia kepada otoritas berwenang pada negara terkait;

vi. KBRI/KJRI menyetujui pelaksanaan pemeriksaan saksi/ahli oleh pengadilan Indonesia sesuai dengan waktu yang disepakati;

vii. dalam hal KBRI/KJRI menolak untuk melaksanakan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka romawi iii maka penolakan tersebut disertai dengan alasan yang jelas;

viii. dalam hal KBRI/KJRI bersedia memenuhi permohonan sebagaimana dimaksud pada angka romawi iii namun tidak menyetujui jadwal pelaksanaannya maka sidang pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik dijadwalkan ulang sesuai kesepakatan antara KBRI/KJRI dengan pengadilan Indonesia;

ix. berdasarkan persetujuan dari

KBRI/KJRI, ketua majelis hakim/ hakim membuat jadwal pemeriksaan jarak jauh dengan memperbarui jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang disampaikan kepada pemohon/para pemohon melalui SIP dan memerintahkan pemohon/para pemohon untuk:

i) menghadiri persidangan pada Pengadilan pemeriksa perkara pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan; dan

ii) menghadirkan saksi dan/atau ahli di KBRI/KJRI pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan;

x. ketua majelis hakim/hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang pengadilan, dengan agenda pemeriksaan saksi/ahli, menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ ahli di depan persidangan tempat pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh yang ditunjuk, dan dilanjutkan dengan permintaan/pemberian keterangan saksi/ahli;

xi. dalam hal terdapat kendala teknis yang mengakibatkan sidang pemeriksaan saksi/ahli secara jarak jauh tidak dapat dilanjutkan, demi hukum, sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir;

xii. dalam hal kendala teknis tidak dapat diatasi selama 60 (enam puluh)

menit, demi hukum, sidang pemeriksaan saksi/ahli secara jarak jauh ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan termuat dalam SIP;

xiii. dalam hal kendala teknis berupa gangguan koneksi telekonferensi pada saat pelaksanaan, ketua majelis hakim/hakim berwenang untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut diulang pada hari itu, atau ditunda atau dianggap cukup tanpa merugikan para pihak;

xiv. panitera sidang mencatat semua aktivitas persidangan elektronik dalam BAS melalui SIP; dan

xv. segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses pemeriksaan jarak jauh dibebankan kepada pemohon/para pemohon.

(5) Pemeriksaan Setempat[851]

(a) Dalam hal memerlukan pemeriksaan setempat seperti perkara isbat wakaf, dilakukan sesuai ketentuan hukum acara.

(b) Berita acara pemeriksaan setempat harus diunggah ke dalam SIP oleh panitera sidang.

(6) Musyawarah dan Pengucapan Penetapan[69]

(a) Majelis hakim/hakim dapat menskors/ menunda sidang untuk musyawarah majelis dan memberitahukan kepada pemohon/para pemohon bahwa penetapan akan diucapkan secara elektronik melalui SIP.

---

[851] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

(b) Majelis hakim/hakim bermusyawarah dan membuat penetapan.

(c) Majelis hakim/hakim melanjutkan persidangan untuk mengucapkan penetapan secara elektronik.

(d) Panitera sidang membuat BAS melalui SIP.

(e) Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

(7) Salinan Penetapan[852]

(a) Naskah penetapan diunggah oleh ketua majelis hakim/hakim ke dalam SIP pada hari dan tanggal yang sama.

(b) Panitera menyesuaikan naskah penetapan dengan penetapan yang telah ditandatangani secara manual oleh majelis hakim/hakim dan panitera sidang, kemudian panitera menandatangani naskah penetapan tersebut secara elektronik menjadi salinan penetapan pada hari dan tanggal yang sama dengan musyawarah majelis.

(c) Panitera yang sedang berhalangan tidak tetap, berwenang untuk menandatangani salinan penetapan secara elektronik.

(d) Dalam hal panitera berhalangan tetap, ketua pengadilan menunjuk pelaksana tugas (Plt.) panitera untuk menandatangani salinan penetapan secara elektronik.

(e) Salinan penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

(f) Pemohon/para pemohon dapat mengunduh salinan penetapan elektronik setelah membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(g) Dalam hal pemohon/para pemohon

---

[852] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

meminta salinan putusan/penetapan elektronik dalam bentuk cetak, salinan tersebut dapat diberikan setelah membayar PNBP.

2) Perkara Gugatan/Permohonan (*Contentiosa*)

a) Surat Kuasa

(1) Ketentuan mengenai surat kuasa dalam perkara permohonan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan surat kuasa dalam perkara gugatan.

(2) Dalam beberapa keadaan digunakan surat kuasa istimewa, yaitu dalam hal:

(a) mewakili suami mengikrarkan talak;[853]

(b) mewakili para pihak mengucapkan sumpah di hadapan persidangan; [854] dan

(c) mewakili para pihak dalam proses mediasi.[855]

(3) Surat kuasa istimewa sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(a) surat kuasa khusus dalam perkara permohonan (*voluntair*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) angka (7) huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan angka (8);

(b) bersifat limitatif baik subjek maupun objek dan tidak dapat disubstitusikan;

(c) dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang, dalam hal ini panitera/notaris;

(d) memuat lafaz ikrar talak/sumpah yang akan diucapkan di hadapan persidangan; dan

(e) untuk keperluan mediasi, harus mencantumkan klausul kewenangan

---

[853] Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
[854] Pasal 157 HIR/Pasal 184 RBg.
[855] Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

untuk mengambil keputusan dan menandatangani hasil mediasi.

b) Pendaftaran[856]

(1) Gugatan/permohonan diajukan secara elektronik melalui SIP.

(2) Dalam hal gugatan/permohonan tidak diajukan secara elektronik, gugatan/ permohonan dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

(3) Penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatan/permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, gugatan/permohonan tersebut dicatat oleh ketua atau hakim yang ditunjuk dan didaftarkan secara elektronik melalui SIP.

(4) Gugatan/permohonan harus ditandatangani oleh penggugat/pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh penggugat/pemohon.

(5) Perkara gugatan/permohonan harus diputus oleh majelis hakim/hakim dalam bentuk putusan/penetapan.

c) Persidangan[857]

(1) Sidang Pertama

(a) Dalam hal penggugat/pemohon dan tergugat/termohon hadir

i. Ketua majelis hakim/hakim membuka sidang yang dilaksanakan di ruang sidang sesuai tanggal dan jam pelaksanaan sidang yang telah ditetapkan.

ii. Pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan surat kuasa asli dan surat gugatan/permohonan asli.

---

[856] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.
[857] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

iii. Majelis hakim/hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli sebagaimana dimaksud pada angka romawi ii dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP.

iv. Dalam hal Pengguna Terdaftar tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli maka persidangan tidak dapat dilanjutkan sampai pengguna terdaftar dapat menunjukkan surat kuasa asli sesuai dengan dokumen yang diunggah di SIP.

v. Dalam hal penggugat/pemohon tetap ingin melanjutkan persidangan maka penggugat/pemohon harus menyatakan mencabut surat kuasa dan sidang diskors untuk memberi kesempatan kepada penggugat/ pemohon untuk membuat akun sebagai pengguna lain.

vi. Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen surat gugatan/ permohonan yang diunggah ke dalam SIP dengan dokumen asli surat gugatan/permohonan yang diperlihatkan di persidangan maka penggugat/pemohon mengunggah kembali gugatan/permohonan sebagai dokumen perubahan gugatan/permohonan.

vii. Ketua majelis hakim/hakim menjelaskan hak dan kewajiban penggugat/pemohon atau kuasanya terkait persidangan secara elektronik.

viii. Ketua majelis hakim/hakim menawarkan dan meminta

persetujuan persidangan secara elektronik kepada tergugat/ termohon dalam hal tergugat/ termohon tidak diwakili kuasa hukum yang telah tercatat sebagai pengguna terdaftar.

ix. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi viii dituangkan dalam BAS.

x. Dalam hal tergugat/termohon setuju beperkara secara elektronik, ketua majelis hakim/hakim menskors sidang untuk memberikan kesempatan kepada tergugat/ termohon untuk membuat akun sebagai pengguna lain di PTSP.

xi. Setelah pembuatan akun selesai dan skors dicabut, selanjutnya:

i) majelis hakim/hakim mengupayakan damai kepada para pihak dan apabila tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi; dan

ii) majelis hakim/hakim memberikan penjelasan tentang mediasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator serta memerintahkan kepada para pihak untuk menandatangani formulir para pihak tentang penjelasan mediasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/ VI/2016.

xii. Dalam hal terdapat tergugat/turut tergugat/termohon/turut termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik maka persidangan elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui, sedangkan tergugat/turut tergugat/termohon/ turut termohon yang tidak menyetujui menyerahkan jawaban, duplik dan kesimpulan kepada panitera sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang, untuk diunggah ke dalam SIP.

(b) Dalam hal penggugat/pemohon tidak hadir

i. Majelis hakim/hakim dapat menunda persidangan dan memerintahkan kepada juru sita/ juru sita pengganti untuk memanggil kembali penggugat/ pemohon secara elektronik.

ii. Apabila pemohon/para pemohon tidak hadir dalam sidang selanjutnya, majelis hakim/hakim melanjutkan persidangan dengan musyawarah dan menjatuhkan penetapan gugur dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan/ permohonan Penggugat/ Pemohon gugur;
2. Membebankan/Menghukum kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp… (… rupiah);

(c) Dalam hal tergugat/termohon tidak hadir

i. Majelis hakim/hakim dapat menunda persidangan dan

memerintahkan kepada juru sita/ juru sita pengganti untuk memanggil kembali tergugat/ termohon melalui domisili elektronik atau surat tercatat.

ii. Memberitahukan kepada pihak penggugat/pemohon untuk hadir pada sidang berikutnya tanpa harus dipanggil kembali.

iii. Apabila tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang berikutnya, majelis hakim/hakim melanjutkan agenda persidangan dengan menasihati penggugat/pemohon agar menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

iv. Apabila upaya nasihat perdamaian tidak berhasil, agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

v. Amar putusan dalam hal tergugat/termohon tidak hadir adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat/ Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemohon seluruhnya/sebagian dengan verstek, Menolak gugatan Penggugat/Pemohon dengan verstek, atau Menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Membebankan/ menghukum kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);

(2) Mediasi[858]

(a) Proses mediasi memedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

(b) Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

(c) Mediasi dapat dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang mediasi di pengadilan secara elektronik.

(d) Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara (mediasi sukarela).

(e) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian (mediasi sukarela di tingkat upaya hukum).

(3) Sidang Lanjutan setelah Mediasi (Jawab Jinawab)

(a) Sidang lanjutan setelah mediasi dilaksanakan secara elektronik melalui SIP.

(b) Setelah majelis hakim/hakim menerima laporan mediasi yang berhasil dan penggugat/pemohon memohon untuk mencabut gugatan/permohonan, majelis hakim/hakim menjatuhkan penetapan.

---

[858] PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

(c) Setelah majelis hakim/hakim menerima laporan mediasi berhasil dan para pihak memohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian, majelis hakim/hakim membuat akta perdamaian dan menjatuhkan putusan setelah memeriksa dan meyakini kesepakatan damai tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiel.[859]

(d) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan (*executable*).[860]

(e) Dalam hal majelis hakim/hakim menerima kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan huruf (d), ketua majelis hakim/ hakim paling lambat 3 (tiga) hari dapat menerbitkan penetapan hari sidang untuk mengucapkan akta perdamaian. [861]

(f) Setelah majelis hakim/hakim menerima laporan mediasi tidak berhasil/berhasil sebagian maka ketua majelis hakim/ hakim tanpa melakukan pembacaan gugatan/permohonan secara langsung, menetapkan *court calendar* untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan melalui SIP.[862]

(g) Dalam hal majelis hakim/hakim berdasarkan alasan yang sah mengubah

---

[859] Pasal 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[860] Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[861] Pasal 28 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[862] Pasal 30 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

court calendar maka perubahan tersebut diberitahukan secara elektronik melalui SIP kepada para pihak paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

(h) Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak penggugat/pemohon tidak mengirimkan replik/kesimpulan, tergugat/termohon tidak mengirimkan jawaban/duplik/kesimpulan secara elektronik maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian majelis hakim/hakim maka sidang ditunda 1 (satu) kali.[863]

(i) Dalam hal tergugat/termohon mengirimkan jawaban secara elektronik, ketua majelis hakim/hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat/termohon tersebut selanjutnya meneruskan jawaban kepada penggugat/pemohon melalui SIP.[81]

(j) Setelah ketua majelis hakim/hakim memverifikasi replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara elektronik maka ketua majelis hakim/hakim meneruskan replik kepada tergugat/ termohon melalui SIP,[81] adapun bagi tergugat/termohon yang tidak memiliki domisili elektronik, replik tersebut disampaikan melalui surat tercatat.

(k) Setelah ketua majelis hakim/hakim memverifikasi duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon secara elektronik maka ketua majelis hakim/hakim meneruskan duplik kepada penggugat/ tergugat melalui SIP.[864]

---

[863] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.
[864] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

(l) Dalam hal tergugat/turut tergugat tidak menyetujui sidang elektronik, tergugat/ turut tergugat menyerahkan dokumen cetak dan dokumen elektronik jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada panitera sidang melalui PTSP sebelum jadwal persidangan untuk selanjutnya diunggah oleh panitera sidang ke dalam SIP pada hari sidang tersebut, kemudian setelah diverifikasi oleh ketua majelis hakim/ hakim, dokumen tersebut diteruskan kepada penggugat/pemohon melalui SIP.

(m) Dalam hal majelis hakim/hakim memandang perlu untuk menghadirkan para pihak di ruang sidang pengadilan maka para pihak diberitahukan sesuai dengan ketentuan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

(4) Perubahan/Perbaikan Gugatan[865]

(a) Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiel.

(b) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif penggugat di dalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban.

(c) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban tergugat, harus dengan persetujuan tergugat.

(d) Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan perdamaian di luar permasalahan yang terdapat dalam posita dan petitum gugatan/ permohonan, penggugat/pemohon

[865] Pasal 127 Rv dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

mengajukan kesepakatan tersebut sebagai perubahan gugatan/ permohonan.[866]

(e) Perubahan/perbaikan gugatan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban.

(5) Pencabutan Gugatan/Permohonan[867]

(a) Pencabutan sebelum jawaban:

i. pencabutan gugatan/permohonan dapat diajukan melalui SIP atau di depan persidangan;

ii. majelis hakim/hakim memverifikasi permohonan pencabutan gugatan/ permohonan melalui SIP atau di depan persidangan; dan

iii. majelis hakim/hakim mengucapkan penetapan pencabutan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan perkara Nomor ...Pdt.G/.../PA/MS... dicabut;
2. Membebankan/Menghukum kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);

(b) Pencabutan setelah jawaban:

i. pencabutan gugatan/permohonan diajukan melalui SIP atau di depan persidangan;

ii. majelis hakim/hakim memverifikasi permohonan pencabutan gugatan/ permohonan melalui SIP atau di depan persidangan;

iii. majelis hakim/hakim meminta persetujuan tergugat/termohon atas permohonan pencabutan tersebut

---

[866] Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[867] Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.

melalui SIP atau di depan persidangan;

iv. tergugat/termohon menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pencabutan tersebut melalui SIP atau di depan persidangan;

v. majelis hakim/hakim mengucapkan penetapan pencabutan gugatan/ permohonan dengan amar sebagai berikut:

i) Dalam hal permohonan pencabutan dikabulkan:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ...Pdt.G/.../PA/MS... dari Penggugat/Pemohon;
2. Membebankan/ Menghukum kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);

ii) Dalam hal permohonan pencabutan ditolak:

1. Menolak permohonan pencabutan perkara Nomor ...Pdt.G/.../PA/MS... dari Penggugat/Pemohon;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

vi. dalam hal pencabutan dikabulkan, sidang dinyatakan selesai dan ditutup; dan

vii. dalam hal pencabutan ditolak, sidang dilanjutkan dengan agenda berikutnya.

(6) Kumulasi Gugatan

(a) Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.

(b) Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu jika antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan hubungan erat (*innerlijke samenhang*), penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.

(c) Kumulasi gugatan tidak dapat dilakukan antara perkara yang:

i. sifat pemeriksaannya berbeda, seperti antara perkara yang harus diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum dan perkara yang harus diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali secara tegas dibenarkan dalam hukum acara; dan/atau

ii. berbeda kompetensi absolut pengadilan, seperti kumulasi antara gugatan waris Islam dan waris menurut adat.

(7) Perkara Dibatalkan

(a) Dalam hal panjar biaya perkara sudah habis, pihak beperkara ditegur untuk membayar tambahan panjar biaya perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran itu disampaikan.

(b) Dalam hal setelah ditegur, pihak beperkara tidak membayar tambahan panjar biaya perkara maka perkara tersebut dapat dibatalkan dalam bentuk putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Membatalkan perkara Nomor .....;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);

(8) Eksepsi

(a) Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.[868]

(b) Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat/termohon, dan hal ini dapat dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, termasuk dalam tahap banding dan kasasi.[86]

(c) Eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara.[869]

(d) Jika tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara

---

[868] Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg. dan Pasal 132 Rv.
[869] Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg. dan Pasal 131 Rv.

relatif, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang.[87]

(e) Jika eksepsi dikabulkan maka majelis hakim/hakim menjatuhkan putusan akhir dengan amar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/ Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/ permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan/Menghukum Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);

(f) Jika eksepsi ditolak maka majelis hakim/ hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Tergugat/ Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

(g) Putusan sela tidak dituangkan dalam putusan tersendiri, tetapi dimuat dalam

berita acara sidang.[870]

(h) Putusan sela hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir.[871]

(i) Para pihak dapat meminta salinan putusan sela sebagaimana dimaksud pada huruf (f) tanpa menyertakan berita acara sidang terkait dengan membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(j) Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara,[872] dan dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan, tetap disebutkan:

i. Dalam Eksepsi: ..... (pertimbangan lengkap).

ii. Dalam Pokok Perkara: ..... (pertimbangan lengkap).

(9) Rekonvensi

(a) Gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam setiap perkara, kecuali:[873]

i. penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;

ii. pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tidak berwenang memeriksa tuntutan balik berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut); atau

iii. dalam perkara tentang menjalankan

---

[870] Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg.
[871] Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
[872] Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg.
[873] Pasal 132a HIR/Pasal 158 RBg.

putusan hakim.

(b) Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban paling lambat sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan.[874]

(c) Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi.[875]

(d) Gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu.[876]

(e) Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi.

(f) Apabila gugatan konvensi dicabut maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.

(10) Intervensi

Dalam hal terdapat intervensi dari pihak ketiga, gugatan intervensi wajib diajukan secara elektronik dengan ketentuan:[877]

(a) gugatan intervensi diajukan melalui petugas pelayanan administrasi perkara;

(b) petugas pelayanan administrasi perkara mendaftarkan perkara gugatan intervensi melalui akun petugas yang sudah disiapkan;

(c) petugas pelayanan administrasi perkara mengunggah surat gugatan intervensi dan surat kuasa (jika ada) ke dalam SIP;

---

[874] Pasal 132b HIR/Pasal 158 RBg.
[875] Pasal 132a ayat (2) HIR/Pasal 157 ayat (2) RBg.
[876] Pasal 132b ayat (3) HIR/Pasal 158 ayat (3) RBg.
[877] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

(d) proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik;

(e) ketua majelis hakim/hakim mengeluarkan penetapan mengenai diterima tidaknya penggugat intervensi sebagai pihak dalam perkara tersebut;

(f) penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun;

(g) dalam hal penggugat intervensi ditolak sebagai pihak dalam perkara tersebut, akses penggugat intervensi pada SIP ditutup;

(h) dengan adanya gugatan intervensi, ketua majelis hakim/hakim menetapkan *court calendar* yang baru dan menyampaikan kepada para pihak melalui SIP; dan

(i) gugatan intervensi dan tanggapan/ jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi disampaikan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan.

(11) Pembuktian[95]

(a) Penggugat/pemohon harus mengunggah fotokopi alat bukti yang telah bermeterai ke dalam SIP dalam tenggang waktu sejak pendaftaran perkara sampai sidang pembuktian, sedangkan tergugat/ termohon harus mengunggah alat bukti yang bermeterai dalam tenggang waktu sejak sidang jawaban sampai saat sidang pembuktian.

(b) Dalam hal terdapat dokumen bukti surat melebihi kapasitas yang disediakan oleh SIP maka para pihak mengunggah dokumen tersebut melalui tautan (media penyimpanan *online*) yang terdapat di dalam SIP.

(c) Asli dari bukti surat yang fotokopinya telah diunggah ke dalam SIP diperlihatkan di muka sidang untuk dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP dan hasilnya dicatat ke dalam BAS.

(d) Fotokopi bukti surat bermeterai sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diserahkan kepada majelis hakim/hakim dan disatukan dengan berkas lainnya.

(e) Khusus dalam perkara perceraian, asli surat bukti dalam bentuk buku nikah diserahkan kepada majelis hakim/ hakim.

(f) Ketentuan mengenai pemeriksaan keterangan saksi/ahli yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual* dalam perkara permohonan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemeriksaan keterangan saksi/ahli yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual* perkara gugatan.

(12) Pemeriksaan Setempat (*Descente*)[878]

(a) Pemeriksaan setempat (*descente)* dilakukan sesuai ketentuan hukum acara.

(b) Pemeriksaan setempat (*descente)* dilakukan terhadap perkara yang objeknya berupa tanah terkait letak, luas, dan batas tanah untuk mendapatkan keterangan secara terperinci atas objek perkara sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

(c) Selain perkara sebagaimana dimaksud

[878] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

pada huruf (b), pemeriksaan setempat (*descente)* juga dapat dilakukan dalam perkara lain untuk mendapatkan keterangan secara terperinci mengenai objek perkara tersebut.

(d) Dalam hal objek perkara berada di luar yurisdiksi pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara, pengadilan tersebut meminta bantuan pemeriksaan setempat (*descente*) kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di tempat objek perkara berada.

(e) Hasil pemeriksaan setempat (*descente)* sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dituangkan dalam berita acara dan dikirimkan ke pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara.

(f) Biaya pemeriksaan setempat (*descente)* yang masuk dalam komponen panjar biaya perkara meliputi:

i. biaya PNBP sesuai ketentuan;

ii. biaya pemberitahuan/panggilan; dan

iii. sewa kendaraan operasional hakim dan petugas pengadilan dalam hal tidak menggunakan kendaraan dinas.

(g) Berita acara pemeriksaan setempat harus diunggah ke dalam SIP oleh panitera sidang.

(13) Penggugat/Tergugat Meninggal Dunia

(a) Jika penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.

(b) Jika dalam proses pemeriksaan perkara tergugat meninggal dunia maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.

(c) Dalam perkara perceraian jika salah satu pihak suami/istri meninggal dunia maka gugatan perceraian digugurkan.[879]

(14) Putusan/Penetapan[880]

(a) Putusan/penetapan diucapkan oleh ketua majelis hakim/hakim secara elektronik.

(b) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.

(c) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) secara hukum telah dihadiri oleh para pihak dan memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.

(d) Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.

(15) Salinan Putusan/Penetapan[98]

(a) Pengunggahan salinan putusan/ penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (14) huruf (b) dan huruf (d) dilakukan dengan cara:

i. naskah putusan/penetapan diunggah oleh ketua majelis hakim/ hakim ke dalam SIP; dan

ii. panitera mencocokkan naskah putusan dengan putusan/ penetapan yang telah ditandatangani oleh majelis hakim/ hakim dan panitera sidang, kemudian panitera menandatangani naskah putusan/penetapan

---

[879] Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
[880] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

tersebut secara elektronik menjadi salinan putusan/penetapan.

(b) Panitera yang sedang berhalangan tidak tetap, berwenang untuk menandatangani salinan putusan/penetapan secara elektronik.

(c) Dalam hal panitera berhalangan tetap, ketua pengadilan menunjuk pelaksana tugas (Plt.) untuk menandatangani salinan putusan/penetapan secara elektronik.

(d) Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan/penetapan, pengadilan mempublikasikan putusan/ penetapan untuk umum pada SIP.

(16) Perdamaian

(a) Para pihak yang hadir di persidangan wajib didamaikan dengan ketentuan:

i. oleh majelis hakim/hakim pada persidangan pertama;[881]

ii. melalui mediasi;[882] dan

iii. khusus untuk perkara perceraian, perdamaian dilakukan pada setiap tahap persidangan.[883]

(b) Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan perdamaian maka para pihak dapat:

i. memohon kesepakatan perdamaian untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian[884] kecuali perkara perceraian; atau

ii. memohon untuk mencabut gugatan.[885]

(c) Dalam hal para pihak mohon

---

[881] Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.
[882] PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[883] Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 KHI.
[884] Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[885] Pasal 27 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

kesepakatan pedamaian dikukuhkan menjadi akta perdamaian, majelis hakim/hakim mengucapkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:
   a. .....;
   b. .....;
   c. dst.
   (diambil dari rincian kesepakatan perdamaian)
3. Menghukum Penggugat/Tergugat*) atau Penggugat dan Tergugat (sesuai isi kesepakatan perdamaian) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);
   *) pilih salah satu

(d) Dalam hal para pihak mohon mencabut perkara, majelis hakim/hakim mengucapkan putusan secara elektronik dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .../Pdt.G/.../PA/MS... dari Penggugat/Pemohon;
2. Membebankan/menghukum kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp... (... rupiah);

3) Sita dan Eksekusi

a) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)[886]

(1) Sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah penyitaan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat untuk menjamin agar putusan tidak *illusoir* (hampa).[887]

(2) Sita yang diajukan bersama-sama dalam surat gugatan

(a) Majelis hakim/hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama apakah permohonan sita yang diajukan itu beralasan atau tidak, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan apakah ada hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan.

(b) Dalam hal permohonan sita sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sudah terpenuhi, majelis hakim/hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menempuh salah satu dari 3 (tiga) alternatif sebagai berikut:

i. secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tersebut tanpa dilaksanakan sidang insidentil lebih dahulu. Perintah sita ini disertai dengan penetapan hari sidang dan memerintahkan para pihak beperkara untuk menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan;

ii. apabila permintaan sita itu tidak beralasan maka majelis hakim/ hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penolakan

---

[886] Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg.

[887] Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg. dan Pasal 720 Rv.

permohonan sita. Ketentuan ini juga tidak perlu diadakan sidang insidentil; atau

iii. majelis hakim/hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penangguhan permohonan sita. Terhadap ketentuan ini diperlukan sidang insidentil lebih dahulu dan harus dibuat putusan sela.

(3) Majelis hakim/hakim dalam mengabulkan permohonan sita harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat.[888]

(4) Selain dapat diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, permohonan sita jaminan juga dapat diajukan saat pemeriksaan persidangan berlangsung atau diajukan setelah perkara diputus, namun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Terhadap permohonan sita yang diajukan penggugat bersama-sama dalam surat gugatan yang dalam PHS permohonan sitanya ditangguhkan dan permohonan sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung.

(a) Majelis hakim/hakim memeriksa permohonan sita tersebut beralasan atau tidak dengan mendengarkan terlebih dahulu keterangan tergugat dan memeriksa bukti-bukti pendukung.[889]

(b) Majelis hakim/hakim membuat putusan sela apakah permohonan sita dikabulkan atau ditolak.

(c) Jika permohonan sita dikabulkan,

---

[888] Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg. dan Pasal 720 Rv.
[889] Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg. dan Pasal 724 Rv.

majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita jaminan.

(6) Sita yang diajukan setelah perkara diputus sebelum putusan inkrah

(a) Pemohon membayar pendaftaran sita.

(b) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita kepada ketua pengadilan.

(c) Ketua pengadilan membuat penetapan sidang insidentil untuk pemeriksaan permohonan sita.

(d) Ketua pengadilan memerintahkan pemohon sita untuk hadir dalam sidang insidentil.

(e) Juru sita/juru sita pengganti memanggil pemohon sita untuk datang menghadap dalam sidang insidentil.

(f) Sidang insidentil didampingi oleh panitera sidang yang ditunjuk.

(g) Ketua pengadilan memeriksa permohonan sita apakah ada alasan atau tidak dan memeriksa alat bukti.

(h) Ketua pengadilan membuat penetapan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan sita.

(i) Jika permohonan sita dikabulkan, ketua pengadilan memerintahkan juru sita/ juru sita pengganti untuk melaksanakan sita jaminan.

(7) Pelaksanaan Permohonan Sita Jaminan yang Dikabulkan

Jika permohonan sita jaminan dikabulkan, baik untuk sita yang dimintakan bersamaan dengan gugatan, sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung, maupun sita yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan inkrah maka langkah

selanjutnya setelah majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita jaminan adalah sebagai berikut:

(a) pemohon sita membayar panjar biaya peletakan sita kepada petugas pembayaran (kasir);

(b) juru sita/juru sita pengganti memberitahukan kepada penggugat dan tergugat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan;

(c) juru sita/juru sita pengganti membuat surat pemberitahuan kepada kepala desa/lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di wilayah kepala desa/lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut;

(d) pada hari yang telah ditentukan juru sita/juru sita pengganti dan 2 (dua) orang pegawai pengadilan sebagai saksi mendatangi lokasi objek sengketa;

(e) untuk menghindari kesalahan penyitaan, hendaknya mengikutsertakan kepala desa/lurah untuk melihat keadaan tanah, batas, dan luas tanah yang akan disita;

(f) juru sita/juru sita pengganti meminta pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita;

(g) juru sita/juru sita pengganti membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh juru sita/juru sita pengganti, 2 (dua) orang saksi, pemohon sita, dan jika termohon sita tidak menolak, berita acara sita juga

ditandatangani oleh termohon sita;

(h) jika barang yang disita tersebut adalah benda bergerak, juru sita/juru sita pengganti menyimpan benda bergerak tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut, atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman, dan memohon kepada pihak kepolisian dan kepala desa/lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut;

(i) juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di kelurahan/desa setempat yang memuat jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut;

(j) dilarang menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah:[890]

(k) jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak (tanah) yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada kelurahan/desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan;

(l) jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak (tanah) yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan tersebut

[890] Pasal 197 ayat (8) HIR/Pasal 211 RBg.

dengan mendaftarkan kepada kantor badan pertanahan nasional (BPN) setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan;

(m) jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada kantor syahbandar setempat agar dicatatkan dalam buku daftar yang tersedia pada kantor syahbandar mengenai jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan;

(n) jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar berupa kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada kantor syahbandar/bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada kantor syahbandar/bandar udara di mana kapal/pesawat terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan;

(o) penyitaan dilakukan lebih dahulu atas benda bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, jika barang bergerak milik tergugat tidak cukup, baru dilakukan penyitaan atas benda tidak bergerak;

(p) juru sita/juru sita pengganti melaporkan

berita acara sita kepada majelis hakim/ hakim untuk permohonan sita dalam perkara yang belum diputus, kemudian majelis hakim/hakim dalam persidangan selanjutnya menyatakan sita jaminan sah dan berharga yang dicatat dalam berita acara sidang; dan

(q) juru sita/juru sita pengganti melaporkan berita acara sita kepada ketua pengadilan untuk permohonan sita dalam perkara yang sudah diputus tetapi belum inkrah, kemudian ketua pengadilan melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga.

(8) Pengumuman Sita

(a) Pengumuman sita kapal laut

i. Setelah berita acara sita kapal laut ditandatangani, juru sita/juru sita pengganti mengumumkan pelaksanaan sita.

ii. Pengumuman sita dengan mendaftarkan berita acara sita kepada kantor syahbandar di mana kapal tersebut terdaftar dan mencatatkannya dalam buku daftar yang tersedia pada kantor syahbandar di mana kapal tersebut tercatat.[891]

iii. Pengumuman dan pencatatan sita tersebut harus mencantumkan jam, hari, tanggal, dan tahun sita diumumkan.

(b) Pengumuman sita pesawat terbang

i. Setelah berita acara sita kapal terbang ditandatangani, juru sita

[891] Pasal 562 Rv.

mengumumkan pelaksanaan sita.

ii. Pengumuman sita dengan mendaftarkan berita acara sita kepada kantor bandar udara di mana pesawat terbang tersebut terdaftar dan mencatatkannya dalam buku daftar yang tersedia di kantor bandar udara di mana pesawat tersebut tercatat.

iii. Pengumuman dan pencatatan sita tersebut harus mencantumkan jam, hari, tanggal, dan tahun sita diumumkan.

b) Sita eksekusi[892]

(1) Sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita *revindicatoir* yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berubah menjadi sita eksekusi.

(2) Dalam hal belum diletakkan sita jaminan terhadap objek yang diputus, harus diletakkan sita eksekusi sebelum dilaksanakan eksekusi.

(3) Sita eksekusi berlaku untuk putusan yang amarnya memerintahkan tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. tata cara pelaksanaannya sama dengan tata cara pelaksanaan sita jaminan, perbedaannya dilakukan setelah diadakan *aanmaning,* dan termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

c) Sita *Revindicatoir* [893]

(1) Sita jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat (*revindicatoir beslag*) yaitu menyita barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat yang bertujuan untuk

---

[892] Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg.
[893] Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBg.

melindungi hak pemilik sah dan mencegah agar objek sengketa tidak dialihkan, dijual, atau digelapkan selama proses persidangan berlangsung.[894]

(2) Barang yang dimohonkan untuk disita harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri dengan jelas dan terperinci.[895]

(3) Pada prinsipnya tata cara sita *revindicatoir* sama dengan sita *conservatoir*.

(4) Sita *revindicatoir* yang dimintakan bersamaan dengan gugatan

(a) Ketua majelis hakim/hakim membuat PHS sekaligus menetapkan apakah permohonan sita *revindicatoir* tersebut dikabulkan atau ditunda.

(b) Jika permohonan sita dikabulkan dan ditetapkan sekaligus dalam PHS, ketua majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita *revindicatoir*.[896]

(5) Terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat bersama-sama dalam surat gugatan yang dalam PHS permohonan sitanya ditangguhkan dan permohonan sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung

(a) Majelis hakim/hakim memeriksa permohonan sita tersebut beralasan atau tidak dan memeriksa bukti-bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.

(b) Majelis hakim/hakim membuat putusan sela apakah permohonan sita dikabulkan atau ditolak.

(c) Jika permohonan sita dikabulkan,

---

[894] Pasal 226 ayat (1) HIR/Pasal 260 ayat (1) RBg.
[895] Pasal 226 ayat (2) HIR/Pasal 260 ayat (2) RBg.
[896] Pasal 226 ayat (3) HIR/Pasal 260 ayat (3) RBg.

majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita untuk melaksanakan sita *revindicatoir*.[897]

(6) Sita *revindicatoir* yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan inkrah

(a) Pemohon membayar pendaftaran sita *revindicatoir*.

(b) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita *revindicatoir* kepada ketua pengadilan.

(c) Ketua pengadilan membuat penetapan sidang insidentil untuk pemeriksaan permohonan sita *revindicatoir*.

(d) Ketua pengadilan memerintahkan pemohon sita untuk hadir dalam sidang insidentil.

(e) Juru sita/juru sita pengganti memanggil pemohon sita untuk datang menghadap sidang insidentil.

(f) Sidang insidentil didampingi oleh panitera pengganti yang ditunjuk panitera.

(g) Ketua pengadilan memeriksa permohonan sita apakah ada alasan atau tidak dan memeriksa alat bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.

(h) Ketua pengadilan membuat penetapan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan sita *revindicatoir*.

(i) Jika permohonan sita *revindicatoir* dikabulkan, majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita *revindicatoir*.

(7) Pelaksanaan Permohonan Sita *Revindicatoir* yang Dikabulkan

---

[897] Pasal 226 ayat (3) HIR/Pasal 260 ayat (3) RBg.

Jika permohonan sita *revindicatoir* dikabulkan baik untuk sita yang dimintakan bersamaan dengan gugatan, sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung, maupun sita yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan inkrah maka langkah selanjutnya setelah majelis hakim/hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita *revindicatoir* adalah sebagai berikut:[898]

(a) juru sita/juru sita pengganti memberitahukan kepada penggugat dan tergugat bahwa ia akan melakukan sita *revindicatoir* atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan;

(b) juru sita/juru sita pengganti membuat surat pemberitahuan kepada kepala desa/lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita *revindicatoir* atas objek sengketa yang terletak di wilayah kepala desa/lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan kepala desa/ lurah untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan sita *revindicatoir* tersebut;

(c) pada hari yang telah ditentukan juru sita/juru sita pengganti dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sengketa;

(d) juru sita/juru sita pengganti meminta pemohon sita untuk menunjukkan benda yang akan disita;

(e) juru sita/juru sita pengganti membuat berita acara sita *revindicatoir* yang harus ditandatangani oleh juru sita/juru sita pengganti, 2 (dua) orang saksi, pemohon sita dan oleh termohon sita jika termohon sita tidak menolak menandatangani;

---

[898] Pasal 226 ayat (3) HIR/Pasal 260 ayat (3) RBg.

(f) juru sita/juru sita pengganti menyimpan benda yang disita tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut, atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman serta memohon kepada pihak kepolisian dan kepala desa/lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut;

(g) juru sita/juru sita pengganti mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di kelurahan/desa setempat yang memuat jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut;

(h) juru sita/juru sita pengganti melaporkan berita acara sita kepada majelis hakim/ hakim untuk permohonan sita dalam perkara yang belum diputus, kemudian majelis hakim/hakim melaksanakan sidang insidentil dalam sidang selanjutnya untuk menyatakan sita *revindicatoir* sah dan berharga; dan

(i) juru sita/juru sita pengganti melaporkan berita acara sita kepada ketua pengadilan untuk permohonan sita dalam perkara yang sudah diputus tetapi belum inkrah, kemudian ketua pengadilan melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita *revindicatoir* sah dan berharga.

d) Sita Persamaan [899]

(1) Apabila barang yang akan disita telah diletakkan sita oleh pengadilan lain maka juru

[899] Pasal 463 Rv.

sita/juru sita pengganti tidak dapat melakukan penyitaan lagi, namun juru sita/ juru sita pengganti dapat melakukan sita persamaan dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya.

(2) Apabila setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang ditujukan terhadap penanggung utang kepada negara maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran utang menuntut putusan hakim itu dan hakim pengadilan agama/mahkamah syar'iyah jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.

(3) Dalam hal yang dimaksud dalam syarat-syarat angka (1) dan angka (2), majelis hakim/hakim pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung utang kepada negara, pelaksana dan orang yang berpiutang.

(4) Pelaksana dan orang yang berpiutang yang menghadap atas panggilan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat memohon banding pada pengadilan tingkat banding atas penentuan pembagian tersebut.

(5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan hukum tetap, majelis hakim/hakim pengadilan agama/

mahkamah syar'iyah mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yang ditugaskan melakukan penjualan umum untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.

(6) Oleh karena hal tersebut berhubungan dengan penyitaan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maka sita tersebut adalah sita eksekusi dan bukan sita jaminan, dan objek yang disita bisa barang bergerak atau barang tidak bergerak.

(7) Sita persamaan barang tidak bergerak harus dilaporkan kepada BPN atau kelurahan setempat.

(8) Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekusi, kemudian objeknya akan dilelang maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum.

(9) Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama).

e) Sita Harta Bersama (Sita Marital) [900]

(1) Sita harta bersama (sita marital) dimohonkan oleh pihak suami/istri terhadap harta perkawinan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan oleh suami/istri.

(2) Sita terhadap harta bersama dapat juga diajukan oleh suami/istri walaupun tidak terjadi perceraian, bilamana suami/istri

---

[900] Pasal 190 KUHPerdata, Pasal 78 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI.

melakukan tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama.[901]

(3) Tata cara sita harta bersama (sita marital) dilaksanakan sebagaimana sita jaminan (*conservatoir beslag*).

f) Sita Buntut [902]

(1) Sita buntut adalah permohonan sita yang diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan perkaranya dimintakan banding/kasasi.

(2) Pemohon mengajukan permohonan sita buntut ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

(3) Pemohon membayar pendaftaran sita.

(4) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita kepada ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah.

(5) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah meneruskan permohonan sita buntut ke pengadilan tinggi agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung jika perkara dalam proses banding atau kasasi.

(6) Apabila permohonan sita buntut tersebut dikabulkan oleh pengadilan tinggi agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung maka majelis hakim membuat penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan sita tersebut;
2. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah ..... untuk melaksanakan sita atas objek .....;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah ..... untuk mengirimkan berita acara sita kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah

---

[901] Pasal 95 KHI.
[902] Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg.

Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung dalam tempo dua kali dua puluh empat jam sejak sita dilaksanakan;[903]

(7) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membuat penetapan yang berisi perintah kepada juru sita untuk melaksanakan sita buntut.

(8) Juru sita memberitahukan kepada penggugat dan tergugat bahwa pengadilan akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.

(9) Juru sita membuat surat pemberitahuan kepada kepala desa/lurah setempat bahwa pengadilan akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di wilayah kepala desa/lurah yang bersangkutan dan sekaligus memohon kesediaan untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

(10) Pada hari yang telah ditentukan, juru sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sita.

(11) Juru sita meminta pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita.

(12) Juru sita membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh juru sita, 2 (dua) orang saksi, pemohon sita dan termohon sita jika termohon sita tidak menolak menandatangani.

(13) Jika barang yang disita tersebut adalah benda bergerak, juru sita menyimpan benda bergerak tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman dan memohon kepada pihak kepolisian dan kepala desa/ lurah setempat untuk menjaga keamanan

---

[903] Pasal 195 ayat (5) HIR/Pasal 206 ayat (5) RBg.

barang-barang yang disita tersebut.

(14) Juru sita mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di kelurahan/desa setempat yang memuat jam, hari dan tanggal pengumuman sita tersebut.

(15) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada kelurahan/desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

(16) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang maka juru sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada kantor BPN setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

(17) Ketua pengadilan mengirimkan berita acara sita buntut kepada pengadilan tinggi agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung.

g) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

(1) Eksekusi pembayaran sejumlah uang, baik berkenaan dengan hak perempuan dan anak pascaperceraian dalam bentuk nafkah *iddah*, *mut'ah* dalam bentuk uang, nafkah anak, dan nafkah *madhiyah,* termasuk eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam bentuk memerintahkan termohon eksekusi untuk memenuhi dan membayar hak perempuan dan anak tersebut kepada pemohon eksekusi sesuai amar putusan dan kewajiban pembayaran ganti rugi serta pembayaran

uang paksa (dwangsom).

(2) Proses eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan cara:

(a) pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dengan melampirkan putusan yang sudah inkrah;

(b) apabila putusan mencantumkan harta milik termohon eksekusi sebagai jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran sejumlah uang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak maka daftar seluruh harta barang bergerak dan barang tidak bergerak tersebut diajukan bersamaan dengan permohonan eksekusi sebagai jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran;

(c) apabila putusan tidak mencantumkan harta milik termohon eksekusi sebagai jaminan pembayaran sejumlah uang, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau apabila jaminan tersebut tidak mencukupi maka pemohon eksekusi menyampaikan daftar harta lain berupa barang bergerak milik termohon kepada ketua pengadilan;

(d) pemohon membayar biaya eksekusi pembayaran sejumlah uang;

(e) panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada ketua pengadilan;

(f) ketua pengadilan membuat PHS peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*);

(g) juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*);

(h) ketua pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari, bila termohon eksekusi hadir;

(i) panitera membuat BAS peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh ketua serta panitera.

(j) setelah lewat 8 (delapan) hari dari *aanmaning,* termohon eksekusi tidak melaksanakan secara sukarela, pemohon eksekusi memberitahukan kepada ketua pengadilan bahwa pemohon eksekusi tidak memenuhi perintah sidang *aanmaning*;

(k) ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk melakukan konstatering (pencocokan data objek eksekusi di lapangan) yang dilaksanakan oleh panitera atau juru sita disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(l) ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap objek/barang milik termohon eksekusi apabila belum diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Jika terhadap objek/barang milik termohon eksekusi tersebut telah diletakan sita jaminan maka sita jaminan tersebut dikukuhkan menjadi sita

eksekusi, dengan penetapan pengukuhan sita jaminan menjadi sita eksekusi;

(m) juru sita/juru sita pengganti melaksanakan sita eksekusi dengan tata cara sebagaimana pelaksanaan sita jaminan;

(n) ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan lelang terhadap objek/barang milik termohon eksekusi;

(o) panitera/juru sita/juru sita pengganti mengumumkan tentang adanya lelang di papan pengumuman pengadilan dan beberapa media massa cetak atau elektronik;

(p) ketua pengadilan meminta bantuan permintaan lelang kepada kantor lelang negara dengan melampirkan dokumen berupa:

i. salinan putusan;
ii. salinan penetapan sita eksekusi;
iii. salinan berita acara sita eksekusi;
iv. salinan penetapan perintah lelang;
v. salinan surat pemberitahuan kepada para pihak yang berkepentingan (pemohon dan termohon eksekusi, BPN dan lain-lain);
vi. perincian besarnya jumlah tagihan oleh pengadilan;
vii. bukti kepemilikan barang lelang;
viii. syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan (baik yang menyangkut penawaran maupun pembayaran); dan

ix. bukti pengumuman lelang;[904]

(q) ketua pengadilan menerima laporan pemenang lelang dari juru lelang kantor lelang negara, dan mengesahkan pemenang lelang;

(r) juru lelang menetapkan pemenang lelang setelah mendapat pengesahan dari ketua pengadilan;

(s) juru lelang menerima pembayaran dari pemenang lelang;

(t) kantor lelang negara membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada pengadilan;

(u) pengadilan menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi;

(v) panitera/juru sita membuat berita acara penyerahan hasil lelang; dan

(w) ketua pengadilan membuat penetapan pengangkatan sita eksekusi.

h) Lelang (Penjualan Umum) [905]

(1) Setelah ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memerintahkan lelang, panitera/ juru sita mengumumkan tentang akan adanya lelang di papan pengumuman pengadilan dan beberapa media massa.

(2) Pengumuman lelang benda bergerak dapat dilakukan dengan cara:

(a) diumumkan 1 (satu) kali melalui papan pengumuman di kelurahan/desa atau melalui surat kabar jika nilai objek lelangnya sangat tinggi; dan

(b) pengumuman lelang dilaksanakan setelah kantor lelang menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang.

---

[904] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.

[905] Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.

(3) Pengumuman lelang benda tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara:
   (a) diumumkan 1 (satu) kali melalui surat kabar yang terbit di daerah tempat benda terletak; dan
   (b) pengumuman dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal penjualan lelang.

i) Eksekusi Riil [906]

(1) Eksekusi riil adalah eksekusi putusan atau penetapan pengadilan yang memerintahkan:
   (a) menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang;
   (b) menghukum atau memerintahkan pengosongan dan penyerahan tanah atau bangunan;
   (c) menghukum atau memerintahkan membongkar suatu bangunan; atau
   (d) menghukum atau memerintahkan menyerahkan anak dalam bentuk memerintahkan termohon eksekusi menyerahkan anak kepada pemohon eksekusi dilaksanakan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan.

(2) Eksekusi riil dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
   (a) pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi riil dengan melampirkan putusan yang sudah inkrah;
   (b) pemohon membayar biaya eksekusi riil;
   (c) panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi riil kepada ketua pengadilan;
   (d) ketua pengadilan membuat PHS

[906] Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg., dan Pasal 1033 Rv.

peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*);

(e) juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*);

(f) ketua pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam tenggat waktu tertentu (paling lama 8 (delapan) hari, bila termohon eksekusi riil hadir;

(g) panitera membuat bas peringatan (*aanmaning*) dan ditandatangani oleh ketua serta panitera;

(h) ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk melakukan *konstatering* (pencocokkan data objek eksekusi di lapangan) yang dilaksanakan oleh panitera atau juru sita disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(i) ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita untuk menjalankan eksekusi riil (baik membagi, menyerahkan pembongkaran ataupun pengosongan), bila dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada sidang peringatan (*aanmaning*), termohon eksekusi tidak melaksanakan dengan suka rela isi putusan;

(j) ketua pengadilan secara *ex officio* dapat

langsung mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita untuk menjalankan eksekusi riil (baik pengosongan maupun pembongkaran), bila pada sidang peringatan (*aanmaning*) termohon eksekusi tidak hadir;

(k) panitera/juru sita memberitahu pemohon dan termohon eksekusi bahwa ia akan melakukan eksekusi riil atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan;

(l) panitera/juru sita membuat surat pemberitahuan kepada kepala desa/ lurah setempat bahwa ia akan melakukan eksekusi atas objek sengketa yang terletak di wilayah kepala desa/ lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut;

(m) panitera/juru sita membuat surat permohonan bantuan keamanan kepada kepolisian setempat terkait dengan akan dilaksanakannya eksekusi atas objek sengketa;

(n) pada hari yang telah ditentukan, panitera/juru sita mendatangi lokasi objek yang akan dieksekusi;

(o) juru sita/juru sita pengganti meminta pemohon eksekusi untuk menunjukkan objek yang akan dieksekusi;

(p) juru sita/juru sita pengganti membacakan penetapan ketua pengadilan terkait dengan permohonan eksekusi dan objek yang akan dieksekusi;

(q) juru sita/juru sita pengganti melaksanakan eksekusi dengan cara menyerahkan objek eksekusi berupa benda bergerak kepada pemohon

eksekusi dari tereksekusi, atau mengosongkan objek eksekusi untuk benda tidak bergerak dari tereksekusi, keluarganya dan orang lain yang menempati objek tidak bergerak tersebut;

(r) juru sita/juru sita pengganti membuat berita acara eksekusi;

(s) berita acara eksekusi wajib ditandatangani oleh juru sita/juru sita pengganti, 2 (dua) orang saksi, dan pemohon eksekusi;

(t) termohon eksekusi tidak wajib menandatangani berita acara eksekusi, ia boleh menandatangani atau menolak menandatangani berita acara eksekusi; dan

(u) juru sita/juru sita pengganti melaporkan berita acara sita kepada ketua pengadilan.

j) Eksekusi untuk Melakukan Perbuatan Tertentu [907]

(1) Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan adalah tindakan paksa pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan tindakan tertentu sesuai amar putusan, misalnya menyerahkan anak.

(2) Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dengan melampirkan putusan yang sudah inkrah.

(3) Pemohon eksekusi membayar biaya eksekusi.

(4) Panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan.

(5) Ketua pengadilan membuat PHS peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan

[907] Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg.

(*aanmaning*).

(6) Juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).

(7) Ketua pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari, bila termohon eksekusi hadir.

(8) Panitera membuat BAS peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh ketua serta panitera.

(9) Jika termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah agar perbuatan tertentu yang diperintahkan dalam putusan untuk dilakukan termohon eksekusi dinilai dengan sejumlah uang dengan menyebutkan besaran penggantian sejumlah uang tersebut sebagai syarat formal, kemudian dilakukan sidang insidentil yang dipimpin oleh ketua pengadilan untuk menetapkan permohonan tersebut diterima atau ditolak, serta menentukan besaran uang penggantinya. [908]

(10) Dalam hal permohonan dimaksud pada angka (9) diajukan secara lisan, panitera pengadilan menuangkan dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon.

(11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (9) diajukan ke pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama.

---

[908] Pasal 225 ayat (1) HIR/Pasal 259 ayat (1) dan (3) RBg.

(12) Panitera menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada ketua pengadilan.

(13) Ketua pengadilan menyidangkan permohonan tersebut dengan cara:

(a) Ketua pengadilan membuat PHS.

(b) Panitera menunjuk panitera sidang.

(c) Ketua pengadilan memerintahkan juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi.

(d) Juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang tersebut.

(e) Ketua pengadilan membuka persidangan insidentil.

(f) Ketua pengadilan menanyakan kepada termohon eksekusi tentang:

i. alasan tidak melaksanakan isi putusan; dan

ii. berapa nilai penggantian menurut pendapat termohon eksekusi; dan

(g) Ketua pengadilan mengambil kesimpulan tentang berapa jumlah uang nilai pengganti dari putusan tersebut.

(14) Panitera sidang membuat BAS insidentil.

(15) Ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita untuk menjalankan eksekusi, berdasarkan laporan pemohon eksekusi bahwa dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada sidang peringatan (*aanmaning*), termohon eksekusi tidak melaksanakan dengan sukarela isi putusan.

k) Eksekusi Hak Tanggungan [909]

(1) Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) mekanisme, yaitu parate eksekusi, eksekusi berdasarkan titel

---

[909] Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

eksekutorial, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan. [910]

(2) Dalam hal eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan mekanisme titel eksekutorial (melalui pengadilan) dilakukan dengan cara: [911]

(a) pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan dengan melampirkan akta hak tanggungan;

(b) pemohon eksekusi membayar pendaftaran eksekusi hak tanggungan;

(c) panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi hak tanggungan kepada ketua pengadilan;

(d) ketua pengadilan membuat PHS peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*);

(e) juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*);

(f) ketua pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar termohon eksekusi membayar hutang kepada kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari, bila termohon eksekusi hadir;

(g) panitera membuat BAS peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh ketua serta panitera;

(h) ketua pengadilan dapat mengeluarkan

---

[910] Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
[911] Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

penetapan untuk melakukan *konstatering* (pencocokkan data objek eksekusi di lapangan) yang dilaksanakan oleh panitera atau juru sita/juru sita pengganti disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(i) ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita untuk meletakkan sita eksekusi terhadap objek hak tanggungan dalam hal sita jaminan belum diletakkan. Apabila telah diletakkan sita jaminan maka sita jaminan tersebut berubah menjadi sita eksekusi;

(j) panitera/juru sita melaksanakan sita eksekusi dan mendaftarkan sita tersebut pada instansi yang berwenang;

(k) ketua pengadilan mengajukan permohonan lelang kepada kantor lelang negara dengan melampirkan dokumen berupa:

i. salinan akta hak tanggungan;
ii. salinan penetapan sita eksekusi;
iii. salinan berita acara sita eksekusi;
iv. salinan penetapan perintah eksekusi lelang;
v. salinan surat pemberitahuan kepada para pihak yang berkepentingan (pemohon dan termohon eksekusi, BPN dan lain-lain);
vi. perincian besarnya jumlah tagihan oleh pengadilan;
vii. bukti kepemilikan barang lelang;
viii. syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan (baik yang menyangkut penawaran

maupun pembayaran);

ix. bukti pengumuman lelang; dan

x. lain-lain sesuai dengan ketentuan.

(l) panitera/juru sita mengumumkan tentang adanya lelang di papan pengumuman pengadilan dan beberapa media massa cetak atau elektronik;[912]

(m) juru lelang menetapkan pemenang lelang;

(n) juru lelang menerima pembayaran dari pemenang lelang;

(o) ketua pengadilan menerima laporan pemenang lelang dari juru lelang kantor lelang negara, dan mengesahkan pemenang lelang;

(p) kantor lelang negara membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada pengadilan;

(q) pengadilan menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi;

(r) panitera/juru sita membuat berita acara penyerahan hasil lelang; dan

(s) ketua pengadilan membuat penetapan pengangkatan sita eksekusi.

(3) Dalam hal eksekusi lelang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kantor lelang negara tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan membuat penetapan yang menyatakan permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register permohonan eksekusi, namun permohonan eksekusi tersebut dapat diajukan kembali.

l) Eksekusi Pengosongan Objek Hak Tanggungan [913]

(1) Ketua pengadilan menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang untuk dikuasai

---

[912] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.

[913] Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg.

pemenang lelang.

(2) Apabila ternyata objek lelang tersebut masih dikuasai oleh termohon eksekusi maka pemohon eksekusi dan/atau pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi pengosongan objek hak tanggungan kepada ketua pengadilan.

(3) Pemohon membayar panjar biaya eksekusi.

(4) Panitera menyampaikan berkas permohonan kepada ketua pengadilan.

(5) Ketua pengadilan membuat PHS peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil termohon untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*).

(6) Juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).

(7) Ketua pengadilan melakukan sidang peringatan (*aanmaning*) agar termohon mengosongkan secara sukarela dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari.

(8) Panitera membuat BAS peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh ketua serta panitera.

(9) Setelah lewat 8 (delapan) hari dari *aanmaning* termohon tidak melaksanakan secara sukarela, ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada panitera/juru sita untuk mengosongkan objek hak tanggungan eksekusi.

m) Eksekusi *Grosse* Akta [914]

(1) *Grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial ada dua macam, yaitu *grosse*

[914] Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg.

akta hipotek dan surat-surat utang.

(2) *Grosse* adalah salinan pertama akta autentik, salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.

(3) Oleh karena salinan pertama atas pengakuan utang yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan eksekutorial maka salinan pertama ini wajib memuat kepala/irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai kepala/irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Asli dari akta (minuta akta) disimpan oleh notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala/irah-irah.

(4) *Grosse* atas pengakuan utang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", oleh notaris diserahkan kepada kreditur yang di kemudian hari bila diperlukan dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada ketua pengadilan agama.

(5) Eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan utang *fixed loan* hanya dapat dilaksanakan, apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah utangnya itu.

(6) Apabila debitur membantah jumlah utang tersebut dan besarnya utang menjadi tidak *fixed* maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan, dalam hal ini apabila syarat-syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan serta merta.

(7) Pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang (*Geldschieters Ordonantie*, S.1938-523), melarang notaris membuat atas pengakuan utang dan mengeluarkan *grosse* aktanya untuk perjanjian utang-piutang dengan seorang pelepas uang.

(8) Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg. tidak berlaku untuk *grosse* akta sebagaimana dimaksud pada angka (7).

(9) *Grosse* akta pengakuan utang adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara alamiah/badan hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan disertai bunga sebesar 2% sebulan.

(10) Jumlah yang sudah pasti dalam surat pengakuan utang bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain.

(11) Kreditur yang memegang *grosse* atas pengakuan utang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dapat langsung memohon eksekusi kepada ketua pengadilan agama yang bersangkutan dalam hal debitur ingkar janji.

n) Eksekusi Anak

(1) Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang memutus perkara dengan melampirkan putusan yang sudah inkrah.

(2) Ketua pengadilan membuat PHS untuk sidang peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*).

(3) Juru sita/juru sita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).

(4) Ketua pengadilan melaksanakan sidang

peringatan (*aanmaning*) dan memperingatkan termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari.

(5) Apabila termohon eksekusi tetap tidak menjalankan isi amar putusan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah *aanmaning* maka pemohon eksekusi memohon kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah agar proses eksekusi dilanjutkan.

(6) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membuat penetapan yang memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk melaksanakan eksekusi.

(7) Sebelum pelaksanaan eksekusi penyerahan anak, pengadilan dapat berkoordinasi dan meminta pendapat instansi pemerintah di bidang perlindungan anak, komnas perlindungan anak, psikolog, dan unit perlindungan perempuan dan anak pada kepolisian setempat.

(8) Ketua pengadilan memimpin rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (7), yang diselenggarakan di kantor pengadilan dan hasilnya dicatat dalam berita acara rapat koordinasi.

(9) Dalam rapat koordinasi, ketua pengadilan meminta pendapat instansi pemerintah di bidang perlindungan anak, komnas perlindungan anak, psikolog, dan unit perlindungan perempuan dan anak pada kepolisian terkait rencana pelaksaan eksekusi penyerahan anak.

(10) Eksekusi menghukum atau memerintahkan untuk menyerahkan anak hanya dapat dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam proses tumbuh kembangnya.

(11) Ketua pengadilan dapat memerintahkan panitera atau juru sita untuk melakukan pencocokkan objek eksekusi di lapangan (*konstatering)* terhadap anak yang akan dieksekusi, dengan melibatkan instansi pemerintah di bidang perlindungan anak, komnas perlindungan anak, psikolog dan unit perlindungan perempuan dan anak pada kepolisian setempat untuk pengumpulan informasi dari keadaan di lapangan, dan mencatat keadaan terakhir anak, dengan penetapan *konstatering* anak.

(12) Pelaksanaan eksekusi anak harus dilakukan dengan hati-hati dengan pendekatan persuasif dengan memperhatikan seluruh situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi psikologi anak.

(13) Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut pemohon eksekusi maka eksekusi dianggap *non-executable.* Sedangkan, jika anak tidak ditemukan maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali, dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap *non-executable*.[915]

(14) Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi anak, hakim dapat menghukum tergugat melalui lembaga dwangsom (uang paksa yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok), yang diawali dengan adanya petitum dalam gugatan pengugat.

o) Perdamaian dalam Proses *Aanmaning*

(1) Pada tahap *aanmaning*, ada kemungkinkan para pihak mencapai kesepakatan untuk menjalankan isi putusan secara sukarela.

---

[915] SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

(2) Jika terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) maka termohon eksekusi diberi waktu maksimal 8 (delapan) hari untuk melaksanakan amar putusan secara damai dan melaporkan hasilnya kepada pengadilan. Jika setelah waktu maksimal 8 (delapan) hari tersebut tidak dapat terlaksana secara damai maka dilakukan eksekusi sesuai dengan amar putusan.

p) Perdamaian dalam Pelaksanaan Eksekusi

(1) Pada pelaksanaan eksekusi di lapangan, ada kemungkinan terjadinya perdamaian di antara para pihak.

(2) Jika terjadi perdamaian maka:

(a) pemohon eksekusi memohon penundaan eksekusi dan dicatat dalam berita acara eksekusi;

(b) pemohon eksekusi menyerahkan isi perdamaian kepada ketua pengadilan;

(c) para pihak memohon kepada ketua pengadilan agar eksekusi dilaksanakan sesuai isi perdamaian;

(d) ketua pengadilan membuat penetapan pelaksanaan eksekusi; dan

(e) panitera/juru sita melaksanakan eksekusi sesuai isi perdamaian.

q) Penawaran Pembayaran dan Konsinyasi [916]

(1) Debitur mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat pembayaran yang disepakati oleh debitur dan kreditur.

(2) Dalam hal tidak ada tempat pembayaran yang disepakati maka permohonan diajukan

[916] Pasal 1404 – 1412 KUHPerdata.

kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal termohon atau tempat tinggal yang telah dipilihnya.

(3) Permohonan konsinyasi didaftarkan dalam register permohonan konsinyasi setelah pemohon membayar biaya konsinyasi.

(4) Kreditur didudukkan sebagai termohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (3).

(5) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membuat penetapan yang berisi perintah kepada juru sita/juru sita pengganti disertai 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran kepada kreditur.

(6) Juru sita/juru sita pengganti melakukan penawaran pembayaran kepada kreditur disaksikan 2 (dua) orang saksi dan membuat berita acara tentang pernyataan kesediaan debitur untuk membayar (*aanbod van gereede betaling*).

(7) Pihak kreditur diberi salinan berita acara tersebut.

(8) Jika kreditur menolak pembayaran, juru sita/juru sita pengganti membuat berita acara yang berisi pemberitahuan bahwa:
   (a) kreditur menolak pembayaran;
   (b) uang akan dilakukan penitipan (konsinyasi) di Rekening Pengadilan Lainnya (RPL) pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah; dan
   (c) penitipan akan dilakukan pada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut.

(9) Pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (c), juru sita/juru sita pengganti disertai 2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut

kepada panitera pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam Rekening Pengadilan Lainnya (RPL) pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebagai uang konsinyasi.

(10) Agar pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, debitur harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, dengan petitum:

(a) menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi; dan

(b) menghukum pemohon membayar biaya perkara;

r) Konsinyasi Bagian Waris, Harta Bersama, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Lain-Lain

(1) Dalam eksekusi objek waris, harta bersama, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan lain-lain yang dilakukan melalui mekanisme lelang, ada kemungkinan para pihak yang berhak atas bagian dari hasil penjualan tidak mengambil bagian tersebut.

(2) Dalam hal demikian, dapat dilakukan konsinyasi atau penitipan hasil penjualan tersebut kepada pihak pengadilan yang dilaksanakan menurut ketentuan konsinyasi sebagaimana dimaksud pada huruf q).

s) Pengelolaan Uang Titipan Hak-Hak Pascaperceraian/Pasca-Ikrar Talak

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan titipan pasca-ikrar talak yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

(2) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membuat penetapan titipan atas permohonan pemohon dan memerintahkan

panitera untuk menyimpan sementara uang/ barang tersebut, serta memberitahukan dan menyerahkannya kepada termohon.

(3) Panitera membuat berita acara penyimpanan titipan, yang ditandatangani oleh panitera, pemohon/kuasanya dan para saksi.

(4) Panitera melakukan pemberitahuan titipan kepada termohon agar mengambil uang/ barang titipan tersebut.

(5) Apabila termohon mengambil uang/barang titipan tersebut, panitera membuat berita acara penyerahan titipan yang ditandatangani oleh panitera, termohon/kuasanya dan para saksi.

(6) Apabila termohon telah mengambil uang/ barang titipan tersebut, panitera membuat surat pemberitahuan kepada pemohon atas pengambilan titipan tersebut.

(7) Titipan baik berupa uang/barang yang merupakan hak dari pihak termohon, namun tidak diambil oleh termohon, tetap berada dalam pengelolaan pengadilan yang bersangkutan tanpa batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat disetorkan ke kas negara.

(8) Titipan berupa uang harus dicatat pada aplikasi dan disimpan dalam rekening Rekening Pengadilan Lainnya (RPL) pengadilan.

t) Perlawanan Eksekusi [917]

(1) Perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga (bukan pihak)/d*erden verzet*

(a) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang akan melaksanakan eksekusi.

---

[917] Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg. dan Pasal 207 HIR/Pasal 225 RBg.

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
   i. identitas pelawan/para pelawan dan terlawan/para terlawan;
   ii. alasan permohonan:
      i) hubungan hukum antara pelawan/para pelawan dan terlawan/para terlawan serta objek perlawanan; dan
      ii) menyebutkan alasan/ kepentingan hukum diajukannya perlawanan; dan
   iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan perlawanan pelawan sebagai perlawanan yang benar dan memerintahkan mengangkat sita/menghentikan proses eksekusi, dan/atau mengeluarkan objek perkara dari putusan perkara asal yang telah berkekuatan hukum tetap.

(c) Perlawanan eksekusi dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

(d) Jika perlawanan eksekusi diajukan secara lisan maka ketua atau hakim yang ditunjuk mencatat perlawanan lisan tersebut.

(e) Perlawanan lisan tersebut dibacakan di hadapan pelawan dan ditandatangani oleh ketua atau hakim yang ditunjuk.

(f) Jika perlawanan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelawan sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh pelawan.

(g) Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasarkan Pasal 195 ayat (6) *jo.* Pasal 206 HIR, hanya dapat diajukan karena

alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Gadai tanah).[918]

(h) Bagi pemegang hak tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet/ perlawanan karena objek hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita eksekusi kecuali sita persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.[919]

(i) Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri/suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta yang dijaminkan oleh suami/istri merupakan harta bersama.

(j) Dalam hal yang disita merupakan harta bawaan suami/istri maka suami/istri dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga, kecuali keduanya telah membuat perjanjian perkawinan berupa penyatuan harta.

(k) Apabila perlawanan eksekusi dikabulkan maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan proses eksekusi harus dihentikan.

(l) Apabila perlawanan eksekusi tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan eksekusi tetap dilanjutkan.

(m) Perlawanan tidak menangguhkan eksekusi kecuali jika perlawanan didasarkan atas bukti otentik seperti sertifikat atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

---

[918] SEMA Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diperbaiki dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
[919] SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

(n) Ketua majelis hakim/hakim yang memeriksa perkara perlawanan tersebut harus senantiasa melaporkan perkembangan perkara kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk menentukan kebijakan mengenai dilanjutkan atau ditangguhkannya eksekusi.

(2) Perlawanan Eksekusi oleh Pihak (*Partij Verzet*)

(a) Perlawanan pihak (*partij verzet*) diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang akan melaksanakan eksekusi.

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pelawan/para pelawan dan terlawan/para terlawan;

ii. alasan permohonan:

i) hubungan hukum antara pelawan/para pelawan dan terlawan/para terlawan serta objek perlawanan; dan

ii) menyebutkan alasan/ kepentingan hukum diajukannya perlawanan; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan perlawanan pelawan sebagai perlawanan yang benar dan memerintahkan mengangkat sita/menghentikan proses eksekusi, dan/atau mengeluarkan objek perkara dari putusan perkara asal yang telah berkekuatan hukum tetap.

(c) Perlawanan eksekusi dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

(d) Jika perlawanan eksekusi diajukan

secara lisan maka ketua atau hakim yang ditunjuk mencatat perlawanan lisan tersebut.

(e) Perlawanan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pelawan dan ditandatangani oleh ketua atau hakim yang ditunjuk.

(f) Jika perlawanan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelawan sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh pelawan.

(g) Perlawanan eksekusi oleh pihak (*partij verzet*) berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan pelawan sudah memenuhi kewajiban sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan.[920]

(h) Pada asasnya, perlawanan tidak menangguhkan eksekusi,[921] kecuali jika segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai putusan perlawanan dijatuhkan.

u) Penangguhan Eksekusi

(1) Eksekusi hanya dapat ditangguhkan oleh ketua pengadilan yang memimpin pelaksanaan eksekusi.

(2) Dalam keadaan sangat mendesak, apabila ketua pengadilan berhalangan, wakil ketua pengadilan dapat memerintahkan penangguhan eksekusi, misalnya dalam hal terjadi serangan fisik terhadap petugas eksekusi atau keadaan darurat lainnya.

(3) Dalam hal permintaan bantuan eksekusi maka yang dapat melakukan penangguhan eksekusi adalah ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan

---

[920] SEMA Nomor 7 Tahun 2012.
[921] Pasal 207 ayat (3) HIR/Pasal 227 RBg.

eksekusi, sedangkan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang meminta bantuan eksekusi cukup mendapat ”laporan” tentang jalannya eksekusi dari ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan eksekusi.[922]

(4) Penangguhan eksekusi bersifat kasuistik dan eksepsional, sehingga hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang benar-benar mendesak dan dapat dibenarkan secara hukum.

(5) Penangguhan eksekusi bersifat sementara dan terbatas, baik untuk jangka waktu tertentu maupun berdasarkan syarat tertentu. Misalnya, apabila penangguhan dilakukan karena adanya perlawanan dari pihak beperkara atau pihak ketiga maka apabila perlawanan ditolak, eksekusi dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila perlawanan dikabulkan, pelaksanaan eksekusi harus menunggu sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah).

(6) Apabila penangguhan sebagaimana ditetapkan dicabut maka pelaksanaan eksekusi harus segera dilanjutkan tanpa perlu dilakukan *aanmaning* (teguran) ulang.

(7) Penangguhan eksekusi dituangkan dalam bentuk penetapan penangguhan eksekusi.

(8) Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, ketua pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh selaku kawal depan (*voor post*) Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau diteruskan.

(9) Dalam hal sangat mendesak dan ketua pengadilan tinggi agama/Mahkamah

---

[922] Pasal 195 ayat (3) dan (4) HIR/Pasal 206 ayat (4) RBg., dan SEMA Nomor 1 Tahun 2010.

Syar'iyah Aceh berhalangan, wakil ketua pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.

v) Panjar Biaya Eksekusi Habis

(1) Dalam hal panjar biaya eksekusi sudah habis, ketua pengadilan membuat surat peringatan kepada pemohon eksekusi untuk menambah panjar biaya perkara.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) memuat perintah kepada pemohon eksekusi untuk membayar tambahan panjar biaya perkara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Dalam hal surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan, panitera pengadilan membuat surat keterangan.

(4) Berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (3), ketua pengadilan membuat penetapan yang memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan tersebut dari register eksekusi dengan alasan pemohon eksekusi tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan eksekusi.

w) Putusan *Non-Executable*

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non-executable* oleh ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah apabila:

(1) Putusan bersifat *deklaratoir* dan *konstitutif*.

(2) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan tergugat/termohon eksekusi.

(3) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan.

(4) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan.

(5) Untuk dapat menyatakan suatu putusan *non-executable* disebabkan amar putusan tidak

jelas maka harus dilakukan tiga langkah terlebih dahulu, yakni:

(a) harus merujuk amar tersebut ke dalam pertimbangan hukum putusan;

(b) bila ukuran dan batas tetap tidak jelas, ketua menunjuk hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat/ *descente* sebelum eksekusi dilaksanakan; dan

(c) menanyakan pendapat majelis hakim yang memutus.

(6) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat menyatakan suatu putusan *non-executable* setelah seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali penetapan *non-executable* atas alasan sebagaimana dimaksud pada angka (1).

(7) Penetapan *non-executable* sebagaimana dimaksud pada angka (6) harus didasarkan berita acara yang dibuat oleh juru sita yang melaksanakan eksekusi putusan tersebut.

(8) Apabila dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda tetap/tidak bergerak ternyata objek eksekusi ditemukan luas dan batasannya tidak sesuai bunyi amar putusan maka panitera/juru sita melakukan eksekusi sesuai objek senyatanya dengan persetujuan pemohon eksekusi. Perbedaan objek eksekusi dan objek senyatanya dicantumkan dalam berita acara eksekusi.

(9) Penetapan *non-executable* bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.

b. Pedoman Khusus

1) Perkara Permohonan (*Voluntair)*

a) Bidang Perkawinan

(1) Izin Kawin[923]

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon.

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas Pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) pemohon sudah berusia lebih 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; dan

ii) orang tua/wali pemohon tidak memberi izin kawin atau di antara orang tua/wali pemohon ada yang berbeda mengenai izin kawin (yang satu memberi izin yang lain tidak memberi izin); dan

iii. petitum agar pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah memberikan izin kawin kepada pemohon.

(c) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan orang tua/ wali/keluarga garis lurus ke atas dari Pemohon.

(2) Dispensasi Kawin [924]

(a) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua dari anak yang

---

[923] Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (2) KHI, serta Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

[924] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

dimohonkan dispensasi.[925]

(b) Dalam hal kedua calon mempelai masih di bawah usia kawin, dispensasi kawin diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan ke pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin.[926]

(c) Jika orang tua anak enggan mengajukan maka dispensasi kawin dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan wali *adhal* (berbarengan/*concursus*) oleh kerabat terdekat dari anak (kakek kandung, saudara kandung, paman kandung).

(d) Dalam hal orang tua telah bercerai maka permohonan diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang menjadi pemegang kuasa asuh berdasarkan penetapan pengadilan.[927]

(e) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup. [928]

(f) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka permohonan diajukan oleh wali anak yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. [929]

(g) Dalam hal orang tua/wali berhalangan maka diajukan oleh kuasa sesuai dengan

---

[925] Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[926] SEMA Nomor 5 Tahun 2021.
[927] Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[928] Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[929] Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

ketentuan peraturan perundang-undangan. [930]

(h) Dalam hal orang tua/wali tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan diajukan oleh kerabat yang senyatanya merawat dan mengasuh anak yang dibuktikan dengan surat keterangan lurah/kepala desa/ gampong/wali nagari atau istilah lain.

(i) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi domisili orang tua, kecuali:

i. permohonan dispensasi kawin yang calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin;[931] atau

ii. apabila terdapat perbedaan agama antara anak dengan orang tua/wali, sedangkan anak beragama Islam maka permohonan diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah. [932]

(j) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) calon suami/istri belum berusia 19 (sembilan belas)

---

[930] Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[931] SEMA Nomor 5 Tahun 2021.
[932] SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

tahun;

ii) memenuhi syarat administrasi sebagaimana termuat dalam Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; dan

iii) adanya maslahat jika dilangsungkan perkawinan atau menimbulkan mudarat jika tidak dilangsungkan perkawinan.

iii. Petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memberi dispensasi kawin kepada anak yang dimohonkan dispensasi.

(k) Panitera melakukan pemeriksaan secara elektronik terhadap syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan apabila memenuhi syarat maka permohonan dapat dilanjutkan dengan pendaftaran. [933]

(l) Perkara dispensasi kawin diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. [934]

(m) Hakim melaksanakan sidang dibantu oleh panitera sidang.

(n) Dalam memeriksa anak, hakim dan panitera sidang tidak memakai atribut persidangan. [935]

(o) Pada tahap pemeriksaan perkara, pemohon wajib menghadirkan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin,

---

[933] Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[934] Pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[935] Pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

calon suami/istri serta orang tua/wali dari calon suami/istri untuk didengar keterangannya serta dilakukan penasihatan tentang risiko perkawinan di bawah umur oleh hakim. [936]

(p) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf (o) tidak harus pada hari sidang yang sama. [937]

(q) Dalam hal pemohon tidak mampu menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf (o), permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. [938]

(r) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/ wali calon suami/istri mengenai risiko perkawinan terkait dengan: [939]

i. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

ii. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

iii. belum siapnya organ reproduksi anak;

iv. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan

v. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

(s) Pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada huruf (r) harus dicantumkan dan dipertimbangkan dalam penetapan. [940]

(t) Hakim harus mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan

---

[936] Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[937] Pasal 10 ayat (7) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[938] Pasal 10 ayat (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[939] Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[940] Pasal 12 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali calon suami/istri. [941]

(u) Mendengarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf (t) harus dicantumkan dan dipertimbangkan dalam penetapan. [942]

(v) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (r) sampai dengan huruf (u) tidak dilaksanakan mengakibatkan penetapan batal demi hukum. [943]

(w) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebelum memutus perlu mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi/hasil asesmen dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, atau komisi perlindungan anak. [944]

(3) Wali *Adhal* [945]

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Pemohon.

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) pemohon sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun ke atas;

---

[941] Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[942] Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[943] Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[944] Pasal 16 huruf h PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
[945] Pasal 23 ayat (2) KHI.

atau

ii) jika pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun maka permohonan harus dikumulasikan dengan dispensasi kawin dan izin pengadilan;

iii) wali yang berhak menolak menjadi wali nikah; dan

iv) adanya maslahat jika dilangsungkan perkawinan atau menimbulkan mudarat jika tidak dilangsungkan perkawinan; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan wali *adhal*.

(c) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan orang tua/ wali/keluarga pemohon garis lurus ke atas. [946]

(d) Upaya hukum terhadap penetapan wali adhal hanya dapat diajukan permohonan kasasi oleh pemohon.

(e) Dalam hal orang tua/wali nikah keberatan terhadap penetapan pengadilan, dapat mengajukan pencegahan perkawinan atau pembatalan perkawinan jika perkawinan sudah dilangsungkan.[164]

(4) Pencegahan Perkawinan [947]

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat

---

[946] SEMA Nomor 5 Tahun 2014.
[947] Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

perkawinan akan dilangsungkan. [948]

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) salah seorang/kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan; [949]

ii) salah seorang calon mempelai dalam pengampuan sehingga jika dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya;[950] atau

iii) salah seorang calon mempelai masih terikat perkawinan sah dengan orang lain; [951] dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mencegah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mengawinkan mempelai yang perkawinannya dicegah.

(c) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan dari kedua calon mempelai dan PPN yang mencatatkan perkawinannya.

(5) Penolakan Izin Kawin Campuran [952]

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon/tempat tinggal pemohon akan

---

[948] Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[949] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[950] Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[951] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[952] Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

melangsungkan perkawinan.

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
   i. identitas pemohon;
   ii. alasan permohonan:
      i) kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan; [953] dan
      ii) adanya penolakan untuk melangsungkan perkawinan dari pejabat yang berwenang;[954] dan
   iii. petitum yang memuat agar pengadilan menyatakan penolakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan syarat perkawinan telah terpenuhi, tidak beralasan.

(c) Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, calon mempelai diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing.

(d) Bukti berupa surat penolakan izin kawin campuran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara masing-masing.

(e) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memeriksa permohonan dengan acara singkat. [955]

(f) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat mendengar keterangan dari pejabat

---

[953] Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[954] Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[955] Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

yang menerbitkan surat penolakan yang dimohonkan pembatalannya.

(g) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat membatalkan surat penolakan tersebut dengan pertimbangan surat tersebut tidak beralasan[956] dan mengucapkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

- Membatalkan surat penolakan Nomor... tanggal... yang dikeluarkan oleh ...;

(h) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) bersifat final, tidak dapat diajukan upaya hukum.

(i) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak digunakan untuk melangsungkan perkawinan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan diucapkan. [957]

(6) Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah[958]

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat PPN yang menolak perkawinan berkedudukan. [959]

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan; dan

ii) adanya penolakan

---

[956] Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[957] Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[958] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[959] Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

melangsungkan perkawinan dari PPN;[960] dan

iii. Petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan tidak sah penolakan perkawinan oleh PPN dengan memerintahkan kepada PPN untuk melangsungkan perkawinan pemohon.

(c) Pemohon harus melampirkan surat penolakan perkawinan dari PPN. [961]

(d) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan PPN yang menolak melangsungkan perkawinan.

(e) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memeriksa permohonan ini dengan acara singkat. [962]

(f) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mengucapkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

i. Dalam hal permohonan dikabulkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut surat penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Nomor .... tanggal .....;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... untuk melangsungkan perkawinan Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar

---

[960] Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[961] Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[962] Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

biaya perkara sejumlah Rp... (.... rupiah);

ii. Dalam hal Permohonan ditolak:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menguatkan surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Nomor ..... tanggal ..... untuk melangsungkan perkawinan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (.... rupiah);

(g) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dapat diajukan upaya hukum kasasi.

(7) Pengesahan Nikah/Isbat Nikah [963]

(a) Permohonan isbat nikah oleh suami dan istri

i. Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal para pemohon.

ii. Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i) identitas suami dan istri sebagai para pemohon;

ii) alasan permohonan:

(i) tempat dan waktu dilangsungkannya pernikahan;

(ii) terpenuhinya rukun dan

[963] Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) KHI.

syarat perkawinan, mencakup: mempelai, akad nikah, saksi nikah, wali nikah, dan mahar;

(iii) tujuan permohonan isbat nikah untuk pencatatan nikah agar tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(iv) status suami istri saat pernikahan dilangsungkan, apakah terdapat larangan perkawinan atau tidak; dan

iii) petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan perkawinan para pemohon sah menurut hukum.

iii. Dalam hal permohonan dikabulkan harus ada diktum amar penetapan yang memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon.

iv. Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah *sirri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.[964]

v. Isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan kecuali

[964] SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.[965]

vi. Kumulasi permohonan isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian sedangkan pernikahan kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan, dinyatakan tidak dapat diterima.[966]

vii. Isbat nikah massal yang dilaksanakan di dalam negeri dengan dana pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan di luar negeri dapat dilaksanakan, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat syar'i yang ketat dan prinsip kehati-hatian.[967]

viii. Pengadilan dapat melaksanakan sidang isbat nikah terpadu dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di luar gedung pengadilan, di dalam maupun di luar negeri.

ix. Perkawinan bagi warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri dan ternyata pendaftarannya ditolak oleh KUA, baik karena tidak didaftar oleh KBRI maupun pendaftarannya melewati dari 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia, dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal

[965] SEMA Nomor 7 Tahun 2012.
[966] SEMA Nomor 7 Tahun 2012.
[967] SEMA Nomor 5 Tahun 2014.

pemohon.[968]

(b) Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri

i. Permohonan diajukan dalam bentuk *contentiosa* kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal suami atau istri yang didudukkan sebagai termohon.

ii. Apabila suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan tidak didudukkan sebagai termohon maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

iii. Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i) identitas suami atau istri sebagai pemohon;

ii) identitas suami atau istri sebagai termohon;

iii) alasan permohonan memuat uraian tentang:

(i) waktu akad nikah;

(ii) tempat akad nikah;

(iii) terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, mencakup: mempelai, akad nikah, saksi nikah, wali nikah, dan mahar;

(iv) tujuan permohonan isbat nikah untuk pencatatan nikah agar tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(v) status suami istri saat pernikahan

---

[968] SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

dilangsungkan, apakah terdapat larangan perkawinan atau tidak; dan

iv) petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan perkawinan pemohon dan termohon sah.

iv. Dalam hal permohonan dikabulkan harus ada diktum amar putusan yang memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

(c) Permohonan isbat nikah terhadap salah satu atau kedua suami atau istri sudah meninggal dunia

i. Dalam hal salah satu suami atau istri meninggal dunia, permohonan isbat nikah diajukan oleh suami atau istri yang masih hidup bersama dengan seluruh ahli waris dari suami atau istri yang sudah meninggal dunia secara *voluntair* kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah di tempat tinggal para pemohon atau salah satu pemohon.

ii. Dalam hal suami dan istri telah meninggal dunia, permohonan isbat nikah diajukan oleh seluruh ahli waris dari suami dan istri tersebut secara *voluntair* kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di tempat tinggal para pemohon atau salah satu pemohon.

iii. Apabila ada ahli waris yang menolak untuk menjadi pemohon tersebut maka harus diajukan dalam bentuk *contentiosa* dengan mendudukkan ahli waris yang menolak sebagai termohon.

iv. Apabila ahli waris yang menolak menjadi pemohon tersebut tidak dijadikan sebagai termohon maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

v. Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i) identitas pemohon dan termohon;

ii) alasan permohonan:

(i) akad nikah;

(ii) tempat akad nikah;

(iii) terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, mencakup: mempelai, akad nikah, saksi nikah, wali nikah, dan mahar;

(iv) status suami istri saat pernikahan dilangsungkan, apakah terdapat larangan perkawinan atau tidak; dan

(v) tujuan permohonan isbat nikah untuk pencatatan nikah agar tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

iii) petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan perkawinan antara .... dan ....

sah menurut hukum.

vi. Dalam amar putusan/penetapan harus ada diktum yang memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal pemohon atau tempat perkawinan dilangsungkan (dalam hal keduanya telah meninggal dunia).

(8) Asal Usul Anak [969]

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal anak.

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon dan anak;

ii. alasan permohonan:

i) kapan anak dilahirkan;

ii) penyebab kelahiran anak apakah dalam atau akibat perkawinan yang sah atau tidak;

iii) hubungan pemohon dengan anak tersebut;

iv) hubungan pemohon dengan wanita yang melahirkan anak tersebut; dan

v) hubungan pemohon dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan anak tersebut

[969] Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 99 dan Pasal 103 KHI.

sebagai anak sah dari pemohon atau wanita yang melahirkan anak tersebut atau anak luar kawin dari laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

(c) Dalam amar penetapan harus memuat perintah kepada pemohon untuk mencatatkan asal usul anak kepada dinas kependudukan dan catatan sipil di tempat tinggal anak.

(9) Perwalian Anak [970]

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal anak/wali.

(b) Permohonan perwalian harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon dan anak;

ii. alasan permohonan:

i) hubungan hukum pemohon dengan anak yang dimohonkan perwalian; dan

ii) anak yang dimohonkan perwalian belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak dalam pemeliharaan orang tuanya, baik disebabkan sudah meninggal dunia, *mafqud*, atau tidak dapat melaksanakan pemeliharaan anak; [971] dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan pemohon menjadi wali terhadap anak yang dimohonkan perwalian.

---

[970] Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 KHI, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

[971] Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

(c) Dalam hal anak yang akan ditetapkan perwaliannya sedang berada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian orang lain maka permohonan perwalian diajukan secara *contentiosa*.

(d) Permohonan penetapan wali terhadap anak yang masih memiliki orang tua harus disertai dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.

(e) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali adalah seseorang yang berasal dari: [972]

i. keluarga anak (keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai derajat ketiga);

ii. saudara (kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek atau bapak/ibu atau anak);

iii. orang lain; atau

iv. badan hukum.

(f) Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada huruf (e) diutamakan keluarga anak. Jika keluarga anak tidak ada/tidak bersedia/tidak memenuhi persyaratan maka ditunjuk saudara, kemudian orang lain atau badan hukum. [973]

(g) Penunjukan wali dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(h) Permohonan penetapan wali harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial kabupaten/kota

---

[972] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.
[973] Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

setempat.[974]

(i) Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.[975]

(j) Pada dasarnya, penunjukan wali melalui penetapan pengadilan ditujukan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, tetapi pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat mengeluarkan penetapan wali untuk keperluan tertentu yang merupakan kepentingan hukum masyarakat atau kebutuhan praktis dari instansi lain.[976]

(10) Penetapan Kekuasaan Orang Tua atas Anak/ Kuasa Asuh [977]

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal anak.

(b) Permohonan penetapan kekuasaan orang tua atas anak adalah permohonan dari orang tua kandung anak kepada pengadilan untuk mendapat penetapan kekuasaan orang tua guna mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu.[978].

---

[974] Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.
[975] SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
[976] SEMA Nomor 1 Tahun 2025.
[977] Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[978] SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

(c) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diajukan untuk tujuan pengurusan administrasi yang disyaratkan instansi tertentu.

(d) Permohonan kuasa asuh harus memenuhi syarat formal, minimal:
   i. identitas pemohon dan anak;
   ii. alasan permohonan:
      i) adanya hubungan hukum antara pemohon dengan anak;
      ii) anak yang dimohonkan kuasa asuh belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri; [979] dan
      iii) adanya keperluan mendesak yang mempersyaratkan penetapan pengadilan guna melakukan perbuatan hukum mewakili serta untuk kepentingan anak; dan
   iii. petitum yang memuat permohonan agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan pemohon sebagai pemegang kuasa asuh atas anak dimaksud.

(e) Jika permohonan dikabulkan, diktum penetapan memuat amar yang menetapkan pemohon sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak yang bernama ..... dan pemohon berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

(f) Jika ada perselisihan di antara kedua orang tua mengenai kuasa asuh maka harus diajukan dalam bentuk

[979] Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

contentiosa.

(11) Pengangkatan Anak [980]

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal anak.

(b) Permohonan pengangkatan anak harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) pemohon dan anak yang akan diangkat beragama Islam;

ii) permohonan pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan anak;[981] dan

iii) pengangkatan anak tersebut tidak memutus hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya; [982] dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan pemohon sebagai orang tua angkat dari anak.

(c) Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan surat izin menteri dan/atau kepala instansi sosial. [983]

(d) Pengangkatan anak terdiri atas: [984]

i. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan

ii. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing.

---

[980] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

[981] Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

[982] Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

[983] Pasal 13 huruf m, Pasal 14 huruf b, Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

[984] Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

(e) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Jika permohonan dikabulkan, diktum penetapan memuat amar yang menyatakan pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama ....

(g) Panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyampaikan salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) kepada instansi sosial.

(12) Pengakuan Anak/*Istilhaq*

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal wali atau anak.

(b) Pengakuan anak tidak dapat diajukan jika anak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain.

(c) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) kapan anak ditemukan;

ii) penyebab kelahiran anak apakah dalam atau akibat perkawinan yang sah atau tidak;

iii) hubungan pemohon dengan anak tersebut; dan

iv) hubungan pemohon dengan wanita yang melahirkan anak tersebut; dan

iii. petitum yang memuat pengadilan agama/mahkamah syar'iyah

menetapkan bahwa anak bernama ..... adalah anak sah/anak biologis*) dari pemohon.

*) pilih salah satu

(d) Permohonan pengakuan anak diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak anak tersebut ditemukan dan tidak dalam kekuasaan atau perwalian orang lain.

(e) Anak yang ditetapkan berdasarkan permohonan pengakuan anak hanya memiliki hubungan hukum dengan pemohon yang mengakui, tidak mengikat terhadap keluarga pemohon.

(f) Dalam hal permohonan pemohon dikabulkan, pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengakuan anak kepada dinas kependudukan dan catatan sipil.

(13) Perbaikan Buku Nikah [985]

(a) Permohonan perbaikan buku nikah diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon/para pemohon atau tempat kedudukan KUA tempat dilangsungkannya pernikahan.

(b) Permohonan diajukan oleh:

i. suami dan istri;

ii. suami/istri, dalam hal salah satu memberikan kuasa insidentil kepada pasangannya atau salah satu pasangan telah meninggal dunia; atau

iii. anak/ahli waris, dalam hal pasangan suami istri tersebut telah

[985] Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

meninggal dunia.

(c) Permohonan perubahan buku nikah diajukan untuk merubah penulisan nama suami, istri, dan/atau orang tua pada akta nikah dan/atau buku nikah.

(d) Permohonan perubahan buku nikah harus menyertakan akta kelahiran terkait dengan nama yang dimohonkan perubahan.[986]

(e) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon/para pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) adanya kesalahan penulisan nama suami, istri, dan/atau orang tua;

ii) menyebutkan nama yang seharusnya dicantumkan dalam akta nikah/buku nikah; dan

iii) menyebutkan alasan/ kepentingan hukum diajukannya permohonan; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah merubah penulisan nama yang termuat dalam akta nikah/ buku nikah nomor ...., yang semula tertulis ... menjadi ...

(f) Dalam hal pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah mengabulkan permohonan pemohon/para pemohon, diktum penetapan memuat penetapan perubahan nama dari ... menjadi ... dan memerintahkan kepada pemohon/para pemohon untuk melaporkan perubahan

[986] Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

tersebut kepada KUA yang telah menerbitkan akta nikah/buku nikah tersebut.

b) Selain Bidang Perkawinan

(1) Isbat Kesaksian Rukyat Hilal [987]

(a) Kantor kementerian agama mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyat hilal kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal.

(b) Permohonan sidang isbat kesaksian rukyat hilal diajukan dengan menyebutkan lokasi pelaksanaan rukyat hilal.

(c) Dalam hal terdapat lebih dari satu lokasi rukyat hilal maka permohonan cukup diajukan dalam satu surat permohonan.

(d) Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hilal (sidang di tempat) sesuai ketentuan tata ruang sidang yang berlaku.

(e) Dalam keadaan tertentu, tata ruang sidang dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

(f) Dalam hal lokasi rukyat hilal yang dimohonkan lebih dari satu tempat sebagaimana dimaksud pada huruf (c), ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, dapat menugaskan hakim dan panitera sidang ke salah satu lokasi rukyat hilal.

(g) Salah satu lokasi rukyat hilal sebagaimana dimaksud huruf (f),

---

[987] Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

ditentukan oleh pengadilan dan diinformasikan kepada pemohon.

(h) Sidang isbat kesaksian rukyat hilal di lokasi yang tidak dapat dihadiri oleh hakim dilakukan secara jarak jauh melalui komunikasi audio visual (*video conference*).

(i) Sidang jarak jauh sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dilaksanakan di ruang sidang pengadilan yang memeriksa permohonan atau di lokasi rukyat hilal yang dihadiri oleh hakim.

(j) Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan dengan hakim tunggal.

(k) Petugas sidang isbat kesaksian rukyat hilal minimal terdiri dari hakim dan panitera sidang.

(l) Hakim membuka persidangan, kemudian persidangan diskors untuk dilaksanakan kegiatan rukyat hilal.

(m) Hakim membuka kembali persidangan atas permohonan pemohon ketika ada perukyat yang melihat hilal dan/atau ketika sampai batas waktu hilal terbenam tidak ada perukyat yang melihat hilal.

(n) Dalam hal persidangan dibuka kembali dikarenakan ada perukyat yang melihat hilal maka hakim memeriksa kesaksian perukyat tersebut untuk mengetahui terpenuhinya syarat formil dan materiel.

(o) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada huruf (n) adalah:

i. *aqil baligh* atau sudah dewasa;
ii. beragama Islam;
iii. laki-laki atau perempuan;
iv. sehat akalnya;
v. jujur, adil, serta dapat dipercaya; dan

vi. mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

(p) Syarat materiel sebagaimana dimaksud huruf (n) adalah:

i. melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal; dan

ii. mengetahui proses melihat hilal, yakni mengenai waktu, tempat, berapa lama melihatnya, letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dilihat.

(q) Dalam hal perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiel maka hakim memerintahkan perukyat mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut: "*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan ..... tahun ini.", selanjutnya hakim menetapkan/ mengisbatkan kesaksian perukyat tersebut dan dicatat dalam berita acara persidangan.

(r) Dalam hal perukyat dan kesaksiannya tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiel maka hakim menolak permohonan kesaksian rukyatul hilal dan dicatat dalam berita acara persidangan.

(s) Dalam hal persidangan dibuka kembali dikarenakan sampai batas waktu hilal terbenam tidak ada perukyat yang melihat hilal, hakim menyatakan permohonan kesaksian rukyatul hilal tidak dapat diterima, dan dicatat dalam

berita acara persidangan.

(t) Dalam menentukan terpenuhinya syarat materiel yang disampaikan perukyat, hakim mempertimbangkan data astronomi dan data falakiah serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait.

(u) Hakim membacakan penetapan dengan amar sebagai berikut:

i. Jika permohonan kesaksian rukyat hilal dikabulkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perukyat (nama .....) telah berhasil melihat hilal awal bulan .... tahun .....;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp... (... rupiah);

ii. Jika permohonan kesaksian rukyat hilal ditolak:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp... (... rupiah);

iii. Jika permohonan kesaksian rukyat hilal tidak dapat diterima:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp... (... rupiah);

(v) Hakim menutup persidangan.

(w) Salinan penetapan/isbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada pemohon.

(2) Penetapan Ahli Waris [988]

(a) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon atau salah satu pemohon.

(b) Permohonan penetapan ahli waris diajukan ke pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah sepanjang pewaris beragama Islam meskipun sebagian ahli waris atau seluruhnya beragama selain Islam.

(c) Permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentiosa.*[989]

(d) Permohonan penetapan ahli waris tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan pewaris dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. [990]

(e) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon/para pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) pemohon/para pemohon adalah ahli waris yang sah dan tidak terdapat halangan kewarisan sebagai ahli waris;

ii) pewaris dan ahli waris mempunyai hubungan kewarisan berdasarkan

---

[988] Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
[989] SEMA Nomor 5 Tahun 2021.
[990] SEMA Nomor 5 Tahun 2021 melengkapi SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

hubungan darah atau perkawinan; dan

iii) dalam permohonan, pemohon/ para pemohon menyebutkan kepentingan hukum diajukannya permohonan; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan pemohon/ para pemohon sebagai ahli waris dari pewaris, kepentingan hukum diajukannya permohonan, dan dapat juga memohon ditetapkan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

(f) Dalam hal pemohon/para pemohon tidak mencantumkan kepentingan hukum diajukannya permohonan, majelis hakim/hakim memberikan petunjuk untuk mengubah permohonan dengan mencantumkan kepentingan hukum tersebut. Jika setelah pemohon/para pemohon tidak bersedia mencantumkan kepentingan dimaksud, permohonan pemohon/para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

(g) Kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf (e) angka romawi iii dan huruf (f) perlu dicantumkan guna mencegah terjadinya penyelundupan hukum dan penyalahgunaan penetapan ahli waris.

(3) Penetapan *Mafqud* [991]

(a) Permohonan penetapan *mafqud* seseorang diajukan oleh istri/suami, anak, atau ahli waris lain ke pengadilan

[991] Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171 ayat (2) KHI.

agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal terakhir yang ditinggalkan oleh orang yang dimohonkan *mafqud*.

(b) Permohonan penetapan *mafqud* seseorang dapat diajukan dalam perkara yang berdiri sendiri atau dapat diajukan sebagai perkara *accesoir* bersamaan dengan gugatan/permohonan perkara lain.

(c) Dalam hal permohonan diajukan dalam perkara yang berdiri sendiri, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan dan penyelundupan hukum, dalam posita dan petitum harus menyebutkan tujuan/kepentingan hukum diajukannya permohonan penetapan *mafqud* ini.

(d) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon/para pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) hubungan hukum pemohon/ para pemohon dengan orang yang dimohonkan *mafqud*;

ii) kronologis hilangnya/kepergian orang yang dimohonkan *mafqud*; dan

iii) dalam permohonan, pemohon/ para pemohon menyebutkan kepentingan hukum diajukannya permohonan; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan status orang yang dimohonkan *mafqud* dan menyatakan kepentingan hukum penetapan *mafqud* tersebut.

(e) Pemanggilan kepada orang hilang dalam perkara *mafqud* merujuk pada ketentuan sebagai berikut:[992]

i. panggilan dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Jika pada panggilan pertama yang bersangkutan tidak datang maka dilakukan pemanggilan kedua dan seterusnya;

ii. panggilan terhadap orang hilang harus diumumkan pada surat kabar atau harian nasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh ketua pengadilan serta ditempelkan pada papan pengumuman di kantor pengadilan setempat dan papan pengumuman kantor karesidenan atau pemerintah daerah di tempat tinggal terakhir yang ditinggalkan oleh orang yang dimohonkan *mafqud*; dan

iii. jarak masing-masing panggilan adalah 3 (tiga) bulan dan jarak panggilan ke-3 (panggilan terakhir) dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) bulan, sehingga sidang perdana pemeriksaan perkara *mafqud* dilakukan paling cepat 9 (sembilan) bulan dari tanggal PHS.

(4) Isbat Wakaf [993]

(a) Permohonan isbat wakaf diajukan di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat objek wakaf berada.

(b) Permohonan harus memenuhi syarat

---

[992] Pasal 467 KUHPerdata.
[993] Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

formal, minimal:

i. identitas pemohon/para pemohon;

ii. alasan permohonan:

i) kedudukan pemohon/para pemohon;

ii) adanya perbuatan hukum wakaf yang dilakukan *wakif* terhadap objek wakaf berupa ... pada tahun ... dengan menguraikan terpenuhinya persyaratan wakaf; dan

iii) menyebutkan alasan/ kepentingan hukum diajukannya permohonan; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan sah perbuatan wakaf yang dilakukan *wakif* terhadap objek wakaf berupa ... pada tahun ... .

(c) Dalam pemeriksaan isbat wakaf harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Status atau legalitas objek wakaf.

ii. Kepentingan hukum pengajuan permohonan isbat wakaf antara lain:

i) kepastian hukum status objek wakaf karena dokumen legalitas wakaf yang hilang atau belum ada;

ii) perlindungan hukum terhadap aset wakaf; dan/atau

iii) mencegah potensi sengketa.

(d) Apabila wakif telah meninggal dunia maka seluruh ahli waris dari wakif harus ikut serta sebagai pihak dalam permohonan.

(e) Apabila terdapat ahli waris yang keberatan maka diajukan isbat wakaf

secara *contentiosa* dengan mendudukkan ahli waris yang keberatan tersebut sebagai lawan.

(f) *Syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa wakaf yang sudah lama.[994]

2) Perkara Gugatan (*Contentiosa*)

a) Bidang Perkawinan

(1) Cerai Gugat [995]

(a) Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan/atau izin tergugat. [996]

(b) Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan cerai diajukan pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat.[997]

(c) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.[998]

(d) Gugatan cerai dapat digabung dengan gugatan harta bersama, nafkah lampau, pemeliharaan anak, nafkah anak, dan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pascaperceraian.[999]

(e) Meskipun gugatan harta bersama dapat digabungkan dengan gugatan cerai, akan tetapi sedapat mungkin diajukan dalam

---

[994] SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

[995] Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 KHI.

[996] Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 ayat (1) KHI.

[997] Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

[998] Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

[999] Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

perkara terpisah untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut.

(f) Perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 *junctis* SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

(g) Gugatan Perceraian dari anggota TNI/Polri/PNS/ASN maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut maka majelis hakim/hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung penggugat/pemohon/ tergugat/ termohon.[1000]

(h) Untuk keseragaman, amar putusan cerai gugat berbunyi:

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).

(i) Majelis hakim/hakim secara *ex officio* dapat membebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang penggugat tidak terbukti *nusyuz* dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.[1001]

(j) Untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pascaperceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan

---

[1000] SEMA Nomor 10 Tahun 2020.
[1001] SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

kalimat: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.[1002]

(k) Dalam hal penggugat tidak mengajukan gugatan *hadhanah*, majelis hakim/ hakim dapat menggali fakta terkait kuasa asuh anak (*hadhanah*). Jika tidak ada kesepakatan para pihak berdasarkan fakta persidangan yang menghendaki kepentingan terbaik bagi anak, majelis hakim/hakim dapat menetapkan anak di bawah *hadhanah* salah satu dari kedua orang tua dan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan kepada orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* serta memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya demi kepentingan terbaik bagi anak.[1003]

(l) Gugatan cerai dengan alasan *syiqaq* harus dibuat sejak perkara diajukan dan tidak diperbolehkan merubah gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi perkara *syiqaq* atau sebaliknya mengubah alasan *syiqaq* menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

(m) Pemeriksaan dan penyelesaian perceraian atas dasar *syiqaq* harus memedomani ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

---

[1002] SEMA Nomor 2 Tahun 2019.
[1003] SEMA Nomor 1 Tahun 2025.

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

(n) Dalam hal gugatan diajukan oleh istri terhadap suami dengan mekanisme khuluk, proses penyelesaian gugatan dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat yang amarnya berbunyi: "Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (nama ..... bin .....) terhadap Penggugat (nama ..... binti .....) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp.... (..... rupiah)".

Keterangan: *Iwadh* tersebut dapat pula berupa rumah atau benda lainnya secara bersama.

(o) Terhadap putusan talak khuluk dapat diajukan upaya hukum sehingga ketentuan khuluk sebagaimana tersebut dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam harus dikesampingkan pelaksanaannya.

(p) Dalam hal suami atau istri *riddah* (keluar dari agama Islam), putusannya memfasakh perkawinan penggugat dan tergugat, dengan amar sebagai berikut:

- Memfasakh perkawinan Penggugat (nama ... binti ...) dengan Tergugat (nama ... bin ...).

(q) Terhadap putusan perkara perceraian sebagaimana huruf (o) tetap diterbitkan akta cerai dengan alasan fasakh.

(2) Cerai Talak [1004]

(a) Permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi

[1004] Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 KHI.

tempat tinggal termohon kecuali termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan/atau izin Pemohon. [1005]

(b) Dalam hal termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan cerai talak diajukan pada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon. [1006]

(c) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. [1007]

(d) Permohonan cerai talak dapat digabungkan dengan pembagian harta bersama dan pemeliharaan anak. [1008]

(e) Meskipun gugatan harta bersama dapat digabungkan dengan gugatan cerai, akan tetapi sedapat mungkin diajukan dalam perkara terpisah untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut.

(f) Perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 *junctis* SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

(g) Permohonan perceraian dari anggota TNI/Polri/PNS/ASN maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut maka

---

[1005] Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 129 KHI.
[1006] Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
[1007] Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
[1008] Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

majelis hakim/hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/ termohon/ tergugat.[1009]

(h) Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak berbunyi:
- Memberi izin kepada Pemohon (nama ..... bin .....) untuk menjatuhkan talak ..... terhadap Termohon (nama ..... binti ....) di depan sidang Pengadilan Agama .....

(i) Dalam hal suami atau istri *riddah* (keluar dari agama Islam), putusannya bukan memberikan izin untuk mengikrarkan talak, akan tetapi memfasakh perkawinan pemohon dan termohon, dengan amar sebagai berikut:
- Memfasakh perkawinan Pemohon (nama ... bin ...) dengan Termohon (nama ... binti ...).

(j) Terhadap putusan perkara perceraian sebagaimana huruf (h) tetap diterbitkan akta cerai dengan alasan fasakh.

(k) Majelis hakim/hakim secara *ex officio* dapat membebankan kepada pemohon untuk membayar nafkah *iddah, mut'ah* (selama istri tidak nusyuz) dan nafkah *madhiyah* serta nafkah anak apabila secara nyata anak bersama termohon, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.[1010]

[1009] SEMA Nomor 10 Tahun 2020.
[1010] SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

(l) Untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pascaperceraian khususnya nafkah *iddah, mut'ah* dan *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat: "... dibayar sebelum pengucapan ikrar talak." Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.[1011]

(m) Selama pemeriksaan cerai talak sebelum pembuktian, istri dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), di antaranya mengenai nafkah anak, nafkah *iddah, mut'ah* dan *madhiyah.*

(n) Dalam hal pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.[1012]

(o) Dalam hal pemohon tidak mengajukan gugatan *hadhanah*, majelis hakim/ hakim dapat menggali fakta terkait kuasa asuh anak (*hadhanah*). jika tidak ada kesepakatan para pihak berdasarkan fakta persidangan yang menghendaki kepentingan terbaik bagi anak, majelis hakim/hakim dapat menetapkan anak di bawah *hadhanah* salah satu dari kedua orang tua dan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan kepada orang tua yang ditetapkan

---

[1011] SEMA Nomor 1 Tahun 2017.
[1012] SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

sebagai pemegang *hadhanah* serta memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya demi kepentingan terbaik bagi anak. [1013]

(p) Ketentuan mengenai perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq* berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perkara cerai talak dengan alasan *syiqaq*.

(q) Dalam hal perkara diajukan dengan alasan istri berzina dilakukan berdasarkan hukum acara sebagaimana permohonan cerai talak biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus atau atas dasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa istri melakukan tindak pidana zina atau dengan cara *li'an.*[1014]

(r) Syarat formil sumpah *li'an*: [1015]

i. Tuduhan istri berbuat zina tercantum atau dibuat secara kronologis dalam surat gugatan atau permohonan.

ii. Istri menyanggah tuduhan suami bahwa dirinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain.

iii. Sumpah *li'an* dilaksanakan atas perintah Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

(s) Syarat materiel sumpah *li'an*: [1016]

i. Suami tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas tuduhan zina terhadap istrinya, hakim harus

---

[1013] SEMA Nomor 1 Tahun 2025.
[1014] Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
[1015] Pasal 127 KHI.
[1016] Pasal 127 dan Pasal 128 KHI.

menjatuhkan putusan sela untuk pengucapan sumpah.

ii. Sumpah suami diucapkan dalam sidang majelis hakim (pengadilan) yang dihadiri oleh istri pemohon.

iii. Sumpah suami dibalas pula dengan sumpah istri yang disampaikan dalam sidang pengadilan pula.

iv. Sumpah *mula'anah* (saling melaknat) menurut teks sumpah yang sudah ditentukan.

(t) Tata cara sumpah *li'an* dilakukan dengan cara sebagai berikut:[1017]

i. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata "Laknat Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta"; dan

ii. istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "Tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "Murka Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut benar".

iii. Tata cara angka romawi i dan angka romawi ii tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(u) *Li'an* hanya sah jika dilaksanakan di muka persidangan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang akibat hukumnya mengakibatkan putusnya

---

[1017] Pasal 127 KHI.

perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.[1018]

(v) Proses pemeriksaan cerai talak dengan *li'an* adalah:

i. Setelah pemohon dan termohon melakukan jawab menjawab, dilanjutkan dengan pembuktian.

ii. Bila tidak ditemukan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. selain bukti sumpah, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menanyakan kepada suami, apakah akan melakukan sumpah *li'an*.

iii. Apabila suami menghendaki untuk mengucapkan sumpah *li'an* maka pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memerintahkan suami mengucapkan sumpah *li'an* melalui putusan sela.

iv. Sumpah suami sebagaimana dimaksud pada angka romawi iii dilakukan sebanyak empat kali yang berbunyi: "*Wallahi,* demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina", dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan: "Saya siap menerima laknat Allah bila saya berdusta."

v. Setelah suami disumpah, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menanyakan kepada istri apakah ia bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik).

vi. Bila istri bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik),

[1018] Pasal 125 dan Pasal 128 KHI.

pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memerintahkan istri untuk mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi: "*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina", dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan: "Saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta."

vii. Amar putusan dengan alasan *li'an* bukan memberikan izin cerai akan tetapi memutuskan perkawinan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/ Termohon dengan *li'an*.

(3) Gugatan Nafkah *Iddah, Mut'ah* dan *Madhiyah* [1019]

(a) Gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* dapat diajukan bersama-sama atau terpisah dengan perkara perceraian.[1020]

(b) Dalam hal gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diajukan terpisah dengan perkara perceraian, gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat.

(c) Dalam menetapkan nominal pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi tergugat, serta fakta kebutuhan dasar hidup penggugat (istri)[1021] atau berdasarkan standar biaya

---

[1019] Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152 dan Pasal 158 KHI.

[1020] Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

[1021] SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

hidup minimal di daerah setempat.

(d) Untuk menjamin terlaksananya putusan atas hak mantan istri pascaperceraian, pengadilan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga/instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan cara pemotongan langsung gaji/penghasilan mantan suami oleh bendahara tempat mantan suami bekerja dan diserahkan kepada mantan istri setiap bulan atau kerja sama lainnya yang dapat memastikan terpenuhinya hak mantan istri pascaperceraian.

(e) Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak mantan istri, majelis hakim/hakim dapat mencantumkan dalam pertimbangan hukum bahwa kelalaian dalam membayar hak mantan istri pascaperceraian termasuk perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dituntut secara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

(4) *Hadhanah* dan Nafkah Anak [1022]

(a) Demi kepentingan terbaik bagi anak, gugatan *hadhanah* diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak senyatanya. Jika jumlah anak lebih dari satu orang dan tinggal terpisah maka gugatan diajukan ke salah satu pengadilan yang daerah hukumnya

[1022] Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 KHI, serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

meliputi tempat tinggal anak atau beberapa anak tersebut. [1023]

(b) Kedua orang tua berhak memelihara dan mengasuh anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun meskipun perkawinan keduanya putus.[1024] Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara orang tua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak maka pengadilan dapat menetapkan siapa orang tua yang berhak memegang hak *hadhanah*. [1025]

(c) Pada dasarnya, hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.[1026]

(d) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama anak.[1027]

(e) Pengalihan pemeliharaan anak sebagaimana dimaksud pada huruf (d), harus didasarkan atas putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan mengajukan gugatan *hadhanah*.

(f) Dalam hal anak telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun (mumayiz), di dalam persidangan majelis hakim/hakim harus mendengarkan keterangan dari anak mengenai memilih untuk mendapatkan

---

[1023] SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

[1024] Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[1025] Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf e KHI.

[1026] Pasal 105 huruf a KHI.

[1027] Pasal 156 huruf c KHI dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

hak asuh dari ayah atau ibunya. [1028]

(g) Persidangan dalam rangka mendengarkan pilihan anak sebagaimana dimaksud pada huruf (f), pengadilan harus memperhatikan hukum acara yang mengatur tentang persidangan anak.

(h) Apabila orang tua pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjaga dan memelihara kepentingan terbaik bagi anak, termasuk tidak memberikan akses kepada orang tua yang bukan pemegang hak *hadhanah* maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.[1029]

(i) Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. [1030]

(j) Dalam menetapkan nominal pembebanan nafkah anak, harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi tergugat serta fakta kebutuhan dasar hidup anak.[1031]

(k) Dalam pembebanan nafkah anak sebagaimana dimaksud pada huruf (j) hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, termasuk kewajiban membayar biaya pendidikan dan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan

---

[1028] Pasal 105 huruf b KHI.
[1029] SEMA Nomor 1 Tahun 2017.
[1030] Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[1031] SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

kebutuhan riil anak. [1032]

(l) Nafkah anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. [1033]

(m) Dalam gugatan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam perkara konvensi, rekonvensi, ataupun gugatan tersendiri.[1034]

(n) Amar putusan gugatan pemeliharaan anak berbunyi: "Menetapkan anak bernama ..... bin/binti ....., umur .....tahun/tanggal lahir ..... berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai berumur 21 (dua puluh satu) tahun/dewasa dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut" dan "Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana dimaksud pada amar putusan angka... kepada Penggugat".

(o) Dalam hal pemeliharaan anak dimintakan pencabutan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah maka amarnya berbunyi:

1. Mencabut hak *hadhanah* dari Tergugat (nama ... bin/binti ...);
2. Menetapkan anak bernama ... bin/binti ... berada di bawah *hadhanah* Penggugat (nama ... bin/

[1032] SEMA Nomor 3 Tahun 2015.
[1033] SEMA Nomor 2 Tahun 2019.
[1034] SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

binti ...);

3. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mecurahkan kasih sayangnya demi kepentingan terbaik bagi anak;

(p) Amar putusan gugatan nafkah anak berbunyi:

"Menghukum Tergugat (... bin/ binti ...) untuk membayar nafkah anak masing-masing bernama:

1. ... bin/binti ..., umur ... tahun/ tanggal lahir ...;
2. ... bin/binti ...., umur ... tahun/ tanggal lahir ...;

sejumlah Rp... (... rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar ... persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun/ dewasa."

(q) Untuk menjamin terlaksananya putusan atas hak nafkah anak pascaperceraian, pengadilan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga/instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan cara pemotongan langsung gaji/penghasilan ayah atau ibu yang diwajibkan pengadilan oleh bendahara tempat ayah atau ibu bekerja dan diserahkan kepada anak melalui orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah setiap bulan atau kerja sama lainnya yang dapat memastikan terpenuhinya nafkah anak.

(r) Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak anak

pascaperceraian, majelis hakim/hakim dapat mencantumkan dalam pertimbangan hukum bahwa kelalaian dalam membayar hak anak pascaperceraian termasuk perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dituntut secara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(5) Harta Bersama [1035]

(a) Gugatan harta bersama diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah:

i. yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat; atau

ii. yang daerah hukumnya mewilayahi objek harta bersama atau salah satu objek harta bersama dalam hal objek tersebut dalam bentuk benda tetap.

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas penggugat dan tergugat;

ii. alasan gugatan:

i) hubungan hukum penggugat dengan tergugat; dan

ii) objek-objek harta bersama dan status perolehannya; dan

iii. petitum yang menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama

[1035] Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI.

penggugat dengan tergugat.

(c) Putusan perkara dalam gugatan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara,[1036] kecuali terhadap pihak ketiga yang memiliki hak sewa dengan iktikad baik harus dilindungi oleh hukum.

(d) Untuk kepentingan penyelesaian sengketa harta bersama, majelis hakim/ hakim dapat memerintahkan lembaga/ instansi terkait (perbankan, BPN, dan lain-lain) untuk memberikan keterangan atau informasi terkait objek sengketa harta bersama.

(e) Dalam hal salah satu suami atau istri telah meninggal dunia dan keduanya telah bercerai, namun harta bersama belum dibagi maka gugatan harta bersama harus melibatkan seluruh ahli waris suami atau istri yang telah meninggal dunia sebagai pihak.

(f) Dalam hal salah satu suami atau istri telah meninggal dunia namun keduanya belum bercerai maka gugatan harta bersama dikumulasi dengan gugatan waris yang melibatkan seluruh ahli waris suami atau istri yang telah meninggal dunia sebagai pihak.

(g) Hasil pengembangan secara produktif terhadap harta bersama meski perkawinan telah putus harus diperhitungkan sebagai harta bersama

---

[1036] SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

dengan mempertimbangkan kontribusi pihak yang aktif mengembangkannya.

(6) Izin Poligami [1037]

(a) Permohonan izin poligami diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal termohon.[1038]

(b) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas pemohon dan termohon;

ii. alasan permohonan:

i) hubungan hukum pemohon dan termohon;

ii) identitas calon istri kedua/ ketiga/keempat;

iii) latar belakang diajukannya permohonan izin poligami;

iv) harta bersama antara pemohon dan termohon; dan

v) persetujuan termohon atas kehendak pemohon untuk melakukan poligami; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memberi izin kepada pemohon untuk melakukan poligami dengan .... dan menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon.

(c) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

[1037] Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 KHI.

[1038] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KHI.

i. permohonan izin poligami harus bersifat *contentiosa*, pihak istri didudukkan sebagai termohon;

ii. alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat alternatif, bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dapat memberi izin poligami;

iii. persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi;

iv. dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami, sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

v. harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami

masih terikat perkawinan dengan istri pertama maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat;

vi. ketentuan harta bersama sebagaimana dimaksud pada angka romawi (v) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan dari harta pribadi suami untuk istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan untuk istri kedua, ketiga dan keempat tersebut tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta pribadi suami; dan

vii. bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

i) untuk istri pertama 1/2 (seperdua) dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan pertama, ditambah 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah 1/4 (seperempat) dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri

pertama, ditambah 1/5 (seperlima) dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, kedua, ketiga dan keempat; dan

ii) harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/ istri dari hibah, hadiah atau warisan.

(7) Pembatalan Perkawinan [1039]

(a) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya[1040] kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal suami dan istri, suami/ istri. [1041]

(b) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70-72 Kompilasi Hukum Islam.

(c) Perkara permohonan pembatalan perkawinan bersifat *contentiosa*.

(d) Permohonan pembatalan perkawinan

[1039] Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

[1040] Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 72 dan Pasal 73 KHI.

[1041] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 KHI.

oleh suami atau istri dengan alasan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau penipuan atau salah sangka terhadap diri salah satu suami atau istri, dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilangsungkan.[1042]

(e) Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) di atas berakhir apabila ancaman sudah berakhir atau salah satu suami/istri menyadari adanya penipuan atau salah sangka terhadap diri salah satu suami/istri namun yang bersangkutan tetap melanjutkan ikatan perkawinan dalam batas waktu lebih dari 6 (enam) bulan. [1043]

(f) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan,[1044] kecuali terhadap apa yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

(g) Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali apabila perkawinan tersebut didalilkan dan terbukti dilakukan dengan tidak beriktikad baik.[1045]

[1042] Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 KHI.
[1043] Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (3) KHI.
[1044] Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 KHI.
[1045] SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

(8) Gugatan Pencabutan Wali [1046]

(a) Gugatan pencabutan wali diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat.

(b) Gugatan pencabutan wali bersifat *contentiosa* dengan mendudukkan wali yang akan dicabut hak perwaliannya sebagai tergugat.

(c) Gugatan pencabutan wali harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas penggugat dan tergugat;

ii. alasan gugatan:

i) anak saat ini berada dalam perwalian tergugat; dan

ii) tergugat sudah tidak memenuhi syarat lagi atau tidak dan/atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagai wali atau wali tidak diketahui keberadaannya; [1047] dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mencabut perwalian tergugat dan menetapkan penggugat sebagai wali yang baru.

(d) Pencabutan dan penunjukan wali dapat diajukan oleh keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum.

(e) Penunjukan wali dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Gugatan pencabutan wali harus

[1046] Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 109 KHI serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

[1047] Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 109 KHI.

melampirkan surat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.[1048]

(g) Gugatan pencabutan wali dapat dikumulasikan dengan gugatan ganti rugi terhadap harta anak yang diselewengkan secara hukum oleh wali.

(9) Gugatan Pengingkaran Anak [1049]

(a) Gugatan diajukan oleh ayah yang mengingkari anak ke pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat sebagai ibu yang melahirkan anak tersebut.

(b) Penggugat yang akan mengingkari anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah anak dilahirkan, 360 (tiga ratus enam puluh) hari sesudah putusnya perkawinan, atau setelah Penggugat mengetahui istrinya melahirkan anak dan ia memungkinkan untuk mengajukan gugatan.[1050]

(c) Gugatan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas penggugat dan tergugat;

ii. alasan gugatan:

i) penggugat bukan sebagai orang tua sah atau orang tua biologis dari anak yang dilahirkan oleh tergugat meskipun lahir dalam perkawinan yang sah; dan

ii) penggugat bersedia mengucapkan sumpah *li'an*

[1048] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.
[1049] Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 101 dan Pasal 102 KHI.
[1050] Pasal 102 ayat (1) KHI.

atas pengingkaran anak tersebut;[1051] dan

iii. petitum yang meminta agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menetapkan anak tersebut bukan anak sah atau anak luar kawin penggugat.

(d) Gugatan pengingkaran anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara *li'an*,[1052] dengan ketentuan:

i. jika anak lahir sebelum masa 180 (seratus delapan puluh) hari sejak hari perkawinan dilangsungkan (kecuali anak tersebut hasil hubungan suami istri sebelum dilakukan perkawinan); atau

ii. jika suami dapat membuktikan bahwa anak yang berusia 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih dalam kandungan istrinya, atau anak yang dilahirkan bukan anaknya yang sah karena dia dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan hubungan biologis dengan istrinya; dan

iii. Sumpah *li'an* dilakukan dengan cara:

i) penggugat bersumpah empat kali dengan kata "*Wallahi,* demi Allah saya bersumpah bahwa benar Tergugat telah berzina dan anak yang dilahirkan Tergugat bukan anak saya", sumpah tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kata

[1051] Pasal 101 KHI.
[1052] Pasal 101 KHI.

"Laknat Allah atas diri saya apabila tuduhan dan pengingkaran saya terhadap anak tersebut adalah dusta"; dan

ii) tergugat menolak tuduhan dan pengingkaran penggugat dengan bersumpah empat kali dengan kata "*Wallahi,* demi Allah saya bersumpah bahwa tuduhan dan pengingkaran Penggugat adalah tidak benar", sumpah tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kata "Murka Allah atas diri saya apabila tuduhan dan pengingkaran tersebut benar adanya".

iv. Tata cara sebagaimana dimaksud pada angka romawi i) dan angka romawi ii) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan apabila tidak diikuti dianggap tidak terjadi *li`an.*

(e) Pengadilan dapat memerintahkan Penggugat untuk melakukan pemeriksaan tes *DNA* (*Deoxyribonucleic Acid*) untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan putusannya.

(f) Gugatan pengingkaran anak yang tidak dilakukan dengan acara *li'an*, dilakukan dengan pembuktian biasa.

b) Selain Bidang Perkawinan

(1) Kewarisan [1053]

(a) Gugatan kewarisan diajukan kepada

[1053] Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 KHI.

pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tergugat atau salah satu tergugat atau objek atau salah satu objek sengketa dalam hal objek sengketa berupa benda tetap.

(b) Gugatan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di mana penggugat atau salah satu penggugat bertempat tinggal.

(c) Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang sesuai asas personalitas keislaman dalam bidang kewarisan. sengketa kewarisannya yang beragama Islam menjadi kewenangan peradilan agama.

(d) Surat gugatan dalam perkara kewarisan sesuai dengan asas *ijbary* dan individual, harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak karena harta warisan secara hukum telah berpindah dari pewaris kepada ahli waris yang berhak dan dimiliki secara individual terhitung sejak terjadinya kematian pewaris. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.[1054]

(e) Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau baitulmal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

[1054] SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial. [1055]

(f) Pengajuan permohonan oleh Baznas atau baitulmal dilakukan setelah adanya putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang menetapkan Baznas atau baitulmal sebagai pengelola harta pewaris yang tidak mempunyai ahli waris sebagaimana dimaksud huruf (e) dengan tahapan:

i. pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama memberitahukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Baznas atau baitulmal kabupaten/kota setempat;

ii. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka romawi i tersebut, Baznas atau baitulmal kabupaten/kota mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah untuk ditetapkan sebagai pengelola harta warisan pewaris yang tidak mempunyai ahli waris untuk kepentingan sosial sebagaimana isi putusan tersebut; dan

iii. ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah menetapkan Baznas atau baitulmal kabupaten/ kota sebagai pengelola harta warisan

[1055] SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

pewaris yang tidak mempunyai ahli waris untuk kepentingan sosial.

(g) Harta warisan merupakan milik semua ahli waris, dengan demikian, pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris.[1056]

(h) Dalam pembagian warisan berlaku asas *ijbary*, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Karena itu, ketika sengketa waris terjadi setelah harta warisan berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan maka terhadap harta warisan yang produktif harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.[1057]

(i) Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak maka anak kandung pewaris dari hasil perkawinan di bawah tangan yang memenuhi rukun dan syarat menurut fikih tetapi tidak dicatatkan menurut hukum perkawinan di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris.[1058]

(j) Anak tiri dan anak angkat yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris dan telah terjalin hubungan yang harmonis dengan pewaris sepanjang hidupnya, dapat diberi bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat

---

[1056] SEMA Nomor 7 Tahun 2012.
[1057] SEMA Nomor 7 Tahun 2012.
[1058] SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

wajibah.[1059]

(k) Ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu maka anak laki-laki dari saudara kandung tersebut sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung tersebut diberikan bagian melalui wasiat wajibah.[1060]

(l) Putusan perkara dalam gugatan waris yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, kecuali penguasaan melalui sewa oleh pihak ketiga dengan iktikad baik harus dilindungi oleh hukum. [1061]

(m) Untuk kepentingan penyelesaian sengketa waris, majelis hakim/hakim dapat memerintahkan lembaga/instansi terkait (perbankan, BPN, dan lain-lain) untuk memberikan keterangan atau informasi terkait objek sengketa waris.

(n) Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dan dicatat dalam register penitipan (konsinyasi), sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/baitulmal khusus

[1059] SEMA Nomor 7 Tahun 2012.
[1060] SEMA Nomor 3 Tahun 2015.
[1061] SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

wilayah Aceh.[1062]

(2) Wasiat [1063]

(a) Gugatan pembatalan wasiat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat atau salah satu tergugat atau tempat objek sengketa berada dalam hal objek benda tersebut berupa benda tetap.

(b) Gugatan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau tempat tinggal salah satu di antara para penggugat.

(c) Sengketa wasiat dapat diajukan karena wasiat tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang serta hukum *syara'*.

(d) Dalam memeriksa perkara wasiat, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memedomani beberapa petunjuk sebagai berikut:

i. gugatan pembatalan wasiat harus berbentuk *contentiosa*;

ii. ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan wasiat apabila wasiat tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan pemberi wasiat;[1064] dan

iii. wasiat kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai harta

---

[1062] SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

[1063] Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 KHI.

[1064] Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 201 KHI.

warisan, kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris.[1065]

(e) Putusan perkara dalam gugatan pembatalan wasiat yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, kecuali penguasaan melalui sewa oleh pihak ketiga dengan iktikad baik harus dilindungi oleh hukum. [1066]

(3) Hibah [1067]

(a) Gugatan pembatalan hibah diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat atau tempat tinggal salah satu di antara para tergugat atau objek sengketa berada dalam hal objek benda tersebut berupa benda tetap.

(b) Gugatan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau tempat tinggal salah satu di antara para penggugat.

(c) Sengketa pembatalan hibah dapat diajukan karena hibah tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang serta hukum *syara'*.

(d) Dalam memeriksa gugatan pembatalan hibah, pengadilan agama/mahkamah

---

[1065] Pasal 195 ayat (3) KHI.

[1066] SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

[1067] Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 KHI.

syar'iyah memedomani beberapa petunjuk sebagai berikut:

i. gugatan pembatalan hibah harus berbentuk *contentiosa*; dan

ii. ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila hibah tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta benda pemberi hibah. [1068]

(e) Hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/istri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama maka hanya 1/2 (seperdua) dari objek hibah saja yang dapat dicabut, setelah majelis hakim/ hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.[1069]

(f) Putusan perkara dalam gugatan hibah yang objek perkaranya berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, kecuali penguasaan melalui sewa oleh pihak ketiga dengan iktikad baik harus dilindungi oleh hukum.[1070]

(g) Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.[1071]

[1068] Pasal 210 ayat (1) KHI.
[1069] SEMA Nomor 7 Tahun 2012.
[1070] SEMA Nomor 10 Tahun 2020.
[1071] SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

(4) Wakaf [1072]

(a) Gugatan wakaf diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat atau salah satu di antara para tergugat atau tempat objek perkara atau tempat salah satu objek perkara berada dalam hal objek benda tersebut berupa benda tetap.

(b) Gugatan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau tempat tinggal salah satu di antara para penggugat.

(c) Pihak yang dapat mengajukan gugatan wakaf adalah wakif, nazir, ahli waris dari wakif, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), atau pihak terkait.

(d) Sengketa mengenai wakaf dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

i. antara ahli waris wakif atau orang yang berkepentingan dengan nazir yang mengelola harta wakaf;

ii. antara wakif dan nazir dalam sengketa pengelolaan harta wakaf, dalam hal nazir melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukannya maupun karena pengalihan harta wakaf kepada pihak lain;

iii. antara nazir dan wakif atau keluarga wakif dalam hal wakif/keluarga

---

[1072] Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

wakif yang menguasai kembali harta wakaf;

iv. antara masyarakat dengan nazir, karena nazir dalam pengelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukan maupun pengalihan harta wakaf kepada pihak lain yang dapat diajukan dengan gugatan kelompok (*class action*);

v. antara para nazir mengenai siapa yang berhak mengelola harta wakaf jika nazir lebih dari satu;

vi. antara nazir dengan BWI, dalam hal sengketa sah tidaknya surat keputusan BWI tentang penggantian nazir; atau

vii. antara nazir dengan pengawas wakaf.

(e) Gugatan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat;

ii. uraian gugatan, berupa:

i) kronologis terjadinya wakaf;

ii) menguraikan hal-hal terkait wakaf (ikrar wakaf, benda wakaf, nazir dan tujuan); dan

iii) pelanggaran yang telah dilakukan tergugat (misalnya: nazir menyalahgunakan hasil wakaf); dan

iii. petitum yang meminta agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah mengabulkan sesuai dengan kepentingan pengajuan gugatan wakaf (misal: mengesahkan

wakaf, atau mengganti nazir).

(f) Dalam pemeriksaan sengketa wakaf harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. harta wakaf yang disengketkan harus jelas;

ii. Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) yang dibuat di hadapan PPAIW;

iii. sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam hal harta wakaf berupa tanah;

iv. surat keterangan wakaf dari Kantor Urusan Agama (KUA);

v. surat keterangan pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS);

vi. bukti dokumen pengelolaan; dan

vii. rekomendasi BWI.

(5) Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah* [1073]

(a) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[1074]

(b) *Infaq* adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah *Subhanahu Wata'ala.*[1075]

(c) *Shadaqah* adalah perbuatan seseorang

[1073] Pasal 49 huruf f, g, dan h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

[1074] Penejelasan Pasal 49 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

[1075] Penejelasan Pasal 49 huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah *Subhanahu Wata'ala* dan pahala semata.[1076]

(d) Sengketa Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* dimungkinkan antara lain:

i. orang-orang yang berzakat, berinfaq, dan bershadaqah dengan Badan Amil Zakat;

ii. pejabat yang berwenang mengawasi zakat, *infaq* dan *shadaqah* dengan Badan Amil Zakat;

iii. mustahik dengan Badan Amil Zakat; atau

iv. pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Amil Zakat dalam hal diketahui adanya penyalahgunaan harta zakat, *infaq* dan *shadaqah* oleh Badan Amil Zakat. Dalam kasus terakhir ini dimungkinkan adanya *class action*.

(6) Ekonomi Syariah[1077]

(a) Acara Biasa [1078]

i. Gugatan ekonomi syariah diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat atau tempat tinggal salah satu di antara para tergugat atau tempat tinggal tergugat utama atau pengadilan yang ditunjuk

---

[1076] Penejelasan Pasal 49 huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

[1077] Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, serta PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

[1078] Pasal 2 PERMA Nomor 14 Tahun 2016, sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

dalam akad.

ii. Kriteria perkara ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh nomenklatur akad syariah secara eksplisit, tetapi dapat pula ditentukan dari materi akad yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sesuai kaidah *al-'ibratu fi al-'uqudi li al-maqashidi wa alma'ani laa li al-alfadzi wa al-mabani* (yang menjadi acuan dalam kontrak adalah tujuan dan substansi, bukan nama dan redaksi).[1079]

iii. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi antara:

i) para pihak yang berakad karena terjadinya wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH); atau

ii) pihak ketiga dengan para pihak yang berakad terkait pembatalan akad, pembatalan akta pengikat hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang.

iv. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akad yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) maka pengadilan agama/mahkamah

[1079] SEMA Nomor 1 Tahun 2025.

syar'iyah secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.[1080]

v. Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i) dalam gugatan wanprestasi, majelis hakim/hakim secara *ex officio* tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan;[1081] dan

ii) pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/ nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan.[1082]

vi. Eksekusi hak tanggungan berikut pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama, kecuali objek

---

[1080] Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1081] SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
[1082] SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

pengosongan dikuasai pihak ketiga.[1083]

vii. Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.[1084]

viii. Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad syariah maka ketua pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan tersebut diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.[1085]

ix. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (*mas'uliyah taqsiriyah/dhaman 'udwan*) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.[1086]

x. Gugatan pelindungan konsumen yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait lembaga keuangan syariah merupakan kewenangan pengadilan agama.[1087]

[1083] SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
[1084] SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
[1085] SEMA Nomor 5 Tahun 2021.
[1086] SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
[1087] Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

(b) Acara Sederhana [1088]

i. Proses Pengajuan Gugatan dan Pemeriksaan Pendahuluan

i) Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat.

ii) Dalam hal penggugat dan tergugat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang berbeda, penggugat menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. [1089]

iii) Gugatan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. perkara wanprestasi dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiel paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); [1090]
2. penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; [1091] dan
3. gugatan harus dilampiri bukti-bukti surat yang

[1088] Pasal 2 PERMA Nomor 14 Tahun 2016, sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Gugatan sederhana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

[1089] Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

[1090] Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

[1091] Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

sudah dilegalisir.[1092]

iv) Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas gugatan sederhana secara elektronik tanpa persidangan mengenai:
   1. materi dan persyaratan gugatan;[1093] dan
   2. menilai sederhana tidaknya pembuktian.[1094]

v) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi iv) menunjukkan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, hakim yang ditunjuk menerbitkan penetapan secara elektronik dan mengunggah ke dalam SIP dengan amar sebagai berikut:[1095]
   1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
   2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara tersebut dari register perkara;
   3. Memerintahkan Panitera mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

vi) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi iv) menunjukkan bahwa gugatan merupakan

---

[1092] Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1093] Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1094] Pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1095] Pasal 11 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

gugatan sederhana, hakim menetapkan hari sidang melalui SIP. [1096]

vii) Hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil para pihak secara elektronik.

viii) Juru sita/juru sita pengganti mengunggah bukti panggilan ke dalam SIPP.

ii. Persidangan Gugatan Sederhana

i) Perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.[1097]

ii) Dalam melaksanakan sidang, hakim dibantu oleh panitera sidang untuk membuat BAS melalui SIP. [1098]

iii) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, gugatan dinyatakan gugur.[1099]

iv) Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama, dilakukan pemanggilan kedua secara elektronik. [1100]

v) Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil dengan sah dan patut, hakim memutus perkara dengan verstek. [1101]

vi) Terhadap putusan verstek, tergugat dapat mengajukan

[1096] Pasal 12 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1097] Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
[1098] Pasal 20 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1099] Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
[1100] Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
[1101] Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan putusan secara elektronik.[1102]

vii) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir* dalam persidangan elektronik.[1103]

viii) Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur acara gugatan sederhana, tata cara pembuktian, dan upaya hukum kepada para pihak.[1104]

ix) Hakim mendamaikan para pihak pada sidang pertama[1105] dan para pihak dapat pula melakukan perdamaian di luar persidangan.

x) Perdamaian di luar sidang harus dilaporkan kepada hakim, jika tidak dilaporkan kepada hakim, hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. [1106]

xi) Dalam hal terjadi perdamaian saat persidangan atau perdamaian di luar sidang yang dilaporkan kepada hakim, selanjutnya hakim membuat akta perdamaian yang bersifat

---

[1102] Pasal 13 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
[1103] Pasal 13 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
[1104] Pasal 14 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1105] Pasal 15 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1106] Pasal 15 ayat (5) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum terhadapnya.[1107]

xii) Dalam hal tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara secara elektronik.[1108]

xiii) Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan.[1109]

xiv) Jika tergugat mengajukan eksepsi dan/atau rekonvensi atau ada pihak lain yang mengajukan intervensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

xv) Gugatan yang diakui secara bulat tidak memerlukan pembuktian tambahan.[1110]

xvi) Jika tergugat membantah gugatan, sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian sesuai hukum acara yang berlaku. [1111]

xvii) Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat.[1112]

xviii) Panitera sidang membuat BAS melalui SIP yang

[1107] Pasal 15 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1108] Pasal 16 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1109] Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1110] Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
[1111] Pasal 18 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
[1112] Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.[1113]

xix) Hakim mengucapkan putusan secara elektronik melalui SIP.[1114]

xx) Hakim wajib memberitahukan secara elektronik melalui SIP hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum *verzet* atau keberatan jika tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan.[1115]

xxi) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.[1116]

iii. Pemeriksaan *Verzet* atas Putusan Verstek Gugatan Sederhana

i) *Verzet* bukan perkara baru tetapi satu kesatuan dengan gugatan asal sehingga nomor perkaranya tetap menggunakan nomor perkara asal dengan mengganti kode Pdt.GS menjadi Pdt.Plw.GS.

ii) Permohonan *verzet* diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan secara elektronik atau setelah pemberitahuan putusan secara elektronik kepada tergugat yang tidak hadir.[1117]

iii) Dalam hal permohonan *verzet* diajukan melampaui batas

[1113] Pasal 20 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1114] Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1115] Pasal 20 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1116] Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1117] Pasal 13 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan secara elektronik, berdasarkan surat keterangan panitera, ketua pengadilan membuat penetapan melalui SIP dengan diktum permohonan tersebut tidak dapat diterima.

iv) Permohonan *verzet* diperiksa oleh hakim yang mengadili dan memutus verstek paling lambat 7 (tujuh) hari sejak sidang pertama *verzet*.

v) Dalam hal penyelesaian perkara gugatan sederhana lebih dari 25 (dua puluh lima) hari karena ada permohonan *verzet* maka pengadilan harus melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

vi) Putusan *verzet* dapat diajukan upaya keberatan.

iv. Pemeriksaan Keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana

i) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan secara elektronik atau setelah pemberitahuan putusan secara elektronik kepada tergugat yang tidak hadir.[1118]

ii) Dalam hal permohonan keberatan diajukan melampaui

[1118] Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

batas waktu 7 (tujuh) hari kerja, berdasarkan surat keterangan panitera, ketua pengadilan membuat penetapan melalui SIP dengan diktum permohonan keberatan tidak dapat diterima.

iii) Permohonan keberatan diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.[1119]

iv) Ketua majelis membuat PHS melalui SIP.

v) Majelis hakim/hakim memeriksa putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan, memori keberatan dan kontra memori keberatan. [1120]

vi) Panitera sidang membuat BAS melalui SIP.

vii) Majelis hakim mengucapkan putusan secara elektronik melalui SIP.

viii) Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan majelis hakim.[1121]

ix) Majelis hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti memberitahukan putusan keberatan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat

---

[1119] Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1120] Pasal 26 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1121] Pasal 27 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

3 (tiga) hari sejak diucapkan.[1122]

x) Putusan keberatan tidak dapat diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.[1123]

(7) Arbitrase Syariah [1124]

(a) Kewenangan Mengadili

i. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang mengadili perkara ekonomi syariah kecuali sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase/ klausul arbitrase syariah.[1125]

ii. Ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah berwenang menunjuk arbiter atau majelis arbitrase dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, atau atas permohonan para pihak dalam arbitrase syariah *ad hoc* jika para pihak tidak terdapat kesepakatan dalam menunjuk arbiter.[1126]

iii. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya.[1127]

iv. Perlawanan terhadap eksekusi putusan arbitrase syariah menjadi

---

[1122] Pasal 29 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1123] Pasal 30 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
[1124] Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016.
[1125] Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1126] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1127] Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 14 Tahun 2016.

kewenangan peradilan agama.

v. Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syari'ah internasional dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

(b) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syari'ah Nasional

i. Pendaftaran putusan arbitrase syari'ah nasional (*deponir*):

i) pemohon mengajukan permohonan pendaftaran putusan arbitrase syari'ah ke panitera pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan arbitrase syariah diucapkan;[1128]

ii) petugas pelayanan administrasi perkara memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran putusan arbitrase syariah nasional;

iii) pemohon membayar biaya pendaftaran putusan arbitrase syariah nasional;

iv) petugas pelayanan administrasi perkara mencatat permohonan pendaftaran putusan arbitrase syariah nasional kemudian meneruskan berkas permohonan kepada panitera;

[1128] Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

v) panitera dan arbiter atau kuasanya melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase syariah dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran;[1129] dan

vi) arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.[1130]

ii. Proses Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah Nasional:

i) petugas pelayanan administrasi perkara memberikan informasi tentang tata cara pengajuan permohonan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional;

ii) pemohon membayar panjar biaya permohonan eksekusi putusan arbitrase syariah nasional;

iii) pemohon mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase syariah nasional dengan melampirkan:[1131]

(i) putusan arbitrase syariah yang telah didaftar di pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah (telah

[1129] Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1130] Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1131] Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

terdapat catatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase syariah oleh panitera pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dan arbiter atau kuasanya); dan

(ii) lembar asli pengangkatan sebagai arbiter;

iv) panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi putusan arbitrase syariah kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

v) ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah memberikan perintah pelaksanaan/eksekusi jika permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;[1132]

vi) perintah sebagaimana dimaksud pada angka romawi v) ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase syariah.[1133]

vii) perintah eksekusi tersebut diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan eksekusi putusan arbitrase

---

[1132] Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1133] Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

didaftarkan;[1134]

viii) perintah eksekusi selanjutnya dilaksanakan mengikuti prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan (eksekusi); [1135]

ix) ketua pengadilan agama/ mahkamah syari'ah menolak permohonan eksekusi jika permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; [1136] dan

x) atas penolakan sebagaimana dimaksud pada angka romawi ix), tidak ada upaya hukum.[354]

(c) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Internasional

i. Pendaftaran putusan arbitrase syariah internasional (*deponir*):

i) petugas pelayanan administrasi perkara memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran putusan arbitrase syariah internasional;

ii) pemohon membayar biaya pendaftaran putusan arbitrase syariah internasional;

iii) pemohon mengajukan permohonan pendaftaran putusan arbitrase syariah internasional ke Panitera

---

[1134] Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1135] Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1136] Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat,[1137] dengan melampirkan:[1138]

(i) lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase syariah internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;

(ii) lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase syariah internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan

(iii) keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase syariah internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan

[1137] Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1138] Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

pelaksanaan putusan arbitrase syariah internasional;

iv) petugas pelayanan administrasi perkara mencatat permohonan pendaftaran putusan arbitrase syariah internasional kemudian meneruskan berkas permohonan ke panitera.

v) panitera dan arbiter atau kuasanya melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase syariah internasional dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

ii. Proses eksekusi putusan arbitrase syariah internasional:

i) pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;[1139]

ii) petugas pelayanan administrasi perkara memberikan informasi tentang tata cara pengajuan permohonan eksekusi putusan arbitrase syariah internasional;

iii) pemohon membayar panjar biaya perkara eksekusi putusan arbitrase syariah internasional;

iv) petugas pelayanan administrasi perkara mencatat perkara permohonan kemudian menyampaikan kepada panitera;

[1139] Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

v) panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi putusan arbitrase syari'ah internasional kepada ketua pengadilan;

vi) Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase syari'ah internasional jika permohonan pemohon memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

vii) atas pengakuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi vi) tidak dapat diajukan banding dan kasasi;[1140]

viii) Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase syari'ah internasional jika permohonan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

ix) atas penolakan sebagaimana dimaksud pada angka romawi viii), dapat diajukan kasasi.[1141]

x) Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat memberikan perintah pelaksanaan/ eksekusi jika mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase syariah internasional

---

[1140] Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1141] Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

atau jika permohonan kasasi atas Putusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menolak untuk pengakuan dan melaksanakan putusan arbitrase syariah internasional dikabulkan Mahkamah Agung;

xi) perintah sebagaimana dimaksud pada angka romawi x) tersebut di atas ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase syariah internasional; dan

xii) pelaksanaan perintah eksekusi tersebut dilimpahkan kepada ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang secara relatif berwenang melaksanakannya dan pelaksanaannya mengikuti prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan (eksekusi).[1142]

(d) Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah.[1143]

i. Putusan arbitrase syari'ah nasional dapat dimohonkan pembatalannya apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[1144]

i) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

[1142] Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1143] Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
[1144] Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

ii) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

iii) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

ii. Pembatalan putusan arbitrase syariah bukan merupakan upaya hukum banding.

iii. Pembatalan putusan arbitrase syariah nasional memedomani ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

iv. Prosedur pengajuan pembatalan putusan arbitrase syariah:

i) prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara pembatalan putusan arbitrase syariah:

(i) petugas pelayanan administrasi perkara memberikan informasi tentang tata cara pengajuan perkara pembatalan putusan arbitrase syariah;

(ii) pihak beperkara membayar panjar biaya perkara;

(iii) petugas pelayanan administrasi perkara mencatat perkara pembatalan putusan arbitrase syariah ke dalam

register induk perkara gugatan melalui SIPP; dan

(iv) petugas pelayanan administrasi perkara melengkapi berkas perkara dengan instrumen yang dibutuhkan;

ii) tahapan pendaftaran perkara pembatalan putusan arbitrase syariah secara elektronik sama dengan pendaftaran perkara gugatan biasa dengan tambahan mengunggah putusan arbitrase syariah yang telah diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah setempat;

iii) pendistribusian dan persidangan perkara pembatalan putusan arbitrase syariah mengikuti prosedur dan tata cara persidangan perkara biasa; dan

iv) pendistribusian dan persidangan perkara pembatalan putusan arbitrase syariah secara elektronik mengikuti prosedur dan tata cara persidangan elektronik perkara biasa.

(8) Gugatan Pelindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [1145]

(a) Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah:

i. yang daerah hukumnya meliputi

[1145] PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

tempat kediaman tergugat;[1146]

ii. yang daerah hukumnya meliputi kedudukan salah satu Tergugat yang merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS), dalam hal tergugat lebih dari satu dan salah satunya merupakan PUJKS;[1147] atau

iii. Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal tergugat berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1148]

(b) Gugatan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas penggugat (OJK) dan tergugat/para tergugat;

ii. alasan gugatan: [1149]

i) tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh OJK terhadap PUJKS, kecuali terhadap gugatan yang tergugatnya adalah pihak lain (bukan PUJKS);

ii) daftar konsumen yang telah dirugikan; dan

iii) jumlah kerugian dan mekanisme distribusi pembayaran ganti rugi; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyatakan PUJKS telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk membayar ganti rugi/ mengembalikan harta kekayaan

---

[1146] Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2025.
[1147] Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2025.
[1148] Pasal 14 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2025.
[1149] Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

milik pihak yang dirugikan.

(c) Putusan diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak sidang pertama.[1150]

(d) Pihak yang keberatan atas putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diucapkan/diberitahukan kepada para pihak yang sejak awal tidak hadir.[1151]

(e) Perkara gugatan pelindungan konsumen oleh OJK termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

(9) Pembatalan Penetapan Ahli Waris

(a) Pembatalan penetapan ahli waris diajukan oleh pihak ketiga (di luar para pihak dalam penetapan ahli waris) dan/atau para pihak yang semula menjadi pihak dalam penetapan ahli waris sebagai penggugat dan mendudukan para pihak yang lain dalam penetapan ahli waris sebagai tergugat kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang menjatuhkan penetapan ahli waris tersebut.

(b) Penetapan ahli waris dapat dibatalkan jika terdapat kekeliruan, iktikad tidak baik, atau tidak dilibatkannya ahli waris lain dalam permohonan penetapan ahli waris yang sudah ditetapkan.

(c) Gugatan harus memenuhi syarat formal,

[1150] Pasal 22 PERMA Nomor 4 Tahun 2025.
[1151] Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2025.

minimal:

i. identitas penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat;

ii. alasan gugatan berupa:

i) adanya ahli waris yang berhak namun tidak diikutsertakan;[1152]

ii) terdapat ahli waris yang tidak berhak akan tetapi diikutsertakan;

iii) prosedur penetapan cacat hukum; atau

iv) penipuan atau pemalsuan dokumen dalam proses penetapan yang dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membatalkan penetapan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah ... nomor ... tanggal .....

(10) Pembatalan Akta Perdamaian [1153]

(a) Gugatan pembatalan akta perdamaian diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang memutus akta perdamaian.

(b) Gugatan pembatalan akta perdamaian dapat diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan perdamaian dalam hal kesepakatan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh pihak ketiga yang dirugikan atas putusan akta perdamaian

---

[1152] SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

[1153] Pasal 1859 sampai dengan Pasal 1863 KUHPerdata.

tersebut.

(c) Pembatalan akta perdamaian harus melibatkan seluruh pihak yang membuat atau menandatangani kesepakatan perdamaian.

(d) Gugatan harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat;

ii. alasan gugatan berupa:

i) hubungan hukum antara penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat; dan

ii) uraian tentang persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau kerugian yang diderita akibat akta perdamaian tersebut; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah membatalkan akta perdamaian pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah ... nomor ... tanggal .....

(11) Perubahan Amar

(a) Pihak yang dapat mengajukan gugatan perubahan amar adalah pihak dalam putusan yang diajukan perubahan tersebut.

(b) Gugatan perubahan amar diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang telah memutus perkara pada tingkat pertama dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

(c) Gugatan perubahan atau perbaikan amar di antaranya untuk:

i. penambahan amar yang bersifat

condemnatoir;

ii. kesalahan administrasi (salah tulis nama, nomor, tanggal) yang tidak dapat dikoreksi melalui mekanisme renvoi;

iii. mengoreksi kesalahan materiel seperti salah ketik, salah hitung, atau salah sebut yang tidak mengubah esensi putusan; atau

iv. melengkapi hal-hal yang terlewat tetapi merupakan konsekuensi logis dari putusan.

(d) Dalam memeriksa gugatan perubahan amar harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

i. putusan telah berkekuatan hukum tetap;

ii. tidak mengubah pertimbangan hukum atau maksud substansi putusan;

iii. dapat dimintakan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan

iv. majelis hakim/hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi atau substansi dari putusan *declaratoir*, karena materi putusan *declaratoir* tersebut telah selesai dengan dijatuhkannya putusan yang dimohonkan tersebut.

(e) Majelis hakim/hakim hanya memeriksa dan mengadili terbatas mengenai dapat atau tidaknya putusan yang diajukan tersebut untuk dieksekusi.

(f) Majelis hakim/hakim dalam mengabulkan gugatan serta merta harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan

tingkat banding.[1154]

(12) Perlawanan (*Verzet*) [1155]

(a) *Verzet* adalah perlawanan tergugat terhadap putusan yang dijatuhkan verstek.[1156]

(b) *Verzet* diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pembacaan putusan atau pemberitahuan putusan kepada tergugat.[1157]

(c) *Verzet* bukan perkara baru tetapi satu kesatuan dengan gugatan asal sehingga nomor perkaranya tetap menggunakan nomor perkara asal dengan mengganti kode Pdt.G menjadi Pdt.Plw.

(d) Dalam *verzet,* pelawan adalah tergugat dan terlawan adalah penggugat.

(e) *Verzet* diperiksa dan diadili oleh majelis hakim/hakim yang sama dengan majelis hakim/hakim yang mengadili gugatan asal, kecuali ketua majelis atau hakim anggota berhalangan tetap.

(f) *Verzet* ditujukan pada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/ penggugat asal.

(g) *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat dalam persidangan dianggap tidak relevan karena forum untuk membahas masalah tersebut sudah dilampaui.

(h) Pengadilan yang menerima pengajuan *verzet* harus memeriksa perkara kembali karena dengan adanya *verzet* putusan verstek menjadi mentah kembali.

(i) Surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan pada

---

[1154] SEMA Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2001.
[1155] Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg.
[1156] Pasal 129 ayat (1) HIR/Pasal 153 ayat (1) RBg.
[1157] Pasal 129 ayat (2) HIR/Pasal 153 ayat (2) RBg.

hakikatnya sama dengan surat jawaban.

(j) Apabila dalam pemeriksaan *verzet*, terlawan (penggugat asal) tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir*. Sedangkan apabila pelawan (tergugat asal) yang tidak hadir maka majelis hakim/hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan untuk kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi dapat diajukan upaya hukum banding.[1158]

(k) Dalam hal tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek dan penggugat mengajukan upaya hukum banding maka upaya hukum banding yang diajukan oleh penggugat dinyatakan gugur.

(l) Pernyataan gugur sebagaimana dimaksud pada huruf (k) diterbitkan oleh ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berdasarkan surat keterangan panitera yang menyatakan tergugat mengajukan *verzet*.

(m) Contoh amar putusan verstek untuk kedua kali sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menguatkan putusan Nomor ... tanggal ... dengan verstek;
3. Menghukum/Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);

[1158] Pasal 129 ayat (5) HIR/Pasal 153 ayat (5) RBg.

(n) Contoh amar putusan mengabulkan *verzet* sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor ... tanggal ... tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan/semula Tergugat/Termohon adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor ... tanggal ....;
4. Menolak gugatan Terlawan/semula Penggugat/Pemohon;
5. Menghukum/membebankan kepada Pelawan/semula Tergugat/ Termohon atau Terlawan/semula Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);

(o) Contoh amar putusan menolak *verzet* sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor ... tanggal ... tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan/ semula Tergugat/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek Nomor ..... tanggal....;
4. Menghukum/membebankan kepada Pelawan/semula Tergugat/ Termohon atau Terlawan/semula Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... rupiah);

(p) Terhadap putusan *verzet,* kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding maka berkas

perkara verstek dan *verzet* disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan menggunakan satu nomor perkara.

(13) Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)[1159]

(a) Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat atau salah seorang dari para tergugat.

(b) Surat gugatan harus memenuhi syarat formal dan memuat:

i. identitas penggugat/para penggugat (sebagai perwakilan kelompok) dan identitas tergugat/para tergugat; dan

ii. alasan gugatan sebagai berikut:

i) definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

ii) keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

iii) posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi, dikemukakan secara jelas dan terinci; dan

iv) uraian kerugian yang diderita oleh kelompok.

[1159] PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

(c) Gugatan dapat diajukan oleh wakil kelompok secara elektronik dengan ketentuan:[1160]

i. jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan diajukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan;

ii. terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan dan bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; dan

iii. wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

(d) Majelis hakim/hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian kuasa, jika kuasa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.[1161]

(e) Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.[1162]

(f) Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.[1163]

[1160] Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1161] Pasal 2 huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1162] Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1163] Pasal 3 huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

(g) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.[1164]

(h) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, majelis hakim/hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok.[1165]

(i) Majelis hakim/hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok.[1166]

(j) Sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.[1167]

(k) Apabila majelis hakim/hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah maka segera setelah itu, majelis hakim/hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan majelis hakim/hakim.[1168]

(l) Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan: [1169]

i. segera setelah majelis hakim/hakim memutuskan bahwa pengajuan tata

---

[1164] Pasal 3 huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1165] Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1166] Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1167] Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1168] Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1169] Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan ke luar; dan

ii. pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

(m) Pemberitahuan memuat: [1170]

i. nomor gugatan dan identitas penggugat/para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat/para tergugat;

ii. penjelasan singkat tentang kasus;

iii. penjelasan tentang pendefinisian kelompok;

iv. penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;

v. penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dan keanggotaan kelompok;

vi. penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;

vii. penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;

viii. apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;

ix. formulir isian tentang pernyataan ke luar anggota kelompok; dan

x. penjelasan tentang jumlah ganti rugi

[1170] Pasal 7 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

yang akan diajukan.

(n) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan majelis hakim/hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh majelis hakim/hakim diberi kesempatan menyatakan ke luar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir.[1171]

(o) Pihak yang telah menyatakan diri ke luar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.[1172]

(p) Apabila majelis hakim/hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan majelis hakim/hakim.[1173]

(q) Majelis hakim/hakim mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.[1174]

(r) Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, majelis hakim/hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan

---

[1171] Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1172] Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1173] Pasal 5 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1174] Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

pemberitahuan atau notofikasi.[1175]

(14) Pengukuhan Kesepakatan Damai di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian [1176]

(a) Permohonan pengukuhan kesepakatan damai di luar pengadilan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi:

i. tempat tingggal tergugat/salah satu di antara para tergugat dalam hal diajukan dalam bentuk gugatan;

ii. tempat objek perkara berada dalam hal objek kesepakatan perdamaian berupa benda tetap; atau

iii. tempat yang disepakati oleh para pihak.

(b) Permohonan pengukuhan kesepakatan damai di luar pengadilan menjadi akta perdamaian dapat diajukan dengan mekanisme pengajuan gugatan[1177] atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(c) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.[1178]

(d) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (c), berupa kesepakatan perdamaian dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat.[1179]

(e) Dalam hal permohonan diajukan dengan

[1175] Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
[1176] Pasal 36 dan Pasal 37 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[1177] Pasal 36 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[1178] Pasal 36 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[1179] Pasal 36 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

mekanisme gugatan, harus memenuhi syarat formal, minimal:

i. identitas para pihak (penggugat/ para penggugat dan tergugat/para tergugat);

ii. alasan permohonan:

i) hubungan hukum antara penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat; dan

ii) menyebutkan alasan/ kepentingan hukum diajukannya permohonan pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian; dan

iii. petitum yang memuat agar pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menghukum para pihak mentaati akta perdamaian tanggal ...

(f) Kesepakatan perdamaian harus dipastikan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan/atau dapat dilaksanakan.[1180]

(g) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (e) harus diucapkan oleh majelis hakim/ hakim paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak gugatan didaftarkan.[1181]

(h) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (f), majelis hakim/ hakim memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal yang harus diperbaiki.[1182]

[1180] Pasal 36 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[1181] Pasal 36 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[1182] Pasal 37 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

(i) Para pihak wajib segera memperbaiki kesepakatan perdamaian sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh mejelis hakim/hakim sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (g).[1183]

(j) Majelis Hakim/Hakim segera mengucapkan putusan akta perdamaian paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan kesepakatan perdamaian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dari para pihak.

2. Pedoman Beracara Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh [1184]

a. Ketua membuat penetapan majelis hakim/hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah setelah perkara didaftar.

b. Panitera di hari yang sama dengan penetapan majelis hakim menunjuk panitera sidang.

c. Ketua majelis hakim/hakim menetapkan hari sidang melalui SIP.

d. Majelis hakim/hakim memeriksa perkara dengan cara:

1) mempelajari bundel A dan bundel B melalui SIP; atau

2) mempelajari bundel A dan bundel B cetak untuk banding atas perkara yang didaftarkan secara manual sejak awal pada pengadilan tingkat pertama.

e. Dalam hal majelis hakim/hakim berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, majelis hakim/hakim memerintahkan kepada pengadilan pengaju melalui putusan sela secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan mencantumkan batas waktu pengadilan agama/mahkamah syar'iyah melakukan pemeriksaan tambahan tersebut.

f. Putusan sela tersebut disampaikan oleh panitera pengadilan

---

[1183] Pasal 37 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
[1184] Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

tingkat banding kepada pengadilan pengaju.

g. Pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf e juga dapat dilakukan langsung oleh pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

h. Hasil pemeriksaan tambahan, baik oleh pengadilan pengaju atau langsung oleh pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf g dituangkan ke dalam berita acara yang merupakan bagian dari berkas bundel A, kemudian diunggah ke dalam SIP.

i. Setelah mempelajari perkara sebagaimana dimaksud pada huruf d, majelis hakim/hakim menuangkan pertimbangan dan pendapat masing-masing secara tertulis dalam lembar pendapat.

j. Majelis hakim melakukan musyawarah, baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi.

k. Pengucapan putusan dilakukan:

1) secara elektronik untuk perkara yang diproses secara elektronik; atau

2) secara langsung dalam sidang terbuka untuk umum untuk perkara yang didaftarkan secara manual sejak awal pada pengadilan tingkat pertama.

l. Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf k dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah musyawarah.

m. Sidang pengucapan putusan dirumuskan dalam catatan sidang yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim/hakim dan panitera sidang dan catatan tersebut menjadi bagian bundel B.

C. Teknis Peradilan Perkara Jinayat

1. Mahkamah Syar'iyah

a. Pada prinsipnya persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim anggota dan dibantu oleh seorang panitera sidang.

b. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal, misalnya pada perkara dengan pemeriksaan acara

cepat[1185] dan praperadilan.

c. Perkara-perkara jinayat yang diperiksa dan diadili di persidangan Mahkamah Syar'iyah terdiri atas: perkara dengan acara biasa; perkara dengan acara singkat; dan perkara dengan acara cepat.

d. Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Biasa

1) Perkara yang telah diregister diserahkan kepada ketua mahkamah syar'iyah untuk ditetapkan majelis hakim/ hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

2) Dalam menetapkan majelis hakim/hakim, ketua mahkamah syar'iyah dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua.

3) Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan penahanan maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah majelis hakim.

4) Dalam hal permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh ketua majelis dan hakim anggota.

5) Sebelum perkara disidangkan, majelis hakim terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiel.[1186]

6) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada angka 5) meliputi:

a) nama;
b) tempat lahir;
c) umur atau tanggal lahir;
d) tempat tinggal;
e) pekerjaan terdakwa;
f) jenis kelamin;
g) kebangsaan; dan
h) agama.

7) Syarat-syarat materiel sebagaimana dimaksud pada angka 5) meliputi:

a) waktu dan tempat *jarimah* dilakukan (*waqt wuqu'i*

[1185] Pasal 208 ayat (1) huruf (d) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1186] Pasal 139 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

al-jarimah);

b) perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya; dan

c) hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan *jarimah* itu yang dapat menimbulkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

d) syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) bersifat imperatif, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan.[1187]

8) Dalam hal ketua mahkamah syar'iyah berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya maka dikembalikan kepada JPU dengan penetapan untuk dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah atau pengadilan lain yang berwenang mengadilinya.[1188]

9) JPU dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima.[1189]

10) Dalam hal isi penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah lain, mahkamah syar'iyah wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perlawanan tersebut diajukan.[1190]

11) Dalam hal isi penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilimpahkan ke pengadilan lain, mahkamah syar'iyah wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Mahkamah Agung dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perlawanan tersebut diajukan.[1191]

e. Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Singkat

1) Perkara dengan acara singkat adalah perkara jinayat yang menurut penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya

---

[1187] Pasal 139 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1188] Pasal 145 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1189] Pasal 146 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1190] Pasal 146 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1191] Pasal 147 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

sederhana.[1192]

2) Pemeriksaan dengan acara singkat hanya dapat dilakukan terhadap jarimah dengan ancaman *'uqubat* maksimal 24 (dua puluh empat) bulan penjara atau yang setara dengan itu.[1193]
3) Pengajuan perkara jinayat dengan acara singkat oleh penuntut umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan.
4) Ketua mahkamah syar'iyah sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan kepala kejaksaan negeri setempat.
5) Setelah sidang dibuka, ketua majelis hakim/hakim menanyakan identitas terdakwa kemudian penuntut umum diperintahkan untuk menguraikan *jarimah* yang didakwakan secara lisan, hal tersebut dicatat dalam BAS sebagai pengganti surat dakwaan.[1194]
6) Pendaftaran perkara jinayat dengan acara singkat dilakukan panitera muda jinayat setelah pemeriksaan perkara.
7) Apabila pada hari persidangan yang ditentukan, terdakwa atau saksi-saksi tidak hadir maka berkas dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung tanpa penetapan, dan dicatat dalam buku ekspedisi.
8) Dalam hal majelis hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan maka majelis hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang mahkamah syar'iyah dengan acara biasa.[1195]
9) Putusan perkara jinayat singkat tidak dibuat secara

[1192] Pasal 206 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1193] Pasal 206 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1194] Pasal 206 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1195] Pasal 206 ayat (3) huruf (d) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

khusus tetapi dicatat dalam BAS.[1196]

10) Ketua mahkamah syar'iyah berkoordinasi dengan kepala kejaksaan negeri setempat, agar berkas perkara dengan acara singkat diajukan 3 (tiga) hari kalender sebelum hari persidangan.

f. Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Cepat

1) Perkara dengan acara cepat adalah perkara jinayat yang diancam dengan hukuman paling banyak 3 (tiga) kali cambuk atau hukuman denda 30 (tiga puluh) gram emas murni.[1197]

2) Mahkamah syar'iyah dapat bersidang dengan hakim tunggal.

3) Putusan dalam perkara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

4) Perkara jinayat dengan acara cepat, didaftarkan dalam register *jarimah* cepat.

g. Perubahan Surat Dakwaan

Penuntut umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan sebelum hakim menetapkan hari sidang dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, perubahan tersebut diberitahukan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik.[1198]

h. Bantuan Hukum

1) Setiap orang yang tersangkut perkara jinayat berhak memperoleh bantuan hukum.[1199]

2) Bagi terdakwa yang didakwa melakukan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hudud* atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1.200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan hukuman 20 (dua puluh) kali cambuk atau denda 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara atau lebih, majelis hakim/hakim wajib menunjuk penasihat

---

[1196] Pasal 206 ayat (3) huruf (f) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1197] Pasal 207 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1198] Pasal 140 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1199] Pasal 60 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

hukum/advokat bagi terdakwa.[1200]

3) Ketidakmampuan terdakwa harus dibuktikan dengan SKTM yang dibuat oleh kepala gampong/lurah di mana terdakwa berdomisili.

4) Dalam hal terdakwa menolak didampingi penasihat hukum, hal tersebut harus dinyatakan di depan persidangan dan dicatat dalam BAS.

i. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam praktik terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu:

1) surat dakwaan tunggal yaitu terhadap terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari qanun jinayat, misalnya *khalwat*;

2) surat dakwaan kumulatif, yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa *jarimah* secara serempak yang masing-masing berdiri sendiri, dengan ketentuan:

   a) terhadap bentuk dakwaan kumulatif, semua jarimah yang didakwakan harus dibuktikan oleh JPU dan oleh majelis hakim/hakim setiap dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan; dan

   b) cara penulisan dakwaan kumulatif: Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya, atau Ke-satu, Ke-dua, Ke-tiga, dan seterusnya, atau Satu, dan Dua, dan Tiga, dan seterusnya.

      Contoh:

      Kesatu : Minum khamar.

      Kedua : Produksi khamar, menimbun/ menyimpan, menjual dan memasukkan khamar.

      Ketiga : Mengikut sertakan anak-anak dalam minum khamar dan memproduksi khamar, menimbun/menyimpan khamar dan menjual khamar serta memasukkan khamar;

3) surat dakwaan subsidiaritas, yaitu dalam dakwaan

[1200] Pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

terdapat beberapa jarimah yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi) mulai dari *jarimah* dengan ancaman hukuman terberat hingga *jarimah* dengan ancaman hukuman teringan.

Contoh dakwaan subsidiaritas:

a) Primer.

b) Subsider.

c) Lebih Subsider.

Dalam dakwaan ini yang lebih dulu dibuktikan adalah dakwaan primer, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primer tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya, dan seterusnya;

4) surat dakwaan alternatif, yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa *jarimah*, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, majelis hakim/hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini sering dirumuskan dengan menggunakan kata “atau” antara beberapa pasal *jarimah* yang didakwakan; dan

5) surat dakwaan kombinasi, yaitu kombinasi dari dakwaan berbentuk subsider dengan alternatif atau antara dakwaan kumulatif dengan subsider atau antara dakwaan kumulatif dengan alternatif.

j. Pembuktian

1) Alat bukti yang sah terdiri atas:[1201]

a) keterangan saksi;

b) keterangan ahli;

c) barang bukti;

d) surat;

e) bukti elektronik;

f) pengakuan terdakwa; dan

[1201] Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

g) keterangan terdakwa.

2) Keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan segala hal yang saksi nyatakan di muka sidang mahkamah, berikut sebab pengetahuan saksi tentang *jarimah* yang didakwakan kepada terdakwa.

3) Majelis hakim/hakim menjatuhkan putusan jika telah yakin berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, baik 2 (dua) orang saksi ataupun 1 (satu) orang saksi ditambah dengan bukti lainnya, bahwa *jarimah* telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.[1202]

4) Majelis hakim/hakim wajib menilai kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya.

5) Dalam hal keterangan beberapa saksi berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan tertentu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.

6) Khusus dalam *jarimah* zina, majelis hakim/hakim memutus berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses perzinaan. Jika ternyata keterangan saksi palsu maka saksi dikenakan *jarimah qadzaf*.

7) Dalam menggali keterangan saksi, majelis hakim/ hakim harus dengan sungguh-sungguh menggali tentang cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayainya keterangan tersebut.

8) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.[1203]

[1202] Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1203] Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

9) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.
10) Dalam perkara jinayat, saksi terbagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:
    a) saksi yang meringankan terdakwa, yaitu saksi yang dimintakan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk dihadirkan dan diperiksa guna meringankan atau membebaskan terdakwa dari dakwaan;
    b) saksi yang memberatkan, yaitu saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum guna menerangkan tentang *jarimah* yang didakwakan kepada terdakwa;
    c) ahli, yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan *jarimah* yang didakwakan; dan
    d) saksi korban, yaitu korban dalam perbuatan *jarimah*.
11) Majelis hakim/hakim memerintahkan penuntut umum untuk memanggil saksi guna didengar keterangannya di persidangan. Jika saksi enggan hadir meskipun telah dipanggil maka ketua majelis hakim/hakim dapat memerintahkan untuk memanggil paksa saksi agar hadir di persidangan.[1204]
12) Sebelum memberikan keterangan, saksi/ahli terlebih dahulu mengangkat sumpah sesuai agama yang dianutnya.
13) Untuk mewujudkan asas persamaan kedudukan di depan hukum, atas permintaan terdakwa, penasihat hukum, ataupun penuntut umum, majelis hakim/ hakim wajib mendengarkan keterangan saksi/ahli yang dimintakan atau yang terdapat dalam surat pelimpahan perkara.
14) Jika dipandang telah cukup, tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa/penasihat hukum untuk menghadirkan saksi/ahli yang dipandang perlu untuk pembelaan, majelis hakim/hakim dapat melakukan

[1204] Pasal 155 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan.

k. Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Kompensasi dalam Perkara Jinayat [1205]

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dipersamakan dengan Restitusi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, [1206] yang diatur sebagai berikut:[1207]

1) Korban/anak korban dalam perkara jinayat berhak memperoleh restitusi berupa:
   a) ganti kerugian, baik materiel maupun imateriel, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat jarimah;
   b) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
   c) kerugian lain yang diderita korban/anak korban sebagai akibat *jarimah*, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
2) Permohonan restitusi harus memuat:
   a) identitas pemohon;
   b) identitas korban/anak korban, dalam hal pemohon bukan korban/anak korban sendiri;
   c) uraian mengenai jarimah;
   d) identitas terdakwa/anak (sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum)/termohon;
   e) uraian kerugian yang diderita; dan
   f) besaran restitusi yang diminta.
3) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dilengkapi dengan:
   a) fotokopi identitas pemohon dan/atau korban/anak korban;
   b) bukti kerugian materiel yang diderita oleh pemohon

[1205] Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1206] Pasal 2 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2022.
[1207] Pasal 4 sampai Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2022.

dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;

c) bukti biaya korban/anak korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;

d) uraian kerugian immateriel yang diderita oleh pemohon dan/atau korban/anak korban;

e) fotokopi surat kematian, dalam hal korban/anak korban meninggal dunia;

f) surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau wali;

g) surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan

h) salinan atau petikan putusan mahkamah syar'iyah, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

4) Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris, atau kuasanya, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada ketua mahkamah syar'iyah, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.

6) Dalam hal pemohon lebih dari 1 (satu) orang, dapat dilakukan penggabungan permohonan.

7) Dalam hal pelaku *jarimah* lebih dari 1 (satu) orang dan persidangan terhadap mereka dipisah, ketua mahkamah syar'iyah menunjuk hakim yang sama untuk mengadili perkara tersebut.

8) Dalam hal pelaku *jarimah* dan/atau pihak ketiga melakukan pembayaran restitusi dalam proses

pemeriksaan atau sebelum putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap, uang restitusi dititipkan di kepaniteraan mahkamah syar'iyah.

9) Penitipan uang restitusi sebagaimana dimaksud pada angka 8) mengacu pada tata cara penitipan uang jaminan penangguhan penahanan.

10) Pengajuan dan pemeriksaan permohonan sebelum putusan mahkamah syar'iyah yang berkekuatan hukum tetap:

a) Permohonan restitusi kepada mahkamah syar'iyah selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban/anak korban.

b) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada penuntut umum disertai keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi jika terdapat keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan *jarimah*.

c) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa/anak (sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum) atau penasihat hukumnya.

d) Dalam hal korban/anak korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan korban/anak korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim memberitahukan hak korban/anak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan

atau setelah putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap.

e) Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

f) Penuntut umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi.

g) Hakim memberikan kesempatan pada pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan pemohon, LPSK, dan/atau penuntut umum.

h) Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa/anak (sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum) atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti.

i) Dalam hal restitusi akan dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.

j) Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan *jarimah*.

k) Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.

l) Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf k) wajib memuat:

   (1) pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi;

   (2) alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; dan

   (3) besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga.

m) Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai

dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

n) Dalam hal hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.

o) Dalam hal terdakwa/anak (dalam pelaku *jarimah* adalah anak) dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan pemohon, penuntut umum dapat mengajukan permohonan banding dan/atau kasasi.

p) Permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris, dan wali untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal:

(1) permohonan restitusi ditolak karena terdakwa/anak (dalam pelaku *jarimah* adalah anak) diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan

(2) permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa/anak (dalam pelaku *jarimah* adalah anak) dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban/anak korban yang belum dimohonkan restitusi kepada mahkamah syar'iyah atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh mahkamah syar'iyah.

q) Penuntut umum menyampaikan salinan putusan mahkamah syar'iyah kepada terdakwa dan/atau pihak ketiga dan LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya salinan putusan oleh penuntut umum.

r) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf q) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan.

s) LPSK menyampaikan salinan putusan kepada korban/anak korban atau keluarga, wali, ahli waris, atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari

terhitung sejak salinan putusan diterima.

t) Pengajuan dan pemeriksaan permohonan setelah putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap:

(1) Dalam hal korban/anak korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku *jarimah*, permohonan dapat diajukan setelah putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap.

(2) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dapat dilakukan jika pemohon telah mengajukan permohonan restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat diajukan oleh pemohon kepada mahkamah syar'iyah secara langsung atau melalui LPSK.

(4) Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemohon mengetahui putusan mahkamah syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap.

(5) Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya.

(6) Dalam hal permohonan restitusi dilakukan setelah putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak termohon.

(7) Jaksa Agung/jaksa menjadi pihak terkait dalam permohonan restitusi.

u) Pemeriksaan dan pencatatan permohonan:

(1) Panitera mahkamah syar'iyah yang membidangi perkara jinayat wajib memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan diajukan.

(2) Dalam hal permohonan belum lengkap,

panitera mahkamah syar'iyah mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau LPSK untuk memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak pemberitahuan diterima.

(3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, panitera mencatat permohonan tersebut dalam buku register dengan kode penomoran: Nomor ... /Res.JN/2O ... /MS ..... *juncto*. nomor pokok perkara jinayatnya.

(4) Ketua mahkamah syar'iyah menunjuk hakim untuk mengadili permohonan restitusi paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

(5) Panitera mahkamah syar'iyah menunjuk panitera pengganti pada hari yang sama dengan penunjukan hakim.

v) Pemeriksaan di persidangan dan penyampaian putusan:

(1) Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang pertama paling lama 2 (dua) hari sejak menerima penetapan penunjukan, disertai dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk mempersiapkan alat bukti.

(2) Hakim mengirimkan salinan permohonan kepada Kejaksaan Agung/kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri setempat disertai panggilan untuk menghadiri sidang.

(3) Dalam hal ganti rugi akan dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebut wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.

(4) Panggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon, termohon, Jaksa Agung/kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri dan/atau pihak ketiga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum persidangan.

(5) Dalam hal pemohon atau termohon tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pemanggilan dilakukan 1 (satu) kali lagi.

(6) Dalam hal pemohon tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan dinyatakan gugur.

(7) Dalam hal termohon tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

(8) Pemeriksaan persidangan meliputi:
   (a) pembacaan permohonan pemohon;
   (b) pembacaan jawaban termohon;
   (c) pemeriksaan alat bukti; dan
   (d) pembacaan penetapan.

(9) Mahkamah syar'iyah wajib memutus permohonan dalam bentuk penetapan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama.

(10) Ketentuan mengenai putusan mahkamah syar'iyah sebagaimana dimaksud pada angka 10) huruf l) dan huruf m) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan yang diajukan setelah adanya putusan mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap.

(11) Upaya hukum terhadap penetapan mahkamah syar'iyah sebagaimana dimaksud pada angka (9) hanya dapat diajukan banding.

(12) Penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada angka (9) bersifat final dan mengikat.

l. Barang Bukti

1) Barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan *jarimah*, atau sebagai objek *jarimah*, atau hasilnya, atau bukti fisik atau materiel, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau

dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya *jarimah*.[1208]

2) Barang bukti diserahkan seluruhnya atau sebagian oleh penuntut umum ke mahkamah, bisa pada saat pelimpahan berkas perkara ataupun pada saat persidangan.
3) Panitera muda jinayat atau panitera pengganti wajib mencatat dalam register barang bukti setiap penyerahan, peminjaman, dan pengembalian barang bukti dan melaporkannya pada panitera melalui panitera muda jinayat.
4) Barang bukti yang disimpan di mahkamah syar'iyah wajib distempel.
5) Barang bukti berupa uang dan surat berharga yang tidak ikut dilampirkan dalam berkas perkara, harus disimpan pada tempat tersendiri yang disediakan untuk itu.
6) Barang bukti yang telah menjadi tanggung jawab mahkamah syar'iyah tidak diperkenankan untuk dipergunakan oleh pejabat di lingkungan mahkamah syar'iyah (hakim, panitera dan karyawan) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 17 tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969.
7) Pengajuan barang bukti di persidangan dapat dilakukan dengan cara:
    a) apabila barang bukti itu berupa barang yang karena sifat maupun jumlahnya sulit diajukan ke persidangan maka cukup diajukan contohnya saja;
    b) jika diperlukan, ketua majelis dapat memerintahkan seorang hakim anggota didampingi oleh panitera sidang untuk memeriksa barang bukti dimaksud dan panitera sidang wajib membuat berita acara setelah mencocokkannya dengan berita acara penyitaan penyidik;
    c) barang bukti yang sifatnya cepat rusak, sebelum

[1208] Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

diajukan ke muka persidangan dan telah dilelang oleh penuntut umum maka berita acara pelelangan barang bukti serta uang hasil pelelangan wajib dilampirkan dalam berkas perkara dan uang hasil pelelangan harus diajukan sebagai bukti di muka persidangan;

d) setiap barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus diajukan oleh penuntut umum ke muka persidangan, sehingga terhadap barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim/hakim; dan

e) barang bukti yang telah disita dan diajukan ke muka persidangan, oleh majelis hakim/hakim dalam putusannya memutuskan barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada dari mana barang itu disita, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.[1209]

8) Sebelum putusan diucapkan, majelis hakim/hakim dapat mengembalikan barang bukti atas permohonan dari pemiliknya atau dari siapa benda itu disita melalui permohonan dan dengan membuat perjanjian berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim.

m. Koneksitas[1210]

1) *Jarimah* yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam maka pelaku yang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri pada Qanun Jinayat sehingga diperiksa dan diadili oleh mahkamah syar'iyah.

2) Bila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *jarimah* yang tunduk kepada peradilan umum tidak menundukkan diri pada qanun jinayat maka ia diperiksa dan diadili di peradilan umum.

[1209] Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1210] Pasal 94 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

3) Jika perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku yang tunduk pada peradilan umum bukan merupakan *jarimah* yang diatur dalam KUHP atau ketentuan '*uqubat* di luar KUHP maka pelaku *jarimah* tetap diadili di mahkamah syar'iyah.

n. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan[1211]

1) Pada setiap mahkamah syar'iyah ditunjuk hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan mahkamah yang menjatuhkan '*uqubat* dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun.
2) Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat.
3) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi penjatuhan '*uqubat*, yang diperoleh dari perilaku terhukum atau pembinaan LP serta pengaruh timbal balik terhadap terhukum selama menjalani hukumannya.
5) Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terhukum selesai menjalani hukumannya.
6) Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala LP menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku terhukum tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.
7) Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala LP tentang cara pembinaan terhukum tertentu.
8) Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh

[1211] Pasal 277 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

hakim pengawas dan pengamat kepada ketua mahkamah syar'iyah secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

o. Sidang Tertutup untuk Umum

1) Pada asasnya sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan, perkara dengan terdakwa atau korbannya anak-anak atau menurut peraturan perundangan-undangan dinyatakan tertutup.[1212]

2) Putusan atas perkara tersebut harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

3) Jika di antara para terdakwa ada yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka untuk terdakwa tersebut oleh hakim ditetapkan untuk diperiksa secara tertutup.

4) Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

p. Penahanan

1) Penahanan terhadap tersangka/terdakwa dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2) Penahanan hanya dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan *jarimah* berdasarkan bukti permulaan yang cukup.[1213]

3) Dalam masalah penahanan, sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh penuntut umum untuk kepentingan penuntutan.

4) Perhitungan pengurangan masa tahanan dari '*uqubat* yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan/penahanan oleh penyidik, penuntut umum, dan mahkamah syar'iyah kecuali '*uqubat hudud*.

5) Masa penahanan untuk pelaku *jarimah* yang dijatuhi '*uqubat hudud* disebutkan dalam putusan sebagai tambahan hukuman.[1214]

6) Pengurangan '*uqubat* untuk penahanan paling lama 30

[1212] Pasal 149 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
[1213] Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1214] Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

(tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.[1215]

7) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka/terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan disebabkan tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik atau mental berat yang dibuktikan dengan surat dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan '*uqubat* cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 40 (empat puluh) bulan.[1216]
8) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 7) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
9) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilakukan atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
    a) penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua mahkamah syar'iyah;
    b) pemeriksaan di mahkamah syar'iyah diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
    c) pemeriksaan banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung; dan
    d) pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
10) Masa penahanan untuk pelaku *jarimah* yang ancaman '*uqubat*nya penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau '*uqubat* yang setara dengan itu diatur secara khusus dengan mengikuti ketentuan Pasal 30 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
11) Untuk menghindari kesalahpahaman kepala rutan dalam menghitung kapan tersangka/terdakwa harus

---

[1215] Pasal 23 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1216] Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

dikeluarkan dari rutan maka tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.

12) Sejak perkara terdaftar di mahkamah syar'iyah maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada mahkamah syar'iyah, dan sisa masa penahanan penuntut umum tidak boleh diteruskan oleh hakim.
13) Apabila tersangka/terdakwa tidak ditahan maka jika hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang.
14) Apabila tersangka/terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, maka memedomani ketentuan sebagai berikut:[1217]
    a) Apabila masa penahanan tersangka atau terdakwa di tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit, tersangka atau terdakwa dilakukan pembantaran.
    b) Masa pembantaran sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dihitung sebagai masa penahanan.
    c) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada huruf a), tersangka atau terdakwa berada dalam pengawasan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan.
15) Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan.[1218]
16) Yang dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan adalah tersangka/terdakwa.
17) Besaran uang jaminan sesuai dengan pertimbangan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan memperhatikan berat ringannya *jarimah* yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa/ penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
18) Barang atau uang jaminan tersebut harus diserahkan

[1217] Pasal 111 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025.
[1218] Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

kepada panitera mahkamah syar'iyah. Uang atau barang jaminan yang diminta penuntut umum ataupun Mahkamah Syar'iyah Aceh tetap harus diserahkan dan disimpan di kepaniteraan mahkamah syar'iyah.

19) Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan tidak diketemukan maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan ketua mahkamah syar'iyah menjadi milik negara, dan disetor ke baitulmal.
20) Apabila terdakwa melarikan diri maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak, cukup mampu, dan bertempat tinggal di Indonesia.
21) Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkannya penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh maka ketua mahkamah syar'iyah harus segera menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
22) Dalam hal terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding atau kasasi maka kewenangan penahanan beralih ke Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung, sejak pernyataan banding atau kasasi tersebut.[1219]
23) Permohonan banding atau kasasi harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung dengan mengikuti petunjuk Surat Ketua Kamar Agama Nomor 18/Tuaka-PA/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 dan surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/1399/HK.01/08/2016.
24) Apabila Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung akan melakukan penahanan maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.

[1219] Pasal 230 ayat (2) *juncto* Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

25) Pada asasnya selama tersangka/terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan, kecuali '*uqubat hudud*.

26) Yang berwenang mengeluarkan tersangka/terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat di tempat mana tersangka/terdakwa ditahan.

q. Status Tahanan

1) Tanggungjawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada mahkamah syar'iyah sejak perkara tersebut dilimpahkan, sedangkan untuk pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.

2) Sejak putusan berkekuatan hukum tetap, status terdakwa beralih menjadi terpidana.

3) Terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum tidak dapat diajukan upaya hukum banding, [1220] akan tetapi dapat diajukan upaya hukum kasasi.[1221]

4) Terhadap putusan bebas dari tuntutan hukum tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi.[1222]

5) Apabila masa penahanan sama dengan '*uqubat* yang dijatuhkan oleh mahkamah syar'iyah maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

6) Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan '*uqubat* yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh baik '*uqubat* penjara, cambuk, atau denda maka Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan kejaksaan kalau perkaranya kasasi.

7) Apabila dalam tingkat banding, lamanya penahanan telah sama dengan '*uqubat* yang dijatuhkan mahkamah syar'iyah, ketua mahkamah syar'iyah dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

[1220] Pasal 73 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1221] Pasal 236 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1222] Pasal 299 ayat (2) huruf (a), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

8) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir, mahkamah syar'iyah wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

9) Dalam hal proses banding dan kasasi, masa tahanan terdakwa hampir berakhir maka mahkamah syar'iyah pengaju wajib mengajukan permohonan perpanjangan penahanan.

r. Pembantaran (*Stuiting*)

1) Pembantaran (*stuiting*) terhadap terdakwa karena alasan kesehatan memedomani ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 1989 tentang Pembantaran (*stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang di Rawat Inap di Luar Rutan atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

2) Pembantaran (*stuiting*) waktu penahanan terdakwa yang dirawat inap di rumah sakit didasarkan pada surat keterangan dokter Rutan.

3) Pembantaran (*stuiting*) dilakukan atas dasar perbuatan melawan hukum, terhitung pada saat terdakwa dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan berakhir setelah terdakwa berada kembali dalam tahanan negara.

s. Pengalihan Penahanan

1) Permohonan pengalihan penahanan dalam lingkungan mahkamah syar'iyah dapat diproses sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

2) Jenis tahanan terdiri dari tahanan Rutan, tahanan rumah, dan tahanan kota.[1223]

3) Terdakwa/penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari penahanan rutan ke penahanan rumah atau penahanan kota, baik secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada majelis hakim, dengan mengemukakan alasan pengalihan penahanan dengan jaminan.

[1223] Pasal 190 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 *juncto* Pasal 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

4) Dalam hal terdakwa dalam tahanan mahkamah syar'iyah, majelis hakim/hakim dapat mengabulkan permohonan pengalihan penahanan tersebut setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang patut dan logis misalnya: jaminan kehadiran terdakwa, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat atau alasan kesehatan/kemanusiaan.
5) Permohonan pengalihan penahanan, baik dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam penetapan, ditandatangani oleh majelis hakim/hakim dan diucapkan di persidangan, serta dicatat dalam BAS.
6) Penetapan majelis hakim/hakim sebagaimana dimaksud pada angka 5), ditembuskan kepada terdakwa/keluarganya atau penasihat hukum, serta kepada instansi yang berkepentingan.
7) Dalam hal pengalihan penahanan dari tahanan kota atau tahanan rumah ke Rutan maka hakim harus memedomani Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

t. Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan maka:

1) penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, pakaian, badan, atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu dengan surat izin ketua mahkamah syar'iyah setempat;[1224]
2) dalam hal rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum mahkamah syar'iyah lain maka harus diketahui oleh ketua mahkamah syar'iyah dan keuchik atau nama lain atau perangkat gampong setempat;[1225]
3) apabila perkara yang bersangkutan belum dilaporkan kepada mahkamah syar'iyah di tempat kejadian perkara yang menurut ketentuan yang berlaku adalah mahkamah syar'iyah yang berwenang mengadili perkara tersebut maka ketua mahkamah syar'iyah dalam

[1224] Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1225] Pasal 42 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

wilayah hukum tempat rumah tersebut terletak, wajib memberi izin penggeledahan;

4) pemberian izin penggeledahan dalam *jarimah* koneksitas diberikan oleh ketua mahkamah syar'iyah tempat perkara tersebut akan diajukan; dan

5) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari ketua mahkamah syar'iyah, dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada ketua mahkamah syar'iyah setempat untuk memperoleh persetujuan.

u. Penyitaan

1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas izin ketua mahkamah syar'iyah di wilayah tempat barang yang akan disita berada.[1226]

2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua mahkamah syar'iyah atas benda bergerak dan penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua mahkamah syar'iyah setempat untuk memperoleh persetujuan.[1227]

3) Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada mahkamah syar'iyah di tempat terjadinya *jarimah* maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah ketua mahkamah syar'iyah tersebut, sedangkan ketua mahkamah syar'iyah di wilayah tempat barang yang disita itu berada, hanya "mengetahui".

4) Apabila dalam persidangan hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang maka perintah hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada penyidik melalui penuntut umum.

v. Praperadilan

1) Praperadilan dapat dilakukan dalam hal:[1228]

a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penetapan tersangka, penghentian penyidikan,

---

[1226] Pasal 44 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

[1227] Pasal 44 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 *juncto* Pasal 120 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

[1228] Pasal 82 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

atau penghentian penuntutan; dan

b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2) Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh:[1229]
   a) tersangka/penasihat hukumnya;
   b) penyidik atau penuntut umum; atau
   c) pihak lain yang dirugikan.

3) Proses pemeriksaan praperadilan[1230]
   a) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua mahkamah syar'iyah dan dibantu oleh seorang panitera sidang.
   b) Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
   c) Hakim mendengar keterangan tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang tentang alasan-alasan praperadilan.
   d) Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan.
   e) Selama pemeriksaan perkara praperadilan belum diputuskan maka pemeriksaan terhadap perkara jinayat tidak dapat dilaksanakan.
   f) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat:
      (1) dasar dan alasannya harus jelas;
      (2) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau JPU pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
      (3) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

[1229] Pasal 84 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1230] Pasal 83 – Pasal 87 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

(4) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; dan

(5) dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

4) Ganti kerugian dapat diminta akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.[1231]

5) Rehabilitasi

a) Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh mahkamah syar'iyah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[1232]

b) Permintaan rehabilitasi diajukan terdakwa sebagai permohonan praperadilan atas kesalahan penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dengan ketentuan sebagai berikut:[1233]

(1) dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;

(2) hakim membuka sidang guna mendengar keterangan dari tersangka sebagai pemohon praperadilan maupun dari pejabat yang

---

[1231] Pasal 87 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1232] Pasal 99 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1233] Pasal 99 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

berwenang, guna memeriksa dan memutus tentang:

(a) sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;

(b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;

(c) materi gugatan rehabilitasinya;

(d) akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan

(e) ada benda yang disita yang tidak termasuk sebagai alat bukti;

(3) pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan acara cepat dan diputus dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak sidang pertama;

(4) selama pemeriksaan perkara praperadilan belum diputuskan maka pemeriksaan terhadap perkara jinayat tidak dapat dilaksanakan; dan

(5) selain memuat dasar hukum, jika praperadilan dikabulkan maka putusan praperadilan juga memuat tentang:

(a) rehabilitasi tersangka dengan "memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya"; dan

(b) dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

c) Rehabilitasi yang berkaitan dengan materi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di

Provinsi Aceh (APBK).[1234]

d) Ganti kerugian yang berakibat tersangka ditahan, dapat dikompensasikan setara dengan uang senilai 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni untuk setiap 1 (satu) hari penahanan.[1235]

e) Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PW-XIII/2015 *jo.* Pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana).

6) Upaya hukum terhadap putusan praperadilan[1236]

a) Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding.

b) Putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

c) Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

w. Kewajiban Hakim, Panitera Sidang, dan Penuntut Umum untuk Mengundurkan Diri[1237]

1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan ketua majelis, hakim anggota, penuntut umum atau panitera sidang.

2) Ketua majelis, hakim anggota, penuntut umum atau panitera sidang wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan

---

[1234] Pasal 100 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1235] Pasal 89 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1236] Pasal 88 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1237] Pasal 153 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

penasihat hukum.

3) Seorang hakim dan/atau JPU wajib mengundurkan diri, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

4) Jika hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas terpenuhi dan tidak mengundurkan diri atau tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus maka perkara ini harus diadili ulang dengan susunan majelis hakim yang lain.

x. Putusan

1) Sistematika Putusan *'uqubat* Jinayat

a) Kalimat Putusan.

b) Nomor Putusan.

c) Kalimat Bismillahirrahmanirrahim (tulisan Arab).

d) Kepala Putusan/Irah-irah:
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

e) Identitas Terdakwa, yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, dan seterusnya.[1238]

f) Tahapan penahanan, jika ditahan.

g) Surat dakwaan.

h) Tuntutan *'uqubat*.

i) Pembelaan.

j) Fakta hukum.

k) Pertimbangan hukum.

l) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan.

m) Terpenuhinya unsur-unsur Jarimah.

n) Pernyataan kesalahan Terdakwa.

o) Alasan yang memberatkan atau yang meringankan hukuman.

p) Kualifikasi dan pemidanaan.

q) Penetapan pengurangan masa tahanan.

[1238] Pasal 200 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

r) Status tahanan Terdakwa (termasuk perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan).[1239]

s) Penentuan status barang bukti.

t) Biaya perkara.

u) Hari dan tanggal musyawarah serta pengucapan putusan.

v) Nama Majelis Hakim/Hakim, Penuntut Umum, Panitera Sidang, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

2) Perkara jinayat biasa yang Terdakwanya tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, sidang dapat dilanjutkan secara *in absentia* (pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa), dan putusan dapat dijatuhkan.

3) Ketua majelis memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.[1240]

4) Jika dalam suatu perkara lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.

5) Dalam hal terdakwa dihukum dengan '*uqubat* penjara yang lamanya sama dengan masa penahanan yang dijalaninya maka dalam putusan harus disebutkan "Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan".

y. Biaya Perkara

1) Putusan pemidanaan atau penjatuhan '*uqubat* harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya.

2) Dalam pedoman tambahan KUHAP ditentukan biaya perkara minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa biaya perkara maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu

---

[1239] Pasal 200 huruf (l) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1240] Pasal 150 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

rupiah) itu adalah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat banding.

2. Pengadilan Anak pada Mahkamah Syar'iyah
   a. Dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, mahkamah syar'iyah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[1241]
   b. Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak, baik sebagai anak berkonflik dengan hukum, sebagai korban atau sebagai saksi, batas umur anak berkonflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.[1242]
   c. Dalam sistem peradilan anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversi.[1243]
   d. Dalam sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.[1244]
   e. Pemeriksaan perkara:
      1) dalam hal anak melakukan *jarimah* sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang mahkamah syar'iyah setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak;[1245]
      2) hakim yang mengadili perkara anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan melalui Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;

[1241] Pasal 66 dan Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *jo.* Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.
[1242] Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
[1243] Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
[1244] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
[1245] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

3) dalam hal belum ada hakim bersertifikat pidana anak maka ketua mahkamah syar'iyah dapat menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa;[1246]
4) persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan hakim tunggal dan dapat dilakukan dengan hakim majelis dalam hal apabila ancaman '*uqubat* atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukuman *ta'zir* lain yang setara dan sulit pembuktiannya;[1247]
5) dalam hal anak melakukan *jarimah* bersama-sama dengan orang dewasa maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa;[1248] dan
6) acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut:
   a) persidangan dilakukan secara tertutup;[1249]
   b) hakim, JPU dan penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan toga;[1250]
   c) penyidik, JPU, hakim, wajib melaksanakan diversi apabila diancam dengan '*uqubat* di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan *jarimah*;[1251]
   d) hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ketua mahkamah syar'iyah menetapkan hakim pemeriksa;
   e) diversi sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
   f) sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai

---

[1246] Rumusan Kamar Agama angka (6) SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
[1247] Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
[1248] Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
[1249] Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
[1250] Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
[1251] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

anak yang bersangkutan;[1252]

g) selama dalam persidangan, anak wajib didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan;

h) persidangan terhadap anak dilaksanakan di dalam ruang sidang khusus anak;

i) pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang, namun orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir;

j) dalam persidangan, anak pelaku, dan anak korban dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atau pekerja sosial atas izin hakim/majelis hakim; dan

k) putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

f. Penahanan[1253]

1) Hakim mahkamah syar'iyah dan Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

2) Dalam pemeriksaan kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

3) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

4) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

[1252] Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
[1253] Pasal 35 sampai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

g. Putusan[1254]

1) Sebelum mengucapkan putusan, majelis hakim/hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak.
2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan.
3) Terhadap anak dapat dijatuhi *'uqubat* dalam bentuk tindakan, *hudud* atau *ta'zir*.

h. Macam-macam *'Uqubat*[1255]

1) *'Uqubat* yang dijatukan terdiri dari *'uqubat hudud* dan *ta'zir* pokok dan *'uqubat* tambahan.
2) *'Uqubat hudud* berbentuk cambuk.
3) *'Uqubat ta'zir* terdiri dari:
   a) *'uqubat ta'zir* utama, terdiri dari: cambuk, denda, penjara, restitusi, pengembalian kepada orang tua/wali, dan ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Aceh, atau pemerintah kabupaten/kota; dan
   b) *'uqubat ta'zir* tambahan terdiri dari: pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.
4) *'Uqubat ta'zir* tambahan dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih oleh hakim, atas pertimbangan tertentu dalam hal penjatuhan *'uqubat ta'zir* utama saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
5) Denda pada *'uqubat ta'zir* utama, wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
6) Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum berupa:[1256]
   a) mengembalikan kepada orang tua/wali;
   b) penyerahan kepada pemerintah;
   c) penyerahan kepada seseorang;

[1254] Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
[1255] Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
[1256] Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

d) perawatan di rumah sakit jiwa atau perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);

e) kewajiban mengikuti pendidikan formal/latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta; dan

f) perbaikan akibat *jarimah*.

7) Terhadap anak sedapat mungkin tidak dijatuhi *'uqubat* penjara.[1257]

8) *'Uqubat* penjara dan cambuk yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama atau paling banyak 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman *'uqubat* bagi orang dewasa. Ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman *'uqubat* bagi anak.[1258]

9) '*Uqubat* denda tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, apabila pasal yang dilanggar menyebutkan sanksi denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari dengan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari[1259], serta yang tidak mengganggu waktu sekolah anak dan tidak dilakukan pada malam hari.

10) Apabila anak yang melakukan *jarimah* belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana tersebut di atas, dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

3. Mahkamah Syar'iyah Aceh

a. Perkara banding yang telah diregister diserahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk ditetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

b. Dilarang bagi hakim atau panitera yang menangani perkara jinayat mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, baik karena sedarah, semenda sampai derjat ketiga, hubungan suami/istri meskipun telah bercerai.[1260]

[1257] Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

[1258] Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

[1259] Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

[1260] Pasal 153 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

c. Dilarang juga dalam memeriksa perkara yang sama, antara hakim atau panitera tingkat pertama yang mempunyai hubungan karena sedarah, semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan hakim atau panitera tingkat banding.[1261]

d. Dilarang juga bagi hakim yang menangani perkara tersebut merupakan hakim yang sebelumnya memeriksa pada tingkat pertama.

e. Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang hakim dibantu dengan 1 (satu) orang panitera sidang.[1262]

f. Dalam hal berkas perkara telah diterima oleh ketua majelis maka masing-masing hakim mempelajari dan memeriksa berkas tersebut.

g. Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, majelis hakim memerintahkan melalui putusan sela secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada mahkamah syar'iyah pengaju.

h. Putusan sela tersebut disampaikan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh kepada mahkamah syar'iyah pengaju.

i. Hasil pemeriksaan tambahan dituangkan ke dalam berita acara yang diunggah ke dalam SIP untuk dikirimkan kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

j. Dokumen hasil pemeriksaan tambahan merupakan bagian dari berkas bundel A.

k. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g, huruf h, dan huruf i juga berlaku terhadap putusan mahkamah syar'iyah yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan batal.

l. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf k, status penahanan mengikuti kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

m. Jika dipandang perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat

[1261] Pasal 153 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1262] Pasal 230 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.[1263]

n. Panitera/panitera sidang membantu hakim dalam pemeriksaan tambahan tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang.

o. Panitera/panitera sidang wajib menyusun catatan sidang, yang disampaikan kepada ketua majelis dan hakim anggota, guna kepentingan musyawarah dan penyusunan putusan oleh majelis hakim.

p. Jika dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa yang dijatuhi '*uqubat* itu ditahan maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya harus memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

q. Putusan yang telah dimusyawarahkan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.[1264]

r. Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada mahkamah syar'iyah yang memutuskan pada tingkat pertama.[1265]

III. Ketentuan Penutup

A. Dalam rangka menjamin keamanan, akuntabilitas, dan integritas akses penggunaan SIP, setiap pemilik akun SIP bertanggung jawab atas akunnya masing-masing.

[1263] Pasal 230 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1264] Pasal 198 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.
[1265] Pasal 235 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

B. Dalam hal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung telah menyediakan data perkara dan/atau salinan putusan yang menjadi kewajiban pengadilan untuk disampaikan kepada instansi terkait dan data tersebut dapat diakses oleh instansi tersebut maka pengadilan tidak perlu lagi mengirimkan data dan dokumen dimaksud.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERADILAN MILITER

I. Teknis Administrasi

A. Pengadilan Militer

1. Penerimaan berkas perkara

a. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Pidana Secara Elektronik

1) Panitera muda pidana menerima berkas perkara pidana secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu.

2) Panitera muda pidana melakukan verifikasi kelengkapan berkas perkara elektronik sesuai dengan daftar periksa (*checklist*).

3) Terhadap berkas perkara yang tidak lengkap, panitera muda pidana memberikan notifikasi berkas perkara yang tidak lengkap dengan menyebut jenis dokumen yang harus dilengkapi oleh oditur militer/tim tetap koneksitas, dan apabila sudah lengkap untuk dilimpahkan kembali.

4) Pendaftaran perkara agar mempedomani aturan tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.[1]

b. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Secara Manual.

1) Petugas PTSP (dalam hal ini petugas kepaniteraan), menerima berkas perkara, kemudian memeriksa kelengkapan berkas. Apabila berkas perkara belum lengkap sesuai dengan *checklist* kelengkapan berkas perkara tersebut dikembalikan kepada petugas pengantar (Caraka) dari oditurat militer.

---

[1] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

2) Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, petugas PTSP (dalam hal ini petugas kepaniteraan), kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke petugas kesekretariatan untuk diagendakan di buku agenda (manual) dan aplikasi e-Simpan terintegrasi. Setelah diagendakan, petugas kesekretariatan menyerahkan berkas perkara ke panitera, selanjutnya panitera melakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara (formil).

3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, panitera menyerahkan ke kepala pengadilan militer dan memerintahkan panitera muda pidana untuk meregister ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan memasukkan ke dalam Register manual/e-Register.

4) Pencatatan perkara pidana dalam e-Register dilaksanakan dengan mencantumkan nomor perkara, huruf K untuk kejahatan, singkatan nama pengadilan, singkatan matra dari terdakwa/para terdakwa, bulan pencatatan dengan angka romawi dan tahun dengan angka arab yang sesuai dengan urutan.

Contoh:

nomor Register Perkara	:	nomor 10-K/PM.I-01/AD/I/2025.
10	:	nomor urut register.
K	:	kode jenis tindak pidana yaitu K (Kejahatan).
PM.I-01	:	nama Pengadilan Militer (dengan tanda baca titik), dalam contoh ini adalah Pengadilan Militer I-01. Banda Aceh.
AD	:	menunjukkan terdakwa personel TNI AD.
AL	:	menunjukkan terdakwa personel TNI AL.
AU	:	menunjukkan terdakwa personel TNI AU.

I	:	bulan Januari (angka romawi)
2025	:	tahun

5) Pencatatan nomor perkara koneksitas, permohonan kompensasi atau restitusi, keberatan pihak ke tiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dimasukkan dalam kode Sus dalam e-Register dilaksanakan dengan mencantumkan nomor perkara, Sus untuk perkara khusus, singkatan nama pengadilan, bulan pencatatan dengan angka romawi dan tahun dengan angka arab yang sesuai dengan urutan.

Contoh :

nomor Register Perkara	:	n nomor 1-Sus/PM.I-01/I/2026.
1	:	nomor urut register.
Sus	:	kode perkara koneksitas.
PM.I-01	:	nama Pengadilan Militer (dengan tanda baca titik), dalam contoh ini adalah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
I	:	bulan Januari (angka romawi).
2025	:	tahun.

6) Pencatatan perkara pelanggaran lalu lintas melalui e-Register yang dilaksanakan dengan mencantumkan nomor perkara, huruf P untuk pelanggaran, singkatan nama pengadilan, singkatan matra dari terdakwa, bulan pencatatan dengan angka romawi dan tahun dengan angka arab, yang sesuai dengan urutan.

Contoh:

nomor 10-P/PM.I-01/AD/I/2025

7) Dalam hal kepala pengadilan militer berpendapat bahwa pengadilan militer yang dipimpinnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena terdakwa/para terdakwa telah berubah kepangkatannya dari Pama menjadi Pamen atau tempat kejadian perkara tidak berada dalam daerah hukumnya atau pindah satuan dan atas permintaan komandan satuan, kepala pengadilan militer segera mengembalikan berkas

perkara kepada oditur militer semula dengan penetapan agar perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang berwenang melalui oditur militer yang berwenang.

8) Dalam hal kepala pengadilan militer berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpinnya berwenang mengadili, maka kepala pengadilan militer mengeluarkan penetapan hakim (Tapkim) melalui SIPP terhadap perkara tersebut.

9) Panitera muda pidana sebagai pengunggah data kegiatan yang berkenaan dengan proses penyelesaian perkara serta pelaksanaan putusan ke SIPP dan memasukkan dalam e-Register.

10) Perkara kejahatan, perkara koneksitas dan perkara pelanggaran lalu lintas yang sudah diputus dimasukkan dalam e-Register.

a. Pencatatan dan Penelitian Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding

1) Permohonan banding diajukan kepada pengadilan militer tinggi oleh terdakwa/para terdakwa dan/atau oleh oditur militer melalui pengadilan militer yang memutus pada tingkat pertama, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, untuk itu panitera/panitera pengganti wajib membuat akta pemohonan banding.

2) Dalam hal Oditur Militer mengajukan permohonan banding wajib menyertakan memori banding dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari, apabila lewat waktu maka permohonan banding Oditur Militer dinyatakan gugur, sedangkan terdakwa yang menyatakan banding dapat menyertakan memori banding.

3) Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilakukan upaya hukum banding.

4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirimkan kepada pengadilan tingkat banding, panitera wajib memberikan kesempatan kepada terdakwa/para terdakwa atau

kuasa hukumnya maupun oditur untuk mempelajari keaslian berkas perkara di pengadilan militer yang menerima permohonan banding.

5) Dalam keadaan khusus terdakwa/para terdakwa dapat memohon upaya hukum banding melalui media elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) keadaan khusus (seperti lokasi satuan yang jauh, keadaan geografis yang sulit dijangkau, pandemi/wabah dan bencana alam). Dengan ketentuan batas waktu 14 (empat belas) hari harus menandatangani akta permohonan banding secara elektronik, apabila terdapat kendala dapat dilakukan secara manual;
   b) pemohon banding mengajukan memori banding yang memuat alasan permohonan bandingnya kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mengajukan permohonan banding, untuk itu ia memberikan akta penerimaan memori banding;
   c) apabila berkas perkara telah dikirim ke pengadilan tingkat banding, pengajuan memori banding melalui pengadilan tingkat pertama berkas perkara tersebut dikirim ke pengadilan tingkat banding atau melalui panitera tingkat pertama;
   d) setelah 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berkas perkara wajib dikirimkan ke pengadilan tingkat banding dengan tanpa memori banding atau kontra memori banding;
   e) apabila memori banding dikirim langsung ke pengadilan tingkat banding tanpa melalui pengadilan tingkat pertama atau pengadilan pengaju maka pengadilan tingkat banding mengembalikan memori banding tersebut kepada pemohon agar diajukan melalui pengadilan tingkat pertama sebelum perkaranya diperiksa;
   f) apabila terdakwa bertempat tinggal atau kesatuan terdakwa di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama lain, maka panitera pengadilan tingkat

pertama yang memutus perkara meminta bantuan kepada panitera pengadilan setempat untuk menandatangani akta permohonan banding dan mengirimkannya ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara;

g) apabila hari terakhir batas waktu permohonan upaya hukum banding bertepatan pada hari libur (baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat), maka batas akhir waktu adalah hari kerja berikutnya.

6) Ketentuan yang sama (poin 4 diatas) berlaku juga apabila terdakwa sebagai termohon upaya hukum banding.

7) Setelah terdakwa dan/atau oditur militer mengajukan permohonan banding ke pengadilan militer tinggi, maka sejak saat itu kewenangan penahanan beralih ke pengadilan militer tinggi. Dalam hal terdakwa berada dalam tahanan untuk itu panitera wajib membuat laporan banding (mendahului pengiriman berkas bundel A dan B secara elektronik atau manual) yang memuat fakta hukum, dikirim melalui SIPP untuk menentukan status penahanan/pembebasan terdakwa.

8) Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Dalam hal perkara desersi yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diumumkan pada papan pengumuman pengadilan dan/atau *website* pengadilan bersangkutan.

9) Terhadap permohonan banding diajukan setelah lewat waktu dan terhadap putusan yang tidak dapat diajukan banding, maka panitera/panitera pengganti membuat akta penolakan permohonan banding dan akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akta-akta tersebut diinput melalui e-Register dan berkas perkara

tersebut tidak perlu dikirim ke pengadilan tingkat banding.

10) Panitera/panitera pengganti wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, untuk itu panitera/panitera pengganti membuat akta pemberitahuan permohonan banding.
11) Tanggal penerimaan memori banding dan kontra memori banding oleh panitera/panitera pengganti harus dicatat dengan membuat akta penerimaan memori banding dan akta penerimaan kontra memori banding.
12) Terhadap memori banding dan kontra memori banding, panitera/panitera pengganti harus menyampaikan salinannya kepada pemohon dan termohon dengan membuat akta pemberitahuan memori banding dan akta pemberitahuan kontra memori banding.
13) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirimkan kepada pengadilan tingkat banding, panitera wajib memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun oditur militer untuk mempelajari kelengkapan berkas perkara di kepaniteraan pengadilan militer yang menerima permohonan banding, pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dilakukan dengan surat panggilan pemberitahuan kepada terdakwa dan oditur militer dengan tembusan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) terdakwa. Selama mempelajari berkas perkara wajib didampingi petugas kepaniteraan.
14) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut pemohon banding tidak menggunakan kesempatan untuk menyerahkan memori banding, maka berkas perkara tetap dikirimkan kepada pengadilan tingkat banding.
15) Setelah terdakwa maupun oditur militer mempelajari berkas perkara, maka panitera/panitera pengganti membuat akta telah mempelajari berkas perkara dan apabila terdakwa atau oditur militer tidak hadir mempelajari berkas perkara, perlu ditambahkan akta tidak mempelajari berkas perkara yang ditandatangani panitera.

16) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik/manual ke pengadilan tingkat banding.
17) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tingkat banding, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.
18) Atas pencabutan tersebut panitera/panitera pengganti membuat akta pencabutan permohonan banding yang ditandatangani oleh panitera/panitera pengganti dan pihak pemohon serta dilaporkan kepada kepala pengadilan militer. Akta tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding secara elektronik/manual.
19) Panitera wajib memberitahukan pencabutan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Untuk itu panitera membuat akta pemberitahuan pencabutan permohonan banding, terhadap pencabutan permohonan banding, panitera pengadilan tingkat pertama membuat akta berkekuatan hukum tetap (BHT) setelah habis waktu.
20) Pengadilan tingkat pertama setelah menerima petikan putusan atau salinan putusan pengadilan tingkat banding, panitera segera membuat surat panggilan untuk memberitahukan isi petikan putusan atau salinan putusan kepada oditur militer dan terdakwa. Setelah isi putusan diberitahukan, panitera membuat akta pemberitahuan isi putusan banding.
21) Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan tingkat pertama lain, panitera meminta bantuan kepada panitera pengadilan tingkat pertama tersebut untuk memberitahukan isi putusan banding kepada terdakwa dan untuk itu panitera yang melaksanakan pemberitahuan putusan harus membuat akta pemberitahuan isi putusan banding, ditandatangani oleh panitera pengadilan pengaju.
22) Apabila terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau sudah tidak berstatus militer atau bertempat

tinggal di luar negeri, panitera memberitahukan putusan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat terdakwa biasa bertempat tinggal.

23) Setelah upaya di atas belum berhasil, panitera memanggil dan memberitahukan putusan melalui 2 (dua) surat kabar yang terbit di daerah hukum pengadilan tingkat pertama atau daerah hukum yang berdekatan, media sosial atau diumumkan pada papan pengumuman pengadilan kemudian panitera membuat berita acara penempelan pengumuman putusan pengadilan dan dilekatkan dalam berkas perkara, selanjutnya diunggah di *website* pengadilan.

24) Apabila upaya pengumuman pertama belum berhasil, panitera memanggil dan memberitahukan putusan untuk kedua kali melalui 2 (dua) surat kabar, setelah 14 (empat belas) hari dari pengumuman yang pertama dan pengumuman tersebut ditempel di papan pengumuman pengadilan, panitera membuat berita acara penempelan pengumuman putusan pengadilan dan dilekatkan dalam berkas perkara, selanjutnya diunggah di *website* pengadilan dan panitera/panitera pengganti membuat akta berkekuatan hukum tetap (BHT).

25) Panitera/panitera pengganti memberikan petikan putusan pengadilan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan oditur militer segera setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

26) Salinan putusan diberikan kepada terdakwa, perwira penyerah perkara (Papera), oditur militer, polisi militer dan Ankum, sedangkan kepada penasihat hukum diberikan atas permintaan. Ketua majelis sebagai pengunggah putusan melalui SIPP dengan mempedomani peraturan yang berlaku.

27) Terhadap putusan banding yang tidak diajukan permohonan kasasi, panitera/panitera pengganti pengadilan tingkat pertama membuat akta berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dikirimkan kepada pengadilan tingkat banding untuk kepentingan tingkat persentase

akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding.

28) Panitera muda pidana sebagai pengunggah data kegiatan yang berkenaan dengan proses penyelesaian perkara banding serta pelaksanaan putusan melalui SIPP dan memasukkan dalam e-Register.

29) Apabila penahanan terdakwa sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan, maka terdakwa dibebaskan demi hukum dengan penetapan kepala pengadilan militer.

b. Pencatatan dan Penelitian Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi

1) Permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa dan/atau oleh oditur militer kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama atau tingkat pertama dan terakhir. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi itu diberitahukan/dibacakan.

2) Dalam keadaan khusus terdakwa dapat menyatakan upaya hukum kasasi melalui media elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :

a) keadaan khusus (seperti lokasi satuan yang jauh serta keadaan geografis yang sulit dijangkau, pandemi/wabah, bencana alam). Dengan ketentuan batas waktu 14 (empat belas) hari harus menandatangani akta permohonan kasasi apabila terdapat kendala dapat dilakukan secara manual;

b) pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera, kemudian panitera memberikan surat tanda terima;

c) apabila terdakwa bertempat tinggal atau kesatuan terdakwa di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama lain, maka panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara meminta bantuan kepada panitera pengadilan tersebut untuk

menandatangani akta permohonan kasasi dan menerima memori kasasi untuk selanjutnya mengirimkannya ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara;

d) apabila hari terakhir batas waktu pernyataan upaya hukum kasasi bertepatan pada hari libur, maka batas akhir waktu adalah hari kerja berikutnya.

3) Panitera setelah menerima permohonan kasasi perkara pidana wajib membuat akta permohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera/panitera pengganti dan pemohon kasasi. Akta tersebut diteruskan ke panitera muda pidana militer untuk diproses dan selanjutnya dimasukkan dalam e-Register.

4) Panitera wajib memberitahukan adanya permohonan kasasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.

5) Dalam hal terdakwa berada dalam tahanan, Setelah terdakwa dan/atau oditur militer mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, maka sejak saat itu kewenangan penahanan beralih ke Mahkamah Agung. Panitera wajib membuat laporan kasasi (mendahului pengiriman berkas bundel A dan B) yang memuat identitas terdakwa, riwayat penahanan, tempat penahanan, dakwaan, fakta hukum, putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, pemberitahuan isi putusan banding dan akta permohonan kasasi dikirim melalui SIPP kepada Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung untuk ditentukan status penahanan terdakwa.

6) Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan banding diberitahukan kepada terdakwa dan oditur militer tidak mengajukan permohonan kasasi, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan banding dan panitera wajib membuat akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).

7) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dan diserahkan kepada panitera/panitera pengganti yang bersangkutan dalam

waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya sesudah mengajukan permohonan kasasi. panitera/panitera pengganti wajib membuat akta penerimaan memori kasasi yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon.

8) Terhadap pemohon yang terlambat mengajukan memori kasasi, panitera/panitera pengganti membuat akta terlambat menyerahkan memori kasasi. Akta-akta tersebut dimasukkan ke dalam e-Register.

9) Apabila pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera/panitera pengganti wajib menanyakan apakah alasan pemohon mengajukan kasasi dan untuk itu panitera menuangkan alasan-alasan pemohon dalam penyusunan memori kasasinya.

10) Terhadap memori kasasi yang diserahkan oleh pemohon setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan, panitera/panitera pengganti harus membuat akta terlambat menyerahkan memori kasasi dan dilekatkan dalam berkas perkara.

11) Panitera/panitera pengganti wajib menyampaikan salinan memori kasasi yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukum kepada oditur militer. Oditur militer berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya salinan memori kasasi.

12) Panitera/panitera pengganti wajib menyampaikan salinan memori kasasi yang diajukan oleh oditur militer kepada terdakwa dan/atau penasihat hukum. Terdakwa dan/atau penasihat hukum berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya salinan memori kasasi.

13) Panitera/panitera pengganti wajib membuat akta penerimaan kontra memori kasasi yang ditandatangani oleh panitera dan yang mengajukan kontra memori kasasi.

14) Perkara yang diancam dengan pidana penjara maksimal paling lama 1 (satu) tahun dan diputus dengan pidana

tambahan pemecatan dari dinas militer dapat diajukan permohonan kasasi.

15) Setelah pengadilan tingkat pertama menerima permohonan kasasi dan memori kasasi, panitera pengadilan yang bersangkutan wajib segera mengirimkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu penyerahan memori kasasi. Surat pengantar dari pengadilan tersebut ditembuskan kepada Dirjen Badilmiltun, Kepala Pengadilan Militer Utama dan kepala pengadilan militer tinggi pengaju.

16) Salah satu pihak dapat menyerahkan tambahan memori kasasi atau tambahan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah pengajuan permohonan kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan wajib membuat akta penerimaan tambahan memori kasasi atau akta penerimaan tambahan kontra memori kasasi, selanjutnya mengirimkan secara tersendiri kepada Ketua Mahkamah Agung. Setelah syarat berkas kasasi lengkap, panitera mengirimkan berkas kasasi ke Mahkamah Agung secara elektronik (melalui SIPP) dan sebagai bukti penerimaan berkas kasasi secara elektronik dari Mahkamah Agung (melalui notifikasi SIPP).

17) Apabila memori kasasi atau tambahan memori kasasi dikirim langsung ke pengadilan tingkat kasasi tanpa melalui pengadilan tingkat pertama atau pengadilan pengaju maka pengadilan tingkat kasasi mengembalikan memori kasasi atau tambahan memori kasasi tersebut kepada pemohon agar diajukan melalui pengadilan tingkat pertama sebelum perkaranya diperiksa.

18) Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan kasasi lagi. Apabila pencabutan permohonan kasasi dilakukan sebelum berkas perkara

dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

19) Atas pencabutan tersebut panitera/panitera pengganti membuat akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera/panitera pengganti dan pemohon kasasi. Akta tersebut dikirimkan melalui media elektronik pada hari yang sama pada saat pemohon kasasi melakukan pencabutan ke Mahkamah Agung dengan tembusan kepada pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap putusan bebas dari pengadilan tingkat pertama tidak perlu tembusan ke pengadilan tingkat banding.

20) Pencabutan permohonan kasasi harus diberitahukan kepada pihak lainnya, untuk itu panitera/panitera pengganti membuat akta pemberitahuan pencabutan permohonan kasasi.

21) Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, maka petikan putusan dan salinan putusan kasasi dikirimkan melalui SIPP pengadilan tingkat pertama dan SIPP tingkat banding. Berdasarkan petikan putusan kasasi dan/atau salinan putusan kasasi tersebut, panitera/panitera pengganti pengadilan militer membuat surat panggilan untuk memberitahukan isi putusan dan setelah isi putusan tersebut diberitahukan, panitera/panitera pengganti membuat akta berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada oditur militer dan terdakwa.

22) Dalam hal terdakwa berstatus militer atau sudah tidak berstatus militer dan tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, panitera/panitera pengganti memberitahukan putusan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat terdakwa biasa bertempat tinggal.

23) Dalam hal upaya di atas belum berhasil, panitera/panitera pengganti memanggil dan memberitahukan putusan melalui 2 (dua) surat kabar yang terbit di daerah hukum pengadilan tingkat pertama atau daerah hukum yang berdekatan dan

pengumuman tersebut ditempel di papan pengumuman pengadilan panitera/panitera pengganti membuat berita acara penempelan pengumuman putusan dan dilekatkan dalam berkas perkara, selanjutnya diunggah di w*ebsite* pengadilan.

24) Setelah 14 (empat belas) hari dari pengumuman yang pertama belum berhasil, panitera/panitera pengganti memanggil dan memberitahukan putusan untuk kedua kali melalui 2 (dua) buah surat kabar/*website*/media *online* setelah 14 (empat belas) hari dari pengumuman yang kedua belum berhasil, pada 1 (satu) hari berikutnya panitera/panitera pengganti menempel pengumuman BHT di papan pengumuman pengadilan. Apabila pada 1 (satu) hari berikutnya jatuh pada hari libur (baik yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat), maka pengumumannya dilakukan pada hari pertama masuk kerja.

25) Salinan putusan kasasi diberikan kepada terdakwa, perwira penyerah perkara, oditur militer, polisi militer dan Ankum, sedangkan penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

26) Panitera muda pidana sebagai pengguna mengunggah data kegiatan yang berkenaan dengan proses penyelesaian perkara dan pelaksanaan putusan melalui SIPP serta memasukkan dalam e-Register.

27) Segala bentuk pengiriman administrasi upaya hukum kasasi harus melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

28) Apabila penahanan terdakwa sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan, maka terdakwa dibebaskan demi hukum dengan penetapan kepala pengadilan militer/kepala pengadilan militer tinggi.

c. Pencatatan dan Penelitian Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari

pengadilan dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Oditur Jenderal TNI (Orjen TNI).

2) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum diajukan secara tertulis oleh Orjen TNI kepada Mahkamah Agung melalui panitera/panitera pengganti pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat pertama dan terakhir, disertai risalah yang memuat alasan permohonan. Panitera/panitera pengganti membuat akta penerimaan risalah kasasi demi kepentingan hukum.

3) Salinan risalah sebagaimana dimaksud di atas oleh panitera/panitera pengganti segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk diketahui.

4) Kepala pengadilan segera meneruskan permohonan dimaksud kepada Mahkamah Agung.

5) Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, maka berdasarkan salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum, panitera/panitera pengganti membuat surat panggilan untuk memberitahukan isi putusan kepada Orjen TNI dan pihak yang berkepentingan, selanjutnya setelah isi putusan diberitahukan, panitera/panitera pengganti membuat akta pemberitahuan isi putusan kasasi demi kepentingan hukum.

6) Dalam hal pihak yang berkepentingan bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan tingkat pertama lain, panitera/panitera pengganti meminta bantuan kepada panitera/panitera pengganti pengadilan tersebut untuk memberitahukan isi putusan kasasi demi kepentingan hukum kepada pihak yang berkepentingan dan untuk itu panitera/panitera pengganti yang melaksanakan pemberitahuan putusan harus membuat akta pemberitahuan isi putusan kasasi demi kepentingan hukum.

d. Pencatatan, Penelitian Serta Proses Penyelesaian Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

2) Permohonan peninjauan kembali hanya diajukan oleh pihak terpidana atau ahli warisnya.
3) Dalam hal terpidana telah meninggal dunia permohonan diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.
4) Permohonan oleh terpidana atau istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung dikuasakan kepada penasihat hukum/advokat yang dikuasakan khusus untuk itu.
5) Permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
   a) jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan oditur militer tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
   b) salah seorang atau lebih hakim yang menjatuhkan pemidanaan tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana hakim tersebut duduk sebagai salah seorang hakimnya dengan maksud mempengaruhi agar terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat dari yang seharusnya; dan/atau
   c) putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
6) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu

sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan oditur militer tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

7) Permohonan peninjauan kembali oleh pemohon terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, selanjutnya diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan alasannya.

8) Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu pengajuannya jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan oditur militer tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dan putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

9) Permohonan peninjauan kembali salah seorang atau lebih hakim yang menjatuhkan pemidanaan tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana hakim tersebut duduk sebagai salah seorang hakimnya dengan maksud mempengaruhi agar terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat dari yang seharusnya diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (BHT).

10) Kepala pengadilan militer segera mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan alasan peninjauan

kembali.

11) Terhadap putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oditur militer dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.

12) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa keadaan atau bukti baru tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan oditur militer tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan atau terdapat pertentangan antara 2 (dua) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

13) Panitera pada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama atau tingkat pertama dan terakhir, setelah menerima permohonan peninjauan kembali wajib membuat akta permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon. Akta tersebut diteruskan ke panitera muda pidana untuk dicatat dalam e-Register, selanjutnya dilekatkan pada berkas perkara. Pemohon wajib menyerahkan memori peninjauan kembali pada saat pengajuan permohonan peninjauan kembali.

14) Apabila pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera/panitera pengganti wajib menanyakan apakah alasan pemohon mengajukan peninjauan kembali, selanjutnya panitera/panitera pengganti menuangkan alasan-alasan tersebut dalam surat permohonan peninjauan kembali.

15) Setelah menerima berkas permohonan peninjauan kembali, panitera segera menyerahkan kepada panitera muda pidana untuk diteliti dan diinput oleh admin e-

Register, kemudian panitera muda pidana mengembalikan berkas perkara permohonan peninjauan kembali kepada panitera, kemudian diteruskan kepada kepala pengadilan, selanjutnya:

a) Kepala pengadilan menetapkan majelis hakim (Tapkim) yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali.
b) Ketua majelis menetapkan hari sidang (Tapsid).
c) Panitera menunjuk panitera pengganti.

16) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada terpidana dan oditur militer.
17) Panitera memanggil terpidana dan oditur militer untuk hadir dalam sidang guna menyampaikan pendapatnya.
18) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim/majelis hakim, oditur militer, panitera pengganti dan terpidana.
19) Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim/ketua majelis dan panitera pengganti.
20) Dalam hal suatu perkara dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan banding, maka tembusan surat pengantarnya harus dilampirkan salinan berita acara pemeriksaan dan salinan berita acara pendapat, selanjutnya disampaikan kepada pengadilan tingkat banding yang bersangkutan.
21) Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan kecuali pidana mati.
22) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali ada alasan suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.[2]

---

[2] SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana dan SEMA

23) Terhadap permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi syarat formil, permohonan peninjauan kembali ditolak dan kepala pengadilan mengeluarkan penetapan dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
24) Dalam pemeriksaan persidangan peninjauan kembali dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan pengadilan di tingkat pertama.
25) Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah pengadilan yang telah memutus dalam tingkat Pertama:
    a) diajukan kepada pengadilan militer yang memutus dalam tingkat pertama;
    b) hakim dari pengadilan militer yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan (delegasi) pemeriksaan kepada pengadilan militer tempat pemohon peninjauan kembali berada;
    c) berita acara pemeriksaan dikirim ke pengadilan militer yang meminta bantuan pemeriksaan;
    d) berita acara pendapat dibuat oleh pengadilan militer yang telah memutus pada tingkat pertama[3].
26) Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana yang berada di lemasmil/lapas tanpa kuasa hukum dilakukan menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).[4]
27) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan persidangan selesai, panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada terpidana dan oditur militer.
28) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2023.

[3] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

[4] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

kembali adalah putusan pengadilan tingkat banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat, kemudian disampaikan kepada pengadilan tingkat banding yang bersangkutan.

29) Surat keterangan (relaas) pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung secara elektronik.

30) Setelah pemeriksaan persidangan selesai, panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan oditur militer.

31) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan tingkat banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri salinan berita acara pemeriksaan dan salinan berita acara pendapat, kemudian dikirim dan disampaikan kepada pengadilan tingkat banding yang bersangkutan.

32) Panitera muda pidana sebagai pengguna mengunggah data kegiatan yang berkenaan dengan perkara peninjauan kembali dan pelaksanaan putusan melalui SIPP, kemudian diinput dalam e-Register.

e. Pencatatan dan Penelitian Berkas Perkara yang Dimohonkan Grasi

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi kepada Presiden secara tertulis oleh:
   a) terpidana dan/atau kuasa hukumnya;
   b) keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana;
   c) keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana, dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati.

2) Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah:
   a) pidana mati;
   b) pidana seumur hidup; dan
   c) pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.[5]

---

[5] Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor

3) Permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali.
4) Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
5) Permohonan grasi diajukan kepada Presiden dan salinannya disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
6) Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh terpidana yang sedang berada di lembaga pemasyarakatan, maka permohonan dan salinannya disampaikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kepada Presiden melalui kepala pengadilan militer yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
7) Panitera/panitera pengganti wajib membuat akta penerimaan salinan permohonan grasi dan akta permohonan grasi, selanjutnya berkas perkara beserta salinan permohonan grasi diteruskan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan, maka panitera membuat akta penolakan permohonan grasi yang diinput ke dalam e-Register, namun berkas tidak dilanjutkan.
8) Dalam jangka waktu paling lambat dua puluh (20) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan tersebut dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.[6]
9) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu. Berkas perkara disusun sebagai berikut:
    a) surat pengantar;
    b) daftar isi;
    c) akta berkekuatan hukum tetap (BHT);

---

22 Tahun 2002 tentang Grasi.
[6] Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

d) salinan permohonan grasi dan akta penerimaan salinan permohonan grasi;
e) surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada);
f) putusan kasasi;
g) putusan tingkat banding;
h) putusan pengadilan tingkat pertama;
i) berita acara sidang;
j) pembelaan, replik dan duplik (jika ada);
k) surat tuntutan;
l) eksepsi dan putusan sela (jika ada);
m) surat dakwaan;
n) penetapan hari sidang;
o) penetapan penunjukan panitera pengganti;
p) penetapan penunjukan hakim;
q) penetapan penahanan pengadilan tingkat pertama (jika ada);
r) keputusan penyerahan perkara dari Papera;
s) bapat oditur militer;
t) surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara; dan
u) berkas perkara dari Penyidik.

10) Salinan keputusan Presiden yang diterima oleh pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama atau tingkat pertama dan terakhir, dicatat oleh pemegang buku register dalam register induk perkara dan diberitahukan oleh panitera kepada terpidana dengan membuat akta pemberitahuan keputusan grasi, petugas meja I sebagai pengguna mengunggah data kegiatan yang berkenaan dengan permohonan grasi kembali serta pelaksanaan putusan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan menginput ke dalam e-Register.

2. Persiapan Persidangan

a. Acara Pemeriksaan Biasa

1) Berkas perkara yang sudah diregister, kepala pengadilan militer menetapkan majelis hakim melalui

SIPP dengan memprioritaskan perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan dan perkara korupsi.

2) Panitera menunjuk panitera pengganti yang akan bersidang dengan membuat penetapan penunjukan panitera pengganti.
3) Panitera segera menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda pidana untuk diteruskan kepada panitera pengganti, selanjutnya panitera pengganti meneruskannya kepada ketua majelis yang ditunjuk.
4) Majelis hakim segera mempelajari berkas perkara secara bergilir yang diatur oleh ketua majelis dan merencanakan hari sidang dengan memperhatikan tempat tinggal/domisili, kesatuan terdakwa dan para saksi, selanjutnya ketua majelis menetapkan hari sidang menginput melalui SIPP dengan memprioritaskan perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan.
5) Penetapan persidangan disampaikan kepada oditurat militer agar kepala oditur militer memanggil terdakwa dan para saksi untuk datang serta menghadapkan barang bukti ke sidang, dengan menyebutkan hari, tanggal, jam/waktu dan tempat sidang.
6) Dalam hal kepala pengadilan militer berpendapat bahwa pengadilan militer yang dipimpinnya tidak dapat memeriksa perkara desersi secara *in absentia* karena terdakwa diketemukan, maka pengadilan militer segera mengembalikan berkas perkara kepada oditurat militer semula dengan suatu penetapan dengan perintah agar berkas perkara dilengkapi dengan BAP Tersangka dan agar Tersangka ditahan. Jika Tapkim sudah diterbitkan, maka sidang pemeriksaan perkara dibuka, selanjutnya majelis hakim memutus bahwa penuntutan oditur militer tidak dapat diterima dengan perintah untuk melengkapi BAP tersangka dan terdakwa ditahan.
7) Dalam hal ternyata pengadilan militer menerima berkas perkara tersebut yang dilimpahkan kembali setelah disesuaikan dengan putusan dan/atau penetapan,

maka diregister sebagai perkara baru.

8) Apabila seorang hakim anggota berhalangan (sementara/tetap) untuk melaksanakan sidang, kepala pengadilan militer menunjuk hakim lain dengan penetapan.

9) Apabila ketua majelis berhalangan sidang, hakim anggota I tetap dalam posisi duduknya tanpa membuka sidang, selanjutnya menjelaskan kepada para pihak tentang alasan ketua majelis berhalangan, kemudian hakim anggota I menunda sidang tanpa ketukan palu, selanjutnya dibuat berita acara sidang yang ditandatangani oleh hakim anggota I dan panitera pengganti.

10) Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap:
    a) Penggantian ketua majelis diutamakan hakim anggota I;
    b) Apabila penggantian ketua majelis bukan hakim anggota I maupun hakim anggota II, maka proses acara pemeriksaan sidang dengan syarat risalah sidang yang terdahulu dibacakan di persidangan oleh panitera pengganti, kemudian ketua majelis melanjutkan sidang dengan acara pemeriksaan biasa dan memperhatikan asas efektivitas serta asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
    c) Apabila penggantian ketua majelis dan hakim anggota I maupun hakim anggota II (pergantian majelis hakim), maka proses acara pemeriksaan sidang dengan pemeriksaan sidang dimulai dari awal.

11) Atas permintaan oditur militer untuk mengubah surat dakwaan dengan maksud untuk disempurnakan, dapat dikabulkan apabila diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Panitera membuat berita acara perubahan surat dakwaan dengan tidak mengubah atau menambah pasal dakwaan.

12) Untuk kepentingan pemeriksaan, ketua majelis berwenang mengeluarkan penetapan penahanan untuk

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas perkara dilimpahkan dan diregister ke dalam e-Register.

13) Untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, ketua majelis dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada kepala pengadilan militer. Dalam hal ini kepala pengadilan militer berwenang memperpanjang masa penahanan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dengan suatu penetapan.

14) Apabila ketua majelis/kepala pengadilan militer berpendapat terdakwa tidak perlu ditahan lebih lanjut, maka ia mengeluarkan penetapan yang berisi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan.

15) Sesudah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, kepala pengadilan militer harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum dengan suatu penetapan.

16) Dalam hal waktu 90 (sembilan puluh) hari sudah habis akan tetapi guna kepentingan pemeriksaan masih diperlukan penahanan dan terdakwa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih atau menderita gangguan fisik/mental yang berat, kepala pengadilan militer dapat meminta perpanjangan penahanan kepada kepala pengadilan militer tinggi, untuk kepala pengadilan militer tinggi meminta perpanjangan penahanan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama.

17) Dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, wajib didampingi penasihat hukum, sedangkan terdakwa pada saat dilakukan penyidikan tidak didampingi penasihat hukum, maka:

    a) apabila hal tersebut baru diketahui setelah dilakukan penelitian berkas perkara oleh panitera, panitera harus melaporkan kepada kepala pengadilan militer untuk selanjutnya dikeluarkan penetapan pengembalian berkas perkara kepada

oditur militer agar Papera menunjuk penasihat hukum. Atau apabila tersangka menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang dituangkan dalam berita acara penolakan didampingi penasihat hukum, Papera tetap wajib menunjuk penasihat hukum;

b) apabila hal tersebut diketahui setelah berkas perkara tersebut diregister dan ditetapkan majelis hakim (Tapkim), maka pengembalian berkas perkara tersebut harus melalui sidang majelis hakim dengan putusan berupa penetapan pengembalian berkas perkara kepada oditurat militer dengan perintah agar terdakwa didampingi oleh penasihat hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, namun karena pengembalian berkas perkara diputuskan melalui penetapan majelis hakim, maka saat dilimpahkan kembali ke pengadilan militer harus didaftarkan dengan nomor register baru.

18) Dalam hal terdakwa menolak didampingi penasihat hukum yang telah disediakan Papera, panitera pengganti membuat berita acara penolakan yang ditandatangani oleh panitera pengganti dan terdakwa, kemudian sidang tetap dilanjutkan dan penasihat hukum tetap duduk di kursi penasihat hukum untuk mengikuti jalannya sidang.

19) Penasihat hukum yang mendampingi terdakwa yang statusnya sebagai prajurit TNI aktif harus dilengkapi dengan surat perintah dari Papera atau pejabat lain yang ditunjuk dan surat kuasa khusus dari terdakwa. Bila bantuan hukum diberikan oleh seseorang dari luar dinas bantuan hukum TNI, harus dilengkapi dengan surat izin Papera atau pejabat lain yang ditunjuk (dinas hukum angkatan) dan surat kuasa khusus dari terdakwa.

20) Penasihat hukum yang mendampingi terdakwa yang berstatus purnawirawan tidak perlu izin dari Papera dan untuk pendampingan penasihat hukum dari luar

Institusi TNI wajib melampirkan surat izin beracaranya.

21) Apabila terdakwa sudah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali dan satuan sudah memberikan jawaban bahwa terdakwa sudah tidak ada di satuan atau melarikan diri pada saat putusan akan diucapkan, maka penasihat hukum terdakwa tidak boleh menyatakan sikap terhadap putusan.

22) Dalam pemeriksaan perkara terdakwa tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil secara patut dan sah, oditur militer menyatakan tidak sanggup menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas permintaan Papera/Ankum perkara terdakwa disidangkan di wilayah hukum pengadilan tempat satuan terdakwa[7] majelis hakim memutus dengan putusan berupa penetapan untuk dikembalikan ke oditur militer untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang.

b. Acara Pemeriksaan Cepat

1) Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat.

2) Sidang dilaksanakan dengan hakim tunggal paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah berita acara pelanggaran lalu lintas (Balanglalin) diterima.

3) Panitera menyerahkan Balanglalin yang sudah diregister kepada kepala pengadilan militer, selanjutnya kepala pengadilan militer segera membuat penetapan hakim.

4) Panitera membuat penetapan penunjukan panitera pengganti.

5) Hakim yang ditunjuk segera mempelajari Balanglalin, selanjutnya menetapkan hari sidang dan segera memutus perkara lalu lintas tersebut.

6) Panitera pengganti wajib menyusun Balanglalin, kemudian mengunggah melalui SIPP beserta putusannya.

---

[7] Pasal 10 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tetang Peradilan Militer.

c. Acara Pemeriksaan Secara Elektronik[8]

1) Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari oditur militer dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

2) Penetapan hari sidang memuat hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan disampaikan oleh panitera/panitera pengganti kepada oditur militer secara elektronik.

3) Pemanggilan diatur sebagai berikut:

a) oditur militer melaksanakan pemanggilan sidang kepada terdakwa melalui atasan yang berhak menghukum (Ankum);

b) dalam hal terdakwa ditahan/menjalani hukuman, oditur militer melakukan panggilan sidang melalui Ankum dengan tembusan kepala lembaga pemasyarakatan militer;

c) panggilan dianggap diterima oleh terdakwa apabila telah terbukti bahwa panggilan telah terkirim.

4) Persidangan secara elektronik dapat dilakukan dengan cara:

a) majelis hakim, panitera pengganti dan oditur militer bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara terdakwa mengikuti sidang dari staltahtibmil/lemasmil/rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;

b) majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara oditur militer mengikuti sidang dari kantor oditurat militer dan terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari staltahtibmil/ruang tahanan pom/lemasmil/ rutan

[8] Sidang secara elektronik diatur di dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

tempat terdakwa ditahan;

c) dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari kantor oditurat militer/pengadilan terdekat; atau

d) terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor oditurat militer dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh majelis hakim dengan penetapan.

5) Apabila sidang dilaksanakan, maka semua peserta/para pihak sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.

6) Panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksinya dengan peserta sidang kepada majelis hakim.

7) Dalam persidangan, majelis hakim, panitera pengganti, oditur militer dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.

3. Persidangan

a. Acara Pemeriksaan Biasa

1) Panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

2) Setiap selesai sidang panitera pengganti wajib membuat berita acara sidang (BAS), kemudian mengunggah melalui SIPP yang bersifat rahasia dan terbatas, selanjutnya disampaikan kepada ketua majelis guna menyusun putusan.

3) Setiap selesai sidang panitera pengganti wajib menyampaikan catatan sidang dan wajib menyampaikan berita acara sidang (BAS) paling lambat sebelum sidang berikutnya kepada ketua majelis guna kepentingan sidang berikutnya dan/atau bahan penyusunan putusan.

4) Pengadilan militer dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin kepala pengadilan militer tinggi.
5) Dalam hal suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana atau restitusi dan kompensasi.[9]
6) Penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan paling lambat sebelum oditur militer mengajukan tuntutan.
7) Atas pengajuan permohonan penggabungan perkara ganti rugi tersebut ketua majelis mengeluarkan penetapan penggabungan perkara gugatan ganti rugi.
8) Dalam hal restitusi belum diajukan ditahap penyidikan atau penuntutan oleh korban/keluarga korban, maka masih dapat mengajukan permohonan restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama melalui oditur militer selama persidangan masih berlangsung sebelum putusan dijatuhkan.
9) Setelah pemeriksaan saksi, terdakwa dan barang bukti selesai dan para pihak tidak mengajukan saksi tambahan, maka ketua majelis menyatakan "pemeriksaan saksi, terdakwa dan barang bukti dinyatakan selesai" dan diikuti ketukan palu sebanyak 1 (satu) kali oleh ketua majelis, selanjutnya oditur militer mengajukan tuntutan, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan, replik dari oditur militer dan duplik dari penasihat hukum terdakwa (bila ada), pemeriksaan dinyatakan ditutup dan diikuti ketukan palu sebanyak 1 (satu) kali oleh ketua majelis.
10) Apabila pemeriksaan dimaksud dalam poin 9 sudah selesai, sebelum majelis hakim mengambil putusan, ketua majelis dapat membukanya sekali lagi, baik atas

---

[9] Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

kewenangan ketua majelis karena jabatannya maupun atas permintaan oditur militer atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

11) Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, majelis hakim melakukan musyawarah secara tertutup dan rahasia untuk mengambil putusan.
12) Dalam keadaan khusus sidang dapat dilakukan secara media elektronik/*teleconference.*
13) Pelaksanaan pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim dicatat oleh masing-masing hakim dalam himpunan putusan (e-Register) oleh majelis hakim dan bersifat rahasia.
14) Pada asasnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a) putusan diambil dengan suara terbanyak;
    b) jika ketentuan tersebut pada huruf a) tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.
15) Apabila tidak tercapai mufakat bulat, pendapat berbeda dari salah seorang majelis hakim dicatat dalam berita acara sidang majelis hakim.
16) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat *dissenting opinion* (DO) atau *concurring opinion* (CO), pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
17) Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti seketika setelah diucapkan.
18) Putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang terdakwa dalam 1 (satu) perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya salah seorang terdakwa.
19) Dalam hal pemeriksaan sudah selesai, sedangkan terdakwa tidak hadir di sidang, putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya terdakwa.
20) Apabila terdakwa menerima putusan yang telah diucapkan dan diberitahukan kepadanya, panitera

pengganti membuat akta menerima putusan.

21) Panitera pengganti wajib menyiapkan dan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan oditur militer segera sesudah putusan diucapkan.

22) Salinan putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa, Papera, oditur militer, polisi militer dan Ankum, sedangkan kepada penasihat hukumnya diberikan atas permintaan dan putusan tersebut dapat diakses melalui SIPP pada *website* pengadilan dan pada direktori putusan pengadilan terkait.

23) Salinan putusan pengadilan boleh diberikan pada orang lain hanya dengan seizin kepala pengadilan sesudah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

24) Setelah putusan pengadilan militer memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera membuat akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya menyampaikan kepada terdakwa, oditur militer dan Ankum.

25) Perkara yang diputus ”tidak dapat diterima” atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO) meliputi:
    a) cacat formil;
    b) perkara desersi *in absentia* yang terdakwanya ditemukan;
    c) terdakwa meninggal dunia;
    d) daluwarsa;
    e) pengaduannya dicabut; dan
    f) *nebis in idem.*

26) Terhadap perkara yang diputus *niet ontvankelijke verklaard* (NO) tersebut diatas tidak dapat dilakukan upaya hukum, kecuali perkara daluwarsa yang sudah memeriksa pokok perkara, maka dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

27) Perkara yang disidangkan belum diputus dalam waktu 5 (lima) bulan harus dilaporkan oleh ketua majelis kepada kepala pengadilan militer dengan tembusan kepala pengadilan militer tinggi, Kepala Pengadilan

Militer Utama dan Ketua Mahkamah Agung dengan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab sehingga perkara tersebut belum dapat diputus.[10]

b. Acara Pemeriksaan Secara Elektronik

1) Proses persidangan secara elektronik mengikuti hukum acara yang berlaku.
2) Dalam proses persidangan, dokumen keberatan (eksepsi), tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan, berbentuk PDF yang sudah ditandatangani dan distempel.
3) Setiap dokumen elektronik yang dikirim harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.
4) Sesaat setelah keberatan (eksepsi), tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dibacakan, Pengadilan Militer meneruskan dokumen elektronik tersebut ke alamat pos-el oditur militer/terdakwa dan/atau ke alamat pos-el penasihat hukum.
5) Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa.
6) Dalam hal penasihat hukum tidak memungkinkan mendampingi terdakwa di rutan/lapas, penasihat hukum bersidang di kantor oditur militer atau pengadilan militer.
7) Ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik hanya dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas staltahtibmil/ruang tahanan pom/lemasmil/rutan dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara

---

[10] SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

keseluruhan.

9) Panitera pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan, termasuk tempat kedudukan oditur militer ataupun terdakwa/penasihat hukum dalam berita acara sidang.

10) Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh oditur militer dan terdakwa/penasihat hukum yang dibacakan dalam persidangan berupa dokumen elektronik berbentuk PDF dikirim terlebih dahulu melalui pos-el.

11) Dokumen keberatan (eksepsi) dan pendapat oditur militer dikirim kepada hakim/majelis hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada oditur militer dan penasihat hukum.

12) Setelah pembacaan putusan sela yang dilangsungkan secara elektronik, maka putusan sela dikirimkan ke oditur militer dan terdakwa/penasihat hukum setelah sidang dilaksanakan.

13) Setiap saksi dan ahli mengucapkan sumpah/janji serta penerjemah wajib terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh majelis hakim.

14) Dalam hal saksi dan ahli memberikan keterangan dari kantor oditur militer atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh majelis hakim dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada di tempat saksi dan ahli memberikan keterangan.

15) Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai dengan hukum acara.

16) Dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau ahli, majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berada di:

    a) Kantor Oditur Militer pada Odituriat Militer dalam daerah hukumnya;

    b) Pengadilan militer tempat saksi dan/atau ahli berada apabila saksi dan/atau ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan militer yang menyidangkan perkara;

c) Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi dan/atau ahli berada di luar negeri; atau

d) tempat lain yang ditentukan oleh majelis hakim.

17) Dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada poin di atas, kepala pengadilan militer dan kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia tempat saksi dan/atau ahli yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang panitera/panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli.

18) Sebelum pemeriksaan saksi dan/atau ahli, maka oditur militer atau penasihat hukum yang menghadirkan saksi dan/atau ahli memberitahukan/mengirimkan kepada panitera/ panitera pengganti berupa:

a) jumlah saksi dan/atau ahli yang akan dihadirkan;

b) akun tempat saksi dan/atau ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang; dan

c) dokumen lain yang dibutuhkan.

19) Khusus untuk pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut majelis hakim wajib dirahasiakan, ketua majelis memerintahkan panitera/panitera pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.

20) Dalam hal pemeriksaan terdakwa, majelis hakim dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a) terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh

penasihat hukum;

b) terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor oditur militer;

c) apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor oditur militer atau tempat lain yang ditentukan oleh ketua majelis melalui penetapan.

21) Pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan, maka kepala pengadilan militer tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang panitera/panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan terdakwa.

22) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor oditur militer.

23) Oditur militer memperlihatkan barang bukti tersebut kepada majelis hakim, terdakwa, saksi dan/atau ahli secara elektronik.

24) Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, majelis hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh oditur militer secara elektronik.

25) Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.

26) Dalam hal terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti lainnya.

27) Majelis hakim mencocokkan dan memeriksa barang

bukti yang dikirimkan sebagaimana dengan aslinya secara elektronik.

28) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen melalui pos-el dan dikirimkan oleh panitera pengganti ke oditur militer dan penasihat hukum.

29) Putusan diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dilangsungkan secara elektronik. Dengan dihadiri oleh oditur militer dan terdakwa/penasihat hukum.

30) Dalam hal terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh pengadilan militer kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa alamat pos-el, nomor *Whatsapp* atau SMS (*short message service*).

31) Apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, maka pemberitahuan putusan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah.

32) Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, media sosial dan diumumkan pada papan pengumuman pengadilan, diunggah di *website* pengadilan.

33) Jika terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir.

34) Apabila gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam SIPP pengadilan.

c. Acara Pemeriksaan Koneksitas

1) Tindak pidana yang dilakukan dengan acara pemeriksaan koneksitas adalah tindak pidana yang

dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila dalam keadaan tertentu, menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2) Apabila diperiksa dan diadili di peradilan umum, maka ketua majelis adalah hakim dari peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan secara berimbang dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pakaian bagi hakim dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara koneksitas di pengadilan negeri menggunakan pakaian sidang.

3) Apabila diperiksa dan diadili di peradilan militer, maka ketua majelis adalah hakim dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan hakim anggota masing-masing ditetapkan secara berimbang dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum menggunakan pakaian sidang.

d. Acara Pemeriksaan Cepat

1) Sidang dengan acara pemeriksaan cepat tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, cukup berita acara pelanggaran lalu lintas (Balanglalin) sebagai pengganti BAP polisi militer.

2) Sidang perkara lalu lintas dilaksanakan dengan hakim tunggal dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa di persidangan.

3) Penjatuhan pidana pada perkara lalu lintas adalah pidana denda, dalam hal pertimbangan khusus dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan terdakwa.

4) Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan dapat mengajukan upaya hukum banding.

5) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Perlawanan diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan dan dengan perlawanan tersebut, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

6) Sesudah panitera memberitahukan kepada oditur militer tentang perlawanan itu, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara.

7) Apabila putusan perlawanan tersebut tetap berupa pidana, terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding.

4. Minutasi Perkara

a. Minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Publikasi putusan wajib diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pada saat putusan diucapkan *(one day publish).*

b. Putusan tingkat banding dapat diakses setelah akta pembacaan putusan banding diunggah dalam *website* pengadilan pengaju.

c. Majelis hakim bertanggung jawab atas penyelesaian minutasi.

d. Berkas perkara disusun secara berurutan sesuai urutan pada lampiran yang ada pada bundel A dan B, kemudian diserahkan kepada panitera muda hukum untuk diberi sampul dan dijilid.

5. Berkas

a. Dalam hal putusan sudah diucapkan, panitera wajib membuat salinan putusan.

b. Salinan putusan tersebut dibundel dengan surat-surat lain yang disebut bundel A.

c. Bundel A untuk perkara pidana dan perkara pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

1) Bundel A perkara pidana terdiri dari:

a) berkas perkara penyidik polisi militer yang terdiri dari:

(1) berita acara pemeriksaan;
(2) daftar barang bukti;
(3) surat-surat lain yang terlampir sebagai barang bukti, misalnya *visum et repertum* dan surat lainnya; dan
(4) surat kuasa khusus penasihat hukum.

b) berita acara pendapat oditur militer;
c) berita acara pendapat bersama jaksa penuntut umum dan oditur militer (khusus untuk perkara koneksitas);
d) surat pendapat hukum kepala oditurat militer;
e) keputusan penyerahan perkara (Keppera);
f) surat dakwaan oditur militer;
g) surat pelimpahan perkara;
h) Tapkim;
i) juktera;
j) Tapsid;
k) panggilan dan surat keterangan (*relaas)*;
l) eksepsi dari penasihat hukum;*
m) tanggapan atas eksepsi;*
n) putusan sela;*
o) surat permohonan penggabungan gugatan ganti rugi, restitusi dan kompensasi;*
p) penetapan ketua majelis tentang penggabungan gugatan ganti rugi, restitusi dan kompensasi;*
q) tuntutan (*requisitoir*);
r) pembelaan (pleidoi) atau permohonan keringanan (*clementie)*;*
s) tanggapan atas pembelaan (replik);*
t) sanggahan atas tanggapan atas pembelaan (duplik);*
u) putusan;
v) petikan putusan;
w) berita acara sidang; dan
x) surat-surat lainnya yang berkaitan.

2) Bundel A upaya hukum kasasi:
a) putusan tingkat banding;
b) petikan putusan tingkat banding; dan

c) bundel A tingkat pertama.

3) Bundel A upaya hukum peninjauan kembali:
   a) putusan tingkat kasasi; dan
   b) bundel A tingkat pertama dan tingkat banding.
4) Bundel A perkara pelanggaran lalu lintas terdiri dari:
   a) Balanglalin;
   b) laporan polisi;
   c) surat dakwaan dan tuntutan oditur militer;
   d) putusan; dan
   e) berita acara sidang.
5) Bundel A disimpan di pengadilan dan menjadi arsip kepaniteraan c.q. panitera muda hukum.
6) Dalam hal ada upaya hukum banding, panitera harus menyiapkan berkas yang disebut bundel B dalam bentuk elektronik.
7) Bundel B upaya hukum banding terdiri dari:
   a) surat pengantar dan daftar isi;
   b) akta permohonan banding;
   c) akta pemberitahuan permohonan banding;
   d) memori banding;*
   e) akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding;*
   f) kontra memori banding;*
   g) akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding;*
   h) surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara;
   i) berita acara/akta memeriksa berkas perkara;
   j) salinan putusan; dan
   k) dokumen elektronik yang berisi *soft copy* terdiri dari salinan putusan, memori banding, kontra memori banding, dakwaan dan tuntutan;
8) Bundel B disimpan di pengadilan tingkat banding dan menjadi arsip di kepaniteraan c.q. panitera muda hukum.
9) Dalam hal ada upaya hukum kasasi, panitera harus menyiapkan bundel B guna dikirimkan ke Mahkamah Agung secara elektronik.

10) Bundel B upaya hukum kasasi terdiri dari:
    a) surat pengantar dan daftar isi;
    b) salinan putusan tingkat pertama;
    c) surat kuasa khusus kepada penasihat hukum untuk mengajukan kasasi;*
    d) akta pemberitahuan putusan banding;
    e) akta permohonan kasasi;
    f) akta pemberitahuan permohonan kasasi;
    g) memori kasasi;
    h) akta penerimaan memori kasasi;
    i) akta pemberitahuan/penyerahan memori kasasi;
    j) kontra memori kasasi;
    k) akta pemberitahuan/penyerahan kontra memori kasasi;
    l) surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara;
    m) salinan putusan tingkat banding;*
       Catatan : * jika ada.
    n) dokumen elektronik melalui komunikasi data SIPP antara lain berisi :
        (1) surat keterangan (*relaas)* pemberitahuan putusan tingkat banding;
        (2) akta permohonan kasasi;
        (3) tanda terima memori kasasi;
        (4) memori kasasi;
        (5) kontra memori kasasi;
        (6) surat dakwaan oditur militer;
        (7) putusan pengadilan tingkat pertama;
        (8) putusan pengadilan tingkat banding;
        (9) surat pernyataan dari panitera bahwa berkas yang dikirim telah lengkap; dan
        (10) surat-surat lain yang berkaitan;

        Catatan : Apabila upaya hukum kasasi diajukan karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, maka bundel B tidak diperlukan adanya permohonan banding, memori banding, kontra memori banding dan putusan banding.

11) Bundel B tersebut disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung;
12) Dalam hal ada upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, panitera harus menyiapkan bundel B secara elektronik untuk dikirim ke Mahkamah Agung;
13) Bundel B dalam permohonan kasasi demi kepentingan hukum, terdiri dari:
    a) surat pengantar dan daftar isi;
    b) akta permohonan kasasi;
    c) akta penyerahan memori kasasi;
    d) salinan putusan pengadilan tingkat banding;*
    e) salinan putusan sela dan BAS putusan sela;*
    f) salinan putusan pengadilan tingkat pertama;
    g) dokumen elektronik melalui komunikasi data direktori putusan antara lain berisi:
        (1) surat keterangan *(relaas)* pemberitahuan putusan tingkat banding;
        (2) akta permohonan kasasi;
        (3) tanda terima memori kasasi;
        (4) memori kasasi;
        (5) risalah kasasi;
        (6) surat dakwaan Oditur Militer;
        (7) putusan pengadilan tingkat pertama; dan
        (8) putusan pengadilan tingkat banding.
14) Surat-surat lain yang berkaitan;
15) Dalam hal ada upaya hukum peninjauan kembali, panitera harus menyiapkan bundel B untuk dikirim ke Mahkamah Agung;
16) Bundel B peninjauan kembali (PK) terdiri dari:
    a) surat pengantar dan daftar isi;
    b) akta pemberitahuan isi putusan kasasi kepada terdakwa/ oditur militer;
    c) akta permohonan PK;
    d) surat kuasa khusus kepada ahli warisnya;
    e) memori PK;
    f) akta penyerahan/penerimaan memori PK;
    g) akta pemberitahuan permohonan PK kepada oditur militer/terdakwa;

h) kontra memori PK;
i) akta penyerahan/penerimaan memori PK;
j) salinan putusan sela;*
k) salinan putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan militer);
l) salinan putusan pengadilan tingkat banding (pengadilan militer tinggi);
m) salinan putusan kasasi;
n) penetapan hakim untuk PK;
o) berita acara pemeriksaan dan pendapat tingkat pertama untuk PK;
p) dokumen elektronik melalui komunikasi data direktori putusan antara lain berisi:
(1) akta permohonan PK;
(2) berita acara pendapat hakim;
(3) memori PK;
(4) kontra memori PK;
(5) putusan pegadilan tingkat pertama; dan
(6) putusan pegadilan tingkat banding.
r) surat-surat lain yang berkaitan.

17) Apabila upaya hukum PK yang dilakukan terhadap putusan tingkat pertama atau putusan tingkat banding, maka bundel B tidak diperlukan adanya putusan banding.
18) Bundel A dan B dalam bentuk elektronik.

Catatan: * jika ada.

6. Arsip
a. Register Elektronik.
1) Register perkara terdiri dari:
a) register induk perkara pidana;
b) register induk perkara khusus;
c) register perkara pelanggaran lalu lintas;
d) register Tapkim;
e) register juktera;
f) register Tapsid;
g) register putusan;
h) register putusan sela;
i) register perlawanan;

j) register perkara permohonan banding;
k) register perkara permohonan kasasi;
l) register perkara permohonan kasasi demi kepentingan hukum;
m) register perkara permohonan peninjauan kembali;
n) register perkara permohonan grasi;
o) register penahanan;
p) register pembebasan dari tahanan;
q) register pengembalian berkas perkara; dan
r) register musyawarah hakim.

2) Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik (SIPP), apabila penggunaan e-Register elektronik mengalami gangguan dapat menggunakan secara manual.
3) Register induk perkara harus memuat seluruh data proses penyelesaian perkara dari tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pelaksanaan putusan (diunggah oleh pengguna sesuai kewenangannya).
4) Register elektronik harus memuat seluruh data perkara, pengisiannya dilaksanakan dengan tertib dan cermat sesuai dengan perkembangan perkara.
5) Register harus ditutup dan diganti setiap tahun tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
6) Register perkara pidana, perkara khusus dan perkara pelanggaran lalu lintas ditutup setiap bulan. nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor urut 1 (satu), sedangkan nomor register perkara berlanjut dalam 1 (satu) tahun.
7) Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani secara elektronik oleh petugas e-Register dan panitera, dengan membuat perincian perkara sebagai berikut:

a) Sisa bulan lalu : ..... perkara
b) Masuk bulan ini : ..... perkara
c) Putus : ..... perkara
d) Dilimpahkan : ..... perkara
e) Dikembalikan : ..... perkara
f) Sisa : ..... perkara

g) Sudah diminutasi : ..... perkara
h) Belum diminutasi : ..... perkara
i) Sudah diunggah : ..... perkara
j) Belum diunggah : ..... perkara

8) Penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani secara elektronik panitera dan kepala pengadilan militer dengan membuat perincian perkara sebagai berikut:
a) Sisa tahun lalu : ..... perkara
b) Masuk tahun ini : ..... perkara
c) Putus tahun ini : ..... perkara
d) Dilimpahkan : ..... perkara
e) Dikembalikan : ..... perkara
f) Sisa : ..... perkara
g) Sudah diminutasi : ..... perkara
h) Belum diminutasi : ..... perkara
i) Sudah diunggah : ..... perkara
j) Belum diunggah : ..... perkara

9) Register permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi ditutup setiap akhir tahun, ditandatangani secara elektronik panitera dan kepala pengadilan militer dengan membuat rekapitulasi perkara akhir tahun sebagai berikut:
a) Tahun lalu : ..... perkara
b) Masuk : ..... perkara
c) Putus : ..... perkara
d) Sisa : ..... perkara
e) Sudah dikirim : ..... perkara
f) Belum dikirim : ..... perkara
g) Sudah diminutasi : ..... perkara
h) Belum diminutasi : ..... perkara
i) Sudah diunggah : ..... perkara
j) Belum diunggah : ..... perkara

10) e-Register yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual.

7. Laporan

a. Guna memperoleh gambaran tentang kegiatan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer perlu dibuat laporan

bulanan, triwulan dan tahunan.

b. Laporan bulanan memuat hal-hal sebagai berikut:
   1) keadaan perkara;
   2) perkara yang dimohonkan perlawanan;
   3) perkara pidana yang dimohonkan banding;
   4) perkara pidana yang dimohonkan kasasi;
   5) perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali;
   6) perkara pidana yang dimohonkan grasi;
   7) pelaksanaan sidang keliling;
   8) pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif *(restorative justice)*;
   9) pelaksanaan penyelesaian perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
   10) kinerja hakim dan panitera;
   11) pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat; dan
   12) jenis perkara pidana.

c. Laporan Triwulan memuat hal-hal sebagai berikut:
   1) keadaan perkara;
   2) perkara yang dimohonkan perlawanan;
   3) perkara pidana yang dimohonkan banding;
   4) perkara pidana yang dimohonkan kasasi;
   5) perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali;
   6) perkara pidana yang dimohonkan grasi;
   7) pelaksanaan sidang keliling;
   8) pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif *(restorative justice)*;
   9) pelaksanaan penyelesaian perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
   10) kinerja hakim dan panitera;
   11) pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat;
   12) jenis perkara pidana; dan
   13) Keuangan, personel dan materiil.

d. Laporan tahunan memuat hal-hal sebagai berikut:
   1) keadaan perkara;
   2) perkara yang dimohonkan perlawanan;
   3) perkara pidana yang dimohonkan banding;
   4) perkara pidana yang dimohonkan kasasi;
   5) perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali;

6) perkara pidana yang dimohonkan grasi;
7) pelaksanaan sidang keliling;
8) pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif *(restorative justice)*;
9) pelaksanaan penyelesaian perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
10) kinerja hakim dan panitera;
11) pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat;
12) jenis perkara pidana;
13) keuangan, personel dan materiil.

e. Laporan perkara pidana memuat keadaan perkara sejak diterima sampai diputus dan diminutasi.

f. Laporan perkara pidana yang dimohonkan perlawanan, banding, memuat nomor dan tanggal putusan, tanggal permohonan banding dan tanggal pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding.

g. Laporan perkara pidana yang dimohonkan kasasi, memuat nomor dan tanggal penerimaan berkas dari Pengadilan tingkat banding, tanggal pemberitahuan putusan banding, tanggal penyerahan memori kasasi, pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.

h. Laporan perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali, berisi tentang keadaan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali yang memuat mulai tanggal penerimaan berkas dari Mahkamah Agung /pengadilan tingkat banding sampai dengan tanggal pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.

i. Laporan perkara pidana yang dimohonkan grasi/remisi, berisi tentang keadaan perkara yang dimohonkan grasi/remisi mulai tanggal diterimanya permohonan grasi/remisi sampai dengan dikirim ke Mahkamah Agung.

j. Dalam setiap laporan terhadap perkara yang belum dikirim, harus pula disebutkan alasannya dalam kolom keterangan.

k. Laporan kinerja hakim dan panitera berisi tentang nomor putusan, tanggal putusan, nama majelis hakim, nama panitera pengganti dan keterangan lain yang diperlukan.

l. Perkara tingkat pertama yang belum diputus dalam waktu 5 (lima) bulan dan perkara tingkat banding yang belum

diputus dalam waktu 3 (tiga) bulan harus dilaporkan ke Ketua Mahkamah Agung dengan tembusan kepala pengadilan militer tinggi dan Kepala Pengadilan Militer Utama dengan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab sehingga perkara tersebut belum dapat diputus.

m. Laporan kinerja hakim dan panitera pengganti dibuat setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan baik bagi hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding.

n. Laporan keuangan, data-datanya harus sesuai dengan buku keuangan perkara.

o. Laporan jenis perkara berisi data tentang jumlah dan jenis perkara, jumlah putusan, sisa perkara yang belum diputus pada setiap akhir bulan; dari data-data tersebut dapat ditentukan penyusunan anggaran, jumlah kebutuhan dan kualitas hakim serta panitera.

p. Laporan kepala pengadilan militer dikirim ke Dirjen Badilmiltun dengan tembusan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama dan kepala pengadilan militer tinggi.

q. Laporan bulanan, triwulan dan tahunan dilaksanakan secara elektronik, sebagai berikut:
   1) sisa perkara;
   2) perkara masuk;
   3) perkara putus;
   4) perkara dilimpahkan;
   5) perkara dikembalikan; dan
   6) sisa perkara.

r. Apabila terdapat kendala pada aplikasi e-Register dapat dilakukan secara manual.

8. Arsip Perkara

   a. Arsip perkara terdiri dari 2 (dua) jenis:
      1) berkas perkara yang masih berjalan, yakni berkas perkara yang sudah diputus namun belum berkekuatan hukum tetap (BHT) (proses minutasi masih dalam tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali dan yang masih memerlukan penyelesaian akhir (eksekusi)); dan
      2) berkas perkara yang sudah selesai dalam arti telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

   b. Berkas perkara yang masih berjalan menjadi tanggung jawab

oleh panitea muda pidana, dan apabila berkas perkara sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) maka dibuatkan berita acara oleh panitera muda pidana untuk diserahkan kepada panitera muda hukum.

c. Terhadap berkas perkara yang diputus *niet ontvankelijke verklaard* (NO) yang berkas perkaranya dikembalikan kepada oditur militer, maka yang menjadi arsip adalah salinan putusan, fotokopi surat dakwaan, fotokopi Keppera dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara.

d. Berkas perkara yang sudah selesai menjadi tanggung jawab panitera muda hukum yang disimpan dalam bentuk elektronik dan apabila masih dianggap perlu disimpan dalam bentuk *hardcopy* dalam boks atau sampul yang diikat secara rapi dan ditempatkan di atas rak atau dalam lemari dengan urutan berdasarkan:

   1) nomor urut boks atau sampul;
   2) tahun perkara;
   3) jenis perkara;
   4) nomor urut perkara; dan
   5) tingkat penyelesaian yang ditulis pada box atau sampul.

e. Berkas perkara yang diputus ”tidak dapat diterima” atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO):

   1) putusan NO dalam perkara desersi *in absentia* yang ternyata terdakwa hadir di persidangan, padahal belum dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan tersangka, berkas perkara dikembalikan kepada oditur militer untuk dilengkapi;
   2) putusan NO karena terdakwa tidak diketahui keberadaannya dalam perkara di luar desersi *in absentia*, berkas perkara dikembalikan ke oditur militer dengan perintah “dilimpahkan kembali ke pengadilan militer untuk disidangkan setelah terdakwa kembali atau ditangkap" dengan nomor register baru;
   3) putusan NO karena berkas perkara tidak memenuhi syarat formil dan materil, berkas perkara dikembalikan kepada oditur militer;
   4) putusan NO karena terdakwa meninggal dunia, berkas perkara tetap di pengadilan militer;

5) putusan NO karena daluwarsa, berkas perkara tetap berada di pengadilan militer;
6) putusan NO yang karena pengaduannya dicabut, berkas perkara tetap di pengadilan militer;
7) putusan NO karena perkaranya *nebis in idem,* berkas perkara tetap berada di pengadilan militer;
8) putusan NO karena terdakwa sakit permanen, berkas perkara dikembalikan ke oditur militer.

f. Panitera bersama panitera muda hukum menyempurnakan penataan arsip berkas perkara yang dibuat secara manual dengan membuat daftar isi berkas perkara yang dibuat di atas kertas tersendiri dan ditempelkan dibagian dalam pada sisi kiri boks;

g. Arsip berkas perkara disusun menurut jenis perkaranya, kemudian dipisahkan menurut klasifikasi perkaranya;

h. Perincian klasifikasi perkara adalah sebagai berikut:
1) perkara kejahatan;
2) perkara khusus (koneksitas); dan
3) perkara pelanggaran.

i. Penyimpanan boks arsip perkara ditempatkan di dalam lemari/rak dan diusahakan untuk ditempatkan dalam ruang khusus, agar terjamin keamanannya dan dibuat gambar denah ruangan khusus tersebut.

j. Setiap lemari/rak dibuatkan daftar isi lemari atau daftar isi rak.

k. Dalam hal arsip berkas perkara telah mencapai masa untuk dihapus, maka atas kerja sama dengan Arsip Nasional RI, berkas tersebut dimusnahkan dan wajib disertakan dengan berita acara pemusnahan berkas perkara dan pengusulan pemusnahan berkas perkara, dengan pengecualian terhadap berkas perkara yang mempunyai nilai sejarah dan telah melalui pensortiran, maka berkas tersebut harus tetap disimpan.

l. Pengadilan wajib menyimpan arsip perkara dalam bentuk dokumen elektronik atau media lainnya secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Arsip Nasional RI setelah memperoleh izin dari Mahkamah Agung.

m. Pembenahan dan penataan arsip perkara dilaporkan setiap

tahun kepada kepala pengadilan militer.

B. Pengadilan Militer Tinggi

1. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

a. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara pada pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama sama dengan petunjuk pelaksanaan pada pengadilan militer dengan penyesuaian seperlunya.

b. Pangkat lokal majelis hakim ditulis dengan “Lok” dan pangkat tituler ditulis dengan “Tit”.

c. Laporan pengadilan militer tinggi sebagai tingkat pertama dibuat dengan menyesuaikan laporan pengadilan militer yang dikirim oleh kepala pengadilan militer tinggi kepada Dirjen Badilmiltun dengan tembusan Kepala Pengadilan Militer Utama.

2. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding

a. Penerimaan Berkas.

1) Petugas PTSP (dalam hal ini petugas kepaniteraan), menerima berkas perkara, kemudian memeriksa kelengkapan berkas; Apabila berkas perkara belum lengkap sesuai dengan *checklist* kelengkapan berkas perkara tersebut dikembalikan kepada pengadilan pengaju;

2) Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, petugas PTSP (dalam hal ini petugas kepaniteraan), kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke petugas kesekretariatan untuk diagendakan di buku agenda (manual) dan aplikasi e-Simpan terintegrasi; Setelah diagendakan, petugas kesekretariatan menyerahkan berkas perkara ke panitera, selanjutnya panitera melakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara (formil);

3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, panitera menyerahkan ke kepala pengadilan militer tinggi dan panitera memerintahkan panitera muda pidana untuk meregister ke dalam SIPP serta memasukkan ke dalam Register manual/e-Register tingkat banding;

4) Setelah panitera meneliti kelengkapan berkas perkara, petugas e-Register mencantumkan nomor perkara, K

untuk kejahatan, Sus untuk perkara koneksitas, permohonan kompensasi atau restitusi, keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa, untuk singkatan nama pengadilan (PMT. ...), singkatan kode banding dengan BDG, singkatan matra dari terdakwa, bulan pencatatan dengan angka romawi dan tahun dengan angka arab yang sesuai dengan urutan.

Contoh 1:

nomor Register Perkara	:	nomor 01-K/PMT.I/BDG/AD/I/2026
01	:	nomor urut register
K	:	Kode tindak pidana yaitu K (Kejahatan)
PMT.I	:	Nama Pengadilan Militer Tinggi (dengan tanda baca titik), dalam contoh ini adalah Pengadilan Militer Tinggi I Medan;
AD	:	Menunjukkan terdakwa personel TNI AD;
AL	:	Menunjukkan terdakwa personel TNI AL.
AU	:	Menunjukkan terdakwa personel TNI AU.
I	:	Bulan Januari (Angka Romawi).
2026	:	Tahun.

Contoh 2:

nomor Register Perkara	:	nomor 01-Sus/PMT.I/BDG/I/2026
01	:	nomor urut register
Sus	:	Kode perkara khusus
PMT.I	:	Nama Pengadilan Militer Tinggi (dengan tanda baca titik), dalam contoh ini adalah Pengadilan Militer Tinggi I Medan;
I	:	Bulan Januari (Angka Romawi)
2026	:	Tahun

e-Register harus mencatat dengan cermat dalam e-Register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam e-Register yang ada di SIPP;

5) Apabila pemohon banding menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan militer tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di pengadilan militer tinggi dalam waktu secepatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan militer tinggi;
6) Apabila pemohon banding belum meneliti keaslian berkas perkara, panitera pengadilan militer tinggi wajib memberi kesempatan kepada pemohon banding untuk sewaktu-waktu (jam kerja) meneliti keaslian dan kelengkapan berkas perkara yang sudah ada di pengadilan militer tinggi dan setelah pemohon banding meneliti keaslian dan kelengkapan berkas panitera membuat akta meneliti keaslian berkas perkara;
7) Petugas e-Register mencatat dengan cermat semua proses yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam e-Register;
8) Dalam hal panitera tingkat banding menerima surat pencabutan permohonan banding dari tingkat pertama sebelum berkas perkara diregister, panitera membuat surat pengembalian berkas yang ditanda tangani oleh kepala pengadilan, apabila berkas perkara sudah diregister, panitera mengirimkan penetapan pengembalian berkas yang ditanda tangani oleh ketua majelis;
9) Apabila tingkat banding menerima susulan memori banding dan/atau kontra memori dan/atau surat lainnya tanpa melalui pengadilan pengaju maka memori dan/atau kontra memori dan/atau surat lainnya sepanjang perkaranya belum diperiksa maka dikembalikan untuk diajukan melalui pengadilan pengaju;

b. Persiapan Persidangan

1) Berkas perkara yang sudah diregister, selanjutnya kepala pengadilan militer tinggi segera menetapkan majelis hakim, sedangkan panitera menunjuk panitera pengganti yang akan bersidang dan di input ke dalam SIPP;
2) panitera segera menyerahkan berkas perkara kepada panitera pengganti, kemudian meneruskannya kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk;
3) majelis hakim yang ditunjuk wajib segera mempelajari berkas perkara secara bergilir yang diatur oleh ketua majelis;
4) Kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan militer tinggi sejak diajukannya permohonan banding;
5) Ketua majelis dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara banding wajib menetapkan/ menentukan sikap apakah terdakwa perlu ditahan atau tidak;
6) Dalam hal penahanan yang dijalani terdakwa mencapai tenggang waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, kepala pengadilan pengaju harus segera membebaskan terdakwa dengan suatu penetapan;
7) Ketua majelis menetapkan hari sidang, selanjutnya panitera pengganti menyiapkan sarana prasarana kelengkapan pelaksanaan persidangan;

c. Persidangan

1) Panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
2) Pemeriksaan tingkat banding dilakukan atas dasar berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan bundel B yang diterima dari pengadilan tingkat pertama;
3) Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk

memperbaiki hal itu atau pengadilan tingkat banding melakukannya sendiri;

4) Apabila dipandang perlu, pengadilan tingkat banding mendengar sendiri keterangan terdakwa, saksi atau oditur militer tinggi dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya;

5) Dalam hal diterimanya akta pencabutan permohonan banding atas perkara yang sedang diperiksa akan tetapi belum diputus perkara tersebut maka ketua majelis membuat putusan yang berupa penetapan pengembalian berkas yang berisikan putusan permohonan banding secara formal tidak dapat diterima, dengan mengirimkan kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju;

6) Setiap selesai sidang panitera pengganti wajib membuat bas dan segera disampaikan kepada ketua majelis guna menyusun putusan;

7) Pengadilan militer tinggi dapat bersidang di luar daerah hukum nya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama;

8) Dalam hal pemeriksaan perkara telah dinyatakan ditutup, majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan; pelaksanaan pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim dicatat dalam buku catatan masing-masing hakim (e-Himpunan Putusan);

9) Putusan dalam musyawarah merupakan hasil mufakat bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a) putusan diambil dengan suara terbanyak; dan
   b) apabila ketentuan tersebut pada huruf a tidak dapat dicapai, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

10) Dalam hal tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang majelis hakim dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia; Seluruh

kegiatan dalam musyawarah hakim dicatat dalam berita acara sidang majelis dan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat *dissenting opinion (DO)* atau *concurring opinion (CO)*, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

11) Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti seketika setelah putusan diucapkan;
12) Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
13) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan, panitera pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan petikan putusan dan salinan putusan beserta bundel A kepada pengadilan tingkat pertama (pengadilan pengaju); dan
14) Perkara yang disidangkan di pengadilan militer tinggi yang belum diputus dalam waktu 3 (tiga) bulan harus dilaporkan oleh ketua majelis kepada kepala pengadilan militer tinggi dengan tembusan Kepala Pengadilan Militer Utama dan Ketua Mahkamah Agung dengan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab sehingga perkara tersebut belum dapat diputus.

d. Berkas

Berkas perkara yang terdapat pada pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, terdiri dari:

1) bundel B yang diterima dari pengadilan tingkat pertama;
2) BAS dan putusan tingkat banding;
3) surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara;*
4) akta mempelajari berkas;*dan
5) akta meneliti keaslian berkas;*

Catatan : * jika ada

e. Arsip

1) Register Elektronik;
    a) Register perkara (diunggah ke dalam SIPP), terdiri dari:
        (1) register induk perkara pidana;
        (2) register induk perkara khusus;
        (3) register perkara pelanggaran lalu lintas

(4) register Tapkim;
(5) register juktera;
(6) register Tapsid;
(7) register putusan;
(8) register putusan sela;
(9) register perkara permohonan banding;
(10) register penahanan; dan
(11) register pengembalian berkas perkara.

b) Register harus memuat seluruh data perkara, pengisiannya dilaksanakan dengan tertib dan cermat sesuai dengan perkembangan perkara;

c) Register diberi nomor halaman, halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani oleh kepala pengadilan secara elektronik;

d) Register harus ditutup dan diganti setiap tahun tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya;

e) Register perkara pidana ditutup setiap bulan; nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor urut 1 (satu), sedangkan nomor register perkara berlanjut dalam 1 (satu) tahun;

f) Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani secara elektronik oleh petugas e-Register dan panitera pengadilan militer tinggi dengan membuat perincian perkara sebagai berikut:

(1) Sisa bulan lalu : ..... perkara
(2) Masuk bulan ini : ..... perkara
(3) Putus : ..... perkara
(4) Sisa bulan ini : ..... perkara
(5) Sudah dikirim : ..... perkara
(6) Belum dikirim : ..... perkara
(7) Sudah diminutasi : ..... perkara
(8) Belum diminutasi : ..... perkara
(9) Sudah diunggah : ..... perkara
(10) Belum diunggah : ..... perkara

g) Penutupan register setiap akhir tahun, ditandatangani oleh panitera dan kepala pengadilan militer tinggi dengan perinciannya

sebagai berikut:

(1) Sisa tahun lalu : ..... perkara
(2) Masuk tahun ini : ..... perkara
(3) Putus : ..... perkara
(4) Sisa tahun ini : ..... perkara
(5) Sudah dikirim : ..... perkara
(6) Belum dikirim : ..... perkara
(7) Sudah diminutasi: ..... perkara
(8) Belum diminutasi: ..... perkara
(9) Sudah diunggah : ..... perkara
(10) Belum diunggah : ..... perkara

h) e-Register dari aplikasi SIPP dan yang ditandatangani oleh panitera dan kepala pengadilan militer tinggi, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual.

2) Arsip perkara

Penyelenggaraan arsip perkara menyesuaikan penyelenggaraan arsip perkara di pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan Pengadilan Militer Utama.

f. Laporan

1) Guna memperoleh gambaran tentang kegiatan perlu dibuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
2) Laporan bulanan memuat hal-hal sebagai berikut:
   a) laporan keadaan perkara tingkat banding;
   b) laporan kinerja hakim dan panitera pengganti; dan
   c) laporan jenis perkara pidana.
3) Laporan triwulan memuat hal-hal sebagai berikut:
   a) laporan keadaan perkara tingkat banding;
   b) laporan kinerja hakim dan panitera pengganti; dan
   c) laporan keuangan.
4) Laporan Tahunan memuat hal-hal sebagai berikut:
   a) laporan keadaan perkara tingkat banding;
   b) laporan kinerja hakim dan panitera pengganti; dan
   c) laporan keuangan.
5) Laporan dibuat oleh kepala pengadilan militer tinggi dikirim kepada Dirjen Badilmiltun dengan tembusan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama.

6) Laporan dibuat setiap akhir bulan dan selambat-lambatnya harus sudah diterima oleh Ditjen Badilmiltun tanggal 5 bulan berikutnya.

3. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir Dalam Perkara Sengketa Kewenangan Mengadili.

a. Penerimaan Berkas Secara Manual

1) Petugas PTSP (dalam hal ini petugas kepaniteraan) menerima berkas perkara, kemudian memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas perkara belum lengkap sesuai dengan *checklist* kelengkapan berkas perkara tersebut dikembalikan kepada pengadilan pengaju;

2) Setelah berkas diperiksa kelengkapannya oleh panitera muda pidana, selanjutnya oleh admin e-Register diinput melalui e-Register; Pencatatan dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam e-Register dan dengan urutan tanggal penerimaan; dan

3) Petugas e-Register mencatat dengan cermat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara sampai dengan putusan, petugas e-Register untuk segera mengisi data ke SIPP dan menginput melalui e-Register.

b. Penerimaan Berkas Secara Elektronik

1) Panitera muda pidana menerima berkas perkara pidana secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu;

2) Panitera muda pidana melakukan verifikasi kelengkapan berkas perkara elektronik sesuai dengan daftar periksa (*checklist*);

3) Terhadap berkas perkara yang tidak lengkap, panitera muda pidana memberikan notifikasi berkas perkara yang tidak lengkap dengan menyebut jenis dokumen yang harus dilengkapi oleh oditur militer tinggi/tim tetap koneksitas, dan apabila sudah lengkap untuk dilimpahkan kembali; dan

4) Pendaftaran perkara agar mempedomani aturan tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

c. Persiapan Persidangan

1) Kepala pengadilan militer tinggi segera menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili sengketa kewenangan mengadili dan panitera menunjuk panitera pengganti melalui SIPP dengan memprioritaskan perkara yang terdakwa/para terdakwa nya berada dalam tahanan;
2) Majelis hakim yang ditunjuk segera mempelajari berkas perkara, selanjutnya ketua majelis menetapkan hari sidang melalui sipp dan panitera pengganti menyusun dan mempersiapkan pelaksanaan sidang; dan
3) Dalam hal pengadilan telah mengajukan sengketa kewenangan mengadili terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan, maka kewenangan menahan menjadi tanggung jawab kepala pengadilan yang akan memutus sengketa tersebut; Namun setelah sengketa kewenangan diputus, kewenangan menahan menjadi kewenangan pengadilan yang ditunjuk dalam putusan serta disesuaikan dengan ketentuan undang-undang.

d. Persidangan
1) Panitera pengganti membantu majelis hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang pengadilan;
2) Setiap selesai sidang panitera pengganti wajib membuat berita acara sidang (BAS) dan segera disampaikan kepada ketua majelis guna menyusun putusan, dalam hal sidang ditunda pada hari yang berbeda, panitera pengganti wajib membuat bas lanjutan dan segera disampaikan kepada ketua majelis guna kepentingan pemeriksaan sidang berikutnya dan mengunggah (secara terbatas) melalui SIPP;
3) Dalam hal sengketa kewenangan mengadili telah diputus oleh majelis hakim, salinan putusan beserta berkas perkara dikirimkan kembali oleh panitera ke pengadilan yang mengajukan permohonan;
4) Apabila pengadilan yang mengajukan permohonan, berdasarkan putusan tersebut dinyatakan tidak berwenang, wajib meneruskan kepada pengadilan militer yang berwenang untuk mengadili;
5) Dalam hal sengketa mengadili bukan dari pengadilan

yang ada dalam daerah hukumnya, kepala pengadilan militer tinggi membuat penetapan tentang tidak berwenang mengadili sengketa yang diajukan.

e. Berkas

Berkas perkara yang berkaitan dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa kewenangan mengadili menjadi arsip pengadilan militer tinggi, terdiri dari:

1) surat permohonan penyelesaian sengketa mengadili;
2) berita acara pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili;
3) putusan; dan
4) surat-surat lainnya.

f. Arsip

1) Register Elektronik;
   a) Register perkara (diunggah ke SIPP) terdiri dari:
      (1) register induk perkara;
      (2) register Tapkim;
      (3) register juktera;
      (4) register Tapsid;
      (5) register himpunan putusan; dan
      (6) register perkara yang diputus.
   b) Penutupan register setiap akhir bulan, ditandatangani oleh petugas register dan panitera pengadilan militer tinggi dengan perincian sebagai berikut:
      (1) Sisa bulan lalu : ..... perkara
      (2) Masuk bulan ini : ..... perkara
      (3) Putus : ..... perkara
      (4) Sisa bulan ini : ..... perkara
      (5) Sudah dikirim : ..... perkara
      (6) Belum dikirim : ..... perkara
      (7) Sudah diminutasi : ..... perkara
      (8) Belum diminutasi : ..... perkara
      (9) Sudah diunggah : ..... perkara
      (10) Belum diunggah : ..... perkara
   c) Penutupan register setiap akhir tahun, ditandatangani oleh panitera dan kepala pengadilan militer tinggi, dengan perincian sebagai

berikut:

(1) Sisa bulan lalu : ..... perkara
(2) Masuk bulan ini : ..... perkara
(3) Putus : ..... perkara
(4) Sisa bulan ini : ..... perkara
(5) Sudah dikirim : ..... perkara
(6) Belum dikirim : ..... perkara
(7) Sudah diminutasi : ..... perkara
(8) Belum diminutasi : ..... perkara
(9) Sudah diunggah : ..... perkara
(10) Belum diunggah : ..... perkara

d) Register yang dicetak dari aplikasi SIPP dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual.

2) Arsip perkara

Penyelenggaraan arsip perkara menyesuaikan penyelenggaraan arsip perkara pada pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan Pengadilan Militer Utama.

g. Laporan

1) Guna memperoleh gambaran tentang kegiatan badan peradilan militer, dipandang perlu untuk dibuat laporan;
2) Laporan berkala dibuat setiap bulan, triwulan dan tahunan;
3) Laporan tahunan memuat hal-hal berikut:
   a) laporan keadaan perkara;
   b) laporan kinerja hakim dan panitera; dan
   c) laporan keuangan.
4) Laporan dibuat oleh kepala pengadilan militer tinggi dikirim kepada Dirjen Badilmiltun dengan tembusan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama.

C. Pengadilan Militer Utama

1. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding

a. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara pada Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding, sama dengan petunjuk pelaksanaan pada pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat banding

dengan penyesuaian seperlunya;

b. Pencatatan administrasi perkara dilakukan oleh panitera muda pidana;

c. Penyimpanan berkas perkara yang sudah selesai dilakukan oleh panitera muda hukum, sedangkan penyimpanan berkas perkara yang masih berjalan dilakukan oleh panitera muda pidana;

d. Laporan yang dibuat oleh Kepala Pengadilan Militer Utama dikirim kepada Dirjen Badilmiltun.

2. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir dalam Perbedaan Pendapat

b. Penerimaan Berkas

1) Petugas PTSP (dalam hal ini petugas kepaniteraan), menerima berkas perkara, kemudian memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan *checklist* kelengkapan berkas perkara, kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke petugas kesekretariatan untuk diagendakan di buku agenda (manual) dan aplikasi e-Simpan terintegrasi; Setelah diagendakan, petugas kesekretariatan menyerahkan berkas perkara ke panitera, selanjutnya panitera melakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara (formil);

2) Apabila berkas perkara belum lengkap, Kepala Pengadilan Militer Utama mengembalikan berkas perkara kepada Papera untuk dilengkapi;

3) Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, kemudian panitera meneruskannya kepada Kepala Pengadilan Militer Utama dan memerintahkan panitera muda pidana untuk mengunggah ke SIPP serta menginput ke dalam e-Register; dan

4) Panitera muda pidana memberikan data yang berkenaan dengan perkara perbedaan pendapat dan pelaksanaan putusan kepada petugas e-Register untuk segera mengunggah melalui SIPP dan diinput melalui e-Register.

c. Persiapan Persidangan

1) Setelah menerima berkas perkara perbedaan pendapat, Kepala Pengadilan Militer Utama segera menetapkan

majelis hakim yang akan memeriksa perkara perbedaan pendapat tersebut melalui SIPP;

2) Majelis hakim yang ditunjuk wajib mempelajari berkas perkara Perbedaan Pendapat, kemudian ketua majelis menetapkan hari sidang dan panitera menunjuk panitera pengganti melalui SIPP;
3) Panitera membuat surat pemberitahuan hari sidang kepada Orjen TNI dan Papera untuk menghadiri sidang guna didengar pendapatnya; dan
4) Setelah ketua majelis menetapkan hari sidang, panitera pengganti menyusun dan mempersiapkan pelaksanaan persidangan.

d. Persidangan

1) Panitera pengganti membantu majelis hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
2) Sidang dihadiri oleh majelis hakim, panitera pengganti, Orjen TNI dan Papera untuk mendengar pendapat dari Orjen TNI dan Papera;
3) Setiap selesai sidang panitera pengganti wajib membuat berita acara sidang (BAS) dan segera disampaikan kepada ketua majelis guna menyusun putusan. Dalam hal sidang ditunda pada hari yang berbeda, panitera pengganti wajib membuat BAS lanjutan dan segera disampaikan kepada ketua majelis guna kepentingan pemeriksaan sidang berikutnya dan menggungah ke SIPP;
4) Berita acara sidang sebelum sidang berikutnya sudah harus disampaikan kepada ketua majelis;
5) Setelah putusan perbedaan pendapat diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tanpa dihadiri oleh Orjen TNI dan Papera berkas perkara asli dari Papera dan salinan putusan perkara perbedaan pendapat dikirim ke Papera dengan tembusan kepada Orjen TNI, untuk ditindaklanjuti oleh Papera.

e. Berkas

1) Penerimaan

Pengadilan Militer Utama memutus perkara perbedaan pendapat antara Papera dengan oditur militer/oditur militer tinggi. Berkas perkara yang diajukan oleh Papera ke Pengadilan Militer Utama adalah berkas perkara asli yang berisi:

a) berkas perkara dari penyidik (polisi militer);
b) berita acara pendapat oditur militer/oditur militer tinggi;
c) surat pendapat hukum dari kepala oditur militer/kepala oditur militer tinggi;
d) surat jawaban Papera atas surat pendapat hukum kepala oditur militer/kepala oditur militer tinggi;
e) surat permohonan kepala oditur militer/kepala oditur militer tinggi kepada Papera agar perbedaan Pendapat diajukan ke Pengadilan Militer Utama; dan
f) surat permohonan Papera kepada Kepala Pengadilan Militer Utama untuk memutus perkara perbedaan pendapat melalui sidang Pengadilan Militer Utama.

2) Pengembalian

Setelah perkara perbedaan pendapat diputus, panitera mengirimkan salinan putusan beserta berkas asli kepada Papera dengan tembusan Orjen TNI, sebagai berikut:

a) salinan putusan Pengadilan Militer Utama;
b) pendapat Orjen TNI;
c) surat permohonan kepala oditur militer/kepala oditur militer tinggi kepada Papera;
d) surat jawaban Papera atas saran pendapat hukum (SPH) kepala oditur militer/kepala oditur militer tinggi;
e) SPH kepala oditur militer/kepala oditur militer tinggi;
f) berita acara pendapat kepala oditur militer/ kepala oditur militer tinggi; dan

g) berkas perkara dari penyidik (polisi militer).

f. Arsip

1) Register Elektronik.

a) Register perkara (diunggah ke SIPP) terdiri dari:

(1) register induk perkara;
(2) register Tapkim;
(3) register juktera;
(4) register Tapsid;
(5) register himpunan putusan; dan
(6) register perkara yang diputus.

b) Penutupan register induk perkara dilakukan pada setiap akhir bulan, ditandatangani oleh petugas register dan panitera, dengan perincian sebagai berikut:

(1) Sisa bulan lalu : ..... perkara
(2) Masuk bulan ini : ..... perkara
(3) Putus : ..... perkara
(4) Sisa bulan ini : ..... perkara
(5) Sudah dikirim : ..... perkara
(6) Belum dikirim : ..... perkara
(7) Sudah diminutasi : ..... perkara
(8) Belum diminutasi : ..... perkara
(9) Sudah diunggah : ..... perkara
(10) Belum diunggah : ..... perkara

c) Penutupan register induk perkara dilakukan pada setiap akhir tahun, ditandatangani oleh panitera dan Kepala Pengadilan Militer Utama, dengan perincian sebagai berikut:

(1) Sisa tahun lalu : ..... perkara
(2) Masuk tahun ini : ..... perkara
(3) Putus : ..... perkara
(4) Sisa tahun ini : ..... perkara
(5) Sudah dikirim : ..... perkara
(6) Belum dikirim : ..... perkara
(7) Sudah diminutasi : ..... perkara
(8) Belum diminutasi : ..... perkara
(9) Sudah diunggah : ..... perkara
(10) Belum diunggah : ..... perkara

d) Penutupan register lainnya dilakukan pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh petugas register dan panitera; sedangkan penutupan pada akhir tahun ditandatangani oleh panitera dan Kepala Pengadilan Militer Utama;

e) Register yang dicetak dari aplikasi SIPP dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual.

2) Arsip perkara

Penanganan arsip perkara sama dengan pengadilan militer/pengadilan militer tinggi, dengan penyesuaian seperlunya.

g. Laporan

1) Guna memperoleh gambaran tentang kegiatan-kegiatan badan peradilan militer, dipandang perlu untuk dibuat laporan;

2) Laporan berkala dibuat setiap bulan, triwulan dan tahunan;

3) Laporan Tahunan memuat hal-hal sebagai berikut:

a) laporan keadaan perkara;

b) laporan kinerja hakim dan panitera; dan

c) laporan keuangan.

4) Laporan dibuat oleh Kepala Pengadilan Militer Utama untuk dilaporkan kepada Dirjen Badilmiltun.

3. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir Sengketa Kewenangan Mengadili

a. Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

1) antar pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan militer tinggi yang berlainan;

2) antar pengadilan militer tinggi; dan

3) antar pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer (tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa prajurit yang pangkatnya berbeda, yaitu ada kapten ke bawah bersama-sama mayor ke atas).

b. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara pada Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sama dengan petunjuk pelaksanaan pada pengadilan militer tinggi dengan penyesuaian seperlunya;

c. Pencatatan administrasi perkara dilakukan oleh panitera muda pidana;

d. Penyimpanan berkas yang sudah selesai dilakukan oleh panitera muda hukum, sedangkan penyimpanan berkas perkara yang masih berjalan dilakukan oleh panitera muda pidana;

e. Laporan tersebut dikirimkan ke Ditjen Badilmiltun.

II. Teknis Pemeriksaan

A. Teknis Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa

a. Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa suatu perkara termasuk wewenangnya, kepala pengadilan menetapkan majelis hakim dan panitera menunjuk panitera pengganti yang akan menyidangkan perkara;

b. Majelis hakim setelah menerima berkas perkara mempelajari berkas perkara, selanjutnya ketua majelis menetapkan hari sidang dengan perintah kepada oditur militer/oditur militer tinggi untuk menghadirkan terdakwa/para terdakwa, para saksi, ahli dan barang bukti.

2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

a. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah berkas perkara diterima.

3. Pemeriksaan Dengan Acara Khusus

a. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran;

b. Ketentuan acara pemeriksaan di sidang pengadilan dan acara pemeriksaan biasa dalam Undang-Undang RI Nomor

31 Tahun 1997 tentang peradilan militer berlaku sepanjang ketentuan dimaksud tidak bertentangan dengan acara pemeriksaan khusus;

c. Terhadap putusan pengadilan militer pertempuran, terdakwa atau oditur militer pertempuran hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

4. Pemeriksaan Dengan Acara Koneksitas

a. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila dalam keadaan tertentu menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;

b. Apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;

c. Apabila diperiksa dan diadili di peradilan umum, maka ketua majelis adalah hakim dari peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan secara berimbang dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;

d. Apabila diperiksa dan diadili di peradilan militer, maka ketua majelis adalah hakim dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan hakim anggota masing-masing ditetapkan secara berimbang dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

B. Prinsip Pemeriksaan Sidang

1. Sidang terbuka untuk umum, kecuali terhadap perkara yang mempunyai muatan kesusilaan, perkara anak korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan rahasia militer dan/atau rahasia negara, ketua majelis menyatakan pemeriksaan dilakukan secara tertutup;

2. Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa/para terdakwa kecuali dalam perkara desersi, korupsi yang terdakwa/para terdakwanya tidak diketemukan, dalam hal

terdakwa/para terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa/para terdakwa *(in absentia)*;

3. Dalam pelanggaran lalu lintas putusan dapat dijatuhkan meskipun terdakwa/para terdakwa tidak hadir di persidangan;
4. Ketua majelis memimpin jalannya persidangan dan memelihara tata tertib persidangan;
5. Pemeriksaan dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh saksi, ahli dan terdakwa/para terdakwa;
6. Ketua majelis wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa/para terdakwa, saksi dan/atau ahli memberikan jawaban secara tidak bebas.
7. Pemeriksaan perkara di persidangan dapat dimulai dengan pemeriksaan saksi, ahli atau terdakwa/para terdakwa terlebih dahulu menurut pertimbangan ketua majelis.

C. Proses Pemeriksaan Persidangan

1. Tata Ruang, Waktu dan Pakaian Sidang
   a. Ruang sidang pengadilan diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan kewibawaan pengadilan menurut ketentuan di bawah ini:
      1) posisi meja dan kursi hakim serta panitera pengganti terletak kira-kira lebih tinggi 20 cm (dua puluh senti meter) dari tempat oditur militer/oditur militer tinggi, terdakwa, saksi, ahli dan penasihat hukum serta tempat duduk pengunjung sidang;
      2) posisi meja dan kursi panitera pengganti terletak di belakang sisi kanan tempat majelis hakim;
      3) posisi meja dan kursi oditur militer/oditur militer tinggi terletak di sisi kanan depan tempat majelis hakim;
      4) posisi meja dan kursi penasihat hukum terletak di sisi kiri depan tempat majelis hakim;
      5) posisi kursi terdakwa terletak di sisi kanan meja penasihat hukum;
      6) posisi rohaniwan terletak di sudut sebelah kanan tempat panitera pengganti;

7) posisi kursi pemeriksaan terdakwa, saksi atau ahli terletak di depan tempat majelis hakim;
8) tempat duduk saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak di belakang kursi pemeriksaan terdakwa, saksi atau ahli;
9) posisi pengunjung terletak di belakang tempat duduk Saksi yang telah didengar keterangannya dan diberikan penyekat yang tidak mengganggu pandangan dan pendengaran pengunjung sidang;
10) tempat sebagaimana tersebut nomor 1) sampai dengan 6) diberi tanda pengenal dan melekat pada meja masing-masing secara permanen;
11) posisi petugas keamanan sidang di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan tempat lain yang dianggap perlu;
12) di samping kanan meja majelis hakim ditempatkan bendera merah putih dan di samping kiri ditempatkan bendera pengadilan, sedangkan pada dinding bagian atas di belakang meja majelis hakim ditempatkan Lambang Negara; dan
13) Sidang dilakukan di gedung pengadilan. Apabila karena sesuatu hal sidang diadakan di tempat lain, tata letak tempat dapat disesuaikan dengan keadaan.

b. Sidang pengadilan hendaknya dimulai pukul 09.00 waktu setempat;

c. Selama berlangsung sidang, hakim militer, panitera pengganti, oditur militer/oditur militer tinggi, penasihat hukum memakai PDU IV, untuk hakim militer, oditur militer/oditur militer tinggi dan panitera pengganti menggunakan tali kur di bahu kanan, hakim militer menggunakan tali kur berwarna merah dikombinasikan dengan warna hitam, oditur militer/oditur militer tinggi menggunakan tali kur berwarna merah dikombinasikan dengan warna kuning, panitera pengganti menggunakan tali kur berwarna merah dikombinasikan dengan warna biru, sedangkan penasihat hukum dari PNS TNI dan dari luar dinas hukum TNI menggunakan pakaian toga;

d. Dalam hal sidang dilakukan di daerah operasi militer pada saat darurat militer atau darurat perang, maka pakaian seragam sidang dapat disesuaikan dengan yang berlaku di daerah operasi militer, yaitu dengan menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan tali kur;

e. Terhadap terdakwa yang berstatus militer aktif dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan tutup kepala muts harian angkatan dan tidak diperkenankan menggunakan tanda jasa, tanda kehormatan dan tanda keahlian;

f. Terhadap terdakwa yang sudah berstatus purnawirawan tidak diperkenankan menggunakan atribut militer aktif.

2. Tata Tertib Sidang

a. Sebelum persidangan pengadilan tingkat pertama dimulai, panitera pengganti harus menjelaskan pakta integritas kepada terdakwa dan menandatanganinya;

b. Sebelum majelis hakim memasuki ruang sidang, oditur militer/oditur militer tinggi, penasihat hukum, panitera pengganti, rohaniwan dan pengunjung sudah duduk di tempatnya masing-masing;

c. Pada saat majelis hakim memasuki atau meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir diruang sidang berdiri sebagai penghormatan kepada majelis hakim; Untuk itu panitera pengganti dengan mengucapkan ”majelis hakim memasuki/meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri” dan selanjutnya “dipersilahkan duduk kembali”;

d. Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dengan cara memberi penghormatan ke arah majelis hakim;

e. Kecuali petugas keamanan sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak dan alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang; Benda-benda tersebut harus dititipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu;

f. Petugas keamanan pengadilan militer karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak

membawa senjata serta alat atau benda sebagaimana dimaksudkan di atas dan apabila terdapat benda tersebut, maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya;

g. Setelah majelis hakim, oditur militer/oditur militer tinggi dan penasihat hukum menempati tempat duduk masing-masing, sebelum sidang dibuka terlebih dahulu panitera pengganti melaporkan kepada ketua majelis bahwa sidang siap dimulai;

h. Ketua majelis membuka sidang dengan mengetukkan palu 3 (tiga) kali, selanjutnya memerintahkan oditur militer/oditur militer tinggi untuk menghadapkan terdakwa ke ruang sidang, kemudian oditur militer/oditur militer tinggi meneruskan perintah tersebut kepada petugas keamanan sidang;

i. Petugas keamanan sidang membawa masuk terdakwa/para terdakwa, saksi dan ahli ke ruang sidang disertai laporan kepada ketua majelis bahwa petugas siap menghadapkan terdakwa/para terdakwa, saksi dan ahli, kemudian petugas kembali ke tempat semula;

j. Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus atas izin hakim/ketua majelis yang dilakukan sebelum dimulai sidang dan tidak dapat dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum;

k. Pengunjung sidang dilarang berbicara satu sama lain, makan, minum, merokok, membaca koran, tidur, menggunakan telepon seluler dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan mengurangi kewibawaan persidangan;

l. Setiap orang dilarang membuat kegaduhan, bersorak sorai, dan/atau bertepuk tangan yang dapat mengganggu jalannya persidangan serta mengeluarkan ucapan dan/atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau ahli selama persidangan;

m. Setiap orang dilarang menghina hakim/majelis hakim, aparatur pengadilan, saksi dan/atau ahli, dan dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencederai dan/atau

membahayakan keselamatan hakim/majelis hakim, aparatur pengadilan, oditur militer, penasihat hukum, satuan pengaman pengadilan, saksi, ahli, dan/atau pendamping;

n. Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal; dan

o. Apabila sidang ditunda/diskors, ketua majelis memerintahkan oditur militer/oditur militer tinggi agar terdakwa, saksi dan ahli dibawa keluar ruang sidang, selanjutnya oditur militer/oditur militer tinggi meneruskan perintah tersebut kepada petugas keamanan, kemudian ketua majelis menyatakan sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal/waktu yang ditentukan dengan diakhiri ketukan palu 1 (satu) kali.

3. Proses Pemeriksaan

a. Pembukaan Sidang

1) Ketua majelis membuka sidang dengan mengucapkan: ”Sidang pengadilan militer ..... yang bersidang di ..... dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat ..... perkara pidana atas nama terdakwa/para terdakwa ..... pangkat ..... NRP ..... kesatuan ..... pada hari ini ..... tanggal ..... yang dilaksanakan dalam acara pemeriksaan biasa/cepat/khusus/koneksitas saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum”, dengan diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali;

2) Dalam hal terdakwa/para terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, harus disebutkan satu-persatu nama terdakwa/para terdakwa;

3) Setelah ketua majelis memerintahkan agar terdakwa/para terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang, oditur militer memerintahkan kepada petugas keamanan sidang untuk membawa terdakwa/para terdakwa ke ruang sidang dengan pengawalan tetapi dalam keadaan bebas. terdakwa/para terdakwa yang tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah untuk kedua kalinya, diperintahkan untuk dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya;

4) Ketua majelis menanyakan identitas terdakwa/para terdakwa yaitu nama lengkap, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal terdakwa/para terdakwa; selanjutnya ketua majelis mengingatkan terdakwa/para terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

5) Ketua majelis menanyakan kepada terdakwa/para terdakwa tentang kesehatan, mengerti dihadapkan ke persidangan, penahanan, pernah dipidana dalam perkara lain dan apakah didampingi penasihat hukum, apabila terdakwa/para terdakwa didampingi penasihat hukum, selanjutnya ketua majelis meminta agar surat kuasa dan surat perintah (untuk penasihat hukum yang berasal dari lingkungan TNI) atau surat izin Papera (untuk penasihat hukum yang berasal dari luar lingkungan TNI) atau surat izin kepala pengadilan (untuk penasihat hukum yang mendampingi terdakwa sipil dalam persidangan perkara koneksitas) dan penasihat hukum yang mendampingi terdakwa/para terdakwa yang berstatus purnawirawan tidak perlu izin dari Papera dan untuk pendampingan penasihat hukum dari luar institusi TNI wajib melampirkan surat izin beracaranya diserahkan kepada ketua majelis, kemudian ketua majelis mengingatkan terdakwa/para terdakwa berkaitan dengan pakta integritas dalam proses persidangan;

6) Ketua majelis mempersilahkan oditur militer/oditur militer tinggi untuk membacakan surat dakwaan dan memerintahkan kepada terdakwa/para terdakwa untuk berdiri sikap sempurna menghadap majelis hakim guna mendengarkan dakwaan oditur militer/oditur militer tinggi;

7) Setelah surat dakwaan selesai dibacakan, ketua majelis menanyakan kepada terdakwa/para terdakwa apakah ia benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan; Apabila terdakwa/para terdakwa belum mengerti, ketua

majelis memerintahkan oditur militer/oditur militer tinggi menjelaskan hal-hal yang belum dimengerti terdakwa/para terdakwa;

8) Ketua majelis memerintahkan terdakwa/para terdakwa duduk di samping kanan meja penasihat hukum, selanjutnya ketua majelis menanyakan apakah terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum akan mengajukan keberatan (eksepsi), apabila ia mengajukan keberatan (eksepsi) ketua majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/para terdakwa dan/atau penasihat hukum untuk membacakan keberatan (eksepsi)-nya, apabila tidak mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan;
9) Setelah keberatan (eksepsi) penasihat hukum terdakwa/para terdakwa selesai dibacakan, ketua majelis memberikan kesempatan kepada oditur militer/oditur militer tinggi untuk menyampaikan tanggapan terhadap keberatan (eksepsi) tersebut;
10) Setelah mendengar keberatan (eksepsi) dari terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum dan pendapat oditur militer/oditur militer tinggi atas keberatan (eksepsi) dari terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum, ketua majelis menunda sidang untuk melakukan musyawarah hakim guna mengambil putusan;
11) Setelah ketua majelis membuka sidang kembali yang terbuka untuk umum, ketua majelis mengucapkan putusan sela;
12) Dalam hal majelis hakim menyatakan keberatan (eksepsi) terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum ditolak, sidang dilanjutkan walaupun terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum mengajukan perlawanan atas putusan sela (dapat disatukan dengan upaya hukum bandingnya);
13) Jika majelis hakim dalam putusan sela menyatakan keberatan (eksepsi) terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum diterima, perkara tidak diperiksa lebih lanjut; Apabila oditur militer/oditur militer tinggi mengajukan

perlawanan, pengadilan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perlawanan diterima, harus sudah meneruskan perkara perlawanan kepada pengadilan tingkat banding;

14) Dalam hal keberatan (eksepsi) terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum ditolak dalam putusan sela sidang dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum melakukan perlawanan dan diajukan bersama-sama dengan permohonan banding atas putusan sela tersebut, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah menerima perkara, pengadilan tingkat banding apabila dalam putusannya mengabulkan perlawanan terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum, maka berkas perkara dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama;

15) Pemeriksaan perkara dilanjutkan setelah keluar putusan pengadilan tingkat banding yang menyatakan membatalkan putusan sela atau dengan kata lain menolak keberatan (eksepsi) dari terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum;

16) Dalam hal penundaan sidang, ketua majelis menyatakan: ”Sidang pengadilan militer ..... yang bersidang di ..... dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat ..... perkara pidana atas nama terdakwa/para terdakwa ..... pangkat ..... NRP ..... kesatuan ..... pada hari ..... tanggal ..... saya nyatakan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari ..... tanggal .....”, diikuti ketukan palu 1 (satu) kali;

17) Dalam hal pembukaan sidang lanjutan, ketua majelis menyatakan : ”Sidang lanjutan pengadilan militer ..... yang ..... bersidang di ..... dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat ..... perkara pidana atas nama terdakwa/para terdakwa ..... pangkat ..... NRP ..... kesatuan ..... pada hari ..... tanggal ..... yang dilaksanakan dalam acara pemeriksaan biasa/cepat/khusus/koneksitas saya nyatakan dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum”, diikuti ketukan palu 1 (satu) kali;

18) Jika terdapat lebih dari seorang terdakwa dan tidak semuanya hadir, pemeriksaan terhadap terdakwa/para terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan;

19) Dalam perkara yang mengandung muatan kesusilaan/anak korban/rahasia negara/rahasia militer, setelah dibacakan surat dakwaan dan sebelum pemeriksaan saksi (anak)/ ahli / terdakwa / para terdakwa, ketua majelis menyatakan "untuk keperluan pemeriksaan, sidang dinyatakan tertutup untuk umum" diikuti ketukan palu 1 (satu) kali;

20) Dalam hal perkara desersi yang terdakwanya pernah diperiksa oleh penyidik, selanjutnya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi atau yang terdakwanya tidak pernah diperiksa oleh penyidik karena sejak awal tidak diketemukan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 5 (lima) bulan berturut- turut sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah yang dikuatkan dengan surat keterangan (*relaas)* dari komandan/kepala kesatuannya tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, ketua majelis menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara *in absentia* dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.

b. Pemeriksaan Saksi

1) Sebelum saksi dihadapkan dan diperiksa persidangan dilakukan penentuan urutan terhadap para saksi, yaitu sebagai berikut:

a) dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa/para terdakwa, yang tercantum dalam berita acara penyidikan (BAP) atau yang diminta oleh terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum atau oditur militer/oditur militer tinggi, selama berlangsungnya persidangan atau sebelum putusan dijatuhkan, majelis hakim/hakim wajib mendengar keterangan saksi tersebut;

b) tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam

menentukan jumlah saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir di persidangan, dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa/penasihat hukum untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan, hakim dapat melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan;

c) jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan; Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang; dan

d) dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah serta ketua majelis mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka ketua majelis dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

2) Ketua majelis memerintahkan terdakwa duduk di sebelah kanan penasihat hukum, selanjutnya menanyakan kepada oditur militer/oditur militer tinggi apakah saksi yang dipanggil telah hadir;

3) Saksi dihadapkan ke depan sidang seorang demi seorang menurut pertimbangan ketua majelis, termasuk mempertimbangkan apakah saksi korban atau saksi lainnya yang akan didengar keterangannya terlebih dahulu;

4) Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan wajib didengar keterangannya dan saksi menghadap ke depan sidang dengan diantar oleh petugas/pengawal sidang;

5) Setelah mendengar pendapat terdakwa/para terdakwa/ penasihat hukum untuk menghadirkan saksi tambahan

yang dipandang perlu untuk pembelaan, demikian juga oditur militer/oditur militer tinggi untuk kepentingan penuntutan;

6) Dalam hal saksi atau ahli yang dihadirkan oleh oditur militer/oditur militer tinggi, ketua majelis memberikan kesempatan pertama kepada oditur militer/oditur militer tinggi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli, selanjutnya kepada penasihat hukum dan terakhir kepada oditur milter/oditur militer tinggi untuk memperjelas jawaban yang diberikan kepada penasihat hukum, demikian juga sebaliknya untuk saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum;
7) Dalam hal diperlukan, majelis hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh oditur militer/oditur militer tinggi/penasihat hukum kepada saksi atau ahli.
8) Ketua majelis dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi atau ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
9) Ketua majelis menjaga supaya tidak diajukan pertanyaan yang tidak dibenarkan antara lain:
   a) bersifat menjerat;
   b) mempengaruhi;
   c) bertentangan dengan kehormatan prajurit;
   d) tidak ada kaitannya dengan perkara;
   e) merendahkan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum; dan
   f) tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun.
10) Ketua majelis menanyakan kepada saksi tentang:
   a) identitas yaitu nama lengkap, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal saksi;
   b) apakah saksi kenal dengan terdakwa/para terdakwa sebelum terdakwa/para terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan;

c) apakah saksi ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan terdakwa/para terdakwa;

d) apakah saksi adalah suami atau istri dari terdakwa/para terdakwa meskipun sudah bercerai;

e) apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa/para terdakwa; dan

f) kehendak saksi apakah masih tetap mengajukan pengaduan atau akan mencabut pengaduan (dalam perkara delik aduan).

11) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianut (kecuali undang-undang menentukan lain); Pengambilan sumpah dilakukan oleh rohaniwan atau oleh ketua majelis dengan kata-kata:

Islam : ”WALLOHI (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama terdakwa/para terdakwa ..... (sebutkan nama lengkap, pangkat, NRP, kesatuan) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya“.

Kristen : ”Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama terdakwa/para terdakwa ..... (sebutkan nama lengkap, pangkat, NRP, kesatuan) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. “Semoga Tuhan menolong saya”.

Hindu : “Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama terdakwa/para terdakwa ..... (sebutkan nama lengkap, pangkat, NRP, kesatuan) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. “Om Shanti, Shanti, Shanti Om”.

Budha : “Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama terdakwa/para

terdakwa ..... (sebutkan nama lengkap, pangkat, NRP, kesatuan) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".

12) Ahli mengucapkan sumpah atau janji dengan kata-kata sebagai berikut: "Saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama terdakwa/para terdakwa ..... (sebutkan nama lengkap, pangkat, NRP, kesatuan) akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya".

    Bagi ahli yang beragama Islam dimulai dengan "WALLOHI" atau "DEMI ALLAH".

    Bagi yang beragama Kristen diakhiri dengan kata-kata "SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA".

    Bagi yang beragama Hindu diawali "OM ATAH PARAMA WISESA"dan bagi yang beragama Budha diawali dengan "DEMI SANG HYANG ADI BUDHA".

    Apabila pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli mengucapkan sumpah/janji sekali lagi setelah memberikan keterangan.

13) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan saksi atau ahli tersebut dengan penetapan ketua majelis dapat disandera di rumah tahanan militer paling lama 14 (empat belas) hari.

14) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut sudah telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau mengucapkan sumpah/janji, maka keterangan yang sudah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

15) Ketua majelis harus mengingatkan kepada saksi untuk memberikan keterangan tentang kejadian yang sebenarnya, yaitu kejadian yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi.

16) Ketua majelis dan hakim anggota dapat menanyakan kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu

untuk mendapatkan kebenaran materiil.

17) Setelah seorang saksi selesai memberikan keterangan, ketua majelis menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi tersebut, setelah terdakwa memberikan tanggapannya, ketua majelis dapat menanyakan kepada saksi tentang tanggapan terdakwa tersebut.

18) Setelah seorang saksi selesai memberikan keterangan, saksi tetap hadir di sidang, kecuali jika ketua majelis memberi izin untuk meninggalkan ruang sidang, izin itu tidak diberikan jika oditur militer/oditur militer tinggi atau terdakwa/penasihat hukum mengajukan permintaan supaya Saksi tetap menghadiri sidang.

19) Sesudah saksi memberi keterangan, terdakwa atau penasihat hukum atau oditur militer/oditur militer tinggi dapat mengajukan permintaan kepada ketua majelis, supaya diantara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh ketua majelis untuk didengar keterangannya baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.

20) Pemeriksaan dilakukan secara terus-menerus kecuali jika terdapat alasan tertentu dan ketua majelis memandang perlu untuk menundanya.

21) Selama sidang berlangsung dan sebelum dijatuhkan putusan, oditur militer/oditur militer tinggi atau terdakwa/para terdakwa/penasihat hukum dapat mengajukan permintaan kepada ketua majelis agar seseorang dipanggil ke depan sidang untuk didengar keterangannya sebagai saksi (tambahan) yang memberatkan/merugikan ataupun meringankan/ menguntungkan terdakwa dengan disertai alasannya atau keterangan-keterangan apa yang ingin didengar dari saksi tersebut.

22) Ketua majelis wajib mempertimbangkan permintaan tersebut di atas; apabila ketua majelis berpendapat bahwa permintaan itu tidak mempunyai alasan yang

kuat, ketua majelis harus menjelaskan bahwa panggilan kepada orang yang bersangkutan tidak perlu atau tidak relevan dengan memberikan alasannya.

23) Saksi yang tidak dapat hadir di sidang karena meninggal dunia atau ada halangan yang sah atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggal/kediamannya atau sebab lain karena kepentingan negara, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan permulaan dibacakan di depan sidang.

24) Keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah dalam pemeriksaan permulaan, sama nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan di depan sidang.

25) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi lain yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah.

26) Apabila keterangan saksi di sidang diduga palsu, ketua majelis memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

27) Jika saksi tetap bertahan pada keterangannya, ketua majelis karena jabatannya atau atas permintaan oditur militer/oditur militer tinggi atau terdakwa/para terdakwa, dapat memberi perintah agar saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu; Dalam hal tersebut ketua majelis dapat memerintahkan kepada oditur militer/oditur militer tinggi agar saksi tersebut ditahan dengan penetapan selama 14 (empat belas) hari.

28) Dalam hal yang demikian oleh panitera pengganti segera dibuatkan berita acara sidang yang memuat keterangan saksi yang disangka palsu dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi itu adalah palsu; berita acara tersebut ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti, kemudian diserahkan kepada

oditur militer/oditur militer tinggi untuk diselesaikan lebih lanjut; ketua majelis apabila perlu menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

29) Jika saksi atau terdakwa tidak memahami bahasa indonesia, bisu atau tuli, ketua majelis dapat menunjuk seorang juru bahasa/penerjemah untuk terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji, menurut agama yang dianutnya.

Lafal sumpah juru bahasa/penerjemah:

"Bahwa saya sebagai juru bahasa/penerjemah dalam pemeriksaan tingkat ..... perkara pidana atas nama terdakwa /para terdakwa (sebutkan nama lengkap, pangkat, NRP, kesatuan) akan menerjemahkan dengan benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya".

c. Pemeriksaan Ahli

1) Majelis hakim dalam memeriksa dan menilai keterangan ahli di persidangan menguji:
   a) kesesuaian dengan ilmu pengetahuan dan diterima oleh komunitas ilmu pengetahuan terkait;
   b) adanya publikasi yang telah digunakan sebagai rujukan di komunitas ilmu pengetahuan; dan/atau
   c) telah terdapat peninjauan oleh rekan sejawat *(peer review)* mengenai teori dan metode ilmiah yang digunakan.
2) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para ahli, ketua majelis/hakim dapat meminta dihadirkan ahli lain atau menggunakan pendapat ahli yang dianggap benar dengan memberikan alasannya dalam pertimbangan hukum.
3) Seorang ahli memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di persidangan.
4) Majelis hakim memeriksa dan menilai keahlian seorang ahli dengan memperhatikan:
   a) disiplin ilmu ahli yang dibuktikan melalui pendidikan formal, ijazah akademis (minimal strata 2), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan

khusus, dan/atau pengalaman;

b) karya ilmiah atau penelitian relevan; dan/atau

c) keaktifan mengikuti seminar atau lokakarya yang tercantum dalam daftar riwayat hidup.

5) Dalam hal ahli diajukan ke pengadilan berdasarkan pemeriksaan dan/atau penelitian lapangan, pendapat ahli harus didasarkan atas fakta yang valid dan relevan.

6) Orang yang memiliki keahlian khusus berdasarkan kearifan lokal yang diperoleh dari pengalamannya dapat diminta pendapatnya di persidangan.

d. Pemeriksaan Terdakwa

1) Untuk pemeriksaan, terdakwa/para terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan; Pertanyaan kepada terdakwa/para terdakwa adalah hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa/para terdakwa atau keterangan saksi khususnya jika terdakwa/para terdakwa tidak sependapat dengan keterangan saksi tentang fakta yang terjadi;

2) Apabila dalam suatu perkara terdapat lebih dari seorang terdakwa, maka ketua majelis dapat mengaturnya menurut cara yang dipandangnya baik, yaitu:

a) memeriksa terdakwa seorang demi seorang dengan dihadiri oleh terdakwa lainnya; dan

b) memeriksa seorang terdakwa tanpa dihadiri terdakwa lainnya; Terdakwa yang tidak sedang didengar keterangannya diperintahkan untuk dibawa ke luar ruang sidang.

3) Ketua majelis menanyakan kepada terdakwa/para terdakwa hal yang dipandang perlu untuk memperoleh kebenaran materiil.

4) Ketua majelis memberikan kesempatan kepada hakim anggota, oditur militer/oditur militer tinggi dan penasihat hukum secara bergantian untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa/para terdakwa, apabila terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, pertanyaan penasihat hukum hanya ditujukan kepada terdakwa/para terdakwa yang memberikan kuasa khusus kepadanya.

5) Ketua majelis dapat memberikan kesempatan kepada oditur militer/oditur militer tinggi dan penasihat hukum, untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa/para terdakwa dengan tidak mengurangi haknya untuk menolak pertanyaan yang tidak diperbolehkan dengan memberikan alasannya.

6) Ketua majelis menjaga supaya tidak diajukan pertanyaan yang tidak dibenarkan antara lain:
   a) bersifat menjerat;
   b) mempengaruhi;
   c) bertentangan dengan kehormatan prajurit;
   d) tidak ada kaitannya dengan perkara;
   e) merendahkan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum; dan
   f) tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun.

e. Pemeriksaan Barang Bukti

1) Setelah pemeriksaan semua saksi, ahli dan terdakwa/para terdakwa selesai, ketua majelis memperlihatkan kepada terdakwa/para terdakwa dan apabila perlu juga kepada para saksi segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu serta menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkara untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwanya.

2) Bila dipandang perlu barang bukti dapat juga diperlihatkan sebelum pemeriksaan semua saksi, ahli dan terdakwa/para terdakwa selesai.

3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, ketua majelis membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara yang bersangkut paut dengan barang bukti kepada terdakwa/para terdakwa dan/atau saksi, selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

4) Jika ada sangkut pautnya dengan saksi tertentu, barang bukti itu diperlihatkan dan ditanyakan juga kepada saksi yang bersangkutan.

f. Pemeriksaan Setempat

1) Dalam hal untuk memberikan keyakinan dan kejelasan terhadap perkara yang sedang diperiksa, majelis hakim dapat mengadakan pemeriksaan setempat.

2) Pemeriksaan setempat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a) Ketua majelis membuka sidang lanjutan dengan mengetuk palu 1 (satu) kali, setelah terdakwa/ para terdakwa masuk ke ruang sidang dan duduk di samping kanan penasihat hukum, kemudian ketua majelis menyampaikan kepada oditur militer/oditur militer tinggi dan terdakwa/para terdakwa atau penasihat hukum bahwa ketua majelis memandang perlu dilakukan pemeriksaan setempat;

b) Ketua majelis, kemudian menskors sidang dengan mengucapkan ”Untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat, maka sidang saya skors”, diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali;

c) Majelis hakim, panitera pengganti, oditur militer/oditur militer tinggi, penasihat hukum, terdakwa/para terdakwa dan saksi (jika diperlukan) meninggalkan ruang sidang dan berangkat menuju ke tempat yang akan dilaksanakan pemeriksaan setempat;

d) setelah berada di tempat yang akan dilaksanakan pemeriksaan setempat, ketua majelis mencabut skors dengan mengucapkan ”Skors saya cabut” tanpa mengetukkan palu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim;

e) apabila pemeriksaan setempat selesai, ketua majelis menutup dengan mengucapkan ”Pemeriksaan setempat selesai, sidang saya skors” tanpa mengetuk palu; Kemudian majelis hakim, panitera pengganti, oditur militer/oditur militer tinggi, penasihat hukum, terdakwa/para terdakwa dan saksi kembali ke ruang sidang; dan

f) setelah sampai di ruang sidang dan duduk di tempat masing-masing, ketua majelis mencabut skors dengan mengucapkan ”Skors saya cabut dan sidang dilanjutkan” dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.

3) Panitera pengganti mencatat seluruh kegiatan persidangan baik yang berada di ruang sidang maupun pada saat pemeriksaan setempat ke dalam berita acara sidang dan segera disampaikan kepada ketua majelis guna menyusun putusan.

g. Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik

1) Apabila ketua majelis berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa/para terdakwa, saksi, ahli, barang bukti dan alat bukti lainnya telah selesai, ketua majelis menyatakan pemeriksaan selesai diikuti ketukan palu 1 (satu) kali, kemudian memberikan kesempatan kepada oditur militer/oditur militer tinggi untuk membacakan tuntutannya, untuk perkara yang mengandung muatan kesusilaan atau korban anak atau perkara yang berkaitan dengan rahasia militer atau rahasia negara, sebelum memberikan kesempatan kepada oditur militer/oditur militer tinggi membacakan tuntutan, ketua majelis menyatakan kembali “Sidang terbuka untuk umum” dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.

2) Apabila oditur militer/oditur militer tinggi belum dapat menyampaikan tuntutan, sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada oditur militer/oditur militer tinggi menyusun tuntutan, demikian halnya kepada penasihat hukum atau terdakwa/para terdakwa, jika diminta, diberikan waktu yang sama dengan waktu yang diberikan kepada oditur militer/oditur militer tinggi.

3) Pada saat oditur militer/oditur militer tinggi membacakan tuntutan dengan sikap berdiri, terdakwa/para terdakwa berdiri sikap sempurna menghadap ketua majelis, kecuali jika ketua majelis menentukan lain, setelah selesai membacakan tuntutan, oditur militer/oditur militer tinggi menyerahkan tuntutannya kepada ketua majelis dan

terdakwa/para terdakwa atau penasihat hukumnya, masing-masing 1 (satu) eksemplar.

4) Ketua majelis memberi kesempatan kepada terdakwa/para terdakwa dan/atau penasihat hukum menanggapi tuntutan oditur militer/oditur militer tinggi, pembelaan (pledoi)/permohonan (*clementie*) dibacakan oleh terdakwa/para terdakwa di hadapan ketua majelis dengan posisi berdiri, apabila pembelaan (pledoi)/permohonan (*clementie*) dibacakan penasihat hukum dalam posisi berdiri, maka terdakwa/para terdakwa duduk di sebelah kanan meja penasihat hukum. Setelah selesai dibacakan, naskah pembelaan (pledoi)/permohonan (*clementie*) diserahkan kepada ketua majelis dan oditur militer/oditur militer tinggi, masing-masing 1 (satu) eksemplar.

5) Terhadap pembelaan dari terdakwa/para terdakwa atau penasihat hukum, oditur militer/oditur militer tinggi dapat mengajukan jawaban (replik); Selanjutnya terdakwa/para terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan tanggapan atas jawaban oditur militer (duplik).

6) Setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka ketua majelis menyatakan pemeriksaan ditutup diikuti ketukan palu 1 (satu) kali, kemudian menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil putusan.

7) Ketua majelis karena jabatannya maupun atas permintaan oditur militer/oditur militer tinggi, terdakwa/para terdakwa atau penasihat hukum dapat membuka sidang sekali lagi untuk menampung fakta tambahan sebagai bahan musyawarah hakim.

h. Musyawarah Majelis Hakim

1) Musyawarah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

2) Ketua majelis dalam pelaksanaan musyawarah majelis hakim memberikan kesempatan kepada hakim yang termuda sampai hakim yang tertua untuk memberikan

pandangan, pendapat dan saran, disusul oleh ketua majelis memberikan pandangan, pendapat dan saran pada urutan terakhir, Pendapat tersebut harus disertai pertimbangan dan alasannya.

3) Ketua majelis mengupayakan agar putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat. Apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a) putusan diambil dengan suara terbanyak; dan
   b) apabila ketentuan tersebut pada huruf a) tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa/para terdakwa.
4) Apabila tidak tercapai mufakat bulat, pendapat berbeda dari salah seorang majelis hakim dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut dan dalam hal musyawarah hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat *dissenting opinion* (DO) atau *concurring opinion* (CO), pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
5) Apabila majelis hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa/para terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa/para terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.
6) Apabila majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa/para terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa/para terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
7) Dalam hal terdakwa/para terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan, namun hakim menilai perbuatan terdakwa/para terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin militer dan atas perkara tersebut terdakwa/para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, maka hakim

dengan pertimbangannya dapat memutus mengembalikan perkara kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin militer.

8) Apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

i. Sistematika Putusan

1) nomor putusan;
2) kepala putusan/Irah-irah (DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA);
3) identitas terdakwa/para terdakwa;
4) riwayat penahanan*;
5) tuntutan pidana;
6) pembelaan (*clementie*)*;
7) replik*;
8) duplik *;
9) surat dakwaan;
10) eksepsi*;
11) tanggapan eksepsi*;
12) putusan sela*;
13) pemeriksaan saksi;
14) pemeriksaan ahli*;
15) pemeriksaan terdakwa/para terdakwa;
16) pemeriksaan barang bukti;
17) fakta hukum;
18) pertimbangan hukum;
19) pembuktian;
20) pernyataan kesalahan terdakwa/para terdakwa;

Catatan* : (jika ada)

21) keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
22) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan;
23) kualifikasi dan pemidanaan;
24) status tahanan terdakwa/para terdakwa;
25) penetapan pengurangan masa tahanan;
26) penentuan status barang bukti;
27) biaya perkara;

28) hari dan tanggal musyawarah serta putusan; dan
29) nama majelis hakim, oditur militer/oditur militer tinggi, panitera pengganti, dan/atau penasihat hukumnya;

Untuk putusan yang bukan pemidanaan memuat:

1) pernyataan bahwa terdakwa/para terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
2) perintah supaya terdakwa/para terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
3) perkara pidana biasa yang terdakwa/para terdakwa tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, berkas perkaranya tidak dapat dikembalikan kepada oditur militer/oditur militer tinggi, dan apabila terdakwa/para terdakwa sudah berulang kali dipanggil tetapi tidak datang maka perkara diputus dengan amar "Penuntutan oditur militer/oditur militer tinggi tidak dapat diterima".

j. Pengucapan Putusan Pengadilan

1) Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pada waktu putusan pemidanaan, pembebasan, pelepasan diucapkan, harus diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali.
2) Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti seketika setelah putusan diucapkan; Hal ini berlaku pula untuk putusan sela.
3) Apabila terdakwa/para terdakwa dipidana, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa/para terdakwa dan apabila terdakwa/para terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum atau pidana mati, atau pidana seumur hidup biaya perkara dibebankan kepada negara.
4) Setelah putusan diucapkan, ketua majelis wajib memberitahukan kepada terdakwa/para terdakwa dan oditur militer/oditur militer tinggi tentang haknya, yaitu:
   a) hak segera menerima atau menolak putusan;

b) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan; Bila tenggang waktu tersebut telah lewat dan terdakwa/para terdakwa tidak menyatakan sikap /pendapatnya, maka terdakwa/para terdakwa dianggap menerima;

c) hak untuk mengajukan grasi apabila menerima putusan dalam hal terdakwa/para terdakwa dijatuhi pidana serendah-rendahnya 2 (dua) tahun atau dijatuhi pidana mati;

d) hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan;

e) hak mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan;

5) Apabila sidang pengadilan akan ditutup karena pemeriksaan dan proses pengadilan telah selesai, ketua majelis mengucapkan : ”Sidang pengadilan militer ..... yang bersidang di ..... dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat ..... perkara pidana atas nama terdakwa/para terdakwa ..... pangkat ..... NRP ..... kesatuan ..... tanggal ..... saya nyatakan selesai dan ditutup“ dengan diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali;

6) Petikan putusan diberikan kepada terdakwa/para terdakwa atau penasihat hukumnya dan oditur militer/oditur militer tinggi seketika setelah putusan diucapkan; Salinan putusan diberikan kepada terdakwa/para terdakwa, Papera, oditur militer/oditur militer tinggi, polisi militer, Ankum, sedangkan kepada terdakwa/para terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan;

7) dalam hal perkara desersi yang diperiksa secara *in absentia* telah diputus, panitera memberitahukan putusan melalui 2 (dua) surat kabar yang terbit di daerah hukum pengadilan tingkat pertama atau daerah hukum yang berdekatan, media sosial dan diumumkan

pada papan pengumuman pengadilan; Panitera membuat berita acara penempelan pengumuman putusan pengadilan dan dilekatkan dalam berkas perkara dengan mencantumkan hak-hak terdakwa/para terdakwa, selanjutnya diunggah di *website* pengadilan*;* dan

8) Panitera pengganti membuat BAS yang memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan, juga memuat hal-hal yang penting dari keterangan terdakwa/para terdakwa, saksi dan ahli.

D. Putusan

1. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan dan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa/para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam penjatuhan putusan pemidanaan, berdasarkan Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa/para terdakwa dari dakwaan karena menurut pendapat pengadilan bahwa terdakwa/para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maksud perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa/para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Apabila hakim berpendapat bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa/para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan bagi terdakwa/para terdakwa. Dalam hal terdakwa/para terdakwa diputus bebas, terdakwa/para terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

3. Putusan Lepas

   Putusan lepas dapat diartikan bahwa segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa/para terdakwa dalam surat dakwaan oditur militer/oditur militer tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa/para terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana.

4. Anonimisasi

   Agar memedomani aturan dalam SK KMA nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

E. Penomoran Putusan

1. Putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding mencantumkan nomor yang sama dengan nomor e-Register dari perkara yang tercantum dalam e-Register masing-masing; Pada bagian akhir putusan harus mencantumkan tanggal musyawarah dan tanggal pengucapan putusan.
2. Contoh penulisan nomor Putusan:

   PUTUSAN
   nomor 1-K/PM.I-01/AD/I/2026
   PUTUSAN
   nomor 1-Sus/PM.I-01/AD/I/2026
   PUTUSAN
   nomor 1-P/PM.I-01/AD/I/2026
   PUTUSAN
   nomor 1-K/PMT.I/BDG/AD/I/2026

F. Bantuan Hukum

1. Guna kepentingan pembelaan, terdakwa/para terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum/advokat untuk mendampinginya dalam persidangan.
2. Papera wajib menunjuk penasihat hukum/advokat bagi terdakwa/para terdakwa apabila didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
   a. pidana mati; atau
   b. pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih.
3. Dalam hal majelis hakim mengetahui terdakwa/para terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, sedangkan

terdakwa/para terdakwa pada saat dilakukan penyidikan tidak didampingi penasihat hukum/advokat, maka majelis hakim membuka sidang dan menjatuhkan putusan yang menetapkan penuntutan oditur militer/oditur militer tinggi tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara kepada oditur militer/oditur militer tinggi agar terdakwa/para terdakwa dilakukan pemeriksaan ulang dengan didampingi oleh penasihat hukum/advokat;

4. Apabila di dalam sidang perkara yang wajib didampingi penasihat hukum/advokat ternyata terdakwa/para terdakwa belum didampingi oleh penasihat hukum, maka ketua majelis harus menunda sidang dan melaporkan kepada kepala pengadilan dengan permohonan agar kepala pengadilan memberitahukan kepada Papera bahwa Papera wajib menunjuk penasihat hukum/advokat bagi terdakwa/para terdakwa;

G. Surat Dakwaan

Pada pokoknya dikenal beberapa bentuk surat dakwaan dalam praktik peradilan yaitu:

1. Dakwaan Tunggal

   Dalam dakwaan tunggal, terhadap terdakwa/para terdakwa hanya didakwakan 1 (satu) perbuatan yang memenuhi uraian dalam 1 (satu) pasal dari undang-undang, misalnya: ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai (Pasal 86 ke-1 KUHPM).

2. Dakwaan Kumulatif

   Pada dakwaan ini, terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa/para terdakwa secara bersamaan dan masing-masing berdiri sendiri, dalam hal ini semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan, dakwaan ini dirumuskan dengan menggunakan kata ”dan” antara beberapa pasal tindak pidana yang didakwakan.

   Contoh penulisan dakwaan kumulatif:

   Kesatu : Penganiayaan (Pasal 466 ayat (1) KUHP);

   dan

   Kedua : Pengancaman (Pasal 483 ayat (1) KUHP);

   dan

   Ketiga : Merusak instalasi negara (Pasal 210 huruf a KUHP);

3. Dakwaan Subsidairitas

Pada dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana sejenis yang dirumuskan secara bertingkat (*gradasi*), mulai dari tindak pidana yang ancaman pidananya terberat sampai dengan yang ringan; Pada dakwaan ini yang lebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, apabila terbukti dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, apabila tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya.

Contoh dakwaan subsidairitas :

Primair : Pasal 459 KUHP;
Subsidair : Pasal 458 ayat (1) KUHP;
Lebih Subsidair : Pasal 466 ayat (3) KUHP.

4. Dakwaan Alternatif

Pada dakwaan ini, kepada terdakwa/para terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya; Dakwaan jenis ini, yang dibuktikan hanya salah 1 (satu) saja, yang pembuktiannya dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai fakta yang ditemukan di sidang, Hal ini terjadi karena oditur militer/oditur militer tinggi merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti dalam persidangan, Dakwaan ini dirumuskan dengan menggunakan kata ”atau” antara beberapa pasal tindak pidana yang didakwakan.

Contoh pasal dakwaan alternatif :

Pertama : Pasal 492 KUHP;
atau
Kedua : Pasal 486 KUHP.

5. Dakwaan Kombinasi/Gabungan

Merupakan kombinasi dari dakwaan berbentuk alternatif dengan subsidairitas atau antara dakwaan kumulatif dengan subsidairitas atau antara dakwaan kumulatif dengan alternatif;

Contoh : Dakwaan kombinasi (antara dakwaan alternatif dengan subsidairitas).

Pertama :
Primair : Pasal 459 KUHP;
Subsidair : Pasal 458 ayat (1) KUHP;
atau

Kedua :

Primair : Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Subsidair : Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

6. Perubahan Surat Dakwaan
   a. Oditur militer/oditur militer tinggi dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
   b. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai, dalam hal oditur militer/oditur militer tinggi mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada terdakwa/para terdakwa atau penasihat hukum dan Papera.

H. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi
   1. Dalam hal suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain, orang yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ganti rugi disertai permohonan agar permohonan ganti rugi tersebut diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya, Atas pengajuan perkara ganti rugi tersebut, ketua majelis mengeluarkan penetapan penggabungan perkara gugatan ganti rugi atau mengeluarkan penetapan penolakan penggabungan perkara gugatan ganti rugi.
   2. Penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan paling lambat sebelum oditur militer/oditur militer tinggi mengajukan tuntutan.
   3. Pengadilan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
   4. Atas gugatan ganti rugi, hakim menetapkan hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
   5. Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga sudah mendapat kekuatan hukum tetap.

6. Apabila terjadi penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana, penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
7. Apabila dalam 1 (satu) perkara terdapat lebih dari 1 (satu) orang terpidana, pembayaran ganti rugi dibebankan kepada para terpidana bersama-sama secara berimbang. Yang dimaksud dengan "secara berimbang" adalah pembebanan ganti rugi kepada para terpidana seimbang berdasarkan penilaian hakim.
8. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.
9. Panitera karena jabatannya sebagai juru sita, khusus untuk pelaksanaan putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana.
10. Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti rugi sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

I. Rehabilitasi

Yang dimaksud dengan "pernyataan rehabilitasi" adalah memulihkan hak terdakwa/para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya; Pernyataan rehabilitasi hanya dapat diberikan terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, apabila dalam perbuatan terdakwa/para terdakwa tersebut ada pelanggaran yang tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin militer, maka dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin militer sehingga terdakwa/para terdakwa tidak direhabilitasi.[11]

J. Barang Bukti

1. Majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan kepada oditur militer/oditur militer tinggi untuk menjual lelang suatu benda sitaan dan uang hasil penjualan lelang tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti (dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap

[11] Penjelasan Pasal 189 ayat (4) dan Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi).

2. Apabila perkara sudah diputus, hakim dapat memerintahkan bahwa barang bukti :
   a. dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam putusan;
   b. dirampas untuk negara;
   c. dirampas untuk dimusnahkan;
   d. dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
   e. digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain; atau
   f. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai; Penetapan mengenai penyerahan barang bukti tersebut, misalnya apabila sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain.
4. Penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai syarat apapun dalam hal putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Dalam hal putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan tetapi harus disertai syarat tertentu antara lain barang bukti tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.
5. Peminjaman barang bukti; Sebelum putusan diucapkan hakim dapat meminjamkan barang bukti atas permohonan pinjam pakai dari pemiliknya atau dari siapa benda itu disita dengan membuat perjanjian berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim.

K. Pelaksanaan Putusan

1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh oditur militer/oditur militer tinggi, untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada oditur militer/oditur militer tinggi; Dalam hal tertentu, oditur militer/oditur militer tinggi dapat melaksanakan putusan berdasarkan petikan putusan.
2. Dalam hal terpidana telah dijatuhi pidana penjara atau kurungan,

kemudian dijatuhi pidana penjara atau pidana sejenis sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

3. Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh oleh hakim pengawas dan pengamat dengan bantuan Ankum/komandan satuan.
4. Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan pemeriksaan acara cepat yang pembayaran dendanya harus dilunasi seketika; Apabila terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
5. Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti rugi, pelaksanaannya dilakukan oleh panitera sebagai juru sita menurut tata cara putusan perdata.

L. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan

1. Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilakukan oleh kepala pengadilan yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang hakim atau lebih sebagai hakim pengawas dan pengamat.
2. Hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh kepala pengadilan berdasarkan surat perintah untuk paling lama 2 (dua) tahun.
3. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya termasuk putusan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
4. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan militer serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
5. Pengamatan sebagaimana dimaksud di atas tetap dilaksanakan sesudah terpidana selesai menjalani pidananya.
6. Pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan Ankum/komandan satuan.
7. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim

pengawas dan pengamat kepada kepala pengadilan secara berkala.

8. e-Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud di atas wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh Panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat.[12]

M. Penahanan

1. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di instalasi tahanan militer atau tempat tertentu oleh penyidik atas perintah Ankum, Papera atau ketua majelis atau kepala pengadilan dengan keputusan/penetapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Alasan Penahanan
   a. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terdakwa melarikan diri.
   b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti.
   c. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terdakwa akan mengulangi tindak pidana.
   d. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terdakwa akan membuat keonaran.
3. Penahanan Penyidikan
   a. 20 (dua puluh) hari oleh Ankum;
   b. 180 (seratus delapan puluh) hari maksimal perpanjangan penahanan oleh Papera yang dilakukan secara bertahap masing- masing 30 (tiga puluh) hari;
   c. Sesudah 200 (dua ratus) hari, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
4. Atas permintaan Tersangka, penahanan dapat ditangguhkan oleh Ankum dengan terlebih dahulu mendengar saran polisi militer dan dapat ditangguhkan oleh Papera atas saran oditur militer/oditur militer tinggi dengan persyaratan yang ditentukan;
5. Karena jabatannya, Ankum atau Papera sewaktu-waktu dapat

---

[12] Pasal 262 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SEMA Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamat.

mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan sebagaimana ketentuan pada poin 2.

6. Penahanan Pengadilan Tingkat Pertama
   a. 30 (tiga puluh) hari oleh ketua majelis.
   b. 60 (enam puluh) hari maksimal perpanjangan penahanan oleh kepala pengadilan yang dilakukan secara bertahap masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
   c. Sesudah 90 (sembilan puluh) hari, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
   d. Dalam hal terpenuhi ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penahanan masih dapat diperpanjang sebagai berikut:
      1) 30 (tiga puluh) hari oleh kepala pengadilan militer tinggi untuk perkara yang diperiksa pengadilan militer; dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh kepala pengadilan militer tinggi;
      2) Sesudah 60 (enam puluh) hari tersebut harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan tidak boleh tetap ditahan;
      3) 30 (tiga puluh) hari oleh Kepala Pengadilan Militer Utama untuk perkara yang diperiksa pengadilan militer tinggi, dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Kepala Pengadilan Militer Utama; Sesudah 60 (enam puluh) hari harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan tidak boleh tetap ditahan;
7. Penahanan Tingkat Banding
   a. 30 (tiga puluh) hari oleh ketua majelis.
   b. 60 (enam puluh) hari maksimal perpanjangan penahanan oleh kepala pengadilan yang dilakukan secara bertahap masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
   c. Sesudah 90 (sembilan puluh) hari, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
8. Dalam hal terpenuhi ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penahanan masih dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari oleh Mahkamah Agung untuk perkara yang diperiksa pengadilan militer tinggi maupun yang diperiksa oleh Pengadilan Militer

Utama dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi oleh Mahkamah Agung, sesudah 60 (enam puluh) hari tersebut harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan tidak boleh tetap ditahan.

N. Status Tahanan

1. Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap status tahanan beralih menjadi menjalani pidana dan terdakwa beralih statusnya menjadi terpidana.
2. Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana oditur militer/oditur militer tinggi mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
3. Apabila masa penahanan yang dijalani terdakwa telah mencapai tenggang waktu yang sama dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat banding, maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum seketika itu oleh kepala pengadilan militer tingkat pertama yang memutus perkara tersebut dengan penetapan pembebasan penahanan.
4. Untuk terdakwa yang perkaranya dalam tingkat kasasi dengan habisnya tenggang waktu penahanan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung, maka kepala pengadilan pengaju harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum dengan penetapan pembebasan penahanan dan di input dalam SIPP pada kolom bagian Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
5. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir pengadilan yang melakukan penahanan terhadap Terdakwa wajib mengkoordinasikan dan menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

O. Penangguhan Penahanan

1. Penangguhan penahanan diajukan oleh terdakwa dengan surat jaminan dari Papera.
2. Yang dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan adalah terdakwa.
3. Penangguhan penahanan merupakan kewenangan majelis hakim, setelah mempertimbangkan surat jaminan dari Papera.
4. Dalam hal permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, ketua majelis menerbitkan penetapan penangguhan penahanan.

5. Dalam hal permohonan penangguhan penahanan ditolak, maka hal tersebut diucapkan di persidangan oleh ketua majelis dan dicatat dalam berita acara sidang.
6. Dalam hal terdakwa mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan maka penangguhan penahanan dapat dicabut dan terdakwa/para terdakwa ditahan kembali.
7. Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkannya penetapan perpanjangan penahanan oleh kepala pengadilan militer tinggi, yang mengakibatkan terdakwa keluar demi hukum, maka kepala pengadilan militer harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.
8. Dalam hal terdakwa atau oditur militer/oditur militer tinggi mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke pengadilan militer tinggi/Pengadilan Militer Utama sejak diajukan permohonan banding.
9. Permohonan banding harus segera dilaporkan secara elektronik dan secara manual pada hari itu juga kepada pengadilan militer tinggi/Pengadilan Militer Utama.
10. Kepala pengadilan militer tinggi/Pengadilan Militer Utama karena jabatannya *(ex officio)* berwenang melakukan penahanan.
11. Selama terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
12. Yang berwenang mengeluarkan terdakwa demi hukum dari tahanan adalah kepala pengadilan militer/pengadilan militer tinggi pengaju.
13. Apabila terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.

P. Pembantaran *(Stuiting)*

1. Pembantaran *(Stuitting)* waktu penahanan terdakwa di instalasi tahanan militer/lembaga pemasyarakatan militer dan terdakwa dirawat inap di rumah sakit didasarkan pada surat keterangan dokter rumah sakit.
2. Pembantaran didasarkan pada penetapan ketua majelis, dan terhitung pada saat terdakwa dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit dan berakhir

setelah terdakwa berada kembali dalam instalasi tahanan militer/lembaga pemasyarakatan militer.

Q. Kewajiban Hakim Untuk Mengundurkan Diri

1. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan ketua majelis, salah seorang hakim anggota, oditur militer/oditur militer tinggi, panitera pengganti atau penasihat hukum.
2. Ketua majelis, hakim anggota, oditur militer/oditur militer tinggi, panitera pengganti atau penasihat hukum wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa/para terdakwa.
3. Apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas mereka harus diganti dan apabila tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus, perkara wajib segera disidang ulang dengan susunan majelis hakim yang lain.
4. Tidak seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Dalam hal seorang hakim mengadili suatu perkara sebagaimana dimaksud di atas, hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan oditur militer/oditur militer tinggi, terdakwa/para terdakwa atau penasihat hukum.
6. Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud di atas kepala pengadilan yang berwenang yang menetapkannya.

R. Penyelesaian Perkara yang Terdakwanya Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan

1. Apabila terdakwa/para terdakwa tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, maka ketua majelis meneliti apakah terdakwa/para terdakwa sudah dipanggil secara patut dan sah;
2. Apabila ternyata terdakwa/para terdakwa dipanggil secara tidak patut dan sah, ketua majelis menunda persidangan dan

memerintahkan supaya terdakwa/para terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya; panitera pengganti mencatat hal tersebut dalam BAS;

3. Apabila terdakwa/para terdakwa ternyata sudah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, ketua majelis memerintahkan supaya terdakwa/para terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya; panitera pengganti mencatat hal tersebut dalam BAS;
4. Apabila terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa/para terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan;
5. Panitera pengganti mencatat laporan dari oditur militer/oditur militer tinggi mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3, kemudian menyampaikan kepada ketua majelis;
6. Pemanggilan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara patut dan sah;
7. Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam;
8. Penerimaan surat panggilan dilakukan dengan surat tanda terima;
9. Dalam hal terdakwa/para terdakwa tidak dapat dihadapkan di sidang sesuai penetapan hari sidang karena sudah pindah tempat tinggal disebabkan terdakwa/para terdakwa telah pensiun, dipecat atau melarikan diri, maka ketua majelis dapat meminta oditur militer/oditur militer tinggi untuk mencari terdakwa/para terdakwa di tempat tinggalnya dan/atau di tempat kediaman terakhir, baik secara langsung atau melalui instansi kepolisian, kepala desa, lurah atau ketua lingkungan setempat (RT/RW) dimana diduga terdakwa/para terdakwa bertempat tinggal; Permintaan bantuan tersebut harus disertai identitas lengkap terdakwa/para terdakwa dan foto (bila ada);
10. Apabila sudah dipanggil secara patut dan sah, ternyata terdakwa/para terdakwa tidak hadir tanpa memberikan keterangan yang sah dan upaya pencarian terdakwa/para terdakwa tidak memperoleh hasil yang disertai dengan surat dari instansi terkait di atas yang menyatakan bahwa terdakwa/para

terdakwa tidak ditemukan di daerah hukumnya, serta dalam sidang oditur militer/oditur militer tinggi menyatakan terdakwa/para terdakwa tidak lagi diketahui alamatnya dan tidak dapat menjamin bahwa terdakwa/para terdakwa dapat dihadirkan di persidangan, majelis hakim dapat memutus perkara tersebut dalam bentuk penetapan penuntutan tidak dapat diterima, kecuali perkara tersebut dapat diselesaikan secara *in absentia;*

11. Dalam pertimbangan putusan pengadilan harus diuraikan bahwa terdakwa/para terdakwa telah dipanggil secara patut dan sah 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan bahwa terdakwa/para terdakwa dapat dihadirkan di persidangan; Dalam hal ini amar putusan berbunyi sebagai berikut:

    MENETAPKAN

    Menyatakan:

    a. Penuntutan oditur militer/oditur militer tinggi tidak dapat diterima;
    b. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada oditur militer/oditur militer tinggi (dalam perkara *in absentia* untuk melengkapi BAP tersangka);
12. Setelah dijatuhi putusan tersebut, perkaranya dianggap selesai, baik dalam register maupun laporan dari pengadilan sesuai dengan format laporan.
13. Perkara yang telah diputus “tidak dapat diterima” *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) tidak tunduk pada asas “*nebis in idem*”, sebab pokok perkara belum diperiksa dan diputus.
14. Apabila dikemudian hari terdakwa/para terdakwa diketemukan lagi, perkara tersebut diajukan lagi ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili.
15. Pelaksanaan pelimpahannya tidak perlu dibuat berkas perkara yang baru karena perkaranya sejak semula disimpan di pengadilan cukup dibuat register dengan nomor register yang baru atas perkara tersebut.

S. Penyelesaian Keberatan pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.[13]

1. Pemeriksaan Keberatan
    a. Pemeriksaan keberatan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:
        1) membuka persidangan;
        2) pemeriksaan Identitas pemohon dan termohon;
        3) pembacaan keberatan;
        4) pembacaan tanggapan atas keberatan;
        5) pembuktian pemohon, termohon dan turut termohon; dan
        6) pengucapan penetapan.
    b. Apabila diperlukan, majelis hakim dapat memerintahkan panitera untuk memanggil pihak yang berkepentingan untuk didengar keterangannya.
    c. Dalam proses pemeriksaan keberatan tidak dapat diajukan replik, duplik dan kesimpulan.
    d. Dalam hal pemohon, termohon dan/atau turut termohon tidak hadir pada sidang pertama, ketua majelis memerintahkan untuk memanggil Pemohon, termohon dan/atau turut termohon 1 (satu) kali lagi secara patut dan sah.
    e. Dalam hal pemohon tidak hadir pada sidang berikutnya, permohonan keberatan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.
    f. Dalam hal termohon dan/atau turut termohon tidak hadir pada pada sidang berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemeriksaan permohonan keberatan dilanjutkan sampai dengan dijatuhkannya penetapan.
2. Penetapan
    a. Majelis hakim memutuskan keberatan dalam bentuk penetapan;
    b. Majelis hakim memutus permohonan keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak sidang pertama;
    c. Pembacaan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a

[13] SEMA Nomor 2 Tahun 2022

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:
   1) kepala penetapan disertai dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
   2) identitas pemohon, termohon dan/atau turut termohon;
   3) alasan permohonan yang memuat barang-barang yang dimohonkan;
   4) tanggapan termohon dan/atau turut termohon;
   5) pembuktian;
   6) pertimbangan hukum; dan
   7) amar penetapan.

e. Pemberitahuan penetapan kepada pihak yang tidak hadir dilaksanakan dengan surat tercatat dilampiri dengan salinan penetapan.

f. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para pihak paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan diucapkan.

g. Keberatan dikabulkan apabila pemohon dapat membuktikan bahwa:
   1) pemohon memperoleh hak atas barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/atau penyitaan;
   2) pemohon memperoleh hak atas barang objek permohonan berdasarkan itikad baik;
   3) objek keberatan merupakan barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi; dan
   4) pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa/para terdakwa.

h. Dalam hal majelis hakim mengabulkan permohonan keberatan atas barang yang belum dieksekusi, penetapan menyatakan:
   1) Mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.
   2) Menetapkan secara rinci objek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi.
   3) Memerintahkan negara c.q. Menteri Keuangan untuk:

a) menyerahkan barang yang dirampas kepada pemohon/para pemohon; atau

b) membayar kerugian kepada pemohon/para pemohon sebesar hasil nilai lelang atas barang dimaksud apabila objek barang yang dirampas telah dilelang; atau

c) apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk barang atau barang telah dimusnahkan, maka diganti dengan pembayaran dengan sejumlah uang seharga barang yang telah dirampas atau dimusnahkan berdasarkan perhitungan kantor jasa penilai publik (KJPP).

4) Penetapan ini dilaksanakan tanpa melalui gugatan perdata lagi.

i. Dalam hal keberatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT), apabila penetapan tersebut bertantangan dengan putusan perkara pokok mengenai barang yang dirampas, yang berlaku penetapan.

j. Dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, majelis hakim menolak permohonan keberatan.

T. Upaya Hukum

1. Pemohon, termohon dan/atau turut termohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan atas Keberatan.
2. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau setelah isi penetapan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.
3. Permohonan kasasi wajib disertai memori kasasi yang diajukan bersama dengan pernyataan kasasi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
4. Dalam hal permohonan kasasi tidak disertai dengan memori kasasi, maka panitera pengadilan membuat surat keterangan yang ditujukan kepada kepala pengadilan militer/kepala pengadilan militer tinggi dan kepala pengadilan militer/kepala pengadilan militer tinggi membuat penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

5. Panitera menyampaikan tembusan memori kasasi kepada termohon kasasi dan/atau turut termohon kasasi paling lambat 3 (tiga) hari dan termohon kasasi dan/atau turut termohon kasasi berhak mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah memori kasasi diterima.
6. Panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.
7. Dalam permohonan kasasi, tidak diberikan kesempatan mengajukan tambahan memori kasasi.
8. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu.
9. Dalam hal pemohon mencabut permohonan kasasi, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
10. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak dikirimkan.
11. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
12. Terhadap kasasi dan/atau penetapan atas permohonan keberatan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

U. Pengiriman dan Penyampaian Salinan Putusan

1. Setelah pengadilan pengaju menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari panitera pengadilan wajib memberikan salinan putusan tersebut kepada para pihak.
2. Salinan penetapan pengadilan dan salinan putusan kasasi dapat dibuat dalam bentuk elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Salinan penetapan dan putusan kasasi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

V. Pelaksanaan Penetapan Pengadilan

1. Pelaksanaan penetapan pengadilan yang mengabulkan keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dilaksanakan oleh oditur militer/oditur militer tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap (BHT).
2. Oditur militer/oditur militer tinggi wajib membuat berita acara atas pelaksanaan penetapan pengadilan yang ditandatangani

olehnya, pemohon dan termohon serta tembusannya disampaikan kepada kepala pengadilan militer/kepala pengadilan militer tinggi yang memutus perkara pokok dalam waktu 5 (lima) hari sejak pelaksanaan penetapan.

3. Apabila pengadilan menetapkan permohonan dikabulkan, maka oditur militer/oditur militer tinggi menyerahkan salinan penetapan kepada Kementerian Keuangan.
4. Kementerian Keuangan melaksanakan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
5. Menteri Keuangan memberitahukan pelaksanaan penetapan untuk disampaikan kepada Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pelaksanaan penetapan.

III. Ketentuan Tambahan Mengenai Hukum Materiil dan Hukum Formil bagi Peradilan Militer

A. Peradilan Militer selain berlaku KUHPM juga diterapkan hukum pidana umum termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan hukum pidana materiil lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 KUHPM.

B. Hukum Acara Pidana Militer tetap mendasari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

C. Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur hukum materiil dan hukum formil berkenaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat diterapkan sepanjang yang bersesuaian di lingkungan Peradilan Militer.

D. Pengadilan Militer yang menjatuhkan putusan bebas di tingkat *Judex Factie,* Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.[14]

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

[14] Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

I. ADMINISTRASI PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. PENERIMAAN PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

a. Perkara Gugatan

1) Petugas meja I bertanggung jawab untuk menerima gugatan dan/atau gugatan perlawanan terhadap penetapan *dismissal*.

2) Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran perkara gugatan paling kurang adalah:

a) gugatan atau gugatan perlawanan dalam bentuk *hard copy*;

b) surat kuasa khusus dari penggugat kepada kuasa hukumnya (bila penggugat menguasakan kepada kuasa hukum)[15];

c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan pengganti KTP prinsipal dan kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan serta berita acara sumpah pelantikan advokat;

d) apabila penggugat prinsipal memberikan kuasa kepada kuasa insidentil, maka persyaratan yang harus dilengkapi antara lain:

(1) KTP prinsipal.

(2) KTP penerima kuasa insidentil,

(3) surat kuasa insidentil,

(4) surat izin dari ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil/menerima kuasa secara insidentil.

(5) dokumen pendukung lainnya (seperti kartu

---

[15] Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun)

keluarga, surat keterangan dari kepala desa/lurah dan diketahui camat mengenai hubungan keluarga antara penggugat prinsipal dengan kuasa insidentil).

e) apabila penggugat adalah badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, kelompok masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat rentan (kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat), maka persyaratan yang harus dilengkapi antara lain:
   (1) dokumen akta pendirian dan identitas yang berwenang untuk mewakili badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dokumen akta pendirian dan identitas yang berwenang, daftar periksa (*checklist*) yang disediakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi kelompok masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat rentan;
   (2) kartu advokat kuasa hukum dan berita acara sumpah pelantikan advokat (apabila dikuasakan oleh kuasa hukum).
f) fotokopi surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, kecuali apabila objek sengketa tidak dikuasai oleh penggugat[16];
g) fotokopi bukti telah menempuh upaya administratif (apabila dalam perkara tersebut harus menempuh upaya administratif)[17];
h) data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf g) juga diserahkan dalam bentuk *e-document* dan untuk gugatan/gugatan perlawanan harus dalam format *word office* atau *Rich Text Format* (RTF). Gugatan

---

[16] Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun
[17] Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 tahun 2018.

mencantumkan alamat *e-mail*.

3) Petugas penerima berkas atau dokumen memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*), juga mencocokkan dan memastikan kesamaan data dalam bentuk *e-document* dengan bentuk *hard copy* dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perkara untuk memeriksa jenis perkara dan memberikan catatan terkait kelengkapan berkas.
4) Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan[18] dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), dengan ketentuan:
   a) dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara harus mempertimbangkan jumlah para pihak, jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar;
   b) biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.
5) Pada berkas perkara yang telah lengkap, dibuatkan SKUM rangkap tiga:
   a) lembar pertama untuk penggugat;
   b) lembar kedua untuk kasir;
   c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas gugatan.
6) Penggugat atau kuasanya membayar jumlah uang panjar[19] yang tercantum dalam SKUM melalui rekening pengadilan pada bank pemerintah yang ditunjuk, kemudian bukti setor bank diserahkan kepada kasir pengadilan tata usaha negara.
7) Kasir menandatangani dan membubuhkan stempel lunas serta membukukan panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke dalam buku jurnal keuangan.
8) Khusus perkara prodeo, penggugat wajib menyerahkan

---

[18] Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun
[19] Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun

permohonan dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi[20].

9) Petugas meja II mencatat perkara yang masuk ke dalam register induk perkara.

10) Panitera setelah menerima berkas perkara dari petugas meja II membuat resume gugatan, yang memuat hal sebagai berikut:
    a) tentang subjek gugatan, apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh kuasa;
    b) tentang objek gugatan;
    c) tentang alasan-alasan gugatan;
    d) tentang petitum gugatan;
    e) permohonan penundaan; dan
    f) aspek formal gugatan meliputi:
        (1) kompetensi;
        (2) upaya administratif (jika ada); dan
        (3) tenggang waktu menggugat.

11) Pengisian register perkara harus dilaksanakan dengan tertib, cermat dan tepat waktu berdasarkan jalannya pemeriksaan perkara.

12) gugatan yang telah terdaftar dan dibayar diregister di dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) untuk mendapatkan nomor perkara[21]. Kode penomoran perkara menyesuaikan dengan standarisasi penomoran perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara.

b. Perkara Gugatan secara Elektronik

1) Petugas meja I bertanggung jawab menerima dan memproses pendaftaran gugatan, permohonan, atau upaya hukum perlawanan terhadap penetapan *dismissal* secara elektronik melalui SIP.

2) Dokumen yang wajib diunggah melalui aplikasi *e-court* meliputi:
    a) surat gugatan atau permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya;
    b) surat kuasa khusus yang sah dari penggugat

---

[20] Pasal 60 ayat (1) s.d. ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun
[21] Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun

kepada kuasa hukumnya, apabila penggugat memberikan kuasa untuk beracara[22], atau surat izin kuasa insidentil apabila penggugat menggunakan kuasa insidentil;

c) salinan dokumen identitas diri penggugat berupa KTP atau surat keterangan pengganti KTP, serta bagi kuasa hukum dilampiri kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat yang bersangkutan;

d) akta pendirian badan hukum beserta identitas pengurus yang berwenang mewakili, serta kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat bagi kuasa hukum, apabila penggugat merupakan badan hukum yang beracara melalui kuasa hukum;

e) salinan surat keputusan, penetapan, atau tindakan pejabat tata usaha negara yang menjadi objek sengketa[23] kecuali apabila objek sengketa tidak dikuasai oleh penggugat;

f) salinan dokumen yang menunjukkan bahwa penggugat telah menempuh upaya administratif[24], kecuali ditentukan lain.

3) Data atau berkas sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) sampai dengan huruf f) wajib diunggah melalui aplikasi *e-court* dalam bentuk *e-document*. Gugatan diunggah dalam format *word office*, RTF, atau PDF, dan wajib mencantumkan domisili elektronik berupa alamat *e-mail* dan/atau nomor telepon seluler aktif yang terhubung dengan aplikasi pesan instan (*WhatsApp* atau sejenisnya) yang telah didaftarkan di pengadilan. Gugatan yang diunggah dalam bentuk PDF telah ditandatangani oleh penggugat/kuasa hukumnya.

4) SIP secara otomatis menyediakan fitur penghitungan panjar biaya perkara dan menghasilkan Surat Kuasa

---

[22] Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun
[23] Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun
[24] Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 tahun 2018.

untuk Membayar secara Elektronik (e-SKUM).

5) Khusus perkara prodeo, penggugat wajib mengunggah permohonan dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi (dalam hal penggugat/pemohon telah tercatat pada sistem informasi data penduduk tidak mampu, dokumen tersebut tidak diperlukan).
6) Panitera muda perkara melakukan verifikasi kelengkapan berkas gugatan setelah pembayaran panjar biaya perkara.
7) Panitera muda perkara melakukan validasi berkas gugatan setelah verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
8) Petugas meja I mengunduh (*download*) dokumen yang tersedia di dalam SIP sebagai cadangan data (*backup*), kemudian memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*) sebagai bagian dari penelitian administrasi perkara, serta mencocokkan dan memastikan kesesuaian data dalam bentuk *e-document* dengan berkas fisik (*hard copy*) yang diterima. Selanjutnya, petugas meja I menyusun resume gugatan sebagai instrumen bagi ketua pengadilan dalam proses penetapan *dismissal*.
9) Dokumen yang sudah diunduh (*download*), disusun sebagaimana ketentuan yang berlaku.
10) Pengadilan memproses perkara yang sudah terdaftar secara elektronik terakhir pada pukul 15.00 waktu setempat.
11) Pendaftaran perkara secara elektronik yang dilakukan di luar pukul 15.00 waktu setempat akan diproses dan diregister pada hari kerja berikutnya.
12) Apabila pendaftaran gugatan/permohonan dilakukan pada hari kerja maka tanggal pendaftaran gugatan/permohonan didasarkan pada hari dan tanggal pembayaran biaya perkara secara elektronik.
13) Dalam hal pendaftaran dan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik dilakukan pada hari libur, maka tanggal pendaftaran gugatan/permohonan dihitung pada hari kerja pertama setelah hari libur.

14) Dalam hal penggugat dan/atau tergugat diwakili oleh beberapa orang pengguna terdaftar atau beberapa orang pengguna lain maka penggugat dan/atau tergugat hanya dapat menggunakan satu akun dan satu domisili elektronik.

15) Apabila terjadi penggantian kuasa maka wajib disampaikan secara elektronik kepada kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data perkara yang bersangkutan.

16) Penggantian kuasa harus melampirkan *scan* surat kuasa asli.

17) Gugatan yang telah terdaftar dan dibayar, diregister di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

2. Pendaftaran Perkara Tingkat Banding

a. Perkara Tingkat Banding

1) Petugas meja I menerima pendaftaran permohonan banding.

2) Panitera muda perkara meneliti permohonan banding yang diajukan pembanding terkait dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan secara sah[25]. Apabila hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

3) Panitera menaksir panjar biaya perkara banding[26] yang terdiri dari[27]:

a) biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pendaftaran permohonan banding;

b) biaya Alat Tulis Kantor (ATK);

c) Biaya Pemberitahuan (BP):

(1) BP akta banding;

(2) BP memori banding;

(3) BP kontra memori banding;

---

[25] Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun

[26] Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun

[27] Bagian VII.B.2.d Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perrdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik selanjutnya disebut Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

(4) BP untuk mempelajari berkas bagi Pembanding;
(5) BP untuk mempelajari berkas bagi Terbanding;
(6) BP putusan bagi pembanding;
(7) BP putusan bagi terbanding;
(8) BP pencabutan banding;
(9) biaya panggilan para pihak apabila ada pemeriksaan tambahan.

d) PNBP (sebagaimana ketentuan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya);
e) biaya pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi tata usaha negara;
f) biaya proses pada pengadilan tinggi tata usaha negara;
g) pemberkasan/penjilidan.

4) Biaya-biaya tersebut dituangkan dalam SKUM yang dibuat oleh kasir dan disetorkan oleh pembanding ke bank yang ditunjuk.
5) SKUM dibuat dalam rangkap tiga:
a) lembar pertama untuk pembanding;
b) lembar kedua untuk kasir;
c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan banding.
6) Kasir menandatangani dan membubuhkan stempel lunas pada SKUM, kemudian membukukan panjar biaya banding ke dalam buku jurnal.
7) Apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas, maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara.
8) Permohonan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender harus diberitahukan kepada lawannya.
9) Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku register induk perkara, kemudian salinannya disampaikan kepada

masing-masing lawannya dengan membuat relaas pemberitahuan/penyerahannya.

10) Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi tata usaha negara, panitera membuat relaas pemberitahuan kepada para pihak untuk melihat/mempelajari berkas perkara (*inzage*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan banding dicatat[28].
11) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak permohonan banding dicatat, berkas banding berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi tata usaha negara[29].
12) Biaya proses banding untuk pengadilan tinggi tata usaha negara harus disampaikan melalui bank pemerintah yang telah ditentukan, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
13) Terhadap permohonan banding yang diajukan telah lewat waktu, berkas permohonan banding tetap dikirim dengan disertai surat keterangan panitera.
14) Pencabutan permohonan banding, diajukan kepada ketua pengadilan tata usaha negara dan ditandatangani oleh pembanding, lalu dibuatkan akta pencabutan ditandatangani oleh panitera dan pembanding (apabila pencabutan banding dilakukan oleh kuasa harus diketahui oleh prinsipal, kecuali jika dalam kuasa terdapat klausul pencabutan banding sehingga tanpa perlu diketahui prinsipal) dan diberitahukan kepada pihak lawan.
15) Pencabutan permohonan banding yang berkasnya belum dikirim ke pengadilan tinggi tata usaha negara, berkasnya tidak dikirimkan ke pengadilan tinggi tata usaha negara, selanjutnya dibuatkan akta pencabutan banding.
16) Pencabutan permohonan banding yang berkasnya sudah dikirim ke pengadilan tinggi tata usaha negara,

---

[28] Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun
[29] Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun

akta pencabutan banding harus segera dikirim oleh panitera pengadilan tata usaha negara ke pengadilan tinggi tata usaha negara.

17) Dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

18) Apabila permohonan banding diajukan oleh lebih dari satu pihak, panjar biaya banding hanya dibayarkan oleh pihak yang menyatakan banding pertama kali.

b. Perkara Tingkat Banding secara Elektronik

1) Petugas meja I bertanggung jawab untuk menerima permohonan banding melalui SIP.

2) Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender[30].

3) Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:

a) menerbitkan akta pernyataan banding sesuai dengan tanggal pembayaran biaya banding yang selanjutnya diunggah ke dalam SIP;

b) mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding dalam SIP;

c) memberitahukan permohonan banding kepada terbanding melalui SIP.

4) Pembanding dapat mengajukan memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah pernyataan banding[31].

5) Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada terbanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah memori banding diterima pengadilan[32].

---

[30] Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun jo. Bagian VII.B.3.b.1) Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.
[31] Bagian VII.B.3.b.3) Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.
[32] Bagian VII.B.3.b.4) Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022

6) Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah pemberitahuan memori banding[33].
7) Dalam hal terbanding mengajukan kontra memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada terbanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah kontra memori banding diterima pengadilan.
8) Dalam hal pengajuan memori banding dan kontra memori banding lewat tenggang waktu yang ditentukan, panitera tingkat pertama membuat tanda terima, memberitahukan kepada para pihak melalui domisili elektronik dan selanjutnya mengirimkan tanda terima, memori banding dan kontra memori banding serta pemberitahuannya melalui *e-mail* resmi pengadilan tingkat banding.
9) Kepaniteraan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan Bundel B) termuat dalam SIP[34].
10) Panitera pengadilan memberitahukan pelaksanaan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada para pihak dan pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding melalui SIP, selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding[35].
11) Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pembanding dan terbanding) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya[36].
12) Seluruh proses pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik

---

[33]Bagian VII.B.3.b.6) Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
[34]Bagian VII.B.3.b.7) Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
[35]Bagian VII.B.3.b.8) Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
[36] Bagian VII.B.3.b.9) Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

dalam SIP[37].

13) Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui SIP oleh panitera pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan banding diajukan oleh pembanding[38].
14) Pengadilan memproses permohonan banding yang sudah terdaftar secara elektronik terakhir pada pukul 15.00 waktu setempat.
15) Pendaftaran permohonan banding secara elektronik yang dilakukan di luar jam yang ditentukan pada angka 14) akan diproses pada hari kerja berikutnya.
16) Dalam hal pembanding dan/atau terbanding diwakili oleh beberapa orang pengguna terdaftar atau beberapa orang pengguna lain maka pembanding dan/atau terbanding hanya dapat menggunakan satu akun dan satu domisili elektronik.
17) Apabila terjadi penggantian kuasa maka wajib disampaikan secara elektronik kepada kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data SIP perkara yang bersangkutan.
18) Penggantian kuasa harus melampirkan hasil pindai (*scan*) surat kuasa asli.
19) Pencabutan permohonan banding yang berkasnya belum dikirim ke pengadilan tinggi tata usaha negara, berkasnya tidak dikirimkan ke pengadilan tinggi tata usaha negara, selanjutnya dibuatkan akta pencabutan banding oleh panitera dan akta tersebut diunggah dalam SIP serta diberitahukan kepada para pihak.
20) Pencabutan permohonan banding yang berkasnya sudah dikirim ke pengadilan tinggi tata usaha negara dibuatkan akta pencabutan oleh panitera dan diunggah ke dalam SIP, kemudian diperiksa dan diputus oleh majelis hakim banding, dengan penetapan pencabutan, selanjutnya ditandatangani secara elektronik oleh panitera dan berkas terkirim ke SIP.

---

[37] Bagian VII.B.3.b.10) Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.
[38] Bagian VII.B.3.b.11) Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

21) Pengadilan pengaju memberitahukan penetapan pencabutan kepada para pihak melalui SIP.

22) Dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

3. Pendaftaran Perkara Kasasi

a. Perkara Kasasi

1) Petugas meja I menerima pendaftaran permohonan kasasi.

2) Permohonan kasasi diajukan di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender keesokan harinya setelah putusan pengadilan tinggi tata usaha negara diberitahukan kepada para pihak[39]. Apabila hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

3) Permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal atau permohonan kasasi terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tata usaha negara, dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

4) Panitera menaksir panjar biaya perkara kasasi yang terdiri dari:

a) biaya PNBP pendaftaran permohonan kasasi;

b) biaya ATK;

c) Biaya Pemberitahuan (BP), terdiri dari:

(1) BP akta kasasi;

(2) BP memori kasasi;

(3) BP kontra memori kasasi;

(4) BP putusan bagi pemohon kasasi;

(5) BP putusan bagi termohon kasasi;

---

[39] Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

(6) BP pencabutan kasasi;

(7) surat pemberitahuan penetapan tidak memenuhi syarat formal.

d) PNBP (sebagaimana ketentuan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya);

e) biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;

f) biaya proses kasasi pada Mahkamah Agung;

g) pemberkasan/penjilidan.

5) Biaya kasasi disetorkan melalui *virtual account*.

6) Panjar biaya perkara kasasi disetor ke rekening pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya diterbitkan SKUM dalam rangkap tiga, terdiri dari:

a) lembar pertama untuk pemohon kasasi;

b) lembar kedua untuk kasir;

c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

7) Kasir menandatangani dan membubuhkan stempel lunas pada SKUM kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara dan SIP.

8) Apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas, maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara[40] dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan SIP.

9) Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus telah diberitahukan kepada termohon kasasi[41].

10) Memori kasasi harus telah diterima di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan kasasi[42]. Apabila hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu,

---

[40] Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
[41] Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
[42] Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

11) Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan[43].
12) Kontra memori kasasi harus sudah diterima di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi[44].
13) Terhadap permohonan kasasi dan memori kasasi yang telah diajukan melampaui tenggang waktu, panitera membuat surat keterangan tidak memenuhi syarat formal dan ketua pengadilan tata usaha negara menerbitkan penetapan tidak dapat diterima, dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
14) Tanggal penerimaan memori dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam buku register induk perkara dan SIP.
15) Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung[45].
16) Pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak.
17) Fotokopi relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung wajib dikirim ke Mahkamah Agung.
18) Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon kasasi, lalu dibuatkan akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon kasasi (apabila pencabutan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh prinsipal).
19) Pencabutan permohonan kasasi yang berkasnya belum dikirim ke Mahkamah Agung, berkasnya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung setelah dibuatkan

---

[43] Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
[44] Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
[45] Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

akta pencabutan kasasi.

20) Pencabutan permohonan kasasi yang berkasnya sudah dikirim ke Mahkamah Agung, akta pencabutan kasasi harus segera dikirim oleh panitera pengadilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung.

21) Apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau[46].

22) Pengajuan kasasi untuk perkara informasi publik mengacu kepada peraturan mahkamah agung mengenai tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan dan perkara penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu kepada peraturan mahkamah agung mengenai pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara serta ketentuan terkait.

b. Perkara Kasasi Secara Elektronik

1) Petugas meja I bertanggungjawab untuk menerima permohonan kasasi melalui SIP.

2) Permohonan kasasi diajukan melalui SIP dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pemohon menerima pemberitahuan putusan dari pengadilan tingkat banding[47].

3) Permohonan kasasi untuk perkara tertentu diajukan dalam tenggang waktu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait.

4) Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya kasasi, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama[48]:

a) menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik sesuai dengan tanggal pembayaran biaya kasasi;

---

[46] Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

[47] Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.jo. Bagian C.3.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, untuk selanjutnya disebut Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019.

[48] Bagian C.3.3 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019

b) mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan register kasasi dalam SIP;

c) juru sita pengganti memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik;

d) memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah permohonan kasasi diterima.

5) Pemohon menyampaikan memori kasasi melalui aplikasi *e-court* paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pengajuan permohonan kasasi[49].

6) Dalam hal pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, panitera menerangkan secara elektronik bahwa permohonan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan pengaju serta berkas perkara kasasi tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 6), diberitahukan kepada para pihak secara elektronik.

8) Kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah memori kasasi diterima pengadilan[50].

9) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah pemberitahuan memori kasasi diterima[51].

10) Dalam hal termohon mengajukan kontra memori kasasi, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan[52].

11) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara kasasi (bundel A

---

[49] Bagian C.3.3 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019
[50] Bagian C.3.7 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019
[51] Bagian C.3.8 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019
[52] Bagian C.3.9 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019

dan bundel B) termuat dalam SIP[53].

12) Panitera menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak bahwa berkas perkara telah lengkap dan para pihak memiliki kesempatan untuk memeriksa kelengkapan perkas perkara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan diterima.
13) Para pihak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas perkara yang dianggap tidak lengkap dan pengadilan menindaklanjuti tanggapan para pihak.
14) Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak permohonan atau 3 (tiga) hari kalender setelah tenggat waktu *inzage* berakhir[54].
15) Kontra memori kasasi tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.
16) Pengadilan memproses permohonan kasasi yang sudah terdaftar secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
17) Pendaftaran permohonan kasasi secara elektronik yang dilakukan di luar jam yang ditentukan akan diproses pada hari kerja berikutnya.
18) Pengajuan permohonan dan pembayaran biaya upaya hukum kasasi yang diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat dan akan diproses pada hari kerja berikutnya.
19) Dalam hal pemohon dan/atau termohon diwakili oleh beberapa orang pengguna terdaftar atau beberapa orang pengguna lain maka pemohon dan/atau termohon hanya dapat menggunakan satu akun dan satu domisili elektronik.
20) Apabila terjadi penggantian kuasa maka wajib

---

[53] Bagian C.3.10 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019
[54] Bagian C.3.11 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019

disampaikan secara elektronik kepada kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data SIP perkara yang bersangkutan.

21) Penggantian kuasa harus melampirkan hasil pindai (*scan*) surat kuasa asli.

22) Pencabutan permohonan kasasi yang berkasnya belum dikirim ke Mahkamah Agung, berkasnya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung, selanjutnya dibuatkan akta pencabutan kasasi oleh panitera dan akta tersebut diunggah dalam SIP serta diberitahukan kepada para pihak.

23) Pencabutan permohonan kasasi yang berkasnya sudah dikirim ke Mahkamah Agung dibuatkan akta pencabutan oleh panitera dan diunggah dalam SIP, lalu diperiksa dan diputus oleh majelis hakim kasasi, dengan penetapan pencabutan, selanjutnya ditandatangani secara elektronik oleh Panitera dan berkas terkirim ke SIP.

24) Pengadilan pengaju memberitahukan penetapan pencabutan kepada para pihak melalui SIP.

25) Dalam hal permohonan pemeriksaan kasasi telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi belum lampau[55].

4. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

a. Perkara Peninjauan Kembali

1) Petugas meja I menerima pendaftaran permohonan peninjauan kembali beserta alasan permohonan pengajuan peninjauan kembali.

2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal[56]:

a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh

---

[55] Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

[56] Pasal 69 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

hakim pidana dinyatakan palsu, tenggang waktu dihitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat;

b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, tenggang waktu dihitung sejak ditemukan surat-surat bukti, hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, tenggang waktu dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, tenggang waktu dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, tenggang waktu dihitung sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tenggang waktu dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

3) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, setelah dibuatkan akta peninjauan kembali, panitera membuat surat keterangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan ketua pengadilan tata usaha negara

menerbitkan penetapan tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Apabila hari ke-180 (seratus delapan puluh) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-180 (seratus delapan puluh) jatuh pada hari kerja berikutnya.

4) Dikarenakan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, maka surat kuasa yang digunakan adalah khusus untuk peninjauan kembali, mengingat peninjauan kembali bukan pengadilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, banding, dan kasasi.

5) Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM, terdiri dari:
   a) biaya PNBP pendaftaran permohonan peninjauan kembali dan penerimaan alasan peninjauan kembali dari pemohon;
   b) biaya ATK;
   c) Biaya Pemberitahuan (BP), terdiri dari:
      (1) BP akta peninjauan kembali dan penyerahan alasan peninjauan kembali kepada termohon;
      (2) BP penyerahan jawaban/tanggapan peninjauan kembali kepada pemohon;
      (3) BP pemberitahuan putusan/penetapan kepada pemohon peninjauan kembali;
      (4) BP pemberitahuan putusan/penetapan kepada termohon peninjauan kembali;
      (5) surat pemberitahuan pencabutan peninjauan kembali;
      (6) surat pemberitahuan penetapan tidak memenuhi syarat formal;
      (7) PNBP (sebagaimana ketentuan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya).
   d) biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
   e) biaya proses peninjauan kembali pada Mahkamah Agung;

f) pemberkasan/penjilidan.

6) Biaya proses peninjauan kembali disetorkan melalui *virtual account*.

7) Panjar biaya perkara peninjauan kembali disetor ke rekening pengadilan tingkat pertama.

8) Selanjutnya diterbitkan SKUM dalam rangkap tiga, terdiri dari:
   a) lembar pertama untuk pemohon;
   b) lembar kedua untuk kasir;
   c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.

9) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara dan SIP.

10) Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta permohonan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara dan SIP.

11) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan atas alasan adanya surat bukti baru (novum), maka pemohon pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali juga menyerahkan permohonan untuk dilakukan sumpah terhadap penemu surat bukti baru (novum) dan surat bukti baru (novum) beserta daftar isinya, yang akan dicocokkan dengan aslinya dihadapan persidangan serta akan dituangkan dalam berita acara sumpah.

12) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, panitera pengadilan wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali, dengan melampirkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada termohon peninjauan kembali, dengan maksud[57]:
   a) dalam hal permohonan peninjauan kembali

[57] Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a atau huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;

b) dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut dalam Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung agar dapat diketahui.

13) Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali, harus telah diterima di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak alasan peninjauan kembali disampaikan kepadanya[58].

14) Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut[59].

15) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung[60].

16) Relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, agar dikirim ke Mahkamah Agung.

17) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan tata usaha negara yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali dan dibuatkan akta pencabutan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal.

18) Pencabutan permohonan peninjauan kembali yang berkasnya belum dikirim ke Mahkamah Agung, berkasnya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung

---

[58] Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
[59] Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
[60] Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

setelah dibuatkan akta pencabutan peninjauan kembali.

19) Pencabutan permohonan peninjauan kembali yang berkasnya sudah dikirim ke Mahkamah Agung, Akta pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim ke Mahkamah Agung oleh panitera pengadilan tata usaha negara.

20) Apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara itu.

b. Perkara Peninjauan Kembali secara Elektronik

1) Petugas meja I bertanggungjawab untuk menerima permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasan peninjauan kembali (memori peninjauan kembali diajukan melalui SIP dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

2) Dikarenakan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, maka surat kuasa yang digunakan adalah khusus untuk peninjauan kembali, mengingat peninjauan kembali bukan pengadilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, banding dan kasasi.

3) Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya permohonan peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama[61]:

a) menerbitkan akta pernyataan peninjauan kembali secara elektronik sesuai tanggal pembayaran peninjauan kembali;

b) mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara dan register peninjauan kembali dalam SIP.

4) Memberitahukan permohonan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali kepada termohon secara elektronik, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah permohonan diregistrasi.

5) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan atas alasan surat bukti baru (novum), pemohon menyertakan dokumen elektronik bukti baru pada saat

[61] Bagian C.4.2 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019

mengajukan permohonan peninjauan kembali yang akan dicocokkan dengan aslinya di hadapan persidangan serta akan dituangkan dalam berita acara sumpah[62].

6) Dalam hal termohon mengajukan kontra memori peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah kontra memori peninjauan kembali diterima pengadilan[63].
7) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara peninjauan kembali (bundel A dan bundel B) termasuk berita acara sumpah penemuan bukti baru termuat dalam SIP[64].
8) Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke-60 (enam puluh) kalender setelah permohonan peninjauan kembali diterima pengadilan[65].
9) Kontra memori peninjauan kembali tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.
10) Pengadilan memproses permohonan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
11) Pendaftaran permohonan peninjauan kembali secara elektronik yang dilakukan di luar jam yang ditentukan pada angka 10) akan diproses pada hari kerja berikutnya.
12) Pengajuan permohonan dan pembayaran biaya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat dan akan diproses pada hari kerja berikutnya.

---

[62] Bagian C.4.3 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019
[63] Bagian C.4.4 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019
[64] Bagian C.4.5 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019
[65] Bagian C.4.6 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019

13) Tanggal akta permohonan peninjauan kembali terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 11) menggunakan tanggal pembayaran.

14) Dalam hal pemohon dan/atau termohon diwakili oleh beberapa orang pengguna terdaftar atau beberapa orang pengguna lain maka pemohon dan/atau termohon hanya dapat menggunakan satu akun dan satu domisili elektronik.

15) Apabila terjadi penggantian kuasa maka wajib disampaikan secara elektronik kepada Kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data *e-court* perkara yang bersangkutan.

16) Penggantian kuasa harus melampirkan hasil pindai (*scan*) surat kuasa asli.

17) Apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara tersebut.

B. ADMINISTRASI BIAYA PERKARA

1. Kasir menerima dan membukukan uang panjar perkara dari penggugat/pemohon dalam buku jurnal keuangan perkara, buku induk keuangan perkara dan SIP.
2. Biaya PNBP pendaftaran gugatan/permohonan dikeluarkan bersamaan dengan pencatatan penerimaan biaya perkara.
3. Biaya proses perkara terdiri dari pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi biaya-biaya:
   a. panggilan;
   b. pemberitahuan;
   c. pemeriksaan setempat;

      Komponen biaya yang termasuk/termuat dalam pemeriksaan setempat antara lain:

      1) pemeriksaan setempat dalam kota mengacu pada transportasi perjalanan dinas;
      2) pemeriksaan setempat luar kota mengacu pada standar perjalanan dinas.

   d. ATK;
   e. hak-hak kepaniteraan/PNBP terdiri dari biaya meterai, redaksi, pencatatan banding, pencatatan kasasi, pencatatan

peninjauan kembali, dan lain-lain (sebagaimana ketentuan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya merupakan pendapatan negara);

f. biaya pemberkasan/penjilidan, biaya pengarsipan dan pengiriman berkas (dikeluarkan pada saat perkara diputus dan termasuk dalam rincian biaya perkara).

4. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perkara sebelum maupun setelah putusan didasarkan pada masing-masing institusi/unit/satuan kerja yang mengelola keuangan tersebut. Pengelolaan dan pertanggungjawaban komponen biaya yang dikeluarkan dalam proses pengajuan upaya hukum dilakukan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung, sedangkan biaya administrasi perkara upaya hukum oleh pengadilan pengaju (ATK untuk proses upaya hukum, pemberitahuan upaya hukum, penjilidan, dan pengiriman berkas upaya hukum) dilakukan oleh pengadilan pengaju.
5. Dalam hal terdapat kekurangan panjar biaya perkara/biaya upaya hukum, pengadilan memberitahukan pihak penggugat/pemohon upaya hukum untuk menambah panjar biaya perkara/biaya upaya hukum tersebut (misal kekurangan biaya pengiriman berkas perkara, biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan tambahan atas perintah pengadilan tingkat banding/Mahkamah Agung).
6. Kasir melaksanakan tugas-tugas administrasi biaya perkara.
7. Biaya pendaftaran permohonan banding, pendaftaran permohonan kasasi, pendaftaran permohonan peninjauan kembali dan penerimaan alasan peninjauan kembali dari pemohon dikeluarkan pada saat setelah diterimanya panjar biaya perkara.
8. Biaya meterai dan redaksi, dikeluarkan dari biaya perkara pada waktu perkara diputus.
9. Penerimaan hak-hak kepaniteraan dari kasir hingga pukul 12.00 waktu setempat harus diserahkan ke bendahara penerimaan pada hari yang sama, sedangkan penerimaan oleh kasir diatas pukul 12.00 waktu setempat maka penyerahan ke bendahara penerimaan pada hari berikutnya.
10. Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari

dalam buku jurnal dan SIP yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap 2, lembar pertama disimpan kasir sedangkan lembar kedua diserahkan kepada panitera sebagai laporan.

11. Panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan surat keputusan ketua pengadilan tata usaha negara mencatat dalam buku induk keuangan yang bersangkutan.
12. Buku keuangan perkara, terdiri dari:
    a. jurnal keuangan perkara tingkat pertama;
    b. jurnal permohonan banding;
    c. jurnal permohonan kasasi;
    d. jurnal permohonan peninjauan kembali;
    e. jurnal permohonan eksekusi;
    f. buku induk keuangan perkara;
    g. buku hak-hak kepaniteraan (tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali).
13. Buku jurnal keuangan perkara, digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, dimulai dari penerimaan biaya perkara dan ditutup pada tanggal perkara diputus.
14. Buku jurnal diberi nomor halaman, untuk setiap nomor halaman digunakan 2 halaman muka, dengan halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani ketua pengadilan tata usaha negara dan halaman lainnya diparaf.
15. Banyaknya halaman pada setiap jurnal harus disebutkan, halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh ketua pengadilan tata usaha negara dan halaman selainnya diparaf. Setiap perkara diputus, buku jurnal harus ditutup dan dihitung sisa panjar perkara untuk dikembalikan kepada penggugat.
16. Buku induk keuangan perkara, digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara, dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.
17. Banyaknya halaman buku induk keuangan perkara harus diterangkan dengan jelas, sedangkan halaman pertama dan halaman terakhir harus dibubuhi tandatangan ketua pengadilan tata usaha negara dan halaman lainnya cukup diparaf.

18. Penutupan buku induk keuangan perkara dilakukan oleh panitera dan diketahui ketua pengadilan tata usaha negara.
19. Pada setiap penutupan buku induk keuangan tersebut, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, serta uraian secara terperinci.
20. Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas sesungguhnya, maka harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut.
21. Ketua pengadilan tata usaha negara sebelum menandatangani buku induk keuangan, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang disimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.
22. Ketua pengadilan tata usaha negara setiap saat dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan, dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara, sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan dan meneliti keadaan uang menurut buku kas dan uang yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, disertai buktinya.
23. Penutupan buku induk keuangan perkara atas dasar perintah ketua pengadilan tata usaha negara, sebagaimana tersebut di atas hendaknya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan secara mendadak, dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
24. Buku hak-hak kepaniteraan, digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan dan dalam kolom keterangan diisi dengan tanggal, jumlah uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama bendahara penerima.
25. Buku jurnal dan buku induk keuangan setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
26. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyediakan dan menetapkan pengelolaan jurnal keuangan perkara secara elektronik.

C. ADMINISTRASI PERSIAPAN PERSIDANGAN

1. Penunjukan Majelis Hakim

a. Berkas perkara yang sudah dicatat dalam register perkara, setiap perkara paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja ketua pengadilan tata usaha negara menetapkan majelis hakim untuk mengadili perkaranya.

b. Majelis hakim harus terdiri dari 3 (tiga) orang hakim[66] (kecuali undang-undang menentukan lain), dengan ketentuan sebagai berikut:

1) ketua majelis adalah ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, hakim senior atau hakim yang mempunyai kemampuan menurut penilaian ketua pengadilan tata usaha negara;

2) susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu;

3) untuk memeriksa perkara-perkara tertentu, ketua pengadilan tata usaha negara dapat membentuk majelis khusus/hakim yang telah bersertifikasi;

4) pergantian majelis hakim sementara harus dibuat penetapan pergantian majelis hakim melalui penetapan ketua pengadilan yang memuat tanggal dan agenda persidangan serta dimuat dalam SIPP;

5) majelis hakim dibantu oleh seorang panitera/panitera pengganti.

c. Petugas meja II mencatat penunjukan majelis hakim termasuk pergantian majelis hakim dalam register perkara.

d. Setelah panitera menunjuk panitera pengganti dan juru sita/juru sita pengganti, petugas meja II mencatat penunjukan tersebut termasuk pergantian panitera pengganti dalam kolom register induk.

2. Penetapan Pemeriksaan Persiapan/Hari Sidang

a. Setelah menerima berkas dari panitera muda perkara, ketua majelis/hakim yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari kalender sudah harus menetapkan hari pemeriksaan persiapan/persidangan[67].

---

[66] Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peratun

[67] Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun jo. Bagian III.C.1.a Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022

b. Penetapan hari pemeriksaan persiapan/persidangan dan setiap penundaan persidangan harus dicatat dalam buku register perkara dan SIPP dengan tertib.

c. Majelis hakim/hakim harus mempunyai jadwal persidangan (*court calendar*) yang lengkap dan diunggah pada SIPP.

d. Penetapan dan/atau penundaan hari sidang selalu dimusyawarahkan dengan anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing.

e. Ketua majelis/hakim dalam menentukan hari sidang harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari kalender[68] kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan).

f. Hakim dalam pemeriksaan acara cepat, dalam menentukan hari sidang harus memperhatikan tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, lamanya tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari kalender[69].

3. Panggilan Para Pihak

a. Panggilan

Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan dengan surat tercatat yang ditandatangani oleh panitera pengganti dan dikirim oleh juru sita/juru sita pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:

1) panggilan terhadap para pihak dianggap sah apabila surat panggilan telah dikirim dengan surat tercatat oleh juru sita/juru sita pengganti[70];

2) dalam hal tempat tinggal tidak jelas atau tidak diketahui, maka panggilan kepada pihak ketiga yang berkepentingan dilakukan melalui kepala desa atau lurah setempat;

3) dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, ketua pengadilan tata usaha negara atau ketua pengadilan tinggi tata usaha negara selaku pengadilan tingkat pertama

---

[68] Pasal 64 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[69] Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[70] Pasal 65 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

berpedoman pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Perdata Lintas Negara Nomor: [71]PRJ/HK/00001/04/2023/22 dan Nomor: 02/KMA/NK/IV/2023 Tanggal 11 April 2023 dan Tanggal 6 April 2023 dan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 395/PAN/HK2.1/2/2024 Tanggal 13 Februari 2024, Perihal Kewajiban Menyertakan Dokumen Elektronik dalam Permohonan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Lintas Negara serta Perjanjian Kerjasama lainnya antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri dalam masalah dimaksud.

b. Panggilan secara elektronik[72]

1) Atas dasar perintah hakim, juru sita/juru sita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik.

2) Juru sita/juru sita pengganti melakukan login pada aplikasi *e-court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator.

3) Juru sita/juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak melalui aplikasi *e-court*.

D. PERSIDANGAN PADA TINGKAT PERTAMA

1. Persidangan Pada Tingkat Pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

a. Perkara tata usaha negara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama, baik yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama harus diputus dan selesai diminutasi dalam waktu 5 (lima) bulan sejak pendaftaran perkara. Jika melampaui jangka waktu tersebut, maka majelis hakim melaporkan keterlambatan tersebut beserta alasannya kepada ketua pengadilan. Selanjutnya ketua pengadilan meneruskan tembusan

---

[71] Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[72] Bagian III.B.7 Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022

kepada ketua pengadilan tinggi tata usaha negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketua Mahkamah Agung[73], kecuali untuk perkara tertentu yang telah ditentukan tenggang waktunya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Waktu persidangan dimulai pukul 09.00 waktu setempat.

c. Apabila sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, maka ketua majelis/hakim membuat penetapan hari sidang dan segera diberitahukan kepada para pihak.

d. Apabila ketua majelis yang ditunjuk berhalangan tetap, maka ketua pengadilan tata usaha negara menunjuk ketua majelis yang baru dengan penetapan.

e. Apabila ketua majelis yang ditunjuk berhalangan sementara untuk bersidang, pemeriksaan perkara harus ditunda dalam persidangan oleh salah satu hakim anggota dan apabila berhalangan tetap, ketua pengadilan tata usaha negara menunjuk ketua majelis yang baru dengan penetapan.

f. Apabila salah seorang hakim anggota majelis berhalangan sementara ataupun tetap, ketua pengadilan tata usaha negara dengan penetapan menunjuk hakim lain sebagai pengganti.

g. Persidangan perkara tata usaha negara dilaksanakan di ruang sidang atau ditempat lain yang ditentukan oleh ketua majelis sesuai dengan aturan yang berlaku.

h. Persidangan perkara tata usaha negara dilaksanakan terbuka untuk umum. Persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum dalam hal perkara menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara[74].

i. Ketua majelis/hakim bertanggungjawab atas ketepatan pemeriksaan perkara yang dipercayakan kepadanya, dan agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, maka sebelum pemeriksaan perkara dimulai harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

---

[73] SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

[74] Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

j. Dalam keadaan tertentu, maka persidangan dapat dilaksanakan di luar gedung pengadilan/di gedung pengadilan lain, berdasarkan penetapan ketua pengadilan.

2. Persidangan Pada Tingkat Pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara Elektronik (*e-litigation*)

a. Persidangan secara elektronik dilakukan melalui SIP.

b. Hakim/hakim ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, sedangkan dalam perkara tata usaha negara, jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) ditetapkan setelah selesai pemeriksaan persiapan.

c. Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui SIP.

d. Panitera pengganti mencatatkan semua data persidangan pada SIP.

e. Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan.

f. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, para pihak tidak mengirimkan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, maka dengan batas penalaran yang wajar oleh majelis hakim, para pihak dapat dianggap tidak menggunakan haknya.

g. Setelah majelis hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat secara elektronik maka majelis hakim meneruskan jawaban kepada penggugat melalui SIP.

h. Apabila tergugat tidak hadir dan tidak menyerahkan jawabannya maka acara jawaban tergugat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, panggilan kepada tergugat melalui atasannya dilakukan dengan surat tercatat.

i. Setelah hakim/hakim ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh penggugat secara elektronik maka majelis hakim meneruskan replik kepada tergugat melalui SIP.

j. Setelah hakim/hakim ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh tergugat secara elektronik maka majelis hakim

meneruskan duplik kepada penggugat.

k. Semua dokumen yang disampaikan melalui SIP wajib dalam format PDF dan RTF.

E. BERITA ACARA SIDANG (BAS)

1. Panitera/panitera pengganti yang ikut bersidang wajib membuat Berita Acara Sidang (BAS) yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan[75], yaitu mengenai susunan persidangan, pihak yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.
2. Hakim/ketua sidang dan panitera/panitera pengganti bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran BAS.
3. BAS harus sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera/panitera pengganti paling lambat 1 (satu) hari sebelum sidang berikutnya, kecuali ada alasan lain yang rasional sehingga batas waktu paling lambat 1 (satu) hari tersebut dapat diperpanjang.
4. Apabila hakim ketua majelis/hakim dalam acara cepat berhalangan menandatangani BAS dan/atau putusan, maka BAS atau putusan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua majelis/hakim[76].
5. Apabila panitera pengganti berhalangan menandatangani berita BAS dan/atau putusan, maka BAS atau putusan ditandatangani oleh panitera dengan menyatakan berhalangannya panitera pengganti tersebut[77].

F. RAPAT PERMUSYAWARATAN

1. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia[78].
2. Ketua majelis mempersilahkan hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim anggota I dan terakhir ketua majelis. Sedapat mungkin semua pendapat harus dikemukakan dengan argumentasi yuridis, sosiologis dan/atau filosofis, kecuali untuk perkara yang tidak dipertimbangkan

---

[75] Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[76] Pasal 114 ayat (3) jo. Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[77] Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[78] Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sampai pokok sengketa.

3. Dalam rapat permusyawaratan, dalam hal tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak dan pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan[79].
4. Dalam hal tidak ada kesatuan pendapat diantara majelis hakim (dalam hal ada tiga pendapat yang berbeda dalam satu majelis), maka putusan dijatuhkan berdasarkan pendapat hukum dari ketua majelis[80].

G. PUTUSAN

1. Pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan yang lengkap harus sudah siap, dan setelah putusan diucapkan segera diserahkan kepada panitera pengganti untuk diminutasi dalam waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
2. Pengadilan wajib menyampaikan amar/salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan[81].
3. Dalam perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-court*, para pihak dapat mengunduh salinan putusan setelah Panitera membubuhkan tandatangan elektronik dan setelah membayar biaya PNBP yang dapat dibayarkan melalui *virtual account*[82].
4. Amar putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara harus dipublikasikan melalui SIP pada hari yang sama saat putusan diucapkan.
5. Apabila ada kendala dalam aplikasi *e-court* dalam pengunggahan putusan, maka putusan akan tetap diunggah dengan menunggu hingga kendala sistem dalam aplikasi *e-court* teratasi serta memberitahukan kepada para pihak mengenai kendala yang terjadi melalui *e-mail*/akun *e-court* masing-masing pihak dan memberitahukan amar putusan kepada para pihak.

---

[79] Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
[80] Pasal 107 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[81] Pasal 51A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986.
[82] Bagian III.C.8.d Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022

6. Format putusan agar diketik dalam bentuk RTF. Format putusan: jenis huruf: *font* Arial, batang tubuh ukuran 12, *footer* ukuran 10, *margin* kiri 5 cm, *margin* kanan 1,5 cm, *margin* atas 3 cm, *margin* bawah 3 cm, spasi 1,5. Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak-balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring dengan ukuran 1,6 cm, ukuran kertas A4, 80 gram[83].

H. MINUTASI PERKARA

1. Panitera pengganti segera menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pemeriksaan kepada panitera muda perkara, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan di dalam SOP.
2. Hakim/ketua majelis bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi perkara.

I. BERKAS

BUNDEL A

1. Bundel A elektronik
   a. surat gugatan:
      1) surat gugatan/permohonan;
      2) perbaikan surat gugatan (jika ada);
      3) gugatan yang telah diperbaiki (jika ada);
      4) gugatan perlawanan (jika ada).
   b. surat kuasa/ surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
   c. dokumen upaya administratif (jika ada);
   d. penetapan *dismissal*/lolos *dismissal* (jika ada);
   e. penetapan penunjukan majelis hakim/hakim;
   f. penunjukan panitera sidang;
   g. penunjukan juru sita/juru sita pengganti;
   h. penetapan pemeriksaan persiapan (jika ada);
   i. penetapan hari sidang;
   j. relaas-relaas panggilan/*e-summon*;
   k. penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan hasil mediasi (jika ada);
   l. *court calendar*;
   m. berita acara sidang (dalam satu kesatuan);

---

[83] Bagian F. Format Cetak Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tigkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

n. jawaban;
o. replik (jika ada);
p. duplik (jika ada);
q. permohonan intervensi (jika ada);
r. putusan sela (jika ada);
s. penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);
t. surat bukti penggugat (jika ada);
u. surat bukti tergugat (jika ada);
v. surat bukti intervensi (jika ada);
w. berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
x. simpulan penggugat (jika ada);
y. simpulan tergugat (jika ada);
z. simpulan intervensi (jika ada)
aa. penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada);
bb. surat lainnya (jika ada).

2. Bundel A Fisik

Petugas meja III segera menyusun berkas perkara dan putusan yang diterima dari panitera pengganti yang disebut “Bundel A”.

Bundel A terdiri dari:

a. daftar isi Bundel A;
b. *checklist* isi berkas yang dibuat oleh petugas dan diketahui oleh panitera;
c. dokumen upaya administratif (jika ada);
d. surat gugatan/permohonan:
    1) surat gugatan awal/surat permohonan;
    2) surat gugatan perlawanan (jika ada);
    3) surat gugatan yang sudah diperbaiki (jika ada).
e. penetapan-penetapan: penetapan *dismissal* /lolos *dismissal* (jika ada), penetapan beracara dengan cuma-cuma (jika ada), penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa (jika ada), penetapan majelis hakim/hakim, penunjukan panitera/panitera pengganti dan juru sita/juru sita pengganti, penetapan pemeriksaan persiapan (pada acara biasa), penetapan hari persidangan dan penetapan lainnya;
f. surat panggilan (penggugat/pemohon, tergugat /termohon, pihak ketiga/intervensi, saksi/ahli dan panggilan lainnya);

g. berita acara:
   1) berita acara sidang perlawanan (jika ada);
   2) berita acara pemeriksaan persiapan (acara biasa); dan/atau
   3) berita acara persidangan (sidang pembacaan gugatan/permohonan, jawaban, putusan sela intervensi (jika ada), replik (jika ada), duplik (jika ada), pembuktian, pemeriksaan setempat (jika ada), kesimpulan, dan putusan), yang dimasukkan dalam kesatuan berita acara.

h. surat kuasa (jika memakai kuasa), ijin beracara insidentil dari ketua pengadilan tata usaha negara, surat tugas dari tergugat (jika ada);

i. daftar bukti beserta bukti penggugat/pemohon (bukti surat maupun bukti elektronik);

j. daftar bukti beserta bukti tergugat /termohon (bukti surat maupun bukti elektronik);

k. daftar bukti beserta bukti intervensi (jika ada) (bukti surat maupun bukti elektronik);

l. surat atau dokumen lainnya (termasuk perubahan alamat kuasa dan pihak- pihak).

Catatan :

- Ketebalan pemberkasan maksimal 30 cm (setiap bundel berkas diberi nomor urut, misalnya A1, A2, dst).
- Setiap batasan antar dokumen dibuat tanda pembatas atau catatan kertas (kupingan), termasuk surat jawaban dengan warna dan ukuran sebagai berikut:
  - Warna kupingan kuning (ukuran panjang 8 cm, lebar 5,5 cm);
  - Penulisan dengan huruf kapital, jenis huruf: Arial dengan ukuran menyesuaikan (contoh SURAT GUGATAN PERBAIKAN).

BUNDEL B

1. Bundel B banding elektronik
   a. salinan putusan;
   b. surat kuasa khusus/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
   c. akta banding;

d. pemberitahuan/*e-summon* banding;
e. memori banding (jika ada);
f. pemberitahuan/*e-summon* memori banding (jika ada);
g. kontra memori banding (jika ada);
h. pemberitahuan/*e-summon* kontra memori banding (jika ada);
i. pemberitahuan/*e-summon inzage*;
j. bukti *e-payment* biaya banding (jika ada);
k. surat lainnya (jika ada).

2. Bundel B Banding Fisik

Bundel B yang berkaitan dengan permohonan banding dan menjadi arsip berkas pada pengadilan tinggi tata usaha negara, merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan pernyataan banding serta semua berkas perkara berkenaan dengan adanya permohonan banding. Bundel B banding terdiri dari:

a. daftar isi bundel B banding;
b. *checklist* isi berkas yang dibuat oleh petugas dan diketahui panitera;
c. salinan putusan pengadilan tata usaha negara;
d. surat pemberitahuan putusan dan resi fotokopi pengiriman (bila ada);
e. akta banding beserta surat permohonan banding (jika ada surat permohonan);
f. pemberitahuan permohonan banding;
g. memori banding dan tanda terima memori banding (jika ada);
h. pemberitahuan penyerahan memori banding (jika ada);
i. kontra memori banding dan tanda terima kontra memori banding (jika ada);
j. pemberitahuan penyerahan kontra memori banding (jika ada);
k. pemberitahuan kesempatan para pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*);
l. surat kuasa khusus (jika ada);
m. *soft copy* berkas perkara banding (dalam bentuk RTF antara lain putusan, memori banding (jika ada), kontra memori banding (jika ada));

n. surat keterangan panitera apabila para pihak tidak menyerahkan memori banding/kontra memori banding;
o. berita acara memeriksa berkas/*inzage* (jika ada);
p. tanda bukti pengiriman biaya perkara banding;

Catatan:

- Ketebalan pemberkasan maksimal 30 cm (setiap bundel berkas diberi nomor urut, misalnya A1, A2, dst).
- Setiap batasan antar dokumen dibuat tanda pembatas atau catatan kertas (kuping), dengan warna kupingan hijau, ukuran Panjang 8 cm, lebar 5,5 cm, penulisan dengan huruf kapital, jenis huruf: Arial dengan ukuran menyesuaikan (contoh: SALINAN PUTUSAN PTUN);

3. Bundel B Kasasi

Bundel B yang akan menjadi arsip berkas perkara kasasi pada Mahkamah Agung, terdiri dari:

a. daftar isi bundel B kasasi;
b. *checklist* isi berkas yang dibuat oleh petugas dan diketahui oleh panitera;
c. salinan putusan tingkat pertama;
d. salinan putusan tingkat banding, kecuali perkara tertentu yang tidak ada upaya hukum banding;
e. surat pemberitahuan putusan tingkat pertama beserta resi fotokopi pengiriman (jika ada);
f. surat pemberitahuan putusan banding beserta resi fotokopi pengiriman, kecuali perkara tertentu yang tidak ada upaya hukum banding;
g. akta kasasi beserta surat permohonan kasasi (jika ada surat permohonan);
h. pemberitahuan permohonan kasasi;
i. memori kasasi dan tanda terima memori kasasi;
j. pemberitahuan penyerahan memori kasasi;
k. kontra memori kasasi dan tanda terima kontra memori kasasi (jika ada);
l. pemberitahuan penyerahan kontra memori kasasi (jika ada);
m. pemberitahuan kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) (khusus untuk pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama);

n. surat kuasa khusus (jika ada);
o. tanda bukti setoran biaya proses kasasi;
p. *soft copy* berkas perkara kasasi (dalam bentuk PDF antara lain relaas pemberitahuan putusan pengadilan tingkat banding, akta permohonan kasasi, tanda terima memori kasasi, dalam bentuk RTF antara lain memori kasasi, kontra memori kasasi (jika ada), putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding);
q. surat keterangan panitera apabila termohon kasasi tidak menyerahkan kontra memori kasasi (jika ada);
r. *barcode* direktori putusan;
s. surat pernyataan kelengkapan dan autentikasi berkas perkara.

Catatan :

- Ketebalan pemberkasan maksimal 30 cm (setiap bundel berkas diberi nomor urut, misalnya A1, A2, dst);
- Setiap batasan antar dokumen dibuat kartu identitas berkas (kupingan) dengan warna dan ukuran sebagai berikut:
  - Warna kupingan biru muda (ukuran panjang 8 cm, lebar 5.5 cm);
  - Penulisan dengan huruf kapital, jenis huruf: Arial dengan ukuran menyesuaikan (untuk penulisan PENERIMAAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PT.TUN).

4. Bundel B Peninjauan Kembali

Bundel B yang akan menjadi arsip berkas perkara peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, terdiri dari:

a. salinan putusan tingkat pertama;
b. salinan putusan tingkat banding (jika ada);
c. salinan putusan tingkat kasasi (jika ada);
d. pemberitahuan putusan (tangkapan layar pada *e-court*);
e. surat kuasa khusus (jika memakai kuasa);
f. akta permohonan peninjauan kembali;
g. surat permohonan peninjauan kembali dan tanda terima memori peninjauan kembali;
h. daftar bukti beserta surat bukti (termasuk bukti baru/novum) dari pemohon peninjauan kembali;
i. surat pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan/memori peninjauan kembali kepada pihak

lawan;

j. kontra memori peninjauan kembali dan tanda terima kontra memori peninjauan kembali (jika ada);

k. pemberitahuan penyerahan kontra memori peninjauan kembali (jika ada);

l. pemberitahuan *inzage*;

m. tanda bukti bayar biaya perkara peninjauan kembali;

n. daftar isi bundel B peninjauan kembali;

o. *checklist* isi berkas yang dibuat oleh petugas dan diketahui oleh panitera;

p. relaas pemberitahuan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas putusan tingkat pertama/ banding, relaas pemberitahuan isi putusan kasasi;

q. penetapan hakim dan berita acara sumpah dalam hal permohonan peninjauan kembali berdasarkan adanya novum;

r. *soft copy* berkas perkara peninjauan kembali (dalam bentuk PDF antara lain akta permohonan peninjauan kembali, berita acara sumpah bukti baru/novum dalam hal peninjauan kembali diajukan karena alasan adanya bukti baru, dalam bentuk RTF antara lain alasan peninjauan kembali (jika ada), jawaban alasan peninjauan kembali (jika ada), putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi);

s. *barcode* direktori putusan;

t. surat pernyataan kelengkapan dan autentikasi berkas perkara.

Catatan:

- Ketebalan pemberkasan maksimal 30 cm (setiap bundel berkas diberi nomor urut, misalnya A1, A2, dst);
- Setiap batasan antar dokumen dibuat kartu identitas berkas (kupingan) dengan warna dan ukuran sebagai berikut:
  - Warna kupingan biru (ukuran panjang 8 cm lebar 5.5 cm);
  - Jenis huruf Arial dengan ukuran menyesuaikan (untuk penulisan TANDA TERIMA MEMORI PK TUN).

J. REGISTER, LAPORAN, DAN PENGARSIPAN

1. Register Perkara

a. Register perkara terdiri atas:

1) Register Induk Perkara Gugatan
2) Register Induk Perkara Permohonan
3) Register Induk Perkara Gugatan Keberatan (KIP)
4) Register Permohonan Banding
5) Register Permohonan Kasasi
6) Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK)
7) Register Eksekusi
8) Register Eksekusi KIP

b. Peradilan tata usaha negara menyelenggarakan *e-register* perkara yang merupakan aplikasi pencatatan perkara secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari aplikasi SIPP.

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyediakan dan menetapkan pengelolaan *e-register* perkara tersebut.

d. Seluruh satuan kerja pengadilan wajib menggunakan *e-register* perkara melalui SIP.

2. Laporan

a. Pengadilan tata usaha negara berkewajiban membuat laporan tentang keadaan perkara, jenis perkara, keuangan perkara, kegiatan hakim dan panitera/panitera pengganti dengan jenis laporan:

1) laporan bulanan pengadilan tata usaha negara terdiri dari:
   a) laporan keadaan perkara;
   b) laporan jenis perkara;
   c) laporan perkara cuma-cuma (prodeo);
   d) laporan pelaksanaan posbakum;
   e) laporan pengaduan;
   f) laporan keuangan perkara.
2) laporan caturwulan terdiri dari:
   a) laporan perkara yang dimohonkan banding;
   b) laporan perkara yang dimohonkan kasasi;
   c) laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali;

d) laporan perkara yang dimohonkan eksekusi.

3) laporan semester terdiri dari:

a) laporan kegiatan hakim;

b) laporan kegiatan panitera dan panitera pengganti;

c) laporan waktu penyelesaian perkara.

4) laporan tahunan terdiri dari:

a) laporan perkara tahunan;

b) laporan waktu penyelesaian perkara.

b. Asli laporan dikirim kepada ketua pengadilan tinggi tata usaha negara yang bersangkutan, dengan tembusan dikirimkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara cq. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

c. Laporan keadaan perkara, keuangan perkara, dan jenis perkara dibuat pada setiap akhir bulan dan sudah harus diterima oleh pengadilan tinggi tata usaha negara dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara cq. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

d. Laporan keadaan perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi dibuat setiap 4 (empat) bulan, yaitu pada akhir bulan April, Agustus dan Desember.

e. Laporan tentang kegiatan hakim dan panitera/panitera pengganti dibuat setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember.

f. Dalam setiap laporan terhadap perkara yang diajukan upaya hukum tetapi belum dikirim harus disebutkan alasannya dalam kolom keterangan.

g. Disamping menyampaikan laporan secara manual, juga harus menyampaikan laporan secara elektronik.

h. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyediakan dan menetapkan pengelolaan laporan perkara secara elektronik.

3. Arsip Perkara

a. Setelah putusan dikirim ke para pihak, maka petugas meja III menyimpan berkas perkara untuk keperluan arsip.

b. Secara umum berkas perkara dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1) berkas yang masih berjalan (aktif) yakni berkas perkara yang telah diputus pada tingkat pertama dan diminutasi, tetapi masih dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali;

2) arsip berkas perkara (*in aktif*) yakni berkas perkara yang telah selesai dalam arti telah berkekuatan hukum tetap.

c. Berkas perkara yang masih berjalan (aktif) dikelola oleh kepaniteraan perkara/petugas meja III, sementara arsip berkas perkara *in aktif* dipindahkan pengelolaannya pada kepaniteraan hukum dengan dilengkapi surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

d. Pembenahan dan penataan berkas perkara dan arsip berkas perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni:

1) Tahap Pertama

a) Pendataan semua berkas perkara dengan memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara (panitera muda perkara).

b) Berkas perkara aktif disusun dan dikelompokkan sesuai proses upaya hukum, sedangkan penyimpanannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi ruang.

c) Penataan berkas aktif perkara dimasukkan dalam lemari.

2) Tahap Kedua

Penataan arsip berkas perkara tahap kedua dilakukan oleh kepaniteraan hukum, dengan cara:

a) membuat daftar isi yang ditempel dalam box;

b) arsip yang telah disusun menurut jenis perkara, dipisahkan menurut klasifikasi perkaranya dan disimpan dalam box tersendiri;

c) menyimpan arsip berkas perkara yang telah dimasukkan dalam box/sampul untuk disimpan

dalam rak/lemari, berdasarkan tahun pengajuan gugatan;

d) membuat Daftar Isi Rak (D.I.R.) dan Daftar Isi Lemari (D.I.L.);

e) menginput data arsip perkara *in aktif* dalam SIPP.

3) Tahap Ketiga

Penataan arsip berkas perkara tahap ketiga dilakukan oleh kepaniteraan hukum dengan cara:

a) memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus;

b) penataan dan pengelolaan arsip berkas perkara agar dilaporkan oleh ketua pengadilan tata usaha negara kepada ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara cq. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

e. Pengadilan wajib menyimpan berkas perkara dalam bentuk digital dan/atau dokumen elektronik (*e-document*).

f. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyediakan dan menetapkan pengelolaan arsip perkara secara elektronik.

II. ADMINISTRASI PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

A. PENERIMAAN PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

1. Penerimaan Perkara Banding

a. Administrasi Perkara Banding

1) Petugas meja I menerima berkas perkara yang diajukan oleh pengadilan pengaju.

2) Panitera muda perkara meneliti kelengkapan berkas perkara banding bundel A dan bundel B dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*) dan resume. Apabila berkas tidak lengkap, menyampaikan ke panitera untuk meminta kelengkapan berkas kepada pengadilan pengaju.

3) Kasir memeriksa penerimaan biaya proses banding dari

pengadilan pengaju.

4) Jika pembayaran biaya proses telah diterima dan berkas perkara telah lengkap, maka dicatat dalam buku jurnal dan SIPP maka panitera muda perkara memberi nomor perkara banding.
5) Petugas meja II mendaftarkan perkara banding ke dalam buku register banding, dan kemudian menginput data ke SIPP.
6) Nomor perkara harus sama dengan nomor perkara pada buku jurnal.
7) Pengisian kolom-kolom register harus diisi dengan tertib dan cermat.
8) Panitera menyampaikan bahwa berkas perkara banding telah diregister kepada pengadilan pengaju dengan tembusan kepada para pihak.
9) Panitera menyampaikan berkas permohonan banding kepada ketua pengadilan tinggi tata usaha negara untuk menetapkan majelis hakim banding.
10) Panitera muda perkara pengadilan tinggi tata usaha negara menyerahkan berkas perkara kepada ketua majelis hakim.
11) Setelah putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti, selanjutnya panitera pengganti melaksanakan minutasi perkara sesuai ketentuan dalam SOP.
12) Petugas meja II mencatat amar putusan pada register perkara.
13) Petugas meja III mengirimkan kembali berkas perkara berupa berkas bundel A dan salinan putusan banding ke pengadilan pengaju.

b. Pencabutan Upaya Hukum

1) Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh pengadilan tinggi tata usaha negara, pembanding dapat mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum ke pengadilan pengaju[84].
2) Pembanding membuat permohonan yang berisi alasan pencabutan yang diberi meterai cukup, diketahui oleh

---

[84] Pasal 129 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

prinsipal jika menggunakan kuasa.

3) Panitera tingkat pertama membuat akta pencabutan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, selanjutnya berkas pencabutan dikirim ke pengadilan tinggi tata usaha negara.
4) Selanjutnya permohonan pencabutan beserta akta pencabutan tersebut diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara dengan penetapan dan salinan penetapan akan dikirimkan ke pengadilan pengaju beserta berkas perkara.
5) Panitera pengganti melakukan minutasi berkas perkara.

c. Persidangan

1) Hakim ketua majelis menetapkan jadwal sidang (*court calendar*).
2) Hakim ketua majelis memerintahkan kepada panitera pengganti untuk menyampaikan berkas perkara kepada pembaca I (hakim anggota II).
3) Setelah hakim anggota II membaca panitera pengganti menyerahkan kembali berkas perkara kepada ketua majelis.
4) Hakim ketua majelis memerintahkan kepada panitera pengganti untuk menyampaikan berkas perkara kepada pembaca II (hakim anggota I).
5) Setelah hakim anggota I membaca berkas panitera pengganti menyerahkan kembali berkas perkara kepada ketua majelis.
6) Dalam hal majelis hakim banding berpendapat bahwa pemeriksaan pengadilan tata usaha negara kurang lengkap, atau pengadilan tata usaha negara tidak berwenang, maka pengadilan tinggi tata usaha negara dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan pengadilan tata usaha negara yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan[85].
7) Panitera pengadilan tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak majelis hakim banding mengucapkan

[85] Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

putusan sela untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara beserta surat pemeriksaan dan surat-surat lainnya kepada pengadilan pengaju.

8) Majelis hakim melaksanakan musyawarah untuk memutus perkara.

9) Panitera pengganti menyiapkan duduk perkara putusan.

d. Putusan

1) Majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara mengucapkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2) Dalam hal perkara telah diputus oleh majelis hakim banding, maka salinan putusan beserta berkas perkara dikirimkan kembali oleh panitera pengadilan tinggi tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara.

3) Panitera pengadilan tinggi tata usaha negara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan pengadilan tinggi beserta surat pemeriksaan dan surat-surat lainnya kepada pengadilan pengaju[86].

2. Perkara Banding melalui *e-court*

a. Administrasi Perkara Banding Elektronik

1) Pengadilan tinggi tata usaha negara menerima permohonan dan berkas upaya hukum yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju melalui SIP;

2) Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa kelengkapan berkas dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan berkas/dokumen elektronik, pengadilan tingkat banding memberikan notifikasi/pemberitahuan secara elektronik kepada pengadilan pengaju mengenai hal-hal yang harus dilengkapi.

4) Pengadilan pengaju mengirimkan perbaikan ataupun kekurangan berkas/dokumen elektronik melalui SIP paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah notifikasi/permintaan secara elektronik dikirimkan.

---

[86] Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

5) Dalam hal berkas upaya hukum dianggap telah lengkap, kepaniteraan pengadilan tinggi tata usaha negara menindaklanjuti proses penanganan perkara upaya hukum banding sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pencabutan Upaya Hukum

1) Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh pengadilan tinggi tata usaha negara, pembanding dapat mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum banding melalui SIP[87].

2) Pembanding membuat alasan pencabutan dan mengunggah surat pernyataan pencabutan bermeterai cukup yang diketahui prinsipal jika menggunakan kuasa melalui SIP.

3) Panitera tingkat pertama membuat akta pencabutan dan mengunggah dalam SIP.

4) Selanjutnya permohonan pencabutan beserta akta pencabutan tersebut diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara dengan penetapan, selanjutnya panitera menandatangani penetapan secara elektronik.

5) Berkas perkara banding elektronik terkirim kembali ke aplikasi SIP.

6) Panitera pengganti melakukan minutasi berkas perkara.

c. Persidangan

1) Majelis hakim banding menetapkan jadwal sidang (*court calendar*).

2) Majelis hakim membaca dan memeriksa berkas perkara melalui SIP.

3) Dalam hal majelis hakim banding berpendapat bahwa pemeriksaan pengadilan tata usaha negara kurang lengkap, atau pengadilan tata usaha negara tidak berwenang, maka pengadilan tinggi tata usaha negara dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan pengadilan tata usaha negara yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan.

---

[87] Pasal 129 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

4) Panitera pengadilan tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak majelis hakim banding mengucapkan putusan sela untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara beserta surat pemeriksaan dan surat-surat lainnya kepada pengadilan pengaju.
5) Majelis hakim memerintahkan melalui putusan sela secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada pengadilan pengaju. Putusan sela tersebut disampaikan kepada pengadilan pengaju melalui SIP.
6) Hasil pemeriksaan tambahan dituangkan ke dalam suatu berita acara yang diunggah ke dalam SIP untuk dikirim kembali ke pengadilan tinggi tata usaha negara, untuk selanjutnya diteruskan kepada majelis hakim banding yang memeriksa perkaranya.

d. Putusan/Penetapan
1) Putusan/penetapan pengadilan tinggi tata usaha negara diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem elektronik oleh majelis hakim.
2) Putusan/penetapan ditandatangani secara manual oleh majelis hakim/hakim dan panitera sidang.
3) Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik[88].
4) Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik oleh panitera pengadilan tinggi tata usaha negara menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
5) Panitera pengadilan tinggi dalam waktu 3 (tiga) hari mengirimkan salinan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara beserta surat pemeriksaan dan surat-surat lainnya kepada pengadilan pengaju secara elektronik.

---

[88] Pasal 26 ayat (3) Perma No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma No. 1 tahun 2019.

3. Administrasi Biaya Perkara Banding
   a. Kasir menerima dan membukukan uang panjar perkara dari pengadilan pengaju dalam buku jurnal keuangan perkara tingkat banding, buku induk keuangan perkara dan SIP.
   b. Biaya meterai dan redaksi, dikeluarkan dari biaya perkara pada waktu perkara diputus.
   c. Buku keuangan perkara, terdiri dari:
      1) buku jurnal keuangan perkara tingkat banding;
      2) buku induk keuangan perkara tingkat banding;
      3) buku hak-hak kepaniteraan.
   d. Buku jurnal keuangan perkara digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, dimulai dari penerimaan biaya perkara dan ditutup pada tanggal perkara diputus.
   e. Buku jurnal diberi nomor halaman, untuk setiap nomor halaman digunakan 2 halaman muka, dengan halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dan halaman lainnya diparaf.
   f. Banyaknya halaman pada setiap jurnal harus disebutkan, halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dan halaman selainnya diparaf. Setiap perkara diputus, buku jurnal harus ditutup.
   g. Buku induk keuangan perkara, digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara, dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.
   h. Banyaknya halaman buku induk keuangan perkara harus diterangkan dengan jelas, sedangkan halaman pertama dan halaman terakhir harus dibubuhi tandatangan ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dan halaman lainnya cukup diparaf.
   i. Penutupan buku induk keuangan perkara dilakukan oleh panitera dan diketahui ketua pengadilan tinggi tata usaha negara.
   j. Pada setiap penutupan buku induk keuangan perkara tersebut, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas,

keadaan uang yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, serta uraian secara terperinci.

k. Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas sesungguhnya, maka harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut.

l. Ketua pengadilan tinggi tata usaha negara sebelum menandatangani buku induk keuangan perkara, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang disimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.

m. Ketua pengadilan tinggi tata usaha negara setiap saat dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan perkara, dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara, sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan dan meneliti keadaan uang menurut buku kas dan uang yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, disertai buktinya.

n. Penutupan buku induk keuangan perkara atas dasar perintah ketua pengadilan tinggi tata usaha negara, sebagaimana tersebut di atas hendaknya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan secara mendadak, dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan.

o. Buku jurnal dan buku induk keuangan setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

B. PENERIMAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)

1. Perkara Gugatan

a. Petugas meja I bertanggung-jawab untuk menerima gugatan dan/atau gugatan perlawanan terhadap penetapan *dismissal*.

b. Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran perkara gugatan paling kurang adalah:

1) gugatan atau gugatan perlawanan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*);

2) surat kuasa khusus dari penggugat kepada kuasa hukumnya (bila penggugat menguasakan kepada kuasa

hukum);

3) fotokopi KTP/surat keterangan pengganti KTP prinsipal dan kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan serta berita acara sumpah pelantikan advokat;

4) apabila penggugat prinsipal memberikan kuasa kepada kuasa insidentil, maka persyaratan yang harus dilengkapi antara lain:
   a) KTP prinsipal;
   b) KTP penerima kuasa insidentil;
   c) surat kuasa insidentil;
   d) surat izin dari ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil/ menerima kuasa secara insidentil;
   e) dokumen pendukung lainnya (seperti kartu keluarga, surat keterangan dari kepala desa/lurah dan diketahui camat mengenai hubungan keluarga antara prinsipal penggugat dengan kuasa insidentil).

5) apabila penggugat adalah badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, Badan Layanan Umum (BLU), kelompok masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat rentan (kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat), maka persyaratan yang harus dilengkapi antara lain:
   a) dokumen akta pendirian dan identitas yang berwenang untuk mewakili badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dokumen akta pendirian dan identitas yang berwenang untuk mewakili BLU, daftar periksa (*checklist*) yang disediakan oleh PTSP bagi kelompok masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat rentan;
   b) kartu advokat kuasa hukum dan berita acara sumpah pelantikan advokat (apabila dikuasakan oleh kuasa hukum).

6) fotokopi surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, kecuali apabila objek sengketa tidak dikuasai oleh penggugat[89];
7) fotokopi bukti telah menempuh upaya administratif (apabila dalam perkara tersebut harus menempuh upaya administratif)[90];
8) data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 7) juga diserahkan dalam bentuk dokumen elektronik (*e-document*) dan untuk gugatan/gugatan perlawanan harus dalam format *word office* atau RTF. Gugatan mencantumkan alamat surat elektronik (*e-mail*);

c. Petugas penerima berkas atau dokumen memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (*checklist)* juga mencocokkan dan memastikan data dalam bentuk dokumen elektronik (*e-document*) dengan bentuk salinan cetak (*hard copy*) agar sama dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perkara untuk memeriksa jenis perkara dan memberikan catatan terkait kelengkapan berkas.
d. Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM, dengan ketentuan:
   1) dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara harus mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar;
   2) biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.
e. Pada berkas perkara yang telah lengkap, dibuatkan SKUM rangkap tiga:
   1) lembar pertama untuk penggugat;
   2) lembar kedua untuk kasir;
   3) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas gugatan.

---

[89] Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[90] Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 tahun 2018.

f. Penggugat atau kuasanya membayar jumlah uang panjar yang tercantum dalam SKUM melalui rekening pengadilan pada bank pemerintah yang ditunjuk, kemudian bukti setor bank diserahkan kepada kasir pengadilan tinggi tata usaha negara.

g. Kasir menandatangani dan membubuhkan stempel lunas serta panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke dalam buku jurnal keuangan.

h. Khusus perkara prodeo, penggugat wajib menyerahkan permohonan dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi[91].

i. Petugas meja II mencatat perkara yang masuk ke dalam register induk perkara.

j. Panitera setelah menerima berkas perkara dari petugas meja II membuat resume gugatan, paling kurang berisi:

1) tentang subjek gugatan, apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh kuasa;
2) tentang objek gugatan;
3) tentang alasan-alasan gugatan;
4) tentang petitum gugatan;
5) permohonan penundaan;
6) aspek formal gugatan meliputi:
   a) kompetensi;
   b) upaya administrasi (jika ada);
   c) tenggang waktu menggugat.

k. Pengisian register perkara harus dilaksanakan dengan tertib, cermat dan tepat waktu berdasarkan jalannya pemeriksaan perkara.

l. Gugatan yang telah terdaftar dan dibayar diregister di dalam SIP untuk mendapatkan nomor perkara. Kode penomoran perkara menyesuaikan dengan standarisasi penomoran perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara.

2. Perkara Gugatan Secara Elektronik

a. Petugas meja I bertanggung jawab menerima dan memproses pendaftaran gugatan, permohonan, atau upaya hukum perlawanan terhadap penetapan *dismissal* secara elektronik melalui SIP.

---

[91] Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

b. Dokumen yang wajib diunggah melalui aplikasi *e-court* meliputi:
   1) surat gugatan atau permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya;
   2) surat kuasa khusus yang sah dari penggugat kepada kuasa hukumnya, apabila penggugat memberikan kuasa untuk beracara, atau Surat Izin kuasa insidentil apabila penggugat menggunakan kuasa insidentil;
   3) salinan dokumen identitas diri penggugat berupa KTP atau surat keterangan pengganti KTP, serta bagi kuasa hukum dilampiri kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat yang bersangkutan;
   4) akta pendirian badan hukum beserta identitas pengurus yang berwenang mewakili, serta kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat bagi kuasa hukum, apabila penggugat merupakan badan hukum yang beracara melalui kuasa hukum;
   5) salinan surat keputusan, penetapan, atau tindakan pejabat tata usaha negara yang menjadi objek sengketa kecuali apabila objek sengketa tidak dikuasai oleh penggugat;
   6) salinan dokumen yang menunjukkan bahwa penggugat telah menempuh upaya administratif, kecuali ditentukan lain.

c. Data atau berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) sampai dengan angka 6) wajib diunggah melalui aplikasi *e-court* dalam bentuk dokumen elektronik (e-document). Gugatan diunggah dalam format *word office*, RTF, atau PDF dan wajib mencantumkan domisili elektronik berupa alamat surat elektronik (*e-mail*) dan/atau nomor telepon seluler aktif yang terhubung dengan aplikasi pesan instan (*whatsapp* atau sejenisnya) yang telah didaftarkan di pengadilan. Gugatan yang diunggah dalam bentuk PDF telah ditandatangani oleh penggugat/kuasa hukumnya.

d. SIP secara otomatis menyediakan fitur penghitungan panjar biaya perkara dan menghasilkan e-SKUM .

e. Khusus perkara prodeo, penggugat wajib mengunggah permohonan dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi

(dalam hal penggugat/pemohon telah tercatat pada sistem informasi data penduduk tidak mampu, dokumen tersebut tidak diperlukan).

f. Panitera muda perkara melakukan verifikasi kelengkapan berkas gugatan setelah pembayaran panjar biaya perkara.

g. Panitera muda perkara melakukan validasi berkas gugatan setelah verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan.

h. Petugas meja I mengunduh (*download*) dokumen yang tersedia di dalam SIP sebagai cadangan data (*backup* data), kemudian memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*) sebagai bagian dari penelitian administrasi perkara, serta mencocokkan dan memastikan kesesuaian data dalam bentuk dokumen elektronik (*e-document*) dengan berkas fisik/salinan cetak (*hard copy*) yang diterima. Selanjutnya, petugas meja I menyusun resume gugatan sebagai instrumen bagi ketua pengadilan dalam proses penetapan *dismissal*.

i. Dokumen yang sudah diunduh (*download*), disusun sebagaimana ketentuan yang berlaku.

j. Pengadilan memproses perkara yang sudah terdaftar secara elektronik berakhir pada jam kerja setempat.

k. Pendaftaran perkara secara elektronik yang dilakukan di luar pukul 15.00 waktu setempat akan diproses dan diregister pada hari kerja berikutnya.

l. Apabila pendaftaran gugatan/permohonan dilakukan pada hari kerja maka tanggal pendaftaran gugatan/permohonan didasarkan pada hari dan tanggal pembayaran biaya perkara secara elektronik.

m. Dalam hal pendaftaran dan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik dilakukan pada hari libur, maka tanggal pendaftaran gugatan/permohonan dihitung pada hari kerja pertama setelah hari libur.

n. Dalam hal penggugat dan/atau tergugat diwakili oleh beberapa orang pengguna terdaftar atau beberapa orang pengguna lain maka penggugat dan/atau tergugat hanya dapat menggunakan satu akun dan satu domisili elektronik.

o. Apabila terjadi penggantian kuasa maka wajib disampaikan secara elektronik kepada kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data perkara yang bersangkutan.

p. Penggantian kuasa harus melampirkan *scan* surat kuasa asli.

q. Gugatan yang telah terdaftar dan dibayar diregister di dalam SIPP.

3. Pendaftaran Perkara Kasasi

a. Petugas meja I menerima pendaftaran permohonan kasasi.

b. Permohonan kasasi diajukan di kepaniteraan pengadilan tinggi tata usaha negara dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender keesokan harinya setelah putusan pengadilan tinggi tata usaha negara diberitahukan kepada para pihak[92]. Apabila hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

c. Permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal atau permohonan kasasi terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tinggi tata usaha negara, dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

d. Panitera menaksir panjar biaya perkara kasasi yang terdiri dari:

1) biaya PNBP pendaftaran permohonan kasasi;

2) biaya ATK;

3) Biaya Pemberitahuan (BP), terdiri dari:

a) BP akta kasasi;

b) BP memori kasasi;

c) BP kontra memori kasasi;

d) BP putusan bagi pemohon kasasi;

e) BP putusan bagi termohon kasasi;

f) BP Pencabutan kasasi;

---

[92] Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

g) surat pemberitahuan penetapan tidak memenuhi syarat formal.

4) PNBP (sebagaimana ketentuan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya);

5) biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;

6) biaya proses kasasi pada Mahkamah Agung;

7) pemberkasan/penjilidan.

e. Biaya kasasi disetorkan melalui akun virtual (*virtual account*).

f. Biaya proses kasasi disetor ke rekening kepaniteraan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama.

g. Selanjutnya diterbitkan SKUM dalam rangkap tiga, terdiri dari:

1) lembar pertama untuk pemohon kasasi;

2) lembar kedua untuk kasir;

3) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

h. Kasir menandatangani dan membubuhkan stempel lunas pada SKUM kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara dan SIP.

i. Apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas, maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan SIP.

j. Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus telah diberitahukan kepada termohon kasasi[93].

k. Memori kasasi harus telah diterima di kepaniteraan pengadilan tinggi tata usaha negara paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan kasasi[94]. Apabila hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

---

[93] Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
[94] Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

l. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan[95].

m. Kontra memori kasasi harus sudah diterima di kepaniteraan pengadilan tinggi tata usaha negara paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi[96].

n. Terhadap permohonan kasasi dan memori kasasi yang telah diajukan melampaui tenggang waktu, panitera membuat surat keterangan tidak memenuhi syarat formal dan ketua pengadilan tinggi tata usaha negara menerbitkan penetapan tidak dapat diterima, dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

o. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam buku register induk perkara dan SIP.

p. Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung[97].

q. Pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak.

r. Fotokopi relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung wajib dikirim ke Mahkamah Agung.

s. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon kasasi, lalu dibuatkan akta pencabutan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon kasasi (apabila pencabutan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh prinsipal).

t. Pencabutan permohonan kasasi yang berkasnya belum dikirim ke Mahkamah Agung, berkasnya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung setelah dibuatkan akta pencabutan kasasi.

u. Pencabutan permohonan kasasi yang berkasnya sudah dikirim ke Mahkamah Agung, akta pencabutan kasasi harus segera dikirim oleh panitera pengadilan tinggi tata usaha

---

[95] Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
[96] Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
[97] Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

negara ke Mahkamah Agung.

v. Apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau.

w. Pengajuan kasasi untuk perkara informasi publik mengacu kepada peraturan mahkamah agung mengenai tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan dan perkara penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu kepada peraturan mahkamah agung mengenai pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara serta ketentuan terkait.

4. Perkara Kasasi Secara Elektronik

a. Petugas meja I bertanggung jawab untuk menerima permohonan kasasi melalui SIP.

b. Permohonan kasasi diajukan melalui SIP dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemohon menerima pemberitahuan putusan dari pengadilan tingkat banding[98].

c. Permohonan kasasi untuk perkara tertentu diajukan dalam tenggang waktu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait.

d. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran biaya kasasi, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:

1) menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik;

2) mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan register kasasi dalam SIP.

e. Juru sita pengganti memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik.

f. Memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan kasasi diterima.

g. Pemohon menyampaikan memori kasasi, melalui aplikasi *e-court* paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pengajuan permohonan kasasi.

h. Dalam hal pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, panitera

---

[98] Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

menerangkan secara elektronik bahwa permohonan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua kengadilan pengaju serta berkas perkara kasasi tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

i. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf h, diberitahukan kepada para pihak secara elektronik.

j. Kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah memori kasasi diterima pengadilan.

k. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah pemberitahuan memori kasasi diterima.

l. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori kasasi, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.

m. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara kasasi (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.

n. Panitera menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak bahwa berkas perkara telah lengkap dan para pihak memiliki kesempatan untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan diterima.

o. Para pihak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat beras perkara yang dianggap tidak lengkap dan pengadilan menindaklanjuti tanggapan para pihak.

p. Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak permohonan atau 3 (tiga) hari kalender setelah tenggat waktu *inzage* berakhir.

q. Kontra memori kasasi tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.

r. Pengadilan memproses permohonan kasasi yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu

setempat.

s. Pendaftaran permohonan kasasi secara elektronik yang dilakukan di luar jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf r akan diproses pada hari kerja berikutnya.

t. Pengajuan permohonan dan pembayaran biaya upaya hukum kasasi yang diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setap jenis perkara diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat dan akan diproses pada hari kerja berikutnya.

u. Dalam hal pemohon dan/atau termohon diwakili oleh beberapa orang pengguna terdaftar atau beberapa orang pengguna lain maka pemohon dan/atau termohon hanya dapat menggunakan satu akun dan satu domisili elektronik.

v. Apabila terjadi penggantian kuasa maka wajib disampaikan secara elektronik kepada kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data *e-court* SIP perkara yang bersangkutan.

w. Penggantian kuasa harus melampirkan *scan* surat kuasa asli.

x. Pencabutan permohonan kasasi yang berkasnya belum dikirim ke Mahkamah Agung, berkasnya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung selanjutnya, dibuatkan akta pencabutan kasasi oleh panitera dan akta tersebut diunggah dalam SIP serta diberitahukan kepada para pihak.

y. Pencabutan permohonan kasasi yang berkasnya sudah dikirim ke Mahkamah Agung, diperiksa dan diputus oleh majelis hakim kasasi, dengan penetapan pencabutan, selanjutnya ditandatangani secara elektronik oleh panitera dan berkas terkirim ke SIP.

z. Pengadilan pengaju memberitahukan penetapan pencabutan kepada para pihak melalui SIP.

aa. Dalam hal permohonan pemeriksaan kasasi telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi belum lampau.

5. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

a. Perkara Peninjauan Kembali

1) Petugas meja I menerima pendaftaran permohonan peninjauan kembali beserta alasan permohonan pengajuan peninjauan kembali.

2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal[99]:

a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, tenggang waktu dihitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat;

b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, tenggang waktu dihitung sejak ditemukan surat-surat bukti, hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, tenggang waktu dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, tenggang waktu dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, tenggang waktu dihitung sejak putusan

---

[99] Pasal 69 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tenggang waktu dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

3) Permohonan peninjauan kembali kedua hanya dapat diajukan apabila terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan dan kedua putusan tersebut dijadikan bukti oleh pihak yang mengajukan peninjauan kembali kedua tersebut.

4) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, setelah dibuatkan akta peninjauan kembali, panitera membuat surat keterangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan ketua pengadilan tinggi tata usaha negara menerbitkan penetapan tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Apabila hari ke-180 (seratus delapan puluh) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-180 (seratus delapan puluh) jatuh pada hari kerja berikutnya.

5) Dikarenakan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, maka, surat kuasa yang digunakan adalah khusus untuk peninjauan kembali, walaupun dalam surat kuasa tersebut jelas menyebutkan untuk digunakan sampai dengan pemeriksaan peninjauan kembali karena peninjauan kembali bukan pengadilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, banding dan kasasi.

6) Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM, terdiri dari:

a) biaya PNBP pendaftaran permohonan peninjauan kembali dan penerimaan alasan peninjauan kembali dari pemohon;

b) biaya ATK;

c) Biaya Pemberitahuan (BP), terdiri dari:
   (1) BP akta peninjauan kembali dan penyerahan alasan peninjauan kembali kepada termohon;
   (2) BP penyerahan jawaban/tanggapan peninjauan kembali kepada pemohon;
   (3) BP pemberitahuan putusan/penetapan kepada pemohon peninjauan kembali;
   (4) BP pemberitahuan putusan/penetapan kepada termohon peninjauan kembali;
   (5) surat pemberitahuan pencabutan peninjauan kembali;
   (6) surat pemberitahuan penetapan tidak memenuhi syarat formal.

d) PNBP (sebagaimana ketentuan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya);

e) biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;

f) biaya proses peninjauan kembali pada Mahkamah Agung;

g) pemberkasan/penjilidan.

7) Biaya proses peninjauan kembali disetorkan melalui akun virtual (*virtual account*).

8) Panjar biaya proses peninjauan kembali disetorkan ke rekening pengadilan tingkat pertama.

9) Selanjutnya diterbitkan SKUM dalam rangkap tiga, terdiri dari:
   a) lembar pertama untuk pemohon;
   b) lembar kedua untuk kasir;
   c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.

10) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara dan SIP.

11) Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta permohonan peninjauan kembali yang

dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara dan SIP.

12) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan atas alasan adanya surat bukti baru (novum), maka pemohon pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali juga menyerahkan permohonan untuk dilakukan sumpah terhadap penemu surat bukti baru (novum) dan surat bukti baru (novum) beserta daftar isinya, yang akan dicocokan dengan aslinya dihadapan persidangan serta akan dituangkan dalam berita acara sumpah.

13) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, panitera pengadilan wajib memberitahukan tentang permohonan Peninjauan Kembali kepada termohon peninjauan kembali, dengan melampirkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada termohon peninjauan kembali, dengan maksud[100]:
    a) dalam hal permohonan peninjauan Kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;
    b) dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut dalam Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung agar dapat diketahui.

14) Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali, harus telah diterima di kepaniteraan pengadilan tinggi tata usaha negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak alasan peninjauan kembali disampaikan kepadanya[101].

15) Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali

---

[100] Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
[101] Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

yang diterima di kepaniteraan pengadilan tinggi tata usaha negara harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.

16) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung[102].

17) Relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung agar dikirim ke Mahkamah Agung.

18) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan tinggi tata usaha negara yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali dan dibuatkan akta pencabutan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal.

19) Pencabutan permohonan peninjauan kembali yang berkasnya belum dikirim ke Mahkamah Agung, berkasnya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung setelah dibuatkan akta pencabutan peninjauan kembali.

20) Pencabutan permohonan peninjauan kembali yang berkasnya sudah dikirim ke Mahkamah Agung, akta pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim ke Mahkamah Agung oleh panitera pengadilan tinggi tata usaha negara.

21) Apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara itu.

b. Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

1) Petugas meja I bertanggungjawab untuk menerima permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasan peninjauan kembali (memori peninjauan kembali diajukan melalui SIP dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

2) Dikarenakan peninjauan kembali merupakan upaya

---

[102] Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

hukum luar biasa, maka surat kuasa yang digunakan adalah khusus untuk peninjauan kembali, walaupun dalam surat kuasa tersebut jelas menyebutkan untuk digunakan sampai dengan pemeriksaan peninjauan kembali karena peninjauan kembali bukan pengadilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, banding dan kasasi.

3) Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya permohonan peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama[103]:
   a) menerbitkan akta pernyataan peninjauan kembali secara elektronik;
   b) mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara dan register peninjauan kembali dalam sistem informasi pengadilan.
4) Memberitahukan permohonan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali kepada termohon secara elektronik, paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan diregistrasi.
5) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan atas alasan surat bukti baru (novum). Pemohon menyertakan dokumen elektronik bukti baru pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali yang akan dicocokan dengan aslinya dihadapan persidangan serta akan dituangkan dalam berita acara sumpah[104].
6) Dalam hal termohon mengajukan kontra memori peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali kepada pemohon melalui aplikasi *e-court* SIP paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah kontra memori peninjauan kembali diterima pengadilan[105].
7) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara peninjauan

---

[103] Bagian C.4.2 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019
[104] Bagian C.4.3 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019
[105] Bagian C.4.4 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019

kembali (bundel A dan bundel B) termasuk berita acara sumpah penemuan bukti baru termuat dalam SIP[106].

8) Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah permohonan peninjauan kembali diterima pengadilan[107].
9) Kontra memori peninjauan kembali tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.
10) Pengadilan memproses permohonan peninjauan kembali yang sudah diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
11) Pendaftaran permohonan peninjauan kembali secara elektronik yang dilakukan di luar jam yang ditentukan pada angka 10) akan diproses pada hari kerja berikutnya.
12) Pengajuan permohonan dan pembayaran biaya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis perkara diterima paling lambat pukul 23.59 waktu setempat dan akan diproses pada hari kerja berikutnya.
13) Tanggal akta permohonan peninjauan kembali terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 12) menggunakan tanggal pembayaran.
14) Dalam hal pemohon dan/atau termohon diwakili oleh beberapa orang pengguna terdaftar atau beberapa orang pengguna lain maka pemohon dan/atau termohon hanya dapat menggunakan satu akun dan satu domisili elektronik.
15) Apabila terjadi penggantian kuasa maka wajib disampaikan secara elektronik kepada kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data *e-court* perkara yang bersangkutan.
16) Penggantian kuasa harus melampirkan hasil pindai

---

[106] Bagian C.4.5 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019
[107] Bagian C.4.6 Keputusan KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019

(*scan*) surat kuasa asli.

17) Apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara tersebut.

C. ADMINISTRASI BIAYA PERKARA

1. Kasir menerima dan membukukan uang panjar perkara dari penggugat dalam buku induk keuangan perkara dan buku jurnal keuangan perkara dan SIP.
2. Biaya PNBP pendaftaran gugatan dikeluarkan bersamaan dengan pencatatan penerimaan biaya perkara.
3. Biaya proses perkara terdiri dari pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi biaya-biaya:
   a. panggilan;
   b. pemberitahuan;
   c. pemeriksaaan setempat;

      Komponen biaya yang termasuk/termuat dalam pemeriksaan setempat antara lain:

      1) pemeriksaan setempat dalam kota mengacu pada tranportasi perjalanan dinas.
      2) pemeriksaan setempat luar kota mengacu pada standar perjalanan dinas.

   d. ATK;
   e. hak-hak kepaniteraan/PNBP terdiri dari biaya meterei, redaksi, pencatatan kasasi, pencatatan peninjauan kembali, dan sebagaimana ketentuan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya merupakan pendapatan negara;
   f. biaya pemberkasan/penjilidan, biaya pengarsipan dan pengiriman berkas (dikeluarkan pada saat perkara diputus dan termasuk dalam rincian biaya perkara).
4. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perkara sebelum maupun setelah putusan didasarkan pada masing-masing institusi/unit/satuan kerja yang mengelola keuangan tersebut. Pengelolaan dan pertanggungjawaban komponen biaya yang dikeluarkan dalam proses pengajuan upaya hukum dilakukan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung, sedangkan biaya administrasi perkara upaya hukum oleh

pengadilan pengaju (ATK untuk proses upaya hukum, pemberitahuan upaya hukum, penjilidan, dan pengiriman berkas upaya hukum) dilakukan oleh pengadilan pengaju.

5. Dalam hal terdapat kekurangan panjar biaya perkara/biaya upaya hukum, pengadilan memberitahukan pihak penggugat/pemohon upaya hukum untuk menambah panjar biaya perkara/biaya upaya hukum tersebut (misal kekurangan biaya pengiriman berkas perkara, biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan tambahan atas perintah pengadilan tingkat banding/Mahkamah Agung).
6. Kasir melaksanakan tugas-tugas administrasi biaya perkara.
7. Biaya pendaftaran permohonan kasasi, pendaftaran permohonan peninjauan kembali dan penerimaan alasan peninjauan kembali dari pemohon dikeluarkan pada saat setelah diterimanya panjar biaya perkara.
8. Biaya meterai dan redaksi, dikeluarkan dari biaya perkara pada waktu perkara diputus.
9. Biaya pemberkasan/penjilidan dan biaya pengarsipan berkas (dikeluarkan pada saat perkara diputus dan termasuk dalam rincian biaya perkara).
10. Penerimaan hak-hak kepaniteraan dari kasir hingga pukul 12.00 waktu setempat harus diserahkan ke bendahara penerimaan pada hari yang sama, sedangkan penerimaan oleh kasir di atas pukul 12.00 waktu setempat maka penyerahan ke bendahara penerimaan pada hari berikutnya.
11. Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam buku jurnal dan SIP yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama disimpan kasir sedangkan lembar kedua diserahkan kepada panitera sebagai laporan.
12. Panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan surat keputusan ketua pengadilan tata usaha negara mencatat dalam buku induk keuangan yang bersangkutan;
13. Buku keuangan perkara terdiri dari:
    a. jurnal keuangan perkara tingkat pertama;
    b. jurnal permohonan kasasi;
    c. jurnal permohonan peninjauan kembali;
    d. jurnal permohonan eksekusi;

e. buku induk keuangan perkara;

f. buku hak-hak kepaniteraan (tingkat pertama, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali).

14. Buku jurnal keuangan perkara, digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, dimulai dari penerimaan biaya perkara dan ditutup pada tanggal perkara diputus.
15. Buku jurnal diberi nomor halaman, untuk setiap nomor halaman digunakan 2 halaman muka, dengan halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dan halaman lainnya diparaf.
16. Banyaknya halaman pada setiap jurnal harus disebutkan, halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dan halaman selainnya diparaf. Setiap perkara diputus, buku jurnal harus ditutup dan dihitung sisa panjar perkara untuk dikembalikan kepada penggugat.
17. Buku induk keuangan perkara, digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara, dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.
18. Banyaknya halaman buku induk keuangan perkara harus diterangkan dengan jelas, sedangkan setiap halaman pertama dan halaman terakhir harus dibubuhi tandatangan ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dan halaman lainnya cukup diparaf.
19. Penutupan buku induk keuangan perkara dilakukan oleh panitera dan diketahui ketua pengadilan tinggi tata usaha negara.
20. Pada setiap penutupan buku induk keuangan tersebut, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, serta uraian secara terperinci.
21. Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas sesungguhnya, maka harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut.
22. Ketua pengadilan tinggi tata usaha negara sebelum

menandatangani buku induk keuangan, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang disimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.

23. Ketua pengadilan tinggi tata usaha negara setiap saat dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan, dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara, sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan dan meneliti keadaan uang menurut buku kas dan uang yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, disertai buktinya.
24. Penutupan buku induk keuangan perkara atas dasar perintah ketua pengadilan tinggi tata usaha negara, sebagaimana tersebut di atas hendaknya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan secara mendadak, dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
25. Buku hak-hak kepaniteraan, digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan dan dalam kolom keterangan diisi dengan tanggal, jumlah uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama bendahara penerima.
26. Buku jurnal dan buku induk keuangan setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
27. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyediakan dan menetapkan pengelolaan jurnal keuangan perkara secara elektronik.

D. PERSIAPAN PERSIDANGAN

1. Penunjukan Majelis Hakim
   a. Berkas perkara yang sudah dicatat dalam register perkara, setiap perkara paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kalender ketua pengadilan tinggi tata usaha negara menetapkan majelis hakim untuk mengadili perkaranya.
   b. Majelis hakim harus terdiri dari 3 (tiga) orang hakim[108] (kecuali undang-undang menentukan lain), dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) ketua majelis adalah ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, hakim senior atau hakim yang mempunyai kemampuan menurut penilaian ketua pengadilan tinggi

[108] Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

tata usaha negara;

2) susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu.

3) untuk memeriksa perkara-perkara tertentu, ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dapat membentuk majelis khusus/hakim yang telah bersertifikasi;

4) majelis hakim dibantu oleh seorang panitera/panitera pengganti.

c. Petugas meja II mencatat penunjukan majelis hakim termasuk pergantian majelis hakim dalam register perkara sesuai dengan urutan tanggal penerimaan.

d. Setelah panitera menunjuk panitera pengganti dan juru sita/juru sita pengganti, petugas meja II mencatat penunjukan tersebut termasuk pergantian panitera pengganti dalam kolom register induk.

2. Penetapan Pemeriksaan Persiapan/Hari Sidang

a. Setelah menerima berkas dari panitera muda perkara, ketua majelis/hakim yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari kalender sudah harus menetapkan hari pemeriksaan persiapan/persidangan[109].

b. Penetapan hari pemeriksaan persiapan/persidangan dan setiap penundaan persidangan harus dicatat dalam buku register perkara dan SIP dengan tertib.

c. Majelis hakim/hakim harus mempunyai jadwal persidangan (*court calendar*) yang lengkap dan diunggah pada SIP.

d. Penetapan dan/atau penundaan hari sidang selalu dimusyawarahkan dengan anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing.

e. Ketua majelis/hakim dalam menentukan hari sidang harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari[110] kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Hakim dalam pemeriksaan acara cepat, dalam menentukan hari sidang harus memperhatikan tenggang waktu untuk

---

[109] Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

[110] Pasal 64 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, lamanya tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari[111].

3. Panggilan Para Pihak

a. Panggilan

Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan dengan surat tercatat yang ditandatangani oleh panitera pengganti dan dikirim oleh juru sita/juru sita pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:

1) panggilan terhadap para pihak dianggap sah apabila surat panggilan telah dikirim dengan surat tercatat oleh juru sita/juru sita pengganti[112];
2) dalam hal tempat tinggal tidak jelas atau tidak diketahui, maka panggilan kepada pihak ketiga yang berkepentingan dilakukan melalui kepala desa atau lurah setempat;
3) dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia[113], ketua pengadilan tata usaha negara atau ketua pengadilan tinggi tata usaha negara selaku pengadilan tingkat pertama berpedoman pada Nota Kesepahaman Antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Perdata Lintas Negara Nomor : PRJ/HK/00001/04/2023/22 dan Nomor: 02/KMA/NK/IV/2023 Tanggal 11 April 2023 dan Tanggal 6 April 2023 dan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 395/PAN/HK2.1/2/2024 Tanggal 13 Februari 2024, Perihal Kewajiban Menyertakan Dokumen Elektronik dalam Permohonan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Lintas Negara serta Perjanjian Kerjasama lainnya antara Mahakamah Agung dan Kementerian Luar Negeri dalam masalah dimaksud.

---

[111] Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[112] Pasal 65 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[113] Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

b. Panggilan Secara Elektronik

1) Atas dasar perintah hakim, juru sita/juru sita pengganti mengonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik (*e-summons*).

2) Juru sita/juru sita pengganti melakukan *login* pada aplikasi *e-court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator.

3) Juru sita/juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak melalui aplikasi *e-court*.

E. PERSIDANGAN PADA TINGKAT BANDING

1. Persidangan Pada Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

a. Perkara tata usaha negara harus diputus dan selesai diminutasi dalam waktu 3 (tiga) bulan. Jika melampaui jangka waktu tersebut, maka hakim/ketua majelis melaporkan keterlambatan tersebut alasannya kepada ketua pengadilan tinggi tata usaha negara. Selanjutnya Ketua pengadilan tinggi tata usaha negara meneruskan tembusan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketua Mahkamah Agung[114], kecuali untuk perkara tertentu yang telah ditentukan tenggang waktunya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Waktu persidangan dimulai pukul 09.00 waktu setempat.

c. Apabila sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, maka ketua majelis/hakim membuat penetapan hari sidang dan segera diberitahukan kepada para pihak.

d. Apabila ketua majelis yang ditunjuk berhalangan tetap, maka ketua pengadilan tinggi tata usaha negara menunjuk ketua majelis yang baru dengan penetapan.

e. Apabila ketua majelis yang ditunjuk berhalangan

---

[114] SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

sementara untuk bersidang, pemeriksaan perkara harus ditunda dalam persidangan oleh salah satu hakim anggota dan apabila berhalangan tetap, ketua pengadilan tinggi tata usaha negara menunjuk ketua majelis yang baru dengan penetapan.

f. Apabila salah seorang hakim anggota majelis berhalangan sementara ataupun tetap, ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dengan penetapan menunjuk hakim lain sebagai pengganti.

g. Persidangan perkara tata usaha negara dilaksanakan di ruang sidang, kecuali dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan di lokasi objek sengketa atau tempat lain untuk pemeriksaan dokumen dan fakta lain yang relevan sesuai penilaian majelis hakim).

h. Persidangan perkara tata usaha negara dilaksanakan terbuka untuk umum. Persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum dalam hal perkara menyangkut kesusilaan atau ketertiban umum dan keselamatan negara[115].

i. Ketua majelis/hakim bertanggungjawab atas ketepatan pemeriksaan perkara yang dipercayakan kepadanya, dan agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, maka sebelum pemeriksaan perkara dimulai harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

j. Dalam keadaan tertentu, maka persidangan dapat dilaksanakan di luar gedung pengadilan/di gedung pengadilan lain, berdasarkan penetapan ketua pengadilan.

k. Persidangan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, khususnya dalam perkara prodeo, hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan bukti surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pemeriksaan setempat atas inisiatif majelis hakim atau atas perintah majelis hakim banding/kasasi/peninjauan kembali.

---

[115]Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun.

2. Persidangan Banding secara elektronik (*e-litigation*)

a. Prosedur Upaya Hukum Banding secara Elektronik

1) Pengadilan tingkat banding menerima permohonan dan berkas/dokumen upaya hukum yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju dalam SIP.

2) Pengadilan tingkat banding memeriksa kelengkapan berkas/dokumen elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Dalam hal terdapat berkas/dokumen yang tidak dapat dialihmediakan/digitalisasi, atas permintaan pengadilan tingkat banding, pengadilan pengaju mengirimkan dokumen fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan.

4) Berkas/dokumen perkara yang dikirim secara elektronik harus dapat dipastikan kelengkapannya serta dapat terbaca dengan jelas.

5) Kelengkapan berkas/dokumen perkara sebagaimana dimaksud pada angka 4) adalah tanggung jawab panitera pengadilan pengaju.

6) Pengiriman berkas/dokumen yang tidak lengkap merupakan pelanggaran disiplin.

7) Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan berkas/dokumen elektronik, pengadilan tingkat banding memberikan notifikasi/pemberitahuan secara elektronik kepada pengadilan pengaju mengenai hal-hal yang harus dilengkapi.

8) Dalam hal berkas/dokumen elektronik telah dinyatakan lengkap, tetapi terdapat dokumen, yang tidak jelas/terbaca, hakim pemeriksa pada pengadilan tingkat banding dapat meminta kepada pengadilan pengaju untuk mengunggah kembali berkas/ dokumen elektronik yang dimaksud.

9) Pengadilan pengaju mengirimkan berkas/dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan angka 8) melalui SIP paling lambat 3 (tiga) Hari setelah

notifikasi/permintaan secara elektronik dikirimkan.

10) Dalam hal berkas upaya hukum banding telah lengkap, kepaniteraan pengadilan tingkat banding menindaklanjuti penanganan perkara upaya hukum banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11) Penomoran, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, dan penetapan hari sidang dilakukan melalui SIP.
12) Setelah penunjukan panitera sidang, hakim/ketua majelis menetapkan hari sidang, menginput *court calendar* dan jadwal sidang.
13) Majelis hakim memeriksa perkara dengan cara mempelajari dokumen bundel A dan bundel B melalui SIP.
14) Setelah mempelajari dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 13), majelis hakim melakukan musyawarah, baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi.
15) Putusan diucapkan secara elektronik.
16) Panitera sidang membuat berita acara sidang dan mengunggah ke dalam SIP.

b. Pemeriksaan Tambahan

1) Dalam hal majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, majelis hakim memerintahkan melalui putusan sela secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada pengadilan pengaju[116].
2) Putusan sela tersebut disampaikan oleh panitera pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju melalui SIP.
3) Hasil pemeriksaan tambahan dituangkan ke dalam berita acara yang diunggah ke dalam SIP untuk dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding.
4) Dokumen hasil pemeriksaan tambahan

[116] Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

sebagaimana dimaksud pada angka 3) merupakan bagian dari berkas bundel A.

5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) juga berlaku terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang.

c. Pencabutan Upaya Hukum Banding

1) Pembanding dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum banding melalui SIP.

2) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan pengadilan tingkat pertama menerbitkan akta pencabutan secara elektronik.

3) Berdasarkan akta pencabutan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2), ketua pengadilan menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.

4) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding, permohonan pencabutan tersebut diteruskan ke pengadilan tingkat banding melalui SIP dan diputus oleh majelis hakim tingkat banding dengan penetapan.

5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) disampaikan kepada para pihak melalui SIP.

d. Putusan/Penetapan dan Salinan Putusan/Penetapan

1) Putusan/Penetapan

a) Putusan/penetapan pengadilan tingkat banding diucapkan oleh hakim ketua secara elektronik.

b) Putusan/penetapan ditandatangani secara manual oleh majelis hakim/hakim dan panitera sidang.

2) Salinan Putusan/Penetapan Elektronik

a) Salinan putusan/penetapan dibubuhi tandatangan elektronik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Hakim/ketua majelis mengunggah naskah putusan/penetapan ke dalam SIP.

c) Panitera mencocokkan naskah putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dengan putusan/penetapan yang telah ditandatangani oleh hakim/ majelis hakim, selanjutnya Panitera Sidang menandatangani secara elektronik di dalam SIP.

d) Panitera mengirim salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c) kepengadilan pengaju secara elektronik.

e) Pengadilan pemberitahuan pengaju salinan menyampaikan putusan/penetapan kepada para pihak melalui SIP paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan/penetapan dari pengadilan tingkat banding.

f) Panitera yang sedang berhalangan tidak tetap berwenang untuk menandatangani putusan/penetapan secara elektronik.

g) Salinan putusan/penetapan elektronik kekuatan dan akibat hukum yang sah.

h) Dalam hal para pihak meminta putusan/ penetapan dalam bentuk salinan memiliki salinan cetak, permintaan disampaikan kepada pengadilan pengaju.

i) Salinan putusan/penetapan elektronik ataupun cetak dikenai PNBP yang dapat dibayarkan secara elektronik.

F. BERITA ACARA SIDANG (BAS)

1. Panitera/panitera pengganti yang ikut bersidang wajib membuat BAS yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan[117], yaitu mengenai susunan persidangan, pihak yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.
2. Hakim/ketua sidang dan panitera/panitera pengganti bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran BAS.
3. BAS harus sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera/panitera pengganti paling lambat 1 (satu) hari sebelum sidang berikutnya.
4. Apabila hakim ketua majelis/hakim dalam acara cepat berhalangan menandatangani BAS dan/atau putusan, maka bas atau putusan ditandatangani oleh ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dengan menyatakan berhalangan hakim ketua majelis/hakim[118].
5. Apabila panitera pengganti berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan/penetapan dan BAS. Putusan/penetapan dan BAS ditandatangani oleh panitera dengan menyebutkan alasannya[119].

G. RAPAT PERMUSYAWARATAN

1. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia[120].
2. Ketua majelis mempersilahkan hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim anggota I dan terakhir ketua majelis. Semua pendapat harus dikemukakan dengan argumentasi yuridis, sosiologis dan/atau filosofis, kecuali untuk perkara yang tidak dipertimbangkan sampai pokok sengketa.
3. Dalam rapat permusyawaratan, dalam hal tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak dan pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan[121].

---

[117] Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[118] Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[119] *Ibid*
[120] Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[121] Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4. Dalam hal tidak ada kesatuan pendapat diantara majelis hakim (dalam hal ada tiga pendapat yang berbeda dalam satu majelis), maka putusan dijatuhkan berdasarkan pendapat hukum dari ketua majelis[122].

H. PUTUSAN

1. Pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan yang lengkap harus sudah siap, dan setelah putusan diucapkan segera diserahkan kepada panitera pengganti untuk diminutasi dalam waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
2. Pengadilan wajib menyampaikan amar/salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan[123].
3. Dalam perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-court*, para pihak dapat mengunduh salinan putusan setelah panitera membubuhkan tandatangan elektronik dan setelah membayar biaya PNBP yang dapat dibayarkan melalui akun virtual (*virtual account*).
4. Amar putusan pengadilan tinggi tata usaha negara harus dipublikasikan melalui SIP pada hari yang sama saat putusan diucapkan.
5. Format putusan agar diketik dalam bentuk *word office* atau RTF. Format putusan: jenis huruf: *font* Arial, ukuran 12, *margin* kiri 5 cm, *margin* kanan 1,5 cm, *margin* atas 3 cm, *margin* bawah 3 cm, spasi 1,5, ukuran kertas A4, 80 gram[124].

I. MINUTASI PERKARA

1. Panitera pengganti segera menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pemeriksaan kepada panitera muda perkara, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan di dalam SOP.
2. Hakim/ketua majelis dan panitera atau panitera pengganti bertanggungjawab atas ketepatan batas waktu minutasi perkara.

---

[122] Pasal 107 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[123] Pasal 51A ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[124] Bagian F. Format Cetak Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tigkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

J. BERKAS

BUNDEL A

1. Bundel A elektronik
    a. surat gugatan:
        1) surat gugatan/permohonan;
        2) perbaikan surat gugatan (jika ada);
        3) gugatan yang telah diperbaiki (jika ada);
        4) gugatan perlawanan (jika ada).
    b. surat kuasa/ surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
    c. dokumen upaya administratif (jika ada);
    d. penetapan *dismissal* /lolos *dismissal* (jika ada);
    e. penetapan penunjukan majelis hakim/hakim;
    f. penunjukan panitera sidang;
    g. penunjukan juru sita/juru sita pengganti;
    h. penetapan pemeriksaan persiapan (jika ada);
    i. penetapan hari sidang;
    j. relaas-relaas panggilan/*e-summon*;
    k. penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan hasil mediasi (jika ada);
    l. *court calendar*;
    m. berita acara sidang (dalam satu kesatuan);
    n. jawaban;
    o. replik (jika ada);
    p. duplik (jika ada);
    q. permohonan intervensi (jika ada);
    r. putusan sela (jika ada);
    s. penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);
    t. surat bukti penggugat (jika ada);
    u. surat bukti tergugat (jika ada);
    v. surat bukti intervensi (jika ada);
    w. berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
    x. simpulan penggugat (jika ada);
    y. simpulan tergugat (jika ada);
    z. simpulan intervensi (jika ada)
    aa. penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada);
    bb. surat lainnya (jika ada).

2. Bundel A Fisik

Petugas meja III segera menyusun berkas perkara dan putusan yang diterima dari panitera pengganti yang disebut “Bundel A”.

Bundel A terdiri dari:

a. daftar isi bundel A;
b. daftar periksa (*checklist*) isi berkas yang dibuat oleh petugas dan diketahui oleh panitera;
c. dokumen upaya administratif (jika ada);
d. surat gugatan/permohonan:
    1) surat gugatan awal/surat permohonan;
    2) surat gugatan perlawanan (jika ada);
    3) surat gugatan yang sudah diperbaiki (jika ada).
e. penetapan-penetapan: penetapan *dismissal* /lolos *dismissal* (jika ada), penetapan beracara dengan cuma-cuma (jika ada), penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa (jika ada), penetapan majelis hakim/hakim, penunjukan panitera/panitera pengganti dan juru sita/juru sita pengganti, penetapan pemeriksaan persiapan (pada acara biasa), penetapan hari persidangan dan penetapan lainnya;
f. surat panggilan (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, pihak ketiga/intervensi, saksi/ahli dan panggilan lainnya);
g. berita acara:
    1) berita acara sidang perlawanan (jika ada);
    2) berita acara pemeriksaan persiapan (acara biasa); dan/atau
    3) berita acara persidangan (sidang pembacaan gugatan/permohonan, jawaban, putusan sela intervensi (jika ada), replik (jika ada), duplik (jika ada), pembuktian, pemeriksaan setempat (jika ada), kesimpulan, dan putusan), yang dimasukkan dalam kesatuan berita acara.
h. surat kuasa (jika memakai kuasa), ijin beracara insidentil dari ketua pengadilan tinggi tata usaha negara, surat tugas dari tergugat (jika ada);
i. daftar bukti beserta bukti penggugat/pemohon (bukti surat maupun bukti elektronik);
j. daftar bukti beserta bukti tergugat/termohon (bukti surat

maupun bukti elektronik);

k. daftar bukti beserta bukti intervensi (jika ada) (bukti surat maupun bukti elektronik);

l. surat atau dokumen lainnya (termasuk perubahan alamat kuasa dan pihak- pihak).

Catatan :

- Ketebalan pemberkasan maksimal 30 cm (setiap bundel berkas diberi nomor urut, misalnya A1, A2, dst).
- Setiap batasan antar dokumen dibuat tanda pembatas atau catatan kertas (kupingan), termasuk surat jawaban dengan warna dan ukuran sebagai berikut:
  - Warna kupingan kuning (ukuran panjang 8 cm, lebar 5,5 cm);
  - Penulisan dengan huruf kapital, jenis huruf: Arial dengan ukuran menyesuaikan (contoh SURAT GUGATAN PERBAIKAN).

BUNDEL B

1. Bundel B Kasasi

   Bundel B yang akan menjadi arsip berkas perkara kasasi pada Mahkamah Agung, terdiri dari:

   a. daftar isi bundel B kasasi;
   b. daftar periksa (*checklist*) isi berkas yang dibuat oleh petugas dan diketahui oleh panitera;
   c. salinan putusan tingkat pertama;
   d. surat pemberitahuan putusan tingkat pertama beserta resi fotokopi pengiriman (jika ada);
   e. akta kasasi beserta surat permohonan kasasi (jika ada surat permohonan);
   f. pemberitahuan permohonan kasasi;
   g. memori kasasi dan tanda terima memori kasasi;
   h. pemberitahuan penyerahan memori kasasi;
   i. kontra memori kasasi dan tanda terima kontra memori kasasi (jika ada);
   j. pemberitahuan penyerahan kontra memori kasasi (jika ada);
   k. pemberitahuan kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) (khusus untuk pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama);

l. surat kuasa khusus (jika ada);

m. tanda bukti setoran biaya proses kasasi;

n. salinan digital (*soft copy*) berkas perkara kasasi (dalam bentuk PDF antara lain: relaas pemberitahuan putusan pengadilan tingkat banding, akta permohonan kasasi, tanda terima memori kasasi, dalam bentuk RTF antara lain memori kasasi, kontra memori kasasi (jika ada), putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding);

o. surat keterangan panitera apabila termohon kasasi tidak menyerahkan kontra memori kasasi (jika ada);

p. *barcode* direktori putusan;

q. surat pernyataan kelengkapan dan autentikasi berkas perkara.

Catatan :

- Ketebalan pemberkasan maksimal 30 cm (setiap bundel berkas diberi nomor urut, misalnya A1, A2, dst)
- Setiap batasan antar dokumen dibuat kartu identitas berkas (kupingan) dengan warna dan ukuran sebagai berikut;
  - Warna kupingan biru muda (Ukuran Panjang 8 cm, lebar 5.5 cm)
  - Penulisan dengan huruf kapital, jenis huruf: Arial dengan ukuran menyesuaikan (untuk penulisan PENERIMAAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PT.TUN)

2. Bundel B Peninjauan Kembali

Bundel B yang akan menjadi arsip berkas perkara peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, terdiri dari:

a) salinan putusan tingkat pertama;

b) salinan putusan tingkat banding (jika ada);

c) salinan putusan tingkat kasasi (jika ada);

d) pemberitahuan putusan (tangkapan layar pada *e-court*);

e) surat kuasa khusus (jika memakai kuasa);

f) akta permohonan peninjauan kembali;

g) surat permohonan peninjauan kembali dan tanda terima memori peninjauan kembali;

h) daftar bukti beserta surat bukti (termasuk bukti baru/novum) dari pemohon peninjauan kembali;

i) surat pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan/memori peninjauan kembali kepada pihak lawan;

j) kontra memori peninjauan kembali dan tanda terima kontra memori peninjauan kembali (jika ada);

k) pemberitahuan penyerahan kontra memori peninjauan kembali (jika ada);

l) pemberitahuan *inzage*;

m) tanda bukti bayar biaya perkara peninjauan kembali;

n) daftar isi bundel B peninjauan kembali;

o) *checklist* isi berkas yang dibuat oleh petugas dan diketahui oleh panitera;

p) relaas pemberitahuan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas putusan tingkat pertama/ banding, relaas pemberitahuan isi putusan kasasi;

q) penetapan hakim dan berita acara sumpah dalam hal permohonan peninjauan kembali berdasarkan adanya novum;

r) *soft copy* berkas perkara peninjauan kembali (dalam bentuk PDF) antara lain akta permohonan peninjauan kembali, berita acara sumpah bukti baru/novum dalam hal peninjauan kembali diajukan karena alasan adanya bukti baru, dalam bentuk RTF antara lain alasan peninjauan kembali (jika ada), jawaban alasan peninjauan kembali (jika ada), putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi);

s) *barcode* direktori putusan;

t) surat pernyataan kelengkapan dan autentikasi berkas perkara.

Catatan :

- Ketebalan pemberkasan maksimal 30 cm (setiap bundel berkas diberi nomor urut, misalnya A1, A2, dst);
- Setiap batasan antar dokumen dibuat kartu identitas berkas (kupingan) dengan warna dan ukuran sebagai berikut;
    - Warna Kupingan biru (Ukuran Panjang 8 cm lebar 5.5 cm)

- Jenis huruf Arial dengan ukuran menyesuaikan (untuk penulisan TANDA TERIMA MEMORI PK TUN)

K. REGISTER, LAPORAN, DAN PENGARSIPAN

1. Register Perkara
   a. Register perkara pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai tingkat pertama terdiri atas:
      1) register induk perkara gugatan;
      2) register pendaftaran surat kuasa khusus/insidentil;
      3) register bantu posbakum.
   b. Register tingkat banding terdiri dari register perkara banding.
   c. Peradilan tata usaha negara menyelenggarakan *e-register* perkara yang merupakan aplikasi pencatatan perkara secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari aplikasi SIPP.
   d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyediakan dan menetapkan pengelolaan *e-register* perkara tersebut.
   e. Seluruh satuan kerja pengadilan wajib menggunakan *e-register* perkara melalui SIP.
2. Laporan
   a. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkewajiban membuat laporan tentang keadaan perkara, jenis perkara, keuangan perkara, kegiatan hakim dan panitera/panitera pengganti dengan jenis laporan.
   b. Macam Laporan
      1) Pengadilan tinggi tata usaha negara tingkat banding terdiri dari:
         a) laporan bulanan terdiri dari:
            (1) laporan keadaan perkara;
            (2) laporan jenis perkara;
            (3) laporan perkara cuma-cuma (prodeo);
            (4) laporan keuangan perkara.
         b) laporan semester terdiri dari:
            (1) laporan kegiatan hakim;
            (2) laporan kegiatan panitera/panitera

pengganti;

(3) laporan waktu penyelesaian perkara.

c) laporan tahunan terdiri dari:

(1) laporan perkara tahunan;

(2) laporan waktu penyelesaian perkara.

2) Pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama terdiri dari:

a) laporan bulanan

(1) laporan keadaan perkara;

(2) laporan jenis perkara;

(3) laporan keuangan perkara.

b) laporan empat bulanan:

(1) laporan perkara yang dimohonkan kasasi;

(2) laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali;

(3) laporan perkara yang dimohonkan eksekusi.

c) laporan semester:

(1) laporan kegiatan hakim;

(2) laporan kegiatan panitera/panitera pengganti;

(3) laporan waktu penyelesaian perkara.

d) laporan tahunan:

(1) laporan tahunan perkara;

(2) laporan waktu penyelesaian perkara.

c. Pengadilan tinggi tata usaha negara membuat evaluasi atas laporan bulanan keadaan perkara yang berasal dari seluruh pengadilan tata usaha negara di wilayah hukumnya untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung.

d. Pengadilan tinggi tata usaha negara membuat rekapitulasi setiap akhir tahun atas laporan dari seluruh pengadilan tata usaha negara di wilayah hukumnya tentang keadaan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan jenis perkara serta mengirimkan kepada Mahkamah Agung.

e. Disamping menyampaikan laporan secara manual, juga harus menyampaikan laporan secara elektronik.

f. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyediakan dan menetapkan pengelolaan laporan perkara secara elektronik.

3. Arsip Perkara

a. Setelah putusan dikirim ke para pihak, maka petugas meja III menyimpan berkas perkara untuk keperluan arsip.

b. Secara umum berkas perkara dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu :

1) berkas yang masih berjalan (aktif) yakni berkas perkara yang telah diputus pada tingkat pertama dan diminutasi, tetapi masih dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali;

2) arsip berkas perkara (*in aktif*) yakni berkas perkara yang telah selesai dalam arti telah berkekuatan hukum tetap.

c. Berkas perkara yang masih berjalan (aktif) dikelola oleh kepaniteraan perkara/petugas meja III, sementara arsip berkas perkara *in aktif* dipindahkan pengelolaannya pada kepaniteraan hukum dengan dilengkapi surat keterangan BHT.

d. Pembenahan dan penataan berkas perkara aktif dan arsip berkas perkara tidak aktif dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni:

1) Tahap Pertama

a) Pendataan semua berkas perkara dengan memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara (panitera muda perkara).

b) Berkas perkara aktif disusun dan dikelompokkan sesuai proses upaya hukum, sedangkan penyimpanannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi ruang.

c) Penataan berkas aktif perkara dimasukkan dalam sampul/box dengan diberikan catatan:

(1) nomor urut box;

(2) tahun perkara;

(3) jenis perkara;

(4) nomor urut perkara.

2) Tahap Kedua

Penataan arsip berkas perkara tahap kedua dilakukan oleh kepaniteraan hukum, dengan cara:

a) membuat daftar isi yang ditempel dalam box;

b) arsip yang telah disusun menurut jenis perkara, dipisahkan menurut klasifikasi perkara dan disimpan dalam box tersendiri;

c) menyimpan arsip berkas perkara yang telah dimasukkan dalam box/sampul untuk disimpan dalam rak/lemari, berdasarkan klasifikasi dan tahun pengajuan gugatan;

d) membuat Daftar Isi Rak (D.I.R.) dan Daftar Isi Lemari (D.I.L.);

e) menginput data arsip perkara in aktif dalam SIPP.

3) Tahap Ketiga

Penataan arsip berkas perkara tahap ketiga dilakukan oleh kepaniteraan hukum dengan cara:

a) memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus;

b) penataan dan pengelolaan arsip berkas perkara agar dilaporkan ketua pengadilan tinggi tata usaha negara kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara cq. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

e. Pengadilan wajib menyimpan berkas perkara dalam bentuk digital dan/atau dokumen elektronik (*e-document*).

f. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyediakan dan menetapkan pengelolaan arsip perkara secara elektronik.

III. TEKNIS PERADILAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA UMUM

A. PERKARA GUGATAN

1. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat pemerintahan dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan[125]. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara tingkat pertama atau pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama[126].

---

[125] Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

[126] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah[127]:
   a) keputusan dan/atau tindakan yang disengketakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   b) keputusan dan/atau tindakan yang disengketakan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

B. PEMBEBASAN BIAYA PERKARA DALAM GUGATAN SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)

1. Penggugat/pemohon yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara terlebih dahulu sesuai ketentuan yang dimaksud dalam peraturan mahkamah agung mengenai pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan[128].
2. Sebelum suatu gugatan dicatat dalam buku register, penggugat/pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), yang apabila dikabulkan ketua pengadilan membuat penetapan tentang izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Khusus perkara prodeo, penggugat wajib mengunggah penetapan ketua pengadilan tentang izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), permohonan dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi saat mendaftarkan gugatan secara elektronik.
4. Terhadap penetapan ketua pengadilan tentang izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal surat penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud di atas menolak permohonan pembebasan biaya perkara, maka surat dimaksud harus dimaknai bukan sebagai keputusan administrasi pemerintahan melainkan keputusan yang bersifat teknis yudisial sehingga tidak dapat diajukan sebagai objek sengketa tata usaha negara.
5. Semua penerimaan dan pengeluaran terkait dengan gugatan perkara cuma-cuma (prodeo) meskipun nihil harus tetap dicatat dalam jurnal. Untuk yang cuma-cuma (prodeo) yang dibiayai

---

[127] Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[128] Pasal 1 60 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

oleh negara, tata caranya mengikuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

6. Pemberian izin beracara secara cuma-cuma (prodeo) berlaku untuk masing-masing tingkatan pemeriksaan di setiap pengadilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat pemeriksaan pengadilan sekaligus.

C. OBJEK GUGATAN

Objek gugatan adalah:

1. Keputusan[129] dan/atau tindakan administrasi pemerintahan[130], yang telah ditempuh upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan, yang tidak wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak termasuk objek gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pembatasan dan/atau pengecualian objek sengketa di peradilan tata usaha negara.

D. SUBJEK GUGATAN

1. Penggugat
   a. Penggugat adalah orang perseorangan, badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, kelompok masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat rentan (antara lain penyandang disabilitas) yang merasa kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan sehingga mengajukan gugatan tertulis/elektronik kepada pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan dan/atau tindakan

---

[129] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

[130] Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf a Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

b. Potensi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan suatu keadaan berdasarkan alat bukti yang dapat diperkirakan akan menimbulkan kerugian bagi penggugat.

c. Apabila penggugat meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan gugatan sepanjang masih memiliki kepentingan hukum.

d. Ditolak atau dikabulkannya ahli waris sebagai penggugat pengganti ditetapkan dengan penetapan ketua pengadilan atau majelis hakim yang ditunjuk, penetapan dimaksud berlaku juga untuk upaya hukum.

e. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat menjadi penggugat, dalam hal dikeluarkan keputusan dan/atau dilakukan tindakan pemerintahan yang merugikan aset badan pemerintahan dan/atau untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

f. Perwakilan kelompok dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan warga negara dalam gugatan warga negara (*citizen law suit*) untuk kepentingan umum dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tergugat

Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan, yang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan pemerintahan, yang digugat oleh warga masyarakat atau badan pemerintahan[131].

---

[131] Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

E. KUASA

1. Surat Kuasa Khusus

a. Bagi penggugat, harus memuat secara jelas dan rinci mengenai:

1) judul surat kuasa;
2) identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa (nama, kewarganegaran, tempat tinggal, pekerjaan, domisili elektronik);
3) pernyataan pemberian kuasa khusus secara jelas dan tegas;
4) identitas tergugat dan objek sengketa;
5) maksud pemberian kuasa;
6) ruang lingkup pemberian kuasa, apakah sebatas tingkat pertama atau termasuk banding maupun kasasi;
7) memuat tahapan persidangan dari mulai pembuatan dan penandatanganan gugatan sampai dengan putusan dalam hal dilakukan banding, kasasi harus memuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi;
8) tempat dan tanggal pemberian kuasa;
9) tanda tangan pemberi dan penerima kuasa sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali bagi yang tidak bisa baca/tulis atau sebab lain dapat dengan cap jempol yang disahkan (*waarmerking*) oleh pejabat yang berwenang;
10) meterai tempel sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11) dalam hal surat kuasa dibuat secara elektronik harus disertai dalam bentuk cetak/tertulis.

b. Bagi tergugat, berlaku syarat kuasa sebagaimana tersebut huruf a dengan menambahkan nomor perkaranya.

2. Kuasa Lisan

Pemberian kuasa dapat diberikan secara lisan yang dinyatakan dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan dengan menyebut ruang lingkup pemberian kuasa, tahapan persidangan, dan upaya hukum.

3. Kuasa Penggugat:
    a. Orang perorangan, dapat memberikan kuasa kepada:
        1) advokat; dan/atau
        2) penerima kuasa insidentil, dengan syarat:
            a) mampu beracara;
            b) keluarga sedarah atau semenda (hubungan perkawinan) sampai dengan derajat ketiga, dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah atau nama lain yang sejenis; dan
            c) mendapat izin dari ketua pengadilan;
    b. Badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, kelompok masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat rentan dapat memberikan kuasa kepada:
        1) advokat;
        2) karyawan atau sebutan lain yang ada hubungan pekerjaan dengan badan hukum perdata;
        3) pimpinan dari masyarakat hukum adat; dan/atau
        4) lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian dalam perlindungan kelompok rentan.
    c. Badan pemerintahan, dapat memberikan kuasa kepada:
        1) advokat;
        2) bagian hukum atau sebutan lain yang sejenis; dan/atau
        3) jaksa pengacara negara, dengan syarat untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
4. Kuasa Tergugat

    Tergugat (badan/pejabat administrasi pemerintahan), dapat memberikan kuasa kepada:
    a. advokat;
    b. bagian Hukum atau sebutan lain yang sejenis; dan/atau
    c. dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas dan larangan konflik kepentingan, jaksa pengacara negara dapat diterima sebagai kuasa tergugat sepanjang tidak bertindak di kesempatan berbeda sebagai kuasa penggugat dengan syarat untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan

negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

5. Ketentuan terkait penerimaan kuasa bagi penggugat dan tergugat, berlaku juga bagi penerima kuasa terhadap pihak intervensi.
6. Dalam hal badan pemerintahan mengatur secara khusus tentang pemberian kuasa, bukan dalam arti pelimpahan kewenangan, pengadilan menggunakan aturan dasar yang mengatur pemberian kuasa tersebut.
7. Dalam hal surat kuasa dibuat di luar negeri, bentuk surat kuasa tersebut harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
8. Surat kuasa substitusi hanya dapat diterima apabila di dalam surat kuasa awal menyebutkan adanya hak substitusi.
9. Penambahan kuasa baru dapat dilakukan pada tiap tahap persidangan yang dapat dilakukan dengan cara menambah kuasa pada surat kuasa yang lama dengan klausul tidak mencabut surat kuasa yang lama atau mengganti dengan surat kuasa yang baru.
10. Advokat magang diperbolehkan/diberi kesempatan namanya dimasukkan dalam surat kuasa dengan diberi tanda bintang (*) dan mendampingi advokat yang telah disumpah dalam rangka pembelajaran, namun tidak dapat beracara sendiri.
11. Berakhirnya pemberian kuasa dapat terjadi karena:
    a. dicabut oleh pemberi kuasa dan penarikan kembali kuasa oleh penerima kuasa, harus diberitahukan kepada majelis hakim;
    b. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
    c. dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
    d. pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan;

e. Pemberi kuasa atau penerima kuasa dinyatakan pailit oleh pengadilan;

f. Penerima kuasa tidak dapat bertindak lagi sebagai penerima kuasa misalkan karena statusnya sebagai advokat ditangguhkan oleh organisasi profesi atau masa berlaku kartu tanda advokatnya telah berakhir.

F. KOMPETENSI

1. Kompetensi Absolut

a. Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan di tingkat pertama[132] dan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kompetensi absolut pengadilan tinggi tata usaha negara[133]

1) Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan di tingkat banding.

2) Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya.

3) Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif pengadilan tata usaha negara, sebagai berikut[134]:

a. gugatan sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang meliputi tempat kedudukan tergugat;

b. apabila tergugat lebih dari satu badan dan/atau pejabat pemerintahan dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan

---

[132]Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[133]Pasal 51 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[134]Pasal 54 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan dan/atau pejabat pemerintahan;

c. dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;

d. apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan pada pengadilan di Jakarta;

e. apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

3. Kompentensi Khusus

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan secara khusus memberikan yurisdiksi kepada pengadilan tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara, antara lain sebagai berikut:

a. pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri Hukum dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta). Selanjutnya, pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara tersebut hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

b. pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Panitia Seleksi (Ponsel) terkait hasil hasil seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara secara langsung ke pengadilan tinggi tata usaha negara (*in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado), tanpa harus menempuh upaya

administratif terlebih dahulu sebagaimana sengketa tata usaha negara lain pada umumnya (vide Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua).

G. UPAYA ADMINISTRATIF DAN PENYELESAIAN DALAM SENGKETA TUN

1. Upaya Administratif Dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

a. Peradilan tata usaha negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif[135].

b. Peradilan tata usaha negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peradilan tata usaha negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut atau sebutan lain yang mengatur persyaratan formal pengajuan gugatan
(Contoh: hak gugat administrasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air).

d. Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, peradilan tata usaha negara menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

---

[135] Pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 tahun 2018.

tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminisratif, pengadilan tinggi tata usaha negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

1) peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif atau sebutan lain yang sejenis di antaranya sanggah banding dalam jasa konstruksi;
2) peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit pengadilan tinggi tata usaha negara berwenang mengadili;
3) pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili dalam hal:
    a) tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Administratif.
    b) apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

f. Perkara-perkara yang tidak memerlukan upaya administratif.

1) Perkara khusus yang diatur dalam:
    a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 21.

2) Pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana atau komisi etik.

3) Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*).

2. Tenggang Waktu

a. Tenggang waktu pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif[136].

b. Dalam hal upaya administratif tidak ditanggapi oleh pejabat maupun atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif seharusnya diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan;

c. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu

---

[136] Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun jo. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 tahun 2018

pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya[137].

H. PROSES DISMISSAL

1. Ketua pengadilan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar sesuai yang ditentukan dalam Pasal 62 UU Peratun (proses *dismissal*), dalam hal:
   a. pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
   b. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU Peratun tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun penggugat telah diberitahu dan diperingatkan;
   c. gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak;
   d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan/tindakan tata usaha negara yang digugat;
   e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;
   f. dalam melakukan proses *dismissal*, ketua pengadilan diminta agar tidak mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Peratun.
2. Ketua pengadilan dapat memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum mengeluarkan penetapan proses *dismissal* (perlu atau tidaknya pemanggilan tersebut bersifat kasuistis).
3. Ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan lolos atau tidak lolos proses *dismissal* (kecuali hukum acaranya tidak mengatur adanya kewajiban proses *dismissal*, misalnya: acara cepat, acara singkat dalam gugatan perlawanan, dan acara sengketa tun khusus);
4. Dalam pemeriksaan proses *dismissal*, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang hakim sebagai raportir (*raporteur*).

---

[137] Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 tahun 2018.

5. Pemeriksaan proses *dismissal* dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan, dan ketua pengadilan tidak mengenakan toga sidang.
6. Pembacaan penetapan proses *dismissal* dilakukan secara elektronik.
7. Penetapan proses *dismissal* ditandatangani oleh ketua pengadilan dan panitera atau pejabat kepaniteraan yang ditunjuk oleh panitera.
8. Wakil ketua pengadilan, Plt atau Plh ketua pengadilan dapat menandatangani penetapan proses *dismissal* dalam hal ketua pengadilan berhalangan.
9. Apabila pihak penggugat tidak sependapat atau berkeberatan karena gugatannya tidak lolos proses *dismissal* berdasarkan penetapan ketua pengadilan, maka dapat mengajukan gugatan perlawanan. Gugatan perlawanan terhadap penetapan *dismissal* diperiksa dengan acara singkat (Pasal 62 ayat (4) UU Peratun).
10. Nomor perkara gugatan perlawanan sama dengan nomor perkara awal dengan penambahan kode PLW.
11. Nomor perkara setelah gugatan perlawanan dikabulkan kembali ke nomor perkara awal.
12. Perhitungan tenggang waktu penanganan perkara 5 (lima) bulan (sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan) dihitung sejak penunjukan majelis hakim perlawanan.
13. Pemeriksaan perkara setelah perlawanan dikabulkan dimulai dengan pemeriksaan persiapan.

I. PENETAPAN PENUNDAAN

1. Asas *praesumptio iustae causa* dituangkan dalam Pasal 67 ayat (1) UU Peratun yang menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/pejabat tata usaha negara serta tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang digugat.
2. Penundaan pelaksanaan terhadap keputusan/tindakan merupakan pengecualian dari asas *praesumptio iustae causa*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan/tindakan,

badan/pejabat dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan, kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah, atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sah.

3. Dalam keadaan tertentu demi perlindungan hukum, penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan/tindakan aktif ditunda selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b UU Peratun *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan pengadilan dapat mengabulkan permohonan penundaan hanya apabila:
   a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan/tindakan aktif tersebut;
   b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan/tindakan aktif tersebut;
   c. pengadilan dapat menunda berlakunya keputusan dan/atau tindakan aktif jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial.
5. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan ketua/majelis hakim /hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan/tindakan aktif obyek sengketa:
   a. objek sengketanya adalah keputusan administrasi pemerintahan dan/atau tindakan pemerintahan;
   b. penundaan harus dimohonkan oleh penggugat dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan/tindakan aktif yang digugat itu tetap dilaksanakan, bukan atas prakarsa hakim;
   c. yang ditunda adalah daya berlakunya keputusan administrasi pemerintahan dan/atau tindakan aktif pemerintahan, maka jika daya berlakunya keputusan administrasi pemerintahan dihentikan, akibat hukumnya

seluruh tindakan pelaksanaan keputusan administrasi pemerintahan terhenti. atas dasar itu, tidak boleh menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan administrasi pemerintahan dengan hanya berlaku untuk sebagian saja (secara parsial);

d. sebelum mengabulkan permohonan penundaan, secepat mungkin tergugat diberitahu terlebih dulu tentang adanya permohonan penundaan, dengan cara yang dapat dibuktikan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau pesan instan (*Instant Messaging*/IM) dalam komunikasi daring (*online*) yang memungkinkan pengiriman pesan teks, media (foto, video), dan file secara langsung (*real-time*) melalui internet menggunakan aplikasi atau perangkat lunak, mirip percakapan tatap muka, dengan fitur seperti status online/offline, panggilan suara/video, dan berbagi file, misalnya *WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger*, dan lainnya. Permohonan penundaan dapat juga diberitahukan melalui juru sita pengadilan.

e. Penetapan penundaan yang ditetapkan, daya berlakunya mengikat sampai dengan putusan pokok sengketanya berkekuatan hukum tetap.

f. Penundaan tidak boleh ditetapkan dengan bersyarat selama jangka waktu tertentu, misalnya 1 (satu) bulan, 1 (satu) tahun, atau sejenisnya.

g. Mengingat kepentingan penggugat yang dirugikan oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat kemungkinan baru timbul pada waktu proses pemeriksaan di tingkat banding, ketua/majelis hakim/hakim pengadilan tinggi tata usaha negara dapat menerbitkan penetapan penundaan. Dalam hal ini harus dilihat dan dipertimbangkan secara kasuistis.

h. Apabila permohonan penundaan diajukan dan perkaranya masih di tangan ketua pengadilan, penetapan penundaan dapat dilakukan oleh ketua pengadilan dan ditandatangani oleh ketua pengadilan dan panitera.

i. Apabila permohonan penundaan diajukan dan perkaranya sudah diserahkan kepada majelis hakim/hakim, maka majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan penundaan

baik selama proses berjalan maupun sebelum putusan akhir. Penetapan penundaan ditandatangani oleh majelis hakim.

j. Penundaan pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara, maupun pencabutan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara/tindakan tata usaha negara, agar dibuat dalam bentuk "PENETAPAN", dan terpisah dengan putusan akhir (sekalipun diucapkan pada hari yang sama sebelum putusan akhir diucapkan), tujuannya untuk menghindari agar penetapan penundaan maupun pencabutan penetapan penundaan tidak melekat terus pada pokok perkaranya sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (secara kasuistis, penetapan penundaan dapat ditetapkan bersama dengan putusan akhir).

k. Penundaan pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara meliputi penundaan tindakan-tindakan pejabat tata usaha negara yang terkait dengan keputusan tata usaha negara yang ditunda pelaksanaannya, seperti larangan diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara yang baru mengenai hal yang sama.

l. Permohonan penundaan dapat diajukan sekaligus dalam surat gugatan atau terpisah.

m. Penyampaian penetapan penundaan dapat dilakukan dengan cara pengiriman melalui SIP (*e-court*), surat elektronik (*e-mail*), pesan instan (*Instant Messaging*/IM), ataupun dengan juru sita pengadilan agar secepatnya sampai kepada tergugat.

n. Apabila penetapan penundaan dikeluarkan oleh majelis hakim/hakim di luar persidangan, maka majelis hakim/hakim harus menyampaikan kepada para pihak pada persidangan berikutnya.

o. Penetapan penundaan yang tidak dipatuhi oleh tergugat, secara kasuitis dapat diterapkan Pasal 116 UU Peratun.

J. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA SINGKAT

1. Para pihak dalam pemeriksaan acara singkat adalah para pihak yang disebut dalam gugatan awal.

2. Pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan untuk perkara perlawanan atas penetapan tidak lolos dalam proses *dismissal* yang dilaksanakan oleh majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan tidak lolos dalam proses *dismissal* tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya atau disertai dengan pemeriksaan alat bukti dari para pihak.
4. Tahapan dalam pemeriksaan acara singkat ditetapkan dalam kalender persidangan yang bersifat mengikat dengan tahapan sebagai berikut:
   a. pembacaan gugatan perlawanan;
   b. pembacaan jawaban terlawan;
   c. pembuktian aspek formal terkait dengan alasan tidak lolos proses *dismissal*;
   d. putusan.
5. Terhadap putusan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan upaya hukum.
6. Dalam hal perlawanan diterima, maka pemeriksaan terhadap perkaranya dilakukan dengan acara biasa oleh majelis hakim yang sama, dengan nomor perkara yang sama berdasarkan penetapan ketua pengadilan.
7. Dalam hal pelawan atau terlawan tetap pada pendiriannya mengajukan upaya hukum, panitera membuat surat keterangan yang menyatakan menolak pengajuan upaya hukum.

K. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

1. Pemeriksaan acara cepat dimohonkan oleh penggugat kepada ketua pengadilan tata usaha negara dengan surat permohonan tersendiri atau digabung dalam surat gugatan dengan alasan adanya kepentingan penggugat yang cukup mendesak[138];
2. Ketua pengadilan tata usaha negara harus mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan atau menolak permohonan, dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan di dalam SOP, dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
3. Ketua pengadilan tata usaha negara menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa perkaranya.

---

[138] Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

4. Hakim tunggal yang telah ditetapkan, secepatnya menentukan hari, tempat dan waktu sidang tanpa melalui pemeriksaan persiapan.
5. Hakim tunggal setelah menerima berkas perkara, membuat *court calendar* yang disampaikan kepada para pihak dalam panggilan sidang pertama dan bersifat mengikat.
6. Jangka waktu pemanggilan dan hari sidang dalam pemeriksaan acara cepat tidak melebihi 3 (tiga) hari kalender.
7. Hakim tunggal memutus perkara dengan acara cepat paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak hari sidang pertama[139] ditambah 7 (tujuh) hari penundaan untuk putusan.
8. Hakim tunggal dapat mengeluarkan penetapan penundaan berlakunya objek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Apabila karena sifat perkaranya yang sangat kompleks, dan ada keterkaitan dengan kepentingan pihak ketiga, sehingga batas waktu pemeriksaan dengan acara cepat menurut ketentuan undang-undang dilampaui, maka pemeriksaan dilakukan dengan acara biasa dengan cara hakim tunggal tersebut menyerahkan kembali kepada ketua pengadilan untuk ditetapkan majelis hakim yang memeriksa perkaranya.

L. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA

1. Ketentuan Umum Persidangan
   a. Majelis hakim/hakim membuat dan menetapkan rencana kalender persidangan (*court calendar*) yang disampaikan kepada para pihak dan wajib dipatuhi.
   b. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan pembacaan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang[140].
2. Pemeriksaan Persiapan[141]
   a. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan.
   b. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki surat kuasa

---

[139] Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun.
[140] Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[141] Pasal 63 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

dan surat gugatan serta melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemeriksaan persiapan dilaksanakan.

c. Saran perbaikan surat kuasa berlaku juga bagi tergugat.

d. Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan agar tidak diterapkan secara ketat. Hakim hendaknya berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima meskipun tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender telah dilampaui, misalnya apabila penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya dan terdapat keadaan darurat.

e. Hakim meminta penggugat untuk melampirkan keputusan tata usaha negara atau data yang terkait dengan tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat dan data-data awal yang menyangkut pokok sengketanya bersama-sama dengan gugatan.

f. Apabila penggugat tidak dapat melampirkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan disebabkan karena ada halangan dari badan/pejabat tata usaha negara, maka hakim memerintahkan badan/pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk menyerahkannya.

g. Dalam hal tergugat atau kuasanya dalam pemeriksaan persiapan tidak bersedia menunjukkan keputusan yang menjadi objek sengketa, hakim ketua dapat mengeluarkan surat perintah kepada badan/pejabat tata usaha negara yang memegang surat keputusan atau pejabat lain yang memegang surat keputusan untuk menunjukkan keputusan tersebut pada pemeriksaan persiapan.

h. Hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

i. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang pemeriksaan persiapan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tanpa memakai toga.

j. Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan persiapan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti video *conference* atau sarana lain sesuai perkembangan teknologi informasi.

k. Pemeriksaan persiapan dapat dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis.

l. Dalam pemeriksaan persiapan dapat mendengar keterangan tergugat dan penggugat, serta pejabat tata usaha negara lainnya atau pihak lain yang terkait.

m. Panitera pengganti yang ditunjuk mengikuti pemeriksaan persiapan wajib membuat berita acara pemeriksaan persiapan.

n. Dalam pemeriksaan persiapan dapat dilakukan pemeriksaan setempat, dengan syarat kepentingan pihak ketiga juga terlindungi.

o. Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir sejak pemeriksaan persiapan pertama dan pemeriksaan persiapan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut, penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh untuk berproses dan gugatan dinyatakan gugur.

p. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir sejak pemeriksaan persiapan pertama dan pemeriksaan persiapan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut, majelis hakim dapat memanggil tergugat melalui atasannya agar diperintahkan hadir pada pemeriksaan persiapan tersebut.

3. Persidangan

a. Persidangan konvensional

Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila sengketa yang sedang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum[142].

b. Persidangan Secara Elektronik

Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

---

[142] Pasal 70 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

4. Pengunduran Sidang
   a. Apabila suatu sengketa tidak dapat diperiksa pada sidang pertama, pemeriksaan diundurkan sampai sidang berikutnya dengan memperhatikan waktu yang cukup dalam hal ada pihak yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan tersebut.
   b. Pengunduran sidang harus diucapkan di persidangan, dan bagi mereka yang hadir, pemberitahuan pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir untuk persidangan konvensional dipanggil dengan surat tercatat dan untuk persidangan secara elektronik dipanggil melalui SIP.
   c. Dalam keadaan tertentu, pengunduran sidang dapat dilakukan di luar persidangan dengan penetapan yang diberitahukan kepada para pihak.

M. GUGATAN GUGUR[143]

1. Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
2. Dalam hal gugatan dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara sepanjang masih dalam batas tenggang waktu gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun.

N. TERGUGAT TIDAK HADIR

Tergugat atau kuasanya yang tidak hadir di persidangan, Pasal 72 UU Peratun menentukan:

1. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 (dua) kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat

[143] Pasal 71 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan.

2. Dalam hal setelah lewat 2 (dua) bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat dan/atau panggilan oleh juru sita, penetapan tidak ditanggapi baik oleh atasan tergugat maupun oleh tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya, dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat.
3. Meskipun persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat atau kuasanya, putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.

O. PENCABUTAN GUGATAN[144]

1. Sebelum tergugat mengajukan jawaban, penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.
2. Pencabutan gugatan diajukan kepada ketua pengadilan/majelis hakim/hakim yang memeriksa perkaranya.
3. Dalam hal pencabutan gugatan oleh kuasa dan di dalam surat kuasa tidak terdapat klausul kewenangan untuk mencabut gugatan maka ketua pengadilan/majelis hakim/hakim memanggil pihak pemberi kuasa/prinsipal untuk didengar keterangannya.
4. Dalam hal gugatan dicabut namun telah dikeluarkan penetapan penundaan keputusan/tindakan tata usaha negara yang digugat, baik yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan maupun oleh majelis hakim/hakim yang memeriksa perkaranya, maka di dalam penetapan pencabutan gugatan dicantumkan pencabutan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara obyek sengketa dan memerintahkan panitera mencoret gugatan dari register perkara.
5. Apabila penggugat lebih dari 1 (satu), dan tidak seluruh penggugat mencabut gugatan maka ketua pengadilan/majelis hakim/hakim membuat penetapan, dan untuk pemeriksaan penggugat yang lain dilanjutkan.
6. Penetapan pencabutan gugatan diucapkan dalam persidangan

[144] Pasal 76 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun.

yang terbuka untuk umum melalui SIP (*e-court*) dan dicatat dalam berita acara persidangan.

P. INTERVENSI[145]

1. Intervensi adalah pihak ketiga, yaitu orang atau badan hukum perdata atau badan pemerintahan yang mempunyai kepentingan, yang masuk sebagai pihak dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim.
2. Hakim wajib memanggil pihak ketiga tersebut di atas, untuk diberi penjelasan mengenai hak-haknya.
3. Dalam hal pihak ketiga yang berkepentingan tidak diketahui alamatnya, panggilan disampaikan melalui kantor kelurahan atau desa untuk diumumkan di papan pengumuman kelurahan/desa tersebut dan diumumkan di website pengadilan yang memeriksa perkaranya.
4. Permohonan intervensi dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara berlangsung, sebelum tahapan kesimpulan. Apabila masuknya pihak ketiga setelah pembuktian, maka untuk kelancaran proses persidangan, tidak diperlukan lagi pengulangan jawab jinawab di antara para pihak berperkara.
5. Permohonan intervensi diajukan dalam bentuk tertulis, tidak perlu membayar biaya perkara. Untuk perkara *e-court* permohonan intervensi yang masuk dalam tahapan pemeriksaan persiapan dapat diajukan langsung kepada majelis hakim, jika tahapan persidangan sudah sampai pada tahap jawab jinawab, permohonan intervensi dimasukkan melalui meja *e-court*.
6. Permohonan dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan penetapan.
7. Terhadap penetapan penolakan tersebut bagi pihak pemohon yang mempertahankan kepentingannya sendiri tidak dapat mengajukan banding bersama dengan pokok perkara, namun dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalan.
8. Pengajuan upaya hukum banding atas penetapan penolakan permohonan pihak ketiga dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diucapkan penetapan penolakan tersebut.

---

[145] Pasal 83 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

9. Dalam hal permohonan ditolak dan para pihak mengajukan banding, sedangkan pengadilan tinggi berpendapat intervensi dikabulkan, maka dapat ditempuh 2 (dua) cara:
   a. Pengadilan tinggi dapat mengambil penetapan sebelum memutus pokok perkara dengan memerintahkan kepada pengadilan yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan hal-hal yang relevan dengan perkara (intervensi tersebut). Setelah hasil pemeriksaan tersebut diterima pengadilan tinggi, selanjutnya diambil putusan akhir mengenai pokok perkara oleh pengadilan tinggi;
   b. Pengadilan tinggi dapat melakukan pemeriksaan sendiri dan mengambil putusan akhir tentang pokok perkaranya.
10. Pihak ketiga yang masuk untuk mempertahankan kepentingannya sendiri disebut Penggugat Intervensi. Pihak ketiga yang bergabung dengan Tergugat disebut Tergugat II Intervensi. Pihak ketiga yang bergabung dengan Penggugat disebut Penggugat II Intervensi;
11. Apabila pihak ketiga yang masuk lebih dari satu, maka sebutan untuk masing-masing adalah:
   a. Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dst;
   b. Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dst;
   c. Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2, penggugat II Intervensi 3, dst.
12. Sebelum permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak, hakim meminta tanggapan dari penggugat dan tergugat.
13. Permohonan intervensi yang dikabulkan/ditolak dituangkan dalam putusan sela dan amarnya dicantumkan dalam berita acara persidangan.
14. Pemohon intervensi yang telah ditetapkan sebagai pihak dalam perkara yang diajukan melalui *e-court* wajib mengikuti proses persidangan secara elektronik.

Q. PERDAMAIAN

1. Ketua pengadilan/majelis hakim/hakim dapat melakukan perdamaian atau mediasi pada tahap sejak proses dismissal, pemeriksaan persiapan sampai dengan persidangan, demi

kepentingan terbaik para pihak berperkara (*the best interests of the party*), dan jika kemudian ada kesepakatan di antara para pihak, ketua pengadilan/majelis hakim/hakim tidak boleh mengeluarkan *acta van dading*.

2. Dalam hal para pihak telah sepakat untuk berdamai, penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan kepada ketua pengadilan/majelis hakim/hakim yang memeriksa perkaranya.
3. Terhadap permohonan pencabutan gugatan, ketua pengadilan/majelis hakim/hakim menuangkannya dalam bentuk penetapan yang berisi pengabulan permohonan dan perintah agar panitera mencoret gugatan tersebut dari register perkara. Perintah pencoretan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.
4. Terhadap perkara yang tidak ada tahapan proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan, majelis hakim/hakim dapat menyampaikan saran perdamaian kepada para pihak pada awal persidangan atau dapat dicantumkan dalam catatan persidangan elektronik (*e-court*) setelah pembacaan gugatan.
5. Penetapan pencabutan gugatan sebagaimana dimaksud angka 3 dan 4, memuat pertimbangan hukum yang substansinya sesuai isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak.

R. EKSEPSI[146]

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Majelis hakim harus menyikapi eksepsi kompetensi relatif sebelum penggugat mengajukan replik.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

---

[146] Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

S. PEMBUKTIAN

1. Pembuktian di peradilan tata usaha negara mengarah pada asas pembuktian bebas terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 107 UU Peratun, di mana hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, dengan dibatasi oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sesuai asas *dominus litis*, dan dalam rangka penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka majelis hakim dapat memberikan petunjuk dan memerintahkan kepada pihak agar mempersiapkan alat bukti yang relevan.
3. Alat bukti ialah:
   a) surat atau tulisan;
   b) keterangan ahli;
   c) keterangan saksi;
   d) pengakuan para pihak;
   e) pengetahuan hakim;
      pengetahuan yang diperoleh hakim melalui fakta-fakta persidangan.
   f) bukti elektronik;
      informasi elektronik dan dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya dikategorikan sebagai bukti elektronik (Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Verifikasi bukti elektronik dilaksanakan dengan pencocokan kepada sistem elektronik atau hasil audit digital forensik atau pengakuan dari pihak.
   g) bukti ilmiah;
      berupa keterangan ahli, pendapat ahli, hasil uji laboratorium, laporan hasil penelitian, hasil forensik, dan bukti lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mempertimbangkan alat bukti yang relevan diajukan oleh para pihak berperkara.

T. BUKTI SURAT

1. Para pihak membuat daftar bukti.
2. Setiap bukti surat harus diberi meterai masing-masing sesuai dengan tarif yang berlaku dan ditandatangani dan distempel oleh petugas pos.
3. Untuk bukti surat penggugat diberi tanda bukti P-1, dan seterusnya.
4. Untuk bukti surat tergugat diberi tanda bukti T-1, dan seterusnya.
5. Untuk bukti surat Intervensi:
   a. Penggugat Intervensi, diberi tanda bukti P.Intv-1, dan seterusnya;
   b. Penggugat II Intervensi, diberi tanda bukti P.II.Intv-1, dan seterusnya;
   c. Tergugat II Intervensi, diberi tanda bukti T.II.Intv-1, dan seterusnya.
6. Penyerahan bukti surat oleh para pihak dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersamaan dalam satu agenda persidangan yang terbuka untuk umum;
7. Penandaan bukti surat adalah sebagai berikut:
   a. “ASLI”, jika bukti surat yang disampaikan asli (contoh panggilan);
   b. “SDA”, jika fotokopi bukti surat sesuai dengan aslinya;
   c. ”FK”, jika fotokopi bukti sesuai dengan fotokopinya;
   d. “Sesuai Salinan”, jika bukti sesuai dengan salinan;
   e. “Cetakan”, jika hasil cetakan (contoh Buku);
   f. “BE”, jika merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Apabila sesuai dengan aslinya, ditambah dengan kode “SDA”;
   g. ”FK sesuai dengan cetakan”, jika fotokopi bukti sesuai dengan cetakan;
   h. Untuk tambahan informasi diberi tanda “Ad Informandum-1”, dan seterusnya;
8. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk melihat bukti yang disampaikan pihak lawannya dan para pihak dapat mencatat seperlunya.
9. Para pihak dapat melakukan *inzage* terhadap bukti surat di kantor pengadilan setiap hari kerja/jam kerja, diawasi oleh

panitera pengganti yang memegang perkaranya atau staf kepaniteraan.

10. Alat bukti surat disusun berurutan secara kronologis. Apabila terdapat alat bukti yang disusulkan (tambahan alat bukti), maka penomorannya ditambahkan dengan huruf di belakangnya, misalnya P-10A. Apabila terdapat alat bukti yang berkaitan dengan alat bukti yang sudah diajukan, jangan dijadikan lampirannya, tetapi disusun sebagai alat bukti tambahan.

U. AHLI DAN SAKSI

1. Pemeriksaan ahli dan saksi dilakukan oleh majelis hakim/hakim lengkap atau hakim tunggal untuk acara cepat.
2. Apabila dalam pemeriksaan persidangan yang bukan menyangkut acara pemeriksaan ahli dan saksi ternyata ketua majelis atau anggota majelis berhalangan yang sah, maka persidangan dapat dilakukan oleh majelis hakim tidak lengkap, jika kedua pihak yang bersengketa tidak berkeberatan dan dicatat dalam berita acara persidangan.
3. Majelis hakim memeriksa asli KTP atau identitas diri lainnya dari ahli dan/atau saksi, dan ahli dan/atau saksi menyerahkan fotokopinya. Khusus bagi ahli, harus menyerahkan *curriculum vitae*/daftar riwayat hidup dan dapat menyampaikan pendapat secara tertulis.
4. Majelis hakim menanyakan identitas, hubungan kekeluargaan, hubungan semenda (hubungan perkawinan), hubungan pekerjaan dengan para pihak atau kuasa hukumnya dengan ahli dan saksi[147].
5. Majelis hakim menentukan dapat atau tidak dapat didengarnya seorang ahli dan saksi. Penilaian atas ahli didasarkan pada:
   a. disiplin ilmu ahli yang dibuktikan melalui pendidikan formal, ijazah akademis minimal sarjana strata 2 (dua), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan khusus, dan/ atau pengalaman;
   b. karya ilmiah atau penelitian relevan; dan/atau
   c. keaktifannya dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam daftar riwayat hidup.
6. Seorang ahli dapat memberikan pendapat berdasarkan

[147] Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

pengetahuan dan/atau pengalamannya, baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji di muka persidangan menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan/atau pengalamannya yang sebaik–baiknya[148].

7. Penilaian atas Saksi didasarkan pada Pasal 88 dan Pasal 89 UU Peratun.
8. Majelis hakim menanyakan kepada para pihak mengenai keberatan atau tidaknya terhadap calon ahli atau saksi. Jika keberatan para pihak beralasan hukum maka keberatan tersebut diterima, calon ahli atau saksi tersebut tidak diperiksa. Jika keberatan tidak beralasan hukum maka keberatan tersebut tidak diterima dan ahli atau saksi tersebut tetap diperiksa selanjutnya keberatan tersebut cukup dicatat dalam berita acara persidangan.
9. Ahli dan saksi wajib bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaannya, dan jika tidak bersedia diambil sumpah atau janji, tidak perlu didengar keterangannya.
10. Sebelum mengajukan ahli dan/atau saksi, para pihak dapat menyerahkan daftar pertanyaan tertulis yang akan diajukan dalam acara pemeriksaan ahli dan/atau saksi.
11. Dalam hal ahli atau saksi akan memberikan pendapat atau keterangan untuk beberapa perkara yang konstruksi hukumnya relatif sama, maka hakim/majelis hakim dapat mengambil alih keterangan atau pendapat ahli atau saksi tersebut dari perkara lain sepanjang para pihak tidak keberatan, pertanyaan para pihak sama, dan jawaban ahli atau saksi juga sama dengan perkara sebelumnya.
12. Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, hakim/majelis hakim dibantu oleh panitera datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan mendengar keterangan saksi tersebut dengan menggunakan atribut persidangan lengkap[149].
13. Ahli atau saksi yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus

---

[148] Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

[149] Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun.

didampingi oleh ahli alih bahasa tersumpah[150]. Majelis hakim mengangkat sumpah dari ahli alih bahasa tersebut bahwa ahli alih bahasa akan mengalihbahasakan pendapat ahli maupun keterangan saksi ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya akan mengalihbahasakan pertanyaan majelis hakim dan para pihak dari Bahasa Indonesia ke bahasa yang digunakan oleh ahli atau saksi tersebut[151].

14. Hakim melakukan pengambilan sumpah terhadap penyandang disabilitas sebelum meminta keterangan sebagai saksi/ahli. Proses pengambilan sumpah dapat dilakukan melalui penjuru bahasa atau pendamping sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas. Sebelum penjuru bahasa dan/atau pendamping menerjemahkan dan mendampingi proses komunikasi selama persidangan, hakim melakukan pengambilan sumpah terhadap penjuru bahasa dan/atau pendamping;
15. Majelis hakim dan/atau hakim dengan kearifannya mempertimbangkan keterangan ahli atau saksi yang relevan dengan penyelesaian perkara yang ditangani.

V. PEMBUKTIAN SECARA ELEKTRONIK

1. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermeterai dan bukti elektronik dengan meterai elektronik ke dalam SIP, tanpa perlu diverifikasi oleh majelis hakim.
2. Asli dan/atau salinan bukti surat tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan dan fotokopi yang menjadi bukti diserahkan kepada majelis hakim di persidangan.
3. Bukti elektronik yang tersimpan di dalam bentuk *flashdisk* atau bentuk penyimpanan lainnya, isinya dibuat dalam bentuk transkrip diperlihatkan dan diserahkan kepada majelis hakim di persidangan, setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap bukti elektronik tersebut.
4. Bukti elektronik yang dicetak dari sistem elektronik yang terdaftar, diperlihatkan asli sistem elektroniknya melalui perangkat elektronik (laptop, tablet, telepon pintar, dan sejenisnya) oleh para pihak kepada majelis hakim di persidangan atau menghadirkan administrator (penanggung jawab) sistem

---

[150] Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun
[151] Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun.

elektronik tersebut sebagai saksi atau menghadirkan ahli digital forensik.

5. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan pendapat ahli dan/atau keterangan saksi dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan dan pemeriksaan tersebut direkam melalui media tersebut.
6. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada penggugat dan/atau kepada pihak tergugat yang menghendaki.
7. Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan atau infrastruktur ahli dan/atau saksi di mana ahli dan/atau saksi berada.

W. DASAR HUKUM PENGUJIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN/ TINDAKAN

1. Dasar pengujian/penilaian (*toetsingsgronden*) yang dipakai oleh hakim dalam pertimbangan putusannya adalah[152]:
   a. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, di mana keputusan dan/atau tindakan dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, apabila:
   a. dikeluarkan oleh badan/pejabat yang tidak berwenang;
   b. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural;
   c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.
3. Apabila keputusan dan/atau tindakan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka hakim dalam

[152] Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

pertimbangan harus menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar tersebut, dan apabila keputusan dan/atau tindakan dinilai bertentangan dengan AUPB maka hakim dalam pertimbangan harus menyebutkan AUPB yang dilanggar tersebut.

4. Hakim dalam putusannya dapat menetapkan AUPB yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun AUPB lainnya di luar peraturan perundang-undangan.
5. Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang instrumen hukum hak asasi manusia baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional sehingga dapat diterapkan dalam kasus-kasus konkret menurut kearifan dan kebijaksanaan hakim.

X. PEMERIKSAAN SETEMPAT

1. Pemeriksaan setempat dapat dilakukan atas permintaan para pihak yang bersengketa atau atas inisiatif majelis hakim. Majelis hakim harus arif dan bijak, mengenai perlu atau tidaknya pemeriksaan setempat, dengan melihat relevansi objek gugatan dan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Jika pemeriksaan setempat dilakukan atas inisiatif majelis hakim maka harus disesuaikan dengan kemampuan para pihak.
3. Pemeriksaan setempat dapat dilakukan oleh majelis hakim lengkap atau apabila terdapat salah 1 (satu) hakim berhalangan hadir dapat dilakukan dengan paling kurang oleh 2 (dua) orang hakim.
4. Pemeriksaan setempat dapat dilakukan untuk perkara prodeo.
5. Pemeriksaan setempat dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak/kuasanya dan/atau pihak lain yang dianggap relevan dengan perkara tersebut.
6. Dalam hal salah satu pihak tidak hadir pada pemeriksaan setempat meskipun telah diberitahu secara patut, maka pemeriksaan setempat tetap dilaksanakan.
7. Pemeriksaan setempat dapat didelegasikan baik dari pengadilan tinggi tata usaha negara maupun dari pengadilan tata usaha negara yang memeriksa perkaranya ke pengadilan tata usaha negara di mana lokasi pemeriksaan setempat berada. Hasil pemeriksaan setempat tersebut dibuat berita acaranya dan

ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera sidang, yang selanjutnya dikirimkan ke pengadilan pemberi delegasi.

8. Prosedur sidang pemeriksaan setempat:
   a. pemeriksaan setempat dapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum di ruang persidangan atau di lokasi pemeriksaan setempat, tanpa menggunakan toga;
   b. hakim ketua sidang memeriksa kehadiran para pihak;
   c. hakim ketua sidang menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan setempat;
   d. majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan hal-hal lain yang berhubungan dengan objek sengketa;
   e. hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan hubungan antara objek sengketa dengan lokasi pemeriksaan setempat;
   f. hakim dapat meminta keterangan dari aparat setempat terkait dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak;
   g. panitera pengganti membuat berita acara pemeriksaan setempat yang memuat data-data hasil pemeriksaan setempat beserta gambar lokasi yang diperiksa sesuai dengan keterangan masing-masing pihak;
   h. hakim ketua sidang menetapkan penundaan sidang selanjutnya dan menutup pemeriksaan setempat;
   i. majelis hakim menyerahkan bukti biaya pemeriksaan setempat kepada panitera setelah selesai dilaksanakannya pemeriksaan setempat.

Y. KESIMPULAN

1. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing[153].
2. Para pihak hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali persidangan untuk mengajukan kesimpulan.
3. Penyampaian kesimpulan dilakukan melalui SIP.

---

[153] Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun

4. Dalam acara kesimpulan tidak dibenarkan mengajukan bukti lagi, jika masih ada surat yang diajukan, dianggap sebagai lampiran dari kesimpulan atau tambahan informasi (*ad informandum*).

Z. MUSYAWARAH

1. Pra Musyawarah
   a. Hakim ketua majelis memerintahkan kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 untuk mempelajari berkas.
   b. Hakim ketua majelis menetapkan hari dan tanggal musyawarah.
2. Pada saat Musyawarah
   a. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia.
   b. Ketentuan mengenai prosedur musyawarah majelis hakim mengikuti ketentuan di dalam Pasal 97 ayat (3) sampai dengan ayat (5) UU Peratun.
   c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda, baik berupa *concurring opionion* maupun *dissenting opinion*, wajib dimuat dalam putusan.
   d. Pembuatan konsep naskah putusan ditentukan oleh hakim ketua majelis.
   e. Koreksi konsep naskah putusan dilaksanakan oleh majelis hakim, jika disetujui membubuhkan paraf pada tiap halaman putusan.
   f. Konsep naskah putusan yang telah disetujui oleh majelis hakim, disiapkan untuk dibacakan dengan cara mengunggah ke dalam SIP.

AA. PUTUSAN

1. Sidang dalam pengucapan putusan dilaksanakan oleh majelis hakim lengkap melalui SIP dengan menggunakan akun hakim/majelis hakim.
2. Dalam hal pengucapan putusan telah ditentukan jadwalnya, hakim ketua majelis berhalangan sementara maka sidang pengucapan putusan ditunda. Sedangkan jika hakim ketua majelis berhalangan tetap maka digantikan oleh hakim yang lain dengan penetapan ketua pengadilan.

3. Dalam hal pengucapan putusan telah ditentukan jadwalnya, hakim anggota berhalangan sementara ataupun tetap, maka sidang pengucapan putusan dapat dilaksanakan dengan digantikan oleh hakim yang lain melalui penetapan ketua pengadilan.
4. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui SIP.
5. Dalam hal terjadi kesalahan redaksional yang tidak mengubah substansi putusan, baik atas permohonan para pihak maupun atas inisiatif majelis hakim/hakim, majelis hakim/hakim membuat putusan perbaikan yang memperbaiki redaksi putusan tersebut dengan ditandatangani oleh majelis hakim/hakim dan panitera/panitera pengganti dan merupakan satu kesatuan dengan putusan tersebut, selanjutnya melalui ketua pengadilan dikirim kepada para pihak, dan apabila perkara tersebut dalam tahap upaya hukum, putusan perbaikan tersebut dikirimkan bersama berkas upaya hukum. Apabila majelis hakim/hakim yang memutus perkara tersebut berhalangan tetap atau mutasi, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim/hakim baru untuk membuat putusan perbaikan.
6. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan/pejabat yang mengeluarkan keputusan/tindakan, berupa:
   a. pencabutan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan; atau
   b. pencabutan keputusan dan/atau tindakan dan menerbitkan keputusan dan/atau tindakan yang baru.
7. Khusus dalam perkara tindakan pemerintahan, apabila gugatan dikabulkan maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan untuk:
   a. melakukan tindakan pemerintahan;
   b. tidak melakukan tindakan pemerintahan;
   c. menghentikan tindakan pemerintahan.

   Kewajiban ini dapat disertai juga dengan pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi. Rehabilitasi merupakan pemulihan hak penggugat dalam keadaan semula seperti

sebelum tindakan pemerintahan dilakukan.

Ganti rugi dalam perkara tindakan pemerintahan tidak dibatasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat yang memohon ganti rugi harus merumuskan secara jelas dan terperinci kerugian nyata/riil yang dialaminya dalam posita dan petitum gugatannya serta dasar perhitungan kerugiannya. Hakim dapat mengabulkan besaran ganti rugi berdasarkan fakta persidangan dan asas proporsionalitas.

8. Sanksi administratif dan/atau uang paksa hanya dapat dijatuhkan dalam amar putusan yang bersifat *condemnatoir*.
9. Setelah pengucapan putusan, hakim ketua majelis memberitahukan kepada para pihak mengenai upaya hukum yang tersedia.
10. Penandatanganan putusan dilaksanakan pada hari pengucapan putusan.
11. Pada putusan asli yang nantinya masuk dalam berkas perkara, wajib diberi paraf majelis hakim dan panitera/panitera pengganti di masing-masing halaman (di sisi kanan-bawah), sebagai bukti bahwa setiap lembar putusan telah diperiksa oleh majelis hakim dan panitera/panitera pengganti tersebut.

BB. UPAYA HUKUM

1. Upaya hukum terdiri dari:
   a) upaya hukum biasa, berupa banding dan kasasi;
   b) upaya hukum luar biasa, berupa peninjauan kembali.
2. Upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan oleh para pihak kepada pengadilan tingkat banding di wilayah hukumnya. Putusan pengadilan yang bukan putusan akhir, hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.
3. Putusan pengadilan tingkat banding dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, demikian pula terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama, kecuali untuk perkara-perkara yang diatur secara khusus mengenai upaya hukumnya.
4. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat

diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya 1 (satu) kali, kecuali apabila ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan.

5. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan adanya bukti baru (novum) sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b *juncto* Pasal 69 huruf b Undang- Undang Mahkamah Agung, diperiksa di muka persidangan oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk dengan didampingi panitera atau panitera pengganti. Pemohon peninjauan kembali membawa bukti baru (novum) dan fotokopinya serta menyampaikan keterangan tentang siapa yang menemukan bukti baru, tanggal dan tempat ditemukannya novum. Selanjutnya seseorang yang menemukan bukti baru tersebut mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, dan dicatat di dalam berita acara sumpah novum.

CC. PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI

Dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU Peratun mengatur pembatasan upaya hukum kasasi terhadap perkara tata usaha negara tertentu, yaitu perkara tata usaha negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Keputusan tata usaha negara yang berupa keputusan pejabat daerah dapat atau tidak dapat diajukan kasasi, kriterianya adalah :

1. Tidak dapat diajukan kasasi apabila keputusan pejabat daerah yang materi muatannya sebagai pelaksanaan desentralisasi wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Kewenangan desentralisasi biasanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda).
2. Dapat diajukan kasasi apabila keputusan pejabat daerah yang materi muatannya sebagai pelaksanaan dekonsentrasi wewenang, yaitu dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintah pusat.
3. Dapat diajukan kasasi apabila keputusan pejabat daerah dalam rangka tugas perbantuan (*medebewind*).
4. Harus dikirim ke Mahkamah Agung, apabila keputusan pejabat daerah yang jangkauan berlakunya masuk dalam wilayah abu-abu (*gray area*). Dalam hal ini Mahkamah Agung yang

menentukan perkaranya dapat atau tidak diajukan kasasi. Untuk menentukan keputusan pejabat daerah masuk dalam wilayah abu-abu (*gray area*):

a. Keputusan pejabat daerah tersebut sebagai pelaksanaan desentralisasi wewenang akan tetapi jangkauan berlakunya meluas sampai ke luar wilayah kewenangannya (melintas masuk teritorial/wilayah kewenangan pemerintah pusat atau kewenangan pemerintah daerah yang lain), oleh akibat:
   1) Tumpang tindih kewenangan (*locus materiae*) antara kewenangan pemerintah pusat dengan kewenangan pemerintah daerah lainnya atau sebaliknya).
   2) Terdapat urusan pemerintahan di bidang-bidang tertentu yang diurus secara bersama yang bersifat lintas sektoral (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar provinsi dan/atau antar kabupaten/kota).

b. Keputusan pejabat daerah yang bersifat derivatif (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional sehingga jangkauan berlakunya keputusan tata usaha negara tersebut tidak hanya terbatas dalam wilayah daerah yang bersangkutan, akan tetapi sudah ke luar wilayah daerah tersebut, dan masih ada kaitan dengan peraturan yang bersifat nasional.

5. Sengketa tata usaha negara tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa termasuk jenis perkara yang terkena pembatasan kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
6. Apabila sudah pasti keputusan pejabat daerah tersebut jangkauan berlakunya hanya di wilayah daerah yang bersangkutan, ketua pengadilan tata usaha negara atau ketua pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama, atas permohonan pihak yang berperkara wajib

menerbitkan surat keterangan disertai pertimbangan yang ”logis-yuridis” yang menyatakan terhadap perkaranya tidak memenuhi syarat-syarat formal untuk diajukan kasasi. Selanjutnya berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

7. Pernyataan bahwa perkara tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan kasasi yang dibuat oleh ketua pengadilan tata usaha negara atau ketua pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama, dituangkan dalam bentuk penetapan berdasarkan surat keterangan panitera.
8. Apabila ketua pengadilan tata usaha negara atau ketua pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama meskipun sudah mengetahui dengan pasti bahwa keputusan pejabat daerah tersebut jangkauan berlakunya hanya di wilayah daerah yang bersangkutan, akan tetapi tetap saja meneruskan berkas perkaranya ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung mengembalikan berkas perkara ke pengadilan tata usaha negara atau ke pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama dengan surat biasa.

DD. PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

1. Badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat mengajukan peninjauan kembali sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, kecuali dalam hal:
   a. ditemukannya bukti baru (novum);
   b. adanya 2 (dua) atau lebih putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang saling bertentangan; atau
   c. mempertahankan kepentingan hak keperdataan badan atau pejabat tata usaha negara (aset negara atau daerah);
2. Pengajuan peninjauan kembali kedua hanya dapat diajukan apabila terdapat pertentangan 2 (dua) putusan atau lebih, di mana 2 (dua) putusan yang bertentangan tersebut diajukan sebagai bukti.

EE. PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI)

1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Putusan
   a. Pelaksanaan Putusan adalah cara melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*).

b. Pemohon Pelaksanaan Putusan yang selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi adalah penggugat/pemohon atau kuasanya yang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada pengadilan agar putusan yang berkuatan hukum tetap dilaksanakan oleh termohon pelaksana putusan.

c. Termohon Pelaksana Putusan yang selanjutnya disebut Termohon Eksekusi adalah tergugat dan/atau atau badan/pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan menerbitkan keputusan dan/atau tindakan sesuai perintah atau kewajiban yang ditetapkan dalam putusan.

d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

e. Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap yang selanjutnya disebut Putusan BHT adalah putusan secara hukum tidak tersedia lagi upaya hukum biasa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk putusan peninjauan kembali, putusan yang diajukan upaya hukum namun upaya hukumnya dicabut, dan putusan yang telah diterima baik oleh para pihak.

f. Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak.

g. Pembayaran Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan tata usaha negara berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara karena adanya kerugian materiel yang diderita oleh penggugat.

h. Rehabilitasi dalam Sengketa Kepegawaian yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Kepegawaian adalah pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan.

i. Rehabilitasi dalam Sengketa Tindakan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Tindakan adalah pemulihan hak penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum tindakan pemerintahan dilakukan.

j. Kompensasi adalah pembayaran sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan tata usaha negara (Badan TUN) karena putusan pengadilan tata usaha negara yang memuat diktum Rehabilitasi Kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan TUN.

k. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama.

l. Hari adalah hari kalender, kecuali ditentukan lain sebagai hari kerja.

2. Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

a. Putusan yang telah berkuatan hukum tetap dan memiliki nilai eksekutorial dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara sah dan tidak diajukan permohonan upaya hukum paling lambat 14 (empat belas) hari, kecuali ditentukan lain.

b. Pada hari kerja berikutnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Panitera membuat Surat Keterangan Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagai dasar Ketua Pengadilan membuat Penetapan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

c. Panitera mengirimkan salinan Putusan BHT sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada para pihak melalui surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik dengan dibiayai negara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

d. Pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan keterangan agar tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah BHT dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Eksekusi

a. Pemohon Eksekusi dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan BHT dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

b. Permohonan eksekusi dapat diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

atau secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya, yang memuat:

1) identitas Pemohon Eksekusi meliputi:
   a) nama;
   b) kewarganegaraan;
   c) tempat tinggal;
   d) pekerjaan; dan
   e) Domisili Elektronik.
2) dalam hal Pemohon Eksekusi badan hukum perdata atau badan pemerintahan, identitasnya meliputi:
   a) nama badan hukum perdata atau badan pemerintahan;
   b) tempat kedudukan; dan
   c) Domisili Elektronik.
3) identitas Termohon Eksekusi meliputi:
   a) nama jabatan;
   b) tempat kedudukan; dan
   c) Domisili Elektronik (bila ada).
4) uraian singkat mengenai duduk perkara dan alasan permohonan;
5) uraian amar putusan dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir, tanggal putusan berkekuatan hukum tetap dan tanggal pemberitahuan Putusan BHT;
6) tuntutan eksekusi yang pada pokoknya memohon agar permohonan eksekusi dikabulkan, memerintahkan Termohon Eksekusi melaksanakan Putusan BHT, dan apabila Termohon Eksekusi tidak melaksanakan Putusan BHT dikenakan upaya paksa.
7) permohonan eksekusi ditandatangani oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya.

c. Panitera mencatat dalam buku register pengawasan eksekusi atau di dalam sistem informasi pengadilan dalam hal permohonan telah dinyatakan lengkap.

d. Dalam hal penggugat meninggal dunia, permohonan eksekusi dapat diajukan oleh ahli waris sah penggugat sepanjang objek sengketanya adalah keputusan yang bersifat kebendaan dan/atau diktum putusannya berbentuk pemenuhan hak yang bersifat meteriel yang dapat

diwariskan.

e. Permohonan eksekusi putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri dengan dokumen:
   1) fotokopi salinan Putusan BHT dari tingkat pertama sampai terakhir yang diterbitkan oleh kepaniteraan pengadilan;
   2) surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa;
   3) fotokopi surat pemberitahuan Putusan BHT; dan
   4) surat lain yang dianggap perlu.

f. Permohonan eksekusi putusan komisi informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri dengan dokumen:
   1) fotokopi salinan putusan ajudikasi Komisi Informasi dalam hal permohonan eksekusi sengketa informasi publik yang berkekuatan hukum tetap di Komisi Informasi;
   2) surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa;
   3) fotokopi surat pemberitahuan Putusan BHT; dan
   4) surat lain yang dianggap perlu.

4. Prosedur Eksekusi Otomatis

a. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, namun tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencabut keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a UU PERATUN, keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

b. Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

c. Sebelum Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Pengadilan dapat memanggil para pihak untuk dimintai penjelasan/keterangan.

d. Apabila menurut keterangan tergugat, putusan BHT telah dilaksanakan, Ketua tidak perlu mengeluarkan penetapan

sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Atas perintah Panitera, Juru Sita mengirimkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak.

5. Prosedur Eksekusi Upaya Paksa

a. Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU Peratun, atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut.

b. Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Panitera memanggil para pihak, termasuk atasan Termohon jika diperlukan, untuk datang menghadap sendiri hadir pada pengawasan eksekusi yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima.

c. Pengawasan Eksekusi dilaksanakan untuk mendengar penjelasan Pemohon Eksekusi, penjelasan Termohon Eksekusi, dan pihak lainnya terkait pelaksanaan putusan.

d. Apabila ternyata tidak ada keadaan yang menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan, Ketua Pengadilan dalam Pengawasan Eksekusi mengeluarkan Surat Peringatan kepada tergugat agar melaksanakan putusan.

e. Apabila setelah Pengawasan Eksekusi, Termohon Eksekusi bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dan/atau Pemohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis pelaksanaan putusan tersebut kepada Pengadilan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.

f. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Pengawasan Eksekusi tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi

dianggap belum melaksanakan putusan.

g. Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan, dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan upaya paksa (sanksi administratif dan/atau uang paksa), pengumuman media massa, dan pemberitahuan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat, disertai batas waktu kapan Termohon Eksekusi harus melaksanakan putusan tersebut.

h. Panitera atas perintah Ketua Pengadilan mengirimkan Penetapan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik pada hari yang sama dikeluarkannya Penetapan.

i. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf h juga dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dengan disertai Surat Pengantar dari Ketua Pengadilan.

j. Khusus dalam perkara kepegawaian, setelah pemberitahuan penetapan eksekusi, Termohon Eksekusi mengalami kendala yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan, Termohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis kendala tersebut kepada Ketua Pengadilan dengan disertai bukti dan data dukung yang memadai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

k. Apabila Ketua Pengadilan menilai pemberitahuan Termohon Eksekusi beralasan hukum, Ketua Pengadilan dapat memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi beserta badan/pejabat yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi untuk dilakukan Pengawasan Eksekusi lanjutan.

l. Apabila hambatan pelaksanaan Putusan tersebut disebabkan adanya persyaratan administrasi yang belum dipenuhi Pemohon Eksekusi, Ketua Pengadilan menyampaikan secara langsung kepada Pemohon Eksekusi agar memenuhinya.

m. Apabila telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud pada huruf h, Termohon Eksekusi tidak memberitahukan pelaksanaan Putusan atau hambatan pelaksanaan Putusan, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan agar mendorong Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan dalam rangka pembinaan administrasi pemerintahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

n. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepada APIP kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dan Termohon Eksekusi belum juga melaksanakan putusan Pengadilan, Ketua Pengadilan mengeluarkan surat upaya paksa agar pejabat yang berwenang memberikan sanksi administratif (baik yang termuat di dalam amar putusan maupun tidak termuat di dalam putusan) kepada pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan serta dapat diumumkan di media massa cetak dan/atau elektronik dengan membayar biaya pengumuman atas biaya dari Pemohon Eksekusi.

o. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat upaya paksa dikirimkan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan Termohon Eksekusi tetap tidak melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dilaksanakannya eksekusi kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat.

6. Prosedur Eksekusi Pembayaran Ganti Rugi
   a. Pengiriman Putusan yang berisi kewajiban pembayaran ganti rugi dikirimkan kepada para Pihak dan badan tata usaha negara c.q. pengguna anggaran instansi Tergugat oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik dalam waktu 3 (tiga) Hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
   b. Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan Putusan BHT diterima.
   c. Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Eksekusi Pembayaran Ganti Rugi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi dan kuasa pengguna anggaran pada instansi Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan berupa pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi.
   d. Panitera mengirimkan Penetapan Eksekusi pembayaran ganti rugi kepada badan tata usaha negara/pengguna anggaran instansi tergugat atau Termohon Eksekusi dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan eksekusi diajukan, dilampiri permohonan eksekusi dan salinan putusan berkekuatan hukum tetap, serta tembusan kepada Pemohon Eksekusi.
   e. Pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi dilaksanakan di internal badan tata usaha negara oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara dan perbendaharaan negara.
   f. Selain ketentuan di atas, dapat disarankan kepada penggugat untuk mengajukan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum.

7. Prosedur Eksekusi Rehabilitasi
   a. Pengiriman Putusan yang berisi kewajiban rehabilitasi dikirimkan kepada para pihak oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
   b. Dalam rehabilitasi sengketa kepegawaian, selain dikirimkan kepada para pihak, pemberitahuan Putusan juga dikirimkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan/atau Pejabat yang Berwenang (PyB) menerbitkan keputusan rehabilitasi kepegawaian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
   c. Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi rehabilitasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pemberitahuan Putusan BHT, tergugat tidak melaksanakan putusan rehabilitasi atau tidak memberitahukan rehabilitasi yang tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan kepada Pengadilan.
   d. Ketua Pengadilan memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk hadir pada Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi.
   e. Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima.
   f. Setelah mendengarkan penjelasan para Pihak dalam Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi, Ketua Pengadilan dapat mengambil sikap:
      1) apabila terdapat alasan yang sah bahwa Rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan yang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, Eksekusi Rehabilitasi akan diproses dengan prosedur Kompensasi; atau
      2) apabila tidak terdapat alasan bahwa Rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan, Ketua Pengadilan memberi peringatan kepada Termohon Eksekusi Rehabilitasi agar melaksanakan Rehabilitasi.

g. Dalam hal Termohon Eksekusi Rehabilitasi tidak bersedia melaksanakan Putusan Rehabilitasi secara sukarela, Termohon Eksekusi Rehabilitasi dikenai upaya paksa sesuai dengan tahapan dan prosedur penanganan Eksekusi Rehabilitasi dengan Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Sebelum menerbitkan Penetapan Upaya Paksa dalam Eksekusi Rehabilitasi dalam sengketa Kepegawaian, Ketua Pengadilan wajib mempertimbangkan:

1) tahapan dan prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan keputusan di bidang kepegawaian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan pelaksanaannya;

2) dalam hal rehabilitasi Penggugat menyangkut suatu jabatan yang pada saat putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap jabatan tersebut telah terisi pejabat lain, penggugat dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula; dan

3) dalam hal pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat dilaksanakan, Penggugat akan diangkat pada kesempatan pertama setelah tersedia formasi dalam jabatan yang semula atau setingkat.

i. Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dalam sengketa Tindakan Pemerintahan membutuhkan biaya dari anggaran negara/anggaran daerah, sebelum menerbitkan penetapan eksekusi upaya paksa, Ketua Pengadilan wajib mempertimbangkan mekanisme perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan pelaksanaan

lainnya.

j. Dalam hal proses eksekusi berjalan terdapat perubahan keadaan atau perubahan aturan hukum yang menyebabkan rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan, Ketua Pengadilan menyatakan proses Eksekusi ditempuh melalui mekanisme kompensasi.

8. Prosedur Eksekusi Dengan Kompensasi

a. Dalam hal putusan Pengadilan yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, Tergugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya pemberitahuan Putusan berkekuatan hukum tetap, menyampaikan surat pemberitahuan perihal tersebut kepada Ketua Pengadilan yang memutus di tingkat pertama dengan tembusan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Penggugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima pemberitahuan tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kompensasi kepada Ketua Pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan atau memerintahkan tergugat membayar atau memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang PERATUN.

c. Ketua Pengadilan memerintahkan Panitera memanggil para pihak untuk hadir pada musyawarah Pengawasan Eksekusi Kompensasi untuk mendengar penjelasan para pihak dan memeriksa bukti yang diajukan Termohon Eksekusi terkait alasan tidak dapat atau tidak sempurnanya pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

d. Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi Kompensasi dilakukan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima.

e. Ketua Pengadilan mengupayakan tercapainya kesepakatan para pihak terkait bentuk dan besarnya jumlah kompensasi yang dibebankan kepada badan tata usaha negara dalam musyawarah kompensasi.

f. Dalam musyawarah kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, para pihak dapat menghadirkan juru taksir (*appraiser*) professional untuk menghitung besaran kompensasi.

g. Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Kompensasi berdasarkan kesepakatan para Pihak dalam musyawarah kompensasi.

h. Apabila dalam musyawarah kompensasi tidak tercapai kata sepakat, Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak menetapkan bentuk dan besarnya jumlah uang atau bentuk kompensasi lain dengan memperhatikan keadaan yang nyata, kerugian materiel yang diderita Pemohon Eksekusi dan/atau mempertimbangan taksiran dari juru taksir (*appraiser*) professional (jika ada).

i. Apabila para Pihak keberatan terhadap penetapan Kompensasi, para Pihak dapat mengajukan penetapan Kembali kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan tersebut diterima melalui Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan kompensasi.

j. Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas Permohonan Penetapan Kembali kepada Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang terdiri atas:

   1) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekutorial;
   2) penetapan Kompensasi Ketua Pengadilan tingkat pertama;
   3) permohonan Penetapan Kembali oleh Pemohon yang berkeberatan;
   4) jawaban pihak lawan terhadap Permohonan Penetapan Kembali; dan
   5) dokumen lain yang relevan.

k. Mahkamah Agung mengeluarkan Penetapan Kembali paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Penetapan Mahkamah Agung tentang besarnya kompensasi bersifat final dan wajib ditaati para pihak.

l. Penetapan Mahkamah Agung tentang besarnya kompensasi dikirimkan kepada Pengadilan pengaju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

m. Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Penetapan Mahkamah Agung kepada para pihak dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penetapan diterima.

n. Penetapan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada huruf i ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung atau dapat melimpahkannya kepada Ketua Muda Tata Usaha Negara.

9. Prosedur Eksekusi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Khusus

a. Prosedur penanganan permohonan eksekusi dalam sengketa tata usaha negara khusus dilaksanakan sesuai dengan Pedoman ini kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

b. Dalam hal Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan Putusan, Pemohon Eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan.

c. Penanganan permohonan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang diatur dalam penanganan eksekusi otomatis atau eksekusi dengan upaya paksa sesuai dengan karakteristik diktum putusan masing-masing.

d. Batas waktu penanganan eksekusi disesuaikan dengan jadwal dan tahapan dalam kegiatan sengketa khusus terkait.

10. Pencabutan Eksekusi, Eksekusi Tidak Dapat Dilaksanakan, Dan Pencatatan Selesainya Eksekusi

a. Selama proses penanganan eksekusi, Pemohon Eksekusi dapat mengajukan pencabutan permohonan eksekusi yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya ditujukan kepada Ketua Pengadilan.

b. Dalam hal permohonan pencabutan eksekusi diajukan oleh

kuasa hukum, permohonan pencabutan tersebut wajib diketahui Pemohon Eksekusi.

c. Apabila permohonan pencabutan eksekusi beralasan hukum, Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan pencabutan permohonan eksekusi.

d. Panitera menyampaikan pemberitahuan salinan penetapan pencabutan permohonan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan pihak terkait lainnya sesuai perintah penetapan pencabutan eksekusi.

e. Selama proses eksekusi, para pihak dapat melakukan perdamaian, yang ditindaklanjuti dengan permohonan pencabutan permohonan eksekusi.

f. Dalam hal Putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan dengan penilaian objektif, Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan Putusan tidak dapat dieksekusi.

g. Panitera menindaklanjuti penetapan tidak dapat dieksekusi (noneksekutabel) dengan menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dan pencatatan selesainya eksekusi pada buku register pengawasan eksekusi, kecuali terhadap eksekusi yang dapat diterapkan dengan pembayaran kompensasi.

h. Penanganan permohonan eksekusi dinyatakan selesai dalam hal:

   1) Termohon Eksekusi melaksanakan secara nyata kewajiban/perintah/pembebanan yang ditetapkan dalam amar putusan;
   2) Pemohon Eksekusi mencabut permohonan eksekusi;
   3) permohonan eksekusi ditetapkan sebagai putusan yang tidak dapat dieksekusi (non-eksekutabel);
   4) diterbitkannya penetapan yang menyatakan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi; atau
   5) seluruh tahapan eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dijalankan.

i. Panitera menindaklanjuti selesainya penanganan eksekusi

dengan mencatat dalam buku register pengawasan eksekusi dan pengembalian sisa panjar biaya permohonan eksekusi.

FF. ASAS-ASAS UMUM PERADILAN YANG BAIK

1. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*right to a decision*);.
2. Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (*no interest, no action*).
3. Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
4. Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
5. Asas imparsialitas (tidak memihak).
6. Asas kesempatan untuk membela diri (*Audi et Alteram Partem*).
7. Asas obyektivitas (*no bias*), tidak ada kepentingan pribadi-pribadi atau pihak lain.
8. Menjunjung tinggi prinsip "*nemo judex in rex sua*" yaitu Hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara *a quo*.
9. Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan.
10. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).
11. Transparansi (keterbukaan).
12. Kepastian hukum dan konsistensi.
13. Menjunjung hak-hak asasi manusia.

GG. KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, peranan hakim aktif (*dominus litis*) karena hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil. Di dalam ketentuan hukum acara, peranan hakim yang aktif tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 80 ayat (1), Pasal 85, Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 103 ayat (1) UU Peratun.
2. Secara umum, dalam sengketa tata usaha negara, kedudukan antara penggugat dengan tergugat tidak seimbang. Ketidakseimbangannya karena penggugat sebagai orang atau badan hukum perdata diasumsikan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Untuk menyeimbangkannya diperlukan asas kompensasi

dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan kepada penggugat. Antara lain pada saat pembuktian, apabila alat bukti yang diperlukan dalam proses persidangan tidak dimiliki oleh penggugat akan tetapi berada di pihak tergugat atau pihak lain, maka penggugat dapat memohon kepada hakim/majelis hakim yang memeriksa perkaranya. Selanjutnya atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh hakim/majelis hakim dapat meminta alat bukti tersebut untuk diajukan di persidangan.

3. Asas pembuktian yang mengarah pada sistem pembuktian bebas terbatas (*vrij bewijs*). Pengertian bebas terbatas, karena menurut sistem hukum acara peradilan tata usaha negara, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Untuk sahnya pembuktian, diperlukan paling kurang dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Mengenai alat-alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim di dalam pembuktian terbatas, yaitu hanya meliputi:
   a. surat atau tulisan;
   b. keterangan ahli;
   c. keterangan saksi;
   d. pengakuan para pihak;
   e. pengetahuan hakim;
   f. bukti elektronik.
4. Gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Hal ini sebagai konsekuensi berlakunya asas *praesumptio iustae causa* (asas praduga rechtmatig) terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Asas *praesumptio iustae causa* mempunyai makna bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar sampai dengan dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu suatu keputusan tata usaha negara senantiasa harus dapat dilaksanakan. Dalam hal-hal tertentu, oleh ketentuan hukum acara ada pengecualian terhadap berlakunya asas tersebut, yaitu terhadap keputusan tata usaha negara yang digugat dapat diajukan permohonan penundaan pelaksanaannya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat akan sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, serta bukan merupakan kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan

dilaksanakannya keputusan tersebut.

5. Hakim peradilan tata usaha negara pada dasarnya tidak boleh memutus hal-hal yang berada di luar batas permasalahan dan isi dari keputusan badan/pejabat tata usaha negara yang digugat. hakim peradilan tata usaha negara dapat memeriksa dan memutus keputusan dan/atau tindakan yang langsung berkaitan dengan permasalahan pokok yang digugat, walaupun hal ini tidak dimohonkan untuk diputus oleh penggugat karena keputusan badan/pejabat tata usaha negara bertentangan dengan tatanan hukum yang ada dan berlaku.
6. Putusan pengadilan bersifat *erga omnes*. Berbeda dengan sengketa perdata, dimana putusan hakim perdata hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, sedangkan putusan pengadilan tata usaha negara tidak hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi berlaku juga terhadap pihak-pihak yang terkait di luar pihak yang bersengketa, kecuali dalam putusan yang mengabulkan ganti rugi atau penetapan kompensasi oleh ketua pengadilan dalam kasus-kasus kepegawaian, putusan dan penetapannya bersifat *inter partes* (hanya mengikat diantara para pihak).
7. Seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara. Dengan demikian tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan tata usaha negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat bagi seseorang atau badan hukum perdata tersebut, maka berlakulah asas "tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan gugatan (*poin d'interet, poin d'action*)".
8. Dalam proses pemeriksaan gugatan di pengadilan tata usaha negara dikenal beberapa tahapan yaitu tahap penelitian administrasi, tahap proses *dismissal*, tahap pemeriksaan persiapan, dan tahap persidangan terbuka untuk umum.
9. Tidak mengenal putusan verstek, karena hakim bersifat aktif di dalam pemeriksaan persidangan untuk menemukan kebenaran materiil dengan cara mencari bukti-bukti yang relevan di dalam memutus perkaranya, sehingga hakim tetap dapat memutus perkaranya tanpa kehadiran tergugat.

10. Tidak mengenal gugatan rekonpensi, karena obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
11. Hakim peradilan tata usaha negara sebagai pengawal tegaknya prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik (*the guardian of the rule of law and the good governance*) dituntut memiliki kearifan (*wisdom*) dan kematangan (*maturity*) serta kenegarawanan (*statemanship*) dalam mempertimbangkan keseimbangan kepentingan diantara hubungan diametral antara pemerintah (*administration*) dan warga negara (*citizen*) dalam sengketa tata usaha negara.

IV. SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG DIATUR SECARA KHUSUS DI DALAM UNDANG-UNDANG[154]

A. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Teknis Administrasi

a. Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan komisi informasi dapat mengajukan keberatan ke pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan badan publik negara.
b. Keberatan diajukan secara tertulis ke pengadilan tata usaha negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah salinan putusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
c. Pihak pemohon keberatan datang ke pengadilan tata usaha negara (menghadap petugas meja I pada PTSP) dengan menyerahkan:
    1) surat keberatan (gugatan) dalam bentuk tertulis (*hard copy*) paling kurang 5 (lima) rangkap yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan *soft copy* surat keberatan dalam format RTF (subjek pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di

[154] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Pengadilan);

2) surat keberatan dilampiri surat kuasa khusus, fotocopy kartu tanda advokat dan berita acara sumpah, apabila pengajuan keberatan dikuasakan kepada advokat;

3) apabila diwakili oleh kuasa insidentil, pengajuan keberatan dilengkapi dengan izin beracara dari ketua pengadilan tata usaha negara;

4) tanda bukti penerimaan putusan komisi informasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

d. Petugas meja 1 pada PTSP mengecek keaslian kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh pihak pemohon.

e. Pengajuan keberatan dapat juga diajukan secara elektronik melalui SIP, merujuk kepada peraturan mengenai petunjuk teknis mengenai administrasi perkara dan persidangan perkara tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.

f. Berkas permohonan keberatan dinyatakan diterima dengan memberikan tanda terima berkas dan diregister setelah pemohon keberatan membayar panjar biaya perkara melalui bank yang ditentukan.

g. Penomoran register sengketa informasi publik mengikuti nomor perkara gugatan dengan menggunakan kode “KI” (contoh: Nomor: 2/G/KI/2025/PTUN.JKT);

h. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan keberatan diregister di kepaniteraan pengadilan, panitera meminta komisi informasi yang memutus perkara tersebut untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang disengketakan beserta seluruh berkas perkaranya.

i. Panitera pengadilan mengirimkan permohonan keberatan kepada termohon keberatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan keberatan diregister.

j. Komisi informasi wajib mengirimkan salinan putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf f paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan diajukan.

k. Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan melalui panitera pengadilan dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak keberatan diregister.

l. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewatnya tenggang waktu pengajuan jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf k ketua pengadilan menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

2. Teknis Peradilan

a. Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik negara.

b. Pemeriksaan dilakukan secara sederhana terhadap putusan komisi informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak. Dalam hal termohon belum memberikan jawaban, majelis hakim dapat membuka persidangan untuk menerima jawaban dari termohon. Dalam hal termohon masih tidak memberikan jawaban pada persidangan pertama, maka majelis hakim dapat memutus tanpa adanya jawaban dari termohon.

c. Pemeriksaan dilakukan tanpa proses *dismissal* dan pemeriksaan persiapan.

d. Pemeriksaan tambahan terhadap alat bukti dapat dilakukan dalam hal:

1) terdapat bantahan dari salah satu atau para pihak; atau

2) terdapat alat bukti baru yang dipandang perlu oleh majelis hakim.

e. Apabila dipandang perlu, majelis hakim dapat memanggil komisi informasi untuk memberikan keterangan di dalam persidangan.

f. Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali terhadap pemeriksaan dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan.

g. Majelis hakim wajib menjaga rahasia dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

h. Pemohon informasi atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang

berisikan informasi yang dikecualikan.

i. Pengadilan wajib memutus sengketa informasi publik dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja majelis hakim ditetapkan.

j. Putusan pengadilan sengketa informasi publik berpedoman pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

k. Dalam hal pemeriksaan dilakukan secara elektronik, tata cara persidangan mengacu kepada peraturan tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

l. Terhadap putusan pengadilan hanya dapat diajukan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan apabila para pihak hadir, atau 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan putusan dikirimkan melalui pos apabila para pihak tidak hadir.

m. Mahkamah Agung wajib memutus dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak majelis hakim ditetapkan.

n. Pelaksanaan putusan pengadilan mengacu pada ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara.

o. Putusan komisi informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan oleh pemohon informasi, selanjutnya ketua pengadilan mengabulkan atau menolak pemberian penetapan eksekusi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

p. Format penetapan eksekusi adalah sebagaimana dengan contoh format yang terlampir dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

B. SENGKETA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM[155]

1. Teknis Administrasi

a. Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara yang berwenang yang berisi tuntutan agar penetapan lokasi dinyatakan batal atau tidak sah.

b. Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke PTSP (meja I) di pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, dengan menyerahkan:

1) Surat gugatan dibuat secara tertulis (*hard copy*) paling kurang 5 (lima) rangkap dan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang serupa dengan itu (*soft copy*). Gugatan harus memuat:

a) identitas penggugat harus disebutkan terlebih dahulu, kemudian identitas kuasanya (apabila diwakili kuasa), yaitu:

1) untuk orang meliputi: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat dan kuasanya (apabila diwakili kuasa);

2) untuk badan hukum perdata meliputi: nama badan hukum perdata, kedudukan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang, identitas orang dari organ badan hukum perdata yang berwenang mewakili badan hukum perdata tersebut di pengadilan, dan identitas kuasanya (apabila diwakili kuasa);

3) untuk instansi pemerintah meliputi: nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, dan pimpinan instansi pemerintah yang berwenang mewakili instansi tersebut, dan identitas kuasanya (apabila diwakili kuasa);

---

[155] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara

4) untuk masyarakat hukum adat meliputi: nama masyarakat hukum adat (adanya pengakuan masyarakat hukum adat dari pemerintah daerah dalam wujud Perda), tempat kedudukan, dan pimpinan masyarakat hukum adat, dan identitas kuasanya (apabila diwakili kuasa).

b) identitas tergugat meliputi nama jabatan dan tempat kedudukan;

c) objek sengketa adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubenur atau bupati/walikota yang mendapat delegasi dari gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

d) uraian dasar gugatan meliputi:

1) kewenangan pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

2) kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat;

3) gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya objek sengketa;

4) alasan-alasan gugatan yang berupa fakta-fakta sebagai dasar keberatan penggugat atas penerbitan objek sengketa, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang dilanggar tergugat dalam menerbitkan objek sengketa.

e) hal-hal yang dimohon untuk diputus meliputi:

1) mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2) menyatakan batal atau tidak sah objek

sengketa;

3) mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa;

4) menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

f) tanda tangan penggugat atau kuasanya (apabila diwaliki kuasa).

2) Lampiran surat gugatan meliputi:

a) surat kuasa khusus dari penggugat kepada kuasanya, fotokopi kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah advokat (apabila diwakili advokat);

b) surat kuasa khusus dari penggugat (orang) kepada kuasanya dan izin beracara dari ketua pengadilan tata usaha negara (apabila diwakili kuasa insidentil);

c) bukti yang berkaitan dengan identitas penggugat:

1) untuk orang: fotokopi KTP atau bukti identitas lain yang sah;

2) untuk badan hukum: fotokopi angaran dasar (akta pendirian), fotokopi keputusan pengangkatan orang yang menduduki organ yang berwenang mewakili badan hukum di pengadilan beserta fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya yang sah, dan fotokopi keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan hukum tersebut;

3) untuk instansi pemerintah: peraturan perundang-undangan tentang pembentukan instansi pemerintah tersebut (apabila diperlukan);

4) untuk masyarakat hukum adat: fotokopi bukti mengenai masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (fotokopi peraturan daerah yang

mengakui masyarakat hukum adat tersebut).

d) fotokopi objek sengketa;

e) fotokopi alat bukti untuk membuktikan penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

f) fotokopi surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf c), huruf d), dan huruf e), di atas harus sudah dibubuhi meterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan;

g) daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal penggugat bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.

c. Pendaftaran gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP merujuk kepada petunjuk teknis tentang administrasi perkara dan persidangan perkara tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.

d. Petugas meja I memeriksa kelengkapan berkas gugatan, dan meneruskan berkas gugatan yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera melalui panitera muda perkara dengan melampirkan daftar periksa (*checklist*).

e. Panitera meneliti berkas gugatan dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja setelah gugatan diajukan:

1) Apabila berkas gugatan belum lengkap, panitera pengadilan memberitahukan kepada penggugat tentang kelengkapan gugatan yang harus dipenuhi, dan penggugat wajib melengkapinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan berkas gugatan. pemberitahuan panitera pengadilan tersebut dilakukan melalui surat (apabila pendaftaran gugatan dilakukan secara konvensional), atau dilakukan secara elektronik dari domisili elektronik (*e-mail*) kantor pengadilan ke domisili elektronik (*e-mail*) penggugat yang telah didaftarkan (apabila pendaftaran gugatan dilakukan secara elektronik);

2) Apabila penggugat tidak dapat melengkapinya dalam

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja:

a) dalam hal gugatan diajukan secara kenvensional, panitera menyampaikan surat pemberitahuan kepada penggugat bahwa gugatan tersebut tidak diregistrasi dalam buku register perkara disertai dengan pengembalian berkas gugatan;

b) dalam hal gugatan diajukan secara elektronik, panitera memberitahukan melalui domisili elektronik (*e-mail*) kantor pengadilan ke domisili elektronik (*e-mail*) penggugat yang telah didaftarakan bahwa gugatan tersebut tidak diregistrasi dalam register gugatan;

c) Gugatan dapat diajukan kembali dengan gugatan baru disertai kelengkapan berkas gugatannya, dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihentikan sejak pengajuan gugatan ke pengadilan sampai dengan pengembalian berkas gugatan yang tidak lengkap diterima penggugat, atau sampai pemberitahuan tentang tidak diregistrasinya gugatan disampaikan melalui domisili elektronik (*e-mail*) penggugat (dalam hal gugatan diajukan secara elektronik), dan setelah itu penghitungan tenggang waktu kembali dilanjutkan.

3) Gugatan yang sudah lengkap dicatat dalam buku register induk perkara dan diberi nomor perkara.

f. Penomoran register gugatan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum mengikuti nomor perkara gugatan dengan menggunakan kode “PU” (contoh: Nomor: 3/G/PU/2025/PTUN.JKT).

g. Panitera memberikan bukti penerimaan gugatan kepada penggugat.

h. Dalam hal gugatan telah dicatat dalam buku register perkara tetapi berkas perkara belum disampaikan kepada ketua pengadilan, dan gugatan dicabut oleh penggugat, panitera menerbitkan akta pencabutan gugatan dan diberitahukan kepada penggugat disertai dengan pengembalian berkas gugatan (konvensional) atau diberitahukan secara elektronik

kepada penggugat.

2. Teknis Peradilan

a. Pengadilan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubenur atau bupati/walikota yang mendapat delegasi dari gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b. Tenggang waktu pengajuan gugatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya objek sengketa.

c. Materi gugatan adalah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b poin 1) tersebut di atas.

d. Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada ketua pengadilan.

e. Setelah panitera menyatakan berkas lengkap pada hari yang sama ketua pengadilan menetapkan susunan majelis hakim yang memeriksa gugatan tersebut.

f. Majelis hakim melakukan musyawarah untuk menentukan sidang pertama, pembebanan alat bukti, dan penjadwalan persidangan (*court calendar*) yang ditindaklanjuti dengan penetapan hakim ketua majelis mengenai sidang pertama dan jadwal persidangan.

g. Jadwal persidangan (*court calendar*) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya hak atau kesempatan bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali ada alasan yang sah.

h. Proses sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai huruf g di atas harus dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja;

i. Paling lama 1 (satu) hari setelah penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan (*court calendar*) panitera sudah memanggil/pemberitahuan penggugat dan tergugat.

1) Pada gugatan secara konvensional dapat disampaikan secara langsung oleh juru sita atau juru sita pengganti atau melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau surat tercatat, dan untuk tergugat dilampiri salinan

gugatan.

2) Pada gugatan secara elektronik:

a) untuk penggugat disampaikan melalui *e-summon*;

b) untuk tergugat dilakukan melalui *e-summon* (apabila domisisli elektronik tergugat sudah terdaftar), dalam hal domisili elektronik (*e-mail*) tergugat belum didaftarkan, pemberitahuan disampaikan secara langsung oleh juru sita atau juru sita pengganti atau melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau surat tercatat.

j. Panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf i harus sudah dikirim kepada penggugat dan tergugat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum persidangan.

k. Panggilan sidang pertama disertai dengan:

1) penetapan hakim ketua majelis tentang jadwal persidangan (*court calendar*);

2) perintah bagi penggugat untuk melengkapi bukti-bukti lain selain alat bukti pendahuluan yang disampaikan.

3) perintah bagi tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti surat/tulisan;

4) perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang diajukan dalam persidangan sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal penggugat dan/atau tergugat bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.

l. Pengadilan memutus diterima atau ditolaknya gugatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gugatan diregister.

m. Pemeriksaan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa melalui proses *dismissal*, pemeriksaan persiapan dan tidak dimungkinkan adanya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa serta masuknya pihak ketiga/intervensi.

n. Pemeriksaan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum terdiri atas:

1) Pemeriksaan gugatan penggugat.

a) Pada persidangan konvensional, dimulai dengan

memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan pokok gugatannya.

b) Pada persidangan elektronik, dimulai dengan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengunggah dokumen gugatan pada SIP dan diverifikasi oleh hakim ketua sidang.

2) Pemeriksaan jawaban tergugat.

a) Pada persidangan konvensional, jawaban tergugat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

b) Pada persidangan elektronik, tergugat mengunggah dokumen jawaban pada SIP dan diverifikasi oleh hakim ketua sidang.

3) Pemeriksaan bukti surat atau tulisan.

4) Mendengar keterangan saksi.

5) Mendengar keterangan ahli.

6) Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

o. Selama pemeriksaan berlangsung dimungkinkan pemeriksaan setempat apabila diperlukan.

p. Pembacaan putusan

1) Pada persidangan konvensional, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

2) Pada persidangan elektronik, putusan/penetapan diunggah pada SIP dan dibubuhi tanda tangan elektronik oleh panitera.

q. Apabila penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, majelis hakim menerbitkan penetapan pencabutan gugatan dengan memerintahkan kepada panitera untuk mencoret gugatan dari register perkara:

1) Pada persidangan konvensional, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan salinannya disampaikan kepada para pihak.

2) Pada persidangan elektronik, salinan penetapan diunggah pada SIP dan dibubuhi tanda tangan elektronik oleh panitera.

r. Alat bukti terdiri dari:

1) surat atau tulisan;

2) keterangan ahli;
3) keterangan saksi;
4) pengakuan para pihak;
5) pengetahuan hakim; atau
6) alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, atau angka yang memiliki makna.

s. Dalam hal pemeriksaan dilakukan secara elektronik, tata cara persidangan mengacu kepada peraturan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan petunjuk teknis tentang administrasi dan persidangan perkara tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.

t. Para pihak dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara)/paling lama 14 (empat belas) hari (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) sejak putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

u. Memori kasasi diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara)/paling lama 14 (empat belas) hari (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) sejak pernyataan kasasi, dan pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi oleh panitera dikirim paling lama 1 (satu) hari kerja setelah memori kasasi tersebut diterima

oleh kepaniteraan pengadilan.

v. Termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi, paling lambar 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi melalui pengadilan.

w. Pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung melalui pos surat tercatat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima memori/kontra memori kasasi, dimana pengiriman berkas (*hard copy*) didahului dengan pengiriman dokumen elektronik (*soft copy*).

C. SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH[156]

1. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

a. Teknis Administrasi

1) Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah diajukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota, yang diajukan secara langsung, melalui faksimile atau *e-mail* ke pengadilan tinggi tata usaha negara yang berwenang, dengan menyertakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat *e-mail* yang bersangkutan dan dapat juga diajukan secara elektronik dengan tata cara merujuk kepada petunjuk teknis tentang administrasi dan persidangan perkara tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.

2) Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah pasangan yang dirugikan kepentingannya karena tidak ditetapkan dalam keputusan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota sehingga sesama pasangan calon yang sudah ditetapkan dalam keputusan KPU/KIP tidak

---

[156] Peraturan Mahkamah Agung No. 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

dapat bertindak sebagai penggugat (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan).

3) Keputusan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota yang dapat menjadi objek sengketa adalah Keputusan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota tentang Penetapan Pasangan Calon (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 1 Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016).
4) Berita acara KPU provinsi atau berita acara KPU kabupaten/kota tidak dapat dijadikan objek sengketa.
5) Dalam hal terdapat putusan koreksi dari Bawaslu provinsi dan/atau Bawaslu RI, maka tenggang waktu dihitung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya hasil koreksi.
6) Tenggang waktu (prematur dan kadaluwarsa) pengujian objek sengketa penetapan pasangan calon terikat dengan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah ditetapkan oleh KPU, yakni diajukan dan diputus pada tahapan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah.
7) Pengadilan tinggi tata usaha negara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus keputusan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota sebagaimana angka 3 (tiga) sebagai pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan upaya hukum kasasi.
8) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh penggugat atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya memuat:
    a) identitas para pihak dalam sengketa pemilihan, terdiri dari penggugat, tergugat dan pihak terkait: identitas penggugat meliputi:

1) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat;
2) identitas kuasanya apabila diwakili kuasa;
3) apabila diwakili oleh kuasa insidentil maka izin beracara dari ketua pengadilan tata usaha negara harus dilampirkan oleh pemohon.

identitas tergugat meliputi:

1) nama jabatan;
2) tempat kedudukan;

pihak terkait adalah pihak yang berkedudukan sebagai pihak dalam penyelesaian upaya administrasi di Bawaslu dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa. Identitas pihak terkait meliputi:

1) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat;
2) identitas kuasanya apabila diwakili kuasa;
3) apabila diwakili oleh kuasa insidentil maka izin beracara dari ketua pengadilan tata usaha negara harus dilampirkan oleh pemohon.

b) penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
c) kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat;
d) tenggang waktu pengajuan gugatan;
e) alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
f) hal-hal yang dimohonkan untuk diputus, meliputi:
   1) mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
   2) menyatakan batal keputusan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota;
   3) memerintahkan tergugat untuk mencabut

objek sengketa tersebut;

4) memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
5) menghukum tergugat membayar biaya perkara.

g) gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya;
h) gugatan wajib mencantumkan alamat *e-mail* dan nomor telepon.

9) Pengajuan gugatan dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:
   a) putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota;
   b) keputusan objek sengketa.
10) Selain diajukan dalam bentuk tertulis, gugatan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa *flashdisk* atau serupa dengan itu.
11) Pendaftaran gugatan dicatat dalam buku register perkara pemilihan setelah diterimanya pembayaran panjar biaya perkara.
12) Penomoran register gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan mengikuti nomor perkara gugatan dengan menggunakan kode "PILKADA" (contoh: Nomor 2/G/PILKADA/2025/PT.TUN.JKT).
13) Penunjukan Majelis Hakim
    Hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan pada pengadilan adalah majelis khusus yang terdiri dari hakim tinggi khusus yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

b. Teknis Peradilan
   1) Pengadilan tinggi tata usaha negara bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan, setelah seluruh upaya administratif di

Bawaslu provinsi atau Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota telah digunakan.

2) Pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan tidak melalui proses *dismissal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3) Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak gugatan diterima di pengadilan tinggi tata usaha negara.

4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3), penggugat belum menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak diterima.

5) Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali.

6) Pemanggilan dan Penjadwalan Sidang

   a) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan melalui *e-mail*, faksimile, surat tercatat atau oleh juru sita/juru sita pengganti.

   b) Pemanggilan dinyatakan sah, apabila dilakukan melalui *e-mail*, faksimile, surat tercatat, dan/atau oleh juru sita/juru sita pengganti pengadilan.

   c) Tenggang waktu pemanggilan para pihak yang bersengketa dan saksi atau ahli dilakukan secara sah dan patut sesuai dengan jadwal persidangan.

   d) Pemanggilan tergugat disertai salinan surat gugatan.

   e) Hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang ditunjuk mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan menyampaikan jadwal persidangan pada hari sidang pertama dan memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhinya.

   f) Jadwal persidangan bersifat mengikat para pihak.

7) Persidangan
   a) Persidangan dilakukan terbuka untuk umum.
   b) Tahapan persidangan:
      1) pembacaan gugatan;
      2) jawaban;
      3) pembuktian;
      4) kesimpulan;
      5) putusan.
   c) Proses persidangan dilakukan secara elektronik dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik beserta lampiran.
8) Putusan
   a) Majelis hakim memutus sengketa pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
   b) Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a) diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
   c) Salinan putusan diberikan kepada para pihak yang hadir pada hari pengucapan putusan.
   d) Panitera memberitahukan putusan pada hari pengucapan putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir dipersidangan.
9) Dalam hal pemeriksaan dilakukan secara elektronik, tata cara persidangan mengacu kepada peraturan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan

secara elektronik dan petunjuk teknis tentang administrasi dan persidangan perkara tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.

10) Pemeriksaan kasasi sengketa tata usaha negara pemilihan pada Mahkamah Agung.
    a) Para pihak yang keberatan atas putusan pengadilan dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan.
    b) Penyerahan memori kasasi paling lambat sebelum berakhirnya tenggang waktu permohonan kasasi.
    c) Panitera pengadilan menyampaikan pemberitahuan kasasi disertai memori kasasi kepada termohon kasasi pada hari diterimanya memori kasasi tersebut.
    d) Termohon kasasi diberikan kesempatan mengajukan jawaban memori kasasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengiriman memori kasasi.
    e) Pengiriman berkas kasasi dari pengadilan kepada Mahkamah Agung dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
    f) Berkas perkara kasasi (*hard copy*) diantar langsung oleh petugas Pengadilan ke Mahkamah Agung melalui Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang sebelumnya didahului dengan pengiriman *soft copy* melalui e-mail.
    g) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada huruf f) di atas ditanggung oleh pemohon kasasi yang diperhitungkan sebagai biaya perkara kasasi, sesuai dengan biaya perjalanan bagi pegawai negeri sipil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
    h) Bukti biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada huruf f) di atas harus dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Catatan : Untuk huruf f), huruf g) dan huruf h), *hard copy* tidak lagi diantarkan secara langsung ke Mahkamah Agung mengingat bahwa sekarang sudah kasasi elektronik.

i) Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menerima berkas permohonan kasasi elektronik untuk dilakukan penelaahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

j) Setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas diserahkan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk diregister paling lambat 1 (satu) hari kerja, selanjutnya pada hari itu juga Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menyerahkannya kepada Ketua Mahkamah Agung.

k) Ketua Mahkamah Agung meneruskan berkas tersebut kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada hari itu juga untuk menunjuk dan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut pada hari itu juga.

l) Majelis hakim yang ditunjuk, memutus paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima oleh Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

m) Berkas perkara diminutasi dan dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada pengadilan pengaju pada hari pengucapan putusan.

n) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada huruf l) di atas tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

2. Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

a. Sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah sengketa antara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan calon wakil walikota melawan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP kabupaten/kota tentang pembatalan (diskualifikasi) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati atau calon

walikota dan calon wakil walikota (vide Pasal 73 ayat (2) *juncto* Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020).

b. Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

c. Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota.

D. SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM[157]

1. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung

a. Pelanggaran administratif pemilihan umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, tidak termasuk tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran kode etik.

b. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum adalah penyelesaian perselisihan antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan melawan KPU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang pembatalan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

c. Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

d. Permohonan adalah upaya hukum oleh calon anggota DPR,

---

[157] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan oleh KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung.

e. Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan KPU.

2. Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

a. Teknis Administrasi

1) Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan tata usaha negara di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota.

2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan Umum (Pemilu) ke pengadilan tata usaha negara dilakukan setelah ditempuh seluruh upaya administratif di Bawaslu. Koreksi oleh Bawaslu pusat atas putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)/Bawaslu provinsi adalah satu kesatuan utuh pada tahapan upaya administratif. Sehingga gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhitung 5 (lima) hari setelah putusan Bawaslu/Bawaslu provinsi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, terkait upaya administratif tidak dapat ditafsirkan lain selain putusan Bawaslu.

3) Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa proses Pemilu:

a) Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

b) Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

c) Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

4) Keputusan/berita acara KPU tentang:
   a) hasil verifikasi administrasi pendaftaran partai politik;
   b) hasil verifikasi faktual pendaftaran partai politik;
   c) hasil verifikasi dukungan administratif dan factual calon DPD;
   d) Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon DPR, DPRD;
   e) Hasil verifikasi bakal calon presiden dan wakil presiden.

   Tidak dapat menjadi objek sengketa dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPP).

5) Keputusan tata usaha negara yang telah ditentukan secara spesifik sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diuji dalam proses sengketa Pemilu (verifikasi partai politik, verifikasi daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD dan pasangan calon presiden) dan didaftar/digugat pada masa jadwal sengketa pemilu maka secara absolut merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara dan diperiksa dan diputus berdasarkan pada masa pengujian sengketa sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan KPU (vide misalnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang jadwal Pemilu). Gugatan yang diajukan sebelum masa pengujian atau setelah masa pengujian maka dinyatakan prematur atau kadaluwarsa.

6) Keputusan tata usaha negara selain KTUN (verifikasi partai politik, verifikasi daftar calon tetap dan pasangan calon presiden) namun menjadi objek sengketa administrasi di Bawaslu maka pengujian terhadap KTUN tersebut dinyatakan final di Bawaslu dan tidak dapat diajukan gugatan di pengadilan tata usaha

negara.

7) Keputusan tata usaha negara selain KTUN (verifikasi partai politik, verifikasi daftar calon tetap dan pasangan calon presiden) dan juga bukan objek sengketa administrasi di Panwaslu/Bawaslu namun KTUN biasa yang diterbitkan oleh KPU kabupaten/provinsi/KPU maka menjadi kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara untuk menerima dan mengujinya dengan acara biasa.

8) Tenggang waktu (prematur dan kadaluwarsa) pengujian keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a), huruf b), dan huruf c) terikat dengan jadwal tahapan Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU, yakni diajukan pada tahapan penyelesaian sengketa pemilihan proses hasil Pemilu.

9) Pendaftaran gugatan dalam sengketa proses Pemilu hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan. Apabila gugatan diajukan tidak pada hari dan jam kerja tersebut, maka pendaftaran gugatan tidak dapat dilayani, kecuali terdapat alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

10) Penggugat adalah: (1) bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT), atau (2) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT), atau (3) partai politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi, atau (4) bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang tidak lolos verifikasi.

11) Tergugat adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

12) Gugatan diajukan secara langsung atau melalui faksimile atau surat elektronik ke pengadilan tata usaha negara yang berwenang, dengan menyertakan keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat surat elektronik dan nomor

telepon penggugat atau kuasanya.

13) Gugatan diajukan selain dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpan data elektronik.

14) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh penggugat atau kuasanya yang memuat:
    a) identitas penggugat meliputi:
        1) nama;
        2) kewarganegaraan;
        3) tempat tinggal;
        4) pekerjaan penggugat;
        5) identitas kuasanya apabila diwakili kuasa;
        6) alamat surat elektronik dan nomor telepon.
    b) identitas tergugat meliputi:
        1) nama jabatan;
        2) tempat kedudukan
    c) penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
    d) kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat;
    e) tenggang waktu pengajuan gugatan;
    f) alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
    g) hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus:
        1) mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
        2) menyatakan batal keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota;
        3) memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
        4) memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai partai politik peserta Pemilu/pasangan calon presiden dan wakil presiden/calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

5) perintah membayar biaya perkara.

h) gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya;

i) gugatan dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:

1) keputusan objek sengketa;

2) putusan Bawaslu.

15) Pendaftaran gugatan diajukan secara elektronik dan dicatat dalam buku register perkara proses pemilihan umum, setelah panjar biaya perkara diterima.

16) Penomoran register gugatan sengketa proses pemilihan umum menggunakan kode “SPPU” (contoh: Nomor: 3/G/SPPU/2025/PTUN.JKT).

17) Penunjukan majelis hakim yang memeriksa sengketa proses pemilihan umum pada pengadilan adalah majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus tata usaha negara pemilihan umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

18) Hakim yang ditunjuk mengadili sengketa tata usaha negara proses pemilihan umum dapat dibebaskan dari tugas lainnya.

19) Penunjukan majelis hakim yang memeriksa sengketa proses pemilihan umum ditetapkan oleh ketua pengadilan pada hari pendaftaran gugatan paling lambat pada hari berikutnya berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk.

b. Teknis Peradilan

1) Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak gugatan di register pengadilan.

2) Yang berwenang memberikan saran perbaikan dan kelengkapan gugatan adalah majelis hakim. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 471 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023:

a) Terhadap gugatan yang diajukan, baik secara langsung maupun secara elektronik, majelis hakim membuat penetapan sebagai dasar untuk

pemberitahuan yang isinya antara lain: apa saja yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, batas dilakukannya perbaikan dan konsekuensi dari tidak dipenuhinya perbaikan dan penyerahan kelengkapan tersebut;

b) Pemberitahuan perbaikan dilakukan melalui surat elektronik, faksimilie atau pemberitahuan langsung melalui juru sita;

c) Penyerahan perbaikan dan kelengkapan gugatan dilakukan dalam forum pemeriksaan perbaikan gugatan paling lambat pada hari ketiga sejak pendaftaran gugatan dengan dibuatkan berita acara perbaikan gugatan;

d) Kriteria untuk menentukan sempurna tidaknya gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan kriteria untuk menentukan kelengkapan gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1), penggugat belum menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

4) Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 3) mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

5) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan melalui surat elektronik, faksimile, surat tercatat dan/atau oleh juru sita/juru sita pengganti.

6) Tenggang waktu pemanggilan para pihak paling singkat

3 (tiga) hari kerja sebelum sidang pertama.

7) Pemanggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

8) Majelis hakim menyampaikan penetapan tentang jadwal persidangan (*court calendar*) pada hari sidang pertama dan memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhinya:
   a) Melakukan pemanggilan kepada tergugat dalam tahapan perbaikan. Pemanggilan pertama terhadap tergugat yang dilakukan dalam proses perbaikan (dan apabila tergugat hadir), maka dapat mempersingkat proses pemanggilan kepada tergugat dengan tidak adanya durasi 3 (tiga) hari;
   b) Apabila tergugat (KPU) hadir pada perbaikan gugatan, maka memungkinkan majelis hakim menyampaikan penetapan jadwal sidang atau *court calendar* kepada para pihak pada saat perbaikan gugatan, tidak harus menunggu pada persidangan pertama.

9) Dalam hal pihak tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, maka penetapan *court calendar* hendaknya dilampirkan pula dalam surat panggilan.

10) Jadwal persidangan (*court calendar*) bersifat mengikat bagi para pihak.

11) Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan tahapan sebagai berikut:
   a) pembacaan gugatan;
   b) jawaban;
   c) pembuktian;
   d) putusan.

12) Proses persidangan dilakukan secara elektronik dengan mengacu kepada peraturan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.

13) Jenis alat bukti adalah:
   a) surat atau tulisan;

b) keterangan saksi;
c) keterangan ahli;
d) pengakuan para pihak;
e) pengetahuan hakim;
f) alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

14) Majelis hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.
15) Majelis hakim melakukan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
16) Majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
17) Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 16) diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, putusan bersifat final dan mengikat;
18) Amar Putusan
    a) "Menyatakan gugatan penggugat tdak dapat diterima" dalam hal gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal, penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau pengadilan tidak berwenang.
    b) Dalam hal gugatan tidak beralasan hukum maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak.
    c) Dalam hal gugatan berdasarkan hukum maka amar putusan menyatakan:
        (1) mengabulkan gugatan penggugat;
        (2) menyatakan batal keputusan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota tentang penetapan penggugat sebagai partai politik peserta Pemilu/sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden/sebagai calon tetap anggota

DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

(3) memerintahkan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota untuk mencabut keputusan objek sengketa tentang penetapan penggugat sebagai partai politik peserta Pemilu/sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden/sebagai calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

(4) memerintahkan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota untuk mencabut keputusan objek sengketa tentang penetapan untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai partai politik peserta pemilu/sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden/sebagai calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

19) Salinan putusan diberikan kepada para pihak yang hadir pada hari pengucapan putusan, dan kepada pihak yang tidak hadir dilakukan pemberitahuan putusan pada hari itu juga oleh panitera.

20) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 17) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diucapkan.

E. PERMOHONAN PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG[158]

1. Teknis Administrasi

a. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai ada atau tidak

[158] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian unsur Penyalahgunaan wewenang

ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.

b. Materi permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya memuat:

1) Identitas Pemohon

Dalam hal pemohon badan pemerintahan meliputi:

a) nama badan pemerintahan;
b) tempat kedudukan;
c) nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada).

Dalam hal pemohon badan pemerintahan meliputi:

a) nama diri pejabat pemerintahan;
b) tempat, tanggal lahir/umur;
c) pekerjaan;
d) jabatan;
e) tempat tinggal;
f) nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada).

2) Uraian secara singkat dan jelas mengenai objek permohonan berupa keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang dimohonkan penilaian. objek permohonan berupa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

3) Uraian yang menjadi dasar permohonan, meliputi:

a) kewenangan pengadilan;
b) kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon;
c) alasan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan/atau Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan secara jelas dan rinci.

4) Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan:

a) dalam hal pemohon badan pemerintahan yaitu:

(1) mengabulkan permohonan pemohon

seluruhnya;

(2) menyatakan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang;

(3) menyatakan batal atau tidak sah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan.

b) dalam hal pemohon pejabat pemerintahan, yaitu:

(1) mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

(2) menyatakan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang;

(3) memerintahkan kepada negara untuk mengembalikan kepada pemohon uang yang telah dibayar, dalam hal pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

5) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.

6) Permohonan selain diajukan dalam bentuk tertulis juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang serupa dengan itu.

7) Dalam hal pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.

8) Apabila pemohon diwakili oleh kuasa insidentil maka izin beracara dari ketua pengadilan tata usaha negara harus dilampirkan pemohon.

9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 7), wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota advokat dan berita acara sumpah dari kuasa yang bersangkutan.

c. Tata cara pengajuan permohonan

1) Permohonan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan pejabat

pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan melalui kepaniteraan.

2) Dalam hal pemohon berkedudukan atau berada di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan tata usaha negara di Jakarta.

3) Panitera wajib melakukan penelitian administrasi permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti pendahuluan yang mendukung permohonan paling kurang berupa:

   a) bukti yang berkaitan dengan identitas pemohon yaitu:

      (1) fotokopi keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan pembentukan badan pemerintahan yang bersangkutan, dalam hal pemohon badan pemerintahan; dan/atau

      (2) fotokopi KTP atau identitas diri lain, keputusan pengangkatan jabatan pemohon pada saat keputusan dan/atau tindakan pemohon yang dimohonkan penilaian itu diterbitkan dan/atau dilakukan, dalam hal pemohon pejabat pemerintahan.

   b) fotokopi keputusan yang dimohonkan penilaian dan hasil pengawasan APIP serta fotokopi bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan, fotokopi bukti tersebut wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

   c) daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli;

   d) bukti-bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila diperlukan.

4) Dalam hal berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan tanda terima berkas setelah membayar panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk untuk itu.

5) Dalam hal berkas permohonan dinilai belum lengkap,

panitera pengadilan memberitahukan kepada pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan berkas kurang lengkap.

6) Dalam hal kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas tidak dipenuhi, panitera memberitahukan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam buku register perkara disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

7) Permohonan dapat diajukan kembali dengan permohonan baru disertai dengan kelengkapan Permohonan.

d. Permohonan dapat diajukan secara elektronik yang tata caranya mengacu kepada peraturan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan petunjuk teknis tentang administrasi dan persidangan perkara tata usaha negara di pengadilan secara elektronik;

e. Registrasi perkara permohonan

1) Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku register perkara dan diberi nomor perkara.

2) Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1).

3) Dalam hal permohonan telah dicatat dalam buku register perkara dan dicabut oleh pemohon, panitera menerbitkan akta pencabutan permohonan dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

f. Penjadwalan sidang

1) Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan tersebut diregistrasi.

2) Ketua pengadilan menetapkan susunan majelis yang memeriksa permohonan tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh ketua pengadilan.

3) Ketua majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal

persidangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh majelis.

4) Penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) diberitahukan kepada pemohon.

5) Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada angka 4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi pemohon untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah.

g. Panggilan sidang

1) Panggilan sidang pertama disertai dengan:

a) penetapan ketua majelis yang memuat jadwal persidangan;

b) perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain dan wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan selain bukti sebagaimana yang dimaksud pada huruf c angka 3);

c) perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.

2) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh panitera atau panitera pengganti yang menangani permohonan dan disampaikan secara langsung oleh juru sita atau juru sita pengganti atau melalui telepon, faksimili dan/atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian atau pengiriman.

3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus sudah dikirim kepada pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan.

4) Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila surat panggilan telah dikirimkan kepada pihak tersebut.

h. Penomoran register permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang menggunakan kode “P/PW” (contoh: Nomor: 4/P/PW/2021/PTUN.JKT).

2. Teknis Peradilan

a. Pengadilan tata usaha negara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan setelah adanya hasil pengawasan APIP dan sebelum adanya proses pidana atau dimulainya penyidikan terhadap kasus pidana tersebut.

b. Pengajuan permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang ke pengadilan tata usaha negara setelah adanya hasil pengawasan APIP.

c. Pemeriksaan persidangan

1) Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh majelis tanpa melalui proses *dismissal* maupun pemeriksaan persiapan.

2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

3) Pemeriksaan persidangan meliputi:

a) pemeriksaan pokok permohonan, yang dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya;

b) pemeriksaan bukti surat atau tulisan;

c) mendengarkan keterangan saksi;

d) mendengarkan keterangan ahli;

e) pemeriksaan alat-alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

4) Pemeriksaan pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.

5) Dalam hal pemohon mengajukan pencabutan permohonan, majelis hakim menerbitkan penetapan pencabutan permohonan, yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada panitera untuk mencoret permohonan dari buku register permohonan, yang salinannya disampaikan kepada pemohon.

d. Pembuktian

1) Alat bukti dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang meliputi:
   a) surat atau tulisan;
   b) keterangan saksi;
   c) keterangan ahli;
   d) pengakuan pemohon;
   e) pengetahuan hakim;
   f) alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.
2) Saksi dan/atau ahli dapat diajukan oleh pemohon atau dipanggil atas perintah pengadilan.
3) Alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

e. Putusan

1) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang meliputi:
   a) maksud dan tujuan permohonan;
   b) kewenangan pengadilan;
   c) kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon;
   d) pendapat majelis terhadap pokok permohonan mengenai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan/atau Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
   e) Kesimpulan mengenai semua hal yang telah

dipertimbangkan.

2) Amar putusan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang berbunyi:

a) “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, pengadilan tidak berwenang, dan/atau pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

b) Dalam hal pemohon badan pemerintahan:

(1) “Mengabulkan Permohonan Pemohon”;

(2) “Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang”;

(3) “Menyatakan batal atau atau tidak sah Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan”.

Dalam hal pemohon pejabat pemerintahan:

(1) “Mengabulkan Permohonan Pemohon”;

(2) “Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang”;

(3) “Memerintahkan kepada Negara untuk mengembalikan kepada Pemohon uang yang telah dibayar”, dalam hal pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

c) “Menolak Permohonan Pemohon”, dalam hal keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang apabila pemohonnya badan pemerintahan, atau dalam hal keputusan dan/atau tindakan pemohon ada unsur penyalahgunaan wewenang apabila pemohonnya pejabat pemerintahan; atau “Menyatakan Permohonan gugur”, dalam hal pemohon tidak

hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau pemohon tidak serius.

f. Biaya perkara penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dibebankan kepada pemohon.

g. Pengadilan wajib memutus permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama dilakukan.

h. Pemeriksaan permohonan dapat dilakukan secara elektronik yang tata caranya mengacu kepada peraturan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan petunjuk teknis tentang administrasi dan persidangan perkara tata usaha negara di pengadilan secara elektronik;

i. Upaya hukum

1) Pemohon dapat mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan pengadilan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

2) Permohonan banding diajukan melalui kepaniteraan pengadilan yang memutus permohonan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung keesokan hari setelah putusan diucapkan, bagi pihak yang hadir.

3) Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak hadir pada saat pengucapan putusan, tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud angka 2) di atas dihitung setelah pemberitahuan amar putusan dikirimkan.

4) Apabila hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

5) Dalam hal permohonan banding diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2), permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan dan berkas perkara tidak dikirimkan ke pengadilan tinggi tata usaha negara.

6) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dapat diajukan upaya hukum.

7) Pengadilan tinggi tata usaha negara wajib memutus permohonan banding paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak penetapan susunan majelis.

8) Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 7) bersifat final dan mengikat.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO